

MEMBUKTIKAN HARAPAN

EFEKTIVITAS PERJUANGAN
HAK ASASI MANUSIA
PADA ABAD KE-21



KATHRYN SIKKINK

Diterjemahkan oleh
Irsyad Rafsadie & Raditya Darningtyas

MEMBUKTIKAN HARAPAN

Membuktikan Harapan

*Efektivitas Perjuangan Hak Asasi Manusia
pada Abad Ke-21*

Kathryn Sikkink

Penerjemah:

Irsyad Rafsadie

Raditya Darningtyas

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)
Yayasan Paramadina

© 2022, PUSAD Paramadina

Diterbitkan oleh

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina

Bona Indah Plaza, Blok A2 No. B11

Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus

Cilandak, Jakarta Selatan, 12440

T: +62-815-11-666-075

Didukung oleh

Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS)

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

dan

The Asia Foundation (TAF)

Cetakan I, Oktober 2022

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sikkink, Kathryn

Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan Hak Asasi Manusia

pada Abad Ke-21/Karya Kathryn Sikkink; penerjemah: Irsyad Rafsadie dan

Raditya Darningtyas—Jakarta: PUSAD Paramadina, 2022

Penerjemah: Irsyad Rafsadie & Raditya Darningtyas

Penyunting: Ihsan Ali-Fauzi

Pemeriksa aksara: Saiful Rahman Barito

Foto Sampul: Ruth Hartnup, *Resilience and Determination*.

ISBN: 978-623-88282-0-3

Judul Asli: *Evidence for Hope: Making Human Rights Work in the 21st Century*
(Princeton University Press, 2017)

*Mengenang Albert O. Hirschman serta para mentor/sahabat
sepanjang hayat yang telah memberikan berbagai teladan untuk
menjadi sarjana yang tekun dan berkomitmen:
Raymond Duvall, Elizabeth Jelin, Robert Keohane, John Ruggie,
dan David Weissbrodt*

Daftar Isi

<i>Pengantar Penerbit</i>	iii
BAGIAN I	
PENDAHULUAN DAN IKHTISAR	1
1 Pendahuluan: Kemarahan, Harapan, dan Keyakinan bahwa Kita Dapat Menciptakan Perubahan	3
2 Respons terhadap Kritik: Cara Mengevaluasi Legitimasi dan Efektivitas HAM	25
BAGIAN II	
LEGITIMASI HAM: PERJUANGAN YANG BERAGAM	59
3 Asal Mula Politik HAM yang Beragam	61
4 Perjuangan HAM Era Perang Dingin	99
BAGIAN III	
EFEKTIVITAS HUKUM, INSTITUSI, DAN GERAKAN HAM	143
5 Mengapa Sulit Sekali Mengukur Efektivitas Hak Asasi Manusia?	145
6 Apa yang Berhasil dan Tidak Berhasil dalam Memajukan HAM?	187

BAGIAN IV	
MEMPERJUANGKAN KEBERHASILAN HAM PADA ABAD KE-21	229
7 Kesimpulan: Bukti Adanya Harapan Tanpa Rasa Puas Diri yang Berlebihan	231
 <i>Ucapan Terima Kasih</i>	 255
<i>Catatan</i>	263
<i>Bacaan Lanjutan</i>	325
<i>Indeks</i>	331

Pengantar Penerbit

MESKIPUN PENGHORMATAN ATAS hak-hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sudah dijamin dalam Konstitusi dan UUD 1945, pencapaian atau realisasinya masih menghadapi banyak tantangan. Perkembangan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain, misalnya dengan diberangusnya gerakan-gerakan HAM seperti Musim Semi Arab (Arab Spring) di beberapa negara di Timur Tengah dan merosotnya mutu demokrasi di banyak negara termasuk Amerika Serikat. Karena berbagai perkembangan ini, sejumlah kalangan dan kritikus berpendapat bahwa perjuangan menegakkan cita-cita HAM adalah upaya yang sia-sia dan bahkan hanya bagian dari sisa-sisa imperialisme Barat yang dipaksakan ke negara-negara pascakolonial.

Tetapi Kathryn Sikkink, Gurubesar Kebijakan HAM pada Harvard Kennedy School yang sangat dihormati dunia, membantah klaim-klaim pesimistik mengenai masa depan perjuangan HAM di atas. Bantahan ini disampaikan dalam *Evidence for Hope: Making Human Rights Work in the 21st Century* (2017), yang ditulis berdasarkan dua dekade lebih riset literatur dan lapangan khususnya di negara-negara pascakolonial. Dalam buku ini, Sikkink menunjukkan bahwa meskipun perubahan ke arah peningkatan penghormatan atas nilai-nilai HAM berlangsung perlahan dan merupakan buah dari perjuangan, gerakan-gerakan HAM pada akhirnya akan berlangsung efektif dalam jangka panjang.

Menurut Sikkink, aneka serangan dan kritik terhadap gerakan HAM biasanya mempersoalkan legitimasinya dan efektivitasnya. Dalam bantahannya, Sikkink menyatakan bahwa yang pertama didasarkan atas premis yang salah bahwa gagasan-gagasan mengenai HAM muncul pertama kali di Amerika Utara dan Eropa, yang kemudian dipaksakan ke negara-negara berkembang di wilayah Selatan. Dalam buku ini Sikkink menunjukkan bahwa sejak awal dekade 1940-an, para pemimpin dan aktivis Amerika Latin pada kenyataannya sudah merupakan pegiat HAM yang paling awal, yang aktif menyuarakan perlunya perlindungan internasional atas nilai-nilai HAM.

Sementara itu, dari segi efektivitas nilai-nilai HAM, Sikkink menunjukkan bahwa para sarjana dan aktivis berbeda pendapat karena mereka menggunakan alat ukur yang berbeda dalam menilai kemajuan HAM. Namun, ketika membandingkan masa kini dengan masa lalu dilihat dari beberapa sektor HAM, Sikkink dengan meyakinkan berhasil menunjukkan bahwa genosida dan kekerasan terhadap warga sipil jumlahnya menurun dari waktu ke waktu, sementara akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan meningkat tajam selama beberapa dekade terakhir.

Ringkasnya, kata Sikkink, sementara bias kognitif dan kebiasaan media massa melaporkan hal-hal buruk memang meningkatkan sinisme mengenai masa depan HAM, riset ilmu-ilmu sosial yang lebih solid mengenai berbagai kecenderungan di masa lalu dan masa kini memperlihatkan bahwa nilai-nilai HAM kini tidak sedang merosot dan berada di periode kesenjangan. Sebaliknya, masa kita kini adalah periode ketika aktivisme HAM berjalan kencang dengan capaian-capaian yang mengagumkan demi perbaikan nasib umat manusia.

Karena pentingnya temuan-temuan Sikkink di atas, kami bekerja sama menyiapkan edisi Bahasa Indonesia buku ini, yang kami beri judul *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan Hak Asasi Manusia pada Abad ke-21*. Secara umum, buku ini diharapkan dapat memberi wawasan yang lebih utuh dan segar mengenai prospek jangka panjang perjuangan menegakkan nilai-nilai HAM. Dengan demikian, gerakan HAM selalu memperoleh nafas dan energi yang kokoh dan berkelanjutan. Lebih khusus, buku ini diharapkan dapat memberi landasan yang lebih kokoh mengenai bagaimana seharusnya perjuangan menegakkan nilai-nilai HAM dinilai.

Naskah edisi Bahasa Indonesia buku ini disiapkan oleh tim Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina. Penerbitan

ini juga didukung oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-Cultural Studies atau CRCS), Universitas Gadjah Mada, sebagai bagian dari program yang lebih besar terkait pengembangan pengetahuan mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang telah berjalan sejak tahun 2017. Sementara itu, The Asia Foundation di Indonesia membantu sebagian pendanaan kegiatan penerbitan ini.

Karena tujuan di atas, edisi Bahasa Indonesia buku ini tidak diperjualbelikan, melainkan dibagikan secara gratis melalui situs web PUSAD Paramadina dan CRCS UGM, sesuai dengan izin penulis dan penerbit edisi aslinya yang sudah kami peroleh. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyelesaikan rencana penerbitan buku ini.

Jakarta, September 2022

PUSAD Paramadina dan CRCS-UGM

BAGIAN I

Pendahuluan dan Ikhtisar

BAB 1

Pendahuluan

Kemarahan, Harapan, dan Keyakinan bahwa Kita Dapat Menciptakan Perubahan

APAKAH HAK ASASI MANUSIA BERHASIL? Apakah hukum, institusi, dan aktivisme hak asasi manusia (HAM) menghasilkan perubahan positif di dunia? Bila ya, bagaimana dan dalam kondisi apa hal itu dapat terjadi? Bagaimana kita dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan di masa lalu untuk memastikan hak asasi manusia dapat berfungsi lebih baik di masa depan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas telah menimbulkan perdebatan sengit di antara para ahli dan praktisi hak asasi manusia. Pasalnya, pesimisme terhadap legitimasi dan efektivitas hukum, institusi, dan gerakan hak asasi manusia belakangan makin meningkat. Pesimisme ini tidak hanya muncul di kalangan pemerintah dan akademisi, tetapi juga di dalam gerakan hak asasi manusia sendiri.¹

Di antara mereka yang pesimis adalah para aktivis di garis depan perjuangan melindungi hak asasi manusia. Hal itu dapat dimaklumi mengingat beratnya tantangan yang mereka hadapi. Heba Morayef, aktivis HAM Mesir yang saya temui dalam suatu konferensi mengatakan bahwa dia “sudah putus harapan.” Dalam lima tahun terakhir, momentum Arab Spring yang diharapkan dapat membuka peluang perlindungan HAM sudah berubah drastis. Saat ini dia bahkan sering takut memberi tahu orang lain soal aktivisme HAM yang dia kerjakan. Heba Morayef telah bertahun-tahun bekerja memperjuangkan HAM di Mesir bersama Human Rights Watch dan belakangan menjadi salah satu direktur Egyptian Initiative for Personal Rights di Kairo yang bergerak dalam

bidang advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi berbasis gender.²

Sebagai seorang perempuan muda, Morayef tahu bahwa dia ingin bekerja pada bidang reformasi politik. Dia menyukai kelas hukum HAM yang dia ambil saat masih duduk di bangku universitas karena kelas itu “mengombinasikan agenda aktivisme dengan sesuatu yang lebih konkret.” Selepas lulus dari universitas, Morayef menemukan “sekelompok kecil organisasi HAM yang berjuang dengan berani di Kairo hingga akhirnya memutuskan untuk bergabung.” Morayef memulai kariernya sebagai pembela HAM di masa pemerintahan otoriter Hosni Mubarak. Sebagian besar pekerjaannya saat itu adalah membantu mengeluarkan tahanan dari penjara dan menghentikan penyiksaan. Dia menuturkan, “Saat itu saya tidak merasa takut bekerja sebagai pembela HAM di masa pemerintahan Mubarak, tetapi ada perasaan bahwa kerja-kerja ini tidak begitu efektif jika dilihat secara garis besar. Saat itu kami tidak mengharapkan adanya perubahan besar sehingga yang dapat kami lakukan adalah bekerja di pojok-pojok kecil, tetapi pojok kecil itu tentu terletak di pusat negara polisi (*police state*) sehingga kerja-kerja tersebut sebenarnya subversif.”

Pandangan Morayef soal efektivitas kerja-kerja hak asasi manusia mulai berubah setelah peristiwa Arab Spring (Kebangkitan Dunia Arab) di Mesir tahun 2011:

Saat itu saya hanya frustrasi karena tidak mampu memperbanyak (*clone*) diri, mengingat banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Kami saat itu diundang ke berbagai pertemuan dengan pemerintah oleh anggota parlemen yang bilang, “Buatlah hukum untuk mereformasi polisi atau beri tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kriminalisasi jurnalis.” Tidak cukup waktu untuk melakukan semua itu karena saat itu kami hanya komunitas kecil. Saat itu kami sangat populer. Konyol memang, tapi maksudnya—kaum muda berdatangan menawarkan diri menjadi sukarelawan, pengusaha kaya banyak yang ingin mendukung kerja-kerja kami, dan ada banyak inisiatif masyarakat yang bermunculan di akar rumput di berbagai kota yang memuat diskursus soal hak.³

Lalu terjadilah pemilu yang membawa partai Ikhwanul Muslimin yang sangat konservatif di bawah kepemimpinan Mohammed Morsi ke tampuk kekuasaan. Tetapi Morayef menyampaikan bahwa saat itu dia masih belum merasa pesimis akan gambaran besar kerja-kerja HAM karena

“Saat itu kami merasa bahwa kami dapat melawan mereka dan kami memiliki kekuatan untuk itu.”

Optimisme tersebut berubah sesudah 2013 ketika kudeta militer melawan Presiden Morsi mengakhiri Arab Spring di Mesir. Presiden militer-sipil rezim yang baru kemudian tidak hanya membatasi gerak partai Ikhwanul Muslimin Morsi, tetapi juga media, organisasi nonpemerintah dan siapa pun yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Pada 14 Agustus 2013, satu bulan setelah Morsi digulingkan, polisi menyerang kamp-kamp pendukung Morsi yang memprotes kudeta di dua lapangan di Kairo. “Hari itu,” tutur Morayef, “adalah hari ketika harapan benar-benar hilang. Karena, jika Anda dapat membunuh seribu orang dalam sehari, tentu Anda dapat melakukan hal-hal buruk lainnya. Hingga saat itu, segala sesuatunya memang tidak terlihat baik, tetapi saya tidak merasa benar-benar putus asa akan masa depan Mesir hingga pembantaian itu terjadi.” Pembantaian itu menciptakan suasana mencekam bagi kerja-kerja HAM. “Kami sekarang dianggap agen asing dan mata-mata. Beberapa pembawa acara gelar wicara menyebut saya sebagai mata-mata dan saya juga mendapat banyak serangan kebencian di Twitter,” papar Morayef. Setelah kudeta 2013, Morayef mengungkapkan bahwa, “Ini adalah momen terburuk yang pernah dialami Mesir semasa hidup saya, dari segi jumlah orang yang terbunuh akibat penggunaan kekerasan oleh polisi, jumlah tahanan politik, pengadilan massal, hukuman mati massal, dan eksekusi di luar proses hukum.”

Sebelum 2017, Morayef pindah ke Tunisia untuk mengepalai Amnesty Internasional di sana dan memimpin kerja-kerja riset terkait Afrika Utara. Ketika ditanya apakah dia berharap melihat perubahan dalam hidupnya, Morayef menjawab, “Masalahnya perubahan itu boleh jadi baik atau buruk. Saya tidak merasa akan melihat perubahan ke arah yang baik, misalnya pelanggaran HAM lebih sedikit, ruang politik lebih luas, rasa takut berkurang... Kegelapan saat ini memang tidak akan berlangsung selamanya, tetapi akan perlu waktu lama untuk menemukan titik terang.”⁴

Di belahan bumi lainnya di Meksiko, dalam situasi politik yang sangat berbeda, aktivis dan sarjana hak asasi manusia senior Sergio Aguayo juga menyuarakan hal yang mirip dengan yang diungkapkan Morayef. Meskipun Meksiko telah mengalami demokrasi elektoral yang kompetitif sejak tahun 2000, represi makin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Aguayo pertama kali bekerja di bidang hak asasi manusia di Meksiko pada awal 1980-an, dia mengutarakan bahwa, “ada harapan.

Waktu itu kami menjadi bagian dari petualangan... Kami merupakan alternatif dari revolusi kekerasan. Kami mungkin tidak akan berada di garda depan perubahan, tetapi yang pasti kami adalah pelindung para korban kekerasan politik.” Tapi sekarang, tuturnya, “Harapan telah hilang.” Dia menceritakan peningkatan jumlah orang hilang dan tewas akibat perbuatan pihak-pihak di berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisir, dan perusahaan. Pemerintah Meksiko telah membentuk lembaga HAM, tetapi lembaga-lembaga ini gagal melindungi HAM. Berbagai organisasi nonpemerintah atau LSM baru yang “berlagak” melindungi HAM bermunculan, “merusak konsep LSM dan hak asasi manusia.” Orang-orang dalam gerakan HAM yang memiliki kontak di luar negeri diserang dan didiskreditkan sebagai anti-negara atau korup. “Dan kita bahkan tidak tahu apakah yang menyerang kita itu pemerintah, bos lokal, atau kelompok kejahatan terorganisir,” kata Aguayo.⁵

Mesir dan Meksiko bukanlah satu-satunya negara tempat aktivis HAM di garda depan mendapatkan serangan. Banyak pemerintahan—seperti Tiongkok, Rusia, Ethiopia, Israel, dan India—yang berusaha membatasi gerak LSM hak asasi manusia dengan memblokir akses mereka ke dana asing atau dengan memaksa mereka mendaftarkan diri sebagai agen asing.⁶ Dari 1993 hingga 2012, 39 negara memberlakukan undang-undang pembatasan pendanaan asing bagi organisasi masyarakat sipil.⁷ Pembatasan ini adalah bagian dari rencana pemerintah yang lebih besar untuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi organisasi HAM dengan cara menyerang mereka dengan tuduhan anti-negara karena menerima dana asing atau dengan menuduh ide-ide HAM sebagai ideologi asing. Dalam beberapa kasus, seperti di India, pemerintah yang juga menerima penanaman modal asing melihat dukungan asing kepada masalah HAM dan keadilan dari lensa nasionalistik.⁸ Upaya untuk melemahkan aktivisme HAM menunjukkan bahwa pemerintah memandang kerja-kerja organisasi HAM itu efektif. Kalau tidak, mengapa pemerintah repot-repot menghabiskan banyak energi untuk meregulasi, membungkam, dan mendelegitimasi kerja organisasi HAM? Meski begitu, bukti efektivitas kerja-kerja HAM itu tidak juga membuat aktivis yang diserang merasa lega.

Sementara itu, di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump secara terang-terangan berkampanye bahwa dia akan “mengembalikan praktik penyiksaan yang jauh lebih sadis daripada *waterboarding* (simulasi penenggelaman).”⁹ Tak lama setelah mulai memerintah, pemerintahan Trump

mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang warga negara dari tujuh negara Muslim untuk masuk ke Amerika Serikat. Para pemimpin negara-negara represif termasuk di antara pejabat asing pertama yang mengunjungi Presiden Trump, sementara pada saat yang sama Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mendorong adanya pemisahan antara nilai-nilai AS dan kebijakan luar negerinya, tindakan yang secara luas ditafsirkan sebagai bentuk penelantaran kebijakan hak asasi manusia.¹⁰ Akibat perkembangan politik tersebut, wajar bila para aktivis HAM di Amerika Serikat juga merasa putus asa dan kehilangan harapan. Saya tidak pernah sekhawatir ini soal potensi dampak negatif politik AS terhadap hak asasi manusia di dalam negeri maupun di belahan dunia lain.

Saya menulis buku ini untuk orang-orang seperti Heba Morayef dan Sergio Aguayo, mereka yang berada di garda depan kerja-kerja HAM yang merasa putus asa dan hilang harapan. Saya juga menulis buku ini untuk pegiat HAM dan masyarakat luas di Amerika Serikat yang sama-sama prihatin dengan dampak kebijakan AS terhadap hak asasi manusia baik di dalam maupun di luar negeri. Saya menulis karena saya percaya bahwa sejarah panjang hak asasi manusia mengandung pesan positif yang dapat membantunya bertahan di konteks perjuangan HAM saat ini.

Pesimisme akan kemajuan HAM telah meluas. Baik di berita, di kalangan akademisi, atau di percakapan khalayak luas, banyak yang memandang bahwa semua jenis pelanggaran HAM di dunia saat ini makin parah. Di acara World Humanitarian Summit pada Mei 2016, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, “Kita telah mencapai tingkat penderitaan manusia paling parah sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tujuh puluh tahun yang lalu.¹¹ Yang dia maksud adalah krisis pengungsi global, tetapi pernyataannya itu menyangkut penderitaan manusia secara umum. Mengingat maraknya berita buruk dari Suriah, Sudan Selatan, Burundi, dan titik panas pelanggaran HAM lain di dunia, wajar apabila Ban Ki-moon merasa khawatir.

Kebanyakan orang akan setuju dengan kesimpulan Ban ki-moon soal kondisi HAM di dunia. Sebuah survei pada 2015 yang mewawancarai 18.000 responden di tujuh belas negara menanyakan, “Dengan mempertimbangkan segala aspek, apakah menurut Anda dunia menjadi lebih baik atau lebih buruk, atau tidak lebih baik atau lebih buruk?” Hanya di dua negara—Cina dan Indonesia—mayoritas orang menganggap bahwa dunia menjadi lebih baik atau tetap sama. Di lima belas negara lain, persentase orang yang menganggap bahwa dunia menjadi lebih baik

sangat rendah—di Amerika Serikat hanya enam persen dan di Jerman hanya empat persen.¹²

Beberapa akademisi mengkritik hukum, institusi, dan gerakan HAM karena dianggap tidak membawa banyak kemajuan. Sejumlah buku, blog, dan artikel opini terkini memuat judul-judul seperti “*Akhir dari Hak Asasi Manusia*” (*The Endtimes of Human Rights*), “*Senjakala Hukum Hak Asasi Manusia*” (*The Twilight of Human Rights Law*), atau “*Selamat datang di Dunia Pasca-HAM*” (*Welcome to the Post-Human Rights World*).¹³ Menurut Eric Posner, penulis buku *The Twilight of Human Rights Law*, “Negara menegaskan komitmen mereka terhadap HAM, dan meratifikasi aneka perjanjian dan konvensi internasional sebagai wujud komitmen tersebut. Pada saat yang sama, angka pelanggaran HAM tidak mengalami penurunan yang signifikan.”¹⁴ Pada kesempatan lain dia menulis, “Hukum HAM tidak banyak membantu; kita harus menerima kenyataan ini dan terus melangkah.”¹⁵ Posner adalah ahli hukum realis yang tidak terlalu bersimpati pada hukum HAM; namun para ahli yang lebih menggeluti HAM juga menyuarakan opini negatif yang senada.¹⁶ Ketika divisi Hak Asasi Manusia di International Studies Association (Asosiasi Studi Internasional) merencanakan pertemuan tahunan pada 2016, ketua acara tersebut mengusulkan satu hari penuh untuk membahas “Apa yang salah dengan Hak Asasi Manusia?” Email undangan acara tersebut berbunyi, “Mari kita tanyakan bersama-sama: ‘apa yang salah dengan hak?’ dan apa yang dapat kita pelajari dari temuan ini?”¹⁷ International Studies Association adalah asosiasi profesional penting bagi sarjana hubungan internasional dan divisi HAM di dalamnya merupakan wadah bagi mereka yang memiliki dedikasi khusus untuk topik ini; kalau akademisi yang paling berkomitmen terhadap HAM saja ingin menyoroti “Apa yang salah dengan Hak Asasi Manusia,” lantas bagaimana dengan kritik dari mereka yang benar-benar pesimis terhadap HAM?

Tentu sudah sewajarnya HAM terus ditinjau ulang dan diperdebatkan. Saat ini konsep hak asasi manusia telah menjadi salah satu wacana moral dan politik yang dominan di dunia.¹⁸ Ini adalah salah satu cara kita mendiskusikan nilai dan keyakinan kita. Sebagai seperangkat norma, hukum, dan institusi yang makin berpengaruh serta gerakan global yang kuat, hak asasi manusia memang seharusnya terus dikaji dan dikritik.¹⁹ Krisis hak asasi manusia yang nyata di berbagai belahan dunia, seperti yang terjadi di Suriah atau serangan ISIS terhadap warga Yazidi di Irak, sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan kepedulian kita. Buku ini

tidak ditujukan untuk mengelakkan kritik atau menyepelekan krisis hak asasi manusia, tetapi untuk memperjelas pokok perdebatan soal HAM, jenis perbandingan yang digunakan, dan jenis-jenis bukti yang kurang lebih persuasif dalam mendukung dan mengevaluasi klaim-klaim yang dikemukakan.

Saya akan membahas dua jenis kritik dan pesimisme utama yaitu terkait *legitimasi* dan *efektivitas* hukum, institusi, dan gerakan hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan legitimasi adalah persepsi umum bahwa suatu gerakan atau institusi itu diperlukan, dianggap patut, dan otentik.²⁰ Mereka yang mengkritik institusi HAM menganggap bahwa hal itu kurang diperlukan, tidak patut, atau tidak otentik ketimbang alternatif lain yang mereka bayangkan. Sementara itu, efektivitas adalah soal apakah hak asasi manusia dapat menciptakan perubahan yang positif di dunia. Legitimasi dan efektivitas saling terkait; misalnya, efektivitas suatu lembaga dapat memengaruhi pandangan soal apakah lembaga itu diperlukan.

Terdapat empat aktor utama dengan posisi dan alasan yang berbeda-beda yang mengutarakan kritik tersebut. Pertama adalah pemerintah dengan rapor merah hak asasi manusia yang mengkritik HAM karena tidak ingin mengikat tangannya sendiri atau dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Kedua adalah individu atau masyarakat umum yang cemas bahwa dunia sedang di ambang kehancuran dan HAM tidak cukup membantu, pendapat yang juga sering dikemukakan oleh pengambil kebijakan. Ketiga adalah akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang, mulai dari kelompok realis hingga penganut teori kritis. Keempat adalah aktivis hak asasi manusia, terutama dari Kawasan Selatan Dunia (Global South), yang mencemaskan lambatnya kemajuan dan minimnya konsultasi di dunia HAM. Mereka tidak suka dengan arogansi beberapa organisasi HAM besar yang berbasis di Kawasan Utara Dunia (Global North) serta ketidakpedulian dan privilese beberapa staf di institusi HAM. Masing-masing dari empat kritik di atas berbeda secara teoretis, tetapi pada praktiknya tak jarang melebur menjadi satu. Contohnya, pemerintah represif dapat menampik kritik atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan dengan menggunakan kritik akademisi yang mengatakan bahwa HAM berasal dari Kawasan Utara Dunia dan merupakan bentuk imperialisme budaya atau politik. Pada 2015, Presiden Venezuela Nicolás Maduro di hadapan PBB menyatakan bahwa Venezuela menghadapi “serangan imperialis” dan pelecehan terus-menerus lewat “manipulasi HAM oleh Barat.”²¹ Akan

tetapi, seperti yang akan kita lihat di bab 3 dan 4, Venezuela sudah sejak dulu mendukung upaya-upaya internasional untuk melindungi serta memajukan HAM dan demokrasi.

Kalau saya dianggap lebih optimis dari yang lain, mungkin karena saya telah menyaksikan kemajuan HAM yang signifikan di masa hidup saya seperti kesetaraan dan peluang yang lebih besar bagi perempuan dan minoritas seksual. Sewaktu muda, ibu saya, Arlene Sikkink, diberi tahu apabila dia ingin bekerja, ada tiga jenis karier yang dapat dia pilih, yaitu: perawat, sekretaris, atau guru. Karena menyukai sains, ibu saya memilih menjadi perawat. Ibu saya kemudian mendidik saya dan dua saudari saya bahwa kami dapat menjadi apa pun yang kami inginkan. Namun, ketika saya masuk sekolah pascasarjana ilmu politik di Columbia University pada 1981, tidak ada profesor perempuan purnawaktu di departemen saya. Mengingat konteks saat itu, saya tidak yakin dapat menjadi ilmuwan politik profesional, apalagi menjadi dosen tetap.²² Meskipun banyak hak perempuan di bidang profesi saya yang masih perlu diperjuangkan, saya menyaksikan banyak kemajuan di masa hidup saya, dan saya merasa berhutang budi kepada gerakan feminis yang memperjuangkan hak dan kesetaraan perempuan, termasuk membuka ruang bagi perempuan di dunia akademik. Situasi saya tidaklah unik; sebagaimana yang akan kita lihat di bab 6, perempuan di berbagai belahan dunia telah mengalami kemajuan dalam hal jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, dan makin banyak perempuan di seluruh dunia yang bekerja di bidang akademik, meskipun masih terdapat variasi antarnegara.²³

Perubahan tidak hanya terjadi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ketika saya masih tinggal di Uruguay pada akhir 1970-an, teman-teman yang sekarang saya ketahui berorientasi seksual gay atau lesbian saat itu tidak dapat memberi tahu teman terdekat atau anggota keluarga mengenai identitas seksual mereka. Pada 2013, Kongres Uruguay mengesahkan pernikahan sesama jenis, menjadikan Uruguay sebagai negara kedua di Amerika Latin dan negara ketiga belas di dunia yang mengakui kesetaraan pernikahan.²⁴ Meskipun Uruguay berada di garda depan, hal tersebut mencerminkan tren global yang lebih luas, ketika hak-hak LGBT yang dulu dianggap isu yang sama sekali tabu mulai bergeser menjadi pembahasan soal bagaimana meningkatkan penerimaan dan pembahasan tentangnya.

Kadang kita mendengar soal krisis HAM, tetapi tidak mendengar soal kemajuan HAM. Kita mempelajari kegagalan Arab Spring di Mesir

dan Suriah, tetapi tidak mempelajari keberhasilan di Tunisia, yang mulai menyelenggarakan rapat dengar pendapat di Komisi Kebenaran dan Martabat pada 2016.²⁵ Kita mempelajari kehancuran demokrasi di Burundi, tetapi tidak mempelajari perjuangan menggapai demokrasi di Gambia, ketika warga di sana berhasil menurunkan diktator yang telah memerintah selama 22 tahun melalui pemilu pada akhir 2016. Setiap terjadi kemajuan HAM, seperti dalam kasus-kasus di atas, tampak bahwa kemajuan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang selama puluhan tahun.

Saya ingin membedakan argumen saya dari argumen lain belakangan ini dalam perdebatan soal pesimisme dan optimisme di dunia. Sebagian mengatakan bahwa kemajuan di bidang HAM adalah buah dari menyebarnya “rasionalitas yang dipicu oleh era Pencerahan di Barat.”²⁶ Sebagian lainnya mengemukakan klaim terkait namun cukup berlawanan: karena HAM muncul dari Amerika Serikat dan Eropa Barat, dan karena saat ini negara-negara di wilayah tersebut tengah mengalami kemunduran, maka sekarang inilah era berakhirnya HAM.²⁷ Pendekatan saya justru akan fokus pada dampak dari perjuangan HAM jangka panjang, yang kerap dipimpin oleh mereka yang tertindas, terinspirasi oleh ide-ide HAM dan menyasar institusi dan praktik yang memiliki kuasa besar seperti kolonialisme, eksklusivitas, dan represi. Pemerintah di Amerika Serikat dan Eropa kadang mendukung perjuangan tersebut dan kadang menghentikan atau menghambatnya, tetapi pemerintah bukanlah aktor protagonis utama. Perjuangan HAM tersebut tidak hanya terjadi di kawasan yang sering disebut sebagai Kawasan Utara Dunia, yaitu negara-negara kuat di Eropa Barat dan Amerika Utara. Para ahli hukum, diplomat, dan aktivis Amerika Latin merupakan pegiat yang gigih memperjuangkan perlindungan HAM internasional pada tahun 1940-an, ketika mereka mendesak Negara-Negara Adikuasa untuk memasukkan bahasa hak asasi manusia dalam Piagam PBB. Negara-negara pascakolonial di Afrika dan kawasan lainnya memimpin perjuangan untuk memperkuat rezim HAM internasional pada tahun 1960-an, ketika memobilisasi perlawanan terhadap apartheid dan diskriminasi rasial serta membentuk institusi HAM internasional pertama yang kuat.²⁸ Singkat kata, semua sejarah hak asasi manusia adalah sejarah yang “penuh pertentangan” (*contentious*).²⁹

Perjuangan HAM telah menghasilkan hukum dan institusi konkret yang telah mengubah tatanan dunia kita. Saat ini, norma-norma HAM telah terlembagakan secara mendalam dalam hukum dan institusi

internasional maupun domestik, termasuk institusi-institusi di negara berkembang, sehingga kelangsungannya terus terjaga meski terjadi pergeseran dalam relasi kuasa global. Dengan melihat keragaman asal-usul dan pelembagaan hak asasi manusia yang mendalam, kita dapat membayangkan masa depan hukum dan praktik hak asasi manusia yang berbeda dari prediksi literatur pesimis.

Saya juga berargumen bahwa mereka yang mengkritik HAM kerap ambigu dalam melakukan perbandingan dan ceroboh dalam menggunakan sejarah dan bukti argumen mereka. Agar debatnya lebih produktif, kita perlu mengklarifikasi pokok kritik, definisi istilah-istilah, dan metode yang digunakan. Dengan perbandingan empiris dan penggunaan data hak asasi manusia secara saksama, kita dapat memperoleh bukti yang persuasif untuk menilai efektivitas hukum dan aktivisme HAM. Dengan menilai situasi hak asasi manusia secara saksama, kita akan tahu bahwa generalisasi—seperti pernyataan Ban Ki-Moon bahwa saat ini terdapat lebih banyak penderitaan di dunia dibandingkan dengan saat berdirinya PBB atau pernyataan Eric Posner bahwa tidak ada kemajuan dalam HAM—tidak akurat serta tidak membantu. Situasi hak asasi manusia di dunia memang mengalami beberapa kemunduran, seperti kasus di Suriah, Mesir, Meksiko, dan Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain kita juga menyaksikan adanya peningkatan kesadaran dan perbaikan, seperti perkembangan kesetaraan gender, hak-hak minoritas seksual, dan hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun perubahan HAM membutuhkan waktu yang lama dan kemajuannya mengalami pasang surut, kita tidak melihat adanya pengabaian total terhadap gagasan hak asasi manusia atau hilangnya kepercayaan kepada institusi yang dirancang untuk memajukan dan melindungi hak-hak ini.

Para ahli dan aktivis harus mampu membedakan mana bidang atau kasus yang membaik dan mana yang memburuk, agar kita dapat mengambil langkah berikutnya untuk mengevaluasi mana yang berhasil dan tidak dalam memajukan hak asasi manusia. Kita tidak cukup hanya bertanya, “Apa yang salah dengan hak asasi manusia?” tetapi kita juga harus bertanya, “Apa yang benar dengan hak asasi manusia?” Mantan hakim di Afrika Selatan dan mantan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, mengatakan:

Sangat menarik bagi akademisi untuk mengambil pandangan yang menantang selama mereka tidak menghancurkan semuanya. Setiap

sistem yang baru dibangun selalu mendapatkan kritik. Saya menyambut baik kritik, tetapi saya juga akan menyambut para akademisi yang dapat memberi tahu apa yang harus dilakukan, faktor apa yang belum ada, daripada sekadar berpandangan bahwa semuanya tidak berguna, semuanya akan jatuh ke dalam lubang hitam, tak perlu repot-repot berusaha mengubah dunia.³⁰

Agar akademisi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas kepada orang-orang seperti Navi Pillay, kita harus melakukan kajian yang lebih cermat dan mendalam tentang apa yang selama ini efektif dan tidak efektif dalam memajukan hak asasi manusia.

Legitimasi Hukum, Institusi, dan Gerakan Hak Asasi Manusia

Salah satu cara utama yang digunakan pemerintah dan akademisi dalam menyerang legitimasi hukum, institusi, dan gerakan hak asasi manusia adalah dengan menuduhnya asing atau anti-nasional. Seperti yang tampak dalam kasus Heba Morayef, pemerintah yang represif kerap menggambarkan aktivis HAM sebagai individu yang termotivasi oleh ide-ide asing, bahkan mungkin sebagai agen asing. Tetapi pemerintah yang represif bukan satu-satunya yang mempertanyakan legitimasi gagasan dan aktivisme HAM. Kritik yang berbeda datang dari dunia akademik.³¹ Stephen Hopgood, misalnya, mengatakan bahwa gerakan hak asasi manusia “berisiko jadi tidak relevan secara politik di luar Jenewa, London, New York, dan beberapa kantong kelas menengah lainnya di dunia. Di sini hak asasi manusia sebagai ide-ide etis dan politik praktis tidak lagi berguna.”³² Prediksi Hopgood tentang masa depan hak asasi manusia didasarkan pada pemahaman tertentu tentang sejarah hak asasi manusia. Dia mengatakan, “Tersebar nya hak asasi manusia ke seluruh dunia hanya sekadar akibat sampingan dari kuasa dan dana yang dimiliki Amerika.”³³

Isu-isu ini diperdebatkan dengan serius dalam gerakan hak asasi manusia. Baik di Kawasan Utara maupun Selatan Dunia, terdapat perbedaan pandangan mengenai asal-usul dan legitimasi hak asasi manusia. Paulo Sérgio Pinheiro, pegiat HAM senior di Brasil yang pernah bekerja di institusi HAM tingkat tinggi PBB, menyatakan, “Jangan ada lagi yang melontarkan omong kosong bahwa hak asasi manusia merupakan hasil pemaksaan imperialisme negara-negara di Kawasan Utara.”³⁴ Namun, Raquel Rolnik yang juga sama-sama dari Brasil berpendapat bahwa hak

asasi manusia terbelenggu dalam pemikiran liberal dan dalam “model kepemilikan pribadi sistem kapitalis.”³⁵

Dalam membahas perdebatan soal legitimasi, saya menggunakan berbagai sumber, dari arsip sejarah dan penelitian sejarah terbaru hingga data survei. Saya berargumen bahwa penelitian sejarah yang sangat baik baru-baru ini dan sumber empiris lainnya seperti survei menunjukkan bahwa hukum HAM memiliki asal-usul di Kawasan Selatan maupun Utara Dunia dan bahwa banyak orang di dunia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap organisasi HAM. Negara-negara di Kawasan Selatan Dunia, terutama di Amerika Latin dan Afrika, telah membentuk institusi-institusi regional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia sekaligus menegakkan hak-hak ini melalui keputusan pengadilan nasional. Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika telah menghasilkan beberapa keputusan yang berdampak paling luas terkait isu-isu hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat. Pengadilan nasional di Brasil, Afrika Selatan, dan India telah membuat keputusan inovatif tentang penegakan hak-hak ekonomi yang sulit seperti hak atas air, makanan, kesehatan, dan tempat tinggal. Asal-usul yang lebih beragam ini serta pelembagaan hak asasi manusia yang lebih luas di Kawasan Selatan Dunia menunjukkan bahwa HAM memiliki legitimasi yang lebih besar daripada yang dikemukakan oleh para kritikus.

Efektivitas Hukum, Institusi, dan Gerakan Hak Asasi Manusia

Observasi saya yang lebih optimis tidak didasarkan pada angan-angan belaka, tetapi pada ikhtiar untuk memahami kekuatan dan kelemahan data hak asasi manusia secara lebih komprehensif. Ketika kita mencermati isu demi isu dengan lebih saksama serta melihat kualitas data dan tren dari waktu ke waktu seperti yang saya lakukan di bab 5, tampak bahwa beberapa isu HAM mengalami kemunduran—seperti jumlah pengungsi dan migran yang terlantar akibat perang, atau kesetaraan ekonomi yang makin memburuk. Tetapi ada banyak contoh lain yang menunjukkan perbaikan hak asasi manusia, seperti menurunnya angka genosida dan politisida di dunia, menurunnya jumlah korban tewas dalam pertempuran serta jumlah warga sipil yang tewas dalam perang, menurunnya penggunaan hukuman mati, serta kemajuan dalam kesetaraan bagi perempuan.

Riset empiris yang saya bahas tidaklah semuanya padu atau sederhana. Untuk memahaminya, kita perlu mendalami beberapa masalah endemik terkait dokumentasi dan data hak asasi manusia.³⁶ Pada dasarnya, kita perlu memahami debat soal tolok ukur apa yang harus digunakan dalam mengukur efektivitas serta ketegangan antara penalaran ideal dan penalaran empiris. Selama ini, informasi soal pelanggaran HAM yang reliabel sulit didapatkan dan akan terus seperti itu di masa mendatang. Saya juga akan merangkum karya-karya terbaru dari berbagai ahli tentang efektivitas hak asasi manusia dari waktu ke waktu. Studi ini membuat saya memiliki “bias untuk harapan” akan kemajuan hak asasi manusia yang didasarkan bukan kepada optimisme kosong semata, tetapi evaluasi yang logis atas bukti-bukti yang ada.³⁷

Tetapi, kalau memang hukum, institusi, dan gerakan HAM itu efektif, mengapa banyak orang menganggap bahwa pelanggaran HAM justru makin memburuk dan bukannya membaik? Mengapa banyak orang saat ini menganggap ada lebih banyak penyiksaan, pemerkosaan, dan penindasan di dunia daripada sebelumnya? Jawaban singkatnya adalah kita menganggap dunia menjadi lebih buruk karena sekarang kita lebih peduli dan lebih banyak tahu soal hak asasi manusia ketimbang pada masa-masa sebelumnya. Gerakan HAM telah berhasil menarik perhatian banyak pihak terhadap pelanggaran HAM yang makin beragam di berbagai belahan dunia. Akibatnya, seiring makin banyaknya laporan dan perhatian media terhadapnya, muncul kesan bahwa gerakan hak asasi manusia tidak menghasilkan kemajuan apa-apa dalam mengurangi pelanggaran HAM.

Etika dan Hak Asasi Manusia

Pada bagian selanjutnya buku ini, saya mendorong penulis-penulis lain untuk lebih transparan soal posisi etis mereka, sehingga saya perlu terlebih dahulu menjelaskan posisi etis saya sendiri. Sulit bagi ilmuwan sosial untuk berbicara soal etika: kita khawatir jika kita mengambil posisi etis yang eksplisit atas suatu isu, objektivitas kita akan dipertanyakan sehingga mengurangi kredibilitas studi kita.³⁸ Ketika saya menjalani kuliah pascasarjana pada 1981, kebijakan dan aktivisme HAM belum dianggap topik yang cukup serius untuk penelitian ilmu-ilmu sosial. Topik hak asasi manusia dianggap lebih cocok dibicarakan oleh pengacara dan aktivis, bukan ilmuwan politik yang seharusnya berbicara soal bagaimana kondisi dunia yang sebenarnya, bukan bagaimana kondisi dunia yang seharusnya. Ketika saya mulai meneliti hak asasi manusia pada awal 1990-an,

saya merasa pilihan topik itu saja sudah memberikan sinyal normatif bahwa saya perlu menghabiskan waktu untuk menunjukkan keseriusan dalam membangun teori dan metode yang saya gunakan.³⁹

Saya banyak dipengaruhi oleh ide-ide mending ekonom dan filsuf Albert Hirschman dan saya merujuk argumen-argumennya di buku ini. Hirschman menyerukan jenis ilmu sosial yang berbeda:

... sebuah ilmu sosial-moral ketika pertimbangan moral tidak direpresi atau dipisahkan, melainkan diintegrasikan secara sistematis dengan argumen analitis ... ketika transisi bolak-balik antara penyampaian anjuran dan pembuktian sering dan mudah dilakukan; dan ketika pertimbangan moral tidak perlu lagi diselundupkan secara diam-diam, atau diungkapkan tanpa sadar, melainkan dikemukakan secara terbuka dan meyakinkan.⁴⁰

Saya percaya bahwa hak asasi manusia, sebagaimana didefinisikan dalam hukum HAM saat ini, merupakan titik awal yang dapat dipertahankan secara moral untuk membicarakan perubahan yang progresif di dunia. Pandangan ini tidaklah baru. Pemikir seperti Amartya Sen, Martha Nussbaum, Mathias Risse, John Tasioulas, dan Charles Beitz telah menggunakan pemenuhan hak sebagai dasar penyusunan teori normatif.⁴¹ Seperti para filsuf praktik HAM, saya memulai dengan prinsip HAM yang diwujudkan dalam hukum HAM, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR).⁴²

Hukum HAM internasional saat ini mencerminkan “konsensus politik internasional yang lintas batas.”⁴³ Adanya konsensus bersama itu bukan berarti tidak ada konflik. Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam memahami HAM di dunia, tetapi konsensus tentang dan dukungan kepada HAM juga cukup signifikan. Misalnya, norma internasional yang ada saat ini disusun melalui proses perdebatan dan konsultasi mendalam di antara banyak negara, sehingga dapat mengurangi etnosentrisme keimbang meminta analisis untuk mengganti kriteria normatifnya sendiri. Apabila diamati dengan cermat, proses perumusan dan implementasi hukum hak asasi manusia juga menyediakan model tata kelola global yang deliberatif, nirkekerasan, dan non-koersif serta proses perubahan yang

dapat berguna untuk isu lainnya. Tetapi persis karena bersifat deliberatif dan non-koersif, perubahan atau kemajuan hak asasi manusia selalu dan akan terus berjalan lambat.

Perhatian saya terhadap efektivitas HAM pada paruh kedua buku ini mungkin membuat saya tampak seperti seorang konsekuensialis—yaitu, orang yang menilai moralitas suatu tindakan semata-mata dari konsekuensinya. Saya bukan seorang konsekuensialis; saya percaya pada nilai intrinsik norma HAM, terlepas dari konsekuensinya. Tetapi saya juga ingin bertanya soal dampak atau konsekuensi hak asasi manusia. Konsekuensi adalah topik yang sangat penting sehingga hal itu tidak boleh diserahkan begitu saja hanya kepada para konsekuensialis. Memahami dan mengevaluasi konsekuensi secara inheren merupakan langkah komparatif dan empiris, dan dengan itu para ahli yang berwawasan empiris dapat memberikan kontribusi penting.⁴⁴

Saya juga berargumen bahwa hukum HAM tidak menyebutkan, dan tentunya juga tidak mengharuskan, penggunaan cara-cara militer untuk memajukan HAM. Ilmu-ilmu sosial menunjukkan bahwa intervensi militer sama-sama memiliki kemungkinan untuk memperburuk dan melindungi hak asasi manusia.⁴⁵ Piagam PBB secara keseluruhan (bukan hanya hukum HAM) mengizinkan Dewan Keamanan PBB (UN Security Council) untuk menggunakan cara-cara militer guna menangani isu perdamaian dan keamanan internasional. Saya tidak menentang tindakan Dewan Keamanan PBB untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi komitmen etis saya adalah pada pendekatan hak asasi manusia yang deliberatif, nir-kekerasan, dan non-koersif yang menjadi ciri utama sejarah hukum dan institusi hak asasi manusia. Ketika negara-negara diminta atau ditekan untuk mematuhi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang mereka ikut susun dan mereka setuju lewat ratifikasi, itu namanya bukan koersi; itu menuntut pertanggungjawaban negara atas komitmen yang mereka buat sendiri.

Gambaran Umum Buku

Buku ini lebih mirip menu *à la carte* yang dapat Anda pilih secara bebas, dan bukan hidangan lengkap yang harus Anda nikmati dari awal hingga akhir. Karena itu, saya mendorong pembaca untuk mendalami bab-bab yang dianggap paling menarik dan tak usah ragu melompati bab-bab yang ada sesuai keperluan. Setelah pendahuluan (Bab 1 dan 2), bagian

kedua buku ini (Bab 3 dan 4) membahas soal legitimasi hak asasi manusia dan proses perubahan hak asasi manusia berdasarkan penelitian sejarah. Bagian III (Bab 5 dan 6) membahas soal efektivitas hak asasi manusia dan lebih banyak terkait dengan data dan ilmu sosial. Jadi, jika Anda lebih tertarik dengan topik efektivitas hukum, institusi, dan gerakan HAM, Anda dapat langsung melompat ke bab 5 yang lebih banyak membahas soal efektivitas. Jika yang menarik perhatian Anda adalah subjudul berisi saran untuk memajukan HAM pada abad ke-21, Anda dapat langsung lompat ke Bab 6 dan 7 yang berisi rekomendasi kebijakan HAM berbasis bukti dari literatur ilmu-ilmu sosial sekaligus ringkasan kesimpulan utama buku ini.

Pada bab 2, setelah bab pendahuluan ini, saya menguraikan sejumlah sanggahan terhadap kritik akademis dan pesimisme soal efektivitas dan legitimasi hak asasi manusia. Bab ini merupakan bab paling abstrak dalam buku ini dan mungkin akan membosankan bagi para pembaca yang lebih berorientasi pada pembuatan kebijakan. Pembaca yang demikian dapat melewati bab ini dan langsung ke bagian yang dianggap lebih relevan. Pada bab 2, saya membahas salah satu sumber pertentangan paling utama seputar efektivitas HAM—yaitu metode pengukuran. Bagaimana kita dapat menjelaskan perubahan dengan lebih baik, jika kita tidak dapat menyetujui apakah perubahan benar-benar telah terjadi? Akademisi maupun praktisi cenderung menggunakan dua jenis perbandingan yang berbeda dalam mengonseptualisasi efektivitas: perbandingan dengan cita-cita ideal dan perbandingan dengan fakta empiris.⁴⁶ Lain pengukuran, lain pula kesimpulan yang diperoleh soal legitimasi, efektivitas, atau kemajuan HAM. Misalnya, jika saya membandingkan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court, ICC) dengan cita-cita ideal, kesimpulannya akan berbeda jika saya membandingkan dunia saat ini ketika sudah ada ICC dengan dunia sebelum 1998 ketika mahkamah semacam itu belum ada. Kedua evaluasi tersebut valid dan dapat menghasilkan kesimpulan yang berguna, tetapi para akademisi perlu lebih eksplisit soal jenis ukuran yang mereka pilih supaya kita dapat menafsirkan klaimnya. Karena perbandingan dengan yang ideal agak problematis, saya lebih memilih untuk menggunakan penelitian berbasis perbandingan empiris yang sistematis sebagai landasan dalam mengevaluasi kemajuan HAM.

Sejarah HAM memiliki banyak cerita yang dapat membantu kita memahami apa yang menyebabkan perubahan dan mengapa itu terjadi. Pada bab 3, saya membahas dengan rinci sejarah awal perlindungan

HAM internasional pada tahun 1940-an, yang menunjukkan bahwa ide dan hukum HAM berasal dari sumber yang jauh lebih beragam dari negara-negara besar di Kawasan Utara Dunia. Meski saya lebih banyak menyoroti protagonisme dari Amerika Latin, saya juga menyebutkan tokoh protagonis awal dari kawasan lain seperti para diplomat dari India. Saya berargumen bahwa asal-usul yang lebih beragam itu menunjukkan legitimasi HAM yang lebih kuat ketimbang yang selama ini diklaim oleh para pengkritik HAM.

Bab 4 membahas perjuangan HAM yang panjang dan berdarah-darah pada era perang Dingin. Hal ini mengingatkan kita bahwa perubahan atau kemajuan HAM tidak pernah dicapai dengan mudah atau cepat. Sejarah ini barangkali dapat memberikan penghiburan bagi para aktivis seperti Heba Morayef yang merasa putus asa akan perubahan. Cerita HAM dari era Perang Dingin juga mengungkap kelemahan kebijakan domestik dan internasional. Selama Perang Dingin, baik kelompok revolusioner kiri maupun kelompok antikomunis kanan sama-sama meremehkan demokrasi liberal dan hak asasi manusia.⁴⁷ Alih-alih memimpin upaya perlindungan hak asasi manusia, Pemerintah Amerika Serikat justru mendukung kudeta menggulingkan pemimpin kiri yang memenangkan pemilu dan berpihak pada rezim otoriter antikomunis.

Pada bab 5, saya beralih membahas soal efektivitas. Saya memulai bab ini dengan menyajikan serangkaian grafik dan tabel untuk melihat tren isu HAM dari waktu ke waktu. Saya kemudian coba menjelaskan mengapa orang merasa pesimis terhadap HAM meski terdapat banyak bukti yang menunjukkan kemajuannya. Hal itu dilakukan dengan menelusuri serangkaian bias dan heuristik kognitif yang memunculkan pandangan negatif terhadap HAM. Beberapa karakteristik gerakan HAM sendiri juga turut memperburuk pandangan negatif tersebut. Politik informasi, misalnya, merupakan taktik utama gerakan hak asasi manusia—yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi yang dapat digunakan secara politis. Aktivis kerap menarik perhatian dengan membuat pernyataan dramatis yang mengecam pelanggaran berat. Dalam rangka mendapatkan perhatian, pendanaan, dan dukungan yang berkelanjutan, mereka perlu meningkatkan kesadaran publik terhadap hal-hal buruk yang terjadi di dunia. Aktivis terkadang takut jika mereka lebih menekankan cerita kemajuan atau keberhasilan HAM, akan muncul rasa puas diri atau ketidakpedulian terhadap pelanggaran HAM yang sedang berlangsung.

Tetapi kecenderungan negativitas semacam ini juga memunculkan kesan bahwa gerakan HAM selama ini tidak berjalan efektif.

Pada bab 6, saya memberikan rekomendasi kebijakan untuk memajukan HAM di masa mendatang yang didasarkan pada tinjauan terhadap penelitian ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini bukan hanya mengungkapkan bahwa aktivisme dan hukum HAM sering kali efektif, tetapi juga mengidentifikasi kondisi seperti apa yang memungkinkan HAM untuk berfungsi secara efektif. Kemampuan untuk mengidentifikasi kegagalan dan menentukan penyebabnya sangat penting untuk memperbaiki kebijakan HAM di masa mendatang. Tetapi, kemampuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan praktik apa yang dapat berkontribusi pada perbaikan HAM dan bagaimana memperluasnya juga sama pentingnya. Saya mengajukan enam perangkat kebijakan yang pernah dan dapat digunakan untuk menangani pelanggaran HAM: (1) mengurangi perang dan mencari solusi nirkekerasan atas konflik; (2) memajukan demokrasi dan meningkatkan mutu demokrasi yang sudah ada; (3) menangkal ideologi yang mendehumanisasi dan mengeksklusi, baik itu atas dasar ras, agama, gender, kelas, atau status lainnya; (4) mendorong negara-negara untuk meratifikasi konvensi HAM yang sudah ada dan berupaya menegakkan hukum dan norma HAM melalui cara-cara nirkekerasan; (5) mengakhiri impunitas dengan mendukung akuntabilitas di dalam negeri sendiri dan di tingkat internasional yang dapat mencegah pelanggaran di masa mendatang; serta; 6) mendukung, memperluas, serta melindungi mobilisasi HAM di dalam negeri dan mancanegara. Beberapa negara, organisasi internasional, dan organisasi HAM telah bekerja untuk memajukan beberapa opsi kebijakan ini, seperti mengakhiri impunitas dan menegakkan hukum HAM. Bagian lain dari agenda kebijakan ini masih kurang mendapat perhatian, seperti kebutuhan untuk mengurangi perang dan menangkal ideologi yang mendehumanisasi dan mengeksklusi.

Akhirnya, pada Bab 7, saya memberikan kesimpulan dengan meringkas argumen utama dan implikasi kebijakan dari buku ini.

Kesimpulan

Buku ini memetakan respons pragmatis dan penuh harap terhadap pesimisme dan kritik atas legitimasi dan efektivitas HAM. Respons tersebut didasarkan pada penelitian sejarah dan ilmu-ilmu sosial serta dipandu oleh filsafat yang disebut oleh Hirschman sebagai “possibilism” (posibilisme).⁴⁸

Perdebatan seputar HAM ini berisiko tinggi. Kemajuan HAM yang telah tercapai merupakan hasil dari aktivisme dan perjuangan. Kemajuan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi bergantung pada komitmen dan upaya berkelanjutan. Inilah yang disebut Albert Hirschman sebagai “*possibilisme*”, sebuah gagasan yang muncul dalam karyanya di bidang ekonomi pembangunan pada tahun 1960-an. Dia mengusulkan *possibilisme* sebagai alternatif dari kecenderungan elit pemerintahan yang menganggap bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya gagal total. Dia mengimbau para pembuat kebijakan agar lebih menyoroti “upaya yang kemungkinan mendukung pembangunan dan kemajuan.”⁴⁹ Hirschman ingin menarik perhatian mereka kepada kemungkinan yang dapat dikerjakan terjadi (*possible*) ketimbang yang bisa terjadi begitu saja (*probable*). Dia juga ingin menekankan pentingnya “memperlebar batasan hal-hal yang dianggap mungkin terjadi (*possible*).”⁵⁰ Persis inilah yang selama ini berulang kali dilakukan oleh gerakan HAM. Dengan memperlebar batas kemungkinan yang dapat terjadi, gerakan hak asasi manusia terkadang berhasil mengubah kemungkinan yang niscaya terjadi. Saya terinspirasi oleh Hirschman dan di buku ini saya tidak hendak menyampaikan sejarah kemenangan (*triumfalis*), melainkan sejarah kemungkinan (*possibilis*).

Hirschman berargumen bahwa proses perubahan terjadi secara bertahap, tidak teratur, dan merupakan hasil dari konstelasi unik berbagai peristiwa, termasuk aktivisme individu yang oleh Hirschman disebut “*pendorong perubahan*” (*reformonger*) dan disebut banyak orang sebagai “*entrepreneur norma*” (*norms entrepreneurs*). Dalam sejarah HAM, *norms entrepreneur* dari dalam maupun luar negeri telah berperan memajukan agenda HAM. Tanpa keyakinan dan upaya tak kenal lelah dari para *reformonger*, perubahan tidak akan terjadi. Jika orang-orang di seluruh dunia menganggap bahwa upaya mereka memperjuangkan HAM itu sia-sia atau bahkan kontraproduktif dan memilih tidak melakukan apa-apa, maka kemajuan HAM dapat terhambat atau bahkan mengalami kemunduran. Harapan itu menopang keberlanjutan kerja-kerja HAM. Tetapi, meskipun diperlukan, harapan semata tentu tidak cukup. Yang diperlukan adalah harapan yang masuk akal serta ditunjang oleh informasi dan kesabaran yang memadai. Tujuan saya bukan untuk menjadi pemandu sorak bagi gerakan HAM, melainkan ingin memberikan saran terbaik tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil serta menjelaskan bagaimana dan mengapa perubahan memerlukan waktu yang sangat lama. Buku ini membahas apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa yang mungkin

terjadi di masa depan, dengan komitmen yang berkelanjutan, perjuangan, dan keadaan tidak terduga.

Hirschman akan lebih dulu memperingatkan kita agar tidak terlalu percaya bahwa semua masalah dapat terpecahkan dan bahwa paradigma tertentu dapat memberikan solusi yang mudah atau sederhana.⁵¹ Hirschman memberikan perhatian khusus pada konsekuensi-konsekuensi yang kontra-intuitif dan tidak disengaja, baik yang positif maupun negatif. Tetapi Hirschman juga mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap apa yang dia sebut sebagai “fracasomania” atau “*failure complex*”, yaitu kecenderungan untuk menganggap sesuatu sebagai sebuah kegagalan.⁵² Dia menemukan bahwa persepsi tentang kegagalan sering kali merupakan akibat dari idealisme, terutama kalangan radikal kiri, yang membandingkan antara perubahan yang “sejati” dengan yang tampaknya terjadi. Para pengamat HAM modern sering kali mengalami “*failure complex*” ketika membandingkan hasil yang terjadi dengan perubahan “sejati” menurut idealisme mereka (sering kali implisit). Karena itu, saya ingin mengadopsi ide Hirschman soal Bias Harapan, bahwa harapan bukan angan-angan kosong semata tetapi didasarkan pada data dan riset.

Saya berupaya menunjukkan bahwa kajian sejarah yang lebih luas serta asumsi konseptual dan metodologis yang lebih cermat dan eksplisit dapat memunculkan penilaian baru tentang dampak positif hukum dan aktivisme HAM, yang saya sebut sebagai bukti adanya harapan. Suami saya Douglas Johnson, pengurus organisasi HAM kawakan yang saat ini mengepalai Carr Center for Human Rights Policy di Harvard Kennedy School, suka mengutip pernyataan Saul Alinsky soal dinamika dalam menciptakan perubahan sosial. Alinsky mengatakan bahwa kita harus memiliki kemarahan, harapan, dan keyakinan bahwa kita dapat membuat perbedaan dan menciptakan perubahan. Beberapa orang menganggap rasa marah sebagai emosi keadilan yang primordial. Namun, meski rasa marah dapat mendorong aksi, hal itu biasanya cepat habis dan dapat berujung pada sikap apatis. Kemarahan tidak cukup untuk menjaga motivasi dari waktu ke waktu; diperlukan juga harapan dan keyakinan bahwa kita dapat menciptakan perbedaan dan perubahan. Untuk memperoleh keyakinan bahwa kita dapat menciptakan perubahan, kita harus memiliki dan merayakan kemenangan-kemenangan kecil sehingga pekerjaan HAM yang lebih besar dapat berjalan secara berkelanjutan.⁵³ Keseimbangan antara rasa marah, harapan, dan keyakinan bahwa kita dapat menciptakan perbedaan itulah yang terpenting. Saya berpendapat bahwa kesenjangan

antara cita-cita atau idealisme dengan praktik yang berlangsung saat ini dapat memunculkan kemarahan yang diperlukan untuk mengupayakan perubahan. Namun, wawasan tentang sejauh mana kita telah berhasil itulah yang dapat memberi kita harapan. Pada akhirnya, sekadar mengetahui bahwa kita dapat menciptakan perbedaan tidaklah cukup. Mengetahui secara lebih spesifik bagaimana kita telah berhasil menciptakan perbedaan itulah yang dapat memberi kita suntikan energi untuk terus berupaya. Bila hanya meratapi kesenjangan antara cita-cita ideal dan praktik yang ada, para akademisi dan pegiat organisasi HAM hanya akan terjerumus dalam pesimisme dan rasa putus asa. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menggunakan riset untuk menjaga harapan tanpa menjadi berpuas diri atau hilang rasa peduli.***

BAB 2

Respons terhadap Kritik

Cara Mengevaluasi Legitimasi dan Efektivitas HAM

SEORANG PENELITI AMNESTY INTERNASIONAL (AI) Belanda, Doutje Lettinga, bertugas mempelajari tren HAM di seluruh dunia. Ketika ditanya bagaimana dia pertama kali tertarik pada jenis pekerjaan ini, dia menjawab bahwa dia “selalu tahu” bahwa dia ingin bekerja dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun dia tumbuh besar dalam “konteks Eropa Barat,” dia sudah tertarik dengan isu HAM di negara-negara non-Barat sejak belia. Dia sangat tertarik mempelajari sejarah perbudakan dan perang kolonial karena hal itu tidak banyak dibahas di pendidikan formal yang dia ikuti. Meski minatnya terhadap perjuangan HAM sudah berlangsung lama, Lettinga menjadi berkecil hati karena “perangkat HAM yang luar biasa sekalipun masih tidak cukup efektif karena pelanggaran HAM masih terus berlangsung.”¹

Bersama koleganya, Lars van Troost, Lettinga telah membangun jembatan antara dunia aktivisme HAM dan dunia akademisi HAM. Dalam tiga tahun terakhir, van Troost dan Lettinga telah menyusun dan mengedit dua buku kumpulan tulisan untuk AI Belanda yang mengumpulkan para aktivis HAM dengan sejumlah akademisi atau kritikus HAM. Volume pertama yang berjudul *Debating the Endtimes of Human Rights* (Memperdebatkan Akhir HAM) diawali dengan esai Stephen Hopgood, “*The Endtime of Human Rights*” (Akhir dari HAM) yang didasarkan pada buku karya Hopgood dengan judul yang sama.² Volume kedua yang berjudul *Can Human Rights Bring Social Justice?: Twelve Essays* (Dapatkah HAM Menciptakan Keadilan Sosial?: Duabelas Esai) dibuka dengan

esai Samuel Moyn yang berjudul “*Human Rights in the Age of Inequality*” (HAM di Era Ketimpangan).³ Dalam menyusun kedua buku tersebut, AI dan pihak-pihak yang terlibat menunjukkan bahwa gerakan HAM sangat dekat dengan dan dipengaruhi oleh perdebatan akademik seputar HAM. AI menanggapi kritik yang ada dengan sangat serius dan berupaya menyediakan *platform* untuk menyampaikan dan memperdebatkannya.

Jauh dari kesan aktivis HAM yang angkuh dan puas diri, Lettinga cenderung reflektif dan peduli dengan legitimasi dan efektivitas kerja yang dia lakukan sehingga dia mau mengkritik diri sendiri. Pada bagian pendahuluan buku *Social Justice*, Lettinga dan van Troost mendorong evaluasi yang jujur terhadap HAM sebagai alat dan konsep.

Gerakan *Occupy*, *Indignados* di Yunani dan Spanyol—apa yang dapat ditawarkan HAM dalam melawan kebijakan pengetatan anggaran di era stagnasi ekonomi? Peristiwa Arab Spring—apa yang ditawarkan HAM kepada mereka yang menyerukan “pangan, kebebasan, keadilan sosial, dan martabat diri,” selain mempertahankan ruang publik untuk aksi protes yang damai dan perbedaan pendapat politik? Sebagian menganggap banyak hal yang dapat ditawarkan oleh HAM; sementara sebagian lainnya menganggap hampir tidak ada yang dapat ditawarkan oleh HAM.⁴

Dalam sebuah tulisan di blog yang merujuk bukunya, Lettinga menulis:

... dalam bentuk legalnya, HAM memiliki tujuan yang sederhana, yaitu memastikan tingkat perlindungan minimum yang esensial bagi mereka yang paling terpinggirkan—HAM tidak benar-benar mengupayakan redistribusi kekayaan, sumber daya, dan kekuatan. Karena itu, Samuel Moyn menyebut HAM sebagai “pendamping yang tak berdaya di era neoliberalisme” ... Moyn mempertanyakan efektivitas HAM dalam mewujudkan kesetaraan sosial-ekonomi yang substantif. Boleh jadi Moyn ada benarnya.⁵

Ketika saya membaca Lettinga dan van Troost, atau ketika saya mengingat kembali aktivis HAM yang saya wawancara untuk buku ini—seperti Heba Morayef, Sergio Aguayo, Lucia Nader, César Rodríguez-Garavito, dan Navi Pillay—saya pikir betapa mereka berbeda dari tipe pekerja HAM yang digambarkan oleh David Kennedy dalam esainya, *The International Human Rights Regime: Still Part of the Problem* (Rezim

Internasional HAM: Masih Bagian dari Permasalahan). Kennedy mengkritik pemujaan yang berlebihan terhadap HAM, dengan “mengatasnamakan nilai-nilai yang tak boleh diperdebatkan.” Dia berpendapat bahwa HAM “melebih-lebihkan singularitas visinya dan enggan menunjukkan ongkos yang harus dibayar untuk itu agar dapat dinilai untuk ditolak atau dipertimbangkan.”⁶

Lettinga dan van Troost menempatkan kemungkinan ongkos HAM sebagai topik utama yang perlu dinilai dan diperhitungkan. Saya heran mereka begitu *getol* mempertanyakan dan mengecilkan diri dan kerja-kerja mereka demi mendengar dan mempertimbangkan berbagai kritik terhadap kerja-kerja mereka. Lettinga dan van Troost bukanlah “pemuja buta” HAM seperti yang digambarkan Kennedy; mereka justru adalah orang-orang idealis, dan bagian dari menjadi idealis adalah menilai kualitas kerja diri menggunakan standar ideal yang paling tinggi.

Dalam tulisan mereka di buku tentang keadilan sosial, Lettinga dan van Troost mengutip dan mendukung pidato Patrick Corrigan dari AI Britania Raya pada 2013:

Ini adalah pesan kami—kami menginginkan dunia tanpa perang, tanpa penindasan, tanpa kerusakan lingkungan. Ini adalah pesan kami—kami menginginkan dunia tanpa kelaparan, tanpa kesenjangan yang memecah-belah kita. Para pemimpin G8 mengatakan bahwa mereka menginginkan perdagangan bebas. Kami menginginkan perdagangan yang adil dan kebebasan berpendapat. Para pemimpin G8 mengatakan bahwa mereka menginginkan globalisasi bisnis. Kami menginginkan globalisasi perdamaian dan keadilan. Mereka bilang ingin bermain-main dengan suka pajak. Kami menginginkan dunia tanpa berita 800 juta orang tidur dalam keadaan lapar setiap malam dan [tanpa berita] anak meninggal akibat kemiskinan tiap lima detik.⁷

Pidato ini menggambarkan kekuatan dan kefasihan beberapa aktivisme HAM. Pidato itu juga menunjukkan dilema yang dihadapi oleh gerakan yang mengabdikan dirinya pada cita-cita yang begitu tinggi hingga sulit mengakui kemajuan yang telah dicapai, kecuali 800 juta orang sudah tidak lagi tidur dalam keadaan lapar.

Dalam buku ini saya membahas kritik dari empat kelompok berbeda: pemerintahan represif, masyarakat umum, aktivis HAM, dan akademisi. Pada bab ini, saya akan fokus pada kritik HAM dari kalangan akademisi.

Hal itu dilakukan karena berbagai alasan. Salah satunya telah dikemukakan oleh Lettinga dan van Troost—suara para kritikus HAM keras dan jelas bergema di dalam gerakan HAM, memengaruhi citra diri para aktivis dan arah kerja mereka di masa mendatang.

Sebelum saya mulai membahas kritik terhadap gerakan dan kebijakan HAM, saya ingin terlebih dulu menekankan bahwa isu besar dalam dunia HAM bukanlah perselisihan di antara para akademisi HAM, melainkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan negara besar seperti Amerika Serikat yang menyebabkan kemunduran agenda HAM. Pada bab-bab selanjutnya, saya akan menyoroti pemerintah negara-negara yang telah mempersulit pekerja HAM di wilayahnya. Saya juga akan menyoroti jenis-jenis pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah dan apa yang dapat dilakukan oleh aktivis dan pemerintah dalam rangka memajukan HAM. Pembaca yang ingin langsung membaca soal isu besar terkait pelanggaran dan perlindungan HAM itu dapat melewati bab ini, yang akan lebih menyoroti perdebatan akademik.

Prevalensi Kritik

Kajian HAM telah menjadi bidang studi antardisiplin yang besar, yang diwarnai perdebatan di antara sarjana dan praktisi HAM. Sebagian besar perdebatan tersebut menyoal legitimasi dan efektivitas hukum, institusi, dan gerakan HAM. Seperti yang tampak dari tinjauan literatur tentang krisis HAM, kritik HAM berasal dari sumber yang beragam seperti pemerintah otoriter, ahli pascakolonial dan pascamodern, ahli hukum konservatif dan *think tank*, selain dari dalam gerakan HAM itu sendiri. Dalam rangka menyusun dan membongkar kritik tersebut, saya terbantu oleh tinjauan literatur yang dilakukan oleh César Rodríguez-Garavito, dari organisasi HAM Dejusticia dan Human Rights Lab di Universitas los Andes di Bogotá, Kolombia, meski saya sendiri membuat kategori dan memilah respons dengan cara yang berbeda.⁸ Laporan Human Rights Lab termasuk salah satu yang mengonfirmasi anggapan yang mendorong saya untuk menulis buku ini—kita tidak pernah kekurangan kritik terhadap HAM; kita justru kebanjiran kritik terhadap HAM.

Saya memiliki pendapat yang bertentangan dengan sejumlah kritik akademis terhadap HAM yang akan saya ulas pada bab ini. Karena itu, saya akan memaparkan lebih banyak alasan dan bukti untuk mendukung posisi saya pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Saya terutama

berargumen bahwa ide dan institusi HAM berasal dari sumber yang jauh lebih beragam daripada yang diklaim oleh para kritikus HAM. Gerakan dan aktivis HAM beserta cita-cita dan tujuannya bukanlah sekadar produk negara-negara di Kawasan Utara Dunia. Penelitian sejarah yang lebih luas, termasuk namun tidak terbatas pada penelitian saya sendiri soal Amerika Latin, menunjukkan bahwa suara dan aktor di Kawasan Selatan Dunia juga terlibat aktif dalam menuntut perlindungan HAM internasional. Negara-negara di Kawasan Selatan Dunia juga terlibat dalam membangun berbagai institusi yang membantu penegakan HAM. Penelitian yang akan saya ulas pada Bab 3 dan 4 mencatat bahwa wacana dan institusi perlindungan HAM internasional sudah muncul pada tahun 1940-an, bukan tahun 1970-an seperti yang dikemukakan oleh Samuel Moyn. Penelusuran asal-usul HAM hingga tahun 1940-an berperan penting dalam menunjukkan asal-usul gerakan HAM yang lebih luas serta institusionalisasi yang lebih lama. Selama 60 tahun terakhir, para pembela HAM telah menanamkan ide-ide mereka di beragam hukum dan institusi, dan sering kali juga berkiprah di institusi-institusi tersebut. Karena asal-usulnya yang beragam dan proses institusionalisasinya yang lebih panjang, gerakan HAM beserta institusi terkait tidak sedang mengalami kemunduran, penuaan, atau kematian sebagaimana yang banyak dituduhkan oleh kritikus HAM. Perjuangan HAM dewasa ini sama pentingnya dengan perjuangan di masa lalu.

Terakhir, saya akan menunjukkan bahwa hukum, institusi, dan gerakan HAM sebenarnya lebih efektif daripada klaim yang selama ini dituduhkan. Perbedaan evaluasi atas efektivitas HAM yang saya lakukan dengan penilaian para kritikus disebabkan oleh banyak faktor yang akan saya bahas lebih jauh pada Bab 5. Aspek terpenting dari perbedaan pendapat antara saya dan para kritikus tersebut terletak pada metode perbandingan, khususnya apa yang saya sebut sebagai “perbandingan dengan yang ideal.” Persoalan mengenai perbandingan ini akan saya bahas lebih lanjut pada bab ini.

Legitimasi dan HAM

Martha Finnemore mengingatkan kita bahwa legitimasi adalah “konsep sosial dan relasional.” Dengan kata lain, aktor yang kuat sekalipun tidak dapat menciptakan sendiri legitimasi; legitimasi hanya dapat diberikan oleh orang lain, termasuk oleh sesama ataupun “mereka yang tengah dikuasai.”⁹ Penulis lain, Juan Linz, mengatakan bahwa legitimasi adalah

“keyakinan bahwa, terlepas dari kekurangan dan kegagalannya, institusi politik yang ada saat ini lebih baik dibandingkan bentuk institusi lain yang mungkin dapat didirikan sebagai alternatif, sehingga ia dapat menuntut kepatuhan.”¹⁰

Dengan memahami legitimasi seperti ini, kita dapat memahami hukum dan institusi HAM. Linz mengingatkan kita bahwa, meski legitimasi adalah soal perbandingan, tapi perbandingannya belum tentu harus dengan yang ideal. Kita boleh jadi berbeda pendapat soal institusi HAM seperti ICC, misalnya. Kita boleh jadi merasa bahwa institusi tersebut memiliki kekurangan dan mengalami kegagalan, tetapi kita tetap percaya bahwa institusi semacam itu tetap perlu dipatuhi. Bagi Linz, sebuah institusi tidak serta merta menjadi tidak sah hanya karena kita dapat membayangkan alternatif yang lebih ideal. Institusi dapat memperoleh legitimasi, meski tidak secara utuh, karena kita menilai institusi tersebut lebih baik dari institusi lain yang sebenarnya dapat didirikan. Lebih lanjut Linz mengatakan bahwa para cendekiawan memegang peran penting dalam “merumuskan, mengelaborasi, dan menyebarkan” ide-ide soal legitimasi.¹¹ Saya setuju dengan Linz mengenai pengaruh cendekiawan terhadap persepsi soal legitimasi hukum dan institusi HAM, dan karenanya pada buku ini saya akan secara khusus memberi perhatian kepada perspektif para cendekiawan tersebut.

Penekanan pada legitimasi sebagai kepercayaan pada institusi dan apakah institusi tersebut patut dipatuhi tidak begitu relevan ketika kita membicarakan *gerakan HAM* karena kita tidak mengharapkan gerakan itu dipatuhi. Definisi legitimasi yang lebih baik dalam kaitannya dengan gerakan dan *organisasi* nonpemerintah (NGO) mencakup persepsi umum bahwa tindakan yang diambil sebuah entitas merupakan tindakan yang benar atau pantas.¹² Legitimasi menjadi semacam perbandingan yang dibuat oleh orang-orang. Karenanya, yang menjadi pertanyaan kunci adalah—absah dibandingkan dengan apa? Sama halnya dengan efektivitas, organisasi dapat menjadi lebih atau kurang absah jika dibandingkan dengan yang lebih ideal, atau dibandingkan dengan aturan dan organisasi yang sudah ada. Misalnya, kita mungkin memiliki cita-cita ideal, yaitu organisasi HAM yang didanai sepenuhnya oleh sumbangan kecil masyarakat setempat dan membandingkan organisasi yang ada beserta pendanaannya dengan cita-cita tersebut. Alternatifnya, kita dapat membandingkan organisasi yang ada dengan organisasi lainnya. Dalam hal ini, kita dapat bertanya seberapa absah suatu organisasi HAM di suatu

negara dibandingkan, misalnya, dengan gereja atau organisasi lain di negara tersebut.

Kita juga dapat membandingkan legitimasi wacana HAM dengan wacana dan gagasan politik lain yang ada saat ini. Ini adalah jenis perbandingan yang dilakukan oleh akademisi dan aktivis HAM asal Brasil Paulo Sérgio Pinheiro ketika mengatakan, “Saya percaya tidak ada bahasa dan seperangkat prinsip lain yang, di tengah keragaman universal kita, memungkinkan penghormatan terhadap standar bagi manusia untuk hidup dengan bermartabat dan terhormat. Sampai sekarang, belum ada referensi lain yang ditemukan.”¹³ Pinheiro membandingkan cita-cita ideal HAM dengan alternatif lain yang tersedia dalam rangka menilai legitimasi HAM, dan bukan membandingkannya dengan cita-cita ideal yang dapat kita bayangkan namun belum kita temukan di dunia. Dia menyarankan para ahli, ketika membahas alternatif HAM, mereka sebaiknya menyebutkan alternatif-alternatif tersebut dengan gamblang supaya pembaca juga dapat mengevaluasinya.

Salah satu tantangan terbesar terhadap legitimasi gerakan dan hukum HAM adalah argumen bahwa gagasan HAM berasal dari negara-negara di Kawasan Utara Dunia dan dipaksakan kepada negara-negara Kawasan Selatan Dunia. Ketika membahas soal siapa yang menetapkan agenda HAM dunia, sarjana seperti Hopgood dan Kennedy berargumen bahwa perhatian terhadap isu-isu HAM banyak berasal dari negara-negara Barat yang berkuasa—sehingga muncul apa yang disebut Kennedy sebagai asal-usul HAM yang “ternodai”.¹⁴ Argumen ini tidaklah baru, tetapi makin banyak diperkuat oleh buku-buku belakangan.¹⁵ Moyn, misalnya, berargumen bahwa perdebatan soal HAM muncul pada tahun 1970-an, bukan tahun 1940-an, dan dia mengaitkan perdebatan tersebut dengan Presiden AS Jimmy Carter.¹⁶ Karena kesenjangan antara Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948 dengan gerakan-gerakan HAM besar yang muncul pada tahun 1970-an, Moyn melewatkan pentingnya era 1940-an, 1950-an, dan 1960-an.¹⁷ Dia menyebutkan bahwa rezim HAM PBB “sudah mati sejak lahir” dan bahwa sistem Inter-Amerika merupakan “penerima manfaat, dan bukan pendorong transformasi ke arah HAM.”¹⁸ Ada banyak masalah dengan sudut pandang ini, sebagaimana yang akan dijelaskan pada Bab 3 dan 4. Moyn terutama tidak memahami apa yang dipelajari aktivis akar rumput di era 1970-an—bahwa traktat dan institusi HAM PBB dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) yang dibentuk

sebagai wujud komitmen mereka dalam piagam HAM merupakan sumber daya yang penting bagi mobilisasi di tahun-tahun selanjutnya.

Penuturan Moyn yang keliru tentang sejarah HAM menempatkan Amerika Serikat dan Jimmy Carter sebagai aktor yang seolah-olah paling berjasa atas lahirnya perlindungan HAM internasional. Moyn keliru menafsirkan kebijakan HAM di Amerika sebagai prestasi Carter semata, alih-alih sebagai hasil dari interaksi para aktivis Amerika Latin dan perhatian terhadap HAM yang baru muncul di kongres AS dan pemerintahan Carter. Kebijakan HAM yang penting dari pemerintahan Carter membantu *mengaktifkan dan pada akhirnya mengonsolidasi*, tetapi bukan yang menginisiasi perkembangan institusional yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun di Amerika. Apabila kita menghitung perkembangan tersebut sebagai prestasi Carter semata, kita mengabaikan perkembangan intelektual dan institusional tersebut. Moyn juga mengatakan bahwa HAM muncul pada tahun 1970-an dengan mengabaikan kaitan antara gerakan HAM dan proses dekolonisasi yang terjadi pada tahun 1960-an. Moyn menganggap bahwa dekolonisasi adalah soal kedaulatan dan *bukan* soal hak; tetapi, sebagaimana yang akan tampak pada Bab 4, sejarawan dekolonisasi dan HAM terkemuka mengatakan bahwa dekolonisasi merupakan soal kedaulatan dan HAM sekaligus.¹⁹

David Kennedy mengemukakan argumen yang berkaitan. Dia mengatakan bahwa HAM sebagai sebuah “teks”—DUHAM—muncul setelah Perang Dunia II tetapi “sebagai suatu tata kelola, profesi, gerakan, praktik ideologis yang universal, HAM lahir lebih belakangan, yaitu pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, ketika pendulum selama satu generasi berayun ke arah Thatcher, Reagan, dan politik neo-liberalisme.”²⁰ Namun sebagaimana yang akan kita lihat pada Bab 3 dan 4, HAM pada tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an jauh dari sekadar teks belaka. Ia merupakan serangkaian perjuangan yang saling berhubungan—pelembagaan HAM di PBB, dekolonisasi, perlawanan terhadap apartheid, dan perlawanan terhadap kudeta militer asing. Selain itu, perjuangan tersebut sering kali dipimpin oleh negara-negara di Kawasan Selatan Dunia melawan negara-negara besar di Kawasan Utara Dunia. Meskipun penjelasan mengenai “asal-usul HAM yang keliru” berbeda-beda bentuknya, semuanya sama-sama mengabaikan perjuangan tersebut dan menganggap bahwa negara-negara di Afrika, Amerika Latin, Asia, dan Timur Tengah tidak akan memikirkan HAM kecuali terlebih dahulu didorong dan diberi contoh oleh negara-negara di Kawasan Utara Dunia.

Asal-usul sejarah gerakan HAM jauh lebih rumit dan menarik daripada yang ditunjukkan oleh catatan Moyn dan Kennedy. Pada kenyataannya, selama sebagian besar periode pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Inggris malah menjadi hambatan utama bagi kemajuan HAM, alih-alih menjadi pendukung utama.²¹ Pada waktu-waktu tertentu, kebijakan luar negeri AS mendukung perlindungan HAM internasional, tapi di lain waktu justru menghalangi atau melemahkannya.²² Implikasi politik dari perdebatan tentang asal-usul gerakan HAM sangat krusial. Memahami sejarah yang lebih kompleks diperlukan guna memahami kondisi HAM saat ini dan membayangkan masa depannya. Banyak orang saat ini berputus asa karena melihat negara-negara seperti Amerika Serikat dan Britania Raya makin menjauh dari dukungan terhadap HAM. Kekhawatiran mereka tidak sepenuhnya keliru—proyek HAM lebih mungkin berkembang ketika mendapatkan dukungan dari negara-negara besar. Tetapi negara-negara besar tersebut tidak pernah menjadi sumber dukungan yang konstan, atau bahkan utama, bagi perlindungan HAM internasional. Hopgood mengatakan bahwa saat ini kita berada di “akhir era HAM” karena dia percaya bahwa HAM berasal dari negara-negara besar di Kawasan Utara Dunia dan karena negara-negara tersebut sedang kehilangan kekuatannya di dunia baru yang multi-kutub, sehingga perhatian terhadap HAM juga makin menurun. Namun, karena sejarah gerakan HAM sebenarnya jauh lebih beragam dari yang digambarkan Hopgood, masa depan HAM juga lebih menjanjikan.

Keyakinan bahwa gagasan HAM berasal dari Kawasan Utara Dunia mengabaikan perbedaan dan pertentangan seputar HAM di berbagai negara dan kawasan di dunia. Keyakinan tersebut juga membuat legitimasi dan otentisitas aktivis HAM di Kawasan Selatan Dunia dipertanyakan. Kritik sejarah para sarjana ini tanpa disengaja menggemakan wacana banyak pemerintahan represif di Kawasan Selatan Dunia yang mencoba melemahkan aktivis HAM lokal dengan menyebut mereka sebagai “agen asing” yang membawa ide-ide yang tidak patut dari luar negeri ke dalam perdebatan politik nasional. Dengan menghidupkan kembali kontribusi para aktivis dan diplomat dari negara-negara Kawasan Selatan Dunia, para aktivis HAM akan mendapatkan suntikan energi untuk melihat diri mereka sebagai penerus tradisi dan ikhtiar di negara mereka sendiri, dan bukannya mengimpor gagasan dari luar negeri.

Kita memahami perdebatan yang kompleks seputar politik dan HAM di dalam negeri Amerika Serikat. Kita dapat melihat perbedaan antara

politik Jimmy Carter yang bekerja keras untuk memasukkan isu-isu HAM ke dalam kebijakan luar negeri AS, dan George W. Bush, yang justru mengizinkan penyiksaan, penculikan, dan penahanan rahasia tanpa secara terbuka menyarankan kebijakan-kebijakan tersebut. Kita dapat mengenali potensi bahaya dalam diri Donald Trump, yang secara terbuka menyatakan bahwa dia percaya “penyiksaan dapat berhasil” dan mengatakan bahwa dia akan menggunakan teknik interogasi *waterboarding* dan bentuk-bentuk penyiksaan lain yang “lebih buruk”.²³ Terdapat variasi yang sama kompleksnya di banyak negara Kawasan Selatan Dunia ketika mengalami pergantian pemerintahan, khususnya, ketika mengalami transisi dari pemerintahan yang demokratis ke pemerintahan yang otoriter. Seperti yang kita dengar dari Heba Morayef di awal buku ini, dalam hitungan beberapa tahun saja, dia mengalami pergeseran dari masa ketika HAM menjadi bahan pembicaraan semua orang ke masa ketika dia bahkan takut untuk memberi tahu orang-orang bahwa dia bekerja di bidang HAM. Hal-hal serupa, meskipun tidak sedramatis itu, juga memengaruhi banyak aktivis HAM di negara-negara Kawasan Selatan Dunia dari India hingga Thailand dan Myanmar. Negara-negara Amerika Latin pada waktu tertentu berada di garda terdepan dalam mengusung gagasan perlindungan HAM internasional, tetapi pada lain waktu juga turut menjadi target dari gerakan HAM. Contohnya, saya pernah menulis tentang transisi Argentina dari “negara pariah” menjadi tokoh protagonis HAM di dunia.²⁴ Perbedaan penting juga ditemukan di berbagai kawasan di Selatan Dunia. Organisasi-organisasi regional Amerika Latin dan Afrika misalnya, lebih mendukung norma-norma regional untuk memajukan demokrasi dan HAM ketimbang organisasi-organisasi di Asia, yang lebih memegang teguh norma-norma kedaulatan tradisional.²⁵ Saya akan mendokumentasikan klaim-klaim ini dengan lebih detail pada bab 3 dan 4.

Legitimasi dan Efektivitas sebagai Soal Perbandingan

Setiap pembahasan tentang legitimasi atau efektivitas pada dasarnya merupakan upaya memperbandingkan. Suatu institusi atau kebijakan hanya dapat dianggap absah atau efektif jika dibandingkan dengan institusi dan kebijakan yang lain. Oleh karena itu, setiap pembahasan soal legitimasi dan efektivitas perlu dimulai dengan memperhatikan pertanyaan utamanya: Dibandingkan dengan apa?

Sumber perselisihan terbesar di antara para ahli HAM dan aktivis gerakan HAM yang luput diperhatikan adalah isu pengukuran: perbedaan

antara mereka yang melakukan komparasi empiris dengan mereka yang membuat komparasi dengan yang ideal.²⁶ Kita dapat menyebut jenis komparasi tersebut sebagai lensa atau tolok ukur. Komparasi dengan yang ideal membandingkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi di dunia yang ideal, sedangkan perbandingan empiris membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang terjadi di negara yang sama di masa lalu atau dengan apa yang terjadi di negara lain di saat yang sama.

Kedua tolok ukur tersebut berakar dari perbedaan umum di kalangan filsuf: perbedaan antara teori ideal dengan teori non-ideal. Bedanya adalah pada penyusunan teori tentang cita-cita etis yang ideal dengan teori tentang apa yang mungkin dilakukan pemerintah atau individu di dunia yang tidak ideal.²⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh kolega saya Mathias Risse, “Teori ideal mengeksplorasi seperti apa dunia ini nantinya bila semua orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Teori non-ideal memberi tahu apa yang seharusnya kita lakukan karena orang lain tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan.”²⁸ Sejumlah sarjana yang saya bahas pada bab ini menggeluti teori ideal sementara saya lebih tertarik pada teori non-ideal. Dengan teori non-ideal, saya membuat komparasi empiris menggunakan data kuantitatif dan kualitatif seputar HAM. Namun, seperti halnya orang yang menggunakan teori ideal, orang yang sama-sama menggunakan teori non-ideal juga dapat sampai pada kesimpulan yang berbeda-beda. Bagian kedua buku ini akan membahas data-data dan isu empiris tersebut serta meninjau sejumlah penelitian yang sudah ada tentang efektivitas institusi, advokasi, dan kebijakan HAM.

Perbedaan antara teori ideal dan non-deal berkaitan dengan apa yang ditulis Amartya Sen dalam bukunya *The Idea of Justice*, yaitu perbedaan antara pendekatan optimal dan maksimal dalam mencapai keadilan.²⁹ Teori Sen menggunakan pendekatan optimal, yaitu mengambil alternatif terbaik di antara alternatif-alternatif lain yang ada di ranah kemungkinan, sebagai lawan dari pendekatan maksimal dalam mencapai keadilan yang menekankan keadilan sempurna di dunia yang ideal. Pemahaman saya soal perbandingan dengan yang ideal berkaitan dengan teori keadilan maksimal, sementara perbandingan empiris berkaitan dengan pendekatan optimal atau alternatif-alternatif di ranah kemungkinan.³⁰ Dalam buku ini, saya akan mengadaptasi gagasan tersebut ke bidang HAM untuk mendukung argumen saya ke arah kebijakan HAM optimal. Pendekatan

ini sejalan dengan gagasan “posibilisme” Hirschman—mengajak kita untuk fokus pada alternatif-alternatif di ranah kemungkinan (*possible*), meski tidak selamanya pasti (*probable*).

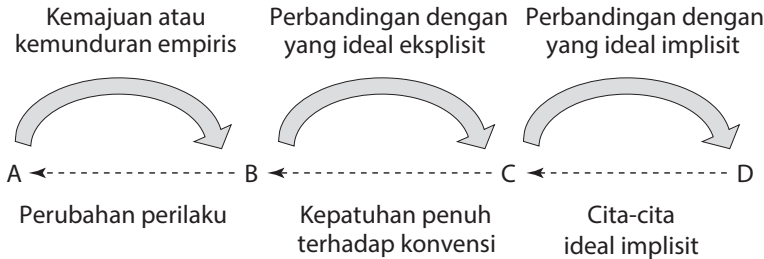
Di antara klaim penting dari para ahli yang melakukan perbandingan dengan yang ideal adalah: bahwa HAM tidak mengalami kemajuan; bahwa saat ini ada lebih banyak penderitaan daripada sebelumnya; bahwa HAM merupakan klaim “minimal”; bahwa HAM “tidak berdaya dalam mengatasi ketimpangan”; bahwa “segala upaya” negara-negara yang menuntut warganya atas kejahatan HAM “secara etis tidak dapat didukung,” dan; bahwa pengungsi tidak pernah diperlakukan sebegitu tidak adil. Masing-masing argumen ini akan dibahas di bawah ini. Karena semua klaim ini sangat negatif, pembaca mungkin merasa aneh bila saya menyebutnya sebagai perbandingan dengan yang ideal. Tetapi pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada setiap klaim tersebut adalah—dibandingkan dengan apa?

Dalam bukunya *The Twilight of Human Rights* (Senja Kala HAM), Eric Posner berulang kali menekankan bahwa berlanjutnya represi dan pelanggaran HAM merupakan bukti bahwa hukum HAM tidak berjalan dan harus ditinggalkan. Sebagai tanggapan terhadap buku Posner, dalam sebuah unggahan blognya, Beth Simmons menunjukkan bahwa Posner “tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaan: dibandingkan dengan apa?”³¹ Simmons berpendapat bahwa cara kita mengonseptualisasi efektivitas menjadi lensa yang memengaruhi cara kita memaknai suatu kesimpulan. Apakah saat ini memang senja kala HAM seperti yang diklaim Posner atau apakah metode yang dia gunakan saja yang memberinya lensa gelap sehingga semua yang terlihat melalui lensa itu tampak suram?

Perbandingan Empiris versus Perbandingan Ideal dalam Mengukur Efektivitas

Saya membuat perbandingan empiris dengan mengonseptualisasi apa yang saya sebut sebagai “kontinum kepatuhan (*compliance continuum*)” HAM (lihat gambar 2.1). Bertolak dari jenis pelanggaran HAM tertentu, saya melihat bagaimana praktik tersebut berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, saya membandingkan diskriminasi perempuan di tempat kerja lima belas tahun yang lalu dengan kondisi saat ini. Saya menggunakan kontinum kepatuhan untuk membedakan secara visual beragam pendekatan dalam mengukur kemajuan atau kemunduran praktik-praktik HAM.³² Salah satu keunggulan metode dengan perbandingan empiris ini

adalah dapat mendeteksi kemajuan dan kemunduran. Sementara perbandingan ideal tidak dapat melakukannya.



GAMBAR 2.1. Kontinum kepatuhan HAM.

Para akademisi bukanlah satu-satunya yang mengandalkan perbandingan ideal; aktivis HAM juga cenderung lebih menyukai cara berpikir semacam ini. Dalam pidato menggugah yang dikutip di awal bab ini, anggota AI Patrick Corrigan mengatakan “Kami menginginkan dunia tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tanpa ketimpangan yang memisahkan kita ... Kami menginginkan dunia tanpa berita 800 juta orang tidur dalam keadaan lapar setiap malam dan [tanpa berita] anak meninggal akibat kemiskinan tiap lima detik.”³³

Saya sepakat dengan sentimen yang dikemukakan Corrigan. Namun, pertanyaannya kemudian adalah—jika kita menginginkan dunia yang seperti itu, bagaimana kita dapat mengukurnya agar tahu apakah kita makin dekat ke sana? Selain itu, bagaimana kita dapat menggunakan pengukuran tersebut untuk mempelajari cara apa yang berhasil dan gagal dalam mencapai kemajuan HAM? Pengamatan yang mendetail terhadap pernyataan Corrigan soal kelaparan menunjukkan bagaimana pengukuran empiris dapat menunjukkan efektivitas. Laporan tahunan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (The UN Food and Agriculture Organization, FAO) pada 2013, ketika Corrigan menyampaikan pidatonya, sepertinya menjadi landasan pernyataan tersebut. Laporan itu mencantumkan jumlah penderita gizi kurang yang mendekati angka yang disebutkan Corrigan, yaitu 800 juta orang yang tidur dalam keadaan lapar.³⁴ Dengan menggunakan perbandingan ideal (dibandingkan dengan dunia tanpa kelaparan), kita masih tertinggal 800 juta orang untuk mencapai tujuan kita—hasil yang sungguh negatif. Namun, dengan menggunakan sumber data yang sama, kita dapat membuat perbandingan empiris dari tahun 1990 sampai 2015,

yang menunjukkan adanya kemajuan. Antara tahun 1990 dan 2015 telah terjadi penurunan jumlah absolut orang yang mengalami kelaparan di dunia, serta jumlah orang yang mengalami kelaparan sebagai persentase dari total populasi di dunia. Di kawasan negara-negara berkembang, yang dihuni persentase terbesar penderita kelaparan, terjadi penurunan 42 persen prevalensi penderita gizi kurang antara tahun 1990-92 sampai 2012-14. Sekitar satu dari delapan orang masih menderita kekurangan gizi kronis di kawasan ini pada 2012-14, tetapi jumlah tersebut turun dari seperempat populasi pada 1990-92. Beberapa kritik akan mengaitkan penurunan ini dengan Tiongkok, yang memang telah berhasil menurunkan angka kelaparan secara substansial. Namun ternyata Amerika Latin merupakan kawasan negara berkembang yang paling sukses dalam menurunkan angka kelaparan; angka absolut penderita kelaparan serta prevalensi kelaparan menurun dari 15 persen menjadi 5 persen. Afrika Sub-Sahara merupakan kawasan yang paling tidak berhasil—prevalensi kekurangan gizi menurun 10 persen antara 1990-92 dan 2014-16, namun jumlah absolut penderita gizi kurang meningkat.³⁵ Pengukuran kemajuan yang berbeda dalam kasus Afrika Sub-Sahara—persentase versus jumlah absolut—juga mengingatkan kita bahwa perbandingan empiris juga bukanlah hal yang sederhana sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan presisi.

Pernyataan bahwa 800 juta orang tidur dalam keadaan lapar sangat mengejutkan. Hal itu tentu dapat membuat banyak orang geram terhadap ketidakadilan. Pernyataan bahwa jumlah penderita kelaparan turun 42 persen sejak 1990 dan penjelasan soal perbedaan antara penurunan persentase dan penurunan jumlah absolut mungkin membuat orang bosan. Namun kebingungan dan kebosanan bukanlah satu-satunya reaksi yang mungkin muncul. Menunjukkan efektivitas upaya-upaya masa lalu dalam mencapai hasil seperti contoh di atas juga dapat memberi harapan dan keyakinan kepada orang-orang bahwa mereka dapat menciptakan perubahan. Harapan dan keyakinan tersebut sangat penting dimiliki, sebagaimana diingatkan oleh Alinsky. Ketika dihadapkan kepada tantangan kelaparan di berbagai belahan dunia, kita dapat menggunakan perbandingan empiris untuk menunjukkan upaya apa yang telah berhasil dan apa yang masih perlu ditingkatkan dalam rangka memberantas kelaparan.

Penggunaan Perbandingan Ideal Implisit versus Eksplisit untuk Mengevaluasi Legitimasi dan Efektivitas

Banyak ahli teori ideal secara eksplisit menyatakan cita-cita ideal yang digunakan ketika melakukan perbandingan. Sebagai contoh, banyak aktivis HAM memberi tahu kita bahwa yang mereka cita-citakan adalah kepatuhan penuh pada hukum. Salah satu hukum tersebut menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama harus menerima upah yang setara; jadi, jika kita menggunakan metrik teori ideal, banyak aktivis yang tidak puas sampai hal itu benar-benar terwujud sepenuhnya.³⁶ Di sisi lain, orang yang melakukan perbandingan empiris akan mengatakan bahwa pada 1981 perempuan di AS mendapatkan 59 sen untuk setiap dolar yang didapatkan laki-laki, sementara pada 2015, perempuan mendapatkan 80 sen—bukti adanya kemajuan HAM.³⁷ Seperti yang ditunjukkan contoh tadi, situasi yang sama dapat dianggap sama sekali tidak memuaskan oleh orang yang melakukan perbandingan ideal dan, di sisi lain, dapat dianggap sebagai sebuah kemajuan oleh orang yang melakukan perbandingan empiris.

Terdapat kelompok ahli teori ideal lain yang dasar perbandingannya implisit—mereka tidak memberi tahu cita-cita ideal apa yang digunakan ketika membandingkan dunia saat ini sehingga kita harus mencari sendiri idealisme yang tersembunyi dalam kritik mereka. Moyn, misalnya, kritis terhadap rezim HAM saat ini dengan mengatakan bahwa rezim tersebut “minimalis” dan terlibat dalam “anti-politik,” namun dia tidak pernah mengungkapkan gagasan ideal apa yang digunakan untuk membandingkan HAM saat ini.³⁸ Kolega saya di Harvard Law School, David Kennedy, juga tidak mengungkapkan secara eksplisit landasan ideal yang dia gunakan dalam melakukan perbandingan. Dia mengkritik HAM karena “pandangan tradisi HAM yang sempit dalam melihat emansipasi manusia,” tetapi tidak menjelaskan alternatifnya.³⁹ Kita diajak membayangkan emansipasi manusia yang lebih luas, tetapi Kennedy tidak pernah memberi tahu kita tepatnya alternatif apa yang dia inginkan.

Moyn juga mengkritik HAM karena “tidak berdaya melawan ketimpangan” dan hanya “menciptakan dasar perlindungan tanpa membuat langit-langit (batas atas) ketimpangan.”⁴⁰ Kritik tersebut tampak meyakinkan, hingga Lettinga sekalipun, aktivis dan ahli HAM yang cerdas, percaya bahwa Moyn mungkin ada benarnya, dan mendedikasikan satu buku untuk membahas kritik tersebut.⁴¹ Tetapi mari kita tinjau secara saksama seluruh perbandingan dalam klaim-klaim Moyn. HAM “tidak

berdaya melawan ketimpangan” dibandingkan dengan *platform* politik atau rangkaian ide yang mana? Moyn tidak pernah memberi tahu kita. Ketika membaca seluruh karyanya, pembaca tidak menemukan gagasan yang jelas tentang apa yang disarankan atau diyakini oleh Moyn. Dengan membaca pesan tersirat dalam *The Last Utopia* (Utopia Terakhir), saya berasumsi bahwa Moyn adalah mantan Marxis yang kecewa; saya menduga, gagasan ideal yang dia cita-citakan adalah semacam perubahan revolusioner yang radikal. Jika benar, tentu tidak masalah, tetapi saya lebih suka jika dia menyatakannya secara eksplisit sehingga saya tidak harus menduga-duga alternatif apa yang sedang dia bicarakan ketika membuat perbandingan. Namun dalam sebuah percakapan, dia memberi tahu saya bahwa dia adalah seorang sosial demokrat. Hal ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan bagi saya. Jika Moyn membandingkan HAM dengan cita-cita dan kebijakan demokrasi sosial, tidakkah dia tahu bahwa ide-ide demokrasi sosial, seperti yang dianut di Skandinavia, dan ide-ide HAM tidak saling bertentangan? Gagasan HAM sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda sosial demokrasi.

Cita-cita ideal lain yang Moyn bandingkan dengan HAM adalah “langit-langit ketimpangan.”⁴² Lettinga dan van Troost menganggap istilah itu menarik. Mereka membahasnya pada bab bukunya yang membahas soal keadilan sosial. Mereka menyerukan visi keadilan “ketika Amnesty tidak hanya sebatas menuntut hak-hak dasar, tetapi juga meyakini bahwa ada langit-langit atau batas atas ketimpangan yang diperbolehkan dalam rangka mewujudkan HAM.”⁴³ Kedengarannya bagus, tetapi apa maknanya? Moyn tidak pernah memberi contoh di dunia nyata bagaimana rupa batasan atau langit-langit yang dia maksud, di mana batasan semacam itu coba diadvokasi atau diimplementasi dan bagaimana dampaknya. Barangkali, yang dianggap ideal adalah semacam usulan pakar manajemen, bahwa gaji manajer tidak boleh melebihi, misalnya, dua puluh kali gaji pekerja. Ini merupakan usulan yang menarik. Saya ingin tahu apakah hal tersebut dijadikan kebijakan nasional oleh negara-negara di dunia. Saya melihat beberapa LSM mengadvokasi isu ini di beberapa negara seperti Kanada sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan.⁴⁴ Alternatif lainnya, langit-langit atau batasan yang dimaksud dapat berupa kebijakan kesehatan, seperti pembatasan jatah jenis operasi tertentu yang mahal sampai semua orang mendapatkan layanan kesehatan dasar. Namun Moyn tidak pernah memberikan rincian apa pun soal kebijakan yang dia advokasi. Dia menganggap HAM minimal dan tidak berdaya

dibandingkan idealisme yang tidak jelas. Kita perlu tahu lebih banyak. Saya bukannya ingin membungkam perdebatan berdasarkan perbandingan dengan nilai-nilai ideal, tetapi ingin memperkuat dan memperdalam perdebatan ini dengan meminta orang-orang yang membuat perbandingan semacam ini untuk mengakui dan memberikan detail yang lebih konkret mengenai alternatif yang mereka advokasikan.

Beberapa ahli teori kritis merasa bahwa mereka tidak seharusnya diwajibkan untuk memberikan usulan alternatif. Satu minggu pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, saya ambil bagian dalam diskusi panel soal Sejarah dan HAM di Mahindra Humanities Center di Harvard. Pembicara pertama dalam diskusi tersebut adalah Bernard Harcourt, seorang profesor hukum dan ilmu sosial di Columbia University. Harcourt mengatakan bahwa kita sedang menyaksikan “memudarnya atau matinya wacana HAM di Amerika.” Dia menjelaskan bahwa selama ini dia “selalu yakin betul” bahwa bukan tugas akademisi dan kritikus untuk memberikan usulan konkret dalam rangka menciptakan perubahan, atau yang dia sebut “lanskap politik alternatif.” Harcourt melanjutkan, “Saya selalu menolak keras gagasan bahwa kita, para pemikir kritis, harus dipaksa menyediakan solusi setelah memberikan kritik, bahwa kita harus mengusulkan cara melangkah ke depan, bahwa kita harus memecahkan masalah, bukan hanya mengidentifikasinya.” Menurutny, sudah cukup bagi mereka untuk “membersihkan bidang ini dari ilusi yang berbahaya” dan “kesalahan nominalis.”⁴⁵

Tetapi bagaimana kita dapat melangkah maju jika hanya kritik yang kita punya? Saat ini, baik di Amerika Serikat maupun di dunia, menyatakan bahwa HAM telah mati tanpa mengusulkan apa yang harus kita lakukan tak ubahnya resep untuk kemandekan dan keputusasaan. Rasa putus asa jugalah yang dirasakan sebagian peserta diskusi malam itu setelah mendengarkan pemaparan Harcourt.

Perbandingan Ideal Implisit dengan Pernyataan Kausal Tersembunyi

Para pencari perbandingan yang jelas frustrasi karena perbandingan ideal terkadang digabungkan dengan pernyataan kausal tersembunyi. Pernyataan kausal tersembunyi biasanya berupa petunjuk bahwa penulis, misalnya, mengetahui “akar masalahnya” namun tidak mengungkapkannya. Soal ini David Kennedy ahlinya. Kennedy menulis bahwa, dalam kerja-kerja HAM, “Kita sering mengalami masalah ketika mengakui

penderitaan orang lain tanpa memutus komitmen pada sistem yang memproduksinya.”⁴⁶ Pernyataan bahwa suatu “sistem” memproduksi penderitaan adalah pernyataan kausal. Kennedy mengisyaratkan bahwa dia mengetahui sistem yang memproduksi penderitaan tersebut tetapi tidak memberi tahu kita apa sebenarnya sistem itu. Di sini dia mengisyaratkan bahwa sistem yang dia maksud sepertinya adalah kapitalisme, tetapi dia tidak pernah mengklarifikasi argumennya. Bagi saya, ketika akademisi membuat pernyataan kausal, mereka harus menyatakannya dengan jelas dan bertanggung jawab dengan menyediakan bukti-bukti untuk mendukung argumen mereka.

Moyn juga menyertai perbandingan idealnya dengan argumen kausal tersembunyi, yang menyiratkan bahwa HAM boleh jadi turut menyumbang kebangkitan fundamentalisme pasar, “atau setidaknya meredupnya konsep negara kesejahteraan,” karena “hubungan kronologis yang tampaknya sangat dekat antara kebangkitan HAM dan ‘neoliberalisme.’”⁴⁷ Saya akan membahas klaim Moyn tersebut di bagian berikut.

Neoliberalisme dan HAM

Perdebatan soal persekongkolan HAM dengan neoliberalisme sering menyisipkan perbandingan ideal implisit dengan pernyataan kausal tersembunyi. Pernyataan kausal tersembunyi dalam hal ini menyiratkan bahwa kebijakan HAM, entah bagaimana, mengarah pada atau memungkinkan penerapan kebijakan-kebijakan neoliberal. Belakangan ini, di beberapa kalangan akademisi dan pengambil kebijakan, khususnya di bidang humaniora dan studi hukum kritis, klaim bahwa HAM telah “bersekongkol” dengan kebijakan ekonomi neoliberal sudah menjadi hal yang biasa.⁴⁸ Costas Douzinas, misalnya, menulis bahwa konsepsi Barat tentang HAM telah “menjadikannya pendamping yang cocok bagi neoliberalisme.”⁴⁹ Mary Nolan berpendapat bahwa HAM dan neoliberalisme atau fundamentalisme pasar sebagaimana yang sering disebutkan, merupakan hal yang serupa karena keduanya “menjunjung individualisme metodologis,” “mengkritik negara,” dan mulai populer di tahun 1970-an. Selain itu, Nolan menulis bahwa HAM dan neoliberalisme sama-sama “mengagung-agungkan individu normatif yang diwujudkan sebagai laki-laki.”⁵⁰

Ada banyak permasalahan dalam argumen ini. Secara konseptual, cara HAM dan neoliberalisme menyoroti individu sangatlah berbeda.

Gerakan HAM memperlakukan individu sebagai urusan normatif dan hukum—yaitu, gagasan HAM menekankan bahwa kesejahteraan individu dalam arti luas harus menjadi tujuan utama perhatian kita dan bahwa hak asasi setiap orang harus didahulukan secara hukum dan moral ke-timbang urusan atau permasalahan kebijakan lainnya. Fokus HAM pada individu tersebut sama sekali berbeda dengan individualisme metodologis ekonomi neoliberal yang menganggap individu sebagai aktor rasional yang memaksimalkan keuntungan diri dalam sebuah model yang meng-utamakan kepentingan pribadi sebagai pendorong ekonomi. Sebaliknya, agenda HAM sering kali mengharuskan kita untuk membatasi kepen-tingan diri untuk mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Soal gera-kan HAM yang dianggap melebih-lebihkan nilai individu laki-laki, yang akan kita bahas pada Bab 3, para aktivis HAM seperti Bertha Lutz dari Brasil atau Hansa Mehta dari India telah memperjuangkan pengakuan hak-hak perempuan sebagai bagian dari agenda HAM sejak awal tahun 1945. Kelompok feminis dalam gerakan HAM menciptakan slogan “hak asasi perempuan adalah HAM” dalam Konferensi HAM Dunia tahun 1993. Sejak saat itu, hampir tidak ada organisasi HAM yang tidak memi-lik program yang menangani hak-hak perempuan. Selain itu, gerakan HAM dan neoliberalisme berusaha membatasi peran negara dengan cara yang berbeda. Organisasi HAM “mengkritik negara” ketika melanggar hak-hak individu, tetapi mereka lebih sering menuntut negara agar lebih berperan dalam melindungi hak-hak tertentu, seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Perlindungan hak-hak sipil dan politik tidak hanya menuntut negara untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar HAM seperti penyiksaan, tetapi juga memperluas kapasitasnya untuk melaku-kan hal-hal lain: misalnya, dalam rangka melindungi proses hukum yang adil, pemerintah dapat mendanai dan melatih pengacara publik andal untuk membantu kaum miskin di peradilan. Di sektor hak-hak sosial dan ekonomi, para pembela HAM terus-menerus mendesak pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan so-sial. Neoliberalisme, di sisi lain, justru sering kali mendesak negara untuk mengurangi layanan publik.

Argumen kausal tersembunyi bahwa gagasan HAM telah bersekong-kol dengan neoliberalisme juga sangat bermasalah dan tidak akurat se-cara historis. Jika HAM dan neoliberalisme dianggap populer di waktu bersamaan, istilah “neoliberalisme” tidak dipahami sebagai jenis kebijakan pasar liberal tertentu sampai akhir 1970-an dan awal 1980-an.⁵¹ HAM

dan neoliberalisme hanya dapat dianggap muncul dalam waktu yang hampir bersamaan jika dilihat dalam kronologi HAM Moyn yang keliru, yang menempatkan kemunculan gerakan HAM pada tahun 1970-an. Pada kenyataannya, kemunculan norma, undang-undang, dan institusi perlindungan HAM internasional muncul beberapa dekade lebih awal mendahului penggunaan istilah neoliberalisme. Kebangkitan gagasan dan praktik perlindungan HAM internasional pasca Perang Dunia II justru bertepatan dengan munculnya model yang disebut John Ruggie sebagai “liberalisme tertanam” (*embedded liberalism*), perpaduan multilateralisme internasional dan intervensionisme domestik yang ditujukan untuk meredakan ketidakstabilan global sekaligus melindungi konstituen domestik.⁵²

Ketika neoliberalisme muncul pada akhir abad ke-20, para pegiat HAM di berbagai belahan dunia berjuang menentang kebijakan neoliberal, bukan bersekongkol dengannya. Aktivis HAM terdahulu di Amerika Latin, misalnya, kerap memprotes pelanggaran HAM yang dilakukan rezim otoriter antikomunis yang juga menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal. Oleh karena itu, anggapan bahwa neoliberalisme telah “melahirkan” aktivisme HAM atau sebaliknya merupakan penafsiran yang ahistoris serta kesimpulan kausal yang keliru.

Di belahan dunia lain, organisasi HAM bangkit bukan untuk melawan neoliberalisme, melainkan dalam rangka melawan rezim komunis otoriter. Tiga perjalanan sejarah yang kemudian bersatu pada 1970-an dalam membentuk gerakan HAM modern adalah aktivis anti-apartheid di Afrika, aktivis Amerika Latin yang melawan rezim otoriter neoliberal, dan aktivis dari Uni Soviet (USSR) dan blok Timur melawan praktik rezim komunis otoriter.⁵³ Banyak aktivis dari negara pecahan Uni Soviet pada awalnya mendukung reformasi pasar, sedangkan aktivis dari Amerika Latin dan gerakan anti-apartheid lebih cenderung menentang fundamentalisme pasar. Hanya karena satu kelompok aktivis HAM dari negara-negara komunis mendukung reformasi pasar, bukan berarti kita dapat menyamakan HAM dengan neoliberalisme.

Banyak aktivis HAM pada 1970-an dan 1980-an yang fokus pada hak sipil dan politik, bukan karena pengaruh neoliberalisme seperti yang diklaim oleh beberapa kritikus, melainkan karena jenis dan karakteristik represi yang terjadi pada masa itu. Di Amerika Latin, pemerintah membunuh, menghilangkan, dan memenjarakan ribuan aktivis HAM. Tidak mengherankan jika kelompok-kelompok HAM di negara-negara tersebut pertama-tama menuntut diakhirinya eksekusi mati, penghilangan, dan

penangkapan tahanan politik. Di belahan dunia lain, kaum oposisi di negara pecahan Uni Soviet dan Eropa Timur sebagian besar tidak memiliki hak politik dan kebebasan sipil, bukan hak sosial dan ekonomi, sehingga mereka menjadikan hak sipil dan politik sebagai tuntutan utamanya.⁵⁴ Selain itu, tuntutan global untuk mengakhiri apartheid bertujuan mengakhiri diskriminasi hukum dan eksklusi politik. Gerakan-gerakan tersebut menuntut hak-hak sipil dan politik yang saat itu menjadi isu yang paling mendesak bagi mereka, sambil meyakini bahwa hak-hak ekonomi dan sosial merupakan bagian penting dari agenda HAM. Mereka sadar bahwa memperoleh, atau mendapatkan kembali, hak-hak sipil dan politik bukanlah titik akhir perjuangan mereka.

Banyak kalangan yang memercayai argumen “persamaan atau persekongkolan” HAM dengan neoliberalisme tampaknya tidak dapat membedakan istilah HAM dengan kebijakan HAM pemerintah AS atau Inggris, atau kerja-kerja HAM yang dilakukan beberapa organisasi non-pemerintah yang berada di Amerika Serikat.⁵⁵ Hanya karena Presiden George W. Bush terkadang menjustifikasi invasi ke Irak pada 2003 dengan dalih HAM tidak lantas menjadikannya juru bicara atau tokoh HAM. Istilah HAM atau gagasan tentang gerakan HAM tidak boleh disamakan dengan kebijakan HAM pemerintah Amerika Serikat atau Inggris atau bahkan dengan kerja-kerja organisasi HAM besar yang berbasis di Amerika Serikat. Kebanyakan aktivis HAM di dunia sangat menentang invasi Amerika Serikat ke Irak. Jika segelintir pengamat HAM di Amerika Serikat mendukung invasi tersebut, tidak serta merta itu menjadi perang HAM, dan bukan perang agresi.

Semua uraian di atas menyanggah pengamatan Moyn soal “kebangkitan HAM dan ‘neoliberalisme’” yang saling bersekongkol. Tidak ada bukti yang mendukung anggapan itu. Satu masalah besar yang muncul dalam perbandingan ideal implisit dan argumen kausal tersembunyi adalah para penulis yang menggunakan teknik ini tidak merasa berkewajiban memberikan bukti atau substansi pembuktian argumen mereka. Dalam argumen Moyn soal hubungan antara HAM dan fundamentalisme pasar, dia hanya mengisyaratkan argumen kausal dan tidak memberikan bukti yang lebih dari sekadar hubungan kronologis. Selain itu, hubungan kronologis itu hanya ada dalam sejarah HAM Moyn yang keliru, yang mengklaim bahwa HAM muncul pada tahun 1970-an, bukan tahun 1940-an sebagaimana yang akan dipaparkan lebih lanjut pada Bab 3. Menurutny,

fundamentalisme pasar “telah mengubah dunia secara besar-besaran,” sedangkan HAM “tidak berguna dan hanya dapat menonton.”⁵⁶

Kritikus lain, Eduardo Arenas Catalan, lebih gamblang dalam tulisannya tentang topik ini: HAM harus mengatasi “sumber-sumber eksklusif struktural” dan hal ini “berkaitan dengan satu fenomena: kebangkitan kapitalisme global.”⁵⁷ Di sini kita melihat argumen kausal yang terbuka, tidak lagi tersembunyi. Catalan jelas percaya bahwa kita tidak mungkin dapat mengatasi ketimpangan tanpa mengatasi kapitalisme. Tetapi dia masih belum memberikan alternatifnya. Haruskah kapitalisme direformasi dalam rangka mengatasi eksklusif, dan, jika iya, bagaimana caranya? Atau apakah dia menyarankan revolusi melawan kapitalisme? Apa alternatif bentuk masyarakat yang ingin dia perjuangkan? Seperti yang dapat Anda lihat, sulit untuk memutuskan apakah kita dapat mendukung suatu perbandingan ideal jika penulisnya sendiri tidak memberikan perbandingan dengan utuh.

Hopgood menyediakan contoh perbandingan ideal implisit yang lain. Dia meremehkan kerja-kerja yang telah dilakukan lembaga HAM tanpa memberi tahu pembaca apa yang dia yakini dapat menjadi alternatif sesuai dengan yang dia inginkan. Di sepanjang bukunya *The Endtimes of Human Rights*, Hopgood tidak konsisten mengisyaratkan alternatif apa yang lebih dia pilih. Dia memuji kontribusi mantan pejuang kemerdekaan Timor Leste, beberapa kelompok kemanusiaan berbasis agama, dan bahkan pemerintah Tiongkok dan Rusia karena setidaknya mereka tidak munafik. Tetapi semua itu masih belum memberikan gambaran visi yang jelas soal idealisme yang dibandingkan dengan kebijakan atau institusi HAM saat ini. Sementara itu, tidak ada lembaga yang lebih banyak dikritik dalam buku Hopgood selain Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hopgood mengkritik ICC dari banyak segi (termasuk arsitekturnya), tetapi yang menjadi poin utama sepertinya adalah karena dia “tidak dapat membayangkan” bahwa ICC akan menuntut pemimpin negara-negara besar atau negara yang menjadi klien salah satu negara besar, sehingga dia merasa “ada standar ganda yang jelas-jelas sedang digunakan.”⁵⁸

Navi Pillay, ahli hukum Afrika Selatan dan mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, memberi tahu saya bahwa dia sering bertemu mahasiswa muda di Afrika Selatan yang percaya bahwa Afrika Selatan seharusnya mundur dari ICC karena standar ganda tersebut. Dia berkata:

Demokrasi ini sudah berusia dua puluh tahun. Ini tentu waktu yang sangat singkat untuk menciptakan perubahan secara menyeluruh. Kaum muda dikecewakan oleh lambatnya perubahan. Angka pengangguran sangat tinggi. Siswa-siswi miskin tidak dapat masuk universitas. Ketika saya berbicara dengan mereka soal HAM, mereka bilang—jangan bicara soal HAM dengan kami—bicaralah sana dengan Amerika Serikat. Mengapa Bush tidak dipenjara setelah menginvasi Irak? Mereka mengeluhkan dunia luar yang menerapkan standar ganda. Mereka tidak tertarik dengan sudut pandang dari luar karena mereka sangat dikecewakan oleh kebutuhannya sendiri yang mendesak.

Pillay juga tidak terima bahwa Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia belum meratifikasi Statuta Roma. Tetapi terkadang, dia juga berkata, “kritik akademisi bahwa semuanya sudah gagal itu dimanfaatkan oleh mereka yang ingin lepas tanggung jawab.” Pillay mengatakan bahwa dia lebih suka jika para akademisi cukup menjelaskan saja, “daripada memberikan masukan kepada berbagai pemerintah yang memandang negatif HAM karena itu menyangkut akuntabilitas. Jadi, saya berbicara di radio menjelaskan bahwa lima dari delapan negara Afrika yang diinvestigasi oleh ICC mengundang ICC untuk melihat kasus-kasus tersebut. Praktisi dan akademisi bertugas memaparkan fakta-fakta semacam itu.”⁵⁹

Saya mengerti mengapa siswa-siswi di Afrika Selatan menganggap ICC institusi yang cacat, karena mereka menindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Afrika tetapi tidak menindak kejahatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau Israel. Tetapi bagi seorang sarjana hubungan internasional seperti Hopgood, mengkritik ICC munafik atau menggunakan standar ganda karena tidak menuntut negara yang belum meratifikasi Statutanya atau karena mengizinkan Dewan Keamanan untuk melimpahkan kasus, itu tidak tepat dan terlampau idealis. Mengapa? Karena dia membandingkan perilaku ICC bukan dengan Statutanya sendiri atau dengan pengadilan lain, tetapi dengan nilai-nilai yang dia yakini seharusnya ada dalam perjanjian itu. ICC, sebagaimana perjanjian internasional lainnya, didasarkan pada persetujuan negara. Artinya, perjanjian atau traktat hanya berlaku untuk negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Adapun soal pelimpahan kasus oleh Dewan Keamanan, apakah Hopgood berharap bahwa pembentukan ICC akan serta-merta menghapus semua dinamika kekuatan di dunia dan membuat ulang PBB? Dia membandingkan ICC dengan cita-cita ideal

implisitnya sendiri soal keadilan internasional dan merasa kecewa atas kenyataan yang dia temukan.

Dalam karya saya sendiri, saya lebih suka perbandingan empiris. Dalam buku sebelumnya, *The Justice Cascade* (Air Terjun Keadilan), saya memaparkan hasil dari berbagai perbandingan empiris penuntutan domestik dan internasional atas pelanggaran HAM.⁶⁰ Pertama, saya melihat adanya peningkatan angka penuntutan HAM yang signifikan pada saat ini dibandingkan dengan masa lalu. Saya berpendapat bahwa naiknya angka penuntutan ini adalah bukti bahwa legitimasi norma HAM baru juga meningkat, termasuk norma bahwa pejabat negara harus bertanggung jawab atas kejahatan di masa lalu. Ini adalah bentuk perbandingan empiris dari waktu ke waktu. Saya juga menggunakan bentuk perbandingan empiris lintas negara dalam artikel yang saya tulis bersama Hun Joon Kim, yang membandingkan negara-negara yang telah melakukan penuntutan HAM domestik dengan negara-negara yang belum. Kami menemukan bahwa negara-negara yang telah melakukan penuntutan HAM mengalami lebih sedikit pelanggaran HAM.⁶¹

Kesimpulan yang saya ambil berbeda dengan kesimpulan penulis lain karena kami menggunakan metode perbandingan yang berbeda. Misalnya, Mark Osiel menulis buku yang menarik pada tahun 1997 tentang peran pengadilan dalam membantu masyarakat memahami kekejaman pelanggaran HAM.⁶² Saat ini, kekecewaannya terhadap hukum pidana internasional yang belum memenuhi cita-cita idealnya sangat dapat kita rasakan. Ketika menulis soal hukum pidana internasional pada 2014, Osiel sangat eksplisit dalam melakukan perbandingan dengan cita-cita yang dia anggap sebagai ideal.

Kami para ahli teori hukum internasional suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, menggugah, dengan cakupan yang terlampau luas: Misalnya seperti apa rupa sistem hukum pidana internasional yang ideal dan terbebas dari batasan-batasan geostrategis seperti saat ini? ... Dunia macam apa yang dibutuhkan agar sistem semacam itu dimungkinkan terjadi, dan bahkan masuk akal? Bagaimana kita dapat membayangkan cara kerja sebuah dunia imajiner?⁶³

Osiel secara eksplisit melakukan perbandingan dengan cita-cita yang ideal karena ia memberi tahu apa yang ia anggap sebagai cita-cita

idealnya—sebuah sistem hukum pidana internasional yang terbebas dari batasan-batasan geopolitik.

Setelah itu, Osiel beralih membahas pertanyaan yang lebih terfokus: “Apa yang harus diubah dalam waktu dekat agar hukum pidana internasional tetap bertahan, dalam bentuk yang cukup dapat diterima?” Di sini kita menemukan permasalahannya: dia tidak memberi tahu kita apa yang dia maksud dengan “bentuk yang cukup dapat diterima.” Meskipun Osiel secara eksplisit dan bersemangat menunjukkan harapannya agar praktik HAM sesuai dengan cita-cita yang dia anggap ideal, standar untuk menentukan apa yang dia anggap ideal tidak pernah dia jelaskan secara terperinci. Osiel menuliskan:

Jarang sekali negara sungguh-sungguh menuntut warga negaranya sendiri atas kejahatan internasional yang mereka lakukan, apalagi warga dari negara yang lebih kuat. Kalaupun negara melakukan penuntutan, pemilihan kasusnya akan sulit dipertahankan dan partisan, sehingga upaya ini sulit didukung secara etik oleh standar kontemporer.⁶⁴

Dalam hal ini, Osiel melakukan perbandingan terhadap gagasan yang dia anggap ideal sambil membuat klaim empiris—bahwa negara jarang menuntut pejabat mereka sendiri. Pangkalan data baru kami soal mekanisme keadilan transisi di dunia mencatat lebih dari 500 kasus penuntutan HAM domestik di negara-negara transisi, yang melibatkan lebih dari 1.100 orang tertuduh.⁶⁵ Banyak di antara penuntutan tersebut yang berakhir dengan vonis bersalah, baik individu biasa maupun pejabat tinggi. Berdasarkan bukti ini, saya akan mengatakan bahwa klaim empiris Osiel salah—negara yang menuntut pejabat mereka sendiri bukanlah fenomena yang jarang terjadi. Perbandingan terhadap cita-cita ideal yang dia lakukan membuat dia meremehkan, dan bahkan mengabaikan, data empiris yang mengungkapkan kemajuan yang dicapai oleh gerakan HAM.

Osiel berargumen bahwa penuntutan pidana yang terjadi bertahun-tahun setelah kejahatan dilakukan, seperti pengadilan di Uruguay dan Chili di tahun 2000-an atas kejahatan yang terjadi pada tahun 1970-an, “tetap sangat bertentangan dengan doktrin ‘rule of law.’”⁶⁶ Dia lagi-lagi melakukan perbandingan dengan masa depan ideal, dunia imajiner ketika para pejabat negara segera dimintai pertanggungjawaban, alih-alih dengan masa lalu ketika tidak ada pejabat negara yang pernah dituntut. Dengan menggunakan perbandingan empiris, saya akan bertanya—mana

yang lebih bertentangan dengan “rule of law,” pejabat tinggi yang terlam-
bat dituntut atau yang tidak pernah dituntut sama sekali?

Karya Osiel mengingatkan kita bahwa, sekalipun tolok ukurnya eks-
plisit, ketidaksepakatan akan sulit diselesaikan. Meski menghadirkan
data dan temuan kami, tim saya akan kesulitan meyakinkan Mark Osiel
soal efektivitas hukum pidana internasional karena kami mengandalkan
perbandingan empiris dan tidak jelas bukti empiris apa, jika ada, yang
akan memenuhi cita-cita idealnya. Kemampuan saya dalam meyakinkan
Osiel akan bergantung pada apa yang dia maksud dengan negara yang
“bersungguh-sungguh” menuntut pejabatnya dan apa yang dia maksud
sebagai penuntutan yang “partisan yang sulit dibela” dan “tidak dapat
didukung secara etik.”

Saya pernah melakukan diskusi serupa dengan Milli Lake, ahli penun-
tutan kasus perkosaan di Republik Demokratik Kongo (DRK). Lake telah
melakukan riset lapangan soal pengadilan keliling di DRK yang mengadili
kombatan atas kasus kekerasan seksual.⁶⁷ Dia mewawancarai para jak-
sa dan menemukan bahwa, berbeda dari anggapan umum yang skeptis,
mereka berhasil menuntut dan menghukum tentara maupun kelompok
pemberontak yang melakukan kejahatan pemerkosaan. Namun ketika
dia mewawancarai lebih dalam lagi, dia menemukan cerita yang lebih
kompleks. Para tentara yang dihukum dan menjalani hukuman penjara
biasanya orang luar yang diserahkan kepada pihak berwenang kare-
na mereka berselisih dengan orang-orang yang berkuasa dalam suatu
kelompok bersenjata. Kami mendiskusikan apakah pengadilan itu ter-
golong yang disebut Mark Osiel “tidak dapat didukung secara etik.” Lake
telah mengklarifikasi bahwa tampaknya tentara yang dihukum memang
telah melakukan pemerkosaan yang menjadi basis penuntutan mereka.
Mereka memiliki akses ke pengacara dan proses hukum yang adil. Para
jaksa sendiri tidak korup atau terlibat dalam *kongkalikong*—sebaliknya,
seperti di semua sistem peradilan, mereka mengeluarkan dakwaan dan
mengandalkan polisi untuk menangkap dan menyerahkan tersangka ke-
pada mereka untuk diadili. Jika polisi adalah “partisan yang sulit dibela,”
dan tampaknya memang demikian, dan hanya menyerahkan beberapa
tersangka untuk dituntut, apakah hal itu membuat seluruh upaya di atas
“secara etis tidak dapat didukung”? Saya rasa tidak demikian.

Di masa lalu, tentara tidak pernah dituntut karena melakukan tinda-
kan perkosaan. Jika beberapa di antara tentara itu sekarang diadili dalam
persidangan yang adil secara prosedural (setidaknya merujuk pada kasus

pengadilan keliling di atas), bagi saya ini tidak dapat disebut “secara etis tidak dapat didukung.” Tidak hanya itu, terdapat lebih banyak tentara yang diadili atas tindakan perkosaan di DRK ketimbang negara mana pun di Afrika. Karena DRK dianggap sebagai negara yang memiliki masalah epidemi perkosaan, penuntutan hukum yang hati-hati dan memenuhi tuntutan keadilan beberapa korban dan mungkin mencegah kejahatan di masa depan merupakan suatu kemajuan bagi saya. Di saat yang sama, saya paham mengapa Lake menyoroti adanya ketidakadilan ketika hanya beberapa tentara saja yang dikirim ke pengadilan sementara yang lainnya dibebaskan. Sulit untuk mengatakan bahwa keadilan atas pemerkosaan di DRK makin membaik tanpa menunjukkan juga bahwa proses persidangannya belum sesuai dengan persidangan yang ideal.

Kritik saya terhadap perbandingan ideal menjadi kompleks. Bagi sebagian orang, saya mungkin tampak ingin menyingkirkan kritik apa pun. Tetapi tujuan utama saya adalah menuntut transparansi. Saya percaya bahwa mereka yang melakukan perbandingan ideal memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu kita metode yang mereka gunakan, dan itu adalah praktik standar untuk semua kerja ilmiah. Jika saya menggunakan perbandingan empiris, saya perlu menyatakan perbandingan empiris yang saya buat serta menjustifikasi mengapa perbandingan tersebut layak dilakukan (mengapa Argentina dapat dibandingkan dengan Brasil dan bukan dengan Meksiko, misalnya, atau mengapa negara-negara transisi yang melakukan pengadilan dibandingkan dengan negara-negara transisi yang tidak melakukan pengadilan). Jika saya menggunakan metode kuantitatif, saya harus menjelaskan mengapa saya memilih suatu model ketimbang model yang lain. Jika seorang penulis menggunakan perbandingan ideal, pembaca harus diberi tahu cita-cita ideal yang sedang dibandingkan dengan realitas mereka dan alasan mengapa cita-cita ideal itu merupakan perbandingan yang masuk akal. Jadi, jika cita-cita Hopgood soal bentuk keadilan ideal menuntut penghapusan segala bentuk dinamika kekuasaan, saya akan mengatakan bahwa meski hal itu didambakan banyak orang, cita-cita itu sangat tidak mungkin terjadi sehingga kritiknya menjadi tidak perlu dianggap penting untuk ditanggapi dengan serius.

Bahkan Osiel, salah satu akademisi paling eksplisit yang saya kutip di atas, tidak memenuhi kriteria saya. Dia memberi tahu bahwa dia sedang melakukan perbandingan ideal, dan kita tahu bahwa sistem internasional dan keadilan ideal semacam itu tidak ada di dunia. Tetapi cita-cita idealnya,

“sistem pemerintahan yang bebas dari batasan geopolitik,” seperti dalam karya Hopgood, tampaknya sama-sama tidak mungkin diwujudkan.

Ketika tolok ukur tidak dipaparkan dengan eksplisit, perdebatan soal efektivitas hukum HAM antara yang menggunakan perbandingan ideal dan yang menggunakan perbandingan empiris ibarat dialog sesama orang tuli. Saya merasa tolok ukur yang digunakan oleh mereka yang melakukan perbandingan ideal hanya menghasilkan angka-angka negatif, karena semua yang terjadi di dunia nyata gagal memenuhi ekspektasi ideal mereka. Sebaliknya, mereka mungkin juga menganggap bahwa tolok ukur perbandingan empiris yang saya gunakan hanya menghasilkan angka positif karena saya melakukan perbandingan dengan masa lalu. Namun, karena saya telah mempelajari situasi yang lebih buruk ketika dibandingkan dengan masa lalu, saya percaya bahwa tolok ukur yang saya gunakan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi hasil negatif maupun positif. Misalnya, penggunaan metode penyiksaan di masa pemerintahan Bush merupakan contoh nyata perbandingan empiris yang menghasilkan gambaran negatif.⁶⁸ Dalam kasus apa pun, titik awal upaya menyelesaikan perdebatan soal efektivitas HAM adalah dengan mencoba menentukan secara eksplisit ukuran apa yang sedang digunakan para ahli dan praktisi ketika membangun argumennya.

Saya tidak mengatakan bahwa para peneliti seharusnya menarik diri dan berhenti mengkritik kerja-kerja HAM. Saya percaya bahwa kritik semacam itu diperlukan dan menyehatkan. Saya juga tidak mengatakan bahwa mereka seharusnya berhenti menyadarkan kita soal peristiwa pelanggaran HAM yang memburuk di negara-negara tertentu. Di samping itu, saya tidak menyarankan orang-orang yang sangat mencemaskan pelanggaran HAM berat yang memburuk, seperti situasi saat ini di Thailand, Mesir, atau Amerika Serikat, agar lebih berpandangan optimis. Saya sedang berbicara lebih umum tentang perspektif yang menganggap situasi HAM secara keseluruhan memburuk tanpa menyebutkan dengan jelas, “dibandingkan dengan apa?”

Yang saya sarankan adalah standar metode dan keserjanaan yang sederhana. Sebagaimana yang diharapkan dari semua akademisi, kita berharap akademisi HAM juga menerangkan metode yang mereka gunakan dengan lebih jelas. Jika mereka membandingkan kasus dengan situasi yang dianggap ideal, gagasan atau situasi ideal yang mereka gunakan sebagai tolok ukur tersebut harus dijelaskan secara eksplisit, dan tidak dibiarkan implisit. Jika terdapat pernyataan kausal, mereka juga harus

menjelaskannya secara eksplisit, bukan membiarkannya tersembunyi. Hal ini akan membantu orang lain untuk mengevaluasi argumen dan kualitas bukti yang digunakan dalam karya mereka dengan lebih baik. Masalah banyak kritikus adalah menganggap bahwa mengkritik sesuatu tidak harus disertai dengan menjelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dengan gamblang sehingga mereka juga sebenarnya dapat menjadi objek kritik.

Aktivis HAM dan Perbandingan Ideal

Seperti yang sudah kita lihat, aktivis HAM juga sering melakukan perbandingan ideal meskipun mereka lebih mungkin melakukan perbandingan ideal yang eksplisit ketimbang implisit. Aktivis lebih mungkin membandingkan praktik saat ini dengan cita-cita ideal yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian HAM, yaitu dokumen yang memang dirancang untuk mewujudkan cita-cita ideal meliputi apa saja yang dibutuhkan manusia agar dapat hidup bermartabat. Teks semacam itu mencakup aspirasi atau janji yang diusung negara-negara, tetapi mungkin tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu pendek. Inilah perbedaan antara memiliki hak dan menikmati hak; perjanjian-perjanjian HAM menjabarkan hak-hak yang “dimiliki” manusia karena terlahir sebagai manusia, tetapi belum tentu sudah mereka nikmati.⁶⁹

Ketika banyak aktivis, akademisi, dan masyarakat umum memikirkan kemajuan HAM, mereka dengan tepat menunjukkan bagaimana praktik yang ada saat ini belum berhasil memenuhi cita-cita ideal yang terkandung dalam hukum HAM. Aktivis menggunakan kesenjangan antara hak yang telah terkodifikasi dengan praktik aktual yang terjadi sebagai alat untuk memobilisasi perubahan. Mereka mungkin khawatir jika mereka tidak terus-menerus menekankan kesenjangan tersebut, kita akan lekas berpuas diri. Jika aktivis mengatakan bahwa keadaan makin membaik, apakah orang-orang masih akan mau bekerja demi perubahan? Beberapa aktivis merasa bahwa kesadaran akan hal-hal negatif itulah yang menjadi sumber energi penopang perjuangan mereka. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu narasumber yang saya wawancarai, “Saya merasa bahwa energi yang saya gunakan untuk menopang kerja-kerja HAM saya selama dua puluh tahun terakhir ini memiliki sumber yang sama dengan kesengsaraan dalam diri saya. Saya selalu khawatir jika saya merasa nyaman dengan situasi saat ini, apakah saya masih akan memiliki energi untuk memperjuangkan HAM sehari-hari?”⁷⁰

Aktivis juga terkadang melakukan perbandingan ideal yang melampaui hukum internasional yang ada saat ini. Dalam perdebatan soal migrasi dan pengungsi saat ini, banyak aktivis yang merujuk pada cita-cita ideal yang bahkan tidak terkandung dalam Konvensi Pengungsi. Mereka berargumen mendukung konseptualisasi ulang secara radikal dan menata ulang aturan dan institusi kewarganegaraan yang tidak didefinisikan dengan jelas, tetapi pasti melibatkan perubahan dramatis dalam sistem tata negara yang kita kenal saat ini. Perbandingannya mungkin tergolong eksplisit—para aktivis dapat memberi tahu jenis dunia yang mereka bayangkan—tetapi belum dalam bentuk hukum pengungsi atau migran.

Perbandingan ideal merupakan bentuk penalaran etik yang penting. Kita perlu mengukur sejauh mana praktik dan upaya yang kita lakukan saat ini berhasil atau gagal memenuhi cita-cita ideal kita. Penalaran semacam itu akan mendorong perubahan sehingga menciptakan tekanan yang penting sebagai alat utama advokasi HAM. Meski begitu, aktivis HAM juga perlu berhati-hati agar cita-cita ideal mereka tidak membuat mereka makin terpuruk dan kehilangan harapan akan kemajuan HAM yang telah berhasil tercapai di dunia. Aktivis juga sebaiknya melakukan perbandingan empiris guna membantu mereka mengukur perubahan HAM aktual yang terjadi di dunia.

Kesimpulan

Ketika saya tengah menyelesaikan manuskrip ini, saya membaca sebuah artikel yang menggugah karya Alex de Waal, akademisi dan aktivis HAM dengan pengalaman penelitian dan advokasi yang panjang di Afrika. Artikel itu diberi judul, *Writing Human Rights and Getting it Wrong* (Menuliskan HAM dan Keliru Memahaminya).⁷¹ Saya sangat setuju dengan gagasannya bahwa “HAM merupakan praktik emansipatoris yang harus ditetapkan oleh orang-orang yang terdampak olehnya.” Bahkan, sebagian dari buku tersebut mencatat bagaimana HAM sebagai praktik emansipatoris terkadang ditetapkan oleh orang-orang yang terdampak dan penetapan agenda ini kerap diabaikan atau dihapuskan oleh para ahli, pemerintah, dan bahkan aktivis.

Saya juga sependapat dengan gagasannya bahwa “HAM tidak boleh membedakan antara sekutu politik dan musuh: semua harus dikenakan standar yang sama.”⁷² Inilah yang menjadi landasan kerja-kerja dan tulisan saya, misalnya, tentang perlunya meminta pertanggungjawaban Amerika

Serikat atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan sebagaimana negara-negara lain di dunia dimintai pertanggungjawaban. Inilah mengapa saya mengadvokasi penuntutan pejabat pemerintahan Bush atas penyiksaan dan invasi ilegal ke Irak yang mereka lakukan.⁷³ Bagi saya, seruan de Waal agar kita tetap wawas diri merupakan pengingat yang absah bahwa masih banyak yang perlu kita pelajari soal apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dalam menjalankan perlindungan HAM.

Namun kemudian muncul ujaran: “Advokasi HAM adalah kritik terhadap kekuasaan, bukan arahan untuk menjalankannya.”⁷⁴ Menyatakan bahwa sekutu dan musuh kita harus dikenakan standar yang sama tentu berbeda dengan mengatakan bahwa HAM hanya dapat menjadi kritik, dan tidak pernah menjadi sebuah arahan. Saya dan De Waal sama-sama mengajar di sekolah kebijakan publik. Di Harvard Kennedy School, banyak di antara mahasiswa kami yang merupakan mahasiswa internasional, termasuk sekelompok mahasiswa dengan karier menengah yang luar biasa dari seluruh dunia. Beberapa dari mereka adalah pegiat HAM dan pernah bekerja di organisasi internasional atau sektor swasta, tetapi sebagian besar berasal dari sektor pemerintahan dan berencana untuk kembali bekerja di pemerintahan. Beberapa di antara mereka akan menjalankan kekuasaan, dengan cara yang berbeda-beda. Apakah saya mengajarkan mahasiswa-mahasiswa saya agar hanya mengkritik dan tidak pernah mengajukan usulan atau mendukung kebijakan? Apakah saya hanya mengajarkan mahasiswa saya agar terus wawas diri, tanpa mengarahkan mereka untuk menggunakan ilmu-ilmu sosial untuk menentukan apa yang berhasil dan tidak berhasil dalam mendorong perlindungan HAM? Banyak orang (termasuk pemerintahan represif) yang mengatakan dengan angkuh bahwa gerakan dan kebijakan HAM gagal. Apakah kita akan diam menghadapi kritik semacam itu, atau cukup mengamininya saja? De Waal telah menulis artikel introspektif yang menggugah, tetapi ide bahwa HAM hanya dapat berhasil sebagai kritik atas kekuasaan dan bukan arahan untuk menjalankan kekuasaan akan membuat kita gelagapan ketika ditanya—apa yang seharusnya kita lakukan?

Terkadang para ahli HAM seperti lupa akan realitas permasalahan dunia. Membaca beberapa karya de Waal sebelumnya, Anda mungkin kadang berpikir bahwa ICC adalah masalah utamanya, bukan pemerintahan Sudan yang membunuh warganya sendiri dan mengusir para pekerja PBB.⁷⁵ Demikian pula, dalam bukunya, *The Endtimes of Human Rights*, Hopgood mengemukakan kritiknya yang paling keras terhadap mantan

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Mary Robinson, yang membagikan rencana dan saran yang dia anggap “tidak layak” dan “mengerikan” dalam sebuah pertemuan di Timor Timur. Hopgood menganggap tindakan Mary Robinson sebagai gambaran sikap institusi HAM paternalistik dan munafik, yang sejak awal telah gagal mencegah pelanggaran HAM di Timor Timur. Hopgood tidak mengalamatkan pernyataan terpedasnya kepada milisi Indonesia yang membunuh warga Timor Timur, melainkan kepada Robinson.⁷⁶ Saya sendiri ingin tetap fokus pada pelaku pelanggaran HAM yang sebenarnya, dan Mary Robinson mungkin paling terakhir yang akan saya salahkan di daftar saya.

Dalam skema yang lebih besar, banyak ahli HAM yang berselisih paham dengan saya merupakan sekutu dalam isu-isu perlindungan HAM yang lebih luas. Kita boleh berselisih paham tentang sejarah, atau jenis-jenis hak yang seharusnya berada di garis depan perjuangan, tetapi perbedaan itu tidak lantas membuat kita sebagai musuh. Alex de Waal telah melakukan kerja-kerja yang sangat penting di Sudan. Stephen Hopgood masih menjadi konsultan Amnesty International. Ahli teori kritis Bernard Harcourt merupakan litigator terkemuka yang menentang hukuman mati di Amerika Serikat. Saya mengagumi kerja-kerja mereka; saya hanya berharap Harcourt dapat menyebutkan kerja-kerjanya dalam penghapusan hukuman sebagai contoh pekerjaan yang dapat dan harus dilakukan oleh orang-orang yang peduli akan HAM, bukannya bersikeras bahwa para ahli teori kritis seperti dirinya tidak berkewajiban memberikan usulan tindakan.

Saya percaya bahwa kita harus siap untuk memberikan kritik *dan* usulan. Kita perlu menentukan apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan mengusulkan agar kita berhenti melakukan cara-cara yang tidak berhasil dan lebih banyak melakukan cara-cara yang berhasil. Buku ini berusaha mengarah ke sana. Albert Hirschman menawarkan beberapa panduan. Dia memperingatkan kita agar menghindari diskursus yang keras kepala dan mengajak kita untuk menentukan posisi “dewasa” yang mengakui adanya bahaya dan risiko pada tindakan yang kita ambil maupun yang tidak kita ambil. Risiko dari keduanya harus “digali, dinilai, dan dihindarkan sebisa mungkin.”⁷⁷ Tetapi untuk menilai risiko dari tindakan yang kita lakukan maupun yang tidak kita lakukan, kita perlu tahu persis jenis tindakan apa yang direkomendasikan. Dalam hal ini, kita perlu bergerak melampaui kritik. Inilah yang menjadi salah satu tugas saya, yaitu mencoba menggali dan menilai risiko dan manfaat dari aktivisme, hukum, dan kebijakan

HAM. Dalam rangka itu, saya akan meninjau sejarah HAM dan ilmu sosial terbaik untuk menilai efektivitas HAM. Kalaupun saya memiliki “bias untuk harapan,” itu sebagian karena rasa hormat saya kepada Hirschman dan bukunya yang luar biasa dengan judul tersebut, selain juga karena belakangan ini kita terlalu sering mendengar apa yang salah dari HAM dan tidak cukup banyak mendengar apa yang benar darinya.***

BAGIAN II

Legitimasi HAM

Perjuangan yang Beragam

BAB 3

Asal Mula Politik HAM yang Beragam

SALAH SATU MAHASISWA S1 saya yang paling idealis dan cemerlang menulis skripsi menarik tentang kekerasan terhadap perempuan di Ciudad Juárez, Meksiko.¹ Sebagai pemimpin utama Program Hak Asasi Manusia (HAM) kami, penelitiannya berhubungan dengan aktivisme di Ciudad Juárez, tempat dia bekerja membantu rumah perlindungan perempuan. Namun suatu ketika dia datang ke kantor saya dan tiba-tiba merasa tidak yakin dengan proyek penelitiannya. Dia baru saja mengambil mata kuliah yang diampu salah satu rekan dosen, seorang ahli teori kritis. Setelah mengikuti kuliah itu, dia terdorong untuk mempersoalkan skripsinya dan mengubah fokus aktivismenya. Dia khawatir fokus pada HAM akan menjadi sebetulnya imperialisme budaya. Dia ingin mengganti penelitiannya ke topik yang menurutnya merupakan akar masalah pelanggaran HAM di Meksiko: permintaan narkoba dari Amerika Serikat. Lagi pula, jelasnya, dia kini mengerti bahwa wacana HAM, termasuk seluruh penelitian dan aktivisme yang dia lakukan sebelumnya, tidak memadai, bahkan mungkin kontraproduktif, dalam mengupayakan perubahan.

Ini bukanlah kali pertama saya terlibat dalam percakapan semacam itu dengan mahasiswa saya. Tadinya saya berharap, dengan mengenal teori kritis, dia akan menjadi mahasiswa dan aktivis yang lebih reflektif. Tetapi sepertinya sekarang lebih mudah baginya untuk meninggalkan aktivismenya daripada nanti dianggap “me-liyan-kan” (*othering*) perempuan miskin di Meksiko, dan bukannya dianggap bekerja dan bersolidaritas dengan mereka.

Karena percaya bahwa konteks kadang berperan penting, saya mulai dengan menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Meksiko Tahun 1917 adalah konstitusi pertama di dunia, bukan hanya di Amerika Latin, yang tidak hanya menyebutkan soal hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial. Pada Konferensi San Francisco 1945, ketika PBB terbentuk, pemerintah Meksiko bersuara mendukung sistem perlindungan HAM internasional yang lebih luas. Sebaliknya, Amerika Serikat sempat enggan memasukkan bahasa HAM ke dalam Piagam PBB hingga diyakinkan oleh berbagai NGO dan negara-negara yang lebih lemah, seperti Meksiko dan negara-negara lain di Amerika Latin. Dengan latar belakang tersebut, saya kira mendukung atau meneliti hak-hak perempuan di Meksiko bukanlah imperialisme budaya. Malah, boleh dibilang yang lebih tidak peka dengan budaya itu justru yang mengabaikan sejarah panjang perjuangan hak di Meksiko dengan mengasumsikan bahwa ide HAM dipaksakan dari Amerika Serikat atau Eropa. Selain itu, lanjut saya, bagaimana penelitian tentang kebijakan narkoba Amerika Serikat, yang tentu merupakan topik penting, dapat menjelaskan soal hak-hak perempuan di Ciudad Juárez?

Percakapan ini tak cukup menghapuskan kekhawatirannya, perlu diskusi yang lebih panjang dan pelik. Karena itu, bab ini adalah kelanjutan dari tanggapan yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa saya itu, serta kepada sekian banyak mahasiswa, aktivis, dan akademisi yang berwawasan luas namun percaya bahwa negara-negara kuat di Kawasan Utara Dunia itulah yang mencetuskan ide perlindungan HAM internasional, menyusun hukum HAM internasional, dan memberlakukannya kepada negara-negara di Kawasan Selatan Dunia di luar kehendak mereka.²

Hak Asasi Manusia: Kisah Awal Mula yang Lebih Kompleks dan Beragam

Kita sudah tak asing dengan upaya-upaya perlindungan hak di tingkat nasional, seperti Deklarasi Hak-hak (Bill of Rights) di Amerika Serikat atau Deklarasi HAM dan Warga Negara (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) di Prancis. Meski deklarasi-deklarasi tersebut mengisyaratkan universalisme dengan menegaskan keberadaan hak alamiah atau hak yang tidak dapat dilanggar, namun tujuan utamanya adalah agar pemerintah Amerika Serikat dan Prancis melindungi hak-hak warga negaranya. Tapi penekanan buku ini adalah pada perlindungan

HAM internasional—keyakinan bahwa, jika pemerintah gagal melindungi hak Anda, ada pihak lain yang dapat dimintai bantuan.

Perlindungan hak di tingkat nasional memiliki sejarah yang lebih panjang daripada perlindungan hak di tingkat internasional, dan memang berasal dari negara-negara Barat. Baru setelah Perang Dunia II, negara-negara mulai menentukan hak yang perlu diperkuat dan dilindungi secara internasional. Sebelum Perang Dunia II, ada banyak kampanye terkait perlindungan hak internasional yang belakangan dikelompokkan dalam kategori HAM, seperti kampanye penghapusan perdagangan budak dan perbudakan, upaya-upaya di Liga Bangsa-Bangsa dalam melindungi hak kaum minoritas, upaya-upaya di Organisasi Perburuan Internasional untuk melindungi hak-hak pekerja, serta berbagai kampanye untuk memajukan hak-hak perempuan. Negara-negara kuat seperti Inggris memimpin beberapa kampanye tersebut.³ Inggris terutama memimpin penghapusan perbudakan dan perdagangan budak, bertolak belakang dengan kepentingan ekonominya.⁴ Malah, sebagaimana disebutkan ahli sejarah abolisi, perbudakan di Amerika Serikat dan di Hindia Barat Britania sedang “di puncak kesuksesannya secara ekonomi” saat dihapuskan.⁵

Namun kampanye tersebut tidak disertai langkah internasional untuk membuat standar dan melindungi sekian banyak hak asasi, yang sama pentingnya dengan masalah-masalah di atas.⁶ Sebagian besar sejarah tentang perlindungan HAM internasional menyebutkan Deklarasi Universal HAM (DUHAM), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, sebagai momen lahirnya HAM internasional.⁷ Namun DUHAM bukan yang pertama kalinya organisasi lintas-pemerintah mengadopsi penyebutan hak secara rinci.⁸ Yang pertama adalah Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia (American Declaration of the Rights and Duties of Man), yang disetujui secara akklamasi oleh 20 negara Amerika Latin dan Amerika Serikat, delapan bulan sebelum DUHAM, yaitu April 1948, pada sebuah konferensi di Bogotá, Kolombia.⁹ Yang mendorong pengajuan deklarasi ini adalah para diplomat dan ahli hukum dari negara-negara Amerika Latin seperti Uruguay, Chili, Meksiko, dan Brasil, bukan Amerika Serikat. Para diplomat dan ahli hukum Amerika Latin paham bahwa mereka tengah menciptakan sesuatu yang baru, dengan berbekal pengalaman panjang Amerika Latin dalam mengupayakan HAM dan demokrasi. Deklarasi Amerika hanyalah salah satu dari banyak contoh yang akan saya bahas ketika tokoh dan negara di

luar Kawasan Utara Dunia berkontribusi penting dalam perkembangan wacana HAM, tetapi terus diabaikan atau disepelekan.¹⁰

Argumen saya tentang peran Amerika Latin dan negara-negara kecil lainnya dalam kemunculan hukum dan institusi HAM tidaklah baru. Saya pertama kali mempresentasikan beberapa bahan ini dalam artikel tahun 1997, dan bagian lainnya tertuang dalam buku yang terbit pada 1998 dan 2004.¹¹ Buku-buku dan artikel hasil penelitian cermat para ahli seperti Jan Herman Burgers, Paolo Carozza, Mary Ann Glendon, Greg Grandin, Rainer Huhle, Patrick William Kelly, Johannes Morsink, Liliana Obregón, Susan Waltz, dan banyak yang lainnya juga mencatat tren sejarah yang disampaikan di sini.¹² Tetapi entah bagaimana suara-suara tersebut tidak terdengar. Para ahli yang beritikad baik sekalipun ketika mengkaji asal-usul wacana HAM terkadang mengabaikan kontribusi dari Kawasan Selatan Dunia dan dari Amerika Latin. Contohnya, salah satu buku sejarah HAM terbaru, *Revisiting the Origins of Human Rights*, mengabaikan sama sekali kontribusi Amerika Latin. Para penulis bab buku ini mencatat dengan teliti banyak sumber wacana HAM yang selama ini kurang diapresiasi, dari Giuseppe Mazzini hingga André Mandelstam, dari gerakan perempuan dan gerakan perdamaian hingga sosialisme, tetapi tidak satu pun bab yang membahas kontribusi dari negara-negara berkembang.¹³

Para ahli, pengamat, dan praktisi HAM terus berasumsi dan berpendapat bahwa ide HAM berasal dari Kawasan Utara Dunia dan dipaksakan ke Selatan. Dulu saya sering memperingatkan mahasiswa saya, jika ada lagi yang asal berkomentar bahwa DUHAM dipaksakan oleh yang kuat kepada yang lemah, dia harus membaca, kata demi kata, 375 halaman buku Johannes Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*.¹⁴ Di dalamnya, Morsink menelusuri sejarah penyusunan setiap pasal DUHAM, termasuk perdebatan alot seputar bunyi setiap pasal. Dia menulis tentang asal-usul Deklarasi ini yang beragam, dan merinci kontribusi Amerika Latin. Mengingat buku ini terbit tahun 1999, saya heran mengapa kita masih berdebat soal ini pada tahun 2017. Tetapi perdebatan mutakhir di bidang ini menunjukkan bahwa orang-orang belum cukup memperhatikan khazanah sejarah ini, atau barangkali lebih suka membaca arsip di negara-negara Kawasan Utara Dunia saja.

Kontribusi Amerika Latin terhadap Perlindungan HAM Internasional dan Demokrasi

Sejumlah politisi dan ahli hukum Amerika Latin sudah sejak lama menyerukan upaya-upaya internasional untuk memajukan HAM dan demokrasi.¹⁵ Sebagian ahli mengawali uraiannya dengan kisah tokoh perubahan sosial dan biarawan Dominika, Bartolomé de las Casas (w. 1566), yang mengecam perlakuan penjajah Spanyol terhadap masyarakat adat di masa kolonial, lalu berlanjut menjelaskan dukungan Amerika Latin terhadap cita-cita liberal semasa perang kemerdekaan.¹⁶ Revolusi ini, sebagaimana revolusi di Amerika Serikat, dilatari oleh ide tentang hak pada masa Pencerahan, dan muncul pada momen pembentukan bangsa, bukannya hasil difusi di masa belakangan.¹⁷ Alih-alih hanya menjiplak nilai-nilai yang diwariskan penjajah Spanyol, kaum revolusioner Amerika Latin menggunakan dan mengubah ide-ide tersebut menjadi seruan untuk memutus ikatan mereka dengan kerajaan Spanyol. Beberapa ahli mungkin menganggap bahwa ide-ide pembebasan ini cacat karena kaum revolusioner Amerika Latin berjuang melepaskan diri dari penjajah, tetapi terus memakai tenaga kerja budak, merendahkan masyarakat adat, dan membatasi representasi politik perempuan, persis seperti di Amerika Serikat. Tetapi yang bermasalah bukanlah idenya, melainkan penerapannya yang tidak sempurna. Masing-masing kelompok tersebut—budak, masyarakat adat, dan perempuan—pada gilirannya menggunakan wacana hak untuk mulai mengemansipasi diri mereka sendiri.

Seperti halnya Amerika Serikat dan Prancis, Amerika Latin juga merupakan laboratorium eksperimen awal pemerintahan demokratis dan termasuk di antara kawasan pertama yang negara-negaranya memberikan hak suara secara universal.¹⁸ Karena ketentuan mengenai hak suara berfluktuasi antarnegara, sulit menentukan negara mana yang pertama kali memberikan dan mempertahankan hak suara laki-laki. Namun terlepas dari itu, pada tahun 1830-an, negara yang memberlakukan hak suara laki-laki (dengan berbagai pembatasan) lebih banyak di Amerika Latin ketimbang di Eropa. Pada 1847, di seluruh dunia hanya Meksiko, El Salvador, dan Yunani yang memberlakukan hak suara laki-laki secara luas.¹⁹ Para aktivis Amerika Latin juga terlibat dalam perjuangan hak ekonomi dan sosial, yang merupakan cikal bakal tuntutan HAM pasca-Perang Dunia II.²⁰

Memajukan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional; sejumlah negara Amerika Latin juga berkeinginan untuk

memajukan demokrasi dan hak asasi di tingkat internasional. Sekalipun eksperimen demokrasi negara-negara di kawasan ini kerap mengalami gangguan, segelintir pemimpin dan diplomat Amerika Latin tahu cara menggunakan tekanan internasional untuk memajukan demokrasi di tingkat lokal. Simón Bolívar, yang sering dijuluki “Liberator” (Pembebas) Amerika Latin karena perannya dalam memerdekakan negara-negara Amerika Latin dari jajahan Spanyol, memulai dorongan ke arah keterlibatan internasional ini. Pada 1826, Bolívar menyerukan para delegasi Kongres Panama agar menyusun konvensi konfederasi yang tidak membolehkan negara non-demokrasi menjadi anggota. Meski konvensi tersebut tidak pernah diberlakukan, tetapi dari tahun ke tahun muncul puluhan proposal dan resolusi lain yang disusun oleh para pemimpin Amerika Latin dalam rangka memajukan demokrasi.²¹ Beberapa pemimpin, misalnya, mengusulkan agar pemerintah yang berkuasa lewat kudeta tidak usah diakui secara diplomatik, atau dikeluarkan saja dari keanggotaannya di organisasi regional. Setiap negara Amerika Latin dan bahkan seluruh kawasan Amerika Tengah pernah bereksperimen dengan kebijakan ini, tetapi tidak mampu mempertahankannya.²² Meski tidak berhasil, usulan untuk memajukan demokrasi tersebut menggambarkan kepedulian awal di kawasan ini terhadap kebijakan internasional yang mendukung nilai-nilai demokrasi.

Para ahli hukum dan negara-negara Amerika Latin juga memelopori pembelaan atas kedaulatan dan nonintervensi sebagai bagian integral dari hukum internasional.²³ Sepertinya tak masuk akal mengapa para ahli hukum Amerika Latin mendukung kedaulatan dan nonintervensi, padahal mereka menyuarakan penguatan demokrasi dan perlindungan HAM internasional, yang pasti mengundang intervensi; tetapi bagi banyak ahli hukum di sana, penguatan demokrasi dan perlindungan HAM internasional itu tidak bertentangan dengan kedaulatan. Bagi mereka, kedaulatan justru merupakan sarana bagi negara-negara yang lebih lemah untuk menghindari intervensi negara-negara yang lebih kuat, khususnya Amerika Serikat.²⁴ Negara-negara Amerika Latin menganggap hukum internasional sebagai salah satu “senjata kaum lemah” yang dapat digunakan untuk mengimbangi kekuatan AS.²⁵

Doktrin Calvo dan Doktrin Drago, yang dicetuskan oleh ahli hukum asal Argentina, menggambarkan bagaimana ahli hukum dan aktivis Amerika Latin memandang hukum internasional sebagai bentuk perlindungan bagi kaum lemah. Diplomat, sejarawan, dan ahli hukum

internasional Carlos Calvo lahir pada 1824 di Buenos Aires dan menegenyam pendidikan di Argentina dan Paris.²⁶ Di awal karier profesionalnya, Calvo mewakili pemerintah Paraguay dalam sebuah kasus melawan pemerintah Inggris, dan dia menang. Bagi Calvo, kasus ini menunjukkan bahwa negara kecil pun dapat menang melawan negara kuat dengan argumen yang didasarkan pada prinsip hukum internasional yang diakui. Pengalaman ini mendorong Calvo untuk mencetuskan prinsip hukum internasional yang penting, Doktrin Calvo, yang menekankan bahwa negara tidak boleh menggunakan intervensi diplomatik atau intervensi bersenjata untuk memaksakan klaim pribadi warga negaranya di luar negeri. Pada saat itu, sudah lumrah bagi negara asing untuk mencampuri urusan negara lain demi melindungi warga negaranya sendiri, terutama untuk membela kepentingan finansial warga negara tersebut. Negara asing yang kuat terkadang mengambil alih pemungutan pajak di negara Amerika Latin sampai utang negara tersebut dilunasi. Doktrin Calvo kemudian mengilhami Menteri Luar Negeri Argentina Luis María Drago untuk mencetuskan Doktrin Drago pada 1902, yang melarang pemungutan paksa utang publik. Calvo dan Drago menjustifikasi doktrinnya sebagai suatu keharusan untuk mencegah negara kuat menindas negara lemah. Kedua doktrin tersebut banyak dimasukkan ke dalam hukum internasional dan domestik.

Ahli hukum Amerika Latin seperti Calvo menganggap kesetaraan kedaulatan negara sebagai prasyarat untuk tujuan lain, termasuk perlindungan HAM. Namun demikian, doktrin kedaulatan dan nonintervensi memperumit perdebatan seputar HAM pada sepanjang abad ke-20. Definisi kedaulatan, dan isu-isu yang terkait dengannya, adalah yang paling banyak diperdebatkan. Biasanya, kedaulatan dimaknai bahwa negara memiliki kekuasaan yang menyeluruh dan eksklusif di batas wilayahnya. Hal ini menyiratkan bahwa perlakuan pemerintah terhadap warga negaranya itu bukan urusan komunitas internasional, sekalipun sudah melanggar hak asasi. Tetapi, doktrin kedaulatan rakyat memberi alat bagi para pegiat HAM awal di Amerika Latin karena menyatakan bahwa kedaulatan pada akhirnya berada di tangan rakyat.²⁷ Pasal 39 Undang-Undang Dasar Meksiko tahun 1917 menyatakan hal tersebut, bahwa: "Kedaulatan nasional, pada mulanya dan pada dasarnya, berada di tangan rakyat. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan dilembagakan demi kepentingan rakyat. Rakyat senantiasa memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan untuk mengganti atau mengubah bentuk pemerintahan."²⁸

Visi kedaulatan rakyat ini menyiratkan bahwa pemerintah tidak dapat menggunakan dalih kedaulatan untuk membenarkan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya karena jika demikian mereka akan memiliki alasan untuk memberontak dan mengubah bentuk pemerintahan mereka.

Argumen kedaulatan rakyat semacam itu melandasi sejumlah doktrin yang ada saat ini seperti Tanggung Jawab untuk Melindungi, yang memaknai ulang kedaulatan sebagai pengukuhan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Jika pemerintah gagal menjalankan tanggung jawab ini, mereka akan mendapat tekanan dan bantuan dari luar. Jika doktrinnya demikian, dukungan terhadap nonintervensi dan dukungan terhadap perlindungan HAM internasional tidaklah saling bertentangan. Tetapi bagi para pengacara Amerika Latin, dukungan terhadap perlindungan HAM internasional hampir tidak pernah melibatkan dukungan terhadap intervensi militer, karena hanya segelintir saja yang menganggap bahwa intervensi militer dapat digunakan sebagai alat perlindungan HAM internasional.

Periode Antarperang (*Interwar*)

Meski kiprah para pengacara seperti Calvo memberikan dukungan penting terhadap hukum internasional di kawasan ini, tetapi baru pada periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II para diplomat-pengacara pertama kali memperkenalkan dan mempromosikan gagasan HAM yang diakui secara internasional. Pada 1917, ahli hukum asal Chili Alejandro Álvarez mengusulkan ide tentang hak individu yang diakui secara internasional kepada American Institute of International Law.²⁹ Meski para sejarawan masih berdebat soal siapa yang pertama kali memperkenalkan perlindungan HAM internasional, tetapi setelah mendalami topik ini lebih jauh, saya yakin bahwa Álvarez memang orang pertama yang mengusulkan perlindungan HAM internasional; idenya belakangan dikembangkan lagi oleh yang lain.³⁰ Pakar HAM internasional lainnya di Amerika Latin, Ricardo Alfaro asal Panama, yang meneliti topik ini secara mendalam dan sezaman dengan Álvarez, menulis:

Ahli hukum Amerika [yakni Amerika Latin], Alejandro Alvarez dari Chili yang terkenal, adalah yang pertama kali mengusulkan pada 1917 bahwa hak-hak individu mesti diakui secara internasional. Dr. Alvarez mengemukakan usulan ini dalam Rancangan Deklarasi Dasar-dasar Hukum Internasional pada rangkaian acara American Institute of International

Law yang berlangsung di Havana pada 1917. Inisiatif Alvarez menarik perhatian para ahli di Eropa, hingga pada sebuah sesi European Institute of International Law pada 1921, Profesor de Lapradelle mengusulkan draf deklarasi, yang kemudian disetujui, tentang hak-hak individu yang lebih luas dan lebih mengena daripada pasal-pasal yang diusulkan oleh Alvarez.³¹

Coba perhatikan urutannya—seorang ahli hukum Amerika Latin mengusulkan gagasan hukum internasional, yang menarik perhatian para ahli di Eropa, yang kemudian mengembangkannya lebih lanjut. Sebelum 1917, Álvarez sudah terlibat dalam jaringan peradilan transnasional berisi para pakar yang menjembatani, setidaknya, Amerika dan Eropa. Peredaran gagasan ini berbeda sekali dari anggapan serampangan sebagian ahli saat ini, yang mengklaim bahwa ide HAM lahir di Kawasan Utara Dunia dan dipaksakan ke Kawasan Selatan Dunia.³²

Diplomat dan ahli hukum lain yang terlibat aktif dalam mengusulkan perlindungan HAM internasional awal di antaranya adalah André Mandelstam dari Rusia dan Antoine Frangulis dari Yunani. Frangulis bertugas sebagai delegasi Haiti di sejumlah konferensi internasional.³³ Álvarez, Mandelstam, dan Frangulis merancang dan menerbitkan deklarasi pertama tentang hak manusia di tataran internasional sebagai bagian dari kiprah mereka di tiga organisasi hukum nonpemerintah—masing-masing di American Institute of International Law, International Law Institute, dan International Diplomatic Academy. Frangulis, yang saat itu bekerja sebagai delegasi dari Haiti, berupaya mendapatkan dukungan pemerintah untuk deklarasi ini dengan memperkenalkan resolusi HAM internasional di Liga Bangsa-Bangsa pada 1933. Sayangnya, tidak banyak dukungan yang diperoleh dari negara-negara yang saat itu berada di tengah pusaran krisis yang menyebabkan Jerman mundur dari Liga Bangsa-Bangsa.³⁴

Pada saat yang sama ketika para pengacara tersebut pertama kali menyoroti perlunya perlindungan hak individu di tingkat internasional, hak lain pun mulai mengemuka, terutama hak-hak kelompok minoritas. Eric Weitz menjelaskan bahwa perjanjian internasional di masa antarperang melihat persoalan hak dari sudut pandang hak kelompok guna melindungi minoritas.³⁵ Terkadang, melindungi minoritas tidak dibedakan dari melindungi individu—perlindungan kelompok minoritas secara keseluruhan sering kali diwujudkan dengan perlindungan individu

yang merupakan anggota kelompok tersebut. Namun penekanan pada hak kolektif ini juga memunculkan masalah baru. Meskipun dapat dianggap sebagai batu loncatan ke arah hak individu, pendekatan tersebut juga digunakan sebagai dalih deportasi paksa dan genosida warga minoritas, yang dilakukan demi membentuk negara kebangsaan (*nation-state*) yang murni atau yang hanya berisi satu bangsa saja. Hal ini juga memperkuat bahasa kolonialisme karena beberapa bangsa dianggap belum siap memiliki negara sendiri yang merdeka.³⁶

Konsep perlindungan kelompok di tataran internasional ini berlanjut dalam karya pengacara Yahudi asal Polandia, Raphael Lemkin. Lemkin memulai kampanye pribadi untuk mengembangkan hukum internasional yang melarang pembinasan suatu kelompok secara sengaja, dengan menciptakan istilah genosida.³⁷ Dipengaruhi oleh peristiwa pembantaian orang Armenia di Turki yang dia saksikan semasa kecil, Lemkin yakin bahwa Nazi akan melancarkan kekejaman serupa terhadap orang Yahudi.³⁸ Pada 1933, Lemkin pertama kali mengusulkan traktat internasional untuk dirundingkan agar “penghancuran kelompok bangsa, agama, dan etnik” dinyatakan sebagai kejahatan internasional yang serupa dengan pembajakan, perbudakan, dan penyelundupan obat-obatan terlarang.³⁹ Penekanan Lemkin pada perlindungan kelompok ditentang oleh para pendukung perlindungan individu, dan pertentangan ini berlanjut pada periode pasca-Perang Dunia II.⁴⁰

Perkembangan HAM dan Demokrasi Pasca-Perang Dunia II

Selain kiprah segelintir pengacara ini dan kiprah Liga Bangsa-bangsa dalam menyusun traktat perlindungan kelompok minoritas, konsep perlindungan HAM internasional tidak banyak mendapatkan perhatian sebelum Perang Dunia II. Meski banyak pembuat kebijakan dan cendekiawan sangat peduli dengan demokrasi dan kebebasan, mereka tidak membingkai isu ini dalam bahasa HAM, juga tidak menyerukan perlindungan internasional atas hak-hak tersebut.⁴¹ Selama Perang Dunia II, hiruk pikuk baru seputar HAM bermula di kalangan akademisi dan masyarakat sipil, dan baru belakangan diikuti oleh para diplomat. Di Inggris, misalnya, penulis H. G. Wells memulai kampanye media besar pada 1939 untuk merancang deklarasi baru tentang hak-hak manusia yang dapat memperjelas tujuan perang Sekutu. Wells mengirimkan deklarasi ini kepada banyak orang, termasuk Presiden Roosevelt, Gandhi, dan Jawaharlal Nehru, dan semuanya menjawab.⁴² Pada saat yang sama, ahli hukum

Hersch Lauterpacht tengah menggarap buku pertamanya tentang HAM, *An International Bill of the Rights of Man*, yang diterbitkan agak belakangan, pada Juni 1945, tak lama selepas Konferensi San Francisco, yang diselenggarakan untuk menyusun Piagam PBB.⁴³

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, mulai muncul konsensus global bahwa HAM dan demokrasi perlu menjadi bagian inti tatanan pascaperang. Tidak ada ahli atau pemerintah yang memimpin konsensus global ini; yang terjadi, ide-ide yang beredar selama periode antarperang dan selama Perang II itu berkonvergensi. Sebagian besar ahli sudah akrab dengan inisiatif yang dilakukan Sekutu selama perang untuk menekankan pentingnya HAM. Para ahli terutama menyebutkan pidato “Four Freedoms” dari Roosevelt dan dimasukkannya bahasa HAM dalam Piagam Atlantik (Atlantic Charter), keduanya pada 1941 dan berpengaruh di sebagian besar belahan dunia, bukan karena orisinalitasnya, tapi karena menjanjikan dukungan baru Sekutu terhadap cita-cita ini di dunia pascaperang. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ide tentang perlindungan HAM internasional sudah ada di periode antarperang. Dukungan terhadap cita-cita ini sebagai bagian dari tujuan perang Sekutu membubungkan harapan akan HAM dan perlindungannya di era pascaperang.

Meningkatnya dukungan terhadap HAM tidak hanya terjadi di Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Dalam bukunya tentang kebijakan luar negeri India pada periode pasca-Perang Dunia II, sejarawan Manu Bhagavan menyebut masa ini “momen Utopia global yang sebenarnya, ketika segala sesuatu tampak mungkin,” dan menekankan bahwa “terdapat konsensus global yang hampir bulat bahwa arsitektur HAM harus dibuat.”⁴⁴ Konsensus tersebut juga diterima para pemimpin baru di India, seperti Jawaharlal Nehru dan saudaranya Vijaya Lakshmi Pandit, serta diplomat Hansa Mehta, yang berperan penting dalam pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa dan norma-norma HAM yang diusungnya.

Ngerinya Perang Dunia II membuat doktrin kedaulatan dan non-intervensi dipertanyakan, karena cacat moral dan politik dari kedaulatan absolut jadi terungkap. Misalnya, selepas Perang Dunia II, menteri luar negeri Uruguay, Eduardo Rodriguez Larreta, menyebutkan bagaimana kedaulatan dan nonintervensi dapat disalahgunakan ketika menulis, “Non-intervensi’ bukan berarti hak untuk menegakkan satu prinsip supaya dapat melanggar semua prinsip lain tanpa hukuman.”⁴⁵ Dia berpendapat bahwa nonintervensi justru harus “diselaraskan” dengan prinsip lain yang penting bagi sistem Inter-Amerika:

[N]on-intervensi bukanlah tameng untuk melindungi kejahatan, melanggar hukum, menaungi agen dan aliansi Poros, dan mengelakkan kewajiban yang mengikat. Jika sejak di Meksiko [Konferensi Chapultepec] dan setelah [konferensi] San Francisco, kita tidak membuat konsepsi internasional dan kemanusiaan yang baru, kita boleh jadi akan membiarkan sebuah doktrin yang mampu mengandaskan dan menghancurkan konsepsi itu sendiri.⁴⁶

Dumbarton Oaks dan Negara-negara Adikuasa

Meski negara-negara adikuasa menekankan soal HAM dalam tujuan mereka berperang, tetapi mereka enggan mendorong perlindungan HAM internasional lewat hukum dan institusi internasional. Inggris, misalnya, mengikuti tradisi *common law* yang dikembangkan tanpa konstitusi tertulis dan cenderung menentang pernyataan formal mengenai hak.⁴⁷ Inggris juga menentang karena jajahan yang dikuasainya. Ketika para diplomat dan ahli hukum pertama kali mengusulkan perlindungan HAM internasional, negara-negara kuat seperti Inggris, Prancis, dan Uni Soviet adalah imperium dan tidak sudi negara lain atau PBB mengurus hak-hak rakyat mereka, terutama rakyat di wilayah jajahan. Amerika Serikat, di sisi lain, lebih mencemaskan implikasi perlindungan HAM internasional terhadap segregasi dan hukum Jim Crow di negara-negara bagian selatan. Kelompok-kelompok kuat di Amerika Serikat tidak ingin PBB mengurus diskriminasi rasial di dalam negeri.⁴⁸ Terdapat banyak pendukung ide perlindungan HAM internasional di negara-negara adikuasa tersebut, seperti ahli hukum, diplomat, dan aktivis, tetapi mereka sulit meyakinkan pemerintah untuk turut mendukung.

Pemerintah AS dan Inggris sangat terpecah dukungannya terhadap pemberlakuan HAM di tatanan pascaperang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Cordell Hull tak keberatan menggunakan bahasa HAM semasa perang, tetapi menentang segala upaya untuk memajukan HAM yang dianggap mengikis kedaulatan nasional pada periode pascaperang.⁴⁹ Pejabat pemerintah Amerika Serikat yang lain, terutama Wakil Menteri Luar Negeri Sumner Welles, berkomitmen memasukkan HAM ke dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan ke dalam organisasi internasional baru, tetapi upaya-upaya tersebut sering dihalangi. Welles mengepalai salah satu subkomite terpenting di Komite Penasihat Kebijakan Luar Negeri Pascaperang, yang melahirkan deklarasi HAM internasional di masa kepemimpinannya pada 1942, tetapi Departemen Luar Negeri

Amerika Serikat tidak pernah menggunakan atau menerbitkan dokumen tersebut.⁵⁰ Penolakan Hull terhadap kodifikasi HAM internasional akhirnya berhasil; delegasi Amerika Serikat di pertemuan Dumbarton Oaks diperintahkan untuk menghindari pembahasan terperinci tentang HAM.⁵¹ Draf awal Piagam PBB versi Amerika Serikat sama sekali tidak menyebut soal HAM, dan usulan yang muncul dari pertemuan Empat Besar di Dumbarton Oaks dalam rangka mempersiapkan konferensi juga hanya sekali menyebut soal HAM.⁵² Karena konflik internal pemerintahan Amerika Serikat dan konflik di antara negara-negara adikuasa, pertemuan Dumbarton Oaks juga tidak membahas persoalan HAM lain yang sangat penting dan mendominasi periode pasca-Perang Dunia II—yaitu dekolonisasi, dan persoalan terkait seperti bagaimana mengelola jajahan negara-negara Poros serta wilayah-wilayah yang diwariskan oleh sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa.⁵³

Keengganan negara-negara adikuasa untuk menyebutkan soal HAM di Piagam PBB menimbulkan pertanyaan terhadap penjelasan teori kritis maupun realis tentang asal-usul norma HAM. Jika wacana HAM terutama lahir dari cita-cita dan kebutuhan negara-negara kuat, sebagaimana yang diklaim kaum realis, lantas mengapa negara-negara kuat itu tidak menyertakan bahasa HAM dalam rancangan Dumbarton Oaks? Hanya Tiongkok, yang paling lemah dari Empat Besar, yang mendesak dimasukkannya pernyataan eksplisit menentang diskriminasi rasial. Hal ini ditolak karena dua aktor pemerintah utama lainnya, Uni Soviet dan Inggris, memiliki kepentingan yang sama dengan Amerika Serikat untuk mencegah intervensi terhadap yurisdiksi dalam negeri.⁵⁴ Meski ketentuan HAM pada tahap awal ini masih belum bergigi, negara-negara adikuasa sudah ketakutan dengan implikasinya terhadap kedaulatan mereka.

Respons Amerika Latin

Ketiadaan bahasa HAM dalam rancangan Dumbarton Oaks menggerakkan komunitas NGO serta sekelompok negara yang kurang kuat, terutama di Amerika Latin, juga Filipina, Lebanon, Selandia Baru, dan Australia. Mereka kecewa karena tidak diajak bicara soal rencana Dumbarton Oaks membentuk organisasi pascaperang, dan karena rancangan Piagam PBB tidak menyertakan sejumlah cita-cita yang mereka dukung, seperti HAM.⁵⁵ Untuk menyuarakan keberatan mereka dan merumuskan kebijakan bersama, negara-negara Amerika Latin mengadakan pertemuan luar biasa di Kastil Chapultepec di Mexico City pada Februari 1945—Konferensi

Inter-Amerika tentang Masalah Perang dan Perdamaian—yang berakhir selang beberapa minggu saja dari pembukaan Konferensi San Francisco yang merampungkan Piagam PBB.

Sebelum pertemuan, Komite Yuridis Inter-Amerika menyiapkan laporan rinci berisi komentar dan rekomendasi atas rancangan Piagam PBB usulan Dumbarton Oaks. Komite ini mendorong dimasukkannya deklarasi HAM internasional dalam Piagam PBB. Dalam pernyataannya yang boleh jadi paling radikal, komite ini menyatakan bahwa “komunitas bangsa-bangsa memiliki haknya sendiri dan bukan sekadar agen dari negara-negara yang berdaulat dan merdeka.” Selain itu, perlu ada “aparatus organisasi internasional yang dapat mewakili kehendak seluruh komunitas dan kepentingan kolektifnya.”⁵⁶

Para delegasi di Chapultepec mengangkat sejumlah isu penting: dominasi negara adikuasa, pentingnya hukum internasional, kesepakatan regional soal keamanan, serta masalah-masalah sosial ekonomi. Isu HAM mengemuka di berbagai pidato dan resolusi.⁵⁷ Banyak negara Amerika Latin berpendapat bahwa pengalaman Perang Dunia II telah memunculkan tuntutan dunia agar hak asasi diakui dan dilindungi di tingkat internasional.⁵⁸ Berbagai resolusi juga menekankan “perlunya” deklarasi hak-hak manusia dan pentingnya keberadaan aparatus dan prosedur internasional untuk menjalankan prinsip-prinsip deklarasi tersebut. Kuba dan Uruguay bahkan mengajukan rancangan deklarasi HAM versi mereka. Dilatari keprihatinan tadi, para delegasi menginstruksikan Komite Yuridis Inter-Amerika untuk menyiapkan rancangan deklarasi tentang hak asasi dan kewajiban manusia.⁵⁹ Negara-negara juga memperdebatkan usulan dari Ekuador dan Guatemala soal apakah negara anggota mesti bersikap lebih tegas terhadap kudeta militer dengan bersepakat untuk tidak memberikan pengakuan diplomatik kepada pemerintah yang berkuasa lewat cara-cara non-demokratis.

Jika diselidiki dengan saksama, terdapat aktor politik yang beragam di balik koalisi negara-negara Amerika Latin yang mendukung HAM pada masa ini. Sebagian ahli berpendapat bahwa, pada masa ini, HAM terutama merupakan proyek kaum Kristen kanan dan bukan kaum sekuler kiri. Klaim ini dipatahkan oleh bukti dari Amerika Latin, karena di sana kaum sekuler kiri maupun negara-negara dengan tradisi Katolik yang lebih konservatif sama-sama memberikan dukungan yang berarti.⁶⁰ Masalah ini, sebagaimana yang akan kita lihat pada Bab 4, tidak terlalu berkaitan dengan soal agama, tetapi lebih banyak berkaitan dengan tipe

rezim. Rezim otoriter, termasuk yang orientasi Kristennya sangat kentara, menentang HAM, sedangkan rezim demokrasi mendukung HAM.

Konferensi San Francisco

Saat para delegasi bersiap mengikuti Konferensi San Francisco pada 1945—yang diselenggarakan dalam rangka pembentukan organisasi internasional baru pascaperang—mereka dikejutkan oleh meninggalnya Presiden Franklin D. Roosevelt karena serangan jantung, hanya 13 hari sebelum dia berangkat ke San Francisco untuk membuka konferensi ini. Selama konferensi, setiap kali para delegasi Amerika Latin—khususnya Uruguay, Chili, Panama, dan Meksiko—berpendapat mendukung perlindungan HAM internasional, mereka kerap menyebutkan “Empat Kebebasan” Roosevelt, untuk mengenangnya dan sekaligus untuk mendorong delegasi Amerika Serikat agar lebih mendukung HAM.

Konferensi San Francisco, yang merupakan konferensi diplomatik terbesar dalam sejarah hingga saat itu, berlangsung selama dua bulan lebih dan melibatkan 2.000 delegasi, pakar, penasihat, dan sekretaris dari 50 negara serta 2.400 koresponden berita dan radio.⁶¹ Dari 50 negara yang hadir di San Francisco, 18 di antaranya berasal dari yang saat ini disebut Kawasan Utara Dunia (Global North), dan 31 (atau 62 persen) di antaranya berasal dari yang saat ini disebut Kawasan Selatan Dunia.⁶² Dengan 20 negara yang hadir, Amerika Latin menjadi kelompok kawasan terbesar di pertemuan ini. Sebelas negara dari kawasan berkembang juga hadir, seperti Republik Tiongkok (dipimpin Chiang Kai-shek, sebelum revolusi komunis), Mesir, Iran, Lebanon, Persemakmuran Filipina, Arab Saudi, Suriah, Turki, Ethiopia, Irak, dan Liberia.⁶³ Banyak negara lain masih berstatus jajahan pada saat itu sehingga tidak diikutsertakan, tetapi, meski demikian, perdebatannya jauh lebih beragam daripada yang umumnya dibayangkan.

Karena pemerintah Amerika Serikat tahu akan sulit meyakinkan Senat untuk meratifikasi Piagam PBB, para senator pun diikutsertakan sebagai delegasi dan sejumlah NGO yang berbasis di Amerika Serikat diundang untuk berpartisipasi sebagai konsultan dengan harapan mereka kelak akan menggerakkan masyarakat sipil untuk mendukung traktat ini. Beberapa NGO tersebut mendukung tuntutan untuk menyertakan HAM dan demokrasi dalam Piagam ini dan melobi pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung usulan ini dari negara-negara Amerika Latin dan

negara-negara kecil lainnya.⁶⁴ Amerika Latin menjadi blok suara terpenting di San Francisco; mengingat setiap bagian Piagam perlu mendapatkan mayoritas dua pertiga dukungan untuk dapat diloloskan, suara 20 negara Amerika Latin menjadi sangat penting. Pada momen sejarah yang singkat itu, kawasan Amerika Latin sebagian besar masih terdiri dari negara-negara demokratis yang memiliki pandangan dunia yang sama.⁶⁵ Pemerintah Inggris mengakui bahwa blok Amerika Latin berhasil mengubah sikap pemerintah Amerika Serikat terkait HAM di San Francisco.⁶⁶ Tanpa protagonisme Amerika Latin, Piagam ini sepertinya tidak akan menyebut soal HAM.

Masa depan kolonialisme merupakan persoalan HAM lain yang penting di San Francisco. Dibingkai dalam bahasa “perwalian” (*trusteeship*), atau pengawasan sementara atas wilayah-wilayah jajahan yang sedang mempersiapkan diri untuk merdeka, isu ini menjadi “pembahasan terpanas” di konferensi San Francisco, menurut Ralph Bunche, anggota delegasi Amerika Serikat.⁶⁷ Inggris dan Prancis menentang segala upaya untuk mendorong kemerdekaan wilayah jajahannya, sedangkan banyak negara dari Kawasan Selatan Dunia yang hadir menganggap bahwa salah satu peran terpenting PBB yang baru adalah mendorong proses dekolonisasi. Bunche, satu-satunya orang Afrika-Amerika di delegasi Amerika Serikat, bekerja sama dengan kubu anti-kolonial lainnya untuk menyusun sistem perwalian yang lebih baik, meski mendapatkan penentangan dari Inggris, Prancis, dan beberapa delegasi Amerika Serikat sendiri di San Francisco. Bunche belakangan menjabat sebagai direktur pertama Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*) di PBB yang baru terbentuk, dan kemudian menjabat Wakil Sekretaris PBB untuk Urusan Politik Khusus, dengan tetap mengusung agenda anti-kolonial.⁶⁸

Versi akhir Piagam PBB membuktikan keberhasilan lobi-lobi NGO, upaya-upaya para delegasi Amerika Latin dalam mendukung HAM, serta ikhtiar para pendukung dekolonisasi. Piagam ini memuat tujuh acuan terhadap HAM, termasuk mencantumkan pemajuan HAM sebagai salah satu tujuan dasar organisasi. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council, ECOSOC*) diminta membentuk komisi HAM, satu-satunya komisi yang diberi mandat secara spesifik dalam Piagam ini. Prakarsa negara-negara Amerika Latin khususnya turut memperluas tujuan ekonomi, sosial, dan HAM, terutama pada Pasal 55 dan 56, yang kemudian menjadi dasar kerja-kerja HAM yang dilakukan organisasi ini. Selain itu, Bab XI menyerukan seluruh anggota PBB agar

mendorong “pengembangan institusi politik yang bebas secara progresif” di wilayah jajahan.⁶⁹

Jika Piagam ini, yang diadopsi pada puncak kolaborasi pascaperang, tidak menyinggung soal HAM dan komisi HAM, kemungkinan besar Deklarasi Universal HAM (DUHAM) juga tidak akan jadi dirancang pada 1948. Bab-bab terkait perwalian dan wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri di dalam piagam ini “memberikan momentum dan legitimasi bagi dekolonisasi,” yang kelak banyak mengubah keanggotaan organisasi ini selama 30 tahun kemudian.⁷⁰ Disertakannya bahasa HAM dalam naskah pendirian PBB merupakan titik kritis (*critical juncture*) yang membelokkan sejarah tata kelola global pascaperang ke arah penetapan norma dan hukum internasional tentang pemajuan HAM.⁷¹ Bahasa yang diadopsi bukan bahasa negara-negara adikuasa, melainkan bahasa negara-negara di Kawasan Selatan Dunia; bahasa ini baru diadopsi oleh negara-negara adikuasa setelah mendapatkan tekanan dari negara-negara kecil dan masyarakat sipil.

Sejumlah negara dan NGO di Amerika Latin menuntut agar PBB memiliki kekuasaan yang lebih luas dalam rangka menegakkan norma-norma HAM internasional. Delegasi Uruguay, misalnya, mengusulkan agar Piagam PBB memuat “Deklarasi Hak” dan “sistem perwalian hukum yang efektif atas hak-hak tersebut.”⁷² Uruguay mengusulkan agar ada mekanisme untuk menanggukkan keanggotaan negara-negara yang berulang kali melanggar HAM.⁷³ Bahasa akhir Piagam HAM tidak setegas yang diharapkan banyak negara dan NGO, karena hanya menyerukan PBB agar mendorong penghormatan terhadap HAM, dan bukannya benar-benar bertindak untuk melindungi hak tersebut.⁷⁴ Visi alternatif yang luas untuk organisasi baru ini pernah disampaikan pada Konferensi San Francisco. Konsultan NGO dan sebagian kecil negara Amerika Latin yang demokratis termasuk di antara juru bicara yang paling fasih untuk itu.

Rakyat di daerah jajahan juga kecewa karena PBB yang baru berdiri tidak menyertakan bahasa yang lebih tegas soal penegakan HAM dan dukungan atas hak untuk menentukan nasib sendiri. Meski demikian, rakyat di daerah jajahan tetap menggunakan Piagam PBB yang baru untuk menuntut kesetaraan serta perbaikan ekonomi dan sosial. Contohnya, pada Kongres Pan-Afrika ke-5 yang diselenggarakan pada Oktober 1945 di Manchester, Inggris, hanya berselang empat bulan setelah Piagam PBB disahkan, para delegasi menuntut persamaan ras, hak untuk menentukan

nasib sendiri, dan HAM; mereka juga menegaskan dukungan mereka terhadap prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB.⁷⁵

Dalam perdebatan seputar Piagam PBB, negara-negara Amerika Latin menjelaskan bahwa mereka mendukung kedaulatan dan nonintervensi, tetapi hal itu harus tunduk pada hukum internasional. Misalnya, ketika membahas soal kedaulatan, delegasi Chili menjelaskan bahwa, “Negara adalah penguasa wilayahnya, dapat memilih sendiri bentuk pemerintahan *demokratis* yang diinginkannya, dengan *mengikuti standar penghormatan hak-hak manusia yang tidak dapat dicabut*.”⁷⁶



GAMBAR 3.1. Madame Vijaya Lakshmi Pandit dari India, di ruang Dewan Keamanan sehari setelah terpilih sebagai Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 16 September 1953, bersama Dag Hammarskold. UN Photo / AF.
Direproduksi atas seizin penerbit.

Negara-negara Amerika Latin bukanlah satu-satunya yang bergulat menyeimbangkan HAM dan kedaulatan. Tidak lama setelah PBB terbentuk, muncul perdebatan soal konflik antara kedaulatan dan HAM yang tercantum dalam bahasa Piagam PBB. Pada beberapa pertemuan awal PBB, bahkan sebelum DUHAM dirancang, delegasi India, Madame Pandit, mengangkat isu pelanggaran HAM di Afrika Selatan, karena banyak warga asal India di sana yang mengalami diskriminasi hukum. Afrika Selatan merupakan kawah candradimuka bagi aktivisme Gandhi,

sehingga memiliki tempat khusus di benak para pemimpin India yang baru. Dalam sebuah perdebatan di Majelis Umum PBB seputar masalah kedaulatan dan HAM, India berhasil meyakinkan bahwa hak asasi warga India di Afrika Selatan bukan hanya urusan yurisdiksi dalam negeri Afrika Selatan.⁷⁷ Afrika Selatan berpendapat bahwa masalah ini sudah dibahas oleh Pasal 2(7) Piagam PBB, yang menyatakan, “Tidak ada satu ketentuan pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya merupakan urusan dalam negeri suatu negara.”⁷⁸ Pandit meyakinkan Majelis Umum PBB bahwa pelanggaran HAM terhadap warga India di Afrika Selatan bukan semata urusan yurisdiksi Afrika Selatan; pelanggaran HAM itu justru merupakan masalah yang dapat dan harus diselidiki oleh PBB. Langkah India ini membuat PBB mengklarifikasi, untuk pertama kalinya, bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dilindungi oleh doktrin kedaulatan. Nehru, yang menyurati Einstein soal perjuangan ini, menyampaikan bahwa ketika melawan kebijakan di Afrika Selatan, India “berdiri di atas landasan HAM yang lebih luas untuk semua sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”⁷⁹

Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia dan DUHAM

Piagam PBB menyerukan organisasi internasional yang baru agar berperan dalam mendorong penghormatan terhadap HAM, tetapi belum ada penjabaran antarpemerintah mengenai hak tersebut. Karena itu, langkah berikutnya adalah merancang definisi HAM internasional yang disepakati. Terdapat dua proses berbeda dalam merancang deklarasi hak yang berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan—proses internasional untuk merancang DUHAM serta proses regional untuk merancang Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia. Kedua proses tersebut beririsan dan saling melengkapi, tetapi proses penyusunan Deklarasi Amerika selalu selangkah lebih maju daripada penyusunan DUHAM.⁸⁰ Komite Yudisial Inter-Amerika menyelesaikan naskah lengkap Deklarasi Amerika, termasuk 21 pasal dan 50 halaman penjelasan lengkap, pada 31 Desember 1945, hanya selang enam bulan setelah Konferensi San Francisco selesai. Dokumen ini diterbitkan dan diedarkan di negara-negara anggota agar dikomentari pada Maret 1946, sebelum Komite Persiapan PBB yang ditugaskan untuk merancang DUHAM mengadakan pertemuan perdana.⁸¹ Negara-negara Amerika belakangan

memperluas Deklarasi Amerika melampaui rancangan awalnya, tetapi seluruh hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam Deklarasi Amerika ada di rancangan tahun 1945.

Pertemuan Bogotá

Pada April 1948, negara-negara Amerika bertemu di Bogotá, Kolombia, untuk membahas sejumlah persoalan regional, di antaranya yang paling utama adalah pembentukan organisasi regional baru, Organisasi Negara-negara Amerika (Organization of American States, OAS). Seperti halnya pembentukan PBB yang diwarnai perdebatan panjang seputar HAM dan demokrasi, perdebatan serupa juga berlanjut di Bogotá. Sekali lagi, sebagian kecil negara ingin menyertakan deklarasi HAM sebagai bagian dari Piagam OAS, sementara negara-negara lain lebih memilih opsi yang tidak begitu mengikat secara hukum. Argumen yang mendukung deklarasi hak dan kewajiban secara terpisah akhirnya mengungguli gagasan yang ingin menjadikan HAM sebagai bagian dari perjanjian OAS yang mengikat. Rancangan Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia menjadi titik awal perdebatan tersebut.⁸²

Kontribusi terbesar Amerika Latin terhadap HAM adalah upaya “menggabungkan dan menyeimbangkan aspek individu dan komunal dari HAM.”⁸³ Hal ini dilakukan dengan menggabungkan perhatian pada kewajiban manusia dan bahasa HAM; mereka juga menggabungkan perhatian pada hak sipil dan politik *dengan* hak ekonomi dan sosial.⁸⁴ Dalam hal ini, para ahli hukum dan diplomat Amerika Latin bertolak dari tradisi sosialis, liberal, dan Katolik untuk menemukan arah di antara berbagai model kapitalisme liberal dan kolektivisme sosialis.⁸⁵ Para delegasi di Bogotá mempertimbangkan rancangan deklarasi yang disiapkan oleh Komite Yuridis Inter-Amerika dan menambahkan delapan pasal baru tentang hak dan sepuluh pasal baru tentang kewajiban. Pembahasan tentang kewajiban dalam hukum HAM umumnya berkenaan dengan kewajiban negara yang dibebankan oleh setiap hak. Misalnya, jika seseorang berhak atas pendidikan, negara berkewajiban menyediakan pendidikan tersebut. Tetapi kewajiban dalam Deklarasi Amerika berbeda jenisnya. Yang dimaksud adalah kewajiban individu yang melengkapi atau menunjang kewajiban negara. Selain kewajiban yang dimiliki negara untuk menyediakan pendidikan, Deklarasi Amerika juga menyatakan bahwa “setiap orang memiliki kewajiban untuk mendapatkan setidaknya pendidikan dasar,” dan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik

anak-anaknya.⁸⁶ Perhatian pada kewajiban ini membedakan Deklarasi Amerika dari DUHAM, yang tidak merinci kewajiban secara khusus, meski disebutkan secara umum pada Pasal 29. Rancangan awal yang dibuat Komite Yuridis Inter-Amerika tidak mencantumkan daftar kewajiban ini; keputusan untuk menyertakannya muncul di Bogotá.

Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia dibangun di atas konstitusi dan tradisi lama negara-negara Amerika Latin. Dari segi ini, hak dan kewajiban dalam dokumen ini muncul dari dalam Amerika Latin, bukan jiplakan ide dari Amerika Serikat atau Eropa Barat. Inilah yang disebut oleh salah seorang ahli sebagai “Konstitusionalisme Inter-Amerika,” atau interaksi antara perkembangan HAM dan perkembangan konstitusi yang progresif di kawasan ini.⁸⁷ Karena itu, ide tentang HAM dan kewajiban manusia bukanlah “cangkakan hukum” yang belakangan di kawasan ini, melainkan aspirasi lokal yang sudah tertanam lama dan tumbuh sehat.⁸⁸

Tetapi, dengan menyandingkan kewajiban dan hak pun, deklarasi ini tidak mendapatkan dukungan penuh dari setiap negara Amerika Latin. Dibandingkan negara-negara lain, Meksiko adalah yang paling mengkhawatirkan intervensi sehingga menentang bahasa tegas dan mengikat secara hukum yang diusulkan negara-negara lain. Letaknya yang sangat dekat dengan Amerika Serikat dan pengalamannya bertahun-tahun diintervensi Amerika Serikat membuat Meksiko menjadi pembela kedaulatan dan nonintervensi yang paling gigih di kawasan ini. Dukungan awal Meksiko terhadap deklarasi HAM muncul dari kekhawatiran mereka terhadap intervensi Amerika Serikat yang melindungi hak warga negara Amerika Serikat di luar negeri, masalah yang telah diantisipasi oleh Doktrin Calvo. Jika deklarasi hak-hak manusia dapat mengarah pada standar tunggal perlindungan hak bagi semua orang, intervensi asing semacam itu untuk melindungi hak harus berhenti. Begitulah sikap Meksiko di Chapultepec dan di San Francisco. Tetapi setelah San Francisco, dan setelah terpilihnya pemerintah yang lebih konservatif, Meksiko mulai khawatir bahwa perlindungan HAM internasional malah dapat menambah, bukannya mengurangi, intervensi. Pemerintah Meksiko menginstruksikan delegasinya di Bogotá untuk berubah haluan. Mereka hanya mendukung deklarasi HAM, bukan perjanjian yang mengikat secara hukum, dan hanya mendukung perlindungan HAM di tingkat nasional, bukan internasional. Karena itu, judul sementara deklarasi ini, “Deklarasi *Internasional* Hak dan Kewajiban

Manusia,” perlu diubah dengan menghapuskan kata “internasional,” sehingga tujuannya lebih ambigu.

Karena perbedaan pendapat ini, sebagian delegasi di Bogotá kecewa dengan HAM yang dihasilkan di konferensi ini. Mereka awalnya berharap deklarasi hak akan disertakan dalam Piagam OAS dan akan ditegakkan dengan perlindungan hak internasional. Dibandingkan dengan bayangan ideal dokumen hukum yang disertai ketentuan penegakannya ini, pimpinan delegasi Uruguay, Dardo Regules, mengatakan bahwa sikap negara-negara soal HAM ini “paling takut-takut dan tidak mengikat.” Ketika menjelaskan mengapa Uruguay dan sekutunya tidak berhasil memasukkan pernyataan yang lebih tegas soal hak manusia, dia menyampaikan bahwa negara-negara otoriter di kawasan ini “khawatir dengan pembentukan institusi yang dapat memaksa mereka untuk mematuhi tanggung jawab internasional.” Dia juga menanggapi bahwa sebagian ahli hukum Amerika Latin terlalu terpaku pada gagasan non-intervensi sehingga menghindari segala doktrin baru yang dianggap dapat mengancamnya.⁸⁹

Pengaruh Deklarasi Amerika terhadap DUHAM

Deklarasi Amerika sudah rampung sebelum putaran kedua penyusunan DUHAM dan berpengaruh terhadap pembentukan DUHAM, khususnya yang berkaitan dengan hak sosial dan ekonomi. Dalam bukunya yang membahas penyusunan DUHAM, Morsink menulis bahwa Deklarasi Amerika “sangat memengaruhi proses penyusunan dan hasil akhir Deklarasi Universal.”⁹⁰ Semua hak yang tercantum dalam DUHAM sudah lebih dulu muncul dalam Deklarasi Amerika, dan terkadang diuraikan lebih jauh dalam DUHAM. Pengaruh besar Deklarasi Amerika terhadap DUHAM ini tidak mengejutkan karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Ketika John Humphrey, kepala Divisi HAM Sekretariat PBB asal Kanada, menyusun Garis Besar Sekretariat (draf deklarasi HAM) untuk Komisi HAM PBB agar digunakan dalam penyusunan DUHAM, modelnya menyertakan draf dari berbagai negara, guru besar hukum, NGO, serta organisasi lintas negara lainnya, seperti Pan-American Union.⁹¹ Kuba, Panama, dan Chili adalah tiga negara pertama yang mengajukan draf lengkap deklarasi HAM kepada komisi ini; masing-masing menyebutkan soal hak atas pendidikan, pangan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.⁹² Humphrey yang merupakan seorang sosial demokrat sangat mendukung ide bahwa DUHAM mesti menyertakan hak

ekonomi dan sosial. Dia juga banyak menggunakan draf tersebut dalam menyiapkan draf Sekretariat yang akan menjadi bahan pertimbangan komisi. Draft-draft yang diajukan itu sangat memengaruhi pemikirannya hingga “Humphrey mengambil banyak rumusan kata-kata dan hampir semua gagasan soal hak sosial, ekonomi, dan budaya dalam rancangannya dari tradisi sosialisme Amerika Latin,” yang terdapat dalam draf deklarasi HAM Amerika Latin.⁹³ Keterlibatan negara-negara Amerika Latin dalam pencantuman hak-hak ekonomi dan sosial dalam DUHAM ini mengoreksi anggapan lama bahwa hak ekonomi dan sosial dalam DUHAM dican-tumkan terutama karena tekanan Soviet.⁹⁴

Dalam proses penyusunan draf DUHAM, para delegasi Amerika Latin berupaya memasukkan pasal-pasal tentang kewajiban individu dari Deklarasi Amerika, namun kurang berhasil. Delegasi Kuba Guy Pérez Cisneros, seorang Katolik taat, adalah yang paling gigih mendorong hal ini. Menurutny, “individu harus diingatkan bahwa ia adalah anggota masyarakat dan ia mesti mengukuhkan haknya sebagai manusia dengan sungguh-sungguh mengemban kewajiban yang merupakan akibat wajar dari hak-haknya itu.” Delegasi Brasil menyatakan bahwa “deklarasi hak tidak mungkin dibuat tanpa menyatakan kewajiban yang tersirat dalam konsep kebebasan.” Tanpa konsep kewajiban, lanjutnya, “kebebasan dapat mengarah pada anarki dan tirani.” Delegasi Tiongkok Peng-chun Chang juga mendukung konsep kewajiban, terutama karena hal itu sejalan dengan cita-cita kolektivisme Tiongkok, yang berlawanan dengan individualisme Barat. Konsep lain yang diperkenalkan Chang—seperti *two-man mindedness* atau melihat sesuatu dari perspektif diri sendiri dan orang lain (diterjemahkan menjadi “nurani”) dan “semangat persaudaraan”—mencerminkan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya dan tercantum dalam DUHAM, meski kewajiban spesifiknya tidak dirinci.⁹⁵

Para delegasi Amerika Latin tidak berhasil memasukkan daftar kewajiban terperinci ke dalam DUHAM; hal itu hanya disebutkan dalam satu kalimat dalam Pasal 29 yang menyebutkan kewajiban secara umum. Meski demikian, dengan rumusan kalimat tersebut, mereka yakin telah berhasil memasukkan visinya yang lebih komunitarian. Rumusannya berbunyi, “Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.” Keberhasilan itu ditandai dengan kata “satu-satunya,” yang, bagi mereka, merupakan pengakuan bahwa masyarakat diperlukan dalam

memperoleh hak, dan bahwa kewajiban sangat penting bagi perlindungan masyarakat tersebut.⁹⁶

Selain hak ekonomi dan sosial serta pencantuman kewajiban dalam DUHAM, delegasi Amerika Latin juga memberikan kontribusi penting yang lain. Delegasi Amerika Latin, khususnya Meksiko, Kuba, dan Chili, adalah yang pertama kali mendesak agar Deklarasi Amerika menyertakan hak atas keadilan. Mereka, hampir tanpa bantuan siapa-siapa, berhasil memasukkan bahasa tentang hak atas keadilan ke dalam DUHAM, yang tertuang dalam Pasal 8 Deklarasi ini. Bagi mereka, hak atas keadilan berarti adanya prosedur peradilan yang dapat melindungi individu dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah yang melanggar hak mereka.

Hukum *amparo* yang ada di sebagian besar, tapi tidak semua, negara di Amerika Latin kemungkinan merupakan sumber yang mengilhami usulan Amerika Latin soal hak atas keadilan dalam Deklarasi Amerika dan DUHAM. Karena tidak ada padanan hukum *amparo* yang lengkap di negara-negara *common-law*, sulit menerjemahkan hukum ini. *Habeas corpus* ada kaitannya, tetapi *habeas corpus* hanya memberikan perlindungan dari penahanan yang sewenang-wenang, sedangkan hukum *amparo* memberikan perlindungan dari berbagai macam pelanggaran hak yang dapat terjadi akibat “tindakan penguasa.” *Habeas corpus* ibarat satu spesies dalam genus perlindungan yang lebih luas, dan banyak di antaranya tercakup dalam hukum *amparo*.⁹⁷ Ini adalah contoh nyata inovasi normatif dan protagonisme para delegasi Amerika Latin ketika mengambil prosedur hukum dari tradisi konstitusinya sendiri, yang tidak ada di negara-negara besar penganut *common law*, dan menggunakannya untuk menyusun pasal penting dalam deklarasi HAM yang baru. Gagasan tentang hak atas keadilan kelak akan menjadi tulang punggung upaya-upaya Amerika Latin dalam memastikan akuntabilitas lewat sistem Inter-Amerika. Dari segi ini, terdapat kesinambungan antara kontribusi normatif dan hukum dari negara-negara Amerika Latin terhadap DUHAM dan Deklarasi Amerika dengan kontribusi sistem Inter-Amerika yang lebih belakangan pada tahun 1970-an dan 1990-an. Jika tidak didorong oleh para delegasi Amerika Latin, hak atas keadilan tidak akan dicantumkan dalam DUHAM.

Bukan hanya negara-negara Amerika Latin yang menginginkan penegakan HAM yang lebih kuat. Delegasi dari Yugoslavia berusaha mencantumkan soal penduduk jajahan secara eksplisit dalam sebuah pasal DUHAM yang kemudian “dijegal oleh Inggris yang bersepakat dengan Prancis.”⁹⁸ Delegasi India di Komisi HAM PBB, Hansa Mehta, juga

mengupayakan sesuatu yang lebih mengikat dari sekadar deklarasi HAM sederhana. Dia mengusulkan kerangka kerja untuk komite HAM khusus, yang akan bekerja dengan pengadilan internasional untuk mengadili kasus yang pelakunya atau korbannya adalah individu dan negara.⁹⁹ Di sini tampak bahwa Mehta, dengan dukungan Nehru, sangat visioner karena menyarankan ide penegakan yang baru diadopsi separuh abad kemudian.

Hak-hak Perempuan dalam Piagam PBB dan DUHAM

Cerita dimasukkannya kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam Piagam PBB menggambarkan betapa kontribusi dari Kawasan Selatan Dunia sering kali dikesampingkan atau bahkan dibelokkan. Beberapa ahli dengan gampang menganggap bahwa perubahan tersebut adalah berkat segelintir perempuan yang mewakili negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada. Cerita resmi PBB pun tidak menyampaikan sejarahnya dengan benar. Di sana diakui bahwa, dari keenam delegasi perempuan di Konferensi San Francisco pada 1945 (tempat Piagam PBB dirancang), separuhnya berasal dari Amerika Latin (Republik Dominika, Brasil, dan Uruguay), satu dari Tiongkok, satu dari Amerika Serikat, dan satu lagi dari Kanada. Tetapi yang disebutkan adalah bahwa semua delegasi perempuan tersebut “bekerja sama dan berhasil memasukkan rumusan penting terkait hak-hak perempuan ke dalam Piagam PBB.”¹⁰⁰ Kenyataannya, dua perempuan Amerika Latin—Bertha Lutz, delegasi dari Brasil, dan Minerva Bernardino, dari Republik Dominika—yang memimpin upaya-upaya ini dan lebih banyak didukung oleh koleganya di Amerika Latin ketimbang dari sesama delegasi perempuan yang lain.

Sikap para delegasi Amerika Latin di San Francisco adalah buah dari keterlibatan mereka, sering kali selama puluhan tahun, dalam gerakan feminis Pan-Amerika, “gerakan yang turut dirintis oleh Lutz.”¹⁰¹ Tujuan besar gerakan ini tidak hanya mencakup hak suara, tetapi juga hak sosial bagi perempuan, undang-undang perburuhan untuk pekerja rumah tangga dan pedesaan, serta multilateralisme yang lebih besar dan kesetaraan global dalam hubungan internasional antarnegara.¹⁰² Dukungan Lutz dan Bernardino terhadap resolusi dan amandemen tidak hanya demi memajukan hak-hak perempuan, tetapi juga untuk mendukung HAM dan mencegah diskriminasi yang lebih luas. Sebagian berkat upaya mereka itulah Piagam PBB menyebutkan HAM di banyak bagian.¹⁰³ Lutz dan Bernardino mendorong bahasa yang mendukung persamaan hak laki-laki dan perempuan, termasuk yang kelak menjadi Pasal 8 Piagam PBB, yang

berbunyi, “Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak membatasi hak laki-laki dan perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam kemampuan apa pun juga, dan atas dasar syarat-syarat persamaan, dalam organ-organ utama maupun subsidiar.”¹⁰⁴ Saat mendorong bahasa ini, Lutz dan Bernardino ditentang oleh delegasi perempuan dari Amerika Serikat dan Kanada, serta oleh penasihat perempuan dari delegasi Inggris.¹⁰⁵



GAMBAR 3.2. Bertha Lutz dari Brasil di Konferensi San Francisco, 15 Juni 1945.
UN Photo / Mili. Direproduksi atas seizin penerbit.

Lutz, yang ibunya berdarah Inggris dan ayahnya berdarah Brasil keturunan Swiss-Jerman, sudah lama menjadi Anglofilia (pecinta segala yang berkaitan dengan Inggris) dan ingin bertemu delegasi perempuan yang berbahasa Inggris. Tidak lama setelah Lutz tiba, dia diundang minum teh bersama delegasi Amerika Serikat Virginia Gildersleeve, Dekan Barnard College, dan dua penasihat perempuan dari delegasi Inggris. Lutz merasa bahwa mereka merendahnya.¹⁰⁶ Gildersleeve “mencecar” Lutz dengan pertanyaan tentang kualifikasinya, agar “tahu diri”, yang dijawab

Lutz dengan, “Cobalah baca buku Percy B. Martin, *Who’s Who in Latin America*.”¹⁰⁷ Ketika Lutz memberi tahu mereka bahwa dia ingin agar PBB memajukan hak perempuan dan melibatkan perempuan dalam semua kegiatannya, Gildersleeve memperingatkan Lutz bahwa “[mendesakkan] langkah khusus apa pun untuk perempuan dalam piagam ini” akan “sangat vulgar” dan “tidak pantas bagi perempuan.”¹⁰⁸

Dalam catatannya mengikuti konferensi tersebut, Lutz menjelaskan bagaimana para delegasi Amerika Latin, dengan dukungan para penasihat perempuan dari delegasi Australia, memperjuangkan pernyataan umum tentang hak-hak perempuan, yang mengakui kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Dia sangat kecewa dengan delegasi perempuan dari Amerika Serikat dan Inggris karena enggan mendukung resolusi hak-hak perempuan. Seperti yang diceritakan Lutz:

Delegasi perempuan dari Amerika Serikat dan Inggris berpandangan bahwa tidak perlu—bahkan tidak pantas—bagi perempuan untuk mengklaim hak untuk dirinya sendiri dan bahwa kehadiran mereka di Konferensi itu sudah menjadi bukti bahwa perempuan sudah memiliki status penuh di organisasi ini... Delegasi Amerika Serikat berpandangan bahwa kehadirannya di sana bukan sebagai perempuan melainkan sebagai pakar. Delegasi perempuan dari Inggris mengatakan bahwa karena [di Inggris] sudah ada Menteri [perempuan], perempuan di Inggris tidak perlu lagi dibela... Sulit meyakinkan perempuan dari negara besar yang berbahasa Inggris dan negara demokratis yang menang perang bahwa di negara lain, bukan hanya di Amerika Selatan yang sudah mengirimkan dua legislator perempuannya ke Konferensi ini, ada perempuan yang tidak memiliki hak.¹⁰⁹

Catatan Lutz juga menceritakan pengalaman yang jenaka dengan delegasi lain. Soviet, misalnya, tidak memiliki delegasi perempuan; alasan mereka kepada Lutz adalah karena “perjalanan melintasi kawasan kutub terlalu berat bagi perempuan.” Tetapi Lutz kemudian mengatakan bahwa, dari kelima negara besar, “hanya Rusia yang benar-benar menunjukkan itikad baik terhadap amandemen perempuan.”¹¹⁰

NGO asal Amerika Serikat jauh lebih mendukung dimasukkannya amandemen perempuan ketimbang delegasi Amerika Serikat sendiri. Lutz bertemu dengan perwakilan organisasi perempuan asal Amerika Serikat yang hadir di San Francisco sebagai konsultan delegasi Amerika Serikat

untuk meminta dukungan mereka terhadap amandemen Amerika Latin. Para konsultan tersebut kemudian melobi delegasi Amerika Serikat. Meski terus ditentang oleh Gildersleeve, mereka akhirnya berhasil memperoleh “persetujuan yang agak berat hati” dari delegasi Amerika Serikat terhadap amandemen perempuan. Akhirnya, dan tanpa diduga-duga, pimpinan delegasi Afrika Selatan, Field Marshal Smuts, menambahkan sebuah frasa pada Pembukaan Piagam PBB yang menegaskan kembali “hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta negara kecil dan negara besar.”¹¹¹



GAMBAR 3.3. Anggota komisi Hansa Mehta (kanan) dan J. Marguerite Bowie pada Sidang Kelima Komisi HAM, 9 Mei 1949. UN Photo / Marvin Bolotsky. Direproduksi atas seizin penerbit.

Upaya memasukkan pernyataan tentang hak perempuan dalam Piagam PBB dilanjutkan dengan upaya memasukkan hak perempuan

dalam DUHAM. Hansa Mehta, delegasi India di Konferensi San Francisco serta di penyusunan DUHAM pada 1948, memberikan kontribusi penting terhadap pengakuan hak-hak perempuan di kedua kesempatan tersebut. Mehta adalah feminis yang gigih memperjuangkan kemerdekaan India dan hak-hak perempuan. Dia bertugas di Sub-Komisi PBB tentang Status Perempuan, dan kontribusinya di sana diilhami oleh kiprahnya bersama Konferensi Perempuan Seluruh India (All India Women's Conference) pada pertengahan tahun 1946.¹¹²

Saat Mehta melihat rancangan awal Pasal 1 DUHAM berbunyi, "Semua orang (*all men*) terlahir bebas serta memiliki martabat dan hak yang setara," dia memperingatkan bahwa istilah seperti "*all men*" dapat ditafsirkan untuk mengesampingkan perempuan, dan sudah usang." Eleanor Roosevelt, pimpinan Komisi HAM PBB, tidak merasa perlu mengubahnya; kata "*men*," menurutnya, sudah umum dipahami mencakup seluruh umat manusia. Tetapi Mehta dan delegasi lainnya bersikeras dan, berkat lobi-lobi mereka yang gigih, pasal ini diubah menjadi "Seluruh manusia (*all human beings*)."¹¹³

Mehta juga bekerja dengan Minerva Bernardino, wakil Republik Dominika, dalam proses penyusunan DUHAM untuk memastikan pembukaan DUHAM menegaskan kembali bahasa pembukaan Piagam PBB dengan menyebutkan "*equal rights of men and women*" (kesetaraan hak laki-laki dan perempuan). Komite ini akhirnya memberikan suara 32-2 untuk penyebutan "kesetaraan hak laki-laki dan perempuan." Tiongkok dan Amerika Serikat adalah dua negara yang memberikan suara menolak.¹¹⁴

Ringkasnya, Bertha Lutz dan Minerva Bernardino berperan penting dalam memasukkan hak-hak perempuan ke dalam Piagam PBB, traktat yang menjadi dasar bagi segala ikhtiar PBB untuk HAM; Mehta dan Bernardino melanjutkannya dengan memperkuat bahasa hak-hak perempuan dalam DUHAM. Sayangnya, hampir tidak ada yang mengenal mereka atau mengingat pencapaian mereka.¹¹⁵ Di Amerika Latin, Lutz bukanlah sosok yang terkenal dan, di Brasil pun, baru belakangan ini kontribusinya mulai diakui, misalnya, dalam bentuk "museum virtual" tentang riwayat hidupnya yang dikumpulkan oleh para ahli di Universitas Brasília.¹¹⁶ Lutz adalah seorang feminis, ahli biologi, serta pembela hak perempuan dan hak buruh di banyak konferensi internasional sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Dari segi ini, dia memiliki lebih banyak pengalaman internasional ketimbang Eleanor Roosevelt saat diminta oleh Presiden Truman untuk menjadi delegasi AS di PBB pada 1945. Saya tidak

mengecilkan kontribusi Roosevelt—dia sudah menjadi pembela hak-hak sipil dan hak-hak perempuan sebelum memulai karier di bidang HAM internasional. Tetapi kita perlu memastikan jangan sampai semua perhatian pada Roosevelt jadi mengaburkan kiprah tokoh-tokoh lain.¹¹⁷

Agensi dan Otentisitas Pegiat HAM

Untuk mengarahkan perhatian kita pada potensi agensi individu dan negara di luar Kawasan Utara Dunia, kita perlu terlebih dahulu melihat kerumitan yang diabaikan dengan membagi-bagi dunia menjadi utara dan selatan serta timur dan barat. Banyak ahli menggunakan istilah “Global North” (Kawasan Utara Dunia) dan “the West” (Barat) seolah keduanya merupakan istilah yang sama, yaitu negara-negara makmur di Eropa dan Amerika Utara. Amerika Latin memperumit pembedaan ini karena para ahli dan politisi di Amerika Latin mewarisi tradisi intelektual Pencerahan Barat tetapi secara geografis dan politik merupakan bagian dari Kawasan Selatan Dunia.¹¹⁸

Banyak orang Amerika Latin yang terlibat dalam gerakan HAM dan hukum internasional memiliki kesadaran hukum “kreol” (*creole*) yang mencampurkan unsur-unsur pengalaman dan perhatian Amerika Latin dengan tradisi hukum internasional pada saat itu. Liliana Obregón, pakar yang menciptakan istilah “kesadaran hukum kreol,” menjelaskannya kepada saya dengan mencontohkan dirinya: “Boleh dibilang saya ini kreol modern dalam arti saya harus menulis dalam Bahasa Inggris agar dibaca, saya berada di pusat kekuasaan akademik, tetapi saya masih merasa terikat pada kekhususan dan kepekaan tertentu pada asal-usul saya.”¹¹⁹ Bagi Obregón, “kreol” bukan merupakan kategori etnik, melainkan kategori hukum dan sosial—cara pandang terhadap pemerintah dan hukum internasional. Para ahli hukum Amerika Latin terlibat dalam perdebatan internasional di pusat kekuasaan, sambil menggugat mereka yang berada di pusat dengan gagasan yang bersumber dari sudut pandang kawasan mereka.¹²⁰ Arnulf Becker Lorca menyoroti fenomena serupa yang dia sebut “mestizo international law” (hukum internasional mestizo), yang menekankan peran pengacara internasional non-Barat dalam pembentukan tatanan hukum internasional. Lorca menyadari bahwa hukum internasional sering kali merupakan wacana kekuasaan, tetapi dia menunjukkan bahwa hukum internasional juga telah dan dapat menjadi salah satu perlawanan terhadap kekuasaan.¹²¹ Dalam contoh Konferensi San Francisco, mayoritas negara yang hadir bukan dari Kawasan Utara Dunia, tetapi

mereka mampu menuangkan kepedulian mereka akan pembangunan dan hak asasi dalam Piagam PBB yang pengaruhnya terus terasa dalam kiprah organisasi internasional itu.

Beberapa ahli teori kritis tidak menyangkal bahwa individu dan pemimpin politik dari Kawasan Selatan Dunia telah berperan mendorong HAM. Tetapi karena mereka mengenyam pendidikan di luar negeri atau menganut filosofi Barat, mereka dianggap kurang otentik dan kurang mewakili kawasan atau tradisi mereka. Pada Bab 1, saya telah memaparkan konsep “otentisitas” sebagai salah satu bagian dari legitimasi; dengan mempertanyakan otentisitas beberapa aktivis dari Kawasan Selatan Dunia, legitimasi hukum HAM pun turut dipertanyakan. Itu sebabnya, kontribusi diplomat seperti Charles Malik—wakil Lebanon yang berperan penting dalam penyusunan DUHAM—jadi diabaikan karena dia adalah penganut Kristen yang mengenyam pendidikan di Amerika, hingga memperoleh gelar Ph.D. dari Harvard. Bagi beberapa ahli dan aktivis, hal ini menjadikannya tidak otentik, meniru ide-ide Barat, dan bukannya mewakili Timur Tengah—sekalipun Kekristenan berasal dari Timur Tengah dan Lebanon berdiri sebagai negara mayoritas Kristen pada awal abad ke-20. Tetapi salah satu kontribusi penting Malik terhadap DUHAM muncul langsung dari pergulatannya dengan isu-isu yang relevan dengan Lebanon: usulan agar pasal kebebasan beragama menyertakan hak untuk berpindah keyakinan. Malik mendasarkan ide ini bukan pada preseden Barat, melainkan pada pengalaman negaranya dalam menerima para pencari suaka agama, beberapa di antaranya berusaha menyelamatkan diri dari persekusi karena telah berpindah agama.¹²²

Begitu juga, sebelum dan selama Perang Dunia I, para cendekiawan Afrika didikan Inggris seperti Osho Davis dan Bande Omoniyi menentang keras sistem Native Authority Inggris yang tidak memperbolehkan jajahannya memerintah secara langsung dengan memberikan penguasa tradisional wewenang yang luas atas unit pemerintahan lokal Afrika. Mereka mendorong penguatan “kapasitas rakyat Afrika untuk menikmati hak-hak sipil dan politik sepenuhnya,” tetapi karena mereka dididik di Inggris, beberapa ahli menganggap mereka kurang otentik.¹²³

Menyangkal otentisitas para ahli dan diplomat tersebut sama saja dengan mengabaikan karakter dunia yang sudah transnasional pada abad ke-20—pertukaran ide dan perpindahan orang-orang lumrah terjadi. Semua pejuang HAM yang dibahas di buku ini ikut andil dalam peredaran gagasan dunia dan merupakan bagian dari jejaring aktivis, ahli, dan

diplomata transnasional.¹²⁴ Lutz, misalnya, ikut serta dalam gerakan yang saat ini mungkin akan disebut jaringan advokasi transnasional.¹²⁵ Dia mewakili pemerintah Brasil di konferensi internasional, tetapi dia tidak hanya memberikan saran teknis sesuai keahliannya. Dia juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan berhubungan dengan para pejuang lain di Brasil, Amerika Latin, dan seluruh dunia.

Seperti Malik dan Lutz, Jenderal Carlos Romulo dari Filipina juga kemungkinan keliru dituduh mewarisi dan mendukung sudut pandang Amerika Serikat, penjajah negaranya di masa lalu, saat terlibat dalam penyusunan DUHAM.¹²⁶ Tetapi jika dikaji lebih saksama, Jenderal Romulo justru melakukan hal yang sebaliknya. Alih-alih menjiplak kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dia menunjukkan “semangat di balik pekerjaan Amerika di Filipina” dan membentuknya menjadi yang dia sebut “Pola Filipina.”¹²⁷ Dia mendorong keterlibatan negara-negara adikuasa di negara-negara berkembang, tetapi bukan dengan penjajahan, melainkan dengan perluasan hak dan kebebasan.¹²⁸ Betul bahwa Jenderal Romulo membingkai aspek imperialisme Amerika Serikat sebagai hal terpuji, tetapi hal itu dilakukan untuk memperkuat argumennya yang mendukung penguatan hak asasi individu di tingkat internasional.¹²⁹

Sebagian delegasi di atas tidak hanya dianggap “tidak otentik”, tetapi juga tidak punya kesantunan atau hitung-hitungan politik (*politically incorrect*). Lutz, misalnya, membenci Gandhi, tidak mendukung upaya-upaya anti-kolonial di San Francisco, dan diam-diam memiliki pandangan rasis. Bernardino maupun Lutz turut mendirikan organisasi feminis kelas menengah atau menengah atas dan dianggap terlalu lembek terhadap penguasa diktator di negaranya, Rafael Trujillo dan Getúlio Vargas.¹³⁰ Bernardino dan Lutz mirip dengan orang kebanyakan pada masanya tetapi, di saat yang sama, juga sangat progresif dalam menuntut dan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Mendiskreditkan kontribusi orang-orang seperti Malik atau Lutz karena mereka didikan luar negeri atau menganut pandangan konservatif itu kurang tepat dan gagal paham. Seperti yang telah kita lihat di memoar Lutz, para delegasi dari berbagai wilayah di Kawasan Selatan Dunia begitu bangga akan sikapnya dan mampu menghadapi negara-negara kuat.¹³¹ Kebanggaan dan otonomi ini telah lama luput diperhatikan dalam literatur pascakolonial atau *subaltern*. Gagasan *subaltern* menyoroti bagaimana orang disisihkan dari struktur representasi politik yang mapan dan tidak diberi suara dalam rangka mengubah dunia mereka.¹³²

Eksklusi semacam itu umum terjadi pada tahun 1940-an, ketika banyak negara masih dijajah dan rakyatnya tidak punya perwakilan dan suara di PBB yang baru terbentuk. Tetapi dalam rangka menyoroti eksklusi terhadap kaum *subaltern*, sebagian ahli teori pascakolonial mengabaikan atau meremehkan episode-episode protagonisme dari Kawasan Selatan. Hal itu, paradoksnya, turut mengesampingkan kontribusi para delegasi dari Kawasan Selatan Dunia yang begitu giat pada saat itu.¹³³

Sebagian besar sosok yang dibahas dalam buku ini adalah perwujudan dari kesadaran hukum kreol dan berharap mengubah dunia mereka di antaranya lewat hukum internasional *mestizo*. Di sini saya tidak membatasi kata kreol atau *mestizo* pada tokoh Amerika Latin saja; istilah itu justru menggambarkan orang-orang dari negara atau kawasan mana saja yang menyelami perdebatan hukum dunia, sambil mempertanyakan istilah dan ketentuan perdebatan tersebut dari perspektif pinggiran sistem. Para pembela HAM dan demokrasi dari Kawasan Selatan Dunia berpotensi memiliki agensi yang utuh, seperti halnya kolega mereka dari Kawasan Utara Dunia. Dengan kata lain, para aktivis HAM dari Kawasan Selatan Dunia harus dilihat sebagai “aktor otonom yang bertanggung jawab atas sebagian besar tindakannya sendiri.”¹³⁴ Mereka tidak sepenuhnya mewakili masyarakatnya, tetapi toh kebanyakan pegiat HAM juga begitu. Orang-orang itu juga visioner, lebih maju dari kebanyakan orang di negaranya. Apakah Eleanor Roosevelt sepenuhnya mewakili Amerika Serikat? Roosevelt hidup di masa ketika mayoritas rakyat Amerika Serikat mendukung atau membiarkan diskriminasi hukum terhadap orang Afrika-Amerika. Roosevelt, berlawanan dengan mereka, mengabdikan dirinya pada hak-hak sipil. Setiap tokoh protagonis mencerminkan sebagian pandangan yang ada di negaranya dan menolak atau menentang sebagian pandangan lainnya. Dengan caranya masing-masing, Eleanor Roosevelt maupun Bertha Lutz adalah pengecualian di masyarakatnya.¹³⁵

Menyangkal otentisitas para delegasi dari Kawasan Selatan Dunia karena mereka minoritas—pegiat feminisme, mahasiswa di mancanegara, dll.—bukan hanya paternalistik, tetapi juga gagal memahami inti perdebatan transnasional seputar hak pada abad ke-20. Masyarakat di Kawasan Selatan maupun Utara Dunia sangat heterogen pandangan politiknya, dan para aktivis HAM sering kali mewakili sudut pandang kaum minoritas. Pada periode pasca-Perang Dunia II, sudut pandang minoritas tersebut diperkuat oleh krisis hebat yang dialami dunia dan harapan

untuk membuka lembaran baru. Meski begitu, ide-ide yang mengemuka di San Francisco telah meresap untuk waktu yang lama.

Kesimpulan

Sejarah gerakan HAM pasca-Perang Dunia II menunjukkan bahwa negara yang lebih lemah mengusung ide perlindungan HAM internasional dalam rangka membendung negara yang lebih kuat, dan bukan sebaliknya. Tetapi, kelompok yang lemah itu lebih besar peluangnya untuk berhasil jika memiliki sekutu di negara-negara kuat. Dalam kasus Piagam PBB dan DUHAM, protagonisnya adalah negara-negara Amerika Latin, negara-negara kecil yang lain, dan NGO yang berperan di garda terdepan dalam memasukkan HAM ke dalam institusi pascaperang dan akhirnya mampu meyakinkan Amerika Serikat untuk mendukungnya, dan bukan sebaliknya.¹³⁶

Mengapa peran Amerika Latin dan peran negara kecil lainnya dalam kemunculan norma dan hukum HAM global tidak diakui secara luas atau dipahami oleh para ahli hubungan internasional, termasuk, kadang-kadang, para ahli dari Kawasan Selatan Dunia? Ada beberapa kemungkinan penjelasan. Banyak akademisi hubungan internasional tidak memiliki keterampilan, wawasan, atau kecenderungan untuk melakukan penelitian lapangan di negara-negara berkembang. Karena itu, mereka menggunakan sumber-sumber di Kawasan Utara Dunia sebagai gantinya. Paradoksnya lagi: akademisi yang mengkritik Kawasan Utara Dunia karena memaksakan norma-norma ke Kawasan Selatan Dunia itu pun sering kali mengandalkan penelitian yang hampir seluruhnya dilakukan di Kawasan Utara Dunia, menggunakan sumber-sumber yang tersedia di sana. Desain penelitian para akademisi yang semacam itu mereproduksi situasi yang persis mereka kritik. Ketika berupaya menekankan bahwa negara-negara di Kawasan Utara Dunia telah membungkam suara-suara di dunia berkembang dan memaksakan nilai-nilai utara kepada mereka, para akademisi itu telah melanggengkan pembungkaman tersebut dengan tidak menyelidiki sumber-sumber dari negara-negara berkembang. Sebagai contoh, salah satu editor *Revisiting the Origins of Human Rights*, buku kumpulan tulisan yang diilhami oleh teori hukum kritis, menyampaikan pada babnya tentang DUHAM bahwa “hampir mustahil menemukan momen-momen menentukan sebelum maupun sesudah diadopsinya DUHAM yang menunjukkan bahwa kelompok yang tidak diunggulkan (*underdog*) benar-benar menjadi aktor utama di kancah global

yang beragam, dan bukan hanya menjadi sasaran tindakan.”¹³⁷ Namun, kecuali satu kali penyebutan tentang Simón Bolívar, tidak ada bab yang menyoroti Amerika Latin, menggunakan sumber-sumber Amerika Latin, atau bahkan menggunakan sumber dari negara-negara berkembang di belahan dunia lain. Buku tersebut sama sekali tidak menyinggung soal Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia, ataupun pengaruhnya terhadap DUHAM. Seperti yang telah ditunjukkan pada bab ini, klaim bahwa tidak ada momen menentukan ketika kelompok yang tidak diunggulkan menjadi aktor utama itu salah besar. Hal itu memang tidak mungkin ditemukan jika penulis dan editornya tidak mencari dengan saksama dan tidak menggunakan sumber-sumber dari negara-negara berkembang.

Tinjauan terhadap beberapa sosok, pria dan perempuan, yang mendukung HAM pada periode antarperang, semasa Perang Dunia II, dan pada periode pascaperang menunjukkan bahwa, meski kebanyakan mereka bukan *underdog* dalam arti korban langsung, sebagian besar mereka berasal dari semi-pinggiran sistem dunia, bukan dari pusat, serta sadar akan dan terdampak oleh masalah pengasingan, otoritarianisme, dan represi. Beberapa dari mereka, seperti Raphael Lemkin dan Hersch Lauterpacht, adalah eksil dari kawasan Eropa Tengah yang oleh sejarawan disebut “Bloodlands” (tanah Berdarah) dan kehilangan keluarganya dalam peristiwa Holocaust.¹³⁸ Yang lainnya, tokoh penting seperti Alejandro Álvarez dari Chile, Ricardo Alfaro dari Panama, Minerva Bernardino dari Republik Dominika, Peng-chun Chang dari Tiongkok, Antoine Frangulis dari Yunani, Bertha Lutz dari Brasil, Charles Malik dari Lebanon, André Mandelstam dari Rusia, Hansa Mehta dan Vijaya Lakshmi Pandit dari India, Dardo Regules dari Uruguay, dan Carlos Romulo dari Filipina adalah ahli hukum dan/atau diplomat dari negara-negara di pinggiran kekuasaan, sebagian pernah diasingkan, mengalami penjajahan, diskriminasi, dan/atau marginalisasi.

Boleh jadi ada alasan lain mengapa protagonisme Amerika Latin belum banyak diakui, seperti paradoks dalam pembelaan Amerika Latin terhadap HAM yang mungkin telah merusak efektivitasnya. Di saat banyak negara Amerika Latin memperjuangkan norma HAM internasional, praktik yang terjadi di lapangan sangat jauh dari cita-cita HAM. Paradoks ini tampak jelas pada konferensi 1948 di Bogotá ketika Deklarasi Amerika pertama kali disetujui oleh negara-negara Amerika. Di tengah jalannya konferensi, tokoh politik populis yang penting di Kolombia, Jorge Eliécer

Gaitán, dibunuh di jalanan Bogotá, memicu protes dan aksi kekerasan yang menyebabkan konferensi dihentikan untuk sementara. Gaitán, tokoh sayap kiri di Partai Liberal, adalah orator yang fasih dan panutan kaum miskin kota. Pembunuhannya dibalas oleh para pendukungnya dengan aksi rusuh, penjarahan, dan pembunuhan, yang kemudian mengundang tindakan keras dari aparat keamanan negara. Kerusuhan ini dikenal dengan sebutan Bogotazo (ledakan Bogotá); ribuan orang terbunuh dan sebagian besar wilayah kota hangus terbakar. Bogotazo kini dianggap sebagai awal mula periode kekerasan di Kolombia yang disebut La Violencia (Masa Kekerasan). Selama periode tersebut, ratusan ribu warga biasa di Kolombia tewas.



GAMBAR 3.4. Konferensi Internasional Negara-negara Amerika Ke-9, Bogotá, 1948. Foto Milik Sekretariat Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika; Direproduksi atas seizin penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Konferensi dalam rangka pembentukan organisasi regional serta pengukuhan hak dan kewajiban manusia disandingkan dengan adegan kekerasan berskala besar ini, saat pemerintah yang menjadi tuan rumah konferensi menginjak-injak hak warga negaranya. Masyarakat dunia, dan banyak kalangan di kawasan tersebut, mungkin jadi tidak menghiraukan cita-cita luhur di dalam konferensi ini karena praktik yang terjadi di

dekatnya saja sudah berlawanan; atau mungkin peristiwa itu dianggap sebagai pertanda bahwa masalah keamanan dan kekerasan yang mende-sak akan segera mendominasi periode Perang Dingin sehingga deklarasi umum pun dikesampingkan. Apa pun itu, kesenjangan antara retorika dan praktik telah memunculkan sinisme, yang diakui pada saat itu. Delegasi Uruguay di Bogotá, Dardo Regules, menulis dalam memoarnya tentang konferensi ini, “Kita mengusung tokoh Amerika untuk menja-dikannya juru damai. Lalu kita mempercayakan kepadanya beberapa hak yang tidak dapat dilanggar; lalu, setelah itu? Setelah itu, kita membiar-kannya mendekam di penjara, tanpa pengadilan, atau diasingkan dan tak punya apa-apa?”¹³⁹



GAMBAR 3.5. Kerusuhan Bogotazo, 9 April 1948, bersamaan dengan Konferensi Internasional Negara-negara Amerika Ke-9. Archivo fotográfico Sady González (Bogotá). 1938–1949 Biblioteca Luis Ángel Arango. Direproduksi atas seizin penerbit.

Beberapa ahli berpendapat bahwa Amerika Latin sudah lama dicirikan dengan “budaya ketidakpatuhan pada hukum” yang bermula sejak masa kolonial. Salah seorang penulis menyatakan, “Kita orang Amerika Latin ini hidup di masyarakat yang mengidap skizofrenia, banyak orang bicara tentang apa yang seharusnya dan banyak peraturan soal kewajiban yang diberlakukan, tetapi tidak pernah dipraktikkan.”¹⁴⁰ Namun sebagaimana yang akan kita lihat pada Bab 4, meski dalam jangka pendek ada

keterputusan antara deklarasi HAM baru dengan praktik negara-negara di kawasan ini, dalam jangka panjang, norma-norma HAM yang baru mulai terlembagakan dan menjadi pengungkit perubahan yang efektif.

Uraian sejarah yang menelusuri asal-usul norma internasional ini menyoroti perkembangan terkini dalam HAM dan dapat membantu mahasiswa seperti yang disebutkan di awal bab ini untuk menelusuri kompleksitas ikhtiar HAM. Protagonis HAM dari Kawasan Selatan Dunia tidak dimotivasi oleh satu filosofi liberal. Mereka berangkat dari berbagai tradisi agama dan politik. Sebagian sekuler, tetapi banyak juga yang tidak. HAM bukanlah “pengganti Tuhan Kristen versi sekuler,”¹⁴¹ melainkan cita-cita yang dengannya orang-orang beragama dan orang-orang sekuler yang dimotivasi oleh berbagai aliran pemikiran dapat menemukan pijakan bersama. Pada suatu ketika pada pertengahan tahun 1940-an, wacana HAM menyediakan tempat bertemunya, sesuatu yang disebut para filsuf belakangan sebagai “*overlapping political consensus*” (konsensus politik yang saling melingkupi/beririsan), di antara kaum liberal, sosialis, Katolik, Hindu, serta banyak kelompok lain, dan bukan kemenangan satu pihak atau pemaksaan moralitas sekular kepada semua pihak. Tetapi konsensus yang rapuh ini diliputi perbedaan pendapat yang mendasar, terutama soal sejauh mana perlindungan HAM internasional harus dituangkan dalam perjanjian dan ditegakkan oleh pengadilan, sebagaimana yang akan kita lihat pada Bab 4.

Dalam sebuah buku yang disusun sesuai memimpin delegasi Uruguay di Bogotá, Dardo Regules menulis, “Apakah semua ini hanya merupakan fase baru yang tidak sempurna dan penuh dengan ketidakpastian? Tidak ada yang menyangkalnya. Tetapi meskipun demikian, ini adalah pengalaman terbaik di dunia, dan kesempatan terbaik yang dimiliki Uruguay dan semua negara untuk melindungi kemerdekaannya dan koeksistensinya dengan supremasi hukum.”¹⁴²

Ketidakpastian yang muncul rupanya jauh lebih mengguntakan daripada yang dibayangkan oleh Regules.***

BAB 4

Perjuangan HAM Era Perang Dingin

PADA 2013, MANTAN PRESIDEN GUATEMALA Efraín Ríos Montt dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Guatemala dan dijatuhi hukuman 80 tahun penjara atas genosida dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa pemerintahan diktator yang dia pimpin pada 1982 dan 1983. Di seantero dunia, baru kali ini pengadilan nasional memidanakan bekas presidennya sendiri atas kejahatan genosida. Ríos Montt terbukti bertanggung jawab atas pembantaian ribuan penduduk suku Maya dalam babak terparah perang saudara yang berkepanjangan. Namun, sepuluh hari setelahnya, Mahkamah Konstitusi Guatemala membatalkan putusan tersebut dan memerintahkan pengadilan ulang parsial, langkah yang dianggap ilegal oleh para ahli konstitusi dan aktivis HAM.¹ Pengadilan di bawahnya kemudian memutuskan bahwa, karena Ríos Montt yang sudah berusia 89 tahun menderita demensia, dia dapat menjalani pengadilan ulang tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman. Pada 2016, pengadilan dibuka kembali secara tertutup. Pada 2015 dan 2016, pengadilan Guatemala melanjutkan penuntutan atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang lainnya, serta membuka penuntutan baru atas korupsi yang dilakukan bekas presiden dan wakil presiden Guatemala. Lika-liku kasus Guatemala menggambarkan sejarah HAM di kawasan ini—perjuangan, keputusan, kemunduran, dan, kadang, keberhasilan yang mencengangkan.

Kemajuan HAM di Guatemala, juga di belahan dunia lainnya, tidak terwujud dengan cepat atau mudah. Kemajuan itu perlu waktu dan kerja

keras. Di Guatemala, para pengacara dan korban memprakarsai pengaduan genosida pertama terhadap Ríos Montt pada 2000. Karena pada saat itu Ríos Montt merupakan anggota Kongres, dia kebal terhadap penuntutan; pengadilan baru dapat dimulai setelah jabatannya di Kongres berakhir pada 2012. Sementara itu, para pengacara dalam kasus Ríos Montt melanjutkan kerja-kerja pengacara HAM yang bermula pada pertengahan 1980-an. Para pemberani ini tergabung dalam jaringan nasional dan internasional yang mendukung kerja-kerja mereka dalam menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di Guatemala.

Perjuangan menuntut pertanggungjawaban berlanjut selama transisi menuju demokrasi di Guatemala pada 1990-an. Saat itu, gerakan HAM melakukan lobi-lobi untuk memastikan undang-undang amnesti 1996 mengecualikan tindakan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Selama transisi menuju demokrasi, para aktivis bekerja sama dengan dua lembaga pengungkapan kebenaran yang penting di Guatemala: komisi kebenaran yang disponsori PBB sebagai bagian dari perjanjian perdamaian dan komisi kedua yang dibentuk oleh kantor Uskup Agung Guatemala. Komisi kebenaran ini menghimpun kesaksian para korban dan warga desa di berbagai daerah. Komisi kebenaran PBB memperkirakan bahwa lebih dari 200.000 orang telah tewas atau hilang selama 36 tahun perang saudara, dan lebih dari 80 persennya adalah penduduk Maya. Komisi ini mengidentifikasi lebih dari 600 pembantaian dan menemukan bahwa aparat keamanan negara dan paramiliter bertanggung jawab atas 93 persen pelanggaran. Laporan PBB menyatakan bahwa, di empat wilayah yang paling terdampak kekerasan, “agen negara ... melakukan tindakan genosida terhadap kelompok-kelompok suku Maya.” Meski perang saudara ini berlarut-larut, 80 persen pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada komisi kebenaran terjadi antara 1981 dan 1983, hampir separuhnya terjadi selama pemerintahan Ríos Montt pada 1982.²

Komisi HAM Inter-Amerika (Inter-American Commission of Human Rights) dan Pengadilan HAM Inter-Amerika (Inter-American Court of Human Rights) mendesak pemerintah Guatemala untuk menyelidiki pembantaian tersebut dan memberikan pemulihan bagi para korban. Berbagai organ PBB juga mendesak pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban.³ Namun walaupun ada tekanan nasional dan internasional, kelompok HAM dan para korban masih terus menerima ancaman pembunuhan dari anggota aparat keamanan Guatemala yang masih kuat. Di setiap langkah maju, ada satu atau setengah langkah

mundur. Bahkan saat kemenangan sudah tampak di depan mata pun, saat Ríos Montt dinyatakan bersalah atas genosida, Mahkamah Konstitusi membuyarkan upaya para pengacara HAM dengan membatalkan putusan itu dan memerintahkan pengadilan ulang parsial. Meski begitu, kelompok-kelompok HAM di Guatemala terus berupaya. Mereka kemudian menerima bantuan internasional dari PBB untuk kali kedua ketika, atas desakan kelompok-kelompok di dalam negeri, PBB membentuk Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala (International Commission against Impunity in Guatemala, CICIG) untuk mendesak pertanggungjawaban dan memperkuat supremasi hukum.⁴

Setelah 30 tahun, upaya menuntut pertanggungjawaban para pelaku di Guatemala masih jauh dari selesai. Namun, haluan sejarah ini di Guatemala mulai condong ke arah keadilan, seperti kata Martin Luther King Jr., yang menggaungkan kata-kata abolisionis abad ke-19 Theodore Parker.⁵

Jika kita menceritakan kisah kemajuan HAM yang demikian di hadapan para pakar hubungan internasional, boleh jadi kita akan dicap optimis, idealis, atau naif belaka—tidak pernah bersentuhan dengan realitas politik dunia.⁶ Di hadapan para ahli teori kritis, kita juga tambah bersalah karena menyampaikan sejarah “teleologis” atau triumfalis—yakni, menggambarkan sedemikian rupa seolah kemajuan HAM merupakan titik akhir yang sudah pasti akan dicapai dan harus dirayakan.⁷ Belakangan, muncul juga tudingan lain—bahwa gerakan HAM bergandengan dengan bangkitnya neoliberalisme dan karenanya turut bersalah atau tidak berdaya dalam mencegah naiknya ketimpangan di dunia.⁸

Meskipun sulit sekali menguraikan empat puluh tahun sejarah Guatemala dalam beberapa paragraf, kasus Ríos Montt menggambarkan poin saya tentang kompleksitas dan sifat kemajuan HAM yang perlahan dan terhenti-henti. Bab ini meletakkan riwayat 40 tahun Guatemala dalam sejarah Perang Dingin yang lebih panjang, mengisahkan perkembangan yang tampak mustahil tetapi sekaligus nyata terjadi. Ini bukanlah sejarah yang naif ataupun triumfalis, melainkan sejarah posibilitas yang tidak menceritakan apa yang mungkin terjadi, tetapi apa yang, dengan upaya luar biasa, akhirnya terjadi.⁹ Ríos Montt adalah orang paling berkuasa di Guatemala pada 1980. Saat itu tak terbayangkan bahwa dia dapat dipidanakan atas kejahatannya, tetapi pada akhirnya hal itu dapat terjadi juga.

Untuk meletakkan peristiwa terkini di Guatemala dalam sejarah terkait, kita mesti melihat ke tahun 1950-an, tak lama dari pengujung bab 3. Beberapa ahli, seperti Moyn yang disebutkan sebelumnya, berpendapat bahwa tidak banyak peristiwa HAM sepanjang 1950-an dan 1960-an.¹⁰ Tetapi, perkembangan di Amerika Latin, Eropa, bekas Uni Soviet, Asia, dan negara-negara yang baru merdeka di Kawasan Selatan Dunia mengisi kekosongan cerita HAM dan menyingkap kaitan historis antara perkembangan pada tahun 1940-an dengan tahun 1970-an. Meski kerap digambarkan sebagai perjuangan gerakan sosial di jalanan, kerja-kerja HAM juga berlangsung saat para diplomat merundingkan konvensi HAM dan membentuk institusi baru. Pada paruh pertama Perang Dingin, para diplomat dari berbagai negara, termasuk dari Amerika Latin dan negara-negara yang baru merdeka di Afrika dan Asia, memimpin ikhtiar untuk menyusun hukum dan konvensi HAM.¹¹

Para delegasi yang berkumpul di Bogotá dan Paris pada 1948 untuk menyepakati Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia (*American Declaration of the Rights and Duties of Man*) dan DUHAM tidak menganggap bahwa penyusunan deklarasi hak saja akan cukup untuk memberikan perlindungan internasional atas hak; tetapi, hal itu merupakan langkah pertama yang amat penting. Lagi pula, bagaimana mungkin kita dapat melindungi HAM jika tidak ada definisi yang disepakati mengenai yang dimaksud dengan HAM? Para delegasi sadar bahwa setelah itu mereka perlu memasukkan definisi tersebut ke dalam konvensi yang mengikat serta membentuk institusi, termasuk mahkamah internasional, untuk menegakkan perjanjian tersebut. Selama puluhan tahun, para ahli hukum dan diplomat berjuang memastikan terbentuknya institusi yang memiliki kekuatan mumpuni untuk menegakkan HAM. Pada saat yang sama, pemerintah negara lain, termasuk rezim otoriter yang didukung Amerika Serikat, mengkhawatirkan institusi hukum yang memiliki kekuatan untuk menegakkan HAM dan berupaya keras untuk *menjegal* pembentukan institusi semacam itu. Seperti yang dikemukakan sejarawan HAM dan dekolonisasi, “Proyek HAM pada 1940-an tidak lahir dalam keadaan mati tetapi tiba di kancah internasional tanpa diistimewakan. Ia mesti meniti jalannya sendiri di dunia.”¹² Proses menapaki jalannya sendiri di dunia itu penuh dengan rintangan dan kemunduran.

Meskipun negara-negara Amerika Latin telah mencetuskan deklarasi HAM antarpemerintah pertama pada 1948, Eropa bergerak lebih cepat menyusun konvensi HAM pertama yang menyeluruh, yaitu Konvensi

Eropa tentang HAM (European Convention on Human Rights). Konvensi ini mulai berlaku pada 1953, membentuk dua institusi yang saling terhubung untuk menegakkan ketentuan-ketentuannya—Komisi Eropa dan Mahkamah Eropa untuk HAM (European Court of Human Rights). Eropa punya alasan kuat untuk bergerak lebih cepat; mereka baru saja mengalami pelanggaran HAM terburuk pada abad ke-20. Krisis Perang Dunia II dan Holocaust lebih berpengaruh ketimbang nilai atau pencerahan Eropa dan mendorong dibentuknya rezim HAM regional. Banyak orang Eropa merasa bahwa perlindungan HAM internasional sangat penting dalam rangka membangun kembali perdamaian dan kesejahteraan di wilayahnya. Selain itu, dengan adanya kontrol Soviet atas Eropa Timur seusai Perang Dunia II, orang-orang Eropa Barat makin merasa perlu menetapkan HAM sebagai kunci identitas Eropa yang unik dan terancam. Negara-negara di kawasan ini berharap dapat menggunakan konvensi internasional untuk “mengunci” rezim demokratis dan hak-hak yang terkait dengannya.¹³ Namun dengan segala dorongan ke arah perlindungan HAM internasional ini pun, Konvensi Eropa tentang HAM nyaris tidak terwujud. Pada 1949, Menteri Luar Negeri Prancis dan Inggris berupaya menghapuskan Konvensi Eropa dari agenda; tetapi berkat upaya delegasi Denmark dan Irlandia, persoalan ini tetap dibahas.¹⁴ Meski Inggris belakangan menjadi negara pertama yang meratifikasi Konvensi ini pada Maret 1951, hal itu semata-mata karena Inggris menganggap persetujuan mereka terhadap konvensi tersebut sebagai gestur simbolik belaka. Para pemimpin Inggris tidak merasa ada pelanggaran HAM di negaranya yang perlu diselidiki dan tindakan-tindakan di luar yurisdiksi negara mereka tidak dapat dicampuri.¹⁵

Di Amerika Latin, penyusunan konvensi HAM terhenti karena banyak negara mengalami kudeta militer. Selama 20 tahun sejak Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia, setiap negara di Amerika Latin dari 20 negara yang hadir dalam pertemuan-pertemuan pada 1940-an mengalami setidaknya satu rezim otoriter yang menolak ide perlindungan HAM internasional. Dalam kasus Guatemala, demokrasi singkat pada 1940-an dan awal 1950-an digulingkan oleh kudeta yang didukung Amerika Serikat pada 1954. Ketidakmampuan golongan kiri untuk mengawal perubahan lewat pemilu membuat para pendukungnya merasa bahwa perjuangan bersenjata merupakan satu-satunya alat yang mereka punya untuk meraih tujuan. Rezim yang kian represif di wilayah itu juga terlibat dalam konflik berlarut dengan pemberontak sayap kiri.

Pada saat yang sama, pemerintah melakukan langkah-langkah yang makin brutal terhadap warga sipil yang dituduh sebagai simpatisan para pemberontak. Gelombang rezim otoritarian pada akhirnya tidak hanya menghantam negara-negara miskin dan rentan di Amerika Tengah dan Karibia, tetapi juga negara-negara demokrasi yang kuat, seperti Uruguay dan Chili, yang telah mendukung HAM di San Francisco dan Bogotá.

Tetapi uraian ini mungkin sudah terlalu jauh. Ada baiknya kita kembali ke awal dan menunjukkan bagaimana, pada setiap langkahnya, kisah tentang HAM itu melibatkan agensi, kontestasi, perjuangan, dan kontingensi.

Jalur Lambat dan Berat dari Deklarasi HAM ke Konvensi dan Institusi

Minimnya komitmen politik menghambat usulan HAM yang muncul di Bogotá pada 1948. Brasil, dalam proposal yang merupakan rintisan, mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Inter-Amerika (Inter-American Court of Human Rights) sebagai wadah untuk menegakkan norma-norma HAM.¹⁶ Banyak negara di Amerika menganggap usulan Brasil ini terlalu prematur, namun mereka meneruskannya ke Komite Yuridis Inter-Amerika (Inter-American Juridical Committee) untuk dipelajari dan dielaborasi. Meskipun tidak membuahkan hasil pada saat itu, usulan Brasil menunjukkan bahwa salah satu kekuatan demokrasi besar di kawasan itu memandang bahwa HAM internasional harus ditopang oleh pengadilan *internasional*.¹⁷ Ini hanyalah salah satu dari banyak contoh pada bab ini yang menggambarkan poin utama bab 2 dan 3—usulan dan inovasi HAM muncul dari negara-negara di Kawasan Selatan Dunia, bukan hanya dari Amerika Serikat dan negara-negara kuat lainnya.

Ketika mempertimbangkan resolusi Brasil, Komite Yuridis Inter-Amerika memberi tahu negara-negara anggota bahwa usulan mereka terlalu jauh. Pengadilan itu mesti berpegang pada hukum yang hendak ditegakkan. Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia tidak punya kekuatan hukum yang mengikat—agar pengadilan dapat berjalan, negara-negara Amerika perlu hukum yang mengikat dalam bentuk konvensi atau traktat HAM.¹⁸ Seiring makin banyaknya negara yang beralih dari demokrasi ke otoritarianisme, komitmen politik untuk menyusun konvensi HAM pun kian memudar, dan usulan Brasil untuk membentuk pengadilan terbelengkalai selama bertahun-tahun, terlupakan bahkan oleh Brasil sendiri.

Pergulatan dalam menyusun konvensi HAM dan institusi HAM regional terjadi di konferensi negara-negara Amerika pada 1950-an dan 1960-an. Pertemuan yang menjadi ajang politik praktis sekaligus teater politik ini mengikuti tradisi lama di Amerika Latin ketika para pejabat tinggi dari negara-negara Amerika berkumpul selama berminggu-minggu dan saling berdebat. Tokoh-tokoh yang penuh warna pada periode ini juga turut serta dalam konferensi-konferensi tersebut. Tokoh revolusioner Kuba “Che” Guevara, dengan raut lelah dan cerutu khasnya, menjadi bintang dalam konferensi Punta del Este pada 1962. Hadir juga lawan ideologis Che dari kepulauan Karibia Republik Dominika, Joaquín Balaguer, anak didik diktator Rafael Trujillo. Berbeda dengan sosok Trujillo yang sangat flamboyan, Balaguer lebih tampak seperti “intelektual kalem” yang pernah menjadi penyair, akademisi, dan pegawai pemerintah sebelum menjadi tangan kanan Trujillo, meski dia sama-sama antikomunis dan pro-AS seperti bosnya.¹⁹ Justino Jiménez de Aréchaga dari Uruguay juga menghadiri beberapa pertemuan, mewakili pemikiran lebih liberal yang lazim di negaranya.

Kehidupan dan karya Jiménez de Aréchaga, ahli hukum dan diplomat asal Uruguay, menggambarkan kaitan langsung antara kerja-kerja HAM pada tahun 1940-an dan tahun 1970-an. Berasal dari keluarga ahli hukum terpadang, Jiménez de Aréchaga mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum University of the Republic di Montevideo, dan belakangan menjadi guru besar di sana. Dia merupakan delegasi Uruguay pada pertemuan Komisi HAM PBB yang mengelaborasi versi final DUHAM di Paris pada 1948. Kolega dan bekas mahasiswa Jiménez de Aréchaga mengatakan bahwa HAM “adalah tujuan hidupnya” dan bahwa “satu-satunya yang dia banggakan” adalah dapat berpartisipasi dalam penyusunan DUHAM pada 1948, meski belakangan dia berperan lebih penting dalam memperkuat Komisi HAM Inter-Amerika (Inter-American Commission on Human Rights) pada tahun 1970-an.²⁰ Jiménez de Aréchaga adalah model sosok liberal yang lazim di Uruguay pada tahun 1940-an dan 1950-an. Orang Uruguay membanggakan stabilitas demokrasi liberal dan negara kesejahteraan mereka—stabilitas yang dijaga hampir sepanjang abad ke-20, bertolak belakang dengan politik negara tetangga Argentina yang lebih bergejolak dan sering kali otoriter.

Ketika para delegasi berkumpul di Caracas pada Konferensi Inter-Amerika ke-10 tahun 1954, peluang dihasilkannya konvensi HAM regional lebih kecil dibandingkan tahun 1948. Selain keberadaan para diktator

yang sudah lama berkuasa di kawasan ini, seperti Anastasio Somoza di Nikaragua, kudeta militer juga menggulingkan sejumlah pemerintah yang sebelumnya mendukung tuntutan HAM pada 1948. Demokrasi Venezuela berakhir pada November tahun itu dengan kudeta militer yang mengangkat diktator Marcos Pérez Jiménez ke tampuk kekuasaan. Di Kuba, kudeta militer pada 1952 mengantarkan kediktatoran Fulgencio Batista. Di samping itu, salah satu dari sedikit negara demokrasi yang tersisa di kawasan ini, Kosta Rika, bahkan enggan menghadiri konferensi 1954 karena pemerintah Venezuela selaku tuan rumah begitu represif.²¹

Cacat besar kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada periode ini adalah menjadikan para diktator sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan ini, seperti Pérez Jiménez, Batista, dan Trujillo, serta Somoza di Nikaragua, dan bukan negara-negara demokratis seperti Brasil, Uruguay, Chili, dan Kosta Rika.²² Para diktator ini menganggap bahwa perjuangan mereka melawan komunisme dan melestarikan “peradaban Kristen” mengalahkan semua isu lain di kawasan ini. Menurut Balaguer, setiap topik lain dalam agenda, seperti pembentukan Pengadilan HAM Inter-Amerika, menjadi isu sekunder ketika dihadapkan dengan “betapa besarnya ancaman jahat komunisme terhadap negara-negara Amerika.”²³ Pada pertemuan di Caracas, Balaguer memuji-muji Amerika Serikat, mengatakan bahwa, bila kawasan ini “selamat dari bencana yang mengancam umat manusia, tak pelak lagi keajaiban itu sepenuhnya berkat Amerika Serikat, yang tak pernah luput berkorban untuk menghentikan konspirasi komunis dalam rangka menyelamatkan peradaban, peradaban kita, dari persekongkolan sejarah yang merusak ini.”²⁴

Pada saat yang sama, posisi Amerika Serikat terkait HAM telah bergeser dan mengeras. Pada 1952, Presiden Eisenhower terpilih dengan kampanye yang dipengaruhi oleh kebangkitan McCarthyisme dan tuduhan bahwa kubu Demokrat terlampaui lemah terhadap komunis dan “kehilangan” Tiongkok. Aliansi di dalam negeri Amerika Serikat antara kelompok segregasionis dan Cold Warriors, yang masing-masing punya alasan tersendiri dalam menolak ide perlindungan HAM internasional, memaksa Eisenhower dan Menteri Luar Negeri, John Foster Dulles, untuk menyampaikan kepada Kongres bahwa Amerika Serikat tidak akan meratifikasi semua konvensi HAM internasional yang sedang disusun PBB.²⁵ Akibatnya, Amerika Serikat tidak banyak mendukung upaya-upaya regional untuk membentuk institusi HAM. Yang dapat dilakukan Amerika Serikat dalam situasi tersebut paling-paling hanya memberikan suara

dukungan terhadap resolusi HAM dan “tidak mengajukan keberatan” kepada negara-negara lain yang memasuki konvensi HAM:

Meski Amerika Serikat, karena struktur Pemerintahan Federalnya, tidak memungkinkan untuk memasuki konvensi multilateral terkait HAM atau terkait Pengadilan HAM Inter-Amerika, Amerika Serikat tentunya tidak mengajukan keberatan terhadap negara lain yang memasuki konvensi terkait subjek-subjek tersebut jika hal itu dianggap memungkinkan.²⁶

Dengan menyebutkan “struktur Pemerintahan Federalnya,” Amerika Serikat mengacu pada argumen hak negara bagian yang dibuat negara-negara bagian di wilayah Selatan saat itu, yang antara lain mengklaim bahwa pemerintah federal tidak memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan diskriminasi rasial di wilayah selatan.²⁷ Kekhawatiran para anggota parlemen, terutama di bagian selatan, bahwa konvensi HAM internasional dapat digunakan untuk melemahkan hak negara bagian tersebut menyebabkan Amerika Serikat tidak banyak terlibat dalam upaya-upaya internasional dan regional untuk mengembangkan hukum HAM dari tahun 1953 hingga 1973.

Pada pertemuan tahun 1954, suara-suara yang mendukung institusionalisasi hukum HAM menyusut hingga tinggal segelintir negara yang masih dipimpin rezim demokrasi saja—Uruguay, Chili, Brasil, dan Kosta Rika. Meski sama-sama mengkhawatirkan komunisme, negara-negara demokratis tersebut memiliki pendekatan yang berbeda untuk memerangnya. Delegasi Chili di Caracas, misalnya, menyatakan, “Kita harus mengeluarkan kuman komunis dari tempat berkembang biaknya yang paling pesat, yaitu kesengsaraan dan kebodohan rakyat. Komunisme adalah sekutu bagi kesedihan, kebutuhan, dan penderitaan; ia tidak akan muncul dari orang-orang yang sejahtera dan bahagia.”²⁸ Negara-negara seperti Chili dan Uruguay memandang bahwa reformasi politik dan ekonomi yang berjalan di negaranya akan membuat mereka kebal terhadap “kuman komunis” ini.

Amerika Serikat berpandangan lain. Tujuan utama Amerika Serikat di Konferensi Caracas adalah mencari dukungan multilateral terhadap agenda antikomunis, seperti dukungan rahasia untuk menginvasi pemerintahan terpilih Jacobo Árbenz di Guatemala, yang dianggap komunis. Árbenz adalah tokoh berhaluan kiri yang bercita-cita menjalankan

reformasi agraria di negaranya, yang dia anggap sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan. Árbenz, meski merupakan simpatisan partai komunis Guatemala, tidak menganggap bahwa negara komunis dapat atau harus didirikan di Guatemala pada saat itu.²⁹ Tetapi Árbenz dimusuhi pemerintah Amerika Serikat dan dituduh mengusung komunisme karena reformasi agrariannya dan, terutama, karena dia menasionalisasi properti United Fruit Company, perusahaan Amerika Serikat, dengan kompensasi hanya sejumlah nilai tanah yang mereka laporkan dalam pembayaran pajak.³⁰

Menteri Luar Negeri Eisenhower, John Foster Dulles, dan saudaranya, Alan Foster Dulles, Direktur CIA, tidak membedakan dengan cermat pemerintah kiri yang terpilih secara demokratis dan pemerintah komunis Uni Soviet. Dulles bersaudara menganggap Árbenz sebagai pos terdepan penguasa Soviet di Amerika Latin dan ingin menyingkirkannya. Hubungan ekonomi mereka secara personal yang sangat erat dengan United Fruit Company memperkuat kecenderungan ideologi mereka. Negara-negara Amerika Latin tahu bahwa John Foster Dulles menggunakan konferensi Caracas untuk memperoleh legitimasi atas sanksi terhadap Guatemala dan terhadap invasi rahasia kelak. Meski banyak negara Amerika Latin tidak bersimpati terhadap Guatemala, mereka khawatir membuat preseden berbahaya yang mengundang lebih banyak intervensi Amerika Serikat di kawasan ini.³¹ Setelah perdebatan panjang, Amerika Serikat berhasil meyakinkan 17 negara anggota untuk memberikan suara dukungan terhadap deklarasi menentang “Intervensi Komunis Internasional” di kawasan ini, pernyataan yang ditujukan kepada Guatemala tanpa menyebutkan nama negara itu.³² Dengan hipokrit, konferensi ini juga menegaskan kembali komitmen regional terhadap demokrasi, sekalipun negara-negara yang hadir tahu bahwa pemerintahan terpilih Árbenz tak lama lagi akan digulingkan. Argentina dan Meksiko abstain; hanya Guatemala yang memberikan suara penolakan.

Meskipun Uruguay tidak memberikan suara menolak resolusi ini, para delegasinya menyadari maksud Amerika Serikat dan menentang mereka secara eksplisit. Jiménez de Aréchaga, yang mewakili pemerintah Uruguay di Caracas pada 1954, bertanya dalam salah satu sesi:

[D]emokrasi macam apa yang sampai-sampai harus kita bunuh untuk menyelamatkannya? ... Kita tidak ingin menganggap kecil bahayanya, tetapi haruskah kita tunduk pada ketakutan histeris (rakyat negara

saya dan semua negara yang berpartisipasi dengan tulus dan niat baik) sampai-sampai kita melegitimasi kebijakan yang, dengan kedok antikomunisme, dapat menjadi ancaman lain terhadap kebebasan rakyat negara-negara Amerika?³³

Jiménez de Aréchaga memperingatkan “ketakutan histeris” yang dapat digunakan untuk menjustifikasi kudeta militer terhadap pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Kekhawatirannya sangat jelas; taktik semacam itu akan makin banyak digunakan untuk menjustifikasi rezim otoritarian di seluruh kawasan ini, dan ujungnya bahkan di Uruguay sendiri yang kelihatannya stabil.

Kebijakan antikomunis Amerika Serikat yang agresif menyebabkan kawasan ini terpolarisasi. Ketika pemerintahan Árbenz digulingkan dengan dukungan CIA pada 1954, kaum kiri pun menjadi radikal. Che Guevara khususnya, yang berada di Kota Guatemala ketika Árbenz jatuh, menjadi makin radikal. Kira-kira pada masa itulah Che Guevara dan Fidel Castro mulai berpandangan bahwa hanya revolusi bersenjata yang mampu membawa perubahan. Dari segi ini, kegagalan Amerika Serikat untuk membiarkan pemerintahan kiri yang terpilih secara demokratis menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya; saat kubu kiri merasa bahwa mereka tidak akan dibiarkan berkuasa lewat pemilu, mereka pun memusatkan perhatiannya untuk berkuasa lewat perjuangan bersenjata. Saat rezim otoriter yang menggantikan Árbenz di Guatemala menjadi kian represif, kubu kiri di sana membentuk kelompok gerilya untuk merebut kekuasaan.

Perkembangan Terkait di Seluruh Dunia: Dekolonisasi

Amerika Latin bukanlah satu-satunya kawasan di dunia berkembang yang banyak berkontribusi terhadap ide dan praktik perlindungan HAM internasional. Malah, ketika momentum pembentukan institusi HAM di Amerika Latin mulai mandek, negara-negara yang baru merdeka di Kawasan Selatan Dunia mengambil alih perjuangan HAM. Kisah ini disampaikan dengan cermat oleh para sejarawan dekolonisasi mutakhir; yang disajikan di sini adalah selang pandang dari uraian sejarah mereka yang terdokumentasi dengan rapi dan dibuktikan dengan hati-hati.³⁴

Para ahli belakangan menunjukkan bahwa dekolonisasi adalah soal *kedaulatan* sekaligus soal HAM, berbeda dengan klaim sebelumnya bahwa dekolonisasi adalah soal kedaulatan semata dan *bukan* soal hak.³⁵

Menurut Roland Burke, “Dekolonisasi adalah yang paling berpengaruh dalam membentuk program HAM antara 1950 dan 1979. Dalam hampir setiap perdebatan penting, para delegasi Arab, Asia, dan Afrika berperan paling terdepan dan kontribusi mereka menunjang pembentukan pilar utama sistem HAM modern.”³⁶ Sejalan dengan itu, Steven Jensen menyatakan, “Dekolonisasi mengakibatkan retakan di dunia yang membentang dari Selatan ke Utara dan dari Timur ke Barat. Dari pergeseran tektonik ini, isu HAM muncul dan seiring waktu menjadi perhatian utama dunia.” Transformasi ini adalah buah dari “cerita tentang agensi yang tokoh utamanya justru adalah sekelompok negara dari Kawasan Selatan Dunia.”³⁷

Menghadapi agensi yang ditunjukkan khususnya oleh bekas koloni dan negara-negara lain di Kawasan Selatan, kekuatan kolonial Eropa bekerja keras mempertahankan “dunia yang terbelah,” agar perlindungan HAM internasional tidak menyebar ke daerah koloni mereka dan mencoreng legitimasi pemerintah kolonial.³⁸ Kekuatan kolonial Eropa justru menjegal dan bukannya mendorong perlindungan HAM internasional. Malah, dekolonisasi sendiri jugalah yang membuat negara-negara Eropa dapat berperan kembali dalam HAM global, yang tercoreng setelah Perang Dunia II: “Dekolonisasi merupakan prakondisi yang membuat ‘Eropa’ dapat kembali dikaitkan dengan dan diakui dalam universalisme egalitarian.”³⁹ Seperti kata Frederick Cooper tentang isu terkait, aktor-aktor dari Kawasan Selatan Dunia “tidak hanya terperangkap dalam kerangka keyakinan Eropa; mereka mengubah drastis anggapan orang-orang Eropa tentang yang mereka yakini.”⁴⁰

Kaitan antara anti-kolonialisme dan HAM sangat kentara dalam Konferensi Bandung 1955 yang diselenggarakan di Indonesia. Perwakilan dari 29 negara Afro-Asia hadir, serta wakil dari wilayah lain yang belum merdeka. Konferensi ini penting karena menunjukkan perhatian terhadap penentuan nasib sendiri sebagai HAM.⁴¹ Kebebasan menentukan nasib sendiri sebagai hak kolektif rakyat menjadi slogan mobilisasi yang ampuh bagi kaum nasionalis anti-kolonial, dan para tokoh nasionalis yang hadir di Bandung memandang bahwa HAM dan penentuan nasib itu saling menunjang.⁴² Pada saat yang sama, para perwakilan juga menyadari berbagai persoalan terkait HAM, yang ditunjukkan dengan dukungan konferensi ini terhadap DUHAM.⁴³ Meski delegasi Tiongkok di Bandung berupaya menghalangi sebagian dari perhatian terhadap

HAM ini, khususnya menyangkut DUHAM, yang tidak ikut disusun oleh Tiongkok, mereka tidak berhasil mengubah bahasanya.

Beberapa tokoh pemimpin dari Afrika, terutama yang lekat dengan transnasionalisme Pan-Afrika—seperti Julius Nyerere, presiden pertama Tanzania, dan Kwame Nkrumah, pemimpin Ghana yang baru merdeka—menyatakan dukungan mereka terhadap HAM sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan kemerdekaan dan persatuan wilayah. Di bawah kepemimpinan Nkrumah, Konferensi Seluruh Rakyat Afrika (All-African Peoples' Conference) diselenggarakan untuk pertama kalinya. Pertemuan regional yang dihadiri negara-negara merdeka Afrika serta delegasi gerakan kemerdekaan ini diselenggarakan di Accra, Ghana, pada 1958. Konferensi ini antara lain ditujukan untuk “memobilisasi opini dunia untuk menentang pelanggaran hak politik dan HAM yang mendasar bagi orang Afrika.”⁴⁴ Negara-negara di Kawasan Selatan Dunia menegaskan kembali keyakinan mereka pada kaitan antara dekolonisasi dan HAM dalam Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri dan Bangsa Terjajah (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People) pada 1960.

Kampanye Anti-Apartheid dan Konvensi Internasional Menentang Diskriminasi Rasial (CERD)

Selama Perang Dingin, perjuangan HAM rintisan dan berkelanjutan yang paling penting agaknya adalah kampanye anti-apartheid. Pada bab 3, kita sudah melihat bagaimana para diplomat pada masa-masa awal PBB menggunakan doktrin HAM baru untuk memprotes diskriminasi hukum terhadap orang India di Afrika Selatan dan untuk meyakinkan Majelis Umum bahwa PBB dapat dan harus melakukan penyelidikan. Ini adalah kali pertama dari banyak contoh bagaimana PBB menjadi arena untuk menuntut HAM bagi orang-orang di Afrika Selatan.

Kampanye anti-apartheid, yang diprakarsai para aktivis dan pemerintah dari Afrika dan negara-negara lainnya di Kawasan Selatan Dunia, merupakan salah satu kampanye HAM transnasional berskala besar yang pertama. Pada 1940-an, Kongres Nasional Afrika (African National Congress, ANC), gerakan utama yang menentang apartheid, “secara eksplisit menjadikan HAM sebagai tujuan mendasar dari perjuangannya untuk mewujudkan keadilan rasial” dalam piagamnya, yang disebut Klaim Afrika, dalam rumusan Anggaran Dasar ANC, dan dalam Manifesto Liga

Pemuda ANC, yang disusun para pemimpin muda yang kelak memimpin ANC, termasuk Nelson Mandela dan Oliver Tambo.⁴⁵ Tuntutan ANC atas hak digaungkan oleh aktor-aktor internasional yang berupaya menekan pemerintah Afrika Selatan. Konferensi Seluruh Rakyat Afrika pada 1958 merupakan pertemuan pertama yang mengusulkan sanksi terhadap Afrika Selatan.⁴⁶

Pada 1965, sentimen anti-apartheid berperan penting dalam mendorong para pemimpin Asia dan Afrika untuk memprakarsai penyusunan konvensi HAM internasional utama yang kedua (setelah Konvensi Genosida)—Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD). Dua tahun kemudian, isu apartheid mendorong Komisi HAM PBB untuk menyusun prosedur khusus yang pertama, Kelompok Kerja Ad Hoc Pakar Afrika Selatan (Ad Hoc Working Group of Experts on Southern Africa).⁴⁷ Prosedur khusus ini menjadi preseden bagi prosedur-prosedur berikutnya, dan menjadi salah satu alat utama yang digunakan PBB untuk menyelidiki dan menangani berbagai masalah HAM. PBB juga memberikan perhatian pada situasi di Rhodesia Selatan, rezim supremasi kulit putih lain yang, pada 1966, menjadi negara pertama yang dijatuhi sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Seperti saat bersuara menentang apartheid pada 1947, India juga terus berupaya menentang supremasi kulit putih di Afrika Selatan dan Rhodesia Selatan. Pada 1966, India mendesak seluruh negara untuk memutus hubungan politik dan ekonomi dengan rezim minoritas kulit putih di Rhodesia Selatan dan, pada 1968, pemerintah India mengusulkan rancangan resolusi Dewan Keamanan yang mengecam eksekusi tahanan di Rhodesia Selatan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.⁴⁸ Negara dari Kawasan Selatan Dunia dalam hal ini menjadi salah satu contoh awal upaya mendorong Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan terkait isu HAM.

Perkembangannya lebih jauh dari sekadar apartheid. Jamaika, salah satu negara pascakolonial yang memimpin perjuangan HAM di PBB pada tahun 1960-an, baru menjadi anggota PBB selama tiga minggu saat menyerukan agar PBB menggecarkan lagi pemajuan HAM, di antaranya dengan menetapkan tahun HAM internasional.⁴⁹ Jamaika juga turut mendorong penyusunan rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD). Karena banyak negara dari Kawasan Selatan Dunia sangat merasakan diskriminasi rasial,

CERD dapat dirancang dan diratifikasi dalam waktu singkat. Negara-negara dari Kawasan Selatan Dunia juga ingin memastikan bahwa CERD memiliki mekanisme penegakan. Negara-negara itu mendorong pembentukan komite khusus yang terdiri dari para pakar independen tentang diskriminasi rasial. Komite ini bertugas menerima laporan negara tentang kepatuhan terhadap konvensi ini, yang belakangan disebut “badan konvensi”. Dalam kasus CERD, badan konvensi ini disebut Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on the Elimination of Racial Discrimination). Selain itu, dalam konteks negosiasi CERD, Lebanon juga memprakarsai inovasi kelembagaan lainnya—hak individu untuk mengajukan petisi kepada badan konvensi. Dengan demikian, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial tidak hanya dapat menerima laporan negara, tetapi juga petisi dari perorangan.

Prakarsa CERD yang dipimpin negara-negara di Kawasan Selatan menjadi preseden bagi implementasi dan penegakan kelembagaan di seluruh sistem konvensi HAM. Jamaika dan negara sekutu lainnya menggunakan keberhasilan CERD yang cepat untuk menghidupkan kembali dua kovenan HAM umum yang terbengkalai di Majelis Umum PBB. Setelah adanya preseden badan konvensi CERD, kedua kovenan dan semua konvensi HAM berikutnya pun dibentuk dengan disertai badan konvensi untuk memastikan penegakannya. Ketentuan baru CERD yang memungkinkan petisi perorangan juga diikuti di berbagai konvensi HAM lainnya yang biasanya tertuang dalam protokol terpisah.

Melemahnya Dukungan terhadap HAM di Kawasan Selatan Dunia

Di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika, dukungan terhadap HAM berkurang seiring makin banyaknya rezim otoritarian. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat semasa Perang Dingin berkontribusi terhadap tren ini karena negara itu turut menggulingkan pemerintahan kiri yang terpilih secara demokratis di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika Latin. Salah satu contoh paling awal, pada 19 Agustus 1953, terjadi kudeta yang menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Iran Mohammad Mosaddeq—setahun sebelum kudeta di Guatemala. Mosaddeq merupakan tokoh nasionalis yang terpilih sebagai anggota parlemen pada April 1951.⁵⁰ Pemilu ini terbilang demokratis dalam sejarah Iran saat itu; pemilu ini diselenggarakan setelah pemilu curang yang diselenggarakan Shah ditolak oleh publik. Protes rakyat terhadap hasil pemilu awal berlanjut hingga Shah berjanji untuk menyelenggarakan lagi putaran pemilu yang

adil.⁵¹ Selama protes dan pemilu berlangsung, Mosaddeq tampil sebagai pemimpin koalisi Front Nasional, yang diorganisasi untuk mendukung demokrasi dan menentang intervensi asing. Mosaddeq kemudian terpilih sebagai perdana menteri dari dalam parlemen dengan suara 79 berbanding 12.⁵² Komitmennya untuk menasionalisasi industri perminyakan, dan dengan demikian membebaskan Iran dari dominasi Inggris yang berkepanjangan, membuatnya memperoleh dukungan terbanyak.⁵³ Selama puluhan tahun, publik tidak banyak tahu soal peran Amerika Serikat dalam penggulingan Mosaddeq, tetapi baru-baru ini ditemukan bukti yang menunjukkan peran sentral Amerika Serikat dalam operasi di Iran, memperjelas bahwa CIA akan tetap menjalankan kudeta sekalipun Shah sendiri tidak ikut serta.⁵⁴

Justifikasi Amerika Serikat untuk tindakan terhadap Iran adalah kekhawatiran akan komunisme, bayangan akan potensi jatuhnya Iran pada pengaruh komunis di dalam negeri atau invasi Uni Soviet ke Iran yang dapat mengawali perang global.⁵⁵ Tetapi, menurut sejarawan Ervand Abrahamian, “bahaya komunis’ lebih merupakan akal-akalan retorik dan bukan isu yang nyata.”⁵⁶ Yang menjadi kekhawatiran utama Amerika Serikat justru adalah minyak dan negara ini pun terjerumus dalam konflik akibat krisis minyak Anglo-Iran.⁵⁷ Minyak dibutuhkan dalam rangka pemulihan ekonomi Barat setelah Perang Dunia II, dan bila terjadi perang dengan Uni Soviet.⁵⁸

Kudeta ini mengakhiri demokrasi di Iran dan mengakibatkan represi politik, terutama Partai Tudeh.⁵⁹ Keberhasilan kudeta di Iran menjadikannya sebagai “cetak biru” operasi rahasia di masa berikutnya, termasuk Guatemala pada 1954.⁶⁰ Menurut sejarawan Shiva Balaghi, “operasi rahasia untuk menggulingkan pemerintahan demokratis liberal menjadi landasan strategi Perang Dingin Amerika Serikat.” CIA dan pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa kudeta itu singkat, sedikit ongkosnya, dan mudah mengelak tanggung jawabnya.⁶¹

CIA kemudian terlibat dalam operasi di Kongo pada 1960 dan 1961, membantu penggulingan pemerintah dan pembunuhan pemimpinnya, Patrice Lumumba.⁶² Lumumba, seorang tokoh nasionalis yang memiliki basis dukungan rakyat banyak, adalah pemimpin pertama, dan hingga kini masih satu-satunya, yang terpilih secara demokratis di Kongo.⁶³ Sebagaimana di Iran, alasan campur tangan Amerika Serikat yang paling sering didengar adalah demi membendung komunisme.⁶⁴ Kongo pun berkonflik dengan PBB, dan pertikaian ini menyebabkan negara ini

mendekat ke Soviet, setidaknya dalam hal bantuan.⁶⁵ Namun, kekhawatiran Amerika Serikat terhadap komunisme di Kongo tampaknya lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi ketimbang komitmen membela demokrasi—arti penting Kongo secara geografis terhadap kepentingan bisnis Amerika Serikat mendorong keterlibatan Amerika Serikat, menurut studi belakangan.⁶⁶ Sebagai insentif tambahan, CIA memutuskan untuk menggulingkan Lumumba karena hal itu relatif mudah. Negara-negara Afrika saat itu baru meraih kemerdekaan dan demokrasiya rapuh; rezimnya tidak sulit untuk digulingkan.⁶⁷

Prioritas utama CIA, menurut pernyataan CIA sendiri, adalah “Pemilihan pemerintah yang condong ke Barat, bersahabat dengan Amerika Serikat, berkomitmen pada cita-cita yang paling menjamin stabilitas dan ketertiban,” bukan demokrasi *per se*.⁶⁸ Setelah pembunuhan Lumumba, Kongo kemudian dibiarkan dipimpin oleh Mobutu, seorang diktator yang lebih menyukai Barat, dan bukannya pemimpin baru yang terpilih secara demokratis. Mobutu menghapuskan tradisi demokratis di negaranya (bahkan melakukan kudeta kedua pada 1965 untuk merebut kekuasaan sebagai penguasa tunggal negara itu) dan menghancurkan budaya politiknya.⁶⁹ Di Afrika, ingatan tentang campur tangan Barat di Kongo menjadikan Lumumba sebagai simbol kebanggaan pan-Africanisme. Tetapi, di Kongo sendiri, Mobutu membelokkan sejarah dengan terus membajak dan menghapuskan ingatan tentang Lumumba, sampai-sampai masyarakat hanya memiliki gambaran samar tentang sosok Lumumba dan tidak melestarikan warisan nasionalisme atau pun demokrasiya.⁷⁰

Kudeta bukanlah satu-satunya metode intervensi Amerika Serikat semasa Perang Dingin. Sebagaimana dibuktikan dengan cermat oleh Gary Bass, atas nama kebijakan antikomunis, Gedung Putih secara ilegal memasok senjata ke Pakistan pada 1971, sehingga mendukung rezim yang melakukan genosida dengan skala seperti di Rwanda dan sebagian besar terlupakan.⁷¹ Pada saat itu, Pakistan terbagi secara geografis ke dalam dua wilayah utama: Pakistan Barat dan Pakistan Timur, sekarang Bangladesh. Pemimpin Bengali, Sheikh Mujibur Rahman dari Liga Awami, memenangkan pemilu yang diselenggarakan pada Desember 1970.⁷² Pemilunya berjalan dengan bebas dan adil, semua orang dewasa dapat memilih, termasuk perempuan.⁷³ Tetapi, para politisi dari Pakistan Barat tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada para politisi dari Bangladesh dan, pada 1971, tentara Pakistan memulai genosida sistemik terhadap

orang-orang Bengali yang berlangsung sekitar sembilan bulan. India melakukan invasi untuk menghentikan genosida, yang menurut salah seorang akademisi India “dianggap banyak kalangan sebagai salah satu kasus intervensi kemanusiaan yang paling berhasil terhadap genosida.”⁷⁴ Bass menunjukkan bahwa “arahan India untuk menyelamatkan orang-orang Bangladesh merupakan kesempatan penting untuk mendengarkan suara hukum dan moral non-Barat” tentang isu-isu HAM.⁷⁵ Ketika India melakukan intervensi untuk menghentikan genosida, Amerika Serikat aktif mendukung Pakistan yang menghancurkan demokrasi di kawasan ini; Bangladesh, yang rapuh karena kekerasan dan korupsi, belum mencapai politik yang benar-benar demokratis sejak saat itu.

Pada saat yang sama ketika sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin beralih ke rezim otoriter, upaya-upaya di PBB dan OAS terus berlanjut untuk menggalang lebih banyak dukungan terhadap HAM. Jamaika, misalnya, mendorong Konferensi HAM Internasional Pertama pada 1968 untuk memperingati hari jadi DUHAM yang ke-20. Ironisnya, Konferensi 1968 diselenggarakan di Teheran, Iran, ketika Shah sedang gencar membungkam suara protes dan melanggar HAM.⁷⁶ Tak heran jika Konferensi Teheran tidak memenuhi harapan tinggi para penyelenggaranya. Perkembangan di tahun 1968 yang penuh gejolak, seperti gerakan reformasi di Cekoslowakia (“Prague Spring”) serta unjuk rasa mahasiswa di seluruh dunia, mengalihkan perhatian terhadap konferensi ini.⁷⁷ Perjuangan menentang apartheid dan konflik Israel-Palestina menjadi pembicaraan di hampir sepanjang pertemuan, melupakan pembahasan tentang isu-isu HAM yang lebih luas.⁷⁸ Selain itu, para perwakilan dari negara-negara yang makin otoriter di Kawasan Selatan Dunia lebih mendahulukan kemerdekaan dan pembangunan ketimbang hak individu.⁷⁹ Meski Konferensi Teheran dianggap gagal oleh banyak kalangan, banyak proses di dalamnya menandakan bermulanya agenda hukum HAM di PBB. Jika mencermati sejarah ini, tampak bahwa Afrika merupakan “kekuatan pendorong” dalam proses yang membuat “HAM memiliki arti nyata” sebagai standar universal yang mengikat secara hukum.⁸⁰

Negara-negara Afrika lebih blak-blakan soal pelanggaran HAM di rezim apartheid Afrika Selatan ketimbang di negara-negara Afrika yang merdeka lainnya. Setelah Idi Amin berkuasa di Uganda lewat kudeta militer pada 1971, presiden negara tetangga Tanzania, Julius Nyerere, berkali-kali mendesak Organisasi Kesatuan Afrika (Organization of African Unity, OAU) untuk mengecam pelanggaran HAM masif yang dilakukan

Amin. Nyerere kadang terang-terangan membandingkan kecaman OAU terhadap pelanggaran di Afrika Selatan dengan kegagalan OAU mengecam pelanggaran di negara-negara Afrika yang baru merdeka, seperti Uganda. Nyerere menyatakan, “Amin ... telah membunuh lebih banyak orang Afrika ketimbang Boer di bawah pemerintahan apartheid.”⁸¹ Ketika kecaman terhadap Amin diabaikan oleh para pemimpin Afrika lainnya, Tanzania pun berperang dengan Amin pada 1978–79 untuk menggulingkannya, suatu perang yang sering kali dianggap sebagai contoh awal lain dari intervensi kemanusiaan sepihak.⁸²

Dampak Revolusi Kuba di Amerika Latin

Satu dekade sebelumnya, pada tahun 1960-an, keberhasilan Revolusi Kuba memicu peninjauan ulang terhadap isu-isu HAM di Amerika Latin. Setelah para pemberontak yang dipimpin Fidel Castro mengalahkan militer Kuba pada Januari 1959, diktator Fulgencio Batista dan lingkaran terdekatnya melarikan diri ke Republik Dominika, dan disambut oleh Trujillo. Pemerintah Kuba yang baru menuduh Batista dan pemerintahannya sebagai “penjahat perang” dan menyerang Trujillo karena memberi suaka kepada mereka.⁸³ Peristiwa ini kemudian disebut “gangguan di Karibia” dan mendorong diadakannya pertemuan khusus para Perdana Menteri negara-negara Amerika di Santiago, Chili, pada Agustus 1959.

Menafsirkan risalah pertemuan Santiago membutuhkan pembacaan terhadap hal yang tersirat karena, dalam tradisi diplomatik pada saat itu, hal-hal yang dikemukakan di depan umum tidak pernah eksplisit. Menteri Luar Negeri pemerintah revolusioner Kuba yang baru, Raúl Roa García, menyampaikan pidato yang paling blak-blakan. Kata-katanya menunjukkan bagaimana pemerintah Kuba yang baru masih merumuskan pendekatannya terhadap urusan internasional dan belum mengesampingkan perlindungan HAM internasional. Dalam pidatonya, Roa García menjelaskan bahwa Kuba memberikan suara dukungan terhadap resolusi HAM dan penyelenggaraan pemerintahan yang representatif. Namun, dia mengisyaratkan bahwa perhatian utama pemerintahnya adalah “hubungan yang ada saat ini antara keterbelakangan ekonomi dan instabilitas politik ... Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tanpa struktur ekonomi yang solid dan pemerataan kekayaan yang adil, penyelenggaraan demokrasi dan penghormatan HAM akan menghadapi risiko dan mistifikasi serius.” Roa García mengemukakan pendapat yang kian lazim di kalangan kiri Amerika Latin tentang akar penyebab ekonomi

dari pelanggaran HAM dan otoritarianisme. Dia menyampaikan dukungannya terhadap HAM dan “kemenangan rakyat Amerika yang merdeka melawan kediktatoran.”⁸⁴ Sejumlah negara cukup bersimpati terhadap argumen ini. Meksiko, misalnya, meski pada saat itu otoritarian, mengingatkan kembali revolusi di negaranya saat menyampaikan dukungan kepada Kuba, “yang aspirasinya untuk kemajuan ekonomi dan keadilan sosial mendapat dukungan penuh pemerintah dan rakyat Meksiko.”⁸⁵ Demikian juga, Bolivia, yang dipimpin pemerintah semi-demokratis yang condong ke kiri, sepakat bahwa stabilitas demokrasi dan perlindungan HAM “akan mungkin terwujud ketika kesenjangan pembangunan yang lebar di antara negara-negara Amerika telah teratasi.”⁸⁶

Salah satu kesimpulan yang diambil negara-negara Amerika lainnya dari Revolusi Kuba adalah perlunya perubahan jika ingin menghindari revolusi. Karena merasa bahwa kediktatoran menyebabkan perampasan HAM, negara-negara Amerika pun mengeluarkan dua resolusi penting di Santiago yang mendukung mekanisme perlindungan HAM yang telah terbengkalai selama lebih dari satu dekade. Resolusi pertama menghidupkan kembali proses penyusunan konvensi HAM regional yang mengikat dengan meminta Dewan Ahli Hukum untuk menyelesaikan rancangan Konvensi Amerika tentang HAM (American Convention on Human Rights). Pada saat yang sama, karena penyusunan dan ratifikasi Konvensi ini akan perlu waktu, negara-negara Amerika mendukung resolusi kedua untuk membentuk lembaga sementara—Komisi HAM Inter-Amerika (Inter-American Commission on Human Rights, IACHR)—untuk bertindak atas nama Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia dan untuk melakukan sejumlah pengawasan internasional terhadap praktik HAM di negara-negara Amerika. Meski beberapa negara berharap IACHR yang baru dapat digunakan untuk menstigmatisasi dan mengucilkan Kuba serta rezim kiri lainnya, namun pada tahun-tahun awalnya pun IACHR sudah mencurahkan perhatiannya pada pelanggaran HAM berskala luas yang dilakukan rezim otoriter kanan, seperti Republik Dominika, Haiti, Guatemala, Paraguay, dan Nikaragua.

Politik yang tidak stabil di kawasan ini, dan terutama kegagalan Teluk Babi, makin memperlambat proses penyusunan konvensi HAM regional yang mengikat serta menyebabkan penundaan Konferensi Inter-Amerika Ke-11. Ketika perwakilan negara-negara pada akhirnya mengikuti konferensi ini pada 1962 di resor Punta del Este di wilayah pantai Uruguay, dibuatlah garis pertarungan antara rezim Kuba dan pemerintah baru

Amerika Serikat yang dipimpin John Kennedy. Hal ini pada akhirnya menyebabkan Kuba ditendang dari sistem Inter-Amerika.

Terlepas dari konflik Amerika Serikat-Kuba, bintang pada konferensi Punta del Este adalah Che Guevara, satu-satunya delegasi yang disambut dengan tepuk tangan khalayak saat tiba di Uruguay. Tapi Guevara khawatir dengan kelangsungan Revolusi Kuba. Invasi Teluk Babi telah gagal, tetapi dia menduga akan ada invasi lain, atau karantina penuh, kali ini dengan dukungan negara-negara Amerika Latin lainnya. Dalam pidato pertamanya di konferensi ini, Guevara mengecam intervensi Amerika Serikat di Kuba dan di negara-negara lain di kawasan ini. Meski Guevara tidak menyebut soal hak secara eksplisit dalam pidatonya, dia berbicara panjang lebar tentang demokrasi, menyatakan bahwa bagi Kuba

demokrasi tidak boleh hanya berupa pemilu yang hampir selalu fiktif dan dijalankan tuan tanah kaya dan politisi profesional, melainkan terwujud dalam hak warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri ... demokrasi hanya akan berdiri di Amerika Latin ketika rakyat benar-benar bebas untuk memilih, ketika kaum papa tidak terbelenggu oleh kelaparan, diskriminasi sosial, dan sistem hukum.⁸⁷

Kata-kata Guevara tumbuh subur di kalangan kaum muda Amerika Latin, bukan hanya di tempat-tempat yang demokrasi dianggap fiktif, tetapi juga di tempat-tempat seperti Uruguay dan Brasil, yang meski demokrasi relatif kuat tapi masih dianggap belum memadai oleh para reformis. Sementara itu, Amerika Serikat berkontribusi dengan caranya sendiri untuk mendiskreditkan demokrasi di kawasan ini. Dengan menggunakan para diktator di kawasan ini sebagai benteng melawan komunisme dan dengan mendorong kudeta terhadap negara demokrasi yang dipimpin kubu kiri, seperti di Guatemala, Amerika Serikat menebalkan anggapan bahwa yang dapat membawa perubahan hanyalah revolusi bersenjata. Lagi-lagi, HAM dan demokrasi kembali terpinggirkan di tengah berlangsungnya pertarungan Perang Dingin di konferensi OAS. Tetapi meski terabaikan di konferensi OAS, ide-ide HAM memperoleh nyawa baru dengan terbentuknya Komisi HAM Inter-Amerika (Inter-American Commission on Human Rights) yang baru.

Komisi HAM Inter-Amerika

Meski dibentuk pada 1959, Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat berdiri dan mulai berjalan, sebagaimana yang lazim terjadi pada institusi HAM lainnya. Baru pada 1965, ketika negara-negara mengubah statuta IACHR agar dapat menerima petisi, IACHR mulai memiliki alat yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. IACHR mungkin tampak kecil saat ini karena kita sudah punya segudang komisi HAM, tetapi di Amerika Latin ini adalah pertama kalinya negara-negara bersepakat untuk membentuk komisi independen yang bertugas mengawasi praktik HAM di negara-negara berdaulat. Karena itu, tak banyak model yang dapat dicontoh. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang pakar, IACHR “dibentuk sebagai improvisasi yang tergesa-gesa serta tidak mempunyai peran atau prosedur yang dipikirkan dengan matang.”⁸⁸ Ketentuan awalnya bahkan tidak membolehkan komisi ini untuk berkomunikasi dengan pemerintah untuk menanyakan soal pelanggaran HAM dan tidak dapat menerima pengaduan dari perorangan. Tetapi sejak pertama kali dibentuk, orang-orang di wilayah ini menganggap komisi tersebut sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak mereka dan mulai mengirim surat untuk mengecam pelanggaran HAM.⁸⁹

Pada 1968, pemerintahan demokratis Uruguay menominasikan Jiménez de Aréchaga sebagai salah satu dari tujuh pakar yang akan bertugas di IACHR. Pada saat itu, IACHR telah menetapkan dan memperluas prosedur serta metode kerjanya, tetapi belum banyak memiliki capaian dalam perlindungan HAM di kawasan ini. Yang mengejutkan para pengamat, hal ini berubah di bawah kepemimpinan Jiménez de Aréchaga ketika dia, bersama beberapa rekannya, mengubah IACHR menjadi alat perlindungan HAM internasional, terutama lewat dokumentasi pelanggaran dan rekomendasi perbaikan. IACHR tidak hanya mengambil sikap terhadap pelanggaran HAM di negara-negara kecil di Amerika Tengah dan Karibia seperti Republik Dominika, Honduras, atau Kuba saja, tetapi juga di negara-negara besar seperti Brasil, yang menjadi makin represif setelah terjadinya kudeta militer pada 1964.

Pengaktifan IACHR merupakan hasil dari gabungan upaya berbagai organisasi masyarakat sipil, yang mengadukan pelanggaran HAM berat kepada IACHR, serta kesigapan para komisioner dalam merespons pengaduan tersebut. Masyarakat sipil memerlukan Komisi ini, dan Komisi ini pun memerlukan masyarakat sipil. Pada akhir 1960-an,

organisasi gereja dan akademisi di Brasil mulai mengirimkan informasi kepada kontak mereka di luar negeri tentang penyiksaan tahanan politik. Kelompok gereja dan akademisi ini melakukan kampanye agar penyiksaan di Brasil diketahui secara luas dengan menerbitkan artikel dan opini di surat kabar, tetapi mereka juga melakukan upaya-upaya lain untuk melindungi tahanan politik di Brasil. Saya masih ingat sewaktu dua aktivis HAM berbasis agama di Washington, D.C., berusaha mencari cara untuk membantu rekan-rekannya yang dipenjara di Brasil, lalu mengetahui keberadaan Komisi HAM Inter-Amerika (IACHR) dan menghubunginya lewat telepon untuk menanyakan apakah mereka dapat membantu.⁹⁰ IACHR menyampaikan bahwa NGO dapat mengajukan permohonan kepada Komisi, dan, mulai tahun 1970-an, beberapa NGO melakukan komunikasi penting dengan IACHR atas nama korban pelanggaran HAM dengan tuduhan penyiksaan, penahanan politik, serta eksekusi tahanan politik di Brasil.⁹¹ Konferensi Katolik Amerika Serikat dan Dewan Gereja Nasional, misalnya, menyurati IACHR tentang keberadaan 12.000 tahanan politik di Brasil dan mencatat kondisi mereka.⁹² IACHR, di bawah kepemimpinan Jiménez de Aréchaga, menjawab tantangan tersebut. Ketika pemerintah Brasil mempertanyakan yurisdiksinya, IACHR menjawab bahwa lembaganya memiliki wewenang untuk memeriksa situasi umum pelanggaran HAM, seperti penahanan dan penyiksaan berskala besar, selain merespons pengaduan perorangan.⁹³

Anggota komisi Genaro Carrió belakangan memuji Jiménez de Aréchaga sebagai “arsitek yang berintegritas dan berani” serta berjasa atas “banyak perubahan positif dalam perlindungan HAM yang efisien” di tubuh IACHR.⁹⁴ Setelah ikut merancang DUHAM pada 1948, Jiménez de Aréchaga berperan penting dalam mengubah institusi HAM yang baru menjadi alat yang efektif dalam merespons gerakan sosial pada tahun 1970-an, seolah menjadi jembatan manusia antara tahun 1940-an dan 1970-an, dan menggambarkan bagaimana gerakan sosial pada tahun 1970-an bergantung pada hukum dan institusi yang dirintis pada tahun 1940-an.

Jiménez de Aréchaga kecewa melihat negaranya sendiri Uruguay jatuh ke dalam kediktatoran militer pada 1973. Kudeta di Uruguay memiliki banyak kesamaan dengan kudeta di Chili yang terjadi pada tahun yang sama, ketika pemerintahan terpilih Salvador Allende yang sosialis juga digulingkan. Chili maupun Uruguay telah mempertahankan tradisi demokrasi di sebagian besar abad ke-20. Kedua negara ini juga memiliki

tingkat pendidikan yang tinggi, kelas menengah yang besar, serta politik yang relatif stabil dibanding banyak negara lain di kawasan ini. Namun kaum muda Uruguay tetap terperangkap dalam gelombang pemikiran revolusioner yang meluas di Amerika Latin. Kaum muda menganggap institusi-institusi demokrasi itu formal dan borjuis. Mereka juga memandang negara kesejahteraan yang dijalankan saat itu tidak mampu mengatasi kemiskinan para petani tebu di sebelah utara atau penduduk daerah kumuh Uruguay, dan mereka pun beralih ke kekerasan. Aksi kekerasan kelompok gerilyawan Tupamaro di Uruguay kemudian digunakan pemerintah untuk menjustifikasi intervensi militer.

Selepas kudeta militer sayap kanan di Uruguay pada 1973, rezim yang baru mulai memenjarakan dan kadang menghabisi lawan-lawannya—bukan hanya pemberontak, tetapi juga anggota parlemen sayap kiri dan tengah. Keluarga korban tak dapat lagi mencari pertolongan di lembaga-lembaga dalam negeri dan mencari bantuan ke mana-mana dengan putus asa. Hal ini, beserta rangkaian peristiwa brutal di Chili selepas kudeta 1973, menyebabkan jumlah pengaduan kepada IACHR melonjak luar biasa.

Pada 1974, IACHR mengeluarkan laporan pertama dari serial laporan HAM di Chili, mengkritik pemerintah Pinochet karena melakukan penyiksaan, eksekusi tanpa proses pengadilan, dan penghilangan paksa. Dalam laporan 1974 dan untuk pertama kalinya, IACHR mengusulkan agar negara anggota mengadili dan menghukum setiap pelaku. IACHR memberikan rekomendasi serupa dalam laporan lainnya tentang Chili pada 1977, serta dalam laporan tentang El Salvador dan Haiti pada 1979.⁹⁵ Pada 1980, IACHR mengeluarkan laporan per negara tentang Argentina berdasarkan kunjungan lapangan pada 1979 dan menjadi publikasi cetak pertama menyerukan penuntutan pelanggaran HAM di Argentina.⁹⁶

Seruan awal pengadilan HAM di Chili boleh jadi tampak seperti rekomendasi yang sederhana dan gampang, tetapi tidak demikian. Hal itu justru merupakan terobosan. Ketika IACHR pertama kali merekomendasikan pengadilan kepada Chili pada 1974, belum pernah ada negara di dunia yang memidanakan pemimpinnya sendiri atas pelanggaran HAM. Pada saat itu, IACHR masih bergerak di bawah Deklarasi Amerika karena konvensi HAM belum berlaku di kawasan ini. Oleh karena itu, rekomendasi untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum itu didasarkan pada ide tentang hak atas keadilan dan hak lain yang tertuang dalam Deklarasi Amerika 1948, bukan pada konvensi HAM. Para komisionernya memiliki

wawasan ke depan, tetapi mereka tidak membuat hukum dari awang-awang. Mereka melanjutkan ikhtiar sebelumnya dan memasukkan makna baru ke dalam tuntutan lama di kawasan itu akan hak atas keadilan yang dimiliki setiap individu di hadapan pemerintahnya, dan bahwa Deklarasi Amerika dapat dan harus dilindungi secara internasional.

Pada pertemuan khusus di San José, Kosta Rika, pada 1969, OAS akhirnya menyetujui dan membuka ratifikasi Konvensi Amerika tentang HAM, yang juga disebut Pakta San José. Hal ini terjadi sepuluh tahun setelah Konvensi ini pertama kali dicetuskan dan dirancang pada 1959 dan perlu hampir sepuluh tahun lagi hingga syarat jumlah negara yang meratifikasinya dapat terpenuhi. Harus ada sebelas negara yang meratifikasinya; mengingat jumlah rezim otoritarian di kawasan ini pada saat itu, proses ini memerlukan waktu lama. Konvensi Amerika tentang HAM akhirnya mulai berlaku pada 1978.

Pada titik ini, kebijakan Amerika Serikat berdampak positif terhadap perlindungan HAM di kawasan ini. Pemerintahan Jimmy Carter yang baru terpilih mulai menjabat pada 1977 dan mengumumkan kebijakan HAM baru. Meski Carter tahu dia tidak akan mampu memperoleh dua pertiga suara Senat AS yang diperlukan untuk meratifikasi Konvensi Amerika, pemerintahannya mendorong negara-negara Amerika Latin untuk meratifikasi konvensi HAM, dan banyak yang melakukan hal tersebut pada 1977-78, setelah Carter menjabat. Pemerintahan Carter juga memberikan dana kepada IACHR sehingga lembaga ini dapat menambah stafnya. Berkat kebijakan ini dan kebijakan-kebijakan lain yang dibuat pemerintah Carter, banyak aktivis di kawasan ini merasa berterimakasih kepada pemerintahnya atas dukungannya terhadap HAM di negara-negara Amerika.

Konvensi Amerika akhirnya memberlakukan proposal Brasil pada 1948 untuk membentuk Pengadilan HAM Inter-Amerika. Konvensi ini juga memberikan peran baru bagi IACHR sebagai perantara bagi Pengadilan ini, mirip dengan model Eropa. Pengadilan Inter-Amerika, sebagaimana Mahkamah Eropa sebelumnya, perlu bertahun-tahun hingga dapat berdiri dan berjalan. Hampir satu dekade setelah Konvensi ini berlaku, Pengadilan HAM Inter-Amerika mengeluarkan keputusan pertama yang menjadi terobosan pada 1988 terkait kasus penghilangan di Honduras, kasus Velásquez Rodríguez. Pengadilan menemukan bahwa pemerintah Honduras bertanggung jawab atas penghilangan tersebut dan memerintahkan mereka untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban.

Selain itu, Pengadilan juga menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menghormati hak asasi setiap orang dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Sebagai konsekuensi dari kewajiban ini, Pengadilan menyatakan bahwa “setiap negara harus mencegah, menyelidiki, dan menghukum setiap pelanggaran HAM yang dilindungi oleh Konvensi ini.”⁹⁷ Keputusan ini menjadi tonggak karena untuk pertama kalinya di dunia pengadilan HAM memutuskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengadili.

Meskipun tampak orisinal, putusan Velásquez Rodríguez merupakan puncak dari serangkaian langkah kecil yang dimulai dengan artikulasi hak atas keadilan dalam Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia pada 1948. Para pengacara di Guatemala yang kala itu menangani kasus genosida Ríos Montt pun kian bersemangat berkat temuan dalam kasus Velásquez Rodríguez ini. Pemerintah Guatemala telah meratifikasi Konvensi Amerika pada 1978, sebelum Ríos Montt berkuasa. Meskipun Guatemala tidak menerima yurisdiksi memaksa dari Pengadilan ini hingga 1987, Konvensinya tetap menjadi acuan hukum internasional yang tegas untuk kasus mereka.

Perkembangan Perlindungan HAM Internasional

Meski sistem HAM regional Amerika jauh tertinggal di belakang sistem Eropa pada akhir tahun 1970-an, laju perkembangan hukum HAM di kawasan Amerika hampir bersamaan dengan hukum HAM internasional. Di negara-negara Amerika, sebagaimana di belahan dunia lainnya, momentum Pasca-Perang Dunia II yang mendukung perlindungan HAM internasional terganggu oleh Perang Dingin. Kecuali Konvensi Genosida, yang disahkan pada 1948, institusionalisasi hukum HAM internasional juga terhambat oleh Perang Dingin.

Konvensi utama yang menyeluruh dan menjadikan DUHAM berkekuatan hukum terlebih dahulu dipecah ke dalam dua konvensi—Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR). Berlawanan dengan pandangan umum, India mengusulkan pemisahan satu konvensi HAM ke dalam dua konvensi berbeda. Dalam hal ini, mereka mendukung posisi Amerika Serikat dan menolak Uni Soviet, yang gencar melobi untuk

mendukung satu konvensi yang mencakup kedua kumpulan hak tersebut. Pada saat itu India bekerja keras untuk menjaga statusnya sebagai negara non-blok dan bernegosiasi dengan kedua negara adidaya tersebut. Mengapa membagi kedua kovenan ini? India telah memasukkan HAM ke dalam konstitusinya yang baru dan, di dalam konstitusi tersebut, terdapat perbedaan antara beberapa hak sipil dan politik yang dapat dijustifikasi dengan hak ekonomi dan sosial yang dianggap tidak dapat dijustifikasi, meski sama-sama penting. India bertolak dari pengalamannya sendiri dalam mendukung dua kovenan berbeda namun sama pentingnya.⁹⁸

Perlu waktu hampir lima belas tahun untuk menyusun kedua konvensi tersebut dan keduanya dibuka untuk diratifikasi pada 1966. Pada 1970, Uruguay yang demokratis merupakan negara keempat di dunia yang meratifikasi ICCPR dan negara ketiga (setelah Kolombia dan Kosta Rika) yang meratifikasi Protokol Opsional Pertama dari konvensi ini, yang memungkinkan individu untuk melaporkan pemerintahnya ke Komite HAM PBB, badan konvensi yang mengawasi ICCPR. Tetapi Komite HAM tidak dapat memulai tugasnya hingga terdapat cukup banyak negara yang meratifikasi konvensi ini dan membuatnya berlaku, yang baru tercapai pada 1976. Jadi, perkembangan konvensi HAM internasional yang bertujuan umum dan konvensi regional pertama yang menyeluruh di Amerika itu beriringan pada pertengahan 1970-an.

Pembahasan sebelumnya tentang IACHR dan peran NGO dalam melaporkan pelanggaran HAM di Brasil menunjukkan bagaimana situasi yang saling menguntungkan antara institusi HAM dan NGO HAM dapat muncul dalam sistem Inter-Amerika. Hubungan antara Uruguay dan Komite HAM PBB pun memiliki dinamika serupa. Tuntutan masyarakat sipil dan korban dari Uruguay membantu “mengaktifkan” Komite HAM dengan memberinya beberapa kasus pertama dan, pada saat yang sama, Komite HAM pun memberikan dukungan kepada orang-orang yang melaporkan pengaduan. Para korban dan keluarganya, yang disasar oleh negaranya sendiri dan tidak punya perlindungan, mengandalkan institusi-institusi HAM yang baru muncul. Tak banyak yang dapat dimintai bantuan oleh anggota keluarga para korban yang dipenjara dan dihilangkan, tetapi tersiar kabar bahwa organisasi yang bernama Komite HAM PBB dan Komisi HAM Inter-Amerika akan menangani kasus mereka. Beberapa keluarga yang punya sumber daya lebih bahkan dapat melakukan perjalanan ke Jenewa atau Washington, D.C. untuk membicarakan kasus mereka secara langsung dengan anggota organisasi tersebut.

Yang mengherankan pemerintahan diktator Uruguay, setelah ICCPR dan ICESCR mulai berlaku pada 1976, Uruguay lekas menjadi negara yang kasusnya paling banyak dilaporkan di Komite HAM PBB. Banyaknya kasus tidak berarti bahwa jumlah pelanggaran di Uruguay lebih banyak dibandingkan rezim keras lainnya; hal itu semata-mata menunjukkan bahwa Uruguay telah jauh lebih maju dalam menjamin HAM dibandingkan kebanyakan negara sebelum kudeta 1973. Uruguay telah meratifikasi Protokol Opsional Pertama ICCPR dan dengan begitu, warga negara Uruguay secara perorangan dapat melaporkan pengaduan kepada Komite HAM PBB. Pemerintah Uruguay yang demokratis pada 1970 tidak perlu mengkhawatirkan pengawasan Komite HAM, tetapi komitmennya juga mengikat pemerintah otoriter pada masa berikutnya, yang tidak senang dengan dampak pengawasan internasional.

Kasus María del Carmen Quinteros menggambarkan bagaimana proses ini berjalan. María del Carmen Quinteros adalah ibu dari Elena Quinteros, yang dihilangkan paksa di Uruguay pada 1976. Elena adalah seorang guru, anarkis, dan pendiri kelompok gerilyawan kecil di Argentina dan Uruguay. Dalam petisinya kepada Komite HAM PBB, María del Carmen Quinteros menggambarkan faktanya sebagai berikut:

Anak saya (lahir pada 9 September 1945) ditangkap di rumahnya di kota Montevideo pada 24 Juni 1976. Empat hari kemudian, saat dia tak dapat dihubungi sama sekali, anggota militer membawanya ke suatu tempat di kota dekat Kedutaan Besar Venezuela. Anak saya tampaknya memberi tahu para penangkapnya bahwa dia ada agenda pertemuan di tempat tersebut dengan seseorang yang ingin mereka tangkap. Begitu dia berada di depan sebuah rumah yang bersebelahan dengan Kedutaan Besar Venezuela, anak saya berhasil meloloskan diri dari orang-orang yang menyertainya, melompati tembok, dan masuk ke halaman Kedutaan. Pada saat yang sama, dia meneriakkan namanya untuk memperingatkan orang yang lewat tentang apa yang terjadi jika dia ditangkap kembali. Anggota militer yang menyertainya kemudian memasuki misi diplomatik dan, setelah menyerang Sekretaris Kedutaan dan para anggota stafnya yang lain, mereka menyeret anak saya keluar dari tempat itu.⁹⁹

Pemerintah Venezuela kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Uruguay akibat insiden ini. Properti kedutaan tidak boleh diganggu, jadi ketika anggota militer Uruguay memasuki properti

tersebut dengan paksa, mereka telah melanggar hukum internasional. Cara Elena Quinteros diseret keluar kedutaan dengan kasar dan penganiayaan yang dilakukan para penangkapnya terhadap pegawai kedutaan Venezuela saat menangkapnya pun memperburuk konflik.

Ibu Elena tidak pernah memperoleh informasi resmi apa pun dari pihak berwenang tentang keberadaan putrinya, dan penahanan Elena juga tidak tercatat secara resmi. Elena Quinteros tak pernah terdengar lagi kabarnya, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Karena diduga meninggal, dia menjadi salah satu dari sekian banyak orang hilang di kawasan ini. Belakangan, dua orang saksi yang mengenal Elena ingat pernah mendengar suaranya di pusat penahanan, di sana mereka ditutup matanya dan disiksa secara sistematis. Salah seorang saksi menuturkan bahwa dia mengenali suara Elena Quinteros ketika terdengar “jeritan putus asa seorang perempuan yang terus berkata, ‘kenapa mereka tidak membunuhku saja, kenapa mereka tidak membunuhku saja.’” Bagi saksi tersebut jelas bahwa Elena sedang disiksa secara brutal.¹⁰⁰

Ketika ibu Elena mulai mencari putrinya, dia pertama-tama menghubungi serikat pekerja anaknya. Para pengacara di serikat tersebut membantunya melaporkan kasus ini ke Komisi HAM Inter-Amerika dan belakangan ke Komisi HAM PBB. Komite HAM mempertimbangkan kasus tersebut dan menyimpulkan bahwa “tanggung jawab penghilangan Elena Quinteros ada pada pemerintah Uruguay” dan oleh karena itu, pemerintah Uruguay harus mengambil langkah segera dan efektif untuk melepaskannya, mengadili orang yang bertanggung jawab atas hilangnya korban serta perlakuan buruk terhadap korban, memberikan kompensasi, serta memastikan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.¹⁰¹ Kasus ini merupakan salah satu kasus hukum awal terkait penghilangan, yang memberi tahu pemerintah bahwa orang yang hilang tidak akan dilupakan oleh komunitas internasional atau institusi HAM-nya.

Sistem HAM Eropa juga menangani pelanggaran yang dilakukan rezim represif. Pada saat itu, Spanyol, Portugal, dan Yunani dipimpin pemerintahan diktator. Rezim di Spanyol dan Portugal sudah berdiri begitu lama hingga mereka tidak pernah diundang untuk bergabung dengan Majelis Eropa, yang syarat keanggotaannya harus merupakan negara demokrasi. Yunani, sementara itu, merupakan salah satu anggota awal sistem HAM Eropa, sehingga ketika negara ini jatuh ke junta militer pada 1967, muncul kekhawatiran yang meluas di kawasan ini. Bagaimana

negara-negara dan institusi Eropa akan bereaksi terhadap situasi yang mirip dengan yang dihadapi IACHR selama sekian tahun?

Yunani dan Komisi Eropa

Otoritarianisme dan penyiksaan di Yunani menunjukkan bahwa lambatnya perubahan HAM itu tidak hanya terjadi di Amerika Latin, tetapi juga di belahan dunia lainnya, termasuk di Eropa. Statuta Majelis Eropa tahun 1949 menjadikan penghormatan HAM dan supremasi hukum sebagai syarat keanggotaan. Yunani, yang saat itu dipimpin pemerintahan demokratis, bergabung dengan Majelis Eropa pada tahun pendiriannya, dan membantu Majelis ini menyusun Konvensi Eropa tentang HAM. Yunani juga ikut serta dalam pembentukan dua institusi HAM regional, yang belum pernah ada sebelumnya—Komisi HAM Eropa (European Commission of Human Rights) dan Mahkamah Eropa untuk HAM (European Court of Human Rights). Yunani merupakan salah satu negara yang paling pertama meratifikasi Konvensi ini pada Maret 1953, dan Konvensi ini mulai berlaku pada September tahun itu. Yunani juga merupakan salah satu negara pertama yang menggunakan Konvensi ini ketika mengajukan gugatan terhadap Inggris atas pelanggaran di Siprus pada 1956.¹⁰² Setelah kudeta 1967, hubungan Yunani dengan sistem HAM Eropa pun mulai berubah. Seperti halnya kediktatoran di Amerika Latin, rezim otoritarian yang baru melakukan kudeta dengan dalih “ideologi keamanan nasional,” yang menganggap kelompok kiri dan komunis di dalam negeri sebagai ancaman keamanan terbesar serta menjustifikasi otoritarianisme dan represi sebagai cara yang absah dan memang diperlukan untuk mengatasi subversi.¹⁰³

Pada 1968, Norwegia, Belanda, Denmark, dan Swedia mengajukan gugatan bersama dengan Komisi HAM Eropa terhadap pemerintah militer Yunani atas pelanggaran sejumlah ketentuan HAM dalam Konvensi Eropa. Laporan Amnesty International pada Januari 1968 tentang penyiksaan di Yunani kemudian mendorong pemerintah Skandinavia untuk menambahkan gugatan atas penyiksaan ke dalam gugatan awal mereka.¹⁰⁴ Karena pemerintah Yunani sebelumnya yang demokratis merupakan pendukung Komisi dan Konvensi Eropa yang awal dan aktif, sulit bagi Yunani untuk menghalangi Komisi ini dalam menjalankan penyelidikan menyeluruh terhadap situasi HAM di Yunani. Dalam laporan akhirnya, Komisi ini menyimpulkan bahwa pemerintahan militer Yunani telah melanggar sejumlah pasal Konvensi. Volume kedua laporan Komisi yang

besar seluruhnya membahas soal penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat.¹⁰⁵ Akibat laporan tersebut, Yunani akhirnya memutuskan keluar dari Majelis Eropa daripada dikeluarkan dari keanggotaan.

Seperti halnya di Amerika Latin, ketika para tahanan dan keluarganya serta orang yang diasingkan di negara-negara Eropa lainnya mulai melawan kediktatoran Yunani, salah satu alat utama yang mereka punya adalah Komisi HAM Eropa. Jika para diplomat Eropa pada tahun 1950-an tidak bekerja untuk menyusun Konvensi dan membentuk Komisi, para aktivis tahun 1970-an tidak akan punya alat dan sekutu penting ini dalam perjuangan melawan represi dan penyiksaan.

Ketika institusi-institusi HAM merespons kasus-kasus di Yunani, Chili, dan Uruguay, secara mengejutkan sejumlah negara dan institusi gagal mengambil tindakan terkait HAM di Kamboja, pada 1975–1978, ketika Khmer Merah yang brutal berkuasa dan melakukan genosida terhadap rakyat Kamboja. Sistem HAM PBB yang baru muncul tidak dapat memberikan respons yang memadai. Paradoks yang tampak ketika sistem HAM dapat merespons dengan tegas kasus-kasus seperti Yunani dan Uruguay, yang pelanggaranannya jauh lebih ringan, tetapi tidak dapat merespons pelanggaran yang lebih berat di Kamboja itu disebabkan karena sistem ini bergantung pada persetujuan negara. Justru negara-negara yang sudah demokratis, yang telah meratifikasi konvensi terkait dan menerima prinsip pengawasan HAM internasional, dan masyarakat sipilnya aktif serta terbiasa dengan isu hak itulah yang pertama kali memungkinkan dijalankannya pengawasan HAM internasional terhadap catatan HAM mereka ketika terjadi kudeta militer. Kamboja telah meratifikasi Konvensi Genosida pada 1950, tetapi konvensi tersebut tidak memiliki badan atau pun mekanisme penegakan. Pada saat itu, Kamboja hampir luput dari radar internasional, karena negara ini menutup perbatasannya dan melarang seluruh perjalanan dan pengawasan.

Di waktu yang kurang lebih bersamaan, penandatanganan Perjanjian Helsinki pada 1975 memberikan dorongan kuat kepada perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur. Perjanjian tersebut bertujuan memperbaiki hubungan antara blok Komunis dan Barat. Soviet menghendaki perjanjian Helsinki karena perjanjian ini mengakui kedaulatan dan batas wilayah negara yang tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai gantinya, Soviet bersedia berkomitmen terhadap HAM, termasuk kebebasan bergerak. Amerika Serikat dan pemerintah Barat lainnya pada awalnya skeptis,

bahkan menentang, perjanjian Helsinki, karena mereka merasa sudah banyak mengalah soal batas wilayah dan balasannya hanya komitmen HAM yang samar-samar. Tetapi, bertolak belakang dengan perkiraan banyak penyusun perjanjian ini, Undang-Undang Terakhir menginisiasi “Proses Helsinki,” yang meletakkan HAM di jantungnya dan berkontribusi terhadap runtuhnya komunisme di Uni Soviet dan Eropa Timur.¹⁰⁶ Perjanjian Helsinki memberi alat bagi para aktivis HAM di kawasan ini yang memungkinkan mereka untuk menuntut pemerintahnya agar memenuhi komitmen tertulis mereka.

Peran Amerika Serikat

Amerika Serikat berperan penting, walau beragam, dalam gerakan HAM di Yunani, Amerika Latin, Kamboja, dan Uni Soviet. Alih-alih menjadi pemimpin global di bidang HAM, Presiden Richard Nixon dan Menteri Luar Negerinya, Henry Kissinger, mendukung Junta Yunani dan mengabaikan praktik penyiksaan, sama seperti ketika mereka mendukung diktator antikomunis di negara-negara Amerika. Yunani adalah anggota NATO serta menerima bantuan militer dan ekonomi yang substansial dari Amerika Serikat untuk menjadikannya sebagai benteng melawan ekspansi blok Soviet. Sebagai balasannya Yunani menyediakan pangkalan militer penting bagi Amerika Serikat.¹⁰⁷

Para pemimpin berpengaruh di Amerika Serikat menentang kebijakan ini. Di Dewan Perwakilan Rakyat, Donald Fraser (D-MN) sangat menentang dukungan Amerika Serikat terhadap rezim represif sampai-sampai dia mencetuskan kebijakan HAM Amerika Serikat yang baru di Kongres pada 1973. Jimmy Carter melanjutkan ide ini dan memasukkan idenya sendiri untuk meresmikan kebijakan HAM Amerika Serikat pertama dari cabang eksekutif saat menjabat pada 1977. Dukungan dari dalam pemerintahan AS tersebut akhirnya membawa perubahan besar bagi para aktivis Amerika Latin. Namun demikian, dalam soal *institusionalisasi* perlindungan HAM internasional, Amerika Serikat tidak kuat perannya, kecuali, seperti disinggung sebelumnya, ketika pemerintah Carter mendorong negara-negara lain untuk meratifikasi konvensi HAM dan mendukung IACHR baik secara politik maupun finansial.

Pemerintah negara-negara Amerika Latin menjadi ragu-ragu menyerang IACHR setelah Carter menjabat pada 1977 dan mengemukakan kebijakan HAM yang baru. Di bawah pemerintah Carter dan,

untuk pertama kalinya sejak negara-negara Amerika Latin membentuk IACHR pada 1959, Komisi ini menerima dukungan penuh pemerintah AS. Pemerintah Carter juga menjabat di waktu yang bersamaan dengan meningkatnya aktivisme gerakan sosial HAM di Amerika Latin.¹⁰⁸

Pemerintah Amerika Latin kesulitan melawan balik institusi HAM karena hukum internasional menetapkan bahwa, jika telah diratifikasi, suatu konvensi mengikat negara itu di masa mendatang walaupun telah berganti rezim, kecuali pemerintah yang baru secara resmi menarik diri dari institusi tersebut. Dengan demikian, ratifikasi Konvensi Amerika tentang HAM oleh negara-negara (yang sering kali masih demokratis) mengikat penguasa otoritarian di kemudian hari. Demikian halnya, ketika negara-negara menominasikan orang-orang seperti Jiménez de Aréchaga untuk bertugas di institusi HAM, baik sebagai anggota IACHR ataupun sebagai hakim di Pengadilan Inter-Amerika, orang-orang tersebut tidak dapat dicopot dari jabatannya hingga masa jabatannya berakhir, sekalipun pemerintahannya sudah berganti. Para komisioner yang dinominasikan ke IACHR oleh Uruguay dan Argentina sebelum kudeta 1973 dan 1976 di negara tersebut terus menjalani masa tugas mereka setelah pergantian pemerintahan, bergabung dengan para komisioner dari Venezuela dan Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1970-an untuk membentuk mayoritas empat anggota guna menunjang laporan HAM yang kuat. Rezim otoriter tidak ingin terikat oleh kewajiban hukum untuk menghormati HAM, tetapi menolak kewajiban tersebut secara terang-terangan dengan menarik diri dapat memunculkan publisitas yang merugikan dan ingin mereka hindari.

HAM dan Neoliberalisme

Karena kebijakan ekonomi neoliberal merupakan bagian besar dari kisah periode Perang Dingin di Amerika Latin, ada baiknya memeriksa klaim bahwa HAM bersekongkol dengan neoliberalisme.¹⁰⁹ Rezim otoritarian di Chili, Brasil, Argentina, dan Uruguay pada tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an dimotivasi oleh agenda politik dan ekonomi yang saling terkait. Pemerintah ingin memaksakan apa yang waktu itu mulai disebut kebijakan ekonomi “neoliberal”—kebijakan yang menurunkan tarif bea masuk untuk menggenjot perdagangan, menyediakan pertukaran mata uang secara bebas dengan kurs pasar internasional, dan menciptakan kondisi yang lebih ramah bagi investasi asing. Kebijakan neoliberal ini juga berupaya menghilangkan defisit pemerintah lewat pemotongan belanja

negara, sering kali dengan membatasi kebijakan kesejahteraan sosial. Di banyak kasus di Amerika Latin, aspek kebijakan ekonomi ini kemudian berlanjut setelah transisi menuju demokrasi.

Rezim militer baru di Argentina, Brasil, Chili, El Salvador, Guatemala, Uruguay, dan lainnya mulai memenjarakan, menyiksa, dan kadang menghilangkan paksa lawan politiknya. Pemerintah menyasar anggota gerakan gerilya, partai politik kiri, serikat buruh, dan juga pemimpin politik sentris yang menentang pemerintahan otoriter. Di Amerika Latin, gerakan HAM muncul *sebagai respons* terhadap rezim otoritarian yang mengadopsi kebijakan ekonomi liberal dan sebagai respons terhadap keluhan keluarga-keluarga para korban rezim tersebut. Kediktatoran neoliberal merepresi semua lawan politik, terutama para pemimpin buruh dan aktivis kiri, termasuk kelompok kiri bersenjata.

Mengingat sejarah tersebut, ketika saya mendengar para ahli dan aktivis saat ini berkata bahwa HAM dan neoliberalisme berjalan beriringan dan bersekongkol, saya yakin mereka telah keliru memahami atau keliru membaca sejarah.¹¹⁰ Bab ini telah menunjukkan bahwa perdebatan seputar model ekonomi di Amerika Latin memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Kaum kiri revolusioner pada tahun 1960-an makin percaya bahwa demokrasi borjuis dan sistem kapitalis perlu digulingkan untuk memajukan pembangunan dan hak. Sementara itu, banyak aktor ekonomi dan politik konservatif mulai percaya bahwa kebijakan ekonomi neoliberal tidak dapat dijalankan di bawah pemerintahan demokratis yang dibarengi gerakan buruh yang kuat. Represi politik, bagi mereka, tidak dapat dihindari demi stabilitas ekonomi. Jadi, paradoksnya, pada tahun 1970-an, di Amerika Latin kaum kiri maupun kanan makin percaya bahwa terdapat kedekatan antara kebijakan ekonomi pasar bebas dan rezim otoriter keras yang melanggar HAM. Hal ini persis berkebalikan dengan argumen bahwa HAM bersekongkol dengan neoliberalisme. Pandangan ini juga diperkuat oleh beberapa ahli politik Amerika Latin yang paling cemerlang pada tahun 1980-an dan 1990-an, seperti ilmuwan politik Argentina Guillermo O'Donnell, yang berpendapat bahwa tahap tertentu kapitalisme membutuhkan bentuk-bentuk rezim "otoriter-birokratis" yang memiliki kebijakan represif.¹¹¹ Ringkasnya, O'Donnell berpendapat bahwa neoliberalisme bersekongkol dengan *pelanggaran* HAM, dan bukan dengan ide-ide HAM.

Ketika saya menjadi mahasiswa pascasarjana dan mempelajari politik Amerika Latin di Columbia University pada tahun 1980-an,

otoritarianisme birokratis merupakan salah satu teori utama yang saya resapi. Saya lagi-lagi berterima kasih kepada Albert O. Hirschman, kali ini karena telah mempersoalkan kekakuan argumen O'Donnell saat menekankan determinan ekonomi dari rezim politik. Hirschman memandang bahwa otoritarianisme birokratis adalah contoh lain dari ilmuwan sosial yang terlalu cemas mencari konsekuensi dan kekecewaan yang negatif dan tak diharapkan. Menurutnya, dari pandangan O'Donnell, seolah-olah “upaya mencapai pertumbuhan, entah berhasil atau tidak, membawa serta efek samping bencana di ranah politik, mulai dari hilangnya kebebasan demokratis di tangan rezim otoriter dan represif hingga pelanggaran HAM besar-besaran.”¹¹² Hirschman menyatakan bahwa hubungan antara ekonomi dan politik jauh lebih rumit, menarik, dan sangat banyak kemungkinan hasilnya. Kritik Hirschman pada 1991 didukung oleh riset baru-baru ini tentang kemunculan, kelangsungan, dan kejatuhan demokrasi di negara-negara Amerika, yang menemukan bahwa kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri, termasuk kepercayaan internasional, merupakan bagian penting dari penjelasan mengapa demokrasi dapat runtuh atau bertahan.¹¹³ Dengan kata lain, alih-alih terus mencari determinan ekonomi dari demokrasi, kita mesti melihat penyebab yang lebih dekat, seperti preferensi normatif masyarakat terhadap demokrasi. Penelitian lapangan untuk disertasi saya mengenai pengambilan kebijakan ekonomi di Amerika Latin pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika saya menemukan bahwa perdebatan seputar model ekonomi dan rezim politik sama rumit dan terbuka kemungkinannya seperti yang diterangkan Hirschman, memperkuat gagasan yang saya ambil darinya.

Meski demikian, karena sudah lazim mendengar argumen bahwa kapitalisme neoliberal dekat dengan rezim otoritarian, saya terheran-heran ketika para ahli saat ini memandang bahwa HAM “bersekongkol” dengan neoliberalisme. Sebaliknya, saya menemukan bahwa penerimaan baru terhadap HAM dan demokrasi merupakan salah satu efek dari periode neoliberalisme dan otoritarianisme di Amerika Latin, ketika ribuan aktivis, kebanyakan kaum muda, dihilangkan secara paksa dan dibunuh. Langkah awal kaum kiri untuk mengadopsi bahasa HAM boleh jadi muncul dari kebutuhan mendesak untuk menemukan bahasa yang dapat diterima untuk menyuarakan tuntutan agar menghentikan penghilangan paksa dan membebaskan tahanan politik. Namun, bagi sebagian orang, perlindungan HAM dan nilai demokrasi telah menjadi keyakinan sejati, dan bukan sekadar slogan yang dapat dimanfaatkan. Selama periode ini,

Amerika Latin menjauh dari revolusi dan mengarah pada solusi yang lebih reformis. Kuba, yang pernah menjadi model bagi kaum muda kiri di kawasan ini, telah kehilangan sebagian daya tariknya. Betul bahwa Che fasih menunjukkan kecacatan demokrasi di negara-negara miskin, tetapi alternatif partai tunggal yang dia yakini saat di Kuba tidak mampu menghasilkan perubahan kekuasaan untuk Fidel Castro, ataupun memberikan sarana untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap pemerintah. Pada tahun 1980-an, di Chili, Uruguay, Argentina, El Salvador, Guatemala, dan negara-negara lainnya di kawasan ini, terdapat upaya peninjauan ulang demokrasi secara mendalam yang mendorong kaum kiri untuk menerima HAM sebagai kosakata moral perjuangan oposisi. Karena itu, stabilitas demokrasi di kawasan ini sebagian besar merupakan buah dari preferensi normatif yang lebih kuat terhadap demokrasi, yang sebagian lahir dari pengalaman kerasnya rezim otoritarian yang melanggar HAM secara besar-besaran.¹¹⁴

Meningkatnya dukungan terhadap demokrasi di Amerika Latin juga menyediakan landasan untuk menerima ekonomi pro-pasar sekaligus kebijakan sosial, sejauh kebijakan tersebut diupayakan oleh pemerintah terpilih. Banyak kelompok HAM turut andil dalam upaya peninjauan ulang ini. Mereka menganggap dirinya sebagai alternatif dari revolusi, sebagaimana ditunjukkan Sergio Aguayo pada bab 1. Mereka telah menyaksikan sendiri betapa banyak kematian yang diakibatkan seruan revolusi di kawasan ini dan sudah tidak begitu tertarik meromantisasi kaum revolusioner dibandingkan pada tahun 1960-an. Kelompok-kelompok HAM mengadopsi pendekatan tanpa kekerasan yang bertahap dalam mendorong perubahan sosial yang didasarkan pada tuntutan terhadap segala jenis hak. Sebagian kalangan mungkin menyebut pendekatan ini “minimalis” karena tidak menyerukan pergolakan revolusioner dengan kekerasan, tetapi sebagaimana yang akan dibahas pada bab 7, meski metodenya bertahap, cita-cita gerakan HAM-nya sama sekali tidak minimalis.

Mengingat rumitnya hubungan antara dukungan terhadap HAM dan demokrasi serta pengalaman neoliberalisme di Amerika Latin, klaim bahwa HAM “bersekongkol” dengan neoliberalisme itu terlalu simplistik.

Kesimpulan

Setelah munculnya norma perlindungan HAM internasional pada tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an, setiap bagian dunia kecuali Eropa

dilanda gejolak dan pertikaian. Pergulatan di masa Perang Dingin terkadang menenggelamkan suara-suara yang mendukung HAM. Namun perkembangan pada tahun 1970-an secara politik dan institusional berkaitan dengan dan dimungkinkan oleh apa yang terjadi pada tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an.

Sejumlah negara di Kawasan Selatan Dunia berupaya keras untuk terus menghidupkan konsep HAM selama Perang Dingin. Seperti kata Jensen, mereka “mengantarkan proyek HAM ke pintu gerbang tahun 1970-an.”¹¹⁵ Ketika Konferensi HAM Internasional Pertama di Teheran, Iran, gagal, salah satu perancangannya, Duta Besar Jamaika Egerton Richardson, mengakui salah satu kekurangan besar dari perjuangan HAM hingga saat itu: “Teheran adalah momen paling membekas bagi kami, ketika kami berhadapan langsung dengan sifat binatang kami—ketika kami melihat seperti apa jadinya memperjuangkan HAM dengan lebih banyak bekerja lewat pemerintah.”¹¹⁶ Paradoksnya, pemerintah merupakan pelindung utama sekaligus pelanggar utama HAM. Sifat negara yang bermuka dua di hadapan HAM ini menunjukkan bahwa kita memang perlu negara, tetapi tidak dapat mengandalkan negara untuk menjadi satu-satunya pembela hak. Richardson mengakui bahwa langkah ke depan perlu melibatkan lebih banyak peran masyarakat sipil dan NGO.¹¹⁷

Selama Perang Dingin, debat HAM di berbagai kawasan dan negara, seperti Afrika, Amerika Latin, Uni Soviet, dan Eropa Timur, mengalami konvergensi. Terdapat pergeseran multi-sentris yang terjadi dalam politik Perang Dingin yang menyebabkan HAM memiliki daya tarik lebih. Gerakan-gerakan sosial yang muncul pada tahun 1970-an sangat berkaitan dengan upaya-upaya awal dalam merancang hukum HAM dan membentuk institusi HAM.

Tetapi di seluruh dunia, perkembangan normatif dan institusional yang terjadi pada periode 1950–1979 tidak dapat sepenuhnya diaktifkan hingga organisasi masyarakat sipil mulai menggunakannya. Karena itu, HAM tidak bermula pada tahun 1970-an sebagaimana anggapan sebagian orang. Sebaliknya, tahun 1970-an adalah momen ketika NGO HAM baru di seluruh dunia mulai menggunakan tatanan kelembagaan yang telah terbentuk berkat perjuangan diplomatik pada tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an: perjanjian, konvensi, badan konvensi, ketentuan petisi individu, komisi, dan mahkamah. Konvergensi ini memungkinkan para aktivis anti-apartheid transnasional menggunakan PBB untuk mengecam dan memberikan sanksi terhadap Afrika Selatan, memungkinkan para

aktivis HAM Amerika Latin untuk membawa kasusnya ke IACHR dan ke Komite HAM PBB, serta memungkinkan kelompok masyarakat sipil dan negara untuk menyampaikan keprihatinan mereka kepada Komisi HAM Eropa. Di Uni Soviet dan Eropa Timur, perjanjian Helsinki juga memberikan sarana kelembagaan bagi para aktivis (mulai dari komite Helsinki di Uni Soviet hingga Helsinki Watch di Amerika Serikat) untuk mengupayakan agendanya. Ketika gerakan-gerakan sosial HAM di Amerika Latin, Afrika Selatan, Eropa Timur, dan Amerika Serikat mulai bermunculan pada tahun 1970-an dan 1980-an, mereka telah mempunyai hukum dan institusi yang sudah dikembangkan sejak tahun 1940-an dan 1950-an.

Cerita-cerita era Perang Dingin juga memberikan peringatan bagi para pembuat kebijakan dan publik di Amerika Serikat saat ini. Pelajaran penting dari Perang Dingin di antaranya adalah bahwa kita tidak dapat menyelamatkan demokrasi dengan menghancurkannya; dan tidak ada yang dapat membangun demokrasi dari luar. Demokrasi mesti tumbuh sendiri agar mengakar. Tetapi aktor internasional dapat berbuat banyak untuk menghancurkan demokrasi, seperti yang dilakukan Amerika Serikat di Guatemala, Iran, dan Kongo. Aktor internasional juga dapat membantu menciptakan iklim yang membuat demokrasi dapat bertahan dan menguat perlahan.

Setelah 9/11, warga negara Amerika Serikat kadang berlagak seolah kita memerlukan seperangkat aturan baru untuk menghadapi ancaman terorisme yang tampak baru. Tapi terorisme bukanlah ancaman baru. Hampir semua rezim militer di negara-negara Amerika menyebut lawan-lawannya sebagai teroris. Rezim-rezim itu berdalih, mirip dengan dalih pemerintah Bush saat membalas 9/11 dan dalih pemerintah Trump baru-baru ini, bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melangkahi ranah hak serta beralih mengandalkan alat dan taktik baru untuk menghadapinya. Setelah 9/11, Wakil Presiden Cheney menyampaikan pernyataan terkenal bahwa Amerika Serikat harus “lepas sarung tangan,” yang maksudnya adalah bahwa Amerika Serikat harus terlibat dalam praktik ilegal seperti penyiksaan dan penahanan ilegal.¹¹⁸ Tetapi jauh sebelum Cheney, rezim otoritarian sudah melepas sarung tangannya dan menggunakan taktik kontra-terorisme yang ilegal, sering kali dengan dukungan Amerika Serikat. Orang-orang Amerika Latin tahu betul betapa melangkahi hukum demi memerangi terorisme itu berisiko menyebabkan lebih banyak penderitaan dan kematian bagi warga sipil ketimbang bagi teroris itu sendiri. Tindakan semacam itu juga berisiko

mendelegitimasi kebebasan yang dicita-citakan serta menjadi alat per-ekrutan bagi mereka yang mengupayakan perubahan dengan kekerasan. Pengalaman Perang Dingin mengingatkan kita akan konsekuensi merusak, kalau bukan disengaja, dari keputusan untuk menggunakan cara-cara ilegal dalam memerangi terorisme.

HAM dan demokrasi itu terkait erat dan, sepanjang sejarah HAM, sulit mewujudkan yang satu tanpa yang lain. Namun bukan berarti bahwa demokrasi niscaya akan melahirkan HAM; maksudnya tak lebih dari bahwa demokrasi itu merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi itu saja tidak memadai, untuk memajukan HAM. Belum ada contohnya di dunia ketika seluruh hak ekonomi, sosial, sipil, dan politik terlindungi di bawah rezim non-demokrasi. Karena itu, merusak demokrasi, seperti yang turut dilakukan Amerika Serikat di Iran, Guatemala, Kongo, Brasil, dan Chili, adalah kebijakan yang picik. Betapa pun tidak sempurnanya dan rapuhnya suatu demokrasi, jika itu dihancurkan oleh kudeta militer, akan perlu waktu puluhan tahun, bahkan mungkin separuh abad, untuk membangunnya kembali.

Apa yang akan terjadi di Iran, Kongo, atau Guatemala andai Amerika Serikat memandang bahwa pemerintahan kiri yang terpilih di sana, meski tidak mereka sukai dan percayai, dapat ditoleransi dan diajak bekerja sama? Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah dihalangi oleh rezim revolusioner di Iran. Apakah membiarkan Mosaddeq berkuasa akan mengarah pada hasil yang berbeda? Kongo adalah salah satu negara paling keras di dunia saat ini. Andai Lumumba tetap berkuasa, akankah Kongo menjadi lebih stabil dan tidak sekeras sekarang? Andai Árbenz tidak digulingkan, akankah demokrasi di Guatemala mampu menghindari polarisasi dan kekerasan yang menyebabkan genosida di masa pemerintahan Ríos Montt pada awal 1980-an? Itu semua adalah pertanyaan kontrafaktual. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi perlu dicatat bahwa, di ketiga kasus tersebut, kita hampir tidak dapat membayangkan sejarah yang lebih keras dan berbahaya daripada sejarah yang terjadi setelah kudeta yang didukung Amerika Serikat. Pada 1982 di Guatemala, seorang diplomat Amerika Serikat terdengar bermenung, "Apa pun akan kami berikan untuk mengembalikan Arbenz sekarang."¹¹⁹ Di Iran atau Kongo saat ini, sebagian orang mungkin akan mengatakan hal yang sama soal Mosaddeq atau Lumumba.

Yang luput kita ketahui, kemajuan HAM dan perubahan demokratis itu perlu waktu. Kemajuan tersebut harus diukur dalam rentang puluhan

tahun, bukan hanya beberapa tahun, dan runtuhnya rezim demokrasi yang terpilih dengan sungguh-sungguh menyebabkan proses tersebut mundur sangat jauh. Salah satu alasan mengapa gerakan HAM berjalan lambat adalah karena mereka berproses melalui pengembangan hukum dan institusi yang bertahap. Gerakan sosial dan aksi warga negara diperlukan untuk memobilisasi institusi-institusi tersebut dan mendorongnya agar berfungsi. Pada akhir 1980-an, negara-negara Amerika akhirnya mendirikan institusi-institusi semacam itu, baik di tingkat nasional di banyak negara maupun di tingkat regional, sehingga membuka jalan yang sulit diganggu gugat ke arah perlindungan HAM yang lebih luas.

Pada 1990-an, para aktivis dan negara-negara telah menambahkan segi baru ke dalam lanskap institusi HAM: pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran HAM masa lalu, seperti pengadilan Jenderal Ríos Montt di awal bab ini. Sebagian besar sistem HAM PBB dan pengadilan HAM regional di Eropa, Amerika Latin, dan Afrika menggunakan “pertanggungjawaban negara” atas pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi pertanggungjawaban negara sering kali dianggap tidak memadai karena pelaku kekerasan yang sebenarnya tidak pernah dimintai pertanggungjawaban dan dipenjarakan. Semua ini mulai berubah pada tahun 1980-an ketika sejumlah negara pasca Perang Dingin yang dibahas sebelumnya—seperti Yunani, Argentina, dan Guatemala—mulai menuntut pertanggungjawaban para mantan pejabatnya secara pidana di pengadilan dalam negeri. Pada tahun 1990-an, dengan jatuhnya Uni Soviet dan pecahnya perang di bekas Yugoslavia, muncul tuntutan agar mahkamah internasional meminta pertanggungjawaban para pelaku kekerasan massal; menanggapi hal tersebut, PBB membentuk pengadilan *ad hoc* untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR). Pada 1998, negara-negara membentuk pengadilan pidana internasional pertama yang permanen, International Criminal Court (ICC). Pengadilan pidana HAM jenis ketiga menarik perhatian ketika Jenderal Augusto Pinochet dari Chili ditahan di London oleh kepolisian Inggris yang melaksanakan permintaan ekstradisi Spanyol, yaitu penuntutan mancanegara di pengadilan domestik di luar negara tempat pelanggaran HAM terjadi. Pengadilan Spanyol ingin agar Pinochet diadili di Spanyol atas kejahatan yang dilakukan di Chili semasa pemerintahan diktator militer yang dia pimpin. Law Lords (Mahkamah Agung Inggris) memutuskan bahwa Pinochet dapat diekstradisi ke Spanyol, tetapi membiarkannya kembali ke Chili karena alasan

kemanusiaan, dan di sana dia menghadapi tuntutan atas korupsi dan pelanggaran HAM ketika dia meninggal pada 2006.¹²⁰

Ketiga jenis penuntutan tersebut membentuk tren baru yang dramatis dan saling terkait di perpolitikan dunia, yaitu tuntutan pertanggungjawaban pidana individu pejabat negara, termasuk kepala negara atas pelanggaran HAM.¹²¹ Saya menyebut tren ini dengan istilah “kaskade keadilan.”¹²² Yang dimaksud dengan kaskade keadilan bukan berarti bahwa keadilan sempurna telah atau akan ditegakkan, atau bahkan sebagian besar pelaku pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Tetapi, yang dimaksud dengan kaskade keadilan adalah terjadinya pergeseran pada *legitimasi norma* pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran HAM dan peningkatan tuntutan pidana atas dasar norma tersebut.¹²³

Seperti halnya semua perkembangan politik dan hukum yang dibahas pada bab ini, kaskade keadilan bukanlah reaksi yang tak terelakkan terhadap kekerasan luar biasa atau terhadap munculnya norma-norma HAM. Gerakan HAM, bekerja sama dengan negara-negara yang sepaham, itulah yang mendorong perubahan ini. Kaskade ini dimulai dengan upaya bersama sekelompok kecil pengacara publik, ahli hukum, dan aktivis yang merintis strategi, mengembangkan argumen hukum, merekrut penggugat dan saksi, mengumpulkan bukti, dan menggeluti tantangan-tantangan hukum selama bertahun-tahun. Kiprah para entrepreneur norma ini terbantu oleh dua perubahan struktural yang lebih besar di dunia: gelombang ketiga demokrasi dan berakhirnya Perang Dingin. Perubahan pertama melipatgandakan jumlah negara transisi yang mengikuti tren yang telah dijelaskan di sini, dan perubahan kedua membuka ruang bagi negara-negara untuk mempertimbangkan lebih banyak pilihan kebijakan. Praktik akuntabilitas yang baru ini tidak akan muncul tanpa adanya gabungan gerakan HAM baru, hukum HAM baru, dan institusi regional untuk menerapkan hukum yang telah kita bahas pada bab ini.

Memahami hal ini sangat penting dalam perdebatan modern tentang masa depan HAM karena banyak ahli yang menyuarakan tentang “akhir-masa” atau “senja kala” HAM berdasarkan gagasan yang keliru tentang asal-usul dan perkembangan institusionalnya. Institusi HAM memungkinkan kelangsungan norma dan kebijakan HAM yang dapat bertahan lebih lama daripada kuasa para penyusunnya. Inilah yang dimaksud para ahli institusi sejarah ketika mengatakan bahwa institusi itu “lengket”. Dengan kata lain, pilihan institusional dari masa lalu dapat bertahan, atau

terkunci, sehingga membentuk dan membatasi para aktor dari waktu ke waktu.¹²⁴ Sekalipun koalisi awal yang mengupayakan pembentukan suatu institusi telah tiada, institusi tersebut memiliki kekuatan dalam dirinya dan dapat mempertahankan kebijakannya.

Institusi HAM dapat membantu melindungi para aktivis HAM dan menjaga kelangsungan kerja-kerja HAM. Meski bukan tanpa masalah, institusi semacam itu merupakan sumber daya yang patut diandalkan oleh para korban ketika mereka mengalami penganiayaan dan ditelantarkan di negaranya sendiri. Sering kali terdapat kedekatan antara institusi HAM dengan gerakan HAM, tetapi kedekatan tersebut tidak akan terwujud jika institusinya dijabat para birokrat yang tidak peka dan hanya peduli dengan gaji besar, atau jika gerakannya mengesampingkan institusi tersebut dan berfokus pada apa yang mereka anggap sebagai aktivisme langsung di jalanan yang lebih murni. Institusi HAM juga dapat “dibajak” oleh pemerintah di negara-negara yang represif. Untungnya, dalam kasus Amerika Latin pada tahun 1970-an, kasus Yunani, atau Komite Helsinki, kedekatan antara gerakan HAM dan institusi HAM dapat terwujud.

Bab ini menggambarkan ciri khas proses perubahan HAM yang penuh pertentangan dan banyak sekali kemungkinan hasilnya. Pada setiap titiknya, beberapa negara, termasuk banyak negara kuat, berupaya (sering kali berhasil) menunda kemajuan HAM. Namun, di tengah gejolak Perang Dingin pun, sebagian negara masih dapat merancang konvensi, membentuk institusi, dan mengupayakan ratifikasi negara yang membuat institusi tersebut dapat berjalan. Perkembangan hukum semacam itu terkadang memiliki konsekuensi yang tak diharapkan oleh pemerintahan selanjutnya serta memberikan peluang politik dan hukum bagi pemerintah dan gerakan sosial lainnya. Semua ini menyiratkan bahwa perbedaan antara kaum idealis dan pesimis itu terlampaui statis dan luput melihat pengembangan, letupan, serangan balik, dan kemunduran. Kita perlu menggunakan perspektif yang oleh para sejarawan disebut *longue durée*, atau jangka panjang, seperti yang ditawarkan dalam buku ini, untuk melihat bagaimana HAM berfungsi dari waktu ke waktu.¹²⁵ Dalam hal ini, sejarah yang ingin saya sampaikan sangat memperhatikan sumber-sumber dan perkembangan institusional dari Kawasan Selatan Dunia.

Jiménez de Aréchaga tidak cukup panjang usianya untuk menyaksikan transisi demokrasi di Uruguay maupun di sebagian besar negara Amerika Latin. Ketika dia meninggal pada 1980, mayoritas negara di kawasan ini masih dipimpin rezim otoriter dan praktik HAM di banyak

negara juga memburuk. Dalam serangkaian perbincangan dan wawancara surat kabar yang dia sampaikan pada pertengahan hingga akhir 1970-an, ketika kawasan ini makin represif, suara Jiménez de Aréchaga terdengar makin geram dan berani bersuara ketika orang lain tidak berani.¹²⁶ Tetapi, di masa-masa kelam otoritarianisme Amerika Latin itu pun, Jiménez de Aréchaga masih melihat secercah harapan. Dia diwawancarai pada 1978, sehari setelah negara kepulauan kecil Grenada meratifikasi Konvensi HAM Amerika, yang merupakan ratifikasi terakhir yang diperlukan agar Konvensi tersebut dapat diberlakukan. Jiménez de Aréchaga bangga melihat pencapaian sesuatu yang dia upayakan, bersama para ahli hukum lainnya, selama hampir sepanjang waktu profesionalnya. Ketika ditanya tanggapannya, dia mengatakan bahwa menurutnya hal ini merupakan “kemenangan luar biasa dalam tradisi hukum terbaik Uruguay ... serta harapan baru bagi mereka yang percaya pada sucinya kebebasan manusia.”¹²⁷***

BAGIAN III

Efektivitas Hukum, Institusi, dan Gerakan HAM

BAB 5

Mengapa Sulit Sekali Mengukur Efektivitas Hak Asasi Manusia?

PARUH PERTAMA BUKU INI telah membahas legitimasi gagasan, institusi, dan gerakan hak asasi manusia (HAM), terutama melalui penelusuran sejarahnya.¹ Tetapi yang juga tak kalah penting dari soal legitimasi adalah soal efektivitas HAM, yang merupakan fokus paruh kedua buku ini. Apakah hukum, institusi, dan gerakan HAM benar-benar memajukan HAM? Pembahasan soal efektivitas, seperti halnya soal legitimasi, juga diliputi pesimisme yang penting, hingga sebagian kalangan menyebut periode saat ini sebagai krisis HAM. Selain itu, sebagaimana soal legitimasi, pertanyaan soal efektivitas juga tidak hanya muncul dari akademisi dan pemerintah, tetapi dan terutama juga dari dalam gerakan HAM sendiri.

Lucia Nader, mantan ketua Conectas, organisasi HAM di Brasil, mengatakan bahwa hal yang paling membuatnya dan koleganya pesimis terhadap kerja-kerja HAM adalah perasaan bahwa “ada capaian penting dalam beberapa hal, tetapi tidak ada perubahan struktural yang bertahan lama.” Nader menuturkan:

Sebagian kalangan yang saya kenal di gerakan HAM, termasuk saya, kadang merasakan kelelahan semacam ini. Kita menggunakan segala alat yang kita punya—mengesahkan undang-undang, mengadakan kampanye, memanfaatkan PBB, tapi semuanya masih jauh dari sasaran. Saya yakin situasinya akan jauh lebih buruk jika tidak ada semua upaya itu, dan saya yakin HAM adalah satu-satunya cara untuk mengupayakan dunia yang lebih baik. Namun kadang sulit menjaga optimisme dari

hari ke hari, apalagi jika kita membandingkan capaian kita dengan dunia yang dicita-citakan. Pada tataran internasional, misalnya, kita mendengar Trump menyinggung soal hukum yang dianggap menghalangi langkah-langkah yang ingin dia lakukan terhadap tersangka teroris. Kita mendengar survei terakhir menyebutkan 58 persen warga Amerika setuju dengannya. Apa yang dapat mengubah mentalitas ini? Enam dari sepuluh orang di Amerika mendukung penyiksaan. Apakah ini dapat dipertahankan? Bisakah kita hidup di dunia seperti ini?²

Survei terbaru terhadap 346 orang yang sedang atau pernah bekerja di bidang HAM menemukan bahwa pekerjaan ini erat dengan tingkat depresi tinggi dan Gangguan Stres Pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) dan salah satu penyebabnya rupanya adalah penilaian diri yang negatif terhadap kerja-kerja HAM.³ Ini menunjukkan bahwa salah satu bagian tersulit dari menjadi aktivis HAM adalah keraguan apakah pekerjaan tersebut berkontribusi pada perubahan positif. Benarkah bahwa gerakan HAM telah membuahkan hasil tetapi bukan perubahan struktural yang bertahan lama? Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Bab ini berupaya menjawab tantangan tersebut.

Pada bab-bab sebelumnya, kita telah melihat bagaimana para diplomat, ahli hukum, dan aktivis berjuang mengembangkan norma HAM, menyusun hukum HAM, serta membentuk pengadilan dan komisi untuk menegakkan hak-hak ini. Memasuki abad ke-21, sebagian besar negara di dunia telah menerima hukum HAM, setidaknya di atas kertas. Hampir tiap negara telah menyatakan dukungannya terhadap HAM dengan meratifikasi setidaknya satu konvensi HAM internasional yang utama.⁴ Tetapi, negara yang meratifikasi pun belum tentu akan patuh, apalagi banyak konvensi tersebut tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Namun demikian, hingga kini, banyak negara telah meratifikasi konvensi yang memungkinkan penegakan melalui pengadilan bentukan dan 122 negara telah meratifikasi konvensi yang potensi penegakannya paling ketat: Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court). Pejabat negara yang melanggar Statuta Roma dapat dituntut secara pidana dan dipenjarakan.⁵ Sebagian besar negara di kawasan yang sistem HAM-nya kuat—Eropa, Afrika, dan Amerika—juga telah meratifikasi konvensi HAM regional dan menerima yurisdiksi pengadilan HAM yang mengikat di wilayah mereka.⁶

Namun, lagi-lagi pertanyaannya bagaimana, bila memang ada, komitmen hukum ini memengaruhi perilaku aktual negara? Penyiksaan, penculikan, dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan Amerika Serikat pasca 9/11, meski pernah berkomitmen pada konvensi internasional yang melarang keras penyiksaan di masa perang maupun damai, menambah pesimisme terhadap relevansi hukum HAM.⁷ Terpilihnya Donald Trump, dengan keabaianya terhadap hukum HAM, menimbulkan kekhawatiran baru di banyak organisasi HAM di Amerika Serikat dan seluruh dunia.

Tren HAM Global

Tinjauan terhadap tren HAM global menunjukkan bahwa catatannya jauh lebih positif daripada yang ditunjukkan pesimisme dewasa ini. Bagi saya, kemajuan HAM adalah soal empiris. Kita mesti melihat lebih dekat data terbaik yang tersedia seputar isu-isu yang umumnya disepakati sebagai ukuran kemajuan HAM—misalnya, data tentang jumlah korban tewas dalam perang, penggunaan hukuman mati, jumlah anak yang meninggal di bawah usia satu atau lima tahun, atau persentase anak perempuan dan perempuan yang bersekolah di seluruh dunia.

Bila kita menganalisis tren ini, kita menemukan bahwa HAM mengalami kemunduran di sejumlah bidang, seperti krisis pengungsi di Eropa saat ini, atau penyiksaan dan penahanan ilegal yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bush. Namun ada banyak bidang lain yang menunjukkan kemajuan dan meningkatnya kesadaran, seperti menurunnya jumlah korban jiwa dalam perang dan konflik, serta kemajuan dalam kesetaraan gender, hak minoritas seksual, dan hak penyandang disabilitas. Di luar tren mengkhawatirkan di sejumlah bidang, seperti meningkatnya ketimpangan ekonomi, tinjauan terhadap data saat ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM di dunia pada saat ini *lebih sedikit* dibandingkan pada masa sebelumnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di sepanjang buku ini, dan khususnya pada bab 2, saya mengukur pelanggaran HAM lewat perbandingan dengan masa sebelumnya karena, sebagai ilmuwan sosial, saya lebih tertarik pada perbandingan empiris ketimbang perbandingan dengan yang ideal. Pada bagian ini, saya akan menunjukkan secara singkat beberapa grafik untuk menunjang argumen saya, sebelum beralih ke bahasan utama bab ini: mengapa banyak orang pesimis padahal tren HAM itu positif. Karena suatu data kadang dapat menjadi problematis, saya menggunakan

berbagai himpunan data yang menunjukkan tren serupa dalam menarik kesimpulan.

Ada banyak variasi dalam data HAM—antarkawasan, antarnegara, dan bahkan di dalam satu negara. Namun kita mesti memahami tren besarnya terlebih dahulu sebelum membahas soal apakah kelompok, kasus, atau negara tertentu lebih baik atau lebih buruk dalam kaitannya dengan tren tersebut. Misalnya, angka harapan hidup meningkat di seluruh dunia, termasuk di Afrika, tetapi di beberapa negara, seperti Zimbabwe, angka harapan hidup menurun pada awal dan pertengahan 2000. Karena itu, setiap kali membahas soal tren besar, kita tahu bahwa ada banyak variasi. Tetapi untuk dapat memahami dan mempelajari variasi tersebut, kita perlu mulai dari tren umum.

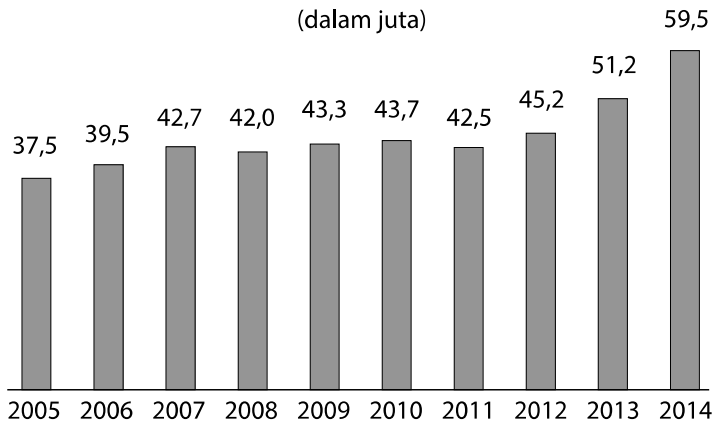
Ada dua pertanyaan besar di sini—pertama, apakah ada tren HAM yang positif di dunia? Dan kedua, apa penjelasan untuk tren tersebut? Keduanya merupakan soal yang terpisah; terkadang, kita melihat capaian positif HAM tanpa bukti yang jelas apakah hukum, institusi, atau gerakan HAM berperan di dalamnya. Meski demikian, capaian positif HAM yang semacam itu pun tetap relevan dalam membahas soal pesimisme, mengingatkan kritikus seperti Posner sama sekali tidak melihat adanya perubahan positif dalam HAM *maupun* dampak dari hukum HAM. Saya akan berusaha menunjukkan dengan jelas di mana saya menemukan bukti bahwa hukum, institusi, dan gerakan HAM berkontribusi terhadap tren yang saya gambarkan.

Krisis Pengungsi

Pada bab 6, saya akan menunjukkan data tentang menurunnya perang saudara dan perang antarnegara di dunia, serta menurunnya jumlah korban tewas yang terkait dengannya. Namun, di sini kita harus akui bahwa, meskipun perang antarnegara dan korban jiwa dalam pertempuran lebih sedikit, perang yang saat ini berlangsung di Suriah, Irak, dan Afghanistan menyebabkan lebih banyak pengungsi dibandingkan masa sebelumnya sejak Perang Dunia II. Masalahnya memang bukan korban jiwa—meski di tengah-tengahnya banyak orang meninggal—melainkan orang-orang yang berpindah untuk menghindari konflik dan mencari hidup yang lebih baik.

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa jumlah pengungsi meningkat drastis antara 2004 hingga 2015. Angka ini adalah perkiraan Kantor Komisariat

Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UN High Commissioner for Refugees, UNHCR), yang telah memantau pengungsi selama puluhan tahun, dan karena itu, angkanya dapat diandalkan. Ada alasan kuat untuk meyakini bahwa tren ini adalah wujud nyata krisis HAM dan kemanusiaan dalam proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.



Gambar 5.1. Jumlah orang yang terusir akibat perang mencapai titik tertinggi yang mencemaskan. *Sumber:* United Nations High Commissioner for Refugees (Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi). Diadaptasi dari bagan dalam “Worldwide Displacement Hits All-Time High as War and Persecution Increase,” UNHCR, 18 Juni 2015, <http://www.unhcr.org/news/latest/2015/6/558193896/worldwide-displacement-hits-all-time-high-war-persecution-increase.html>.

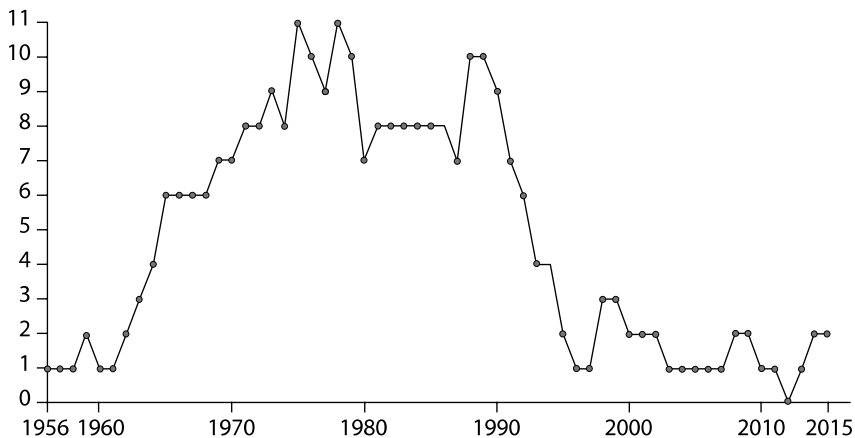
Penyebab krisis ini kompleks. Orang berpindah karena gabungan antara berbagai faktor pendorong, khususnya perang, dan faktor penarik, seperti lingkungan informasi baru yang menunjukkan peluang lebih baik di tempat lain serta kemudahan akses terhadap saluran legal maupun ilegal yang membantu perpindahan semacam itu. Tidak ada bukti bahwa gagasan dan institusi HAM turut andil dalam arus pengungsi ini, walau semestinya ada kebijakan yang lebih baik dalam penanganan pengungsi yang dapat meringankan penderitaan mereka.

Genosida dan Politisida

Pada isu-isu lain, seperti genosida—salah satu kejahatan HAM paling serius—bukti menunjukkan bahwa episode kekerasan lebih sedikit dibandingkan masa sebelumnya. Genosida, menurut definisinya, adalah

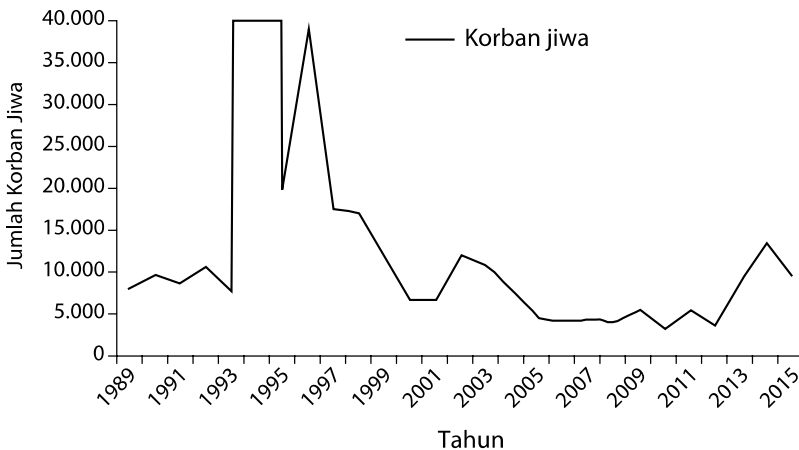
situasi ketika terdapat “maksud untuk memusnahkan, seluruh atau sebagian, kelompok bangsa, etnis, atau ras.”⁸ Karena genosida tidak mencakup kelompok yang disasar karena keyakinan atau ideologi politiknya, para ahli pun membuat kategori lain yang disebut “politisida,” yaitu pembunuhan orang atau sekelompok orang oleh pemerintah karena haluan politiknya atau demi tujuan politik.

Gambar 5.2 memetakan tren genosida dan politisida di dunia, menggunakan data State Failure dari Political Instability Task Force.⁹ Grafik ini mengukur apa yang disebut “data berbasis peristiwa.” Artinya, data ini menghitung episode genosida dan politisida. Karena yang dihitung adalah peristiwa besar, kasusnya sangat sulit disembunyikan dan kita dapat cukup yakin dengan datanya. Tetapi fokus pada “episode” genosida dapat mengaburkan jumlah orang yang terdampak; meskipun jumlah genosida dan politisida menurun, jumlah orang yang terdampak boleh jadi meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, data di Gambar 5.3 menunjukkan estimasi jumlah korban tewas dalam kekerasan “sepihak” di dunia, yang didefinisikan sebagai “serangan mematikan terhadap warga sipil oleh pemerintah atau kelompok yang terorganisir secara formal.”¹⁰ Kategori ini lebih luas dari genosida dan politisida dan menghitung jumlah korban tewas akibat jenis kekerasan yang lebih luas.



Gambar 5.2. Tren genosida dan politisida, 1955–2015. Sumber: Max Roser, *Trends in Genocide and Politicide 1955–2015*, t.t. Indikator Genosida dari Political Instability Task Force (PITF) State Failure Problem Set, 1955–2014. <http://ourworldindata.org/data/war-peace/genocides/>.

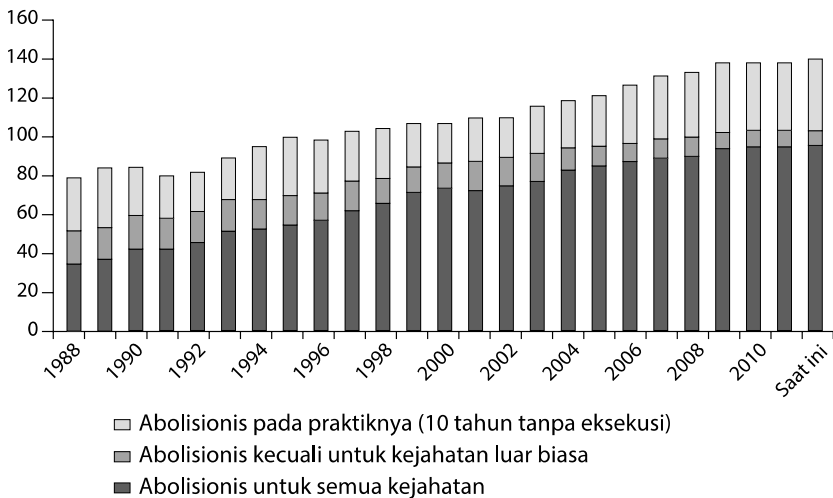
Ditinjau dari episode kekerasan maupun korban jiwa, bukti yang ada mendukung kesimpulan menurunnya kekerasan sepihak di dunia. Genosida dan politisida meningkat selama periode 1960-1990, tetapi menurun secara signifikan setelah periode tersebut. Penjelasan untuk kemajuan dalam isu HAM pokok seperti genosida sangatlah kompleks, mengidentifikasi faktor risiko yang menyebabkan kemunduran atau kemajuan juga tidak mudah. Tetapi, kajian terhadap kemungkinan faktor risiko menunjukkan bahwa perang dan otoritarianisme merupakan mekanisme pemicu utama genosida.¹¹ Karena itu, tidak heran jika menurunnya tren genosida beriringan dengan menurunnya perang saudara dan meredupnya rezim otoritarian pada periode yang sama (lihat Gambar 6.1 dan 6.3 di bab 6). Banyak ahli genosida juga menemukan bahwa naiknya ideologi dan bahasa eksklusif dan dehumanisasi berkaitan dengan genosida.¹² Ide HAM adalah kebalikan dari ideologi yang berisi eksklusif dan dehumanisasi; ide HAM itu humanis dan inklusif. Karena itu, ide HAM merupakan alternatif terhadap ideologi yang berkontribusi terhadap genosida.



Gambar 5.3. Korban jiwa dalam kekerasan sepihak, 1989–2015. Sumber: Diadaptasi dari bagan dalam Erik Melander, Thérèse Pettersson, dan Lotta Themnér, “Organized Violence, 1989–2015,” *Journal of Peace Research* 53 no. 5 (2016): 727–742. Uppsala Conflict Data Program One-Sided Dataset.

Kerja-kerja HAM juga memiliki dampak yang berpotensi dapat diukur dalam perjuangan menghentikan genosida. Penelitian saya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM

berkaitan dengan perbaikan praktik HAM utama.¹³ Pada 1990-an, para pemimpin negara dan pemberontak untuk pertama kalinya dituntut secara pidana atas kejahatan genosida, dalam pengadilan ad hoc Rwanda dan bekas Yugoslavia. Munculnya akuntabilitas ini dapat menjadi bagian dari penjelasan atas menurunnya genosida, meski kesimpulan ini belum benar-benar pasti.¹⁴



Gambar 5.4. Jumlah negara abolisionis. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah negara yang telah menghapuskan hukuman mati. Sumber: Amnesty International, *Number of Abolitionist Countries*, 2015, <http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/death-penalty/us-death-penalty-facts/death-penaltytrends>.

Hukuman Mati

Dalam isu hukuman mati, kaitan antara hukum dan aktivisme HAM dengan kemajuan dalam HAM tampak lebih jelas. Amnesty International (AI) telah mengampanyakan penolakan terhadap hukuman mati di seluruh dunia sebagai salah satu mandat utamanya sejak 1977, ketika baru 16 negara yang telah menghapuskannya dalam undang-undang ataupun pelaksanaannya.¹⁵ Saat ini, seperti tampak pada Gambar 5.4, jumlah tersebut telah meningkat menjadi 140, hampir duapertiga negara di dunia. Jika kita meninjau ratifikasi berbagai protokol hukuman mati dalam konvensi HAM, tampak bahwa sebagian besar negara di dunia sepakat bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran HAM.¹⁶ Hukum HAM turut mendorong perubahan dalam hal ini karena riset menunjukkan bahwa

negara yang telah meratifikasi protokol hukuman mati lebih cenderung berlanjut menghapuskan hukuman mati dalam undang-undang maupun pelaksanaannya.¹⁷

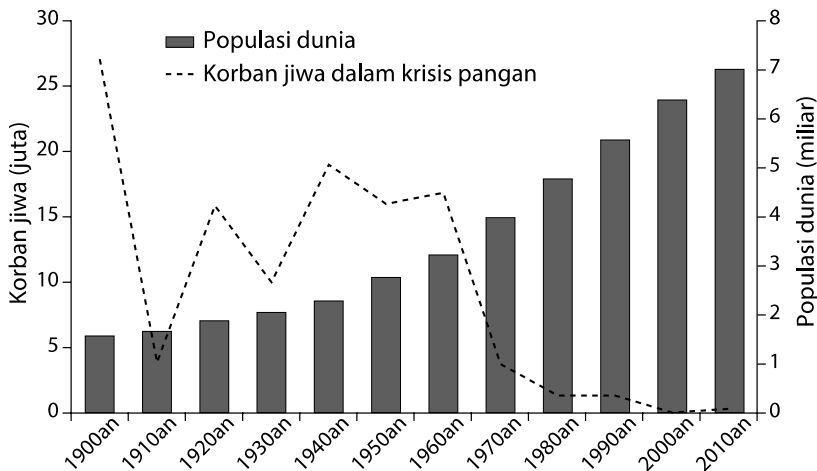
Hukuman mati, seperti halnya genosida, dapat diukur menggunakan data berbasis peristiwa—yakni, jumlah negara tertentu yang telah menghapuskan hukuman mati, baik dalam undang-undangnya maupun dalam pelaksanaannya. Karena undang-undang dan pelaksanaannya sering kali bersifat publik (kecuali Tiongkok, yang melaksanakan eksekusi mati dengan jumlah yang tidak diketahui setiap tahunnya), kita yakin dengan tren yang ditunjukkan data ini—yaitu menurunnya penggunaan hukuman mati secara signifikan dari waktu ke waktu. Dengan data ini, peneliti dapat mengajukan dan menjawab pertanyaan soal dampak hukum dan aktivisme HAM dalam kaitannya dengan hukuman mati.¹⁸

Krisis Pangan, Kelaparan, dan Kekurangan Gizi

Pelanggaran terhadap hak ekonomi dan sosial kadang sulit diukur, tetapi krisis pangan (*famine*) merupakan perampasan hak ekonomi yang paling ekstrem—hak atas pangan—yang kelanjutannya merupakan pelanggaran atas hak hidup. Kita semakin paham bahwa krisis pangan biasanya tidak disebabkan oleh ketiadaan pangan, melainkan karena kegagalan menyediakan pangan kepada mereka yang paling membutuhkan, atau ketidakmampuan mereka yang membutuhkan untuk memperolehnya. Amartya Sen menjelaskan krisis pangan terutama sebagai akibat dari minimnya hak kaum yang lapar atas pangan, atau dengan kata lain, sebagai persoalan HAM.¹⁹ Sen menunjukkan bahwa krisis pangan tidak terjadi di bawah pemerintahan demokratis karena, dalam demokrasi, kemerdekaan pers dan pemilu berkala memastikan pemerintah mengetahui ancaman krisis pangan dan dapat mengambil tindakan untuk mencegahnya agar tidak kehilangan kekuasaannya.²⁰

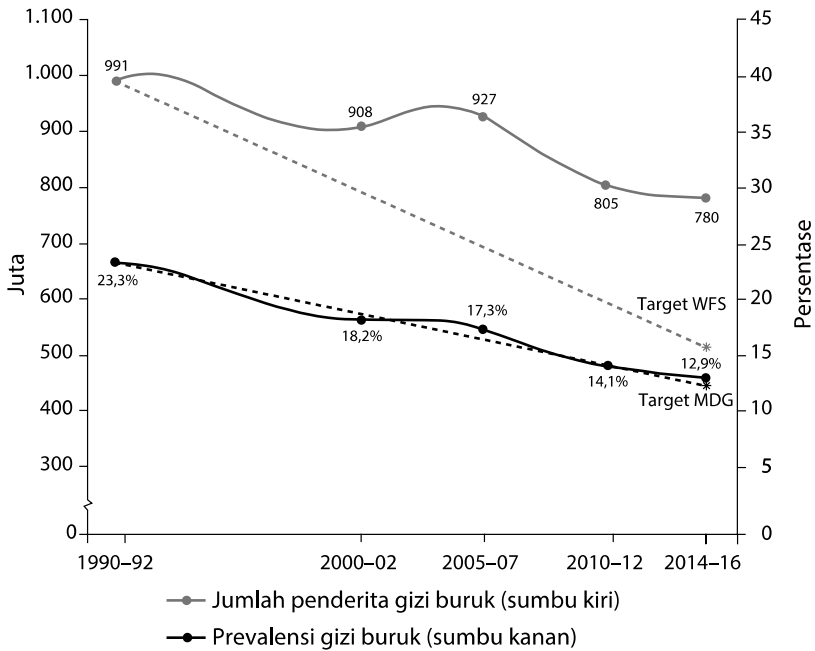
Gambar 5.5 menunjukkan penurunan krisis pangan secara keseluruhan dalam konteks pertumbuhan penduduk dunia. Teoretikus di masa lalu meyakinkan kita bahwa peningkatan populasi secara dramatis niscaya akan menyebabkan krisis pangan, tetapi tidak demikian menurut grafik ini. Sebagian besar angka grafik pada bab ini juga dapat memasukkan angka populasi ini sebagai catatan bahwa menurunnya tren kekerasan dan kesulitan itu terjadi dalam konteks meningkatnya tekanan populasi. Dari segi ini, menurunnya jumlah absolut korban jiwa dalam perang,

genosida, kekerasan sepihak, dan krisis pangan di seluruh dunia jauh lebih mengesankan di tengah meningkatnya populasi secara dramatis.



Gambar 5.5. Pertumbuhan populasi dunia dan jumlah korban tewas dalam krisis pangan, 1900–2015. *Catatan:* Setiap krisis pangan menewaskan lebih dari 100.000 jiwa. *Sumber:* World Peace Foundation. “Famine Trends Project.” Boston: World Peace Foundation, 2016.

Kita tentu tidak hanya menyoroti krisis pangan, tetapi juga bentuk lain dari hilangnya hak atas pangan yang tidak ekstrem. Ketika menunjukkan bagaimana demokrasi menghapuskan krisis pangan di India, Sen juga menyebutkan bahwa endemi gizi buruk telah melanda negeri itu sejak kemerdekaan. Krisis pangan menjadi tajuk utama dan dianggap masalah mendesak, tetapi tidak demikian halnya dengan gizi buruk. Meski begitu, sebagaimana telah dibahas pada bab 2, kelaparan atau kekurangan gizi juga menurun di dunia, walau tidak sedramatis penurunan krisis pangan dan trennya berbeda-beda antarwilayah. Dalam hal ini, seperti halnya dalam semua tren yang lain, penting untuk membedakan antara jumlah absolut orang yang terdampak dan jumlah orang yang terdampak sebagai persentase dari total populasi. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 5.6, jumlah absolut penderita gizi buruk di dunia dan persentase penderita gizi buruk di dunia sama-sama menurun. Tetapi meski pada tataran global terdapat kemajuan, jumlah di beberapa wilayah masih mengkhawatirkan. Di Afrika misalnya, meski jumlah penderita gizi buruk sebagai persentase dari populasi terlihat menurun, jumlah absolut penderita kelaparan meningkat.



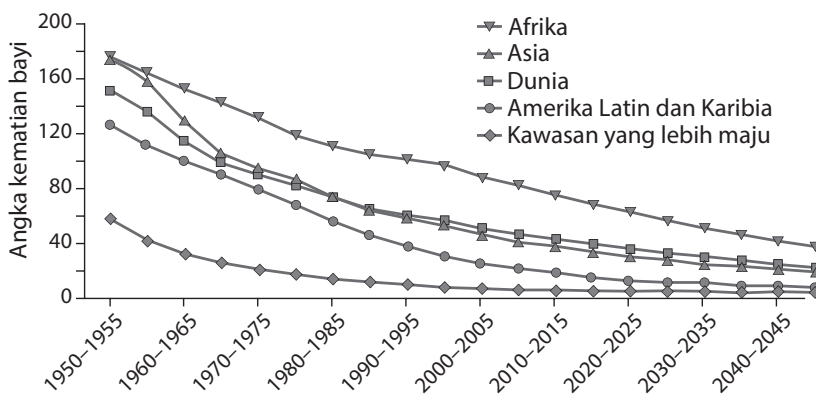
Gambar 5.6. Trajektori gizi buruk di wilayah berkembang: kemajuan aktual dan proyeksi jumlah absolut penderita gizi buruk dan persentase penderita gizi buruk dari populasi. Sumber: Food and Agriculture Organization of the United Nations, “The State of Food Insecurity in the World 2015,” <http://www.fao.org/hunger/key-messages/en/>.

Gambar 5.6 juga menunjukkan bahwa penurunan angka kelaparan belum mencapai target yang ditetapkan komunitas internasional. Penurunan prevalensi gizi buruk sudah sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goal, MDG), tetapi negara-negara pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit, WFS) 1996 di Roma menetapkan target yang meleset dengan selisih cukup besar: “untuk menghapuskan kelaparan di semua negara, dengan segera mengurangi jumlah penderita gizi buruk menjadi setengah dari jumlahnya saat ini paling lambat tahun 2015.”²¹ Hal ini juga menggambarkan bahwa berbagai jenis perbandingan dapat menghasilkan evaluasi yang berbeda atas situasi yang sama. Mengacu pada perbandingan empiris, terdapat penurunan gizi buruk di dunia, baik dalam jumlah absolut maupun persentase sejak 1990. Tetapi, mengacu pada target WFS—yang dapat dianggap sebagai perbandingan eksplisit dengan yang ideal (mengurangi separuh jumlah penderita

kelaparan di dunia dalam sembilan tahun)—terdapat kesenjangan lebar antara kenyataan dengan yang ideal.

Kematian Bayi dan Anak

Indikator hak sosial ekonomi lain yang juga bagus adalah kematian bayi karena hal ini banyak menggambarkan soal kesehatan ibu, akses ke layanan kesehatan, serta akses ke air bersih. Seperti tampak pada Gambar 5.7, kematian bayi menurun di semua wilayah dunia. Bagan ini menyertakan prediksi untuk masa mendatang, dan perubahan positif ini diproyeksikan berlangsung hingga 2045, dengan asumsi tren saat ini terus berlanjut. Lagi-lagi, terdapat variasi antarwilayah yang substansial di sini. Afrika, misalnya, masih tertinggal jauh dari wilayah lain, tetapi masih menunjukkan tren ke arah perbaikan.



Gambar 5.7. Angka kematian bayi menurut wilayah, 1950-2050. Sumber data: UN World Population Prospects, 2008. Bagan oleh Rcragun / Wikimedia Commons (Creative Commons license, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0>).

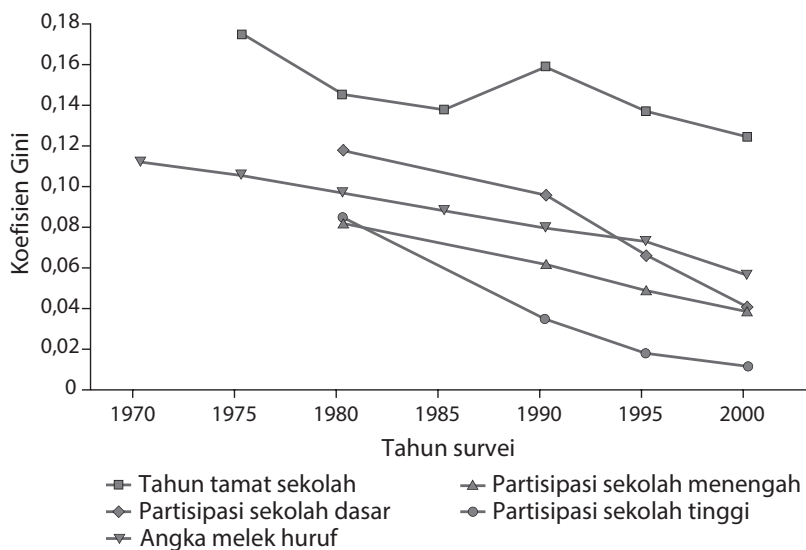
Perbaikan dalam angka kematian bayi atau anak boleh jadi bukan buah dari efektivitas institusi atau gerakan HAM. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) dan Dana Anak-anak PBB (United Nations Children's Fund, UNICEF) menunjukkan bahwa lebih dari separuh kematian anak usia dini dapat dicegah dengan intervensi sederhana dan terjangkau seperti ASI eksklusif, air bersih, vaksinasi, dan terapi rehidrasi oral.²² Sebagian besar intervensi ini merupakan hasil dari upaya-upaya di bidang kesehatan masyarakat, bukan kampanye HAM. Namun, jika ternyata peningkatan ibu menyusui atau penggunaan

rehidrasi oral sebagian ditunjang oleh, misalnya, keberhasilan kampanye HAM—seperti boikot terhadap Perusahaan Nestle serta dihasilkannya kode etik yang mengatur korporasi transnasional dalam memasarkan susu pengganti ASI—dapat dikatakan bahwa gerakan HAM merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perbaikan dalam masalah kematian bayi.²³

Hak Perempuan

Gerakan HAM juga berdampak terhadap hak perempuan. Gambar 5.8 menunjukkan tren penting: menurunnya ketimpangan pendidikan perempuan. Bagan ini menggunakan ukuran ketimpangan yang baku, koefisien Gini, untuk mengukur penurunan di seluruh jenjang pendidikan—dasar, menengah, dan tinggi. Meski kemajuan dalam pendidikan perempuan dipengaruhi oleh berbagai isu, Beth Simmons menunjukkan bahwa ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) merupakan salah satu faktor penting.²⁴ Sebelum ratifikasi, banyak negara mempunyai undang-undang yang membedakan wajib belajar untuk anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, anak laki-laki wajib sekolah hingga kelas delapan, tetapi anak perempuan hanya wajib sekolah hingga kelas enam. Ketika suatu negara meratifikasi CEDAW, badan konvensi memberi tahu mereka bahwa ketentuan semacam itu diskriminatif dan bertentangan dengan tuntutan konvensi ini. Sebagian negara kemudian mengubah undang-undangnya, dengan ketentuan wajib belajar yang setara. Ketika undang-undang baru ini diikuti oleh masyarakat, pendidikan perempuan di suatu negara pun berangsur meningkat, dan peningkatan ini dapat dikatakan adalah berkat hukum HAM. Ihwal dampak hukum HAM, Beth Simoons, Daniel Hill, dan Yonatan Lupu menunjukkan bahwa CEDAW merupakan konvensi HAM yang paling efektif sejauh ini.²⁵

Ada banyak grafik lain yang dapat disertakan, misalnya, tentang kematian anak (jumlah balita yang meninggal), yang sangat mirip dengan grafik kematian bayi, atau grafik tren pendidikan di dunia, angka melek huruf, dan angka harapan hidup, semuanya menunjukkan perbaikan penting, meski terdapat variasi signifikan antarkawasan. Harapannya tersedia bukti kuat untuk menunjukkan bahwa, dalam banyak hal, keadaan manusia di dunia lebih baik dari sebelumnya. Bagian berikutnya dari bab ini menyoroti sejauh mana hukum, institusi, dan gerakan HAM berkontribusi terhadap tren tersebut.



Gambar 5.8. Perubahan ketimpangan gender dunia: lima indikator pendidikan, Data diambil dari Shawn F. Dorius dan Glenn Firebaugh, "Trends in Global Gender Inequality," *Social Forces* 88, no. 5 (2010): 1953.

Efektivitas Hukum, Institusi, dan Gerakan HAM

Membuktikan tren kemajuan HAM hanyalah pintu masuk untuk membicarakan efektivitas hukum, institusi, dan gerakan HAM. Saya mulai mengkaji soal efektivitas ini sekitar lima belas tahun yang lalu bersama kolega saya, Thomas Risse dan Stephen Ropp saat menyunting dua jilid buku yang menyelidiki kekuatan HAM lewat perbandingan studi kasus kualitatif di berbagai negara. Bertolak dari studi terhadap berbagai negara seperti Indonesia, Kenya, Guatemala, Maroko, Tunisia, dan Amerika Serikat, kami menyimpulkan bahwa hukum HAM tidak berfungsi dengan sendirinya; tetapi, ketika hukum tersebut diperkuat oleh advokasi transnasional dan dalam negeri, perbaikan praktik HAM acap terjadi.²⁶ Kami juga menemukan bahwa negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok paling piawai menangkal tekanan HAM dari luar.²⁷

Pada saat kami mempublikasikan temuan kami, peneliti lain mengungkapkan ketegangan dalam bidang kajian HAM. Studi yang lebih fokus pada data kuantitatif menunjukkan bahwa ratifikasi sejumlah konvensi HAM tidak berdampak positif terhadap praktik HAM, dan kadang malah tampak kontraproduktif. Sejumlah studi, misalnya, menunjukkan bahwa ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention against Torture,

CAT) justru berkaitan dengan meningkatnya penyiksaan.²⁸ Dalam esai ulasan berjudul “Seeing Double: Human Rights Impact through Qualitative and Quantitative Eyes,” dua kolega menegaskan bahwa peneliti yang melakukan studi lapangan lebih optimis akan kemajuan HAM, sedangkan peneliti yang melakukan studi kuantitatif lebih pesimis.²⁹ Artikel ini menyiratkan bahwa mereka yang mengandalkan studi lapangan larut dalam angan-angan, sedangkan mereka yang mengandalkan angka lebih objektif.

Buku Beth Simmons yang meraih penghargaan, *Mobilizing for Human Rights*, mempertanyakan dikotomi antara peneliti lapangan yang optimis dengan pengolah angka yang pesimis itu. Menggunakan teknik kuantitatif yang canggih, Simmons menunjukkan bahwa konvensi HAM memang menunjang kemajuan HAM, bila jenis pemerintahan suatu negara diperhitungkan. Meskipun buku Simmons, yang terbit pada 2010, sejauh ini merupakan karya terbaik mengenai dinamika pengaruh hukum internasional terhadap praktik negara, buku ini tidak mengakhiri perdebatan soal efektivitas. Tiga tahun kemudian, *The Twilight of Human Rights* karya Posner sebagian besar mengabaikan karya Simmons karena Posner mengeklaim bahwa hukum dan advokasi HAM sudah gagal membuahkan hasil. Walau telah ada kontribusi Simmons, belum ada konsensus tentang ini. Para peneliti dan kritikus malah tampak makin berbeda pendapat.

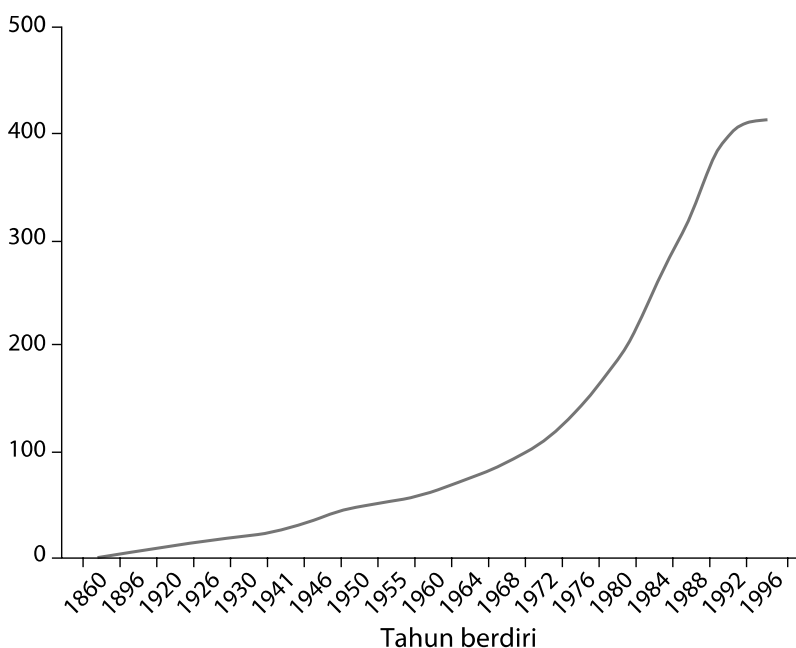
Mengapa kita tidak bersepakat? Pada bab 2, saya telah menjelaskan salah satu penyebab utama perbedaan pendapat ini: kesimpulan berbeda antara yang ditarik lewat perbandingan dengan yang ideal vs. perbandingan dengan yang empiris. Untuk menjawab persoalan ini lebih jauh, saya membahas tiga isu lain yang memengaruhi debat seputar efektivitas, bahkan di kalangan peneliti perbandingan empiris sekalipun:

1. Bahaya tersembunyi (*invisible harms*) dan paradoks informasi.
2. Heuristik atau bias yang membuat kita lebih memperhatikan informasi negatif yang menonjol.
3. Perubahan standar akuntabilitas sehingga apa yang dimaksud dengan HAM pun terus berkembang.

Bahaya Tersembunyi dan Paradoks Informasi

Sebagian hak dapat diukur dengan perhitungan yang cukup sederhana, seperti informasi tentang pendidikan perempuan yang sebelumnya disebutkan. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh kolega saya Malcolm

Sparrow, banyak isu HAM merupakan bagian dari kumpulan masalah yang lebih luas, atau yang dia sebut “bahaya tersembunyi” (*invisible harms*). Bahaya ini sulit diamati dan dianalisis karena cenderung kurang dilaporkan; sehingga sebagian masalahnya pun tersembunyi.³⁰ Contoh bahaya tersembunyi antara lain seperti penyiksaan, penghilangan, eksekusi tanpa proses hukum, pemerkosaan, dan pemenjaraan politik. Survei PBB, misalnya, menunjukkan bahwa sepertiga perempuan di dunia akan menghadapi serangan fisik atau seksual oleh pasangan mereka atau kekerasan seksual oleh yang bukan pasangan mereka selama hidupnya.³¹ Karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan sejenis bahaya tersembunyi yang lebih sulit didokumentasikan dibanding kematian bayi atau jumlah anak perempuan yang bersekolah, sulit menarik kesimpulan tentang kemajuan, atau kemunduran, ataupun yang di tengah-tengahnya.

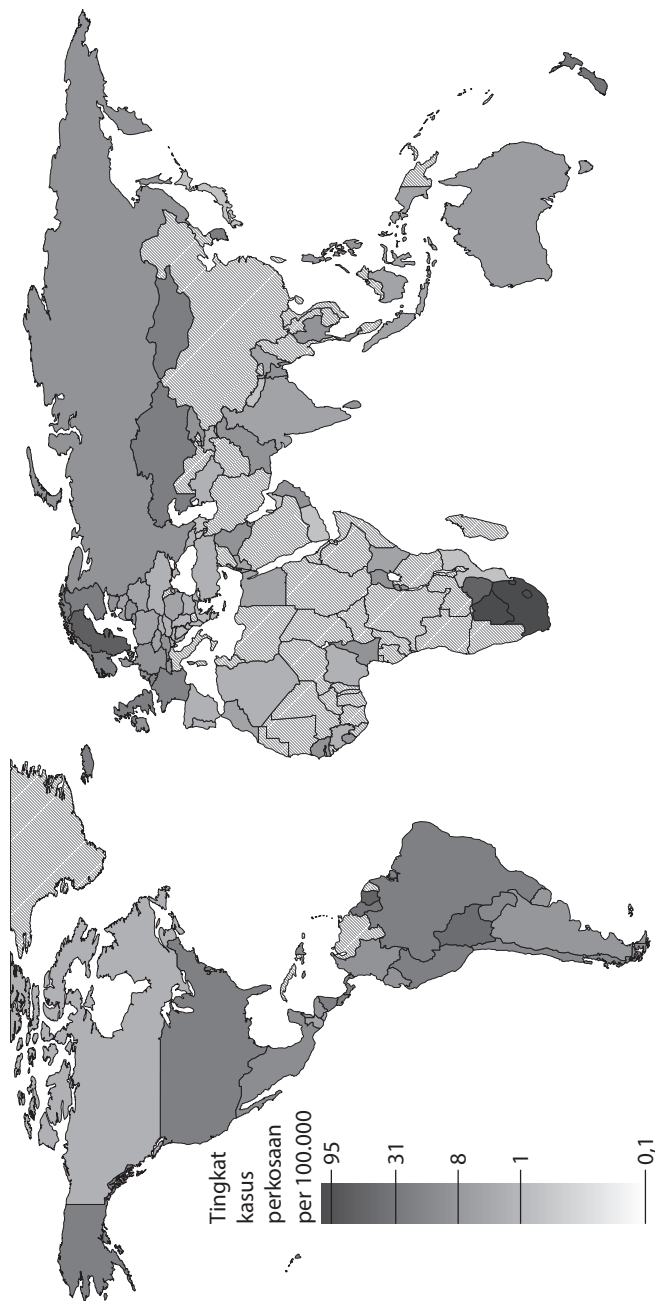


Gambar 5.9. Jumlah Rata-rata NGO Internasional HAM yang Bekerja di Berbagai Negara. Data diperoleh dari pengodean Yearbook of International Organization INGO oleh Jackie Smith dan Dawn Wiest yang tersedia untuk publik. Terima kasih kepada Amanda Murdie atas izinnya untuk mengadaptasi bagan ini.

Salah satu sasaran gerakan HAM adalah mengupayakan agar bahaya yang tersembunyi ini menjadi terlihat, tetapi dalam prosesnya, muncul kesan bahwa pelanggaran HAM jadi lebih marak. Di buku kami yang terbit pada 1998, *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, Margaret Keck dan saya berusaha mencari cara mendefinisikan dan mengukur efektivitas jaringan advokasi transnasional, termasuk di bidang HAM. Kami menunjukkan bahwa untuk mengukur pengaruh jaringan advokasi, jangan hanya melihat pengaruhnya terhadap perilaku aktual, tetapi lihat kemampuannya dalam mengangkat isu baru, menetapkan agenda, serta memengaruhi perubahan kebijakan dan peraturan.

Keck dan saya berpendapat bahwa alat jaringan advokasi yang paling penting adalah “politik informasi”—menghasilkan informasi yang berguna secara politik dengan kredibel dan membawanya ke tempat yang potensi dampaknya paling besar. Kami membuat istilah “paradoks informasi” untuk menunjukkan bagaimana aktivis yang mengangkat isu baru dan menghasilkan informasi baru terkadang memunculkan kesan bahwa keadaannya semakin buruk, padahal sebenarnya orang hanya jadi lebih tahu saja tentang isu tersebut.³² Sebagaimana tampak di Gambar 5.9, jumlah NGO internasional (INGO) bidang HAM di jaringan advokasi ini terus bertambah. Alat utama INGO ini juga masih berupa politik informasi, semakin banyak NGO HAM yang terus melakukan penelitian, menerbitkan lebih banyak laporan, serta menyebarkannya di media sosial.

Politik informasi jaringan HAM pun memancing tanggapan dari pemerintah represif dan pelaku lainnya, yang berusaha agar “bahaya tersembunyi”-nya tetap tak terungkap dan mendelegitimasi pembawa pesan—khususnya NGO. Pelaku menggunakan cara-cara drastis untuk terus menyembunyikan pelanggaran HAM. Sebagai contoh, beberapa minggu setelah kelompok Serbia membantai ribuan pria dan anak di Srebrenica, Bosnia, pada 1990 dan menguburkan mayatnya, pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut mengerahkan bulldoser untuk menggali dan merusak kuburan massal tersebut lalu menguburkannya kembali untuk mempersulit identifikasi forensik terhadap tubuh korban. Organisasi HAM pun mesti memanfaatkan teknologi yang lebih canggih. Dalam kasus ini, mereka menggunakan teknik DNA baru yang memungkinkan identifikasi mayat, sekalipun dari serpihan tulang di kuburan yang rusak. Informasi ini belakangan digunakan di pengadilan *ad hoc* kejahatan perang di bekas Yugoslavia untuk menghukum sebagian dari mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut.³³



Gambar 5.10. Tingkat pemerkosaan per 100.000 penduduk, 2010–2012. Sumber data: United Nations Office on Drugs and Crime. Negara bertanda arsis tidak tersedia datanya. Bagan diadaptasi dari bagan M Tracy Hunter / Wikimedia Commons (Creative Commons License, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>).

Ketegangan di seputar politik informasi selalu ada, bukan hanya antara aktivis yang membuka informasi dan pelaku yang menutupinya, tetapi juga di antara sesama NGO HAM menyangkut jenis informasi yang dilaporkan. Pemerintah represif tahu bahwa salah satu cara ampuh untuk melawan politik informasi adalah dengan mengintimidasi dan menyingkirkan NGO HAM, misalnya dengan hukum sewenang-wenang (*draconian*) yang memaksa mereka mendaftar sebagai agen asing atau dengan memidanakan mereka atas tuduhan makar atau kejahatan lainnya.

Dalam artikel tahun 2013, Ann Marie Clark dan saya mengembangkan lebih lanjut ide tentang paradoks informasi dan membahas isu yang lebih luas: “efek informasi” advokasi transnasional. Efek informasi adalah “pola dalam data yang muncul dari proses pengumpulan dan penafsiran informasi, dan bukan dari proses yang benar-benar merupakan peningkatan pelanggaran HAM.”³⁴ Masalah ini tidak hanya ditemukan pada riset HAM, tetapi juga pada bidang riset yang lain, seperti debat terkini seputar autisme. Para peneliti masih belum dapat memastikan apakah yang terjadi memang benar-benar peningkatan autisme atau hanya peningkatan diagnosis autisme, atau gabungan antara keduanya. Tetapi, para peneliti HAM tampaknya sering tidak menyadari bahwa fenomena semacam itu juga dapat memengaruhi bidangnya.

Situasi di Brasil yang mengecilkan hati sebagian pembela hak perempuan adalah salah satu contoh dari paradoks informasi ini. Saat NGO di Brasil mulai menyoroti pelanggaran terhadap Undang-Undang Maria da Penha, yang bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kadang muncul kesan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat, padahal tidak demikian—informasi tentangnya saja yang jadi lebih banyak.³⁵ Perempuan di Brasil, yang makin tahu tentang undang-undang baru tersebut, kini lebih banyak melaporkan kekerasan. Pada akhirnya, data harus stabil agar dapat mengamati tren. Tetapi saya kira sepuluh tahun kemudian pun masih terlalu dini untuk membangun data yang reliabel mengenai kekerasan terhadap perempuan dan, oleh karena itu, kita belum dapat mengetahui apakah kekerasan atau pelaporan kekerasan yang sebenarnya meningkat. Paradoks informasi menantang para aktivis HAM untuk memastikan bahwa kemampuan mereka dalam politik informasi dan penciptaan isu tidak menjadi alat untuk menunjukkan kurangnya efektivitas dalam mengubah perilaku.

Sedikit sekali sumber informasi HAM yang reliabel pada 1970-an, jadi kita tidak punya acuan dasar untuk mengukur kemajuan HAM.

Sejak 1980-an, jumlah NGO, negara, dan organisasi internasional yang membuat laporan tentang HAM terus bertambah. Pelanggaran sudah lebih sulit disembunyikan dan dikaburkan dibanding sebelumnya, dan para peneliti punya lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan. NGO, organisasi lainnya, dan media, misalnya, makin memperhatikan kekerasan terhadap perempuan, terutama pemerkosaan yang meluas, khususnya pemerkosaan di masa perang. Tetapi apakah yang sebenarnya terjadi itu adalah adanya gelombang baru kekerasan terhadap perempuan secara global, atautkah korban, organisasi, dan media lebih banyak melaporkannya dibandingkan sebelumnya?

Saat mencari informasi tentang apakah kekerasan terhadap perempuan telah meningkat, kita kadang memperoleh data seperti itu pada Gambar 5.10 terkait pemerkosaan, yang dibuat menggunakan angka dari Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UN Office on Drugs and Crime). Petanya seolah menunjukkan bahwa negara yang menjadi tempat di mana paling banyak terjadi pemerkosaan adalah Swedia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Botswana. Selain itu, pemerkosaan juga tampak lebih sering terjadi di Inggris dan Prancis ketimbang di bekas Yugoslavia. Ada banyak negara yang datanya tidak tersedia (area abu-abu muda bergaris pada peta). Data ini adalah cuplikan dari satu periode waktu dan tidak menunjukkan tren dari waktu ke waktu atau pun prevalensi aktual pemerkosaan di dunia. Peta ini hanya menunjukkan negara mana yang mengumpulkan data, termasuk negara mana yang pengumpulan datanya lebih baik dari negara lain, atau prosedurnya berbeda. Misalnya:

Di Swedia, sudah lama ada ambisi untuk mencatat setiap kasus kekerasan seksual secara eksplisit dan terpisah, agar dapat terlihat dalam statistik. Jadi, misalnya, ketika seorang perempuan melapor kepada polisi bahwa suaminya atau tunangannya memerkosanya hampir setiap hari selama setahun terakhir, polisi mesti menghitung setiap peristiwa tersebut, yang boleh jadi lebih dari 300 peristiwa. Di banyak negara lain, laporan semacam itu hanya dicatat sebagai satu peristiwa—satu korban, satu jenis kejahatan, satu catatan peristiwa.³⁶

Komitmen pemerintah Swedia dalam membuat tindak pemerkosaan jadi lebih terlihat patut dipuji, meski hal itu membuat praktik di Swedia jadi sulit dibandingkan dengan data global lainnya.

Kebanyakan bahaya tersembunyi memang “sengaja disembunyikan”—artinya, pelaku melakukan sesuatu agar tidak terdeteksi.³⁷ Karena itu, kita tidak dapat mengukur pelanggaran HAM itu sendiri melainkan hanya laporan tentangnya saja. Misalnya, ketika akademisi melakukan pengodean terhadap laporan Amnesty International, mereka menghasilkan himpunan data dugaan pelanggaran menurut Amnesty International, “bukan sensus terhadap pelanggaran yang sebenarnya.”³⁸ Pelanggaran yang dilakukan pemerintah, seperti upaya Amerika Serikat untuk menutupi penyiksaan pada masa pemerintahan Bush, serta pelanggaran oleh aktor non-negara, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dapat dianggap sebagai bahaya yang sengaja disembunyikan.

Pelanggaran HAM khususnya cenderung kompleks karena sering kali pemerintah sendiri yang melakukan pelanggaran. Lain halnya dengan kasus korupsi, misalnya, ketika pejabat pemerintah terlibat korupsi tetapi pemerintah secara keseluruhan berkepentingan mendeteksi dan menindak kejahatan tersebut. Dalam kasus pelanggaran HAM massal, pemerintah secara keseluruhan dapat melakukan kejahatan tersebut dan melakukan segala cara untuk membuatnya tak terungkap. Ketika pemerintah Argentina menghilangkan ribuan warganya, seluruh aparat keamanan dikerahkan untuk melancarkan dan menutupi bahaya tersembunyi itu.

Bagi para pengambil kebijakan, bahaya tersembunyi ini memunculkan problem pengukuran yang serius tetapi juga dapat diprediksi.³⁹ Dalam jangka pendek, laporan baru membuat situasi tampak memburuk. Namun jika kampanyenya berhasil dalam jangka panjang, volume laporan insiden kekerasan pada akhirnya akan menurun. Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan agar terjadi perubahan HAM. Seberapa cepat pelanggaran HAM dapat menurun jika hukum, institusi, dan aktivisme HAM sudah berjalan?

Mengapa Kita Lebih Memperhatikan Informasi Negatif yang Menonjol

Alasan lain mengapa para aktivis, pengambil kebijakan, dan bahkan akademisi sering kali berbeda pendapat soal apakah HAM mengalami kemajuan berkaitan dengan serangkaian bias dan heuristik psikologis yang membuat manusia cenderung lebih memperhatikan informasi yang mencolok serta lebih memercayai informasi negatif ketimbang informasi positif. Dalam bukunya *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*, Steven Pinker pertama kali menarik perhatian saya pada ilusi

dan bias kognitif ini.⁴⁰ Pinker mengutip karya ekonom pemenang Nobel Daniel Kahneman dan Amos Tversky serta penjelasannya tentang mekanisme psikologis yang memengaruhi bagaimana orang menilai probabilitas atau frekuensi peristiwa dalam situasi ketidakpastian.⁴¹ Inilah yang persis terjadi dalam debat seputar efektivitas HAM—kita menilai, misalnya, seberapa sering praktik seperti penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan dari posisi ketidakpastian karena pemerintah atau orang-orang berusaha menyembunyikan praktik tersebut. Tversky dan Kahneman menunjukkan sejumlah heuristik, atau jalan pintas, yang orang gunakan untuk mereduksi penilaian yang kompleks semacam ini menjadi penilaian yang lebih sederhana.

Heuristik yang paling relevan dengan pembahasan kita adalah *heuristik ketersediaan*: jika suatu contoh lebih mudah dibayangkan atau diingat, orang berpikir itu lebih mungkin terjadi.⁴² Heuristik ketersediaan dapat membantu kita memahami ketidaksesuaian yang membingungkan antara kemungkinan suatu peristiwa yang sebenarnya dengan kemungkinan yang dipersepsikan orang. Misalnya, orang Amerika Serikat saat ini sangat khawatir menjadi korban terorisme jihadis, meski rata-rata hanya empat orang per tahun yang terbunuh di Amerika Serikat gara-gara terorisme semacam itu. Peluang seseorang terbunuh dengan senjata api hampir 3.000 kali lebih besar—bahkan kemungkinan terbunuh karena tersambar petir atau tertimpa benda jauh lebih besar daripada serangan teroris.⁴³ Tapi, menurut model Kahneman dan Tversky, peristiwa dramatis lebih terbuka bagi memori kognitif kita dan lebih cenderung diingat daripada peristiwa yang kurang dramatis.⁴⁴ Karena terorisme begitu mengerikan, diberitakan terus-menerus, dan dibicarakan para kandidat politik, orang-orang jadi percaya bahwa kemungkinan terjadinya terorisme lebih besar daripada kemungkinan yang sebenarnya.

Aktivis HAM terutama rentan dipengaruhi oleh heuristik ketersediaan ini, dan itu bukan tanpa alasan. Dari hari ke hari mereka mendengar cerita dramatis berisi pelanggaran HAM. Cerita-cerita tersebut terus tersedia dan menyakitkan bagi mereka. Profesi dan komitmen politik para aktivis itu sendiri mengharuskan mereka mencerna banyak peristiwa mengerikan dan mengangkatnya menjadi perhatian publik. Dari segi ini, heuristik ketersediaan hampir menjadi fondasi bagi kerja-kerja HAM; tujuannya adalah agar pelanggaran HAM lebih terlihat oleh khalayak umum dan pengambil kebijakan. Tetapi, keberhasilan dalam menyingkap

pelanggaran HAM dapat menimbulkan efek samping berupa kesan bahwa pelanggaran tersebut seolah lebih sering terjadi dibanding sebelumnya.

Dalam *The Idea of Justice*, Amartya Sen membahas bias kognitif terkait, yang disebut “ilusi objektif.” Menurut Sen, ketika ada ketidakadilan yang nyata, hal itu diterima begitu saja hingga orang tidak menyadarinya. Namun saat keadaan berangsur membaik dan menjadi lebih adil, orang jadi lebih sadar akan masalah asalnya. Orang yang paling sering mengeluhkan masalah boleh jadi adalah yang sudah menyaksikan perubahan. Sen mencontohkan negara bagian Kerala di India yang penduduknya lebih sering mengeluhkan soal morbiditas meski harapan hidup mereka lebih panjang dibanding daerah lain di India.⁴⁵

Jenis bias kognitif kedua yang memengaruhi penilaian tentang frekuensi pelanggaran HAM adalah *bias negatif*: orang lebih memperhatikan informasi negatif ketimbang informasi positif. Psikolog sosial Roy Baumeister dkk. mengemukakan ide ini dalam artikel tahun 2001, “Bad Is Stronger Than Good.” Menurut mereka, “Emosi yang buruk, orangtua yang buruk, dan umpan balik yang buruk lebih berdampak daripada yang baik. Kesan dan stereotipe buruk lebih cepat terbentuk dan lebih sulit dipatahkan daripada kesan yang baik.”⁴⁶ Baumeister menyebutkan bahwa “banyak peristiwa baik dapat mengatasi dampak psikologis dari peristiwa yang buruk,” tetapi perlu banyak berita baik untuk mengimbangi berita buruk.⁴⁷ Ekonom perilaku mengonfirmasi bias negatif ini dengan menunjukkan bahwa orang jauh lebih ingin menghindari kerugian daripada mendapatkan keuntungan; misalnya, orang jauh lebih mencemaskan kehilangan uang daripada perolehan uang.⁴⁸

Itu semua menunjukkan betapa manusia “kikir kognitif”—karena kita tidak dapat mencerna semua informasi dengan setara, kita memprioritaskan mana yang ingin kita cerna.⁴⁹ Orang lebih peduli dan lebih sering mencerna informasi yang buruk, yang pada akhirnya juga akan memperkuat ingatan.⁵⁰ Salah satu studi menemukan bahwa orang dua kali lebih mungkin mengingat peristiwa buruk daripada peristiwa baik.⁵¹ Boleh jadi ada alasan evolusi di balik heuristik ketersediaan dan bias negatif ini—manusia yang memperhatikan dan mengingat informasi tentang hal buruk, misalnya predator, lebih mungkin bertahan hidup.⁵²

Manusia juga memiliki analisis dan kosakata yang lebih rinci dan sistematis untuk menjelaskan pengalaman negatif dan emosi yang ditimbulkannya daripada pengalaman positif, yang sebabnya boleh jadi karena

kita memproses informasi positif dan negatif di bagian otak yang berbeda. Emosi positif memicu pemrosesan heuristik atas-bawah, sedangkan “emosi negatif memicu pemrosesan sistematis bawah-atas sehingga orang larut dalam analisis pengalaman yang rinci dan mendalam.”⁵³ Akibatnya, “kita lebih cenderung merenungkan peristiwa yang tidak menyenangkan—dan menggunakan kata-kata yang kuat untuk menggambarkan—ketimbang peristiwa yang menyenangkan.”⁵⁴

Kita tidak hanya lebih memperhatikan dan mengingat informasi tentang peristiwa buruk, tetapi kita juga cenderung menganggap orang yang menyampaikan hal negatif lebih pintar daripada orang yang menyampaikan pandangan positif. Karena itu, kita lebih mengutamakan kritik. Seorang peneliti menemukan bahwa, “Jika saya bilang Anda akan mengajar di depan orang-orang pintar, Anda akan lebih banyak mengatakan hal negatif.”⁵⁵ Mungkin itulah sebabnya mengapa buku-buku negatif tentang HAM yang dibahas pada bab 2 mendapatkan banyak perhatian—penuisnya tampaknya lebih pintar karena menyoroti yang negatif! Saya serius sekali menyoroti hasil riset terkait ini. Sejak dulu saya disebut “optimis” oleh para kolega; jangan-jangan itu kode untuk menyatakan saya “kurang begitu pintar.” Kadang, saya juga memperhatikan bahwa kolega saya yang lebih negatif sepertinya diuntungkan oleh semacam aura elegan dan canggih. Literatur psikologi dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Saya mengambil risiko menulis buku ini dengan harapan pembaca bersedia mengakui bias negatif dan berprasangka baik terhadap saya.

Tiga Tesis Hirschman

Bias negatif terhadap kemajuan HAM bukanlah hal baru. Dalam *The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy*, Hirschman menulis tentang reaksi sejarah terhadap tiga gelombang tuntutan hak di berbagai negara di seluruh dunia: hak sipil dasar pada abad ke-18, perluasan hak pilih laki-laki pada abad ke-19, serta kebangkitan negara kesejahteraan dan hak ekonomi pada abad ke-20.⁵⁶ Semua gelombang ini memuat perlindungan negara terhadap hak warga negara. Perlindungan internasional terhadap HAM dapat dianggap sebagai gelombang hak keempat pada pertengahan abad ke-20 dan berlanjut hingga kini.⁵⁷

Hirschman membahas tiga jenis argumen negatif yang sering muncul dalam merespons setiap gelombang hak tersebut: tesis kebalikan (*perversity thesis*), tesis kesia-siaan (*futility thesis*), dan tesis kemudaratan

(*jeopardy thesis*). Menurut tesis kebalikan, “setiap tindakan yang bertujuan memperbaiki suatu segi tatanan politik, sosial, atau ekonomi hanya akan memperburuk keadaan yang ingin diperbaiki.”⁵⁸ Misalnya, Hirschman menunjukkan bagaimana perluasan hak pilih laki-laki pada abad ke-18 dianggap dapat mengganggu kebebasan yang diperjuangkan. Kaum konservatif berpendapat bahwa pemajuan demokrasi melalui hak pilih laki-laki universal kelak akan melahirkan despotisme massa dan tirani.⁵⁹ Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa demokrasi justru memperburuk keadaan yang hendak diperbaiki. Tesis kebalikan tergambar jelas dalam debat HAM modern, khususnya klaim Jack Snyder dan Leslie Vinjamuri bahwa para pendukung keadilan legalistik telah “menimbulkan lebih banyak pelanggaran ketimbang mencegahnya.”⁶⁰ Snyder dan Vinjamuri mengatakan bahwa penuntutan pejabat negara memperburuk keadaan yang justru ingin diperbaiki—pelanggaran HAM yang tersebar luas. Ini jelas merupakan pernyataan kausal dan perlu diuji secara empiris. Studi saya mengenai efek penuntutan semacam itu serta akademisi lain yang menggunakan data penuntutan HAM kami yang baru tidak menemukan bukti atas efek kebalikan tersebut, tetapi para kritikus terus saja mengulang-ulang klaim ini.⁶¹

Tesis kesia-siaan menyatakan bahwa upaya transformasi sosial “sedikit pun tidak akan mampu mengubah” masalah yang hendak diatasi.⁶² Misalnya, para pengkritik negara kesejahteraan pada abad ke-20, seperti Milton Friedman, berpendapat bahwa banyak program untuk kaum miskin itu sia-sia, dan malah menguntungkan kelas menengah ke atas.⁶³ Tesis kesia-siaan saat ini dikemukakan oleh Eric Posner, yang menyimpulkan bahwa hukum HAM tidak berfungsi sama sekali: “kita mesti menerima fakta tersebut dan melangkah maju.”⁶⁴ Argumen kesia-siaan lainnya dikemukakan oleh Samuel Moyn yang menyatakan bahwa HAM “merupakan pendamping fundamentalisme pasar yang tak berguna” karena “tidak membahas sama sekali soal ketimpangan.”⁶⁵

Tesis kemudaratan “menyatakan bahwa ongkos perubahan atau reformasi yang diusulkan itu terlalu tinggi karena membahayakan capaian sebelumnya yang berharga.”⁶⁶ Pada abad ke-19, misalnya, perluasan hak pilih laki-laki dianggap berdampak fatal terhadap “kebebasan lama” di Inggris, khususnya hak untuk memiliki dan menghimpun kekayaan.⁶⁷ Stephen Krasner dan Jack Goldsmith juga menggunakan argumen kemudaratan ini ketika mengatakan bahwa “desakan penuntutan pidana dapat memperlarut ... konflik, mengakibatkan kematian, kerusakan, dan

penderitaan yang lebih parah.”⁶⁸ Dalam kaitannya dengan HAM, perdamaian sering dianggap sebagai “capaian sebelumnya yang berharga” yang menurut para pengkritik itu dapat terancam dengan adanya pengadilan. Tetapi tesis kemudharatan dari Krasner dan Goldsmith agak dimodifikasi karena dalam banyak kasus perdamaian belum tercapai. Karena perdamaian tak kunjung tercapai di negara-negara yang mereka pelajari, Krasner dan Goldsmith tidak menyatakan bahwa pengadilan membahayakan “capaian sebelumnya yang berharga,” melainkan capaian yang dicita-citakan di masa mendatang.

Hirschman juga maklum bahwa para pendorong perubahan sendiri kadang mengundang kritik dengan mengumbar janji, yang akhirnya memunculkan tuduhan gagal total. Dia melihat bahwa reaksi semacam itu tidak hanya muncul dari kalangan konservatif, tetapi juga dari para penulis reformis radikal yang kritiknya muncul dari harapan akan perubahan yang lebih mendasar.⁶⁹ Dalam hal ini, argumen Hirschman dalam *The Rhetoric of Reaction* mengingatkan pada karyanya sebelumnya tentang Amerika Latin, seperti *Journeys Toward Progress*, yang mengulas berbagai respons terhadap kebijakan pembangunan, seperti reformasi pertanian. Dalam karyanya ini, Hirschman menemukan bahwa analisis kebijakan di Amerika Latin pada saat itu sarat dengan apa yang disebut “fracasomania,” atau “kompleks kegagalan.”⁷⁰ Banyak pendorong perubahan (*reformonger*) terjebak pada perbandingan dengan yang ideal. Mereka bersikeras bahwa upaya pembangunan di Amerika Latin sudah gagal total karena hasilnya tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka yang tinggi, yaitu pertumbuhan yang merata. Namun bagi Hirschman, menaruh perhatian pada krisis saja tidak cukup; kita juga perlu memikirkan kemungkinan menghindarinya.⁷¹ Baginya, “perubahan sosial penuh dengan peluang dan pilihan.”⁷²

Hirschman sering mencurigai motivasi para penulis yang hanya menyoroti efek negatif ini. Dia curiga bahwa hal itu membuat mereka merasa superior dan mereka “menyukainya”. “Sekali lagi, sekelompok analis sosial gemar sekali mencemooh mereka yang bercita-cita mengubah dunia menjadi lebih baik,” tuturnya. Hirschman sudah lebih dulu beberapa dekade memperkirakan—dan mengungkapkannya dengan lebih elegan—keterangan dalam literatur psikologi bahwa orang yang menyampaikan informasi negatif dianggap lebih cerdas dibanding mereka yang berbicara soal perubahan positif. Efek kebalikan, menurutnya, “memuat kecanggihan elementer dan paradoks tertentu” yang memikat

para pencari “wawasan instan”. Ketiga efek ini—kebalikan, kesia-siaan, dan kemudharatan—berpadu memproyeksikan “suatu kesan bijak dan jenaka yang kontras dengan kesan serius dan kaku dari mereka yang meyakini adanya kemajuan.”⁷³ Intuisi Hirschman boleh jadi juga relevan dengan para teoretikus kebalikan dan kemudharatan modern. Ketika saya bertanya kepada Patrick Ball, salah satu pakar terkemuka dunia dalam pengukuran pelanggaran HAM, soal literatur yang pesimis belakangan ini, jawabannya hampir sama dengan Hirschman—menurutnya, orang suka mengecilkan para pelaku kebaikan (*do-gooder*).⁷⁴ Aktivis HAM adalah pelaku kebaikan dan memang kadang suka merasa benar sendiri dan jarang bercanda.

Tesis kebalikan maupun kemudharatan memuat konsekuensi yang tak dikehendaki, yang cukup menarik perhatian Hirschman karena konsepnya memasukkan “ketidakpastian dan keserbamungkinan ke dalam pemikiran sosial.”⁷⁵ Hirschman mengklarifikasi bahwa “ini bukan berarti bahwa aksi sosial yang bertujuan pasti tidak akan memiliki efek kebalikan,” tetapi dia tak habis pikir mengapa konsekuensi yang tak dikehendaki itu harus selalu berkebalikan atau negatif.⁷⁶ Saya sepakat dengan Hirschman bahwa kita perlu memperhatikan konsekuensi negatif yang tak dikehendaki. Malah, saya pikir paradoks informasi itu persis adalah contoh dari konsekuensi negatif yang tak dikehendaki di ranah HAM, dengan konsekuensi yang amat penting bagi bidang ini.

Di bab akhir *The Rhetoric of Reaction*, Hirschman mewanti-wanti agar kita tidak terjerumus pada argumen progresif yang merupakan bayangan pantulan dari ketiga tesis tersebut. Misalnya, kaum progresif mengajukan argumen yang tampak naif (“semua hal baik berjalan beriringan”) atau lawan dari tesis kebalikan (gagal bertindak akan berdampak buruk).⁷⁷ Peringatan ini terutama relevan bagi para aktivis dan peneliti HAM yang kadang tergoda untuk mengajukan klaim semacam itu.

Fenomena psikologis lain yang dapat memengaruhi evaluasi kemajuan HAM di kalangan aktivis adalah trauma langsung dan trauma tidak langsung (*vicarious traumatization* – akibat menonton, mendengar atau membaca aktivitas orang lain, bukan diri sendiri) yang dialami pekerja HAM. Kita tahu bahwa banyak korban pelanggaran HAM mengalami trauma mendalam dan trauma ini dapat mewujudkan dalam semacam “perasaan bersalah sebagai penyintas” (*survivor’s guilt*), dengan mempertanyakan mengapa mereka selamat sedangkan yang lain meninggal. Penyintas merasa bahwa mereka tak boleh berhenti sebelum melakukan

segala yang mereka bisa untuk mengenang korban yang meninggal dan menghentikan pelanggaran yang berlangsung. Pada saat yang sama, penyintas pun merasa tertekan dan putus asa. Mereka yang mendampingi korban pelanggaran HAM juga dapat mengalami trauma secara tidak langsung dan didera gejala serupa. Mereka disebut penyintas trauma sekunder. Penulis yang melakukan survei terhadap 346 pekerja HAM yang disebutkan sebelumnya menemukan bahwa paparan trauma semacam itu berdampak negatif terhadap kesehatan para responden.⁷⁸ Dampak ini diperburuk ketika responden juga memiliki penilaian diri yang negatif terhadap efektivitas kerja-kerja mereka. Untuk mengukur penilaian diri responden, peneliti menyusun serangkaian pernyataan positif dan negatif tentang bekerja di bidang HAM, misalnya item seperti “Saya mampu menciptakan perubahan positif melalui pekerjaan saya,” “Saya merasa terinspirasi oleh pekerjaan saya,” dan “Saya merasa bahwa pekerjaan saya tidak ada gunanya.”⁷⁹ Orang yang jawaban-jawabannya menunjukkan penilaian diri negatif terhadap efektivitasnya rentan mengalami sindrom PTSD yang lebih parah. Pekerja HAM perlu memiliki ketangguhan, “kualitas tak terperiikan yang membuat orang mampu bangkit menjadi lebih kuat dari cobaan berat.” Psikolog telah mengidentifikasi beberapa faktor yang membuat seseorang tangguh, di antaranya adalah sikap positif, optimisme, dan kemampuan untuk belajar dari kegagalan.⁸⁰ Harapan serta kemampuan melihat kegagalan sebagai pelajaran dapat menjadikan pekerja HAM lebih tangguh dan terhindar dari trauma.

Bias kognitif dan efek psikologis yang dibahas di sini mempersulit persepsi akan kemajuan HAM. Hal ini menjadi lebih sulit lagi dengan adanya bias pemberitaan. Apa yang kita saksikan di berita lebih tersedia bagi kita ketimbang apa yang tidak kita saksikan di berita. Jika berita itu terlihat atau terdengar dramatis, kita cenderung lebih mengingatnya. Selain itu, berita juga memiliki bias negatifnya sendiri—dalam ungkapan klasik redaktur berita, “*if it bleeds, it leads*” (kalau berdarah-darah, pasti jadi berita utama).⁸¹ Entah itu berita dari surat kabar, TV, atau media daring, isinya kemungkinan besar adalah peristiwa negatif dan dramatis seperti kekerasan, bukan peristiwa biasa di keseharian.⁸² Gabungan berbagai bias kognitif dan bias berita ini membentuk persepsi bahwa pelanggaran HAM di dunia jauh lebih marak dibanding sebelumnya.⁸³

Yang negatif bukan hanya berita, tetapi juga laporan-laporan organisasi HAM. Stephen Northfield, Direktur Digital Human Rights Watch dan mantan jurnalis berpengalaman, prihatin dengan pesan negatif dari

organisasi-organisasi HAM: “Gempuran hal negatif datang bertubi-tubi tiada habisnya. Audiens Anda pun mulai dibuat mati rasa oleh rentetan berita buruk. Hal ini menciptakan perulangan umpan balik negatif. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita atasi sebagai proses.” Northfield kemudian menjelaskan beberapa alternatif cara menyampaikan pesan yang membesarkan harapan:

Kita tak dapat menunggu hingga sampai di Nirwana, tetapi ada sepuluh langkah untuk menuju ke sana. Kita bergerak menuju sasaran. Jika audiens Anda dapat dilatih untuk memahami, Anda dapat memutus kesan monopoli negativitas ini. Lihat hak kaum gay, misalnya, banyak kemajuan yang dicapai dalam lima tahun terakhir. Tapi begitu kita mengalami kemajuan, kita lekas melupakannya. Sudah melekat erat dalam DNA kelompok HAM untuk memusatkan diri pada masalah. Tetapi ada bahaya internal dan eksternal jika tidak mampu mengukur kemajuan. Hal ini melemahkan orang-orang yang bekerja di bidang HAM.⁸⁴

Berubahnya Standar Akuntabilitas

Terakhir, pengukuran kemajuan HAM dipengaruhi oleh perubahan standar akuntabilitas yang terjadi ketika aktivis dan pegiat HAM memperluas cakupan pelanggaran HAM.⁸⁵ Hukum HAM internasional itu komprehensif dan belum rampung. Sejak DUHAM disahkan pada 1948, telah banyak upaya untuk menetapkan norma dan hukum HAM yang juga memperluas pemahaman kita akan hukum yang ada. Kekuatan gerakan HAM ada pada benih perkembangan yang terkandung di dalamnya.⁸⁶

DUHAM, misalnya, tidak menyebutkan soal hak kaum minoritas seksual atau penyandang disabilitas, tetapi para aktivis saat ini telah memperluas pemahaman kita tentang hak dan menyusun konvensi baru untuk memasukkan isu-isu ini. Ini merupakan salah satu kekuatan HAM sebagai kosakata moral dan proses hukum. Sewaktu saya masih mahasiswa dan mulai bekerja di bidang HAM sekitar 30 tahun yang lalu, tidak terpikir bahwa tidak adanya jalur ramah disabilitas itu merupakan pelanggaran HAM. Saat ini saya sepenuhnya percaya bahwa untuk dapat menikmati haknya atas kesehatan dan pendidikan, atau hak suara, misalnya, penyandang disabilitas dan lansia harus dapat memasuki klinik, sekolah, dan tempat pemungutan suara. Saat menemani ayah saya, yang awam soal hukum dan harus menggunakan kursi roda, saya sangat terbantu oleh gerakan hak-hak disabilitas yang berkat kontribusi mereka, ayah saya dapat

hidup dengan bermartabat. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) menunjukkan bagaimana gerakan HAM terus meningkatkan standar dalam mengukur HAM. Hal itu baik untuk HAM, tetapi jika para aktivis dan akademisi tidak memahami implikasi praktik ini saat mengukur kemajuan dan efektivitas, akan muncul pesimisme yang tidak semestinya.

Terus berkembangnya standar dan cakupan pelanggaran HAM dapat memunculkan masalah dalam pengukuran HAM dan turut memunculkan persepsi bahwa praktik HAM telah memburuk. Ketika standarnya meningkat, muncul kesan bahwa kesenjangan implementasinya menjadi lebih lebar.

Standar akuntabilitas juga berubah ketika definisi yang mencakup pelanggaran hak juga berubah. Dulu, kita menggunakan istilah eksekusi di luar pengadilan (*extrajudicial execution*) untuk menyebut pembunuhan lawan politik oleh pemerintah, tetapi kini istilah itu kita gunakan untuk menyebut pembunuhan sewenang-wenang oleh polisi. Mahkamah Eropa untuk HAM (European Court of Human Rights), misalnya, dari waktu ke waktu mengubah definisinya mengenai penyiksaan.⁸⁷ Makin banyaknya informasi dan makin tingginya standar itu bagus bagi para korban HAM, tetapi tidak bagus bagi pengukuran dan kumpulan data, yang berusaha membandingkan statistik kinerja HAM dari waktu ke waktu. Bagian berikutnya akan menggambarkan bagaimana hal ini terjadi menggunakan contoh dari Brasil dan Guatemala.

Peneliti Kuantitatif dan Efek Informasi

Paradoks informasi memiliki dua bentuk utama. Yang pertama berbentuk langsung: khalayak umum, akademisi, atau pengambil kebijakan yang membaca laporan dan berita memiliki kesan bahwa kekerasan dan segala jenis pelanggaran HAM di dunia mengalami peningkatan. Kesan umum ini dipengaruhi oleh heuristik ketersediaan, bias negatif, dan bias pemberitaan.

Bentuk paradoks informasi yang kedua lebih tersembunyi dan terkait dengan soal teknis, yaitu bagaimana informasi HAM dikodekan ke dalam ukuran kuantitatif dan digunakan oleh akademisi untuk mengukur efektivitas hukum, kebijakan, dan aktivisme HAM. Bahaya bentuk paradoks informasi yang kedua ini sangat akut bagi para akademisi yang melakukan analisis kuantitatif, dengan hanya mengandalkan satu atau

dua ukuran represi. Data semacam itu tidak serta-merta salah atau terdistorsi, tetapi dapat menyesatkan karena pengetahuan kita yang meningkat tentang pelanggaran HAM. Contoh Brasil dan Guatemala menjelaskan bagaimana penambahan informasi dan peningkatan standar memengaruhi evaluasi kuantitatif.

BRASIL

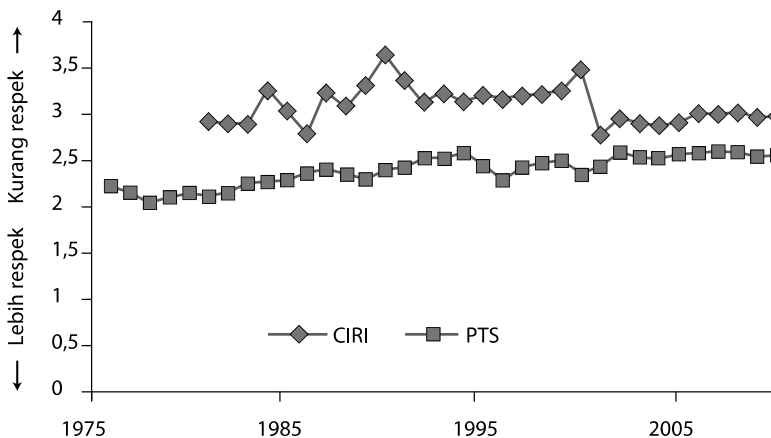
Brasil dipimpin oleh rezim militer dari 1964 hingga 1985, dan mengalami periode paling represif antara 1968 hingga 1974; hampir 2.000 orang kemudian bersaksi di pengadilan militer bahwa mereka menjadi korban penyiksaan pada periode ini.⁸⁸ Secara kasar, pertengahan 1960-an hingga 1970 dapat digolongkan sebagai periode otoritarian, tahun 1980-an sebagai periode transisi menuju demokrasi, dan tahun 1990-an dan 2000-an sebagai periode demokrasi. Antara 1995 hingga 2016, Brasil dipimpin oleh pemerintahan demokratis dari kubu tengah dan kiri.

Brasil tampaknya bakal menjadi contoh perubahan yang dicita-citakan oleh gerakan HAM. Rakyat Brasil memilih mantan tokoh oposisi sebagai presiden dan pemerintahannya menjalankan kebijakan inklusi politik dan ekonomi secara bertahap. Kebanyakan pakar tentang Brasil tahu bahwa masalah HAM serius masih berlanjut setelah transisi demokrasi, tetapi hampir semua orang akan menganggap bahwa praktik HAM lebih baik pada periode demokrasi dibanding pada masa rezim militer. Meskipun demikian, ukuran kuantitatif utama untuk represi—Skala Teror Politik (Political Terror Scale, PTS) dan Indeks Hak Integritas Tubuh Cingranelli dan Richards (CIRI Physical Integrity Rights Index)—menunjukkan bahwa penyiksaan, eksekusi, penahanan, dan penghilangan pada pengujung pemerintahan militer lebih sedikit dibandingkan pada periode demokrasi saat ini. Bagaimana kita menjelaskan teka-teki ini?

Untuk membaca datanya dengan benar, kita perlu memahami proses pembuatan pengukuran ini. Pertama, yang hendak didokumentasikan oleh pengukuran kuantitatif represi adalah bahaya tersembunyi, karena pemerintah berupaya menutupi informasi pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Di bawah kepemimpinan diktator militer, misalnya, pemerintah Brasil menutupi praktik penyiksaan, penghilangan, dan eksekusi mati terhadap lawan politiknya. Hal ini membuat para analis mengandalkan laporan dari organisasi nonpemerintah, organisasi internasional, dan bahkan negara lain untuk mengetahui praktik HAM. Bukti menunjukkan bahwa laporan-laporan pemantau luar, betapa pun tidak

sempurna, lebih mampu mengungkap situasi represi ketimbang laporan pemerintah sendiri.⁸⁹

Dua sumber yang paling sering digunakan akademisi untuk mengukur represi negara adalah laporan tahunan Amnesty International dan laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang praktik HAM, yang sudah terbit secara berkala selama beberapa dekade. Laporan tahunan gabungan yang dibuat AI dan Deplu AS merangkum praktik HAM di sebagian besar negara di dunia. Kita beruntung memiliki dua seri data tersebut, satu oleh pemerintah dan satu oleh organisasi pemerintah terkemuka, meski tentu masih ada bias: Departemen Luar Negeri AS punya tujuan politik yang dapat memengaruhi pelaporan HAM, meski laporannya semakin akurat seiring waktu, dan Amnesty International berkomitmen pada etos HAM yang dapat membuatnya sulit membicarakan “kemajuan” dalam konteks pelanggaran HAM serius yang tengah berlangsung.



Gambar 5.11. Rata-rata skor HAM berbasis-standar di dunia. *Catatan:* Skala Integritas Tubuh CIRI adalah 0–8 dan skala PTS adalah 0–5. Garis PTS di sini menunjukkan rata-rata gabungan skor PTS yang diolah dari laporan Amnesty dan Departemen Luar Negeri AS. Data untuk bagan ini dapat dilihat di CIRI Human Rights Data Project (<http://www.humanrightsdata.com>) dan database Political Terror Scale (PTS) (<http://www.politicalterror scale.org>).

Peneliti menggunakan sumber-sumber tersebut untuk membuat “deret waktu” praktik HAM, guna membandingkan perubahan dari waktu ke waktu, atau dalam hal ini dari 1980 sampai sekarang. Proyek data PTS dan CIRI menggunakan laporan-laporan ini untuk membuat skala pelanggaran atas hak integritas tubuh. Kedua skala ini merupakan ukuran

komposit dari empat pelanggaran HAM: penyiksaan, pembunuhan tanpa proses hukum, penghilangan, dan penahanan politik. Skala ini disebut ukuran berbasis-standar karena pemberian skor HAM kepada setiap negara di dunia didasarkan pada kriteria subjektif yang diterapkan pada dokumen sumber utama. Dengan kata lain, asisten peneliti yang bertugas melakukan pengodean membaca uraian tentang Brasil dalam laporan Amnesty International atau Departemen Luar Negeri AS setiap tahun dan menetapkan angka dalam skala yang dibuat proyek tersebut. PTS menggunakan skala numerik satu sampai lima. Lima berarti paling buruk, dan satu berarti paling baik. Indeks Integritas Fisik CIRI menggunakan skala delapan poin yang agak lebih kompleks, dengan serangkaian petunjuk pengodean yang ketat, namun kadang problematis. Ukuran CIRI untuk pembunuhan tanpa proses hukum, misalnya, dirancang sedemikian rupa sehingga indeks ini tidak dapat mengukur perbaikan apa pun hingga jumlah pelanggarannya turun hingga di bawah 50. Jadi, jika jumlah pembunuhan tanpa proses hukum di suatu negara dalam setahun adalah 200, dan jumlah pada tahun berikutnya adalah 80, negara tersebut tidak akan mencatatkan perbaikan. Skor-skor tersebut terhimpun dalam basis data praktik HAM utama yang tersedia secara online bagi para peneliti.

Ketika dibuat bagan dari waktu ke waktu, kumpulan data populer ini cenderung menunjukkan tingkat represi yang tidak berubah di tingkat global. Gambar 5.11 menunjukkan bahwa, meski terdapat fluktuasi kecil, rata-rata skor global PTS dan CIRI umumnya tetap datar dari akhir 1970-an hingga 2010. Berdasarkan hal tersebut, banyak akademisi menilai bahwa gerakan HAM telah gagal.⁹⁰

Setelah database diterbitkan, peneliti kuantitatif memasukkannya ke dalam model guna menjawab beberapa pertanyaan penting: Apa dampak hukum HAM? Apakah penuntutan HAM meningkatkan HAM? Apakah kelompok advokasi transnasional dapat menciptakan perubahan positif? Peneliti kemudian menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesisnya. Barangkali yang terpenting, dengan menggunakan analisis kuantitatif, para peneliti ini dapat mengontrol faktor lain yang memengaruhi praktik HAM, seperti kemiskinan, demokrasi, dan perang saudara. Para akademisi tidak hanya memeriksa dampak hukum atau aktivisme HAM; mereka juga menganalisis faktor-faktornya secara independen, seperti ketimpangan pendapatan, yang dapat berkontribusi terhadap pelanggaran HAM.⁹¹ Contohnya, ketimpangan ekonomi di Brasil masih signifikan meski sudah ada pemerintahan demokratis dan aktivisme HAM.

Ketimpangan inilah yang mungkin menjelaskan mengapa catatan HAM Brasil tidak tampak mengalami kemajuan. Dengan penelitian kuantitatif, kita dapat menjawab pertanyaan penting seperti ini dengan cara yang cangguh; tetapi, pada akhirnya, seberapa baik model dan kesimpulannya tergantung pada seberapa baik datanya.

Masalah utama pada datanya adalah bahwa informasi HAM jauh lebih banyak dihasilkan saat ini dibandingkan sebelumnya. Saat ini, ketika laporan-laporan itu ditulis, ada ratusan kelompok HAM di Brasil yang bekerja dalam situasi yang relatif aman; mereka dapat mendokumentasikan dan menerbitkan laporan yang jauh lebih luas dari sebelumnya.⁹² Petugas HAM di kedutaan AS rutin berkomunikasi dengan kelompok HAM di dalam dan di luar negeri. Bandingkan sewaktu Amnesty International dan Departemen Luar Negeri AS mulai melaporkan HAM di Brasil pada akhir 1970-an. Karena sumber informasi HAM terbatas, mereka mengandalkan sejumlah kecil sumber di Brasil dan hanya berkomunikasi dengan segelintir organisasi HAM lain. Karena itu, tahun-tahun awal pengukuran CIRI dan PTS kurang reliabel karena beberapa faktor—laporannya paling pendek pada masa itu, baru ada sedikit NGO HAM yang menghasilkan informasi yang bagus, dan bias politik dalam laporan Departemen Luar Negeri AS masih sangat kuat.⁹³

Barangkali karena problem data inilah, situasi HAM di Brasil menurut CIRI dan PTS satu poin penuh lebih baik pada masa otoritarian dan masa transisi dibandingkan pada tahun-tahun demokrasi belakangan. Rata-rata skor PTS Brasil selama tiga dekade otoritarian dan masa transisi 1970-an hingga 1980-an adalah tiga, sedangkan skor selama periode demokrasi dari 1990-an hingga 2013 adalah empat.⁹⁴ Rata-rata skor integritas tubuh CIRI untuk Brasil pada periode pemerintahan militer (1981–1985) juga hampir satu poin lebih baik dibandingkan rata-rata skor pada periode demokrasi tahun 1990-an dan 2000-an. Karena CIRI merinci lebih lanjut skornya berdasarkan jenis pelanggaran tertentu, kita dapat melihat lebih detail jenis pelanggaran yang menyumbang skornya. Meski pemerintahan demokratis Brasil jarang melakukan penghilangan atau penahanan politik, data menunjukkan bahwa mereka lebih banyak melakukan penyiksaan dan pembunuhan tanpa proses hukum ketimbang pemerintahan diktator. Ini berbeda dengan laporan kematian dan orang hilang yang lain pada periode yang sama.⁹⁵ Mengapa CIRI dan PTS mencatat lebih banyak pembunuhan dan penyiksaan di bawah demokrasi? Perbedaannya terletak pada perubahan standar akuntabilitas. Sebelumnya, laporan

Amnesty International dan Departemen Luar Negeri AS (juga laporan pemerintah Brasil yang disebutkan di atas) hanya mendokumentasikan pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan *pemerintah* terhadap *lawan politik*. Mulai 1985, organisasi HAM dan pemerintah AS memperluas sorotannya dari yang sebelumnya hanya terbatas pada tanggung jawab langsung pemerintah atas pembunuhan, penghilangan, penyiksaan, dan penahanan lawan politik, menjadi mencakup banyak hak lain, seperti hak untuk terbebas dari kebrutalan polisi dan pengerahan kekuatan yang berlebihan, serta kewajiban negara untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum tindak kekerasan yang dilakukan aktor non-negara.

Dalam laporan pertamanya tentang Brasil, Amnesty International maupun Departemen Luar Negeri AS fokus pada pelanggaran HAM berat, khususnya penahanan politik, penyiksaan, dan eksekusi mati yang dilakukan langsung oleh pejabat negara. Laporan-laporan awal Deplu AS tentang Brasil relatif pendek dan umumnya positif, memuji pemerintah atas perbaikan dalam kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan negara pada awal 1980-an. Tetapi, sejak 1987, semasa transisi menuju demokrasi, AI maupun Deplu AS mulai agak keras. Amnesty dapat melakukan studi lapangan di Brasil secara langsung dan menghasilkan laporan khusus tentang pembunuhan di pedesaan. AI mengklarifikasi bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh “pembunuh bayaran yang disewa oleh penguasa lahan setempat,” tetapi juga menyayangkan karena “tidak ada investigasi yang menyeluruh dan imparial atas pembunuhan-pembunuhan tersebut yang dapat mengindikasikan pembiaran dan bahkan keterlibatan dalam kejahatan.”⁹⁶ Investigasi AI yang kedua menyoroti penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan di kantor polisi dan lapas di berbagai wilayah di Brasil, termasuk pembunuhan tersangka. Hal ini merupakan pendekatan baru bagi organisasi HAM pada saat itu karena menyoroti perlakuan terhadap tersangka kriminal dan bukan tahanan politik, yang perlingkungannya merupakan misi utama AI sebelumnya.

Dari sudut pandang HAM, perubahan standar akuntabilitas ini merupakan perkembangan positif. Dari sudut pandang data dan pengukuran, hal ini memunculkan masalah. Bertambahnya mandat AI serta meningkatnya kemampuan mereka dalam menjalankan investigasi lapangan turut memperbanyak dokumentasi pelanggaran HAM yang dapat memunculkan kesan bahwa situasi di Brasil memburuk pasca-demokratisasi. Tetapi, situasinya mungkin saja sama atau bahkan lebih baik;

situasinya terkesan lebih buruk karena cakupan pelanggaran HAM kini lebih luas dan kapasitas pelaporan dalam negeri juga meningkat. Perhatian yang lebih menyeluruh terhadap berbagai macam korban yang lebih luas ini menghasilkan skor PTS dan CIRI yang lebih buruk karena kedua pengukuran tersebut kini menghitung penyiksaan dan pembunuhan tanpa proses hukum, baik itu terhadap lawan politik maupun tersangka kriminal. Perubahan serupa juga dilakukan terhadap laporan Deplu AS, yang, dengan mengandalkan sebagian informasi dari NGO, memperluas sorotannya terhadap pelanggaran hak di Brasil dengan mencakup juga perlakuan terhadap petani dan masyarakat adat dalam sengketa lahan, serta tersangka kriminal.

Kita belum tahu apakah kasus pembunuhan dan perlakuan buruk yang dilakukan kepolisian Brasil memang lebih banyak dibanding tahun 1970-an dan 1980-an. Pada dekade-dekade lalu, organisasi HAM tidak mengumpulkan data kekerasan di pedesaan ataupun menginvestigasi penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap tersangka kriminal. Baru belakangan ini saja organisasi di Brasil menyoroti kekerasan polisi. Misalnya, Observatório das Violências Policiais-SP (Pemantau Kekerasan Polisi di São Paulo) menggunakan sumber berita untuk menyusun laporan bulanan tentang seluruh korban kekerasan polisi. Observatório menyatakan bahwa seluruh kematian tersebut merupakan “eksekusi tanpa proses hukum” (*extrajudicial executions*) dan menunjukkan penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh kepolisian Brasil.⁹⁷ Sebagian besar pembunuhan tersebut terjadi di kawasan miskin dan marginal di *favela* (perkampungan di sekitar) São Paulo. Upaya semacam ini menarik perhatian pada kekerasan terhadap kelompok yang sebelumnya bukan merupakan fokus awal gerakan HAM. Tetapi, dari sudut pandang pengukuran efektivitas, perluasan standar akuntabilitas semacam ini dapat memunculkan gambaran yang lebih pesimis daripada yang seharusnya. Kekerasan polisi di *favela* Brasil, misalnya, adalah contoh pertama yang digunakan Eric Posner dalam paragraf pembuka bukunya *The Twilight of Human Rights Law* untuk menggambarkan argumennya bahwa HAM tidak lebih dihargai saat ini dibanding sebelumnya, tanpa sadar bahwa isu yang dipilihnya itu jelas menggambarkan bagaimana paradoks informasi dan perubahan standar akuntabilitas memengaruhi data HAM.⁹⁸

GUATEMALA

Melihat kemajuan HAM di Guatemala juga boleh jadi sama sulitnya. Setelah Guatemala mengalami transisi menuju demokrasi pada 1990-an, dua komisi kebenaran, satu disponsori PBB dan satunya lagi oleh Gereja Katolik Guatemala, mengumpulkan kesaksian tentang represi di masa kediktatoran.⁹⁹ Dengan informasi dari dua komisi tersebut, PBB, dengan bantuan Patrick Ball, memperoleh estimasi jumlah korban tewas dan hilang di Guatemala yang lebih tepat daripada yang muncul dalam laporan AI atau Departemen Luar Negeri AS. Estimasi ini memungkinkan perbandingan data berbasis peristiwa dari tahun ke tahun (dalam hal ini, jumlah pembunuhan dan penghilangan aktual) dengan data berbasis standar yang dihasilkan oleh skala CIRI dan PTS. Meski represi terbilang parah di sepanjang periode ini, terjadi lonjakan tajam dalam kasus pembunuhan dan penghilangan dari 1980-1982 (semasa pemerintahan Ríos Montt), dan 1982 adalah tahun terburuk. Tercatat ada 25.928 kasus kematian dan penghilangan yang teridentifikasi maupun tak teridentifikasi di Guatemala antara 1980-1983, sekitar 79 persen dari semua kematian dan penghilangan yang terjadi antara 1970 dan 1995. Angka ini, meskipun besar, kemungkinan adalah kurang hitung; tak pelak lagi, beberapa pelanggaran tak dilaporkan ke komisi.

Amnesty International dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak dapat memperoleh gambaran akurat tentang represi yang terjadi, meski kedua lembaga tersebut melaporkan di waktu yang hampir bersamaan dengan kejadian. Skor yang didasarkan pada laporan AI menggambarkan tren aktual represi, memberikan skor terburuk untuk periode genosida antara 1980-1982, tetapi laporan Departemen Luar Negeri AS, karena bias politik semasa pemerintahan Reagan, tidak mencatatkan genosida sebagaimana yang terjadi. Meski begitu, skala yang didasarkan pada laporan AI dan Departemen Luar Negeri AS itu “lengket” dan tidak dapat mencatat dengan mudah penurunan kasus pembunuhan dan penghilangan pada masa setelahnya. Represi di Guatemala pada periode 1980-1982 juga parah karena pemerintah memberangus atau membungkam organisasi HAM, sehingga menghilangkan sumber informasi penting seputar represi.

Pada pertengahan 1980-an, organisasi HAM di dalam negeri mulai kembali beroperasi di Guatemala, meski mereka masih menghadapi represi yang dahsyat. Proses re-demokratisasi di Guatemala setelah 1985 turut mendukung terbentuknya lingkungan yang lebih kaya informasi.

Organisasi HAM belakangan makin baik dalam mendokumentasikan represi yang berlangsung dan dokumentasi yang makin baik itu tergambar dalam pengukuran berbasis standar. Jika melihat jumlah aktual korban tewas dan hilang, angkanya menurun dari 17.000 korban pada 1982 menjadi 350 pada 1993. Tetapi, jika melihat skor CIRI dan PTS, tak tampak ada perbaikan. Aktivis HAM mungkin akan bilang bahwa, selama masih ada 350 korban tewas dan hilang, kita tak boleh bicara soal perbaikan. Tetapi ilmuwan sosial akan bilang bahwa penurunan dari 17.000 korban tewas dan hilang menjadi 350 itu termasuk perbaikan. Ketidakmampuan skala CIRI dan PTS menggambarkan perubahan tersebut memperumit kegunaannya untuk riset ilmu sosial.

Penggunaan ukuran berbasis standar ini memengaruhi studi kuantitatif tentang efektivitas HAM, termasuk oleh para akademisi yang menguasai metode mutakhir dan mencari temuan terobosan. Sebut saja, misalnya, artikel sebelumnya yang menyatakan bahwa ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention against Torture, CAT) beriringan dengan meningkatnya penggunaan penyiksaan. Yang lebih masuk akal, ketika suatu negara meratifikasi CAT, mandat Konvensi tersebut memungkinkan komunitas internasional untuk memantau negara tersebut lebih jauh guna memastikan apakah kewajiban yang baru diterima di bawah hukum HAM itu dipenuhi. Meningkatnya pemantauan terhadap kasus penyiksaan ini kemudian meningkatkan kesadaran tentang penyiksaan, bukan meningkatkan kasus penyiksaannya itu sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa saya bukannya skeptis terhadap data atau menolak data kuantitatif karena kurang bernuansa dibandingkan studi kasus. Saya pernah menggunakan CIRI dan PTS dalam studi saya dan menghargainya sebagai sumber data. Namun, saya percaya bahwa akademisi dan aktivis mesti sadar bagaimana dan mengapa data HAM dapat bias dan, karenanya, mesti hati-hati dalam menggunakannya. Para akademisi mesti menjadi pengguna data yang lebih melek dan praktisi HAM mesti sadar bahwa meningkatnya kemampuan mereka dalam politik informasi dapat digunakan untuk mengeklaim bahwa mereka tak punya dampak positif. Yang terpenting, data tidak boleh dianggap sebagai ukuran objektif HAM; harus sangat hati-hati ketika data digunakan untuk menunjang klaim bahwa situasi HAM tak kunjung membaik. Seperti yang diingatkan kolega saya Malcolm Sparrow, yang perlu diingat dari bahaya tersembunyi adalah banyak ukuran yang kita rancang untuk menyingkapnya bukanlah ukuran masalah yang sebenarnya, melainkan “ukuran

komposit yang menggabungkan sejumlah informasi tentang cakupan masalah dengan proporsi insiden yang dilaporkan.”¹⁰⁰ Namun, meski ada masalah dalam pengukuran, kita mesti terus mengukur dan mengembangkan pengukuran yang berbeda dan kreatif.

Setelah artikel saya dengan Ann Marie Clark terbit, Chris Fariss, ahli metode berbakat, menulis artikel canggih dan menarik yang mengajukan argumen terkait dan memberikan solusi pemodelan. Fariss menunjukkan bahwa teknik baru yang disebut pemodelan variabel laten (*latent variable modeling*) dapat digunakan untuk menggabungkan pengukuran berbasis standar, seperti CIRI dan PTS, dengan data peristiwa, yang mencakup daftar peristiwa aktual yang terkait dengan HAM, untuk mengoreksi perubahan standar akuntabilitas. Menggunakan model baru ini, Fariss kemudian menunjukkan bahwa ratifikasi CAT berkaitan dengan peningkatan dalam HAM, bukan penurunan.¹⁰¹

Tidak semua data HAM terkena efek informasi. Data berbasis peristiwa tidak terlalu rentan dibandingkan pengukuran berbasis standar seperti CIRI dan PTS, misalnya.¹⁰² Sebagaimana ditunjukkan pada awal bab ini, sejumlah isu HAM, seperti hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan, dapat diukur dengan lebih lugas—angka melek huruf, persentase anak usia sekolah di sekolah dasar, persentase anak yang menerima imunisasi, angka kematian bayi dan anak, dsb. Data berbasis peristiwa yang sudah lama dikumpulkan (seperti angka melek huruf dan kematian bayi) akan lebih reliabel untuk melihat tren ketimbang data yang baru dikumpulkan belakangan dan yang definisinya mengalami perluasan, seperti data tentang kekerasan terhadap perempuan dan pemerkosaan. Begitu juga, data tentang praktik ilegal yang disembunyikan pemerintah atau perorangan akan lebih sulit diperoleh dan lebih cenderung menampilkan efek informasi ketimbang data tentang isu yang lebih teknis seperti kematian bayi, atau praktik yang lebih kentara dan terpusat, seperti penggunaan hukuman mati.¹⁰³

Akademisi seperti Patrick Ball telah mengabdikan kariernya untuk mengembangkan data yang lebih baik dan mewanti-wanti para akademisi dan aktivis tentang data yang buruk.¹⁰⁴ Adanya data lebih baik ketimbang tak ada data, tapi tidak semua sumber data setara. Aktivis dan peneliti perlu mengembangkan pemahaman yang lebih bernuansa terhadap informasi HAM agar dapat mengukur perubahan dengan lebih akurat.

Kesimpulan

Meski paradoks informasi mungkin tampak seperti soal teknis, tapi bobotnya dalam perdebatan ini sangat besar. Memahami apakah dan di mana aktivisme dan hukum HAM berpengaruh itu tugas yang penting tapi sulit karena banyak data yang kita gunakan untuk mengukur efektivitas itu dibuat oleh gerakan dan institusi HAM. Kita tahu bahwa aktivis HAM sudah makin efektif menggunakan politik informasi dalam mengangkat isu baru, memasukkan isu tersebut ke dalam agenda, dan merancang perubahan standar akuntabilitas untuk cakupan pelanggaran HAM. Pada saat yang sama, karena kita semakin dibanjiri dengan kabar buruk terkait HAM dan karena sulit sekali mengukur kemajuan di bidang ini, muncul anggapan umum bahwa hak atas integritas tubuh di dunia makin memburuk.

Apa implikasi argumen ini bagi para aktivis dan akademisi? Pertama, menurut saya, para aktivis dan akademisi perlu menyadari isu-isu yang dibahas di sini: heuristik dan bias kognitif, perbandingan dengan yang ideal, perubahan standar akuntabilitas, serta paradoks informasi. Kedua, kita perlu menyadari bahwa bukan hanya kita yang memikirkan masalah ini dan coba mengatasinya. Para akademisi di disiplin lain sudah bertahun-tahun menggeluti persoalan semacam itu dan telah mengembangkan konsep dan solusi yang mungkin berguna bagi para akademisi dan aktivis HAM, misalnya konsep seperti bahaya tersembunyi dan heuristik ketersediaan. Seorang kolega dari fakultas kesehatan masyarakat menyampaikan bahwa riset kesehatan masyarakat sudah lama menghadapi apa yang disebut “bias pengawasan” (*surveillance bias*) atau bias deteksi, saat menyadari bahwa makin dekat suatu masalah kesehatan dilihat, makin besar pula kemungkinan masalah ditemukan.¹⁰⁵

Gerakan HAM pada dasarnya adalah gerakan yang berusaha mengungkap bahaya tersembunyi menjadi kentara. Hal itu dilakukan dengan menyoroti sudut-sudut gelap negara. Amnesty International menggunakan simbol lilin untuk menunjukkan bagaimana mereka membawa cahaya untuk menyingkap masalah-masalah yang sebelumnya tersembunyi. Namun entah kenapa gerakan dan studi HAM tidak selalu menyadari efek sampingnya adalah makin gencar kita mencari pelanggaran HAM, makin banyak pelanggaran yang kita temukan. Artinya, bidang kita juga sarat dengan bias pengawasan. Kita perlu mencari cara riset dan analisis baru dari kolega kita di bidang lain yang sudah lama bergelut dengan isu itu.

Aktivis juga perlu menyadari konsekuensi negatif yang tak disengaja dari kerja-kerja mereka. Dalam rumusan yang lebih kompleks, para aktivis perlu tahu bahwa kerja-kerja mereka dapat membawa dampak positif yang disengaja sekaligus dampak negatif yang tak disengaja. Dampak positif yang disengaja dari berubahnya standar akuntabilitas adalah makin banyaknya hak yang diakui; dampak negatif yang tak disengaja adalah sebagian kalangan dapat menggunakan hal ini sebagai bukti bahwa dunia makin buruk dan karenanya menjadi putus asa. Menimbang hal tersebut, barangkali para aktivis HAM jangan lagi terlalu mengandalkan politik informasi dan tunjuk hidung (*naming and shaming*), tapi lebih mengandalkan apa yang disebut “politik efektivitas (*effectiveness politics*)”—mencari teknik dan kampanye yang efektif dalam meningkatkan HAM. Gerakan HAM harus menelusuri taktik-taktik baru dalam HAM dan tidak melulu membuat laporan sebagai pendekatan utama untuk setiap persoalan HAM.¹⁰⁶ Sebagai contoh, para aktivis di Serbia yang berusaha membebaskan koleganya yang ditahan mengaku lebih efektif mengadakan konser *rock* di depan gerbang penjara sambil menuntut pembebasan para tahanan, ketimbang menulis laporan atau membuat siaran pers. Selain itu, para aktivis HAM juga hendaknya tidak terlalu sibuk mendesakkan perluasan standar akuntabilitas, tapi sebaiknya lebih sibuk memastikan standar akuntabilitas yang sudah ada tidak dilanggar.

Kemajuan HAM tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi tergantung pada komitmen dan upaya berkelanjutan. Tanpa keyakinan dan kerja para aktivis yang tak kenal lelah, sering kali perubahan tak akan terjadi. Tetapi jika para aktivis dan para pendukungnya kemudian percaya bahwa upaya mereka atas nama HAM itu malah jadi biang masalah atau bahkan kontraproduktif lalu berhenti dan berdiam diri, kemajuan HAM dapat menjadi mandek atau mundur. Harapan itu dapat menopang kerja-kerja HAM. Meski harapan saja tak cukup, tidak demikian dengan kerja-kerja yang ditopang oleh harapan yang beralasan dan berwawasan.^{***}

BAB 6

Apa yang Berhasil dan Tidak Berhasil dalam Memajukan HAM?

NADIA MURAD BASEE TAHA berusia 19 tahu saat gerilyawan Negara Islam Irak dan Syam (NIIS) menyerang desanya pada Agustus 2015.¹ Dia tinggal di Kocho, suatu desa terpencil di timur laut Irak, dekat Gunung Sinjar, dan merupakan bagian dari warga Yazidi, kelompok agama minoritas independen yang termasuk paling tua di Irak. NIIS membunuh para pria di desa tersebut serta menculik perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki. Nadia menyaksikan anggota keluarganya dibunuh dan diculik. Anak laki-laki di desa itu dibawa ke kamp pelatihan, dipaksa menganut keyakinan NIIS, dan dilatih menjadi pejuang NIIS. Nadia sendiri, seperti banyak perempuan muda lainnya, diculik dan dijual sebagai budak seks, digilir dari satu anggota NIIS ke anggota lainnya.² PBB memperkirakan sekitar 3.000 orang, kebanyakan Yazidi, menjadi tawanan NIIS pada Maret 2016. Menurut PBB, serangan NIIS terhadap warga Yazidi “menunjukkan itikad NIIS untuk memusnahkan seluruh kelompok Yazidi,” yang “menunjukkan dengan jelas” bahwa NIIS telah melakukan genosida.³

Nadia akhirnya berhasil meloloskan diri. Dia melarikan diri ke Irak dan mulai membicarakan soal persekusi kaum Yazidi guna menarik perhatian dunia pada penderitaan mereka yang masih menjadi tawanan. Saya beruntung dapat mengundangnya berbicara di kelas *human security* yang saya ampu di Harvard Kennedy School sebagai bagian dari diskusi tentang genosida. Nadia berbicara dengan lembut namun jelas dalam Bahasa Arab sehari-hari tentang cobaan berat dan tantangan yang

dihadapi komunitasnya. Dia ditemani Murad Ismael, salah satu pendiri dan Direktur Eksekutif Yazda, NGO yang didirikan untuk membantu kaum Yazidi.⁴ Murad hadir untuk menjadi penerjemah sekaligus menceritakan kisahnya sendiri. Nadia memberi tahu kami bahwa, sebelum serangan, dia baru saja naik dari kelas 11 ke kelas 12. Dia suka belajar sejarah, tetapi impiannya adalah bekerja di salon kecantikan di desanya. Murad juga adalah pelajar. Pada saat serangan terjadi, dia sedang kuliah geofisika di University of Houston. Dia menerima panggilan telepon dari keluarganya yang panik karena NIIS menyerang desanya dan mereka pun terpaksa mengungsi dari rumahnya. Dia melihat sekeliling kelas pada mahasiswa saya, hening sejenak. Suaranya tercekak dan kepalanya tertunduk. Apakah ruang kelas kami mengingatkannya pada masa ketika yang mesti dia khawatirkan hanyalah makalah dan ujian, ketika kelangsungan komunitasnya belum membebani pundaknya?⁵

Sebagai pengantar singkat tentang topik genosida, saya menunjukkan kepada para mahasiswa definisi genosida serta bagan yang menunjukkan pasang surut genosida dan politisida pada akhir abad ke-20 (Lihat Gambar 5.2 pada bab 5). Saat melihat kasus Yazidi, kami menemukan bahwa definisi genosida sesuai dengan situasi mereka. Di tengah kekacauan dan kekerasan perang saudara di Irak, NIIS menyerang kaum Yazidi untuk memusnahkan mereka karena dianggap kafir dan menyembah setan.⁶ Di antara bagian dari rencana pembelajaran adalah mendengarkan suara korban dan memperhatikan data agar dapat memetakan prevalensi, penyebab, dan alat yang dapat digunakan untuk mencegah dan merespons kekerasan masif. Saya pikir hal itu dapat memberikan secercah harapan bagi mahasiswa saya maupun bagi Nadia dan Murad, karena tren genosida telah menurun. Rupanya saya keliru. Murad dan Nadia menunjukkan, dengan menggugah dan tepat, bahwa genosida bukanlah sekadar angka. Genosida berdampak terhadap setiap orang dan segenap komunitas, banyak yang meninggal dan yang lainnya tercerai-berai. “Genosida menghancurkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya dengan pembunuhan,” kata Murad.⁷ Nadia dan Murad belum menerima kabar berapa banyak anggota keluarganya yang masih hidup atau sudah meninggal. Keponakan Nadia, sementara itu, mengirimkan pesan teks kepadanya dari kamp Pelatihan NIIS, mengaku bahwa dia telah berpindah keyakinan—kini dia percaya bahwa kaum Yazidi itu kafir. Kalikan pengalaman pribadi yang kelam itu dengan ratusan atau ribuan pengalaman lainnya, dan seperti itulah akibat dari genosida.

Bagaimana kita dapat mendengar para korban pelanggaran HAM dengan hati yang lapang dan pikiran terbuka, tidak mereduksinya ke dalam angka dan garis tren pada grafik, namun di saat yang sama juga tidak luput melihat bukti perubahan? Di setiap negara pada himpunan data tentang genosida, terdapat orang-orang seperti Murad dan Nadia yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk menceritakan kisahnya dan mendesak isunya ke agenda para pengambil kebijakan. Sewaktu Nadia dan Murad mendengar bahwa mereka “hanya” punya dua agenda pertemuan di Kennedy School, mereka mengaku itu terbilang mudah dibandingkan biasanya. Saat menceritakan tentang pejabat pemerintah yang baru mereka temui, sepertinya bagi mereka itu sekadar satu butir agenda tengah di jadwal yang sibuk. Keberhasilan Nadia dan Murad tergantung kepada orang-orang yang mendengar kisah mereka, mengangkanya, dan mencari cara memengaruhi orang lain. Tetapi kisah mereka hanyalah satu dari sekian banyak kisah penderitaan dan pelanggaran.

Menurunnya genosida di dunia tak dapat menenangkan perasaan Nadia atau Murad. Tetapi data tersebut penting bagi kita yang ingin memahami tren hak asasi manusia (HAM) di dunia dan berusaha menggunakan tren tersebut untuk mencari tahu bagaimana meningkatkan HAM. Bagaimana kita menjelaskan penurunan genosida dan politisida? Bagaimana kita dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mencegah genosida dan pelanggaran HAM lainnya di masa mendatang? Bab ini mengulas wawasan tentang penyebab dan pencegahan genosida serta pelanggaran HAM lainnya dan bagaimana wawasan tersebut dapat menopang kebijakan dan sikap kita. Mengingat adanya problem perbandingan dengan yang ideal, yang dibahas pada bab 2, pada bab ini saya akan fokus pada riset yang bertumpu pada perbandingan empiris perubahan HAM, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Subjudul buku ini adalah *Memperjuangkan Keberhasilan HAM pada Abad ke-21*. Untuk itu, bab ini beralih menyoroti proses utama dalam memajukan HAM. Saya akan mengacu pada literatur tentang sebab-sebab pelanggaran HAM dan penjelasan tentang kepatuhan pada hukum HAM untuk mengajukan enam alat kebijakan yang telah dan dapat digunakan untuk menangani pelanggaran HAM: (1) mengurangi perang dan mencari solusi nirkekerasan atas konflik; (2) memajukan demokrasi dan meningkatkan mutu demokrasi yang sudah ada; (3) menangkal ideologi yang berisi dehumanisasi dan eksklusif, baik itu atas dasar ras, agama, gender, kelas, atau status lainnya; (4) mendorong negara-negara untuk meratifikasi

konvensi HAM yang sudah ada dan berupaya menegakkan hukum dan norma HAM melalui cara-cara nirkekerasan; (5) mengakhiri impunitas dengan mendukung akuntabilitas dalam negeri dan internasional yang dapat mencegah pelanggaran di masa mendatang; serta (6) mendukung, memperluas, serta melindungi mobilisasi dalam negeri dan transnasional atas nama HAM.

Setiap rekomendasi kebijakan tersebut sangat sulit dijalankan dan akan perlu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad untuk membuahkan hasil. Tetapi bukti di bab ini menunjukkan bahwa dunia sudah bergerak ke arah ini, ditinjau dari berkurangnya perang, bertambahnya negara demokrasi, dan meningkatnya akuntabilitas pidana atas pelaku pelanggaran HAM. Sebelum beralih membahas secara mendalam setiap rekomendasi kebijakan ini, saya akan membahas bagaimana kita mempelajari faktor risiko pelanggaran HAM.

Bagaimana Kita Mempelajari Penyebab atau Faktor Risiko Pelanggaran HAM?

Untuk dapat menangkal pelanggaran HAM secara efektif, kita perlu memahami mengapa dan bagaimana pemerintah dan pemberontak menggunakan kekerasan. Meski tidak ada teori tunggal dan padu dalam menjelaskan represi, ada beberapa faktor politik, ekonomi, ideologi, dan psikologi yang penting di seputar pelanggaran HAM yang sistematis seperti genosida. Di bawah ini saya membahas masing-masing faktor tersebut dan apa yang kita ketahui tentang pengaruhnya terhadap represi.⁸ Saya terutama fokus pada pelanggaran atas hak integritas pribadi karena literturnya paling kuat, tetapi saya juga akan membahas literatur tentang pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Ada kira-kira dua aliran besar dalam menjawab mengapa otoritas politik melanggar hak warganya: yang menganggap bahwa represi itu didasarkan pada pertimbangan rasional dan yang menganggap bahwa represi diakibatkan faktor ideologis atau psikologis. Jawaban terbaiknya adalah gabungan dari itu semua; segala upaya untuk mengakhiri pelanggaran HAM di dunia mesti memperhatikan untung rugi represi serta faktor psikologis dan ideologis yang mendorongnya.

Represi negara (pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan, dan penahanan politik) kebanyakan dilakukan oleh aparat keamanan dan militer negara, dan kadang oleh pemberontak bersenjata. Orang-orang

yang mengerahkan kekuatan tersebut kerap menghitung untung dan rugi penggunaan represi untuk mencapai tujuannya.⁹ Menurut pendekatan pilihan rasional, penguasa memilih merepresi perbedaan pendapat ketika ongkosnya lebih rendah daripada ongkos melembagakan demokrasi liberal.¹⁰ Sebagian orang menganggap penjelasan ini terlalu mekanistik untuk pelanggaran yang berat, tetapi teori rasionalitas dikonfirmasi oleh banyak studi kasus pelanggaran HAM. Literatur tentang genosida di Rwanda dan pembersihan etnis di bekas Yugoslavia, misalnya, menunjukkan bagaimana elit negara yang kekuasaannya terancam, baik di medan perang maupun di meja perundingan, sengaja melakukan pembunuhan massal untuk mempertahankan kekuasaannya.¹¹ Riset pun menunjukkan bahwa yang mendorong kekerasan dan represi bukanlah keragaman etnis atau faksionalisasi itu sendiri, melainkan pilihan para pemimpin untuk memanipulasi faksionalisasi itu guna mencapai tujuan politiknya.¹² Dalam kasus Rwanda dan kasus lainnya, riset juga menyoroti kegagalan aktor internasional dalam memperbesar ongkos kekerasan yang dipersepsi.¹³ Para pemimpin di negara represif yang lain seperti Argentina di masa Junta dan Sudan di masa Bashir sangat diuntungkan oleh represi, karena mereka dapat memukul lawan politiknya, menjaga kekuasaannya, serta menuai keuntungan ekonomi dan politik dari kekuasaan tersebut.

Sebelum tahun 1970-an, hampir tidak ada ongkos bagi penguasa yang merepresi rakyatnya; mereka seperti memiliki impunitas total. Dalam keadaan seperti ini, tidak mengejutkan jika represi diperhitungkan oleh para pemimpin otoritarian. Bahkan ketika para diktator itu akhirnya tumbang, mereka dapat hidup nyaman di pengasingan, sering kali dengan kekayaan melimpah yang disembunyikan di rekening internasional. Karena alasan itu, para pemimpin otoritarian itu dapat dilihat sebagai aktor rasional yang memilih represi dari sekian kemungkinan kebijakan.

Para pemimpin juga dapat termotivasi oleh pertimbangan yang tidak begitu rasional. Mereka memedulikan prestise dan penghormatan dari para pengikutnya serta dari para pemimpin dunia yang lain. Para pemimpin juga dapat benar-benar meyakini ide yang mereka gunakan untuk mengobarkan kebencian ras, etnis, atau agama. Untuk memahami akar represi, kita perlu memahami bahwa para pemimpin itu rasional dan ideologis, punya keyakinan yang kuat serta memanipulasinya demi kepentingan dirinya.

Penting untuk memahami apa yang dapat dilakukan aktor dalam negeri dan internasional untuk memperbesar ongkos represi dan memberikan

lebih banyak insentif untuk melindungi dan memajukan HAM. Karena banyak pemimpin represif adalah aktor rasional, mereka dapat dicegah melakukan pelanggaran HAM lain jika ongkos untuk melakukan pelanggaran tersebut jelas dan kemungkinan besar ditegakkan. Demikian halnya, pemimpin semacam itu dapat memilih menghormati HAM jika insentif untuk itu langsung dan menarik. Agar dapat bergabung sebagai anggota Uni Eropa, misalnya, negara-negara di Eropa Timur melakukan perubahan substansial dalam kebijakan dan praktik HAM.¹⁴

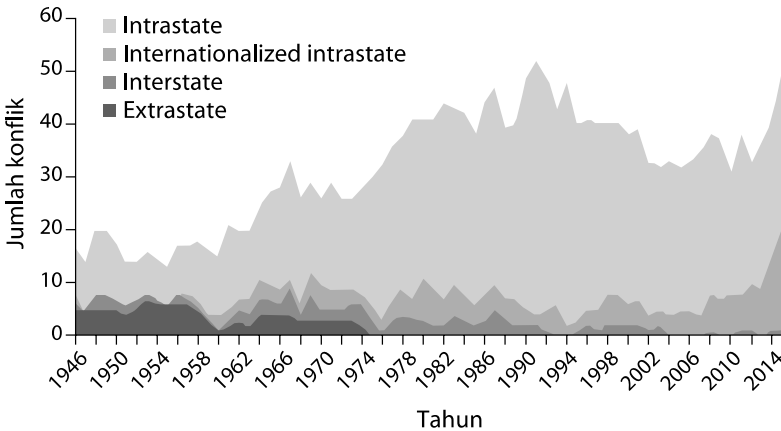
Dua temuan inti terus dikonfirmasi oleh berbagai studi tentang represi. Pertama, ancaman nyata atau yang dikhawatirkan terhadap rezim mereka, seperti perang, upaya kudeta, terorisme, atau revolusi, mendorong para pemimpin untuk memilih represi.¹⁵ Kedua, ketika tidak ada pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah, khususnya di rezim otoritarian yang tanpa pengawasan dan pembagian kekuasaan, para pemimpin lebih cenderung melanggar hak warganya. Semakin sedikit batasan kekuasaan, semakin sedikit juga ongkos represi, karena risiko digulingkan dari kekuasaan juga kecil. Bagian berikutnya dari bab ini akan mengulas opsi kebijakan yang paling menjanjikan untuk menghindari represi dan memajukan HAM berdasarkan riset yang sudah ada.

Mengurangi Perang dan Mencari Solusi Nirkekerasan atas Konflik

Analisis statistik mengonfirmasi bahwa adanya perang, terutama perang saudara, adalah faktor yang paling berkorelasi kuat dengan represi.¹⁶ Lebih khusus lagi, perang saudara merupakan salah satu faktor risiko genosida yang paling penting.¹⁷ Ancaman lain terhadap kelangsungan pemerintah, seperti adanya gerakan separatis dan kelompok separatis atau teroris, juga berkorelasi positif dengan represi.¹⁸

Kabar baik untuk HAM adalah bahwa perang antarnegara dan konflik antarnegara yang berintensitas rendah sudah menurun selama bertahun-tahun. Yang dikategorikan perang oleh petugas pengodean adalah pertikaian yang mengakibatkan sedikitnya 1.000 korban jiwa dalam setahun; sementara yang dikategorikan konflik adalah pertikaian yang mengakibatkan sedikitnya 25 korban jiwa dalam setahun. Kabar buruknya bagi HAM adalah konflik dan perang saudara, atau yang oleh para peneliti disebut “konflik intranegara” (*intrastate conflict*), mengalami peningkatan, setelah sempat menurun dari 1990 hingga 2012. Gambar 6.1 menunjukkan tren empat jenis konflik: perang antarnegara, atau

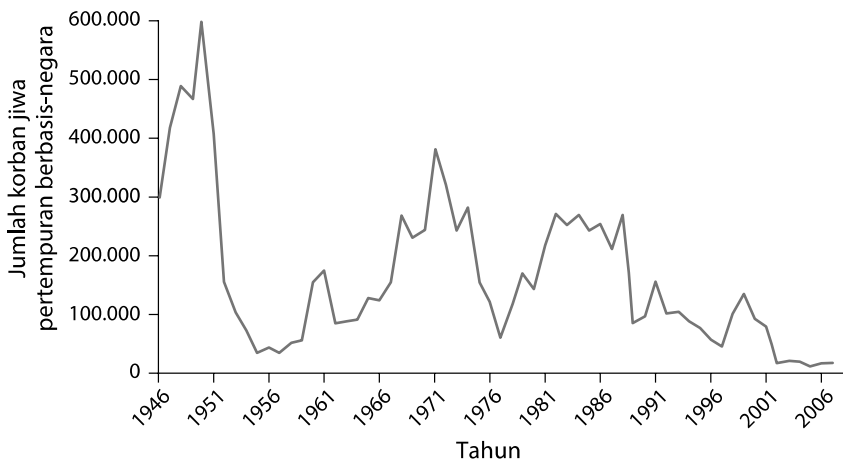
konflik antarnegara; konflik intranegara; konflik intranegara yang bereskalasi menjadi antarnegara (*internationalized intrastate conflict*), seperti konflik yang sedang berlangsung di Suriah, yang melibatkan aktor internasional; serta yang disebut konflik luar negara (*extrastate*), atau perang kolonial, yang, seperti tampak pada bagan, berakhir pada pertengahan tahun 1970-an.¹⁹



Gambar 6.1. Konflik bersenjata berdasarkan jenisnya, 1946–2015. Sumber: Erik Melander, Therése Pettersson, dan Lotta Themnér, “Organized Violence, 1989–2015,” *Journal of Peace Research* 53, no. 5 (2016): 727–742. Uppsala Conflict Data Program One-Sided Dataset.

Jumlah perang antarnegara terbilang kecil, dan masalah utama di dunia saat ini adalah konflik intranegara, atau perang saudara. Isu krusial lainnya yang terkait dengan ini adalah jumlah korban tewas dalam konflik. Orang percaya bahwa kekerasan dan penderitaan pada masa ini lebih parah daripada sebelumnya karena mereka percaya bahwa korban jiwa dalam perang dan konflik saat ini lebih besar dari sebelumnya. Tetapi Gambar 6.2, yang menampilkan jumlah korban jiwa dalam pertempuran per tahun di keseluruhan konflik sejak 1947, menunjukkan bahwa jumlah korban jiwa dalam pertempuran mengalami penurunan yang lebih signifikan daripada penurunan jumlah konflik. Bagan ini berakhir di 2007—jika diteruskan hingga 2016, kita akan melihat peningkatan yang menunjukkan korban jiwa dalam pertempuran baru di Suriah dan wilayah lainnya di Timur Tengah. Namun, itu saja tetap tidak akan mengubah tren keseluruhan. Korban jiwa dalam pertempuran yang baru pada 2015

menaikkan kembali jumlah korban pertempuran ke angka 100.000, agak lebih di atas angka tertinggi pada 1990 dan 2000, tetapi tidak sampai menyamai angka tertinggi pada 1980-an.²⁰



Gambar 6.2. Jumlah korban jiwa dalam konflik bersenjata yang melibatkan negara, 1946–2007. *Sumber:* Human Security Report Project, diakses pada 28 Januari, 2017, <http://www.hsrgroup.org/our-work/security-stats/State-Based-Armed-Conflicts-By-Type.aspx>. Sumber data asli adalah UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset v. 4, 2008.

Tanisha Fazal menunjukkan bahwa penurunan korban jiwa dalam perang sebagian ditunjang oleh kemajuan dalam kedokteran militer. Fazal berpendapat bahwa semua riset tentang penurunan konflik didasarkan secara langsung atau tidak langsung pada penurunan korban tewas karena perang dan konflik ditentukan oleh ambang jumlah korban jiwa dalam pertempuran. Menurunnya korban jiwa dalam peperangan adalah hasil dari kemajuan dalam kedokteran militer, selain dari menurunnya konflik. Untuk mengatasi masalah ini, dia menganalisis korban jiwa dan korban cedera dalam pertempuran. Fazal menyimpulkan bahwa “sekali-pun korban cedera dalam pertempuran dihitung dan terlepas dari adanya kemajuan dalam perawatan medis di wilayah konflik, jumlah korban perang tetap saja menurun.” Riset Fazal ini “meredam, tetapi tidak menegasi” klaim empiris tentang penurunan perang secara umum. Dia juga mengemukakan bahwa meningkatnya kedokteran militer yang maju itu sendiri termasuk bagian dari cita-cita kemanusiaan yang oleh sebagian penulis dianggap turut berkontribusi terhadap menurunnya perang.²¹

Rekomendasi kebijakan yang saya ajukan agar mencari solusi nirkekerasan atas krisis HAM menjadi rumit karena intervensi militer sering diusulkan sebagai salah satu solusi utama atas represi. Karena orang mempersoalkan HAM dan meragukan efektivitas alat hukum dan kebijakan yang biasa, mereka sering kali menuntut pengerahan kekuatan militer untuk mencegah kekerasan massal. Hal ini menimbulkan campur-aduk yang salah kaprah antara HAM dengan yang disebut “Tanggung Jawab Melindungi” (*Responsibility to Protect*), atau R2P, doktrin tiga bagian yang memaknai ulang kedaulatan sebagai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya sendiri dan sebagai tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu pemerintah dalam melindungi warganya. Kalimat terakhir dari pernyataan ini menyebutkan bahwa, jika negara gagal melindungi warganya dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, komunitas internasional harus siap mengambil tindakan tegas, “termasuk pengerahan kekuatan secara kolektif melalui Dewan Keamanan PBB.”²² Meski kekuatan kolektif dianggap sebagai pilihan terakhir, bagi sebagian kalangan yang gegabah, R2P disamakan dengan intervensi militer untuk memajukan HAM dan, oleh sebagian kalangan, intervensi militer dan pemajuan HAM dianggap sebagai dua sisi mata uang.²³

Tak ada satu pun konvensi HAM yang menyatakan bahwa negara diharapkan atau bahkan diperbolehkan menggunakan invasi militer untuk menegakkan HAM. Konvensi Genosida, misalnya, menyerukan negara-negara pihak agar “berusaha mencegah dan menghukum” genosida, tetapi tak pernah merinci bahwa itu harus dilakukan dengan intervensi militer. Sebagian besar konvensi itu berkaitan dengan hukuman legal. Salah satu pasal menyatakan bahwa negara pihak dapat “meminta organ PBB yang kompeten” untuk mengambil tindakan dalam rangka mencegah dan menekan genosida, tetapi ini masih jauh dari mengizinkan atau bahkan mendorong intervensi militer. Pembukaan Statuta Roma ICC menyatakan dengan jelas, “Statuta ini tidak dapat dianggap memberi wewenang kepada Negara Pihak untuk mengintervensi konflik bersenjata atau urusan internal suatu Negara.” Pengerahan kekuatan militer demi perdamaian dan keamanan internasional adalah bagian dari Piagam PBB, dan tidak ditemukan dalam konvensi HAM. Dewan Keamanan selalu punya otoritas untuk memerintahkan intervensi militer dan belakangan mulai menafsirkan misinya dalam memajukan perdamaian dan keamanan internasional sebagai bagian dari HAM.²⁴ Tetapi itu sama sekali

berbeda dari pernyataan bahwa HAM dan R2P adalah dua hal yang sama. ICC memang dianggap dan harus terus dianggap sebagai alternatif dari penggunaan kekuatan militer, dan bukan pelengkap untuknya.

Banyak aktivis HAM di dunia menentang pengerahan kekuatan militer yang berdalih memajukan HAM; hal ini terutama tampak di Amerika Latin dan banyak wilayah di Kawasan Selatan Dunia. Meski sebagian kecil suara yang berpengaruh, terutama dari Amerika Serikat, mendukung pengerahan kekuatan militer untuk memajukan HAM, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mencampuradukkan HAM dengan intervensi militer yang lebih umum.²⁵

Sebagai satu faktor terpenting yang berkorelasi dengan pelanggaran HAM, perang selalu berisiko jika digunakan untuk mengurangi pelanggaran HAM.²⁶ Yang dapat berakibat negatif bukan perangunya saja, tetapi juga pendudukan pascaperang. Menurut riset baru-baru ini tentang terorisme, pelaku bom bunuh diri paling mungkin muncul di tempat-tempat yang diduduki militer asing.²⁷ Bagaimana mungkin kita menyarankan pengerahan dan pendudukan militer untuk menghentikan NIIS, misalnya, jika invasi dan pendudukan Irak sebelumnya itulah yang justru lebih dulu melahirkan NIIS?

Tetapi bukan hanya pemerintahan berdaulat yang perlu meninggalkan perang sebagai alat untuk memajukan HAM. Banyak kelompok pemberontak yang mengutamakan kekerasan sebagai alat memperjuangkan keadilan, dan keberadaan gerakan separatis serta kelompok pemberontak atau teroris juga berkorelasi positif dengan represi. Karena itu, pemberontakan bersenjata untuk memajukan HAM berisiko memicu lebih banyak represi. Erica Chenoweth dan Maria Stephan menunjukkan bahwa, antara tahun 1900 hingga 2006, kampanye perlawanan nirkekerasan dua kali lebih efektif dibandingkan perlawanan dengan kekerasan. Menurut Chenoweth dan Stephan, alasan utamanya adalah karena kampanye nirkekerasan lebih mampu menarik dukungan luas, sehingga rezim menjadi terpisah dari sumber kekuasaan utamanya.²⁸ Alasan lainnya mengapa perlawanan nirkekerasan lebih efektif kemungkinan adalah karena hal itu tidak memicu represi lebih keras seperti pada perlawanan dengan kekerasan.

Persoalan lainnya adalah banyak korban pelanggaran HAM dan kalangan terdampak lainnya menyerukan kekerasan sebagai solusi. Ketika Murad membahas pengepungan NIIS terhadap kaum Yazidi di Gunung

Sinjar yang berhasil dipatahkan, dia ingat bahwa berkat serangan udara AS, banyak orang Yazidi berhasil menyelamatkan diri. Bagaimana mungkin dia tak menaruh harapan pada kekuatan militer jika memang itulah langkah yang mampu memberikan kebebasan dan kelegaan seketika? Tetapi kemudian, Murad menyadari bahayanya. Serangan udara terhadap kamp pelatihan NIIS menimbulkan akibat negatif yang tak disengaja: anak-anak muda Yazidi yang dibawa paksa ke sana untuk menjadi prajurit ikut terbunuh dalam serangan itu.²⁹

Kita harus bilang apa kepada Murad dan orang-orang seperti itu, juga banyak orang yang saat ini menderita di Suriah, saat mereka meminta solusi militer? Meski korban dan orang-orang yang terdampak perlu didahulukan dalam menentukan agenda HAM, ada tantangan dalam menyatukan pengalaman pribadi dengan aktivisme dan riset.³⁰ Pengambil kebijakan dan akademisi perlu mendengar orang-orang yang terdampak dengan hati yang lapang dan sekaligus menggunakan riset untuk merekomendasikan kebijakan. Riset mulai berpihak ke cara-cara nirkekerasan dalam mewujudkan HAM dan itulah respons yang saya rekomendasikan.

Pelajaran yang dipetik banyak orang dari Rwanda adalah bahwa komunitas internasional harus siap melakukan intervensi militer dengan lebih sigap dan lebih sering untuk mencegah kejahatan massal. Saya mempertanyakan kesimpulan ini. Intervensi militer adalah instrumen kasar yang lebih berpotensi mengobarkan kejahatan massal daripada meredakannya. Beberapa riset menyatakan bahwa dalam sejarahnya, pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat turut berkontribusi terhadap demokratisasi pada beberapa kasus, seperti Jepang dan Jerman se usai Perang Dunia II.³¹ Akan tetapi, studi kuantitatif yang lebih baru tentang subjek ini menunjukkan bahwa “intervensi militer berkontribusi terhadap meningkatnya represi negara dengan memperkuat daya koersif negara dan mendorong perilaku yang lebih represif.”³² Studi yang lebih terdahulu menemukan bahwa intervensi militer tidak memajukan HAM di negara-negara sasaran dan tidak pula berkontribusi terhadap demokratisasi di negara tersebut.³³ Invasi Amerika Serikat ke Irak, yang kadang dijustifikasi oleh pemerintahan Bush dengan bahasa HAM, adalah contoh bagaimana pengerahan kekuatan militer yang sepihak dan ilegal memperburuk pelanggaran HAM dan bukannya menghindarkan pelanggaran lebih lanjut. Banyak akademisi dan aktivis HAM yang dulu mendukung perang di Irak kini mengakui bahwa itu adalah bencana HAM. Michael Ignatieff, misalnya, kini menyesalkan dukungannya terhadap perang di

Irak, meski dia masih menyarankan intervensi militer untuk memajukan HAM di Suriah.³⁴ Itikad mencegah kejahatan massal lewat intervensi militer dimaksudkan untuk membantu dan melindungi, dan itu baik. Tetapi selama lebih dari dua puluh tahun sesudah genosida di Rwanda, kelihatannya kejahatan massal di zaman kita—Irak, Afghanistan, dan kini Suriah—malah makin memburuk dan bukannya makin mereda dengan adanya intervensi militer.

Saya mengakui ada beberapa pengecualian pada skeptisisme saya terhadap penggunaan perang untuk mencegah pelanggaran HAM. PBB seharusnya menambah jumlah pasukan perdamaian yang diterjunkan di Rwanda sebelum dan selama berlangsungnya genosida; mereka juga mesti diberi mandat lebih besar untuk melindungi warga. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa pengerahan pasukan perdamaian PBB dapat berkontribusi penting terhadap perdamaian. Selain itu, misi militer terbatas dan terfokus, seperti serangan udara yang membantu kaum Yazidi menyelamatkan diri dari pengepungan NIIS, dapat digunakan dalam situasi ekstrem. Implementasi militer yang lebih keras berupa surat perintah penangkapan dari ICC juga dapat digunakan di beberapa situasi. Namun demikian, rekomendasi kebijakan umumnya tetap sama—dunia perlu mencari cara-cara alternatif yang nirkekerasan untuk memajukan HAM.

Meski saya tidak mengesampingkan sama sekali cara-cara militer untuk mencegah genosida sebagai upaya terakhir, saya berpendapat bahwa memusatkan perhatian utama pada intervensi militer akan mengacaukan ide perlindungan HAM oleh komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB adalah lembaga yang tidak sempurna, lima anggota permanen di dalamnya dapat memveto tindakan apa pun terhadap mereka atau sekutu dekatnya. Lantas mengapa saya lebih memilih intervensi militer yang disetujui Dewan Keamanan daripada intervensi militer sepihak? Pertama, karena akan sangat sulit, hampir mustahil, mendapatkan suara dukungan untuk intervensi militer tanpa adanya veto dari setidaknya satu anggota tetap. Intervensi semacam itu hanya terbatas pada situasi ekstrem ketika ada konsensus global berskala besar. Hal ini akan menangkal manipulasi informasi dan argumen yang dibuat-buat demi kepentingan pribadi, seperti yang tampak pada intervensi sepihak Rusia di Krimea pada 2014 atau intervensi sepihak Amerika Serikat di Irak pada 2003. Kedua, intervensi yang dimandatkan Dewan Keamanan PBB itu legal menurut Piagam PBB

dan sering kali dianggap lebih absah oleh sebagian besar aktor, bahkan termasuk aktor yang menentanginya.

Saya lebih ingin melihat penguasa besar mengerahkan kekuatan militer untuk mengeksekusi paksa surat perintah penangkapan dari pengadilan internasional ketimbang melihat intervensi militer sepihak yang besar-besaran untuk mengatasi kejahatan massal. Di bekas Yugoslavia, misalnya, semua terdakwa penjahat perang diserahkan ke Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Wilayah Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) karena penguasa yang memiliki pasukan di daerah setempat mulai mengerahkan kekuatan militernya untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan.³⁵ Hal ini dapat menangkalkan kejahatan perang di masa mendatang atau setidaknya memaksa para penjahat perang bersembunyi sehingga mereka tidak lagi membahayakan. Jika negara-negara menyikapi dengan serius surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court, ICC), kejahatan massal dapat dicegah; hal ini juga dapat menjadi peringatan keras bagi para calon pelaku agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Dalam kasus Suriah, perdebatannya sering berkutat pada apakah kita harus melakukan intervensi militer. Menurut saya, pemahaman yang lebih baik terhadap hal-hal yang menunjang efektivitas HAM akan meredakan kecenderungan untuk menganggap bahwa HAM dapat dimajukan dengan cara-cara militer. Perlu dicatat juga bahwa tingkat kepercayaan terhadap aktivisme sosial boleh jadi rendah di negara-negara yang memiliki sejarah pengelolaan yang invasif oleh negara yang lebih kuat (entah lewat kolonisasi atau melalui mandat pascakolonial), sekalipun aktivisme tersebut sudah dikelola secara lokal dan dimulai dengan agenda HAM. Masyarakat di wilayah-wilayah seperti ini kerap melihat aktivisme lokal sebagai alat penguasa asing yang berusaha mengadu domba masyarakat yang damai agar terjadi perang saudara.³⁶

Memajukan Demokrasi dan Meningkatkan Mutunya

Salah satu upaya nirkekerasan yang paling penting dalam rangka melindungi HAM adalah penguatan demokrasi. Berbagai studi sudah menemukan bahwa kemungkinan rezim demokrasi terlibat dalam represi lebih kecil ketimbang rezim non-demokrasi.³⁷ Pemilu memberi peluang untuk menurunkan pejabat, sehingga memperbesar ongkos represi. Institusi

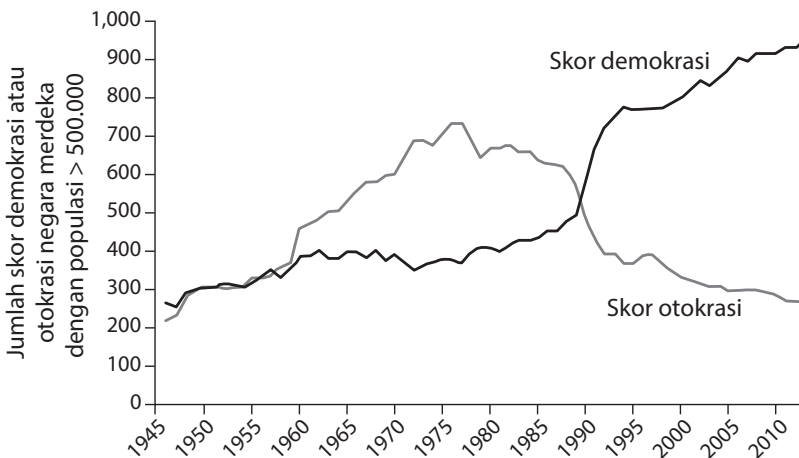
demokrasi juga menyediakan mekanisme nirkekerasan yang sudah mapan untuk menangani keluhan dan memperkuat nilai deliberasi dan kontestasi damai. Meski sebagian besar kalangan sepakat bahwa institusi politik demokrasi mengurangi perilaku represif secara umum, riset menunjukkan bahwa institusi demokrasi baru berkontribusi pada penurunan represi hanya setelah ambang demokrasi tertentu yang tinggi sudah tercapai. Selain itu, beberapa institusi atau konfigurasi rezim demokrasi tertentu berdampak lebih besar terhadap represi ketimbang institusi atau konfigurasi lainnya.³⁸

Demokrasi penuh dengan tingkat partisipasi yang tinggi, sistem yang disertai persaingan elektoral di antara berbagai partai, serta batasan penggunaan kekuasaan eksekutif diperlukan untuk mencegah represi.³⁹ Dengan kata lain, penyelenggaraan pemilu semata tidak cukup untuk menegakkan demokrasi. Kebijakan perlu mendorong tingkat partisipasi warga yang tinggi dalam politik, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian suara dalam pemilu. Selain itu, perlu ada beberapa partai politik yang saling berkompetisi dalam pemilu. Sistem satu partai tidak dapat menciptakan tingkat kompetisi yang diperlukan dalam demokrasi.⁴⁰ Terakhir, perlu ada perlindungan hak agar partisipasi dan kompetisi itu bermakna. Jika pemerintah mengancam warga semata karena mengutarakan pendapatnya, misalnya—melanggar kebebasan berpendapat mereka—maka tidak ada kondisi yang menunjang terlaksananya pemilu yang serius.

Sebagian akademisi khawatir bahwa negara yang bertransisi ke demokrasi atau negara semi-demokrasi sebenarnya lebih rentan terhadap pelanggaran HAM ketimbang negara otoritarian. Hal ini membuat sebagian kalangan menyimpulkan, misalnya, bahwa “pembunuhan lebih banyak terjadi di tengah-tengah,” atau, pelanggaran HAM lebih banyak terjadi di negara-negara yang bertransisi dari otoritarianisme ke demokrasi.⁴¹ Benar bahwa negara semi-demokrasi tidak memberikan perlindungan HAM yang sama dengan negara demokrasi penuh, Tetapi belum cukup jelas bahwa negara semi-demokrasi lebih rentan terhadap pelanggaran HAM ketimbang otokrasi. Malah, kemungkinan genosida di negara-negara yang tengah mengalami demokratisasi jauh lebih kecil dibanding negara otokrasi.⁴²

Kabar baiknya bagi HAM bahwa adalah jumlah demokrasi di dunia meningkat hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada pertengahan 2000-an. Namun demikian, ada persepsi tentang “resesi” dalam

demokrasi—bahwa makin banyak negara yang mengalami kemunduran dari demokrasi ke semi-demokrasi atau bahkan ke otoritarianisme. Inilah yang disebut oleh kolega saya Steven Levitsky, dalam tulisannya bersama Lucan Way, sebagai “mitos resesi demokrasi.”⁴³ Seperti halnya pada literatur tentang HAM, terdapat pesimisme serius di balik persepsi tentang kemunduran demokrasi, ketika sebagian penulis mengeklaim bahwa kebebasan sudah “anjlok” atau bahwa kita mungkin menghadapi “awal dari akhir demokrasi.”⁴⁴ Realitasnya berlawanan dengan pesimisme ini. Pada sekitar pertengahan 1990, jumlah demokrasi di dunia sudah melampaui jumlah otokrasi (lihat Gambar 6.3). Resesi demokrasi terjadi di sejumlah negara, seperti yang terjadi di Thailand, Turki, dan Venezuela, sementara negara lain meningkat mutu demokrasi, seperti Ghana, Peru, Senegal, dan Serbia. Menurut Freedom House, dalam dasawarsa terakhir, meski lebih banyak negara yang skor demokrasi menurun daripada yang meningkat, jumlah demokrasi masih jauh lebih banyak daripada jumlah rezim yang sepenuhnya otoritarian dan, meski terjadi penurunan di beberapa negara, tren pada Gambar 6.3 belum mengalami pembalikan.⁴⁵



Gambar 6.3. Demokrasi dan otokrasi, 1946–2015. Sumber data: Polity IV Project, Center for Systemic Peace, diakses pada 28 Januari 2017, <http://www.systemicpeace.org/polityproject.html>. Bagan ini menunjukkan data terbaru yang dikirimkan Center for Systemic Peace.

Di kalangan pemerintah, juga kalangan akademisi dan aktivis, masih ada keraguan tentang apakah demokrasi diperlukan untuk pemajuan HAM. Sebagian kalangan mengeklaim bahwa dukungan terhadap demokrasi

adalah pernyataan ideologis, dan bahkan religius.⁴⁶ Tetapi banyak studi tentang penyebab pelanggaran HAM menunjukkan dengan jelas bahwa demokrasi diperlukan agar HAM dapat berhasil, tetapi demokrasi saja tidak cukup.⁴⁷ Meski banyak demokrasi yang lemah praktik HAM-nya, tidak banyak negara yang praktik HAM-nya kuat yang bukan demokrasi.

Sulit memajukan demokrasi dari luar dan, setidaknya, aktor internasional perlu berusaha agar jangan sampai merusak demokrasi. Pada bab 4, saya menunjukkan bagaimana Amerika Serikat semasa Perang Dingin menumbangkan demokrasi di negara-negara seperti Guatemala, Iran, Kongo, Brasil, dan Chili. Tantangan kebijakan luar negeri yang utama bagi negara-negara yang peduli dengan HAM adalah bagaimana mencegah kudeta dan mendukung demokrasi yang rapuh. Karena demokrasi diperlukan bagi pemajuan HAM dan karena sulit membangun kembali demokrasi setelah digulingkan oleh kudeta, kaidah utama dalam kebijakan HAM adalah mencegah kudeta sejauh mungkin. Meski dukungan HAM yang sejati memerlukan demokrasi bermutu tinggi, demokrasi yang cacat sekalipun lebih baik daripada rezim otoritarian karena demokrasi yang cacat dapat lebih mudah bertransisi ke demokrasi yang bermutu tinggi.

Membangun dan mempertahankan demokrasi adalah proses yang sulit dan memakan waktu. Ini sejalan dengan tema besar buku ini: perubahan HAM itu perlu waktu. Demokrasi tak dapat dibangun dari luar, dan demokrasi tak dapat dibangun seketika. Sebagaimana ditunjukkan pada bab 4, proses memajukan demokrasi itu dapat berlangsung berpuluh-puluh tahun. Pembaru di bidang demokrasi dan HAM mesti memiliki “toleransi tinggi terhadap capaian yang tertunda.”⁴⁸ Misalnya, andai demokrasi di Mesir yang masih belia dilindungi dari kudeta militer pada 2013, masih perlu kerja-kerja bertahun-tahun untuk mereformasi demokrasi tersebut ke titik ketika praktik HAM-nya dapat dipercaya. Aktor luar dapat memberikan dukungan terhadap reformasi demokrasi tetapi, pada akhirnya, tanggung jawab reformasi ada di pundak rakyat setempat.

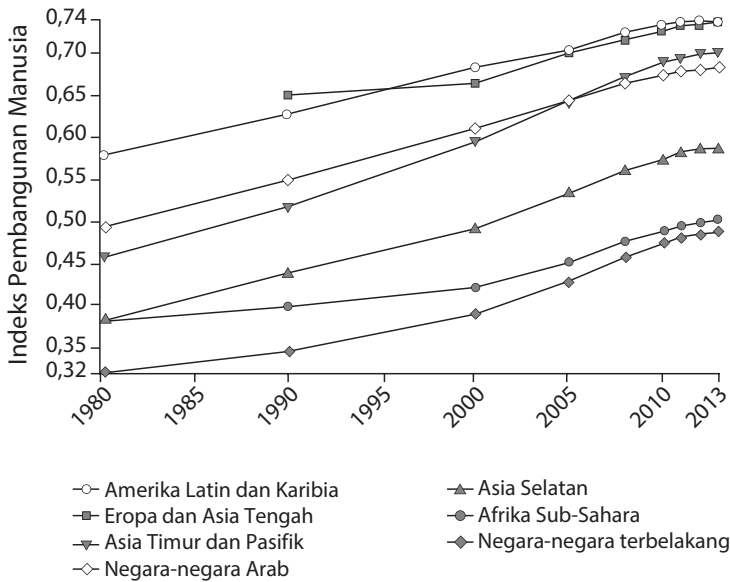
Demokrasi dapat membantu meningkatkan hak-hak ekonomi serta hak integritas tubuh dasar. Pemerintahan demokratis yang menjamin kebebasan berserikat, kebebasan pers, dan pemilu berkala memberikan alat bagi masyarakat untuk bekerja demi hak ekonominya dan memilih pemerintah yang lebih berkomitmen terhadap kesejahteraan ekonomi warganya. Korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi juga terkonfirmasi oleh studi kuantitatif lain yang mengamati hak ekonomi dan sosial.⁴⁹

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesetaraan

Banyak studi terus menunjukkan kaitan antara kemiskinan dengan berbagai macam pelanggaran HAM.⁵⁰ Riset juga menunjukkan bahwa ketimpangan, khususnya ketimpangan pendapatan, berkaitan dengan pelanggaran hak integritas tubuh serta hak ekonomi.⁵¹ Lebih khusus lagi, sebuah studi mengamati dampak ketimpangan pendapatan dan lahan terhadap hak integritas tubuh dan menemukan hubungan kuat antara ketimpangan pendapatan dan pelanggaran hak integritas pribadi; dampak ketimpangan lahan tidak signifikan dampak ketimpangan pendapatan.⁵²

Kesetaraan ekonomi juga penting bagi perlindungan hak perempuan. Amartya Sen membawa perhatian dunia pada jutaan perempuan yang hilang di dunia, akibat berbagai praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kemiskinan saja tidak dapat menjelaskan negara mana yang paling banyak mengalami kasus perempuan hilang; ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan juga berperan. Di negara dan wilayah yang perempuannya terlibat dalam pekerjaan yang menguntungkan dan berkontribusi terhadap ekonomi rumah tangga tidak banyak terjadi kasus perempuan hilang. Pekerjaan yang menguntungkan dapat berupa kerja berbayar di luar rumah, atau pekerjaan yang tidak berbayar tetapi mendatangkan pendapatan untuk keluarga, seperti bertani. Misalnya, di negara-negara di Afrika sub-Sahara, tempat perempuan menghasilkan sebagian besar makanan yang dikonsumsi rumah tangga, kemungkinan perempuan hilang lebih kecil ketimbang negara lain tempat perempuan tidak dianggap memiliki kontribusi ekonomi yang serupa untuk rumah tangga.⁵³

Seperti halnya pada bidang HAM dan demokrasi, saat ini terdapat pesimisme yang signifikan terhadap pembangunan manusia, yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan fokus pada perbaikan kesempatan dan pilihan untuk semua kalangan sambil meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam bidang pembangunan manusia, seperti halnya HAM dan demokrasi, situasi di lapangan lebih positif ketimbang yang diduga akan muncul di berita. Indeks Pembangunan Manusia (Lihat Gambar 6.4), ukuran gabungan PDB, angka melek huruf, dan angka harapan hidup, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di semua kawasan dunia mengalami peningkatan sejak 1980 dan pembangunan manusia di beberapa kawasan, terutama Asia Timur, mengalami peningkatan signifikan, sementara kawasan lain, khususnya Afrika sub-Sahara, lebih lambat kemajuannya.⁵⁴



Gambar 6.4. Indeks pembangunan manusia berdasarkan kawasan dunia, 1980–2013. Max Roser, *Human Development Index by World Region 1946–2013*. <https://ourworldindata.org/human-development-index/>. Penulis, Max Roser, melisensi visualisasi ini di bawah lisensi CC BY-SA. Sumber data: United Nations Development Program.

Data ketimpangan ekonomi lebih rumit ketimbang data pembangunan manusia karena ada berbagai cara untuk mengukurnya.⁵⁵ Ketimpangan antarnegara telah menurun, khususnya berkat pertumbuhan yang dramatis di Tiongkok dan India, sedangkan ketimpangan antarindividu di dalam negara, termasuk di Tiongkok dan India, telah meningkat dan kadang cukup dramatis.⁵⁶

Tidak ada resep sederhana yang dapat dilakukan aktor internasional dan dalam negeri untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Para pembela globalisasi ekonomi mengklaim bahwa perluasan perdagangan bebas dan investasi kapitalis akan mengarah pada perbaikan kondisi HAM, sementara kalangan lainnya menemukan kesimpulan yang berlawanan atau tidak menemukan korelasi antara tingginya investasi asing langsung dengan hak-hak sipil dan politik.⁵⁷ Karena itulah saya skeptis bila mendengar orang bicara dengan sangat yakin tentang “akar penyebab” kemiskinan, ketimpangan, dan pelanggaran HAM lainnya, seolah kita tahu persis apa itu.

Pandangan yang makin didukung adalah bahwa keterbukaan perdagangan berkaitan dengan hak integritas tubuh yang lebih baik, serta perbaikan hak ekonomi dan sosial.⁵⁸ Namun, kebijakan neoliberal tertentu memperburuk ketimpangan dan berdampak negatif terhadap HAM. Misalnya, program penyesuaian struktural dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF) yang meminta pemerintah untuk meliberalisasi dan memprivatisasi ekonominya dalam konteks disiplin anggaran yang ketat berkaitan dengan memburuknya hak integritas tubuh, hak ekonomi, dan hak sosial, khususnya hak pekerja.⁵⁹ Inilah yang persis terjadi pada kediktatoran neoliberal otoritarian di Argentina dan Chili, yang menjalankan program penyesuaian struktural dalam konteks pelanggaran hak yang meluas. Kebijakan yang paling menjanjikan dalam mengurangi ketimpangan di dalam negeri rupanya justru adalah perpajakan yang lebih progresif, termasuk usulan pajak global atas modal, dan kebijakan penyetaraan akses pendidikan.⁶⁰

Perdebatan tentang kebijakan pertumbuhan dan kesetaraan memiliki sejarah panjang di Amerika Latin yang kaum intelektualnya merupakan pencetus developmentalisme dan teori dependensi. Saat menggarap disertasi dan buku pertama, saya tertarik dengan isu HAM, tetapi dalam etos saat itu—yang masih sangat dipengaruhi Marxisme—konon jika meminati HAM, saya mesti belajar ekonomi politik.⁶¹ Pada tahun 1950-an dan 1960-an, para ekonom Amerika Latin telah mengembangkan kritik mereka sendiri atas kapitalisme. Mereka menyatakan bahwa negara-negara yang kurang berkembang menghadapi penurunan nilai perdagangan untuk produk primer dan karenanya tidak dapat berkembang lebih cepat tanpa menggunakan hambatan perdagangan dan investasi untuk mendorong industri dalam negeri, suatu model yang disebut industrialisasi substitusi impor (*import substitution industrialization*, ISI). Ekonom Amerika Latin Raúl Prebisch memimpin dua lembaga internasional yang menyerukan tatanan ekonomi yang lebih adil, Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC) dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (United Nations Conference on Trade and Development), UNCTAD). ECLAC dan UNCTAD termasuk di antara suara penting yang bekerja dengan negara-negara berkembang untuk menyerukan Tatanan Ekonomi Internasional Baru (New International Economic Order, NIEO) yang berisi serangkaian usulan untuk meningkatkan nilai perdagangan untuk produk primer, meningkatkan bantuan

pembangunan, dan mengurangi tarif di negara-negara maju. Namun pada tahun 1980-an, setelah beberapa dekade bereksperimen dengan ISI, sejumlah ekonom Amerika Latin yang progresif mulai memperhatikan bahwa tidak ada negara Amerika Latin yang berhasil mencapai sasaran pertumbuhan *dengan* kesetaraan.⁶² Sementara itu, negara-negara kurang berkembang lainnya di Asia Timur, yang menggunakan model ekonomi berbeda dengan mendorong ekspor dan berinvestasi besar dalam pendidikan, mengalami pertumbuhan yang lebih dramatis dan tingkat kesetaraan yang lebih tinggi. Keberhasilan negara-negara berjuluk “macan Asia” itu memunculkan dorongan di Amerika Latin ke arah investasi dan perdagangan yang lebih terbuka.⁶³ Sayangnya, kebijakan ini pertama kali dijalankan di bawah rezim otoriter yang represif.

Rezim demokrasi dengan kebijakan investasi dan perdagangan yang relatif terbuka dapat mengadopsi kebijakan sosial yang berdampak positif terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Di bawah pemerintahan kiri dan kiri-tengah yang terpilih secara demokratis, Brasil, Argentina, Chili, dan Uruguay melanjutkan kebijakan ekonomi berupa investasi dan perdagangan yang relatif terbuka setelah era kediktatoran. Kebijakan tersebut mendatangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi berisiko menambah ketimpangan yang sudah tinggi di wilayah tersebut. Untuk mengatasinya, pemerintah menggunakan kebijakan sosial yang inklusif, seperti kebijakan jaminan sosial dan kebijakan pendidikan, untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Misalnya, di bawah pemerintahan kiri Frente Amplio (Koalisi Besar), Uruguay menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Amerika Latin yang juga menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 4,8 persen dari 2006 hingga 2015; kemiskinan moderat turun dari 32,5 persen pada 2006 menjadi 9,7 persen pada 2015, kemiskinan ekstrem turun dari 2,5 persen pada 2006 menjadi 0,3 persen pada periode yang sama, dan tingkat pendapatan 40 persen penduduk Uruguay termiskin meningkat lebih cepat ketimbang pertumbuhan rata-rata tingkat pendapatan seluruh penduduk. Kebijakan sosial inklusif yang dampaknya paling besar di Uruguay mencakup perluasan cakupan program sosial yang sudah ada; misalnya, sekitar 87 persen penduduk berusia di atas 65 tahun kini terlindungi oleh sistem pensiun.⁶⁴ Selain itu, pemerintah menyediakan komputer laptop untuk setiap anak sekolah.⁶⁵ Saat menulis tentang mantan presiden José Mujica, bekas gerilyawan Tupamaro, Jonathan Gilbert menuturkan, “pemerintahannya memilih jalan tengah,

mendukung proyek-proyek sektor swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan melakukan intervensi sederhana untuk mendistribusikan kekayaan.”⁶⁶

Dari Uruguay kita belajar bahwa negara dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan dengan kebijakan sosial politik inklusif yang didanai kebijakan pajak yang lebih baik. Semua ini lebih realistis dalam konteks pertumbuhan ekonomi, yang juga lebih mungkin terjadi di negara-negara dengan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka. Namun ketimpangan tidak dapat dihilangkan seketika. Salah satu alasan mengapa tingkat kesetaraan Uruguay lebih baik saat ini adalah karena negara ini cukup setara sejak para reformis pertama kali mencetuskan kebijakan sosial inovatif pada abad ke-20. Seperti halnya banyak negara kecil, Uruguay berkembang dengan kebijakan investasi dan perdagangan terbuka, yang kemudian menghasilkan sumber daya untuk kebijakan sosial. Tentu saja, kebijakan sosial adalah soal kehendak politik—kehendak yang ada di Uruguay, tetapi tidak ada di negara lain. Jika kita peduli akan perbaikan kesetaraan, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan hak ekonomi dan sosial, kita perlu fokus pada bagaimana menambah dan mendorong kebijakan sosial inklusif. Dengan kata lain, berlawanan dengan anggapan pada awal 1980-an, jika ingin mempelajari HAM, penting untuk mempelajari pemerintahan dan politik, bukan hanya ekonomi. Khususnya, kita perlu memahami bagaimana meningkatkan kebijakan sosial dan perpajakan yang inklusif. Kebijakan tersebut kompatibel dengan ekonomi terbuka, seperti yang kita lihat di Uruguay dan demokrasi sosial di Eropa Barat.

Menangkal Ideologi yang Bermuatan Dehumanisasi dan Eksklusi

Literatur tentang penjelasan psikologis dan ideologis untuk pelanggaran HAM menunjukkan peran ideologi yang mendehumanisasi, serta konsep yang “mengeksklusi korban dari semesta kewajiban.”⁶⁷ Bahasa yang mendehumanisasi dan praktik lainnya yang mengeksklusi dapat menggambarkan individu dan kelompok tertentu tak layak mendapatkan perlindungan yang sewajarnya untuk manusia dan karenanya mendorong serta membenarkan pelanggaran HAM.

Ideologi yang mengeksklusi dan mendehumanisasi orang-orang tertentu adalah salah satu faktor risiko terpenting dari genosida.⁶⁸ Kasus Yazidi mengungkap luasnya ideologi dehumanisasi dalam konteks

genosida. Murad ingat bahwa sewaktu kecil, anak laki-laki lain meminta melihat “ekor” Murad. Tentu saja dia tak punya ekor, jawab Murad, Tetapi dia tak pernah melupakan ucapan itu.⁶⁹ Ini adalah contoh nyata dehumanisasi; kaum Yazidi, dalam contoh ini, digambarkan sebagai hewan. Contoh lain dari bahasa yang mendehumanisasi adalah seperti menyebut manusia sebagai kecoak (seperti di Rwanda) atau menyebutnya kanker yang harus disingkirkan dari daging masyarakat untuk menyembuhkannya.

Ideologi yang mengeksklusi adalah sistem keyakinan yang mengusung tujuan atau prinsip tertentu yang sedemikian penting sehingga digunakan untuk membenarkan persekusi atau penyingkiran kelompok yang dianggap bertentangan dengan tujuan yang dicita-citakan.⁷⁰ Ideologi tersebut, yang bisa sangat berbeda-beda, memiliki satu kesamaan: tujuan menghalalkan segala cara. Mereka menyasar kelompok dari bangsa, agama, atau ras tertentu, dan menjustifikasi pelanggaran HAM yang dianggap tak terhindarkan dalam menyasar kelompok tersebut. Tujuan mutlak ini, beserta penggunaan cara-cara brutal untuk mencapainya, mengarah pada hubungan yang mengejutkan antara utopianisme dan genosida. Dalam studi komparatifnya terhadap empat genosida—Uni Soviet di bawah Stalin, Nazi Jerman, Kamboja di bawah Khmer Merah, dan Bekas Yugoslavia—Eric Weitz berpendapat bahwa faktor ideasional dan, khususnya, pencarian utopia, merupakan inti penjelasan genosida.⁷¹

Ideologi yang mengeksklusi ini terkadang menyasar kelompok politik kiri, seperti doktrin keamanan nasional di Amerika Latin yang membenarkan pembunuhan terhadap terduga komunis, dan terkadang kelompok kanan, seperti saat rezim Pol Pot di Kamboja menggunakan ideologi Marxis untuk membenarkan pembunuhan terhadap kaum borjuis. Dewasa ini kita sering mendengar bahasa yang mendehumanisasi dan mengeksklusi digunakan terhadap terduga teroris, seperti saat calon presiden Donald Trump mengatakan bahwa negaranya harus dapat menggunakan penyiksaan untuk “menaklukkan NIIS” dan “menaklukkan kaum biadab.”⁷² Dalam ideologi yang mengeksklusi, kelompok sasaran dijadikan kambing hitam untuk berbagai masalah negara; misalnya, imigran disalahkan atas kesulitan ekonomi suatu negara. Dalam kasus Yazidi, ideologi NIIS yang mengeksklusi tampak sebagai ideologi agama. NIIS memandang cita-cita agamanya semakin terpenuhi dengan membunuh orang-orang yang dianggap kafir. Di wilayah Darfur, Sudan, para peneliti menunjukkan bagaimana negara memobilisasi ideologi rasial

untuk mendehumanisasi berbagai kelompok, dan turut memicu genosida di sana.⁷³

Jika dehumanisasi ditambah dengan kecenderungan psikologis lain yang terkait dengan represi—tendensi untuk tunduk kepada otoritas—pelanggaran HAM yang berat dapat terjadi. Eksperimen Milgram yang terkenal menunjukkan bahwa sebagian besar warga biasa di New Haven bersedia memberikan sengatan listrik kepada orang lain bila diperintahkan oleh orang yang memiliki otoritas, sekalipun korban terdengar menangis atau berhenti merespons, tampak tak sadarkan diri atau mati.⁷⁴ Namun, manusia dalam kelompok juga butuh menyesuaikan diri dengan pendapat kelompok, selain butuh tunduk pada otoritas. Keberadaan seorang pembangkang sering kali dapat mengubah tendensi individu untuk tunduk atau menyesuaikan diri. Dalam eksperimen Milgram, misalnya, saat para peneliti menempatkan individu di skenario yang menolak mematuhi perintah memberikan sengatan listrik, tingkat kepatuhan secara keseluruhan turun drastis.⁷⁵ Karena itu, kecenderungan psikologis kita dapat mendorong pelanggaran HAM sekaligus menjadi alat untuk menangkalnya.

Salah satu cara memandang gerakan HAM sama dengan para pembangkang dalam eksperimen Milgram. Dengan menentang otoritas, gerakan-gerakan ini memberikan contoh ketidakpatuhan dan dengan begitu mengurangi perasaan individu bahwa mereka terpaksa tunduk pada otoritas dan mematuhi perintah yang tidak etis atau tidak sah. Hal ini sebagian menjelaskan mengapa keberadaan lebih banyak organisasi HAM dalam suatu negara memperbaiki situasi HAM di sana.⁷⁶

Penjelasan psikologis pelanggaran HAM sering kali melengkapi dan bukan menyaingi penjelasan ekonomi dan politik. Seperti tampak pada kasus Yazidi, meski konteks perang menciptakan kondisi bagi pelanggaran HAM, keyakinan serta bahasa dan praktik NIIS yang mendehumanisasi adalah penyebab langsung dari pelanggaran tersebut. Hampir semua situasi pelanggaran HAM massal memiliki gabungan ciri seperti adanya perang dan otoritarianisme dengan mekanisme psikologis seperti dehumanisasi dan kebutuhan manusia akan konformitas dan kepatuhan pada otoritas.

Meratifikasi Konvensi HAM dan Mendorong Penegakan Hukum HAM

Selama bertahun-tahun, salah satu tuntutan dan capaian utama gerakan HAM adalah membuat deklarasi dan konvensi HAM yang lebih lengkap menyangkut berbagai isu. Terdapat banyak konvensi yang kini melindungi dan mendorong pemenuhan berbagai macam hak (lihat Gambar 6.5 dan 6.6). Jika meninjau tingkat ratifikasi sejumlah konvensi utama yang tercantum di bawah ini, tampak ada kenaikan tajam jumlah negara yang berkomitmen pada konvensi tersebut.

Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia (American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948)
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights, UDHR, 1948)
 Konvensi Genosida (Genocide Convention, 1951)
 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights, 1953)
 Konvensi Pengungsi (Refugee Convention, 1954)
 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD, 1969)
 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, 1976)
 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR, 1976)
 Konferensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (American Convention on Human Rights, 1978)
 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW, 1981)
 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT, 1987)
 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC, 1990)
 Konvensi Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, CED, 2010)
 Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court, 2002)
 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk (African Charter on Human and Peoples' Rights, 2005)
 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Disabilities Convention, 2008)
 Deklarasi tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007)

Gambar 6.5. Deklarasi dan Konvensi HAM Internasional Utama

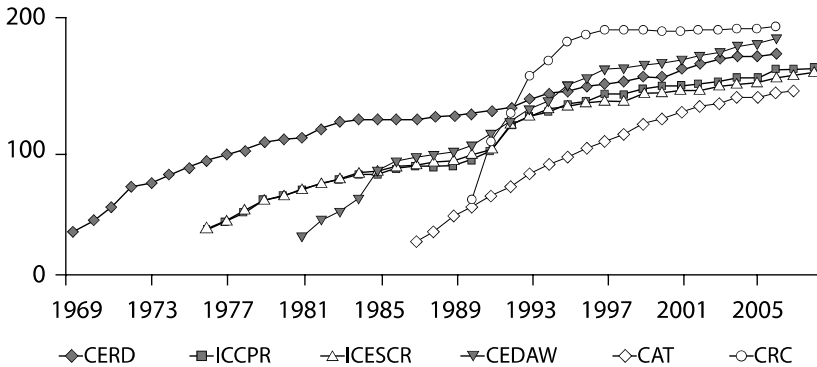
Terdapat perdebatan sengit di kalangan akademisi tentang efektivitas konvensi HAM. Karena alasan-alasan yang dibahas pada bab 5, muncul temuan-temuan bermasalah ihwal kepatuhan.⁷⁷ Beberapa studi awal menganggap bahwa konvensi HAM tidak membawa perbaikan dan, dalam beberapa kasus, malah kontraproduktif.⁷⁸ Studi gelombang kedua

mempertanyakan beberapa temuan dalam studi-studi awal tersebut. Beth Simmons memberikan kontribusi penting terhadap perdebatan ini. Studinya menunjukkan bahwa aturan dan institusi HAM berdampak positif terhadap berbagai HAM dalam kondisi tertentu, khususnya saat negara menjalani transisi politik menuju demokrasi yang lebih luas.⁷⁹ Simmons menjelaskan bahwa, di negara-negara tersebut, warga termotivasi untuk mengupayakan perubahan HAM karena mereka telah lama menjadi korban pelanggaran di bawah rezim otoritarian sebelumnya. Selain itu, sarana warga untuk mengupayakan perubahan tersebut juga tersedia karena masyarakat cukup terbuka bila mereka menggunakan hukum internasional untuk memobilisasi.⁸⁰

Di negara-negara yang sudah sepenuhnya demokratis, warga mungkin tak akan merasakan manfaat dari ratifikasi suatu konvensi. Mereka kemungkinan besar sudah punya banyak saluran untuk mengupayakan perlindungan haknya, seperti pengadilan dalam negeri, ombudsman, dan organisasi masyarakat sipil. Jadi, warga di negara-negara yang sepenuhnya demokratis lebih cenderung mengandalkan sumber daya di luar hukum internasional. Rezim yang sepenuhnya otoritarian, di sisi lain, sering kali meratifikasi konvensi HAM demi pencitraan belaka dan tak ada niat untuk mematuhi. Contohnya, pemerintahan Jenderal Augusto Pinochet, diktator Chili dari 1973 hingga 1990, meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) pada 1988. Di saat yang kurang lebih sama, Pinochet mengajukan plebisit yang membuatnya dapat berkuasa selama delapan tahun lagi. Barangkali dia menganggap bahwa ratifikasi CAT itu akan memperbaiki citranya di mata pemilih. Setelah meratifikasi konvensi itu pun, rezim Pinochet masih terus melakukan penyiksaan.⁸¹

Bagi beberapa ahli, studi yang menunjukkan bahwa aturan HAM paling berdampak di negara transisi adalah bukti bahwa gerakan HAM hanya efektif di kasus “mudah” belaka, tempat gerakan itu tak begitu diperlukan. Hafner-Burton dan Ron menyatakan, misalnya, “Dihitung-hitung, hanya sekitar 50 negara yang memulai transisi demokrasi sejak tahun 1960-an. Ini menunjukkan bahwa hanya seperempat negara di dunia yang dapat terbantu oleh aturan dan konvensi HAM internasional.”⁸² Terdapat sejumlah tanggapan terhadap klaim ini. Pertama, jika aturan HAM memang membantu di 50 negara, maka itu merupakan indikator kemajuan yang penting. Alat perubahan sosial mana yang dapat dengan cukup yakin dianggap membantu di seperempat negara di dunia? Tetapi klaim ini sebenarnya di bawah jumlah transisi sejak 1960-an dan lupa

bahwa keterbukaan politik baru itu terjadi di puluhan kasus yang sebelumnya dianggap sulit—seperti Polandia, Korea Selatan, El Salvador, dan Nigeria. Aktivisme HAM berkontribusi langsung terhadap banyak transisi politik ini.⁸³



Gambar 6.6. Jumlah negara yang telah meratifikasi enam konvensi HAM utama: Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD); Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR); Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR); Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW); Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention against Torture, CAT); dan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC). Sumber: Persatuan Bangsa-Bangsa.

Tak pelak lagi bahwa, setelah gelombang ketiga demokrasi, negara-negara sisanya adalah “kasus sulit” bagi gerakan HAM—negara-negara yang dipimpin rezim otoriter atau semi-otoriter yang sudah mengakar seperti Tiongkok, Sudan, Suriah, dan Rusia. Sebagian negara ini, seperti Rusia dan Azerbaijan, sudah belajar cara memanipulasi sistem dan tampil seolah demokratis tetapi pada saat yang sama memperkuat pemerintahan semi-otoriter. Negara lainnya, seperti Hungaria, menggunakan cara-cara demokratis untuk membuat kebijakan yang semakin otoriter. Venezuela jadi mahir menampilkan wajah demokratis untuk menutupi pemerintahan otoriter, sehingga terhindar dari kritik.⁸⁴ Para pemimpinnya “belajar cara mengelola pemilu yang kompetitif, mengooptasi saingan dan media independen, mengendalikan sektor swasta, dan membuat kelompok sipil dan oposisi kehabisan sumber daya tanpa

melakukan represi atau kecurangan secara terang-terangan yang dapat menyebabkan krisis legitimasi di dalam negeri dan isolasi internasional.”⁸⁵

Banyaknya kasus sulit itu tidak serta merta menunjukkan bahwa gerakan HAM hanya berhasil pada “kasus-kasus mudah” dan menjadi tidak penting karena hanya relevan saat tidak terlalu diperlukan. Pertama, apa yang disebut “kasus mudah” atau “kasus sulit” itu sering kali dikonstruksi belakangan (*ex post facto*). Pada 1980-an, banyak negara yang sebelumnya dianggap kasus sulit belakangan berhasil menjadi negara transisi. Contohnya, pada saat itu tak ada yang menduga Uni Soviet atau negara-negara Eropa Timur akan mulai bertransisi ke demokrasi. Analisis yang menyatakan bahwa gerakan HAM hanya berhasil pada kasus-kasus mudah dan menyertakan seluruh negara Eropa Timur dalam kategori tersebut tidaklah jujur dan ahistoris. Selama tidak ada definisi sebelumnya tentang apa itu kasus sulit dan kasus mudah, dan definisi kasus mudah tampaknya adalah sebarang negara yang bertransisi ke demokrasi dan memajukan HAM, kritik ini tidak perlu ditanggapi terlalu serius.

Riset terkini tentang kepatuhan terhadap konvensi HAM menunjukkan bahwa ratifikasi konvensi adalah alat berguna yang perlu didorong dan diupayakan oleh negara-negara. Tetapi, jangan harap ratifikasi konvensi semata dengan sendirinya akan membawa perubahan HAM. Traktat atau konvensi hanyalah satu alat dan kemampuannya dalam mendorong pemajuan HAM tergantung pada sejauh mana para aktor di badan kovenan, di PBB, di pengadilan, dan yang terpenting di masyarakat sipil dalam negeri bekerja untuk mewujudkan komitmen konvensi dalam praktik negara.

Meski belakangan kita tahu bahwa hukum HAM internasional memang memengaruhi praktik negara, belum jelas bagaimana mekanisme hubungan antara konvensi HAM dengan perbaikan kondisi HAM. Salah satu kemungkinannya adalah perubahan datang dari atas; yaitu, melalui sosialisasi di institusi-institusi internasional, para pemimpin perlahan mulai mengubah praktiknya.⁸⁶ Tetapi, para pengkritik institusi internasional seperti PBB umumnya mengeluhkan bahwa institusi tersebut membolehkan negara-negara seperti Etiopia, Rusia, atau Arab Saudi menjadi anggota, sehingga mengurangi pengaruh institusi tersebut.⁸⁷ Negara-negara dengan catatan HAM terburuk kerap gencar melakukan upaya diplomatik agar terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB guna menangkal kecaman terhadap praktik HAM di dalam negara mereka. Saat negara-negara represif tersebut bersatu untuk saling melindungi,

saat itulah terjadi momen paling hipokrit dari Dewan PBB ini. Pada saat yang sama, studi Ann Marie Clark menunjukkan bahwa kritik atas praktik negara di Dewan tersebut dapat berdampak positif terhadap HAM di negara yang dikritik, setidaknya di negara-negara yang telah meratifikasi konvensi terkait.⁸⁸ Riset Clark adalah yang pertama kali menunjukkan bahwa institusi yang paling politis seperti Dewan HAM sekalipun dapat membawa perubahan positif dalam kondisi tertentu.

Kemungkinan penjelasan kedua dan yang lebih meyakinkan tentang bagaimana konvensi HAM dapat berdampak positif terhadap HAM adalah bahwa kekuatan hukum internasional ditentukan oleh kemampuannya untuk memengaruhi perubahan dari bawah, yakni, dari dalam suatu negara itu sendiri.⁸⁹ Misalnya, dalam *Activists beyond Borders*, Margaret Keck dan saya berpendapat bahwa gerakan sosial setempat di masyarakat yang represif sering kali adalah yang pertama kali mengorganisasi diri dan mereka menggunakan alat hukum yang tersedia, termasuk hukum internasional, untuk melindungi diri sekaligus memprakarsai perubahan. NGO dan gerakan sosial di dalam negeri ini juga mengandalkan sekutu lintas negara dan dukungan internasional untuk menjalankan kegiatannya. Realitasnya kemungkinan adalah gabungan dari kedua penjelasan di atas—berbagai kelompok tidak bekerja secara kaku dari atas atau bawah saja, tetapi sering kali menggabungkan taktik dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah untuk memajukan HAM.

Beth Simmons mengembangkan teori politik dalam negeri yang berkaitan dalam menjelaskan kepatuhan terhadap konvensi. Menurut teori ini, kelompok-kelompok yang terdorong oleh komitmen negara terhadap kovenan HAM menggunakan kovenan tersebut untuk mengubah agenda kebijakan nasional, mengajukan gugatan di pengadilan dalam negeri guna mendesak perlindungan hak yang baru dijamin, serta terlibat dalam upaya-upaya mobilisasi sosial. Litigasi dan mobilisasi adalah mekanisme yang sangat penting dalam memajukan HAM dan karena itu sisa bab ini akan membahas keduanya.

Mengakhiri Impunitas melalui Penuntutan Dalam Negeri dan Internasional

Kekuatan akuntabilitas telah menjadi fokus penelitian saya dengan sejumlah rekan selama lebih dari satu dekade.⁹⁰ Kaitan antara akuntabilitas dan HAM terbukti sangat erat hingga saya yakin bahwa impunitas

itu sendiri merupakan penyebab pelanggaran HAM. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai akomodasi antara kebutuhan kekuasaan dengan tuntutan keadilan.⁹¹ Mekanisme akuntabilitas memungkinkan mereka yang terdampak oleh tindakan penguasa untuk menuntut penguasa agar menjelaskan tindakannya dan diberi sanksi jika tindakan tersebut ilegal. Kegagalan dalam menjaga akuntabilitas atas tuntutan keadilan yang absah akan mengikis kepercayaan publik. Sebagian ahli membahas dua jenis akuntabilitas: lunak (mendesak penguasa menjelaskan tindakannya) dan keras (menghukum kinerja yang buruk atau melanggar hukum).⁹² Sebagian ahli lainnya merinci berbagai cara menanggapi penyalahgunaan kekuasaan dalam politik internasional, seperti tindakan hukum, pasar, sesama negara, dan reputasi.⁹³ Tidak ada metode tunggal yang dapat menyelesaikan semua masalah impunitas. Justru diperlukan berbagai mekanisme akuntabilitas untuk mengatasi berbagai jenis masalah impunitas dan untuk dapat saling memperkuat mekanisme tersebut.

Analisis terbaru berdasarkan himpunan data National Science Foundation oleh tim peneliti kami menunjukkan bahwa akuntabilitas pidana individu perlu menjadi bagian sentral rekomendasi kebijakan saya dalam memperbaiki praktik HAM utama.⁹⁴ Riset kuantitatif saya bersama Hun Joon Kim tentang penuntutan HAM di dalam negeri, misalnya, menunjukkan bahwa negara-negara yang menggunakan pengadilan semacam itu mengalami perbaikan dalam tingkat represi dibandingkan negara-negara yang tidak menggunakan pengadilan.⁹⁵ Sebagian besar rekomendasi yang saya bahas sebelumnya, seperti mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan atau mengakhiri konflik, memerlukan perubahan struktural yang mendalam di masyarakat yang memerlukan waktu lama dan sumber daya besar. Menghapuskan impunitas memang tidak mudah, seperti tampak dalam kasus penuntutan pertanggungjawaban atas genosida di Guatemala yang dibahas pada bab 4. Tetapi hal ini dapat menjadi kebijakan yang konkret, terfokus, dan relatif rendah biayanya dibandingkan perubahan struktural masif yang disarankan pada bab ini.

Pada umumnya, negara harus, dan sering kali sudah, menggunakan pengadilan dalam negeri untuk menegakkan hukum di dalam negeri maupun internasional. Misalnya, saat Argentina meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, pengadilan dalam negeri menggunakan ketentuan di Konvensi tersebut untuk membantu keluarga menemukan anak korban penghilangan paksa. Di Amerika Serikat, pengadilan federal memiliki alat

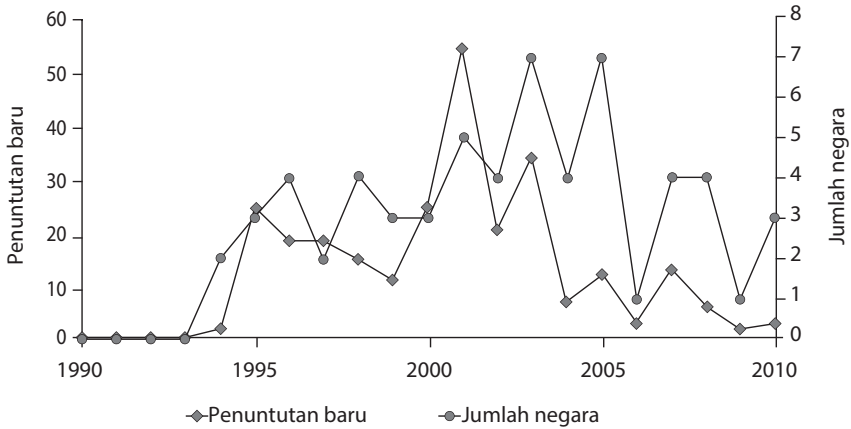
yang lengkap untuk menuntut pejabat pemerintahan Bush atas penyiksaan, jika badan eksekutif dan legislatif mengizinkannya.

Akuntabilitas penting karena dapat membantu menegakkan supremasi hukum, dan dengan begitu juga memperkuat demokrasi. Ada banyak definisi supremasi hukum, tetapi semuanya menekankan perlunya peradilan yang independen. Unsur penting lain dari supremasi hukum adalah tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pemimpin negara. Penuntutan HAM terhadap pejabat negara yang berkuasa dapat menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan membentuk kepercayaan terhadap supremasi hukum. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa supremasi hukum harus lebih dulu ditegakkan sebelum suatu negara dapat mengupayakan akuntabilitas.⁹⁶ Dalam model ini, pembentukan peradilan yang independen harus menjadi langkah pertama sebelum langkah-langkah akuntabilitas lainnya. Namun perubahan biasanya tidak terjadi dalam urutan yang kaku seperti ini. Peradilan yang independen tercipta ketika hakim dan pengadilan berupaya menjalankan dan memperluas otonominya. Di beberapa negara, penuntutan HAM menjadi sarana bagi hakim dan pengadilan untuk mengembangkan hukum dan publik pun mengetahui bahwa hukum dapat menjadi alat perubahan sosial. Catalina Smulovitz, misalnya, berpendapat bahwa pengadilan junta di Argentina berkontribusi terhadap “penemuan hukum” di negara tersebut.⁹⁷

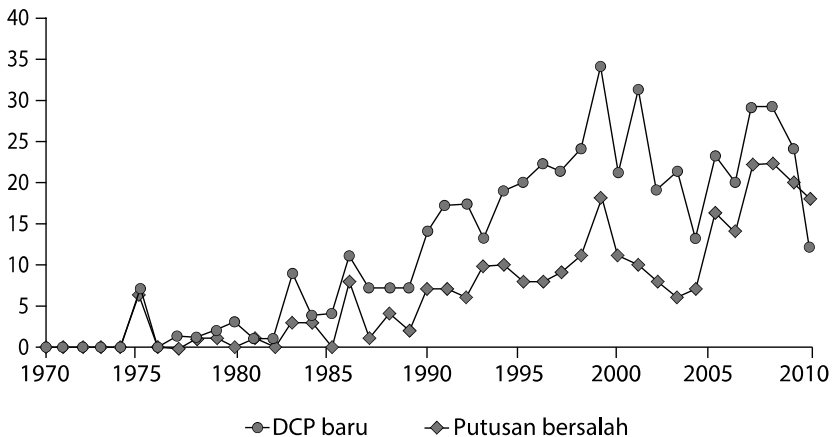
Banyak studi berulang kali menemukan bahwa pengadilan dalam negeri yang kuat, kadang didorong oleh jaringan hukum tingkat kawasan dan internasional, dapat memperbesar dampak dari komitmen internasional.⁹⁸ Beberapa ahli bahkan menyatakan bahwa sekat antara sumber hukum internasional dan domestik sudah mulai terkikis.⁹⁹ Geoff Dancy dan saya menunjukkan bahwa ratifikasi konvensi dengan ketentuan akuntabilitas individu secara empiris berkaitan dengan penuntutan HAM yang lebih tinggi.¹⁰⁰ Penuntutan HAM ini—termasuk pengadilan tingkat tinggi untuk para pemimpin seperti Alberto Fujimori dari Peru dan pasukan keamanan berpangkat rendah—kemudian mendatangkan perbaikan dalam praktik HAM melalui gabungan pencegahan dan komunikasi normatif.¹⁰¹

Tahun 1990-an adalah dekade yang saya sebut kaskade keadilan.¹⁰² Ini adalah periode ketika, untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara-negara mulai menuntut pertanggungjawaban pejabat negara dan kelompok non-negara secara pidana atas pelanggaran HAM masa lalu. Kabar baiknya

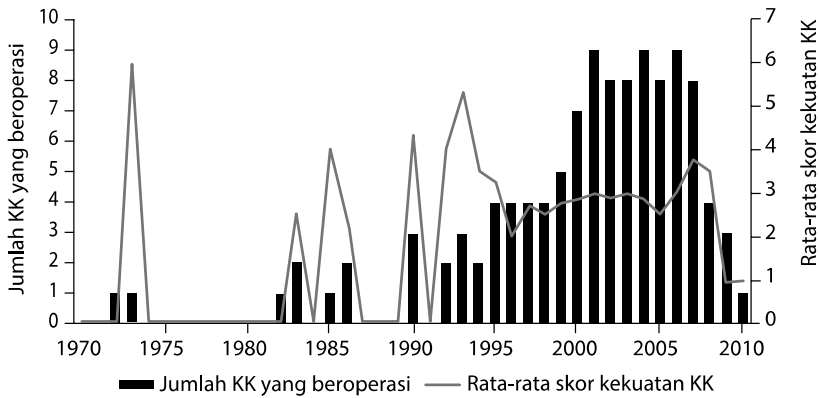
bagi HAM di seluruh dunia adalah akuntabilitas jadi lebih umum dan impunitas jadi menurun. Gambar 6.7, 6.8, dan 6.9 menunjukkan naiknya penuntutan HAM dari waktu ke waktu, serta makin banyaknya komisi kebenaran, yang juga dapat menjadi alat untuk mengakhiri impunitas jika kualitasnya tinggi.¹⁰³



Gambar 6.7. Penuntutan internasional (semua negara). *Sumber:* Diadaptasi dari bagan Geoffrey Dancy untuk Transitional Justice Research Collaborative website (<https://www.transitionaljusticedata.com>) menggunakan data dari Transitional Justice Collaborative yang didanai NSF.



Gambar 6.8. Tuntutan pidana dalam negeri (domestic criminal prosecutions, DCP) dan putusan bersalah pada masa transisi. *Sumber:* Diadaptasi dari bagan Geoffrey Dancy untuk Transitional Justice Research Collaborative website (<https://www.transitionaljusticedata.com>) menggunakan data dari Transitional Justice Collaborative yang didanai NSF.



Gambar 6.9. Jumlah dan kekuatan komisi kebenaran (KK). Sumber: Diadaptasi dari bagan Geoffrey Dancy untuk Transitional Justice Research Collaborative website (<https://www.transitionaljusticedata.com>) menggunakan data dari Transitional Justice Collaborative yang didanai NSF.

Kaskade keadilan mendorong para korban pelanggaran HAM di seluruh dunia untuk menyerukan keadilan. Misalnya, Murad dan Nadia berharap agar kasus Yazidi dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Mereka tahu bahwa terdapat sejumlah hambatan untuk itu. Karena Irak belum meratifikasi Statuta Roma dari ICC, satu-satunya cara kasus Yazidi secara keseluruhan dapat dibawa ke Mahkamah tersebut adalah jika Dewan Keamanan mengajukannya. Murad dan Nadia sudah diminta berbicara kepada para anggota Dewan Keamanan dalam sebuah pertemuan khusus tentang perdagangan manusia yang disiapkan oleh Samantha Power, Perwakilan Tetap AS untuk PBB pada saat itu. Mereka sudah berbicara dengan duta besar Prancis, yang mengaku siap menyampaikan kasus tersebut keesokan harinya ke Dewan Keamanan, jika yakin akan mendapatkan dukungan. Tetapi Rusia kemungkinan akan memveto dan begitu juga dengan Tiongkok. Amerika Serikat juga, meski mendukung keadilan, telah lama menentang ICC dan karenanya sulit memberikan dukungan untuk mengangkat kasus ini. Amerika Serikat lebih memilih membuat pengadilan internasional hibrida khusus untuk situasi di Irak, dan kemungkinan juga di Suriah. Namun Nadia dan Murad merasa bahwa sistem peradilan dalam negeri di Irak tidak dapat diandalkan dan mereka pun berharap kepada ICC. Meski pengadilan mana pun takkan dapat mengembalikan anggota keluarga mereka yang telah tiada,

mereka berharap upaya mereka mencari keadilan akan dapat mencegah kekejaman di masa mendatang.

Mendukung, Memperluas, dan Melindungi Mobilisasi HAM

Organisasi HAM dalam negeri yang berkomitmen adalah benteng pertama dan paling utama terhadap pelanggaran HAM. Organisasi ini memiliki pengetahuan dan legitimasi untuk melakukan intervensi secara efektif dalam politik domestik. Tetapi kelompok-kelompok domestik ini tidak bekerja sendiri. Organisasi semacam itu kerap meminta bantuan jaringan advokasi transnasional dan menggunakan proses hukum transnasional untuk mengupayakan perbaikan HAM sekaligus melindungi dirinya sendiri, khususnya ketika gerakan mereka masih direpresi.¹⁰⁴ Penyebutan “transnasional” di sini bukan berarti bahwa perubahan hanya dimungkinkan oleh kelompok internasional atau tekanan dari atas saja. Transnasional bukanlah sinonim internasional; melainkan relasi yang lintas batas dan menghubungkan upaya-upaya nasional di berbagai tempat. Bersama berbagai rekan, saya menggunakan istilah “model bumerang” dan “model spiral” untuk menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok domestik keluar dari masyarakatnya untuk menekan pemerintah mereka dari atas. Dalam metafora bumerang, organisasi melemparkan bumerang ke luar negaranya dengan harapan bumerang itu akan kembali dan menghantam pemerintahnya. Model spiral adalah bumerang yang diperluas—model ini memperhitungkan bahwa kampanye semacam itu memerlukan upaya untuk memberikan tekanan dalam negeri dan internasional. Model-model ini tidak sepenuhnya dari atas ke bawah atau pun dari bawah ke atas; tetapi, semuanya menunjukkan bagaimana kelompok dalam negeri kerap memprakarsai perubahan, dan kemudian membangun koalisi transnasional untuk membantu menjalankan rencananya.¹⁰⁵

Sejak akhir 1990-an, banyak penelitian tentang kerja advokasi NGO menyoroti tindakan yang berkonotasi peyoratif yaitu “*namings and shaming*” (tunjuk hidung dan permalukan). Saya tidak pernah menyukai istilah ini dan tidak menggunakannya sama sekali dalam *Activists beyond Borders*. Margaret Keck dan saya justru memandang bahwa cara kerja utama jaringan transnasional adalah melalui “politik informasi”—menghasilkan informasi yang relevan secara politik dan membawanya ke tempat yang kemungkinan dampaknya paling besar. Tujuan politik informasi tidak mesti untuk mempermalukan, tetapi lebih untuk menyoroti praktik-praktik yang perlu diperbaiki oleh pemerintah atau aktor non-negara. Tetapi, istilah

naming and shaming sudah kadung populer dan kebanyakan studi akademis tentang politik informasi menggunakannya. Apa pun sebutannya, cara ini kerap berhasil. Tetapi mempermalukan saja tidak cukup. Perbaikan dalam praktik HAM terjadi ketika *naming and shaming* dilakukan oleh jaringan yang memiliki koneksi dengan NGO HAM di dalam negara sasaran.¹⁰⁶

Beberapa ahli telah melakukan pengujian yang berguna dan cang-gih terhadap argumen yang dikemukakan dalam karya kualitatif awal tentang advokasi. Misalnya, studi mendalam Amanda Murdie antara lain membahas dampak aktor masyarakat sipil global, khususnya NGO internasional dan taktiknya.¹⁰⁷ Murdie menemukan dampak positif dari kampanye informasi terarah, khususnya ketika terdapat kelompok yang juga mendorong perubahan HAM di dalam negara sasaran.¹⁰⁸ Dia juga menemukan sejumlah “efek sekitar” (*neighborhood effects*) ketika NGO yang aktif di negara tetangga dapat memberi dampak lintas batas. Kampanye informasi, dari NGO dalam negeri maupun internasional, memperbaiki praktik dan mengubah standar dalam menilai negara-negara yang melanggar HAM.

Organisasi HAM juga harus belajar menjadi aktor yang lebih efektif. Politik informasi dan *naming and shaming* mungkin tidak selalu merupakan cara paling efektif dalam mengupayakan perubahan. Salah satu cara agar NGO dapat lebih efektif adalah dengan mempertimbangkan siapa yang benar-benar mengambil keputusan tentang kepatuhan terhadap hukum HAM dan memusatkan aktivisme mereka pada pengambil keputusan tersebut. Mendesak negara agar mematuhi kewajiban untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan, misalnya, berbeda dengan mencari cara agar NIIS berhenti melakukan genosida terhadap kaum Yazidi. Masing-masing memerlukan pendekatan yang bernuansa.

Biasanya, kita menganggap negara sebagai sumber segala keputusan pemenuhan HAM, tetapi ini adalah khayalan hukum. Berbagai macam aktor bertanggung jawab atas pelanggaran atau pemenuhan hak. Misalnya, kelompok pemberontak dapat melanggar hak, seperti genosida terhadap kaum Yazidi oleh aktor non-negara, NIIS. Terkadang, di perusahaan transnasional atau bahkan keluarga, keputusan pemenuhan HAM perlu diambil. Mekanisme yang tepat untuk mendorong kepatuhan pada hukum HAM tergantung pada sifat para aktor. Sekalipun ketika keputusannya tampak dibuat oleh negara, keputusan kepatuhan yang sebenarnya boleh jadi lebih atau kurang terpusat. Keputusan untuk menghapuskan hukuman mati cukup terpusat, misalnya. Di sisi lain, penyiksaan dapat

terdesentralisasi, tersebar di banyak kantor polisi atau barak militer.¹⁰⁹ Lokasi banyak keputusan pemenuhan hak ekonomi boleh jadi bahkan ada di sektor swasta.¹¹⁰ Meski negara berkewajiban melindungi perempuan dari diskriminasi pekerjaan, lokasi keputusan pemenuhannya di pekerjaan sektor publik berbeda dengan di pekerjaan sektor swasta. Negara hanya dapat menerapkan secara langsung kebijakan non-diskriminasi di sektor publik dan harus menggunakan insentif dan sanksi untuk menghindarkan diskriminasi di sektor swasta. Itulah sebabnya, ketika Simmons menguji dampak Konvensi Perempuan (CEDAW) terhadap pekerjaan perempuan, dia menggunakan data pekerjaan perempuan dari sektor publik dan bukan sektor swasta.¹¹¹ Lebih realistis jika mengharapkan konvensi HAM yang diratifikasi suatu negara berdampak terhadap aparaturnya.

Demikian halnya, meski hukuman lewat pengadilan dapat berdampak terhadap pejabat negara yang melakukan represi, tidak berarti bahwa hukuman atau pencegahan akan ampuh untuk segala jenis perubahan HAM.¹¹² Efektivitasnya bergantung pada lokasi keputusan kepatuhan dan jenis individu yang mengambil pilihan melanggar HAM atau tidak. Berbagai jenis aktor dapat terpengaruhi oleh berbagai mekanisme. Ambil contoh, misalnya, sunat perempuan yang umumnya dipraktikkan di desa kecil atas seizin keluarga, yang percaya bahwa hal itu adalah hal terbaik bagi putrinya karena dengan begitu mereka dapat dinikahi. Tak masuk akal jika mencoba menghentikan praktik tersebut dengan menunjuk hidung atau menghukum pemerintah yang sudah melarang praktik tersebut. Taktik yang berfokus pada respons lokal lewat pendidikan keluarga dan masyarakat serta upacara jauh lebih efektif dalam mengurangi banyaknya praktik ini.¹¹³

Perhatian pada lokasi keputusan pemenuhan HAM dapat membantu kita mengembangkan taktik yang lebih efektif guna mengupayakan perubahan HAM. Meski *naming and shaming* telah menjadi taktik yang paling umum dan paling disoroti di banyak kalangan aktivis HAM, itu bukan dan tidak mesti jadi satu-satunya taktik, atau bahkan taktik utama yang digunakan. NGO sadar akan perlunya inovasi dan terus mengembangkan program, seperti “Taktik-taktik baru dalam HAM” (New Tactics in Human Rights), yang mencari pendekatan baru dalam melakukan kerja-kerja HAM lalu mendorong para aktivis untuk menuliskan metodenya dan melatih aktivis lain. Begitu juga, pemetaan taktik merupakan teknik yang membantu para aktivis menyusun strategi terkait lokasi keputusan kepatuhan pada hukum HAM, kemudian merancang intervensi yang

lebih efektif, yaitu, tindakan yang ditujukan terhadap individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM.¹¹⁴

Aktivisme HAM hanyalah salah satu dari banyak faktor yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan HAM; faktor lainnya di antaranya adalah pembangunan ekonomi, demokrasi politik, serta tidak adanya perang saudara dan perang antarnegara. Berbagai studi, dengan perbendaharaan data terbaik tentang topik ini, telah menunjukkan bahwa kita dapat optimis sewajarnya terhadap dampak dari kerja-kerja NGO HAM internasional, namun demi keberhasilan yang lebih besar, politik informasi perlu digabungkan dengan upaya-upaya untuk membangun sektor advokasi dalam negeri yang kuat, seraya memberikan tekanan dari luar.

Organisasi HAM menggunakan teknologi baru untuk menciptakan berbagai bentuk politik informasi yang kian beragam. Politik informasi memicu reaksi balik dari pemerintah yang represif, yang kemudian berupaya menyembunyikan bahaya tersembunyi serta menyerang dan men-delegitimasi NGO HAM. Dengan mengandalkan teknologi yang lebih canggih, seperti citra satelit, platform digital, dan ilmu forensik, gerakan HAM dapat melanjutkan politik informasi menghadapi sikap keras pemerintah. Organisasi HAM sudah mengandalkan citra satelit pengintai untuk mencari kuburan massal dan tanda-tanda peringatan kekejaman massal lain di wilayah-wilayah yang mungkin terlalu berbahaya untuk diakses lewat investigasi lapangan biasa. Organisasi-organisasi juga menggunakan *platform* digital untuk mengumpulkan data tentang pelanggaran HAM di zona perang, seperti upaya Syria Tracker yang menggunakan materi *crowd-source* untuk membuat peta konflik secara langsung.¹¹⁵

Perlawanan damai yang meluas lebih efektif dalam membantu mendesak kejatuhan pemerintahan diktator ketimbang perlawanan bersenjata.¹¹⁶ Karena itu, proses-proses perlawanan damai berpotensi mengubah capaian HAM. Pertanyaan bagi para peneliti HAM adalah apa peran advokasi hak dalam mendorong dan mendukung kantong-kantong perlawanan yang efektif untuk gerakan sosial. Kaum yang skeptis berpendapat bahwa gerakan HAM tercerabut dari massa dan legalismenya menyingkirkan bentuk-bentuk aktivisme lainnya.¹¹⁷ Tetapi, bukti awal menunjukkan bahwa gerakan sosial damai yang mengusung klaim berbasis hak relatif berhasil dalam mendorong pemerintahan otoriter ke arah transisi demokrasi, suatu prakondisi bagi pemajuan capaian HAM.¹¹⁸

Salah satu klaim favorit kaum skeptis HAM, dan ilmuwan sosial pada umumnya, adalah bahwa tindakan dengan maksud baik akan memperbesar kemungkinan “konsekuensi negatif yang tak dikehendaki.”¹¹⁹ Ilmuwan sosial sudah banyak melakukan studi penting yang menunjukkan bahwa kalangan yang mendukung pelanggaran itu memang ada, dan mereka akan bereaksi negatif terhadap upaya-upaya untuk melindungi HAM individu tertentu.¹²⁰ Tetapi, seperti ditunjukkan Hirschman, meski kita perlu memperhatikan kemungkinan konsekuensi yang tak dikehendaki, kita tak boleh berasumsi bahwa konsekuensi semacam itu akan selalu negatif.¹²¹ Konsekuensi HAM yang tak dikehendaki itu boleh jadi negatif atau positif. Capaian HAM selalu diperoleh lewat pergulatan dan hampir selalu memicu reaksi. Kadang, risiko konsekuensi negatif yang tak dikehendaki itu mungkin sepadan dengan hasilnya.¹²²

Ilmuwan politik atau pegiat HAM tidak boleh naif soal waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mengupayakan perubahan HAM. Contohnya, mengharapkan Mesir dapat beralih dari otoritarianisme ke demokrasi dengan mulus pada 2011 tidaklah realistis. Tetapi menganggap bahwa upaya para aktivis Mesir dalam menuntut demokrasi atau HAM itu terlalu dini sehingga memicu reaksi dan sebaiknya dipilih strategi yang lebih gradual itu adalah anggapan spekulasi kontrafaktual. Tanpa tuntutan itu, kesempatan terjadinya transformasi politik itu sendiri tak akan pernah ada.

Isu utama lain dalam bahasan seputar aktivisme HAM adalah pendanaan asing. Secara etis dan politis, perlukah kita khawatir bahwa sebagian besar pendanaan untuk organisasi HAM di Kawasan Selatan Dunia berasal dari yayasan asing dan pemerintah asing? Banyak negara di Kawasan Selatan Dunia mungkin kurang memiliki tradisi donasi amal dan donasi yang ada cenderung disalurkan pada lembaga tradisional seperti gereja atau masjid.¹²³ Sebelum 1980-an, pemerintahan dan yayasan di Barat menyalurkan hampir semua dana bantuannya untuk pemerintahan dan lembaga pemerintah, bahkan pemerintah represif. Aktivis HAM mengkritik negara Barat yang makmur karena mendukung pelanggaran HAM, mendesak mereka menghentikan pendanaan terhadap pemerintah yang opresif.¹²⁴ Dari sudut pandang pembayar pajak di negara-negara Kawasan Utara Dunia, kita mungkin lebih berharap anggaran bantuan luar negeri kita disalurkan untuk organisasi masyarakat sipil dan bukan negara-negara represif. Alih-alih menganggap pendanaan asing tidak sah, kita menganggapnya sebagai kompensasi atas kesalahan di masa lalu.

Sekalipun diakui bahwa pendanaan asing untuk organisasi masyarakat sipil HAM mungkin diperlukan dan sah, pendanaan semacam itu tetap problematis bagi NGO dan mereka perlu mengatasi masalah tersebut. Pendorong asing yang bermaksud baik sekalipun dapat mengacaukan prioritas NGO dalam negeri dengan merusak independensi mereka dan mengendalikan agenda mereka. Dalam skenario yang lebih buruk, dana asing juga memunculkan banyaknya “NGO koper”, atau “organisasi abal-abal yang hanya ada di atas kertas dan tak banyak memberikan pelayanan. Dalam sebuah studi terkini, para surveyor menemukan bahwa sekitar 75% dari NGO yang terdaftar di ibukota Uganda, Kampala, tidak benar-benar ada.”¹²⁵ Aktivis HAM Meksiko Sergio Aguayo juga memperhatikan tren ini saat dia berbicara mengenai NGO HAM “palsu” baru yang bermunculan di Meksiko; mereka telah “merusak konsep NGO dan HAM.” NGO HAM palsu semacam itu bukan hanya tidak memberikan layanan, tetapi justru memberi selubung bagi kelompok-kelompok yang menentang ide-ide HAM.¹²⁶

Namun, sekalipun dengan organisasi HAM yang sesungguhnya, pendonor asing secara kelembagaan mensyaratkan pelaporan dan pengelolaan keuangan yang dapat memunculkan sistem dua kelas antara NGO di Kawasan Utara dan Selatan Dunia. Organisasi yang berbasis di Kawasan Utara Dunia masih menerima sebagian besar dana dari yayasan HAM dan “kekuatan mereka masih tidak seimbang saat menetapkan agenda internasional ... bukannya melalui proses kolaboratif bersama NGO dari Kawasan Selatan Dunia.”¹²⁷

Akademisi-aktivis Kolombia César Rodríguez-Garavito, pendiri dan Direktur Eksekutif Dejusticia, salah satu Organisasi HAM paling penting di kawasan itu, berkomitmen membangun jembatan di komunitas HAM global, antara aktivis dan akademisi, antara ilmu hukum dan ilmu sosial, antara Kawasan Utara dan Selatan Dunia, serta antara negara-negara di Kawasan Selatan Dunia. Rodríguez-Garavito dan Lab HAM yang dipimpinnya di University of los Andes, saat menganalisis kritik terhadap hukum, institusi, dan gerakan HAM, sampai pada kesimpulan yang agak optimis. Tetapi, bila ditanya mana di antara banyak kritik yang paling dekat dengan pengalamannya bersama Dejusticia, NGO yang berbasis di Bogotá, dia menunjukkan “hubungan vertikal dan dari atas ke bawah antara organisasi di kawasan utara dunia dengan organisasi di kawasan selatan dunia.” Menurutnya, hal itu “tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM.” Rodríguez-Garavito tak habis pikir, misalnya, mengapa

bidang HAM tidak memiliki praktik standar penulisan laporan bersama. Tetapi yang terpenting menurutnya adalah “banyak energi dan peluang untuk menjadi lebih efektif yang kemudian terbuang sia-sia karena model non-kolaborasi.”¹²⁸

Di seluruh dunia, NGO yang lebih besar dan lebih profesional cenderung menerima sebagian besar dana asing karena mereka memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengelola dana tersebut. Di Turki, misalnya, pendanaan Uni Eropa terhadap NGO telah meningkatkan otonomi dan kapasitas NGO, tetapi juga telah menyebabkan “profesionalisasi yang berlebihan” (*over-professionalization*) dan terkikisnya kesukarelaan.¹²⁹ Hal ini dapat membuat kelas NGO profesional tercerabut dari gerakan sosial akar rumput. Kadang, kekhawatiran tersebut boleh jadi berlebihan; alih-alih tercerabutnya NGO dari gerakan sosial, yang kita lihat adalah pembagian kerja yang efektif antara keduanya, kadang disengaja dan kadang tidak disengaja.¹³⁰ Kolega asal Meksiko, Karina Ansolabehere, menyebutnya “multi-direksionalitas” antara elit dan aktor akar rumput dan menunjukkan bahwa hal tersebut kemungkinan akan lebih banyak dalam waktu dekat.¹³¹

Lucia Nader sudah membahas soal ini di Brasil. Dia ingat bahwa suatu ketika dari balik kantor NGO-nya, dia dan rekannya melihat ke jalanan, ada unjuk rasa yang tidak mereka bantu organisir dan bahkan tidak mereka ketahui akan terjadi. Saat itu dia merasakan semacam jurang terbuka lebar antara realitasnya dengan realitas para pengunjuk rasa di jalanan. Seorang jurnalis yang meliput unjuk rasa itu membesarkan hatinya: “Orang seperti kalian itu ada sebelum dan setelah aksi jalanan.” Maksudnya, unjuk rasa itu sementara, sedangkan organisasi HAM bekerja terus-menerus untuk mewujudkan ide-ide yang disuarakan dari jalanan. Namun Nader tetap khawatir NGO jadi terlampau profesional dan “padat”. Kepadatan semacam itu dapat menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan di tengah apa yang Nader sebut sebagai dunia unjuk rasa jalanan dan media sosial yang “cair”. Menurutnya, organisasi HAM harus berjuang setiap hari untuk dapat menjadi “cukup padat untuk berdiri dan berdampak seraya tetap cukup ‘cair’ untuk beradaptasi, mengambil risiko dan memanfaatkan peluang yang diberikan masyarakat kontemporer.”¹³² Masalah-masalah semacam itu tidak hanya ada di Kawasan Selatan Dunia, tetapi juga ada dalam kesenjangan antara NGO profesional dan gerakan akar rumput di Amerika Serikat dan Eropa, tetapi pendanaan asing dapat memperburuk masalah ini dengan memunculkan

reaksi nasionalis dari kelompok kiri dan kanan yang merasa kepentingan dalam negerinya terancam dikacaukan.

Meski problematis, tak banyak aktivis atau akademisi yang berpendapat bahwa dana asing mesti dihentikan.¹³³ Yang paling banyak diusulkan justru adalah memperbanyak keragaman, ada sebagian organisasi yang beralih ke pendanaan lokal, dan ada sebagian lainnya yang tetap menerima dukungan dari luar. NGO yang berkewajiban mencari pendanaan lokal harus lebih terlibat dalam membina konstituen dalam negeri untuk kegiatannya dan, dengan begitu, lebih terhubung dengan kebutuhan dan kekhawatiran khalayak lokal. Gerakan HAM perlu membangun konstituen dalam negeri yang lebih kuat. Hal ini perlu menjadi prioritas khususnya bagi organisasi HAM di masyarakat yang dipimpin pemerintahan yang lebih demokratis dan tidak beroperasi dalam situasi ketakutan dan ketidakpastian.

Kesimpulan

Bab ini memberikan rekomendasi dalam memperjuangkan keberhasilan HAM pada abad ke-21 berdasarkan survei riset ilmu sosial tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Meski saya terutama menyoroti faktor risiko represi dan genosida, banyak faktor yang saya ulas—pe-rang, otoritarianisme, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ideologi yang mengeksklusi—juga merupakan faktor risiko bagi banyak macam pelanggaran hak lainnya, seperti pelanggaran hak ekonomi dan sosial.

Pengetahuan kita tentang faktor-faktor risiko itu saya gunakan untuk membuat rekomendasi kebijakan berisi metode yang paling menjanjikan untuk memajukan HAM. Saya juga memaparkan informasi tren perkembangan terkait faktor-faktor risiko penting, seperti data penurunan konflik di dunia, naiknya demokrasi, menurunnya impunitas, serta merebaknya gerakan sosial dan NGO HAM. Perbaikan di bidang-bidang ini menunjukkan hubungan antara faktor risiko dan menurunnya beberapa pelanggaran HAM.

Rekomendasi yang dijabarkan di sini mungkin tampak menggentarkan—membangun demokrasi, mengurangi konflik, serta mendorong pertumbuhan dan kesetaraan adalah beberapa tantangan terbesar yang kita hadapi dewasa ini. Namun, sebagaimana ditunjukkan data tren, kita tidak memulai dari nol. Banyak di antara proses tersebut yang sudah berjalan dan tantangannya bukanlah membangunnya tetapi mempertahankan

tren yang sudah ada. Tetapi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Beberapa ahli menganggap bahwa tugas-tugas tersebut perlu dijalankan dalam urutan khusus—misalnya, kita perlu pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kita dapat menggarap demokrasi, atau kita perlu supremasi hukum terlebih dahulu, baru setelah itu kita dapat menjaga akuntabilitas. Buku Scott Straus tentang Rwanda, misalnya, menunjukkan bahwa pemilu yang diselenggarakan dalam suasana konflik etnis yang intens dan tanpa lembaga peradilan dan supremasi hukum yang mapan itulah yang menyebabkan konflik membesar, bukan demokrasi.¹³⁴ Dari contoh ini, upaya-upaya membangun supremasi hukum perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pemilu demokratis. Namun demikian, studi ilmu-ilmu sosial di berbagai negara belum menunjukkan adanya urutan istimewa dalam mewujudkan demokrasi, pembangunan, supremasi hukum, perdamaian, dan HAM. Lagi pula, gagasan bahwa suatu negara mesti mengukuhkan supremasi hukum dan mengakhiri konflik etnis sebelum dapat menyelenggarakan pemilu tampak seperti resep yang menguntungkan para otokrat untuk menghindari perubahan. Kita dapat bersikap kritis terhadap kebijakan, kadang dianggap dari Amerika Serikat, yang mendorong pokoknya harus pemilu apa pun situasinya. Namun dalam praktiknya, belum ada contoh spesifik yang menunjukkan bahwa desakan Amerika Serikat untuk mendorong pemilu benar-benar memunculkan masalah. Apakah kita dapat mengatakan bahwa Amerika Serikat terlalu bersikeras mendorong pemilu di Mesir, misalnya? Sebenarnya, akan tampak bahwa rakyat Mesir di jalanan itulah yang mendesak pemilu. Masalah kebijakan biasanya adalah komitmen terhadap demokrasi yang terlalu kecil, bukan terlalu besar. Masalah lebih besar di Mesir yang tampak pada akhirnya adalah komitmen terhadap demokrasi yang terlalu tipis, baik dari sebagian rakyat Mesir yang mendukung kudeta terhadap Morsi maupun kekuatan asing yang gagal berbuat lebih banyak untuk mencegahnya.

Konsep posibilisme Albert Hirschman tampaknya sangat relevan dalam hal ini. Hirschman mengembangkan posibilisme dalam konteks teori ekonomi kaku yang merumuskan model pembangunan yang berurutan. Dia menentang gagasan tentang perlunya urutan tertentu dalam pembangunan yang dilakukan dan sebagai gantinya mengusulkan perlunya hubungan maju dan mundur.¹³⁵ Pendekatan posibilis yang serupa diperlukan untuk memperbaiki upaya-upaya dalam memajukan HAM. Kita tahu bahwa demokrasi, perdamaian, pembangunan, dan HAM saling terkait

dan dapat membentuk lingkaran yang saling mendukung dan menguatkan. Tetapi, sejauh yang saya tahu, belum ada ilmuwan politik dan ekonom yang menentukan mana yang perlu didahulukan, apa lagi urutan-urutan berikutnya. Kejelian Hirschman membuat kita mesti mencari cara-cara tak terduga yang setiap langkahnya dapat berkontribusi terhadap langkah lainnya. Argumen Catalina Smulovitz bahwa penuntutan HAM turut membantu penguatan supremasi hukum di Argentina adalah salah satu wawasan Hirschmanian tersebut.

Bila kita tinjau HAM pada abad ke-21, terdapat dua tren yang sangat mengkhawatirkan: meningkatnya ketimpangan dan berlanjutnya konflik serius. Meski konflik internasional menurun di seluruh dunia, konflik yang menonjol di Timur Tengah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang persis sama dengan yang kita duga—pembunuhan, pemerkosaan, pengusiran, dan arus pengungsi yang besar-besaran. Sementara itu, di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, ketimpangan di antara individu makin meningkat. Masalah-masalah tersebut memerlukan perhatian lebih dari para pegiat HAM di seluruh dunia, dengan menggunakan segala keterampilan dan strategi yang telah terasah dalam perjuangan mereka yang lain. Bab ini mengulas kebijakan yang berhasil dan tidak berhasil dalam memajukan HAM. Wawasan pertama dan paling utama adalah kita perlu terus mengupayakan perubahan dan melanjutkan proses yang sulit, lambat, dan terutama tanpa kekerasan yang telah berkontribusi terhadap banyak tren positif di dunia.***

BAGIAN IV

Memperjuangkan Keberhasilan HAM pada Abad ke-21

BAB 7

Kesimpulan

Bukti Adanya Harapan Tanpa Rasa Puas Diri yang Berlebihan

KURANG DARI SEMINGGU setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat pada November 2016, Amnesty International AS menyelenggarakan konferensi tahunan untuk wilayah Northeast dan New England. Aktivis dan anggota sukarelawan Amnesty dari wilayah tersebut berkumpul di Boston untuk mengikuti lokakarya dan merencanakan kegiatan mereka untuk tahun mendatang. Kawan saya yang merupakan pemimpin dan pengelola lama AI, Jack Rendler, mengikuti konferensi tersebut dan memimpin lokakarya tentang HAM (HAM) di Korea Utara. Dia memperkirakan rata-rata usia peserta konferensi adalah sekitar 25 tahun.¹ Hal ini cukup mengejutkan—saya pikir kebanyakan pengurus AI adalah aktivis HAM tua seperti Rendler, yang sudah terlibat saat aktivisme HAM sedang gencar-gencarnya pada 1970-an.

Konferensi tersebut diawali dengan penampilan band setempat, Eastern Medicine Singers. Mereka berharap dapat mengajarkan lagu dan tarian kepada semua orang, dan penampilan tersebut akan menjadi semacam pemberkatan bagi kerja-kerja mendatang. Tak lama kemudian, 200 hingga 300 anak muda pun menari-nari di auditorium. Setelah itu, Evan Mawarire berbicara. Mawarire adalah pastor asal Zimbabwe yang menggunakan media sosial (#ThisFlag) untuk mengorganisasi unjuk rasa besar-besaran di Zimbabwe pada Juli 2016 yang memprotes korupsi dan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar. Pihak berwenang menangkap dan menahan Mawarire atas tuduhan hasutan kekerasan dan belakangan subversi dan makar untuk menggulingkan

pemerintah. Jika terbukti melakukan makar, dia akan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Mawarire adalah subjek dari seruan Aksi Darurat AI dan Deputy Direktur AI untuk Afrika Selatan, Muleya Mwananyanda, mengatakan, “penahanan Mawarire adalah langkah terukur pemerintah Zimbabwe yang tengah menghadapi gelombang protes untuk mengintimidasi para aktivis yang bersuara lantang menentang Presiden Robert Mugabe.”² AI bukan satu-satunya kelompok yang mendukung Mawarire; sekitar seratus pengacara dari kelompok Pengacara HAM Zimbabwe hadir di pengadilan untuk memberikan bantuan hukum; wakil masyarakat umum juga memadati ruang sidang. Hakim akhirnya menghentikan kasus tersebut karena tidak sesuai prosedur.³ AI kemudian membantu Mawarire keluar dari Zimbabwe. Saat berbicara di konferensi AI di Boston, Mawarire mengaku merasa benar-benar putus asa saat didakwa dengan tuduhan makar dan dia berterima kasih kepada anggota AI yang telah membantu melepaskannya.

Setelah sesi pembukaan, peserta konferensi AI di Boston dapat memilih untuk menghadiri serangkaian lokakarya dengan berbagai topik seperti “Menjaga Diri Tetap Aman Saat Berunjuk Rasa,” “Amerika yang Saya Yakini: Cara Mengelola Ketakutan, Kebencian, dan Fanatisme,” “Menghentikan Kekerasan Polisi yang Sewenang-wenang,” hingga “Strategi Menghentikan Pelanggaran HAM oleh Perusahaan.” Lokakarya-lokakarya tersebut tidak hanya berfokus pada pelaporan pelanggaran HAM, tetapi juga membahas perancangan strategi aksi dan memberikan pelatihan taktik-taktik tertentu. Konferensi diakhiri dengan aksi menyalakan lilin dan membacakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Dalam konteks pemilu Amerika Serikat, Rendler mengatakan bahwa banyak orang “menghadiri konferensi dalam keadaan geram dan putus asa,” tetapi, seiring dia mengamati berlangsungnya konferensi, “yang tampak kemudian adalah banyak orang-orang muda yang beranjak dari keputusan ke tindakan. Mereka menyadari bahwa ada banyak pilihan tindakan dan mereka pun jadi lebih bersemangat.” Kemudian dia berkelekar, “Sebenarnya lebih baik mereka sedih dan putus asa saja, karena begitu mereka bersemangat, yang muncul hanyalah kebisingan.”⁴

Penyelenggara konferensi AI tahu cara menerapkan ide yang ditekan oleh Saul Alinsky, yang saya bahas dalam pendahuluan buku ini: bahwa perubahan sosial memerlukan kemarahan, harapan, dan keyakinan bahwa kita dapat mengupayakan perubahan. Kajian saya terhadap literatur

HAM dan percakapan saya dengan para aktivis di garis depan menunjukkan bahwa saat ini kita terlalu banyak dibebani kritik dan keputusan dan kurang ada harapan, ketangguhan, atau keyakinan bahwa kita dapat mengupayakan perubahan. Kita tentu perlu memiliki kerendahan hati, apalagi kita sadar betapa sedikit yang kita tahu dan betapa sering kita gagal. Salah satu sumber ketangguhan justru adalah kemampuan untuk belajar dari kegagalan dan mengatasi rintangan.⁵ Penyelenggara konferensi AI dan kaum muda yang hadir menemukan keseimbangan yang tepat antara kemarahan dan harapan, serta mendapatkan pelatihan untuk mempelajari cara mengupayakan perubahan. Konferensi ini memberikan, pada minggu pertama setelah pemilu AS, secercah cahaya untuk melangkah, langkah yang sepenuhnya konsisten dengan sejarah yang diuraikan dalam buku ini.

Buku ini adalah tanggapan saya terhadap kritik atas hukum, institusi, dan gerakan HAM, khususnya kritik yang mempertanyakan legitimasi dan efektivitas HAM. Legitimasi berkaitan dengan efektivitas, keduanya terhubung dalam dua bagian buku ini. Keyakinan akan efektivitas dapat menguatkan atau melemahkan persepsi tentang legitimasi, dan komitmen awal terhadap legitimasi dapat memengaruhi orang dalam melihat efektivitas.⁶ Dalam bab penutup ini, saya meninjau efektivitas terlebih dahulu dan setelahnya legitimasi untuk menegaskan apa yang saya yakini sebagai bukti adanya harapan.

Efektivitas Hukum, Institusi, dan Gerakan HAM

Di sepanjang buku ini, saya telah mengukur kemajuan HAM dalam kaitannya dengan hak-hak asasi yang tercantum dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Saya berpendapat bahwa, untuk mengevaluasi kemajuan, kita perlu memiliki kesepakatan metodologi pokok, dan metode yang saya dukung adalah perbandingan empiris, yaitu kita melihat bagaimana perilaku aktor negara dan non-negara mengalami perubahan dibandingkan dengan praktik sebelumnya atau dibandingkan dengan situasi di negara atau kawasan lain. Untuk melakukannya, kita perlu melihat satu per satu masalah HAM karena tak mungkin membuat pernyataan umum yang akurat untuk semua HAM. Kita juga perlu melihat perubahan dari waktu ke waktu, terkadang puluhan tahun atau lebih, karena perubahan HAM itu perlu waktu. Dalam suatu bidang masalah, saya menggambarkan kepatuhan atau pemenuhan hak dengan suatu kontinum dari tidak ada sama sekali

hingga penuh. Gerakan di sepanjang kontinum tersebut, dari kurang terpenuhi hingga lebih terpenuhi, menunjukkan kemajuan HAM dalam suatu masalah, bahkan jika praktik saat ini masih belum terpenuhi sepenuhnya. Dengan menggunakan metode ini, sangat mungkin dan memang wajar bila kita juga melihat gerakan mundur pada kontinum tersebut, seperti yang tampak di Mesir terkait dengan hak integritas tubuh, di Amerika Serikat terkait dengan kebijakan penyiksaan dan penahanan rahasia, serta di Timur Tengah dengan meningkatnya pengungsi yang terusir akibat perang yang berkecamuk di Suriah, Afghanistan, dan Irak.

Kita mesti terus mendorong aktor negara dan non-negara ke arah kepatuhan penuh dengan menekankan kesenjangan yang masih ada antara perilaku mereka dengan kepatuhan yang sepenuhnya. Tetapi, sebagaimana yang telah saya bahas pada bab 1 dan 2, kita tidak dapat menggunakan metode perbandingan dengan yang ideal saja untuk mengukur kemajuan; dengan metode ini, kita hampir tidak akan mungkin dapat melihat kemajuan. Hampir semua yang saya sebut “kemajuan HAM” atau perbaikan dalam praktik HAM terjadi dalam konteks saat perbaikan lanjutan masih diperlukan; kesenjangan antara perilaku dan kepatuhan sepenuhnya masih ada dan masih dapat diperbaiki. Kemajuan HAM adalah sebuah proses dan bukan titik akhir. Selain itu, prosesnya dapat mundur, dan memang sering mengalami kemunduran. Kewaspadaan diperlukan untuk mempertahankan kemajuan HAM dan mencegah kemunduran.

Dua karakteristik yang melekat pada masalah-masalah HAM memperumit upaya kita untuk mengukur efektivitas. Pertama, banyak pelanggaran HAM merupakan bahaya yang tersembunyi dan karenanya sulit diukur. Gerakan HAM berupaya mengungkap bahaya tersembunyi dan menjadikannya perhatian dunia. Namun, dalam melakukan hal itu, gerakan HAM dapat membuat orang berpikir bahwa situasi HAM memburuk padahal nyatanya kita hanya jadi lebih tahu dan lebih peduli tentangnya. Paradoksnya, keberhasilan gerakan HAM dalam meningkatkan informasi dan kesadaran dapat digunakan sebagai bukti bahwa hukum dan aktivisme HAM tidak berhasil, suatu argumen yang didasarkan pada tingginya tingkat pelanggaran yang berkelanjutan di dunia. Kedua, gerakan HAM bertujuan memperluas cakupan pelanggaran HAM, sehingga menjadikan standar akuntabilitasnya terus berubah. Karena itu, HAM adalah target bergerak yang definisinya terus diperluas melalui kerja para aktivis dan berbagai lembaga. Ini adalah salah satu aspek hak yang paling luar biasa, tetapi juga menyebabkan masalah pengukuran yang pelik ketika kita

hendak membicarakan kemajuan. Memahami paradoks informasi dan perubahan standar akuntabilitas tidak mesti membuat kita berpuas diri, tetapi hal ini dapat membuat kita tak terlalu putus asa dan menjadi pengguna data pengukuran pelanggaran HAM yang lebih bijak.

Upaya yang cermat dalam mengukur kemajuan dan efektivitas HAM perlu mempertimbangkan kendala-kendala dalam memperoleh pengukuran yang akurat ini guna mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Dalam rangka itu, peneliti HAM dapat mencari contoh atau inspirasi dari bidang lain yang sudah lebih lama menghadapi masalah pengukuran serupa. Para peneliti kesehatan masyarakat, misalnya, mengetahui adanya fenomena yang mirip dengan paradoks informasi yang mereka sebut “bias pengawasan”, ketika semakin dekat mereka melihat sesuatu, misalnya penyakit, semakin sering mereka menemukannya, dan mereka melakukan sesuatu untuk mencoba mengatasi bias pengawasan dalam penelitian mereka. Kolega saya Malcolm Sparrow, yang bukunya *The Character of Harms* membahas bahaya tersembunyi dari sudut pandang manajemen publik, mengatakan bahwa salah satu motivasi utamanya menulis buku tersebut adalah karena dia mengamati “berbagai bidang yang serba menemukan sendiri, dan agak terisolasi, kebenaran dasar tertentu tentang upaya pengurangan bahaya yang sebenarnya cukup umum.”⁷ Sparrow memberi tahu saya bahwa, jika bidang HAM yang relatif baru “tampak menelusuri masalah pengukuran itu tanpa mengetahui atau merujuk banyak masalah serupa di bidang lain, akibatnya bidang baru itu akan tampak terkucil atau ‘tertutup.’” Sparrow menunjukkan kepada para ahli HAM bahwa ada banyak yang “dapat dipelajari dengan cukup cepat dan mudah dari bidang yang lain, agar mereka tak harus selalu meraba-raba dalam gelap!”⁸ Para peneliti HAM sudah mulai mengatasi masalah pengukuran dengan cara yang canggih, sebagaimana dibuktikan oleh studi metodologis yang inovatif dari para ahli seperti Christopher Fariss, Will Moore, dan Patrick Ball serta timnya di Human Rights Data Analysis Group.⁹ Tetapi sebagian besar aktivis HAM, masyarakat umum, dan kebanyakan akademisi di bidang HAM entah tidak memahami atau tidak menerima gagasan bahwa bidang kita ini mengidap paradoks informasi yang dapat memengaruhi pemahaman kita tentang efektivitas. Upaya ini masih jauh dari selesai.

Setelah menegaskan pentingnya perbandingan empiris dan penggunaan data yang saksama, saya beralih membahas satu per satu masalah untuk mengevaluasi mana yang mengalami kemajuan dan mana yang mengalami kemunduran, terutama pada bab 2, 5, dan 6. Harapannya,

saya dapat meyakinkan pembaca betapa kelirunya anggapan umum bahwa HAM secara keseluruhan makin memburuk. Kemajuan HAM belum menyelesaikan semua konflik, penindasan, dan ketimpangan, tetapi kita memang belum memberinya kesempatan. Kita harus menyadari bahwa perubahan HAM itu perlu waktu dan bahwa kita perlu berusaha mengevaluasi perubahan dari dekade ke dekade, bukan hanya dari tahun ke tahun. Konsep HAM, meski tidak sempurna, telah terbukti efektif di masa lalu. Kita mesti percaya bahwa ia masih akan terus membawa perubahan di masa depan.

Legitimasi dan HAM

Selain membahas soal efektivitas perlindungan HAM internasional, saya membahas tiga kritik utama yang menggugat legitimasi konsep ini.¹⁰ Pertama, saya berpendapat bahwa perlindungan HAM internasional tidak muncul dari Kawasan Utara Dunia dan bahwa konsep HAM tidak berasal dari atau beriringan dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi negara-negara di Kawasan Utara Dunia atau kapitalisme global yang lebih umum. Kedua, saya berpendapat bahwa institusi-institusi HAM internasional bersama gerakan-gerakan HAM merupakan bagian penting dari solusi untuk masalah saat ini, yang akan jauh lebih penting jika negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menarik dukungannya terhadap HAM. Terakhir, saya berpendapat bahwa tak cukup bukti untuk meyakini bahwa HAM itu “minimal” dan “tak berdaya mengatasi ketimpangan.”¹¹ Saya telah membahas masing-masing soal tersebut di berbagai bagian buku ini, tetapi di sini saya merangkum argumen utama saya sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik tersebut.

Asal-usul Ide dan Institusi HAM Lebih Beragam

Sebagian besar kritik terhadap HAM yang dianggap beriringan dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi Kawasan Utara Dunia berasal dari salah kaprah seputar sejarah kemunculan HAM dan perkembangannya. Karena itu, sebagian besar bab 3 dan 4 membahas asal-usul ide dan institusi perlindungan HAM internasional. Saya berpendapat, berdasarkan kajian sejarah Amerika Latin yang saya lakukan dan kajian sejarah terperinci dari seluruh dunia yang makin berkembang, bahwa negara-negara di Kawasan Selatan Dunia dan kampanye-kampanye yang muncul di sana juga turut berkontribusi penting terhadap kemunculan ide, institusi, dan gerakan HAM, yang kerap bertentangan dengan kebijakan

Amerika Serikat dan rezim otoritarian liberal, dan bukannya beriringan dengan mereka.

Tinjauan lebih dekat atas kemunculan ide HAM di seluruh dunia menunjukkan bahwa ide tersebut tidak hanya berasal dari liberalisme atau ajaran Kristen, sebagaimana yang diklaim beberapa penulis.¹² Asal-usul ide-ide tersebut justru lebih beragam, seperti dari republikanisme kewargaan, sosialisme, dan komunitarianisme. Jika melihat lebih dekat dokumen-dokumen HAM dari Kawasan Selatan Dunia, kita akan menemukan beberapa aspek yang terlupakan dari sejarah HAM. Pertama, hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi dan sosial sudah berdampingan dalam hukum HAM sejak perlindungan HAM internasional pertama kali disahkan oleh negara-negara, dengan Deklarasi Amerika dan DUHAM. Kedua, hak dan kewajiban sama-sama ditekankan, tidak hanya dalam Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia (American Declaration of the Rights and Duties of Man), tetapi juga dalam Piagam Afrika tentang HAM dan Penduduk (African Charter on Human and Peoples' Rights).¹³ Deklarasi Amerika maupun Piagam Afrika sama-sama menekankan bahwa kewajiban individu dapat melengkapi hak individu, dan bukan bertentangan dengannya. Gagasan penggabungan kewajiban individu dengan hak individu ini dapat berfungsi sebagai alat untuk meraih lebih banyak konsensus tentang legitimasi norma-norma HAM, khususnya di negara-negara berkembang dan negara-negara di luar Kawasan Utara Dunia. Sejarah tentang hak dan kewajiban manusia dari pinggiran yang hampir terlupakan dapat menjadi jembatan bagi perdebatan modern seputar hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hal ini dapat mengadaptasikan berbagai wacana di dunia yang multipolar tempat negara-negara adikuasa potensial seperti Brasil, India, Tiongkok, Rusia, dan Afrika Selatan akan semakin turut menentukan hasil dari perdebatan HAM internasional.¹⁴

Ikhtiar HAM pada tahun-tahun mendatang abad ke-21 boleh jadi akan mirip dengan periode Perang Dingin pada 1948-1973, saat negara-negara besar umumnya menentang perlindungan HAM internasional dan saat momentum serta kemajuan bergantung kepada tindakan negara-negara yang lebih kecil, dengan dukungan dari NGO dan masyarakat sipil yang mulai berkembang. Tetapi pada abad ke-21, negara-negara kecil dan para aktivis itu memiliki jauh lebih banyak sumber daya kelembagaan—hukum, institusi, dan gerakan HAM yang dirintis para aktivis sebelumnya pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Namun demikian, tetap diperlukan

segenap kreativitas dan energi untuk mempertahankan kemajuan HAM di lingkungan yang lebih tidak bersahabat sesudah pemilihan Brexit dan terpilihnya Donald Trump.

Beberapa penulis dan aktivis berpendapat bahwa ide HAM tidak dapat menjadi alat mobilisasi di Kawasan Selatan Dunia karena orang-orang di sana tidak memercayai organisasi HAM dan, terlebih lagi, menganggap bahwa organisasi semacam itu hanya melayani kepentingan negara besar, khususnya Amerika Serikat. Dalam hal ini, kita memiliki kesempatan langka untuk menggunakan data survei dalam meninjau topik ini. Karena legitimasi berisi apa yang orang percayai, temuan survei tentang kepercayaan dapat digunakan untuk menelusuri soal ini. Dari 2012 hingga 2014, James Ron dan David Crow melakukan survei terhadap 9.380 responden di enam negara di tiga kawasan dunia: Kolombia, Ekuador, India, Meksiko, Maroko, dan Nigeria. Mereka menanyakan soal sikap terhadap pemerintah Amerika Serikat, HAM, serta organisasi HAM lokal dan internasional untuk menguji beberapa argumen yang dikemukakan para ahli hubungan internasional. Ada beberapa variasi menarik antarnegara tetapi, secara keseluruhan, Ron dan Crow menemukan bahwa orang-orang di enam negara di tiga kawasan berbeda di dunia berkembang itu memiliki tingkat kepercayaan “yang cukup baik” terhadap organisasi HAM setempat. Kepercayaan tersebut tidak hanya pada kalangan tertentu, seperti mereka yang berpenghasilan tinggi atau yang lebih memiliki hubungan transnasional. Justru orang-orang dari berbagai tingkat pendidikan, penghasilan, dan lokasi geografis (urban dan rural) memercayai organisasi HAM, dan orang yang mengaku pernah berhubungan dengan organisasi HAM itu lebih cenderung memercayai organisasi tersebut. Terakhir, organisasi-organisasi HAM lokal tidak dipandang sebagai pelayan negara-negara besar, dan pengetahuan bahwa organisasi-organisasi tersebut menerima dana asing tidak mengurangi kepercayaan di sebagian besar negara.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi HAM masih memiliki daya tarik di negara-negara ini dan dapat digunakan sebagai alat mobilisasi dalam kampanye.

Gerakan HAM dan Institusi HAM Bekerja Sama

Beberapa pengkritik akan membuat kita percaya bahwa ada pemisahan tajam antara institusi HAM dan gerakan HAM, karena institusi menjadi birokratis dan tak acuh, bahkan imperial, sedangkan gerakan HAM masih murni.¹⁶ Perbedaan semacam itu tak memperhitungkan bahwa

para pegiat HAM turut menciptakan banyak institusi HAM yang ada saat ini. Pegiat HAM menanamkan harapan dan ekspektasinya kepada institusi-institusi itu dan terus menggunakan dan mengandalkannya, sekalipun mereka mengkritik institusi tersebut dan mendorong perubahan di dalamnya. Misalnya, gerakan HAM di Amerika Latin bergantung kepada dan berkontribusi terhadap institusi HAM pada tahun 1970-an yang turut dibentuk para diplomat di tengah gejolak pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an; selain itu, para aktivis masih mengandalkan institusi-institusi tersebut saat ini. Kemajuan HAM paling pesat berlangsung di wilayah-wilayah yang memiliki institusi HAM regional yang kuat, serta gerakan sosial yang kuat. Keduanya bukanlah kekuatan yang saling berlawanan, tetapi dapat saling melengkapi.

Gerakan sosial dan pegiat NGO sering kali kecewa terhadap institusi HAM. Mereka dengan tepat mengkritik Dewan HAM PBB karena sarat dengan hipokrisi dan politik kekuasaan, di mana para diplomat dari rezim otoriter dapat terpilih sebagai anggota dan bahasa diplomatik dapat mengaburkan tragedi. Tetapi mereka juga mengakui bahwa Dewan HAM PBB telah berkembang dari waktu ke waktu dalam menanggapi tuntutan para pegiat HAM. Pada tahun 1970-an, seorang diplomat di Komisi HAM PBB (UN Commission on Human Rights, sebelumnya bernama Dewan HAM PBB) bahkan tidak dapat menyebutkan nama negara yang dituduh melanggar HAM; saat ini, setiap negara di dunia mesti tunduk terhadap Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) atas praktik HAM-nya dan NGO dari seluruh dunia diundang untuk menyampaikan kritik mereka terhadap praktik-praktik negara. Pegiat HAM Sri Lanka telah lama berjuang keras mendesak Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM selama perang saudara karena mereka pikir hal itu akan membantu advokasi mereka di dalam negeri.

Institusi HAM pada dasarnya adalah alat dan arena. Meski dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti dalam interaksi antara Dewan HAM PBB dan aktivis Sri Lanka, institusi itu juga dapat direbut dan ditundukkan oleh rezim represif. Akibat dari yang disebut oleh salah seorang penulis sebagai “Kurva Belajar Diktator” (*Dictator’s Learning Curve*), banyak rezim otoriter jadi lebih cerdik dalam menangkal manuver kampanye pengembangan demokrasi dan gerakan HAM.¹⁷ Mereka belajar bahwa resolusi institusi HAM dapat membantu melegitimasi atau mendelegitimasi rezim mereka sehingga mereka pun berupaya keras mendukung resolusi yang

memuji negara mereka. Contoh-contoh ini dapat menjadi ilustrasi lain untuk ikhtiar HAM yang merupakan perjuangan tanpa henti, saat rasa puas diri dan ketakacuhan dapat mengikis kemajuan yang dicapai sebelumnya. Semasa Perang Dingin di Amerika Latin, misalnya, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) sering menjadi klub antikomunis dari pemerintah otoriter. Bila organnya, Komisi HAM Lintas-Amerika, mulai melakukan upaya HAM penting meski situasinya demikian, itu karena orang-orang tertentu di Komisi ini berjuang mewujudkan potensinya. Saat ini, Majelis Eropa sekalipun, yang dulu dianggap sebagai benteng dunia dalam melindungi cita-cita HAM, telah diserang dari dalam oleh rezim-rezim otoriter seperti Azerbaijan. Gerald Knaus menunjukkan bagaimana rezim Ilham Aliyev membantu perebutan Majelis Eropa dan mencegahnya membahas soal tahanan politik dan pemilu yang curang di Azerbaijan. Namun, alih-alih cukup menyimpulkan bahwa institusi HAM adalah bagian dari masalah, Knaus mengingatkan: “Semua ciptaan manusia perlu dirawat dan diperhatikan. Ketika perawatan gedung tidak dilakukan, retakan-retakan pun muncul di langit-langit. Tak lama kemudian, puing-puing yang berjatuhan akan menjadi ancaman bagi semua yang bernaung di bawahnya. Hal serupa berlaku untuk arsitektur perlindungan HAM saat ini.”¹⁸ Institusi HAM dapat membusuk jika tidak dirawat dengan cermat oleh para pembela HAM. Situasi serupa terjadi pada sistem Lintas-Amerika yang dibuat sangat kekurangan dana oleh negara hingga harus memberhentikan stafnya. Negara-negara Amerika Latin yang menciptakan sistem Lintas-Amerika gagal merawat dan mempertahankannya dengan baik. Pada tahun 2013, sejumlah negara, dipelopori Ekuador, bahkan berupaya menghapuskan Komisi HAM Lintas-Amerika seluruhnya. Hanya kampanye terpadu dan terorganisir dari organisasi-organisasi HAM Amerika Latin yang dapat menangkal serangan terhadap Komisi ini.¹⁹

Karena itu, pemisahan antara institusi HAM dan gerakan HAM terbukti tidak benar. Institusi HAM besar dapat menjadi birokratis, tak acuh, dan bahkan tertundukkan, tetapi bukan berarti bahwa ia pasti akan selalu demikian; hal itu terjadi ketika para pegiat HAM, di dalam maupun di luar institusi dan pemerintah, di Kawasan Utara maupun Selatan Dunia, lengah, kurang waspada, atau kalah dalam pergulatan penting. Para pegiat HAM dalam negeri di seluruh dunia masih menjadi alat yang tak tergantikan dalam mengupayakan keberhasilan HAM. Namun, pada banyak tahap perjuangannya, para pegiat dalam negeri memerlukan dukungan dari lembaga HAM internasional dan regional, jaringan HAM

transnasional, dan kebijakan luar negeri negara-negara demokratis, baik di Kawasan Utara maupun Selatan Dunia. Mereka yang meromantisasi gerakan HAM dan menjelekkan institusi HAM lupa bahwa kolaborasi antara gerakan dan institusi sudah lama menjadi penggerak utama perubahan HAM.

Hukum, Institusi, dan Gerakan HAM sebagai Alat Ampuh untuk Mengatasi Ketimpangan

Ikhtiar HAM telah menjadi alat utama untuk mengatasi berbagai bentuk ketimpangan di dunia. Jadi, ada alasan untuk meyakini bahwa HAM merupakan wacana yang menjanjikan dan memiliki kemampuan untuk mengatasi diskriminasi ekonomi dan ketimpangan. Tetapi, Moyn beranggapan bahwa HAM itu “minimal” dan “tak berdaya mengatasi ketimpangan,” dan beberapa aktivis HAM mengamini klaim tersebut.²⁰

Mari kita cermati pernyataan pertama. Mengapa kita menganggap kemajuan HAM itu minimal? Jika seseorang terpenuhi semua haknya yang dinyatakan dalam DUHAM 1948, orang itu tidak hanya akan memiliki perlindungan atas nyawa, kebebasan, keamanan, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, serta hak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi dia juga akan memiliki akses ke pendidikan, jaminan sosial, pekerjaan (upah yang setara untuk pekerjaan yang setara), kebebasan bergerak, standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan, seperti sandang, pangan, papan, serta layanan kesehatan dan layanan sosial wajib lainnya. Mereka akan mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum dan akan dilindungi dari diskriminasi “dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, bangsa atau asal-usul sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya.” Mereka juga memiliki hak untuk bersantai, termasuk cuti berbayar. Sejak DUHAM disusun, banyak hak baru yang ditambahkan ke hukum HAM. Secara keseluruhan, hak-hak tersebut tentulah tidak minimal dan saya khawatir akademisi seperti Moyn dan aktivis HAM yang menyuarakan klaimnya itu merugikan kita. Saya bahkan tidak yakin bagian mana yang mereka anggap minimal itu. Saya sangat berharap setiap orang di seluruh dunia memiliki hak-hak tadi, meski kita masih jauh dari itu. Selain itu, meski DUHAM tidak menentukan batas atas ketimpangan, tetap ada kemungkinan untuk berharap dan berusaha demi kesetaraan ekonomi yang lebih baik dalam kerangka HAM dan melakukannya tanpa mengecilkan deklarasi dan aspirasi gerakan ini dengan menyebutnya minimal. Saya

mendorong orang-orang untuk membaca ulang DUHAM—sebagaimana dilakukan Amnesty International di akhir konferensi November—atau Deklarasi Amerika. Itu semua sangat kontras dengan beberapa tuntutan atas kebijakan sosial yang benar-benar minimal di Amerika Serikat.²¹

Menanggapi klaim kedua Moyn, saya berpendapat bahwa hukum, institusi, dan gerakan HAM telah membuat terobosan penting dalam ketimpangan “status” di seluruh dunia. *Ketimpangan status* adalah ketimpangan atas dasar perbedaan penghargaan dan penghormatan, yang dapat terkait, sebagaimana dinyatakan dalam DUHAM, dengan “ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, bangsa atau asal-usul sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya.” Ketimpangan status tidak terpisah dari ketimpangan ekonomi karena mengacu pada pandangan tentang status budaya, tentang siapa yang “lebih baik”—dan hal ini dapat menghasilkan kesenjangan material yang signifikan, seperti dampak rasisme di Amerika Serikat misalnya, tempat warisan perbudakan dan rasisme turunan menjadi sumber ketimpangan ekonomi yang mendasar.²²

Jika kita melihat sejarah perjuangan HAM, tampak bahwa HAM merupakan gerakan yang kuat, barangkali gerakan paling kuat untuk menghadapi berbagai bentuk ketimpangan di dunia, seperti yang didasarkan pada perbedaan ras, gender, orientasi seksual, dan disabilitas. Karena gerakan HAM telah efektif dalam mengatasi bentuk ketimpangan lain, mengapa kita menganggap ia akan “tak berdaya” mengatasi ketimpangan ekonomi? Para pembela hak perempuan sudah lama tahu bahwa inklusi politik dan kesetaraan ekonomi bagi perempuan tak lain adalah dua sisi mata uang. Perempuan perlu memiliki inklusi politik untuk mengupayakan kesetaraan ekonomi dan inklusi ekonomi untuk melindungi integritas fisiknya. Amartya Sen telah mengemukakan argumen yang sama terkait hak sipil dan politik serta hak ekonomi dan sosial. Hak sipil dan politik untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul merupakan alat yang penting bagi individu untuk memperoleh hak ekonominya.²³ Tuntutan atas hak bekerja, hak memperoleh upah yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, dan jaminan sosial semuanya berkontribusi dalam meningkatkan kesetaraan ekonomi. Semua hak tersebut telah diupayakan oleh para aktivis HAM dengan menggunakan banyak perangkat hukum HAM, dengan berbagai tingkat keberhasilan. Misalnya, Jaringan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Network for Economic,

Social and Cultural Rights, ESCR-Net) menghubungkan lebih dari 280 NGO, gerakan sosial, dan aktivis di lebih dari 75 negara untuk membangun gerakan HAM dan keadilan sosial global, memperjuangkan akuntabilitas perusahaan dan kebijakan ekonomi demi “menggugat struktur dan kebijakan yang tidak adil, serta mendorong model pembangunan alternatif.”²⁴ Traktat seperti Konvensi Hak Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD) mencakup kesetaraan ekonomi di dunia pendidikan dan pekerjaan sekaligus inklusi politik.

Saat ini, NGO HAM, khususnya yang berbasis di Kawasan Selatan Dunia, berupaya mengatasi kekurangan serius dari tatanan neoliberal yang mengabaikan HAM. César Rodríguez-Garavito, salah seorang ahli/aktivis paling inovatif, menulis serangkaian buku yang menjabarkan kerja-kerja penting para aktivis dari Kawasan Selatan Dunia dalam mendorong berbagai hak ekonomi dan sosial, hak warga adat, dan masalah lingkungan.²⁵ Misalnya, Kampanye Aksi Pengobatan di Afrika Selatan, menghubungkan jaringan global yang mencakup kelompok pembangunan berbasis hak seperti Oxfam, mengangkat soal konflik antara hak kekayaan intelektual perusahaan farmasi besar dengan hak atas kesehatan dan obat-obatan dasar. Kampanye mereka berhasil menekan perusahaan-perusahaan untuk memberikan obat anti-retroviral ke negara-negara Afrika dengan harga lebih murah. Pada akhirnya, tercapai solusi berupa pengakuan bahwa kendali suatu negara atas krisis kesehatan masyarakat yang krusial dapat didahulukan daripada hak kekayaan intelektual.²⁶

Masalah bisnis dalam HAM telah menjadi bidang aktivisme dan kajian HAM yang berkembang pesat, mempersatukan berbagai kalangan dari Kawasan Utara dan Selatan Dunia untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan menggunakan taktik baru untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan.²⁷ Contohnya adalah masalah tembakau yang melibatkan perusahaan, kesehatan masyarakat, dan HAM. Penyebaran tembakau di dunia memengaruhi kehidupan lebih dari satu miliar orang di negara-negara berkembang. Kalangan yang merokok saat ini adalah penduduk paling rentan di dunia: anak-anak, orang miskin, dan pengidap gangguan jiwa. Baru-baru ini Uruguay memenangkan kasus besar melawan Phillip Morris, sehingga negara tersebut dapat memberi label pada rokok dengan keterangan yang dapat melindungi penduduknya. Kemenangan ini bukanlah hasil usaha satu NGO atau satu negara belaka,

namun melibatkan jaringan transnasional dan aliansi multi-stakeholder. Dalam kasus Uruguay, pemerintahan Frente Amplio memberlakukan undang-undang terkait kemasan. Ketika digugat oleh Phillip Morris, pemerintah menyewa firma hukum di Washington, D.C., Michael Bloomberg membantu menanggung biaya hukum, dan Harold Koh, mantan Dekan Yale Law School dan mantan Penasihat Hukum Departemen Luar Negeri AS, menawarkan bantuan hukum *pro bono* (tanpa bayar) kepada tim hukum Uruguay. Koh berpendapat bahwa tembakau merupakan masalah HAM, memengaruhi kesehatan jutaan orang di seluruh dunia. Uruguay dan negara-negara yang berkampanye untuk melindungi hak atas kesehatan mendapatkan sekutu yang tak tanggung-tanggung, yaitu komedian John Oliver, yang sindirannya terhadap keserakahan dan sinisme Phillip Morris begitu jenaka dan berbasis fakta.²⁸

Menekankan kewajiban sebagai pelengkap HAM dapat menjadi perangkat penting dalam mengatasi tantangan kebijakan publik global, seperti ketimpangan ekonomi. Untuk menghadapi ketimpangan global, yang perlu ditekankan adalah hak ekonomi individu atas standar hidup yang layak serta kewajiban perusahaan dan individu untuk membayar pajak agar pemerintah dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di dalam dan di luar negeri.²⁹ Barangkali penting juga menekankan kewajiban negara untuk menutup surga pajak dan mencegah pencucian uang.³⁰ Dalam rumusan ekonom Gabriel Zucman, Asisten Profesor Ekonomi di University of California, Berkeley:

Setiap negara memiliki hak untuk memilih bentuk perpajakannya sendiri. Tapi jika ... Kepulauan Virgin Inggris membiarkan para pencuci uang membuat perusahaan anonim sesukanya atau jika Swiss menyembunyikan kekayaan para elit korup di kasnya, mereka sama saja mencuri pendapatan bangsa asing. Ujungnya, pajak yang digelapkan itu pun harus digantikan dengan pajak lebih tinggi yang dikenakan atas penduduk yang taat pajak, biasanya dari kelas menengah, di Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara berkembang. Logika perdagangan bebas sama sekali tak dapat membenarkan pencurian ini.³¹

Organisasi-organisasi yang mengampanyekan hak ekonomi dan sosial makin sering menunjuk surga pajak sebagai biang masalah utama yang menyebabkan negara tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi hak ekonomi dan sosial yang memadai. Penindakan masalah surga pajak dengan lebih tegas barangkali merupakan salah satu cara utama

agar negara berkembang dapat memperoleh sumber daya yang diperlukannya untuk mengurangi kelaparan. Pusat untuk Hak-hak Ekonomi dan Sosial (Center for Economic and Social Rights, CESR) bekerja dalam isu penghindaran dan penggelapan pajak, yang dianggap sebagai pengerukan pendapatan pemerintah secara sistemik, yang seharusnya dapat digunakan untuk pemenuhan HAM. Mereka adalah salah satu dari sekian organisasi HAM yang mulai mendalami arti penting kebijakan pajak bagi HAM, termasuk upaya-upaya untuk menutup surga pajak. CESR berpendapat bahwa, “Perpajakan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan HAM, ia diperlukan bukan hanya demi tersedianya sumber daya yang cukup, tetapi juga karena kebijakan pajak berperan penting dalam memperbaiki ketimpangan dan mengukur seberapa bertanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.”³²

Kontribusi HAM terhadap kesetaraan ekonomi telah diakui oleh orang-orang yang bekerja di organisasi kemanusiaan dan pembangunan. Lembaga-lembaga seperti Oxfam berada di garis depan dalam mendorong organisasi kemanusiaan dan pembangunan agar memikirkan pembangunan berbasis hak. Setelah bertahun-tahun bekerja pada isu kemiskinan dan ketimpangan, organisasi-organisasi tersebut menyadari bahwa kemiskinan dan ketimpangan terutama bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi karena pengucilan dari politik dan ekonomi. Di beberapa tempat, pengucilan itu terang-terangan dan dianggap sah, seperti di Afrika Selatan pada masa apartheid. Di tempat lainnya, pengucilan tersebut tidak begitu kentara tetapi tetap berdampak, seperti temuan Oxfam USA saat bekerja dengan para pekerja (kebanyakan imigran) di industri pemrosesan makanan. Dengan berfokus pada pengucilan, Oxfam menunjukkan bagaimana model berbasis hak dapat berguna dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Gagasan pembangunan berbasis hak telah membantu para aktivis dalam mengangkat masalah utama pada perusahaan, hal yang tak mudah mereka angkat di luar kerangka hak.³³

Terlepas dari upaya-upaya ini, ketimpangan ekonomi masih terus meningkat. Saya percaya bahwa kampanye HAM yang lebih gencar lagi dapat membantu mengatasi ketimpangan, seperti penggelapan pajak, korupsi, dan kurangnya akses pendidikan yang luas. Kita perlu lebih banyak aktivisme HAM pada isu-isu seputar ketimpangan ekonomi. Tapi lagi-lagi, gerakan HAM tidak mesti menjadi satu-satunya perangkat untuk mengatasi ketimpangan. Konsep ini cocok dengan visi keadilan lainnya. Keadilan sosial dan HAM, misalnya, saling melengkapi; seperti dikemukakan

Amartya Sen dan Mathias Risse, HAM dapat membantu mendorong dan mewujudkan keadilan.³⁴ Beberapa ahli percaya akan adanya “*crowding out*” (penyingkiran secara bareng-bareng), saat suatu wacana, seperti HAM, entah bagaimana dapat membungkam atau mempersempit pilihan emansipatoris yang tersedia.³⁵ Saya tidak melihat banyak bukti tentang adanya *crowding out* tersebut. Pengaruh Marxisme, misalnya, menurun dengan sendirinya sebagai akibat dari perkembangan di bekas Uni Soviet dan Eropa Timur; HAM mungkin menjadi wacana alternatif, tetapi tidak menyingkirkan Marxisme. Saya juga tidak menemukan bukti bahwa hal ini terjadi pada wacana emansipatoris lainnya.

Makna Legitimasi HAM di Masa Mendatang

Gerakan HAM telah membuktikan diri mampu berinovasi, termasuk dalam mengampanyekan perlindungan hak ekonomi dan sosial. Perubahan struktural di dunia menciptakan kondisi baru bagi aktivisme HAM. César Rodríguez-Garavito berpendapat bahwa kemunculan negara adikuasa potensial seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, kian beragamnya aktor serta strategi hukum dan politik, serta tersedianya teknologi komunikasi dan informasi baru semuanya menggambarkan suatu transisi—peluang bagi kreativitas dan inovasi. Dia percaya bahwa semua transformasi struktural tersebut “mengarah pada bidang HAM yang lebih beragam, terdesentralisasi, dan lebih berjejaring dibandingkan dekade sebelumnya.”³⁶ Tetapi semuanya sangat tergantung pada bagaimana para pembela HAM menyesuaikan diri dengan perubahan sambil terus melangkah ke depan.

Karena perlindungan HAM internasional tidak berasal dari Kawasan Utara Dunia, kita tidak boleh merancang solusi yang selalu menempatkan negara kuat seperti Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Saya tidak percaya pada klub elit “penjaga” HAM sebagaimana yang diusulkan Emilie Hafner-Burton. Meski Hafner-Burton tidak memberi tahu siapa yang akan menjadi penjaga tersebut, ada implikasi bahwa Amerika Serikat dan Eropa Barat akan ditunjuk menjadi pemimpinnya.³⁷ Saya percaya bahwa para pemimpinnya perlu berasal dari negara-negara yang lebih beragam daripada yang diusulkan Hafner-Burton. Seperti halnya Piagam PBB dan DUHAM yang mencita-citakan koalisi besar aktor negara dan non-negara, begitu juga para pejuang HAM mestinya terdiri dari kelompok yang beragam, mosaik negara-negara dari seluruh dunia yang akan bergantian memimpin berbagai isu HAM. Ini bukan hanya

angan-angan kosong. Negara, aktivis, dan institusi di Kawasan Selatan Dunia telah banyak berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan, termasuk yang berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial. Brasil dan Afrika Selatan, misalnya, memimpin isu hak LGBT di Dewan HAM PBB. Brasil dan Meksiko telah berkontribusi pada penyebaran kebijakan sosial yang efektif yang melibatkan transfer tunai.³⁸ Kolombia mengadopsi program reparasi yang paling luas dan inovatif di dunia dan sedang dalam proses menyiapkan model perjanjian perdamaian baru yang mencakup ketentuan terkait keadilan dan pemulihan.³⁹ Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menghasilkan serangkaian putusan terobosan terkait hak atas kesehatan dan perumahan, sementara Mahkamah Agung India menegaskan kembali hak atas pangan yang dijamin konstitusi dan menyerukan investasi besar-besaran dalam program makan siang sekolah untuk membantu mengimplementasikannya.⁴⁰ Negara-negara kecil dapat membuat perubahan—lihat peran Yordania, Kosta Rika, dan Liechtenstein sebagai wakil Negara Pihak di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengawal ICC melalui masa-masa awalnya yang sulit. Negara-negara akan silih berganti memimpin isu-isu HAM, tergantung pihak politik mana yang berkuasa dan isu mendesak lainnya.

Kebanyakan negara di dunia yang pernah mendukung agenda HAM juga mengalami masa-masa kemunduran. Saya tidak ingin menyeragamkan atau meromantisasi protagonisme HAM negara-negara di Kawasan Selatan Dunia. Brasil berperan penting pada 1948 ketika menyerukan Mahkamah HAM Lintas-Amerika, tetapi, pada 2011, menghentikan sumbangan dananya kepada Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) untuk memprotes keputusan Komisi HAM Lintas-Amerika (Inter-American Commission on Human Rights, IACHR). IACHR meminta pemerintah Brasil menanggukuhkan pembangunan bendungan Belo Monte karena belum mengonsultasikan proyek tersebut dengan masyarakat adat setempat. Di waktu yang kurang-lebih sama, Brasil mensponsori resolusi di Dewan HAM PBB yang mendukung hak LGBT.⁴¹ Brasil dapat mengambil, dan telah mengambil, peran sebagai pemimpin di bidang HAM, tetapi juga bertindak melemahkan HAM, kadang di waktu yang bersamaan. Disonansi yang kentara itu tidaklah unik. Perjuangan anti-apartheid termasuk salah satu kampanye HAM global yang paling awal dan paling luas di dunia. Pemerintahan Kongres Nasional Afrika (African National Congress, ANC) yang dipimpin Mandela belakangan ikut mengepalai pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan meratifikasi Statutnya pada

2000, tetapi pada 2016 Afrika Selatan sedang dalam proses keluar dari Mahkamah tersebut. Seperti tampak di bagian sejarah buku ini, India berperan penting dalam memperjuangkan HAM di PBB. Mahkamah Agung India juga membuat keputusan terobosan terkait hak ekonomi dan sosial, terutama, hak atas pangan. Lalu, pada 2014, India mengangkat Narendra Modi sebagai Perdana Menteri. Modi adalah pemimpin partai nasional Hindu kanan BJP yang dulu pernah memimpin negara bagian Gujarat saat terjadi kekerasan yang dapat disebut sebagai pembersihan etnis Muslim dan pemerintah setempat ikut terlibat. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa politik di negara-negara di Kawasan Selatan Dunia sama cair dan rumitnya dengan politik di Amerika Serikat. Karena itu, kemampuan mereka untuk berkontribusi terhadap agenda HAM akan beragam.

Tak ada alasan untuk percaya bahwa Tiongkok atau Rusia akan mendorong perlindungan HAM internasional dalam waktu dekat. Meningkatnya kekuatan dan pengaruh Tiongkok memang mengkhawatirkan bagi agenda perlindungan HAM internasional, meski pada saat yang sama pembangunan ekonomi Tiongkok yang pesat telah banyak mengentaskan kemiskinan warganya dibandingkan tren terbaru lainnya. Tiongkok memiliki kebijakan yang menutup mata terhadap praktik HAM di dalam negara lain dan kurangnya perhatian terhadap demokrasi dan HAM ini tampak menarik bagi pemerintah dan mitra dagang di sekitarnya. Karena mereka ingin ikut tumbuh bersama Tiongkok, negara-negara sekitar akan peka dan akomodatif terhadap kepentingan dan cita-cita Tiongkok. Negara-negara ini cenderung menjauh dari Amerika Serikat dan mendekat ke Tiongkok.⁴² Namun demikian, masalah lama Tiongkok dengan kekuatan lunak membuatnya tak mungkin dapat membujuk banyak negara untuk mengikuti kebijakannya sebagai ganti memajukan HAM dan demokrasi.⁴³ Menurut Iain Johnston, kekhawatiran bahwa Tiongkok akan melemahkan demokrasi dan HAM di dunia barangkali terlalu berlebihan. Tidak ada bukti, misalnya, bahwa kebijakan bantuan atau pengiriman senjata Tiongkok di Afrika Selatan itu aktif mendukung negara-negara otoriter atau negara-negara yang melanggar HAM.⁴⁴

Amerika Serikat mesti menjadi bagian penting dalam koalisi untuk melindungi dan memajukan HAM secara internasional. Namun, saat ini kemampuan Amerika Serikat untuk memiliki peran lebih sentral dalam gerakan ini agak terkendala. Sebelum terpilihnya Donald Trump pun, Amerika Serikat tak menjalankan perannya dalam perlindungan HAM—pemerintah Bush menjalankan kebijakan penyiksaan dan penahanan

ilegal serta gagal mempertanggungjawabkannya, menginvasi Irak, dan, lebih luas lagi, berlagak menegakkan hukum internasional. Pemerintah Obama gagal menuntut pertanggungjawaban atas penyiksaan yang dilakukan pemerintah Bush dan mengakhiri penahanan tanpa batas waktu di Guantánamo, dan bahkan memperluas penggunaan pembunuhan bertarget. Pada akhirnya, Amerika Serikat mesti memimpin dengan memberi teladan, bukan menasihati negara lain dengan hal yang tak hendak diikutinya.

Hak perempuan dan hak penyandang disabilitas adalah contoh bagaimana Amerika Serikat memimpin dengan memberi teladan. Sudah banyak sorotan tentang kegagalan Amerika Serikat dalam meratifikasi Konvensi Hak Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, tetapi, pada kedua bidang tersebut, legislasi dalam negeri Amerika Serikat membawa perubahan dan praktiknya cenderung lebih sesuai dengan konvensi tersebut ketimbang banyak negara lain yang telah meratifikasinya—yang oleh Harold Koh disebut kepatuhan tanpa ratifikasi.⁴⁵ Tetapi, dalam soal penyiksaan, penahanan ilegal, dan tahanan politik, agenda inti HAM, Amerika Serikat mengalami kemunduran besar dan hal ini melemahkan kemampuan Amerika Serikat untuk berbicara atas nama hak asasi. Sebelum Trump terpilih, dalam draf awal bab ini, saya menulis:

... satu hal terpenting yang dapat dilakukan Amerika Serikat untuk menunjukkan kepemimpinan di bidang HAM adalah menutup Guantánamo dan mengakhiri praktik penahanan sewenang-wenang dan tanpa batas waktu di sana. Kedua, Amerika Serikat harus menuntut para pejabat pemerintahan Bush yang bertanggung jawab atas praktik penculikan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan. Tindakan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, dan kewajiban hukum internasional. Tidak ada yang lebih ampuh dalam membangun kembali legitimasi Amerika Serikat untuk bergerak di bidang HAM selain menuntut pertanggungjawaban orang-orang itu atas kejahatannya.

Setelah terpilihnya Trump, semua itu terasa usang dan mustahil. Tugas utama saat ini adalah mencegah pemerintahan Trump agar tidak kembali melakukan kebijakan penyiksaan dan penahanan ilegal.

Kita tengah berada di masa yang berbahaya. Baru saat ini terasa betapa pentingnya kolaborasi aktivis dan akademisi HAM di dalam negeri dan lintas negara. Kita mesti bertindak dengan mengacu pada keberhasilan perjuangan HAM sebelumnya dan mengacu pada sejarah dan ilmu-ilmu sosial yang terbaik. Saya tidak sependapat dengan mereka yang menyatakan bahwa kita hanya perlu memikirkan politik dalam negeri dan mengabaikan norma serta hukum HAM internasional.⁴⁶ Sebaliknya, kita akan perlu gerakan dalam negeri yang lebih kuat dan memiliki perhatian pada masalah dalam negeri maupun luar negeri guna melindungi kaum rentan dari kebencian dan diskriminasi serta memobilisasi kelompok yang terancam oleh globalisasi. HAM akan terus menjadi wacana yang dapat memobilisasi publik di dalam negeri dan internasional.

Mengingat konteks politik saat ini, buku ini jadi tampak jauh lebih diperlukan, karena menunjukkan sejarah perjuangan di masa lalu saat pemerintah Amerika Serikat dan Inggris kerap berada di sisi yang berlawanan dengan HAM. Uraian buku ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang tertindas sudah lama menggunakan ide-ide HAM untuk memperbaiki nasibnya, sedangkan para elit, sering kali elit Amerika Serikat, hanya menonton. Kita sudah melihat bagaimana negara-negara yang baru terlepas dari penjajahan mendorong agenda HAM sedangkan Amerika Serikat dilanda diskriminasi ras pada 1960-an. Kelompok-kelompok tertindas membawa tekanan internasional kepada pemerintah Amerika Serikat yang berupaya merebut perhatian dan pikiran negara-negara berkembang semasa Perang Dingin. Di saat yang sama, tekanan internasional bekerja bersama gerakan sosial di dalam negeri untuk menghentikan segregasi ras formal di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bagaimana gerakan sosial dalam negeri yang kuat dapat memperoleh manfaat dari dukungan jaringan transnasional dan lembaga internasional.

Belakangan ini, tekanan internasional terhadap kebijakan penyiksaan dan penahanan ilegal yang dilakukan pemerintah Bush diperkuat oleh penentangan terhadap kebijakan tersebut di dalam negeri untuk menghentikan pelanggaran pemerintah Amerika Serikat. Bush, Cheney, dan Rumsfeld tidak menerima argumen norma dan hukum internasional, tetapi pada akhirnya sadar bahwa mereka tak dapat mengupayakan kepentingannya karena penentangan yang mereka hadapi, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat Amerika Serikat. Norma dan hukum internasional menginspirasi negara lain untuk

mengambil sikap tegas menentang penyiksaan Amerika Serikat, yang kemudian akan membatasi kemampuan pemerintah Amerika Serikat dalam mengupayakan kepentingannya. Dalam sebuah artikel terbaru di *Foreign Affairs*, Douglas Johnson, Alberto Mora, dan Averell Schmidt mencatat ongkos strategis dari kebijakan penyiksaan dan penahanan ilegal terhadap kepentingan jangka panjang Amerika Serikat, dan berpendapat bahwa kebijakan tersebut merugikan Amerika karena institusi dan negara lain meyakini dan menegakkan hukum HAM internasional.⁴⁷

Perubahan HAM adalah proses jangka panjang yang sudah mengalami dan akan terus mengalami kemunduran dramatis, dan ketidakpedulian pemerintahan Trump terhadap hukum HAM internasional merupakan contohnya yang terkini. Tapi ini bukan kali pertama pemerintah Amerika Serikat bertolak belakang dengan gerakan HAM. Upaya-upaya bersama di dalam negeri berkolaborasi dengan tekanan internasional dari pemerintah asing serta gerakan dan institusi HAM dari negara lain akan sangat penting dalam meredam potensi pelanggaran HAM yang dapat dilakukan pemerintah Trump. Tinjauan lebih dekat terhadap sejarah HAM memberikan model kolaborasi antara gerakan dalam negeri dan tekanan internasional, model yang menawarkan harapan dan panduan di masa yang sulit ini. Alih-alih mengesampingkan ide HAM, saat ini kita justru lebih memerlukannya dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Memperjuangkan Keberhasilan HAM

Kesabaran dan kesadaran bahwa HAM dan demokrasi dapat diraih melalui upaya-upaya yang panjang dan melelahkan mestilah merupakan pelajaran penting dari buku ini. Proses menuntut dan menjaga HAM tak pernah mudah atau tanpa kontestasi. Pergulatan dan konflik justru merupakan inti dari buku ini sebagaimana hal itu juga merupakan inti dari gerakan HAM. Bermula di Bogotá dengan Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia, saya mengikuti lika-liku dukungan HAM yang pelik sepanjang Perang Dingin hingga memasuki abad ke-21. Kemajuan HAM tak pernah spontan, dan bukanlah hasil evolusi alamiah dari hukum atau budaya global di berbagai negara; selain itu, HAM tidak mengalir begitu saja dari Barat dan tradisi Pencerahannya ke belahan dunia lain. Pada setiap tahap, kelambatan sudah biasa terjadi dan bukan hal aneh. Hanya dengan pandangan jangka panjanglah tren ke arah kemajuan dapat dilihat. Saya percaya bahwa, pada waktunya, para ahli juga

akan melihat kembali ke periode ini sebagai titik balik di jalan menuju perlindungan HAM.

Pelajaran pertama agar HAM berhasil adalah bahwa “solusi” kita tidak boleh memperparah kondisi yang kita tahu merupakan penyebab pelanggaran HAM, terutama perang, otoritarianisme, impunitas, serta ideologi yang mendehumanisasi atau mengeksklusi. Saya berpendapat bahwa perang tidak boleh dianggap sebagai alat utama dalam mendorong HAM karena riset menunjukkan bahwa intervensi militer tidak berdampak besar terhadap HAM dan, lebih buruk lagi, malah berkontribusi terhadap represi negara.⁴⁸ Mengingat besarnya ongkos dan penderitaan yang diakibatkan perang, riset-riset itu menguatkan keyakinan saya bahwa intervensi militer mesti dihindari pada semua situasi kecuali yang paling ekstrem, dan hanya digunakan jika diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Terkait dehumanisasi, kita perlu menyadari bagaimana kita mendehumanisasi orang dan budaya lain dan menghindari praktik-praktik tersebut. Saat ini, sebagian orang di Amerika Serikat dan Eropa Barat menyetankan kaum fundamentalis Islam dengan cara yang tak jauh berbeda dengan cara para pemimpin Amerika Serikat dan Amerika Latin membicarakan kaum komunis, termasuk yang terpilih dalam pemilu, semasa Perang Dingin. Ideologi-ideologi yang mendehumanisasi lawan diasosiasikan dengan represi yang lebih tinggi dan dengan logika tujuan menghalalkan segala cara. Kemajuan HAM memerlukan pendekatan yang berbeda. Tujuan HAM tidak dapat diupayakan dengan menghalalkan segala cara karena cara tersebut juga termasuk dalam tujuannya. Dengan kata lain, jika kesejahteraan dan hak setiap orang adalah tujuan yang ingin kita raih, melanggar hak tak dapat menjadi cara untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir, HAM tidak memperbolehkan dehumanisasi atas dasar pandangan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama semata-mata karena mereka manusia.

Keberhasilan konsep HAM diupayakan dengan mendukung aspirasi dan gerakan orang-orang dalam memperjuangkan hak, bukan dengan memaksakan hak dari luar. Kita tidak dapat mengebom suatu negara agar melindungi hak. Begitu juga, kita tidak dapat menghancurkan demokrasi untuk menyelamatkannya. Cara adalah termasuk tujuan dan perubahan apa pun yang terjadi mestilah sejalan dengan supremasi hukum. Sebagian kalangan menyebut argumen ini “minimalis” karena berfokus pada jaminan prosedural. Jika yang dimaksud maksimalisme adalah ideologi keamanan nasional dan wacana revolusi kekerasan, saya lebih menyambut

kontribusi minimalisme. Sebutan minimalis itu melupakan esensi HAM, yaitu bahwa tujuan akhir HAM sama maksimalisnya dengan pandangan dunia mana pun, tetapi ada keterbatasan cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kesimpulan

Buku ini berfokus pada legitimasi dan efektivitas hukum, institusi, dan gerakan HAM. Saya berargumen bahwa kedua konsep—legitimasi dan efektivitas—selalu melibatkan perbandingan dan karena itu masalah krusial yang harus kita perhatikan adalah pertanyaan: “Dibandingkan dengan apa?” Dibandingkan dengan norma, institusi, dan praktik emansipatoris lain yang sudah ada, saya berpendapat bahwa gerakan HAM adalah yang paling baik legitimasi dan efektivitasnya dalam memajukan kesejahteraan manusia. Namun, karena taktik HAM sebagian besar deliberatif dan nirkekerasan, perubahan yang diupayakan HAM terjadi secara perlahan dan hanya diperoleh lewat perjuangan bersama.

Saya berharap kelak akan banyak perjuangan panjang dalam menghadapi pelanggaran HAM yang masih berlangsung. Gerakan yang efektif mampu mengadaptasi hukum dan wacana HAM ke dalam taktik yang inovatif, sehingga dapat menerjemahkan cita-cita hak ke dalam praktik lokal dan internasional. Bila mereka berhasil menuju ke arah perbaikan demokrasi dan meningkatkan ongkos represi para pemimpin yang berkuasa, keadaan akan membaik—secara perlahan, dan dengan pasang surut.

Tinjauan saya terhadap studi HAM di masa lalu dan saat ini menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak berada di “penguji masa HAM” atau “senja kala hukum HAM.” Sebaliknya, kita berada dalam masa dinamisme gerakan, hukum, dan institusi HAM yang semarak. Perkembangan terkini di seluruh dunia dan di Amerika Serikat menyebabkan sebagian orang putus harapan, tetapi jika meninjau lebih saksama sejarah HAM dan tren saat ini, kita dapat menemukan harapan akan adanya kemajuan terlepas dari kesulitan dan penentangan. Dua faktor terbesar yang berkorelasi dengan pelanggaran HAM di dunia adalah perang dan otoritarianisme dan kita tahu kedua faktor tersebut telah menurun di seluruh dunia. Namun, setelah beberapa tahun menurun, jumlah konflik di dalam negeri kembali meningkat pada 2014 dan 2015, dan jumlah demokrasi tak mengalami kenaikan sejak 2000, yang berarti perlu lebih banyak

upaya untuk mengurangi perang dan memajukan demokrasi dalam rangka meraih capaian-capaian HAM. Impunitas atas pelanggaran HAM di masa lalu adalah pemicu lain untuk pelanggaran di masa mendatang. Meskipun impunitas saat ini masih sangat marak, kemunculan berbagai proses di dalam negeri dan internasional serta komisi kebenaran yang efektif perlahan juga mulai mengikis impunitas ini.

Proses-proses HAM merupakan seperangkat alat yang telah berkontribusi terhadap perbaikan sejumlah capaian HAM di seluruh dunia. Dibandingkan alat lain yang tersedia, seperti penggunaan intervensi militer atau peningkatan bantuan asing, ongkos waktu dan dana untuk HAM tidaklah besar, ongkosnya wajar dan sepadan jika melihat hasil capaian yang sudah ditunjukkan. Di dunia yang tak sempurna ini, tampaknya proses-proses HAM membuahkan hasil yang menjanjikan dan perlu terus dikembangkan, ditingkatkan, dan dibuat beragam agar dapat terus berhasil.

Tak lama setelah Trump terpilih, seorang aktivis HAM dengan ironis menulis *tweet*, “Andai saja ada seperangkat cita-cita & nilai universal yang dapat disepakati umat manusia untuk melawan populisme xenophobia ...”⁴⁹ Kita punya seperangkat cita-cita dan nilai universal semacam itu, terlembagakan di institusi-institusi internasional, dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun lewat deliberasi dan pergulatan berbagai macam aktor, termasuk para pemimpin dan aktivis dari Kawasan Selatan Dunia. Cita-cita tersebut tidak dipaksakan, tetapi disepakati setelah berjam-jam perdebatan dan melalui ratifikasi puluhan konvensi HAM internasional yang kini didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Cita-cita tersebut telah terwujud dalam institusi HAM dan digunakan oleh para aktivis di seluruh dunia untuk memobilisasi orang dan menghadirkan perubahan positif. Kita memerlukan cita-cita dan institusi tersebut lebih dari sebelumnya. Kita perlu marah terhadap ketidakadilan dan terhadap pelanggaran HAM. Tetapi kita juga perlu harapan, ketangguhan, dan keyakinan bahwa kita dapat membuat perubahan, dan itulah yang saya harap dapat diberikan buku ini.***

Ucapan Terima Kasih

KARENA SAYA MENDEDIKASIKAN BUKU INI kepada beberapa mentor, saya ingin mulai dengan berterimakasih atas pengaruh mereka terhadap karya saya. Raymond (Bud) Duvall pertama kali memperkenalkan kepada saya teori hubungan internasional, teori dependensi, dan, terutama, pentingnya berpikir secara ketat saat saya masih menjadi mahasiswa S1 di University of Minnesota. Belakangan, sebagai koleganya selama bertahun-tahun, saya terus terbantu oleh pikirannya yang tajam dan semangatnya yang berapi-api. Ketertarikan saya pada HAM (HAM) bermula saat saya menjadi mahasiswa pertukaran di Uruguay dan bekerja di organisasi HAM setelah saya lulus S1. David Weissbrodt membantu saya mendapatkan pekerjaan pertama saya di bidang HAM itu, dan belakangan, sebagai kolega dan sahabat, mengajari saya banyak hal tentang hukum HAM. Sumber teoretis dan filosofis buku ini berasal dari masa-masa pascasarjana dan, khususnya, perjumpaan saya dengan karya-karya Albert Hirschman. Sebagai mahasiswa pada awal tahun 1980-an dengan latar belakang aktivisme HAM, awalnya saya merasa bahwa satu-satunya pilihan saya adalah menganut determinisme ekonomi kaum kiri jika saya ingin melawan strukturalisme neo-realis yang mendominasi debat hubungan internasional pada saat itu. Tetapi saya meragukan kemungkinan dan kemampuan revolusi ekonomi, kalau bukan politik, yang diserukan teori dependensi. Karya Hirschman yang lebih bernuansa dan penuh harap tampak memetakan arah yang berbeda—di sana, gagasan dan agensi menjadi penting dan perubahan terjadi dengan cara yang tak

terduga dan bertahap. Saya tak ingat karya Hirschman mana yang pertama kali saya jumpai, tetapi baik yang saya baca itu kritiknya terhadap determinan ekonomi dari demokrasi, pujiannya atas karya para pendorong perubahan, atau kecemannya atas penerapan model asing dan tidak tepat pada pembangunan Amerika Latin, kata-katanya terus bergema dalam pengalaman hidup dan penelitian saya sebelumnya. Albert Hirschman belakangan menjadi mentor saya dan rupanya kami tidak hanya memiliki minat yang sama dalam pembangunan ekonomi di Amerika Latin, tetapi juga dalam HAM.

Pada waktu yang kurang lebih sama, John Ruggie memperkenalkan saya kepada gagasan yang belakangan dia sebut konstruktivisme dan itu pas dengan posibilisme; dia memberikan bahasa teoretis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan audiens hubungan internasional (HI). Ruggie juga mendorong saya untuk menggabungkan minat saya kepada teori HI dengan kecintaan saya pada penelitian di Amerika Latin, yang saya lanjutkan dalam buku ini. Saat tiba di Argentina untuk melakukan penelitian, Elizabeth Jelin pertama kali memperkenalkan saya kepada teori gerakan sosial, menunjukkan bagaimana kita dapat dekat dengan gerakan sosial sekaligus menjaga jarak kritis, dan menunjukkan model sosok akademisi perempuan senior yang tangguh (saya justru mempelajari hal ini di Argentina dan Brasil: Perempuan senior yang ada di lembaga penelitian tempat saya bekerja di sana lebih banyak daripada yang ada di Departemen Ilmu Politik di Columbia University). Robert Keohane memperluas pemahaman saya tentang berpikir sistematis dan menjadi model sosok mentor dan sahabat yang baik. Dia juga menunjukkan cara mengambil risiko dan tidak terkungkung dalam satu jenis HI. Setiap mentor yang saya sebutkan di sini adalah “pelintas batas” (*trespasser*), meminjam istilah Albert Hirschman, berpindah dari satu disiplin ke disiplin lain dan melintasi berbagai sub-bidang pada disiplin kami.

Saya berterima kasih kepada Radcliffe Institute for Advanced Study dan Harvard Kennedy School yang telah menominasikan dan mengangkat saya sebagai Radcliffe Professor, dengan hak istimewa untuk mengambil cuti penelitian selama dua tahun di Radcliffe. Buku ini adalah buah dari keistimewaan tersebut. Berjalan kaki melewati Radcliffe Yard dan ke Byerly Hall setiap pagi terasa seperti undangan untuk memasuki alam pikiran. Bekerja dan mengajar di Kennedy School dan Carr Center for Human Rights Policy juga membuat saya selalu mengikuti perdebatan terkini seputar politik dan kebijakan. Saya berterima kasih kepada dua

keluarga dermawan yang mendukung jabatan istimewa yang saya emban saat menulis buku ini, keluarga Ryan dan keluarga Pforzheimer. Terima kasih kepada kelompok baca HAM Radcliffe yang sangat lintas disiplin—novelis V.V. Ganeshanathan, sejarawan Tyrell Haberkorn dan Irmtrud Wojak, ahli hukum Carol Steiker, dan filsuf John Tasioulas—atas komentar bernas mereka terhadap bab-bab awal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Lizabeth Cohen dan Judith Vichniac, Ketua dan Wakil Ketua Radcliffe Fellowship Program, atas dukungan mereka. Saya sangat berterima kasih kepada Radcliffe yang telah membantu saya menemukan dan mengangkat orang yang paling membantu semua aspek buku ini selama tiga tahun, salah satu mitra riset S1 saya di Radcliffe, Jessica Tueller. Jessica bergabung dengan tim mitra riset saya di Radcliffe pada 2014 dan, bersama Giovanna Robledo dan Grayson Fuller, membantu penelitian awal tentang kontribusi Amerika Latin terhadap HAM. Saya baru tahu belakangan bahwa rupanya Jessica bukan hanya asisten peneliti yang hebat, tetapi juga editor, pengelola, pengoreksi naskah, dan pembuat indeks yang sangat membantu. Dia bekerja bersama saya secara efisien pada setiap langkah, selalu dengan humor yang jenaka dan sikap percaya diri. Carr Center Fellow Fernando Berdion del Valle membantu menyupervisi tim penelitian saya di Radcliffe dan belakangan menjadi rekan penulis tentang topik sejarah hak dan kewajiban manusia. Asisten saya di fakultas, Derya Honça, juga membantu aspek editorial dan memberikan komentar yang jeli terhadap naskah.

Saya berutang intelektual kepada sejumlah rekan penulis yang bersama saya menulis artikel-artikel yang memunculkan tunas ide untuk buku ini. Khususnya, saya berterima kasih kepada Geoffrey Dancy, sosok dengan semangat intelektual yang sama, karena telah bekerja bersama saya merumuskan beberapa argumen pada bab 6 dan mengizinkan saya menggunakan beberapa materi yang kami tulis bersama. Begitu juga, Ann Marie Clark dan saya pertama kali mengembangkan beberapa kritik terhadap pengukuran HAM yang saya paparkan pada bab 5, dan saya berterima kasih kepadanya karena telah mengizinkan saya menggunakan beberapa materi dari draf awal artikel yang kami tulis bersama. Terakhir, pada bab 6, saya menggunakan materi dari bab buku pegangan yang ditulis bersama Hans Peter Schmitz.

Selain rekan penulis saya, ada banyak akademisi yang memengaruhi naskah ini dalam banyak hal. Yang paling utama di antaranya adalah César Rodríguez-Garavito; saya berterima kasih kepada César atas

serangkaian percakapan dan diskusi yang telah memantik pikiran dan tulisan saya dalam buku ini. Saya banyak terbantu dengan membaca banyak tulisannya, dan artikel yang dia tulis bersama tentang kritik HAM membantu saya menemukan fokus buku ini pada dua tantangan terbesar: legitimasi dan efektivitas. Saya berterimakasih kepada Liliana Obregón bukan hanya atas penelitiannya tentang kesadaran kreol, tetapi juga atas kunjungan ke kampung halamannya di Bogotá, termasuk situs tempat Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia (American Declaration of the Rights and Duties of Man) disusun. Kami berkelakar bahwa sepertinya hanya kami berdua yang tampak peduli terhadap deklarasi HAM lintas negara yang pernah ditulis di gedung di Bogotá itu. Saya berharap kelak kota Bogotá memasang plakat di gedung Gimnasio Moderno, menyatakan bahwa di situlah Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia pertama kali dirancang.

Temuan saya mengenai sejarah HAM yang terlupakan dari Kawasan Selatan Dunia sudah lama menjadi obsesi intelektual dan saya tak tahu bagaimana harus berterimakasih kepada semua orang yang memengaruhi atau membantu saya. Saya menulis artikel pertama saya tentang topik ini pada 1997, menekankan kontribusi Amerika Latin terhadap gagasan HAM dan pemajuan demokrasi. Setiap tahap penelitian saya dipenuhi wawasan akademisi lain yang mengkaji bidang ini, mulai dari Jan Herman Burgers, yang artikelnya pada 1992, "The Road to San Francisco," pertama kali membuat saya memikirkan hal ini, hingga buku Steven Jensen tahun 2016, *The Making of International Human Rights: The 1960s, Decolonization, and the Reconstruction of Global Values*, yang untungnya terbit pada waktu yang tepat sehingga penelitiannya dapat disertakan dalam naskah ini. Daftar semua penulis yang saya pelajari terkait topik ini terlalu banyak untuk disebutkan semua di sini, tetapi nama dan kiprah mereka dapat ditemukan di teks buku, catatan akhir, dan bagian saran bacaan lanjutan.

Editor saya, Eric Weitz dan Brigitta van Rheinberg, banyak berkontribusi untuk buku ini. Mereka mendengarkan dan mendukung saat saya bilang perlu menulis buku yang berbeda dari rencana yang sebelumnya saya paparkan kepada mereka tentang sejarah Amerika Latin. Atas dukungan mereka, komentar mereka yang luar biasa dan terperinci tentang usulan buku dan keseluruhan naskah, serta pengumpulan para pengulas yang sangat membantu, saya berterimakasih yang sedalam-dalamnya. Saya khususnya ingin berterima kasih kepada Eric Weitz, bukan hanya atas karya pentingnya tentang sejarah HAM, tetapi juga atas sarannya untuk

memasukkan beberapa temuan sejumlah sejarawan baru yang mengkaji HAM dalam konteks dekolonisasi dan Perang Dingin secara lebih umum.

Sulit berterima kasih kepada pengulas anonim, tetapi saya jarang menerima komentar serta saran yang lebih bernas dan berisi dibandingkan yang diberikan pengulas buku ini. Karena merasa beruntung menerima ulasan semacam itu, saya berusaha merespons hampir semua saran revisi mereka.

Saya ingin berterimakasih kepada Luis Moreno Ocampo karena telah mengingatkan saya beberapa kali untuk tetap fokus pada lawan HAM yang sebenarnya: Pemerintah yang merepresi warganya dan menekan NGO HAM, atau yang berlagak membela HAM untuk membenarkan intervensi militer yang mereka ingin lakukan karena alasan lain. Saya juga ingin berterimakasih kepada ratusan orang dari lembaga dan gerakan HAM yang saya wawancarai selama bertahun-tahun, termasuk yang saya wawancarai khusus untuk buku ini, khususnya Heba Morayef, Lucia Nader, Sergio Aguayo, Doutje Lettinga, Tawakkol Karman, Jack Rendler, César Rodríguez-Garavito, Navi Pillay, Gaston Chillier, Paula Romo, Carolyn Patty Blum, dan Miguel Pulido. Saya juga ingin berterimakasih kepada semua peserta lokakarya yang diselenggarakan Human Rights Lab di Universitas los Andes di Colombia dan Open Society Foundations dengan topik “Krisis HAM? Usulan untuk Merenungkan, Meninjau, dan Memperlengkapi Kembali” (A Human Rights Crisis? A Proposal to Reflect, Reassess, and Retool) atas umpan balik mereka terhadap draf yang kemudian menjadi bab 5 buku ini. Terima kasih khususnya kepada Holly Cartner atas pembacaannya yang saksama dan komentarnya yang suportif. Saya juga ingin berterimakasih kepada semua peserta lokakarya yang diselenggarakan di Brown University pada 2015 dengan topik “Jaringan Advokasi Transnasional: Refleksi 15 Tahun Perkembangan Teori dan Praktik” (Transnational Advocacy Networks: Reflecting on 15 years of Evolving Theory and Practice) atas komentar dan saran mereka untuk naskah bab buku ini, khususnya Peter Evans, César Rodríguez-Garavito, Doutje Lettinga, Harsh Mander, Margaret Keck, Amanda Murdie, Louis Bickford, Cecelia Santos, Enrique Peruzzotti, Kathryn Hochstetler, Maritza Paredes, Daniela Ikawa, dan Patrick Heller. Para peserta Lokakarya bertajuk “Bagaimana Kita Tahu Apa yang Kita Tahu? Memetakan Masa Depan Dokumentasi dan Analisis HAM” (How Do We Know What We Know? Charting the Future for Human Rights Documentation and Analysis) di Arizona State University pada 2015

memberikan komentar yang membantu untuk makalah saya dan memberikan pandangan mereka tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bab 5. Saya khususnya berterimakasih kepada penyelenggara, Reed Wood dan Daniel Rothenberg, serta para peserta, Patrick Ball, Scott Edwards, Christopher Fariss, David Gartner, Milli Lake, dan Will Moore.

Saya berterimakasih atas komentar dan saran dari para kolega pada lokakarya yang diselenggarakan di Harvard Kennedy School, di Bogotá, Kolombia, dan Munk School di University of Toronto, tentang pengajaran praktik HAM yang lebih strategis dan berorientasi pada hasil. Terima kasih kepada para anggota Harvard Human Rights Colloquium yang mengomentari secara tertulis maupun secara langsung tentang bab 1, seperti Mathias Risse, Beth Simmons, Jacqueline Bhabha, Gerald Neuman, Tyler Giannini, Phuong Pham, Patrick Vinck, Douglas Johnson, Steven Pinker, Zachary Kaufman, Sam Moyn, dan Sushma Raman. Terima kasih kepada kolega saya di Harvard Kennedy School yang hadir dan memberikan komentar dalam diskusi penelitian fakultas, khususnya Malcolm Sparrow, Robert Putnam, Jane Mansbridge, dan Archon Fung. Terima kasih kepada Katherine Marino yang telah membaca dengan saksama dan memberikan saran untuk bab 3 dan telah memberi izin untuk mengutip naskah bukunya yang akan datang. Selain itu, atas berbagai bentuk komentar, bantuan, dan dukungan, saya ingin berterimakasih kepada Charlie Clements, Brooke Coe, Shamila Daluwatte, Alastair Iain Johnston, Bridget Marchesi, Joseph Nye, Tamya Rebelo, Alejandro Chehtman, Fidelis Magalhaes, Maria Beatriz Bonna Nogueira, Stephen Northfield, Michelle Morais de Sa e Silva, Raymond Offenheiser, Richard Price, dan Averell Schmidt.

Saya juga ingin berterimakasih atas kolegialitas beberapa akademisi yang saya sebut sebagai “kritikus” di buku ini. Beberapa kritikus tersebut saya kenal baik—James Ron, Jack Snyder, Leslie Vinjamuri, dan Samuel Moyn. Mereka selalu terbuka pada perdebatan dan mengundang saya untuk berdiskusi dengan mereka dalam berbagai format. Saya menghargai perdebatan intelektual yang tulus dan percakapan menggugah di antara kami.

Suami saya, Douglas Johnson, adalah inspirasi sekaligus pendukung terbaik untuk semua yang pernah saya tulis. Kami mendiskusikan hampir semua argumen di buku ini. Saya berterima kasih kepada orangtua saya atas kasih sayang dan dukungannya sepanjang masa, atas komitmen mereka pada HAM, dan kepada ibu saya yang membacakan buku terakhir

saya kepada ayah saat penglihatannya menurun. Mereka membuat saya terdorong untuk menulis buku lain yang barangkali ingin mereka bacakan lagi.***

Catatan

Bab 1. Pendahuluan: Kemarahan, Harapan, dan Keyakinan bahwa Kita Dapat Menciptakan Perubahan

1. Dalam membahas soal pesimisme dan kritik, saya sangat terbantu oleh tinjauan literatur yang dilakukan César Rodríguez-Garavito dan Human Rights Lab University of los Andes di Bogotá, Kolombia, meski kategori dan tanggapan saya disusun dengan cara yang agak berbeda. César Rodríguez-Garavito dan Sean Luna, Human Rights Lab University of los Andes, “A Human Rights Crisis? Unpacking the Debate on the Future of the Human Rights Field,” dalam *The Future of Human Rights: Critique, Response, and Likely Scenarios* (naskah tidak diterbitkan). Artikel ini awalnya merupakan makalah yang disiapkan untuk diskusi pada lokakarya Open Society Foundations & Human Rights Lab. Untuk makalahnya, lihat César Rodríguez-Garavito dan Sean Luna, Human Rights Lab di University of los Andes, “A Human Rights Crisis? Unpacking the Debate on the Future of the Human Rights Field,” makalah disiapkan untuk diskusi pada lokakarya Open Society Foundations & Human Rights Lab bertema The Future of Human Rights, Rio de Janeiro, 8 Maret 2016, <https://static1.squarespace.com/static/557f5fe4e4b0a17c309a0dcd/t/58a8908c29687f223ffbe21e/148744207549>.

2. Heba Morayef, wawancara dengan penulis, 9 Maret 2016, Rio de Janeiro, Brazil. Semua informasi berikutnya tentang Morayef bersumber dari wawancara ini.

3. Heba Morayef, wawancara dengan penulis, 9 Maret 2016, Rio de Janeiro, Brazil.

4. Heba Morayef, wawancara dengan penulis, 9 Maret 2016, Rio de Janeiro, Brazil.

5. Sergio Aguayo, wawancara dengan penulis, 26 Mei 2016, Cambridge, MA. Semua pernyataan Aguayo dalam paragraf ini bersumber dari wawancara ini.

6. Kendra Dupuy, James Ron, dan Aseem Prakash, “Foreign Aid to Local NGOs: Good Intentions, Bad Policy,” *openDemocracy*, 15 November 2012, <http://www.opendemocracy.net/kendra-dupuy-james-ron-aseem-prakash/foreign-aid-to-local-ngos-good-intentions-bad-policy>.

7. Kendra Dupuy, James Ron, dan Aseem Prakash, “What Drives the Crackdown on NGOs, and How Can It Be Stopped?,” *openDemocracy*, 22 April 2016, <https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/kendra-dupuy-james-ron-aseem-prakash/what-drives-crackdown-on-ngos-and-how-can-it-b>.

8. Harsh Mander, "India's Equivocal Engagement with Transnational Advocacy" (makalah dipresentasikan pada Transnational Advocacy Networks: Reflecting on 15 years of Evolving Theory and Practice, Brown University, Providence, RI, 30 April 2015).

9. Jenna Johnson, "Trump Says 'Torture Works,' Backs Waterboarding and 'Much Worse,'" *Washington Post*, 17 Februari 2016, https://www.washingtonpost.com/politics/trump-says-torture-works-backs-waterboarding-and-much-worse/2016/02/17/4c-9277be-d59c-11e5-b195-2e29a4e13425_story.html.

10. Lihat "Full Executive Order Text: Trump's Actions Limiting Refugees into the U.S." *New York Times*, 27 Januari 2017, <https://www.nytimes.com/2017/01/27/us/politics/refugee-muslim-executive-order-trump.html>. Pada bulan-bulan awal menjabat sebagai presiden, Trump bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pidato Tillerson, "Remarks to US Department of State Employees," pada 3 Mei 2017, dapat ditemukan di Situs Web Departemen Luar Negeri AS: <https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/05/270620.htm>. Untuk tanggapannya, lihat artikel op-ed John McCain, "Why We Must Support Human Rights," *New York Times*, 8 Mei 2017, <https://www.nytimes.com/2017/05/08/opinion/john-mccain-rex-tillerson-human-rights.html>.

11. Ban Ki-moon, "Opening Remarks at Press Conference with President Erdogan of Turkey at the World Humanitarian Summit" (pidato, Istanbul, Turki, 24 Mei 2016), http://www.un.org/apps/news/infocus/speeches/print_full.asp?statID=3053.

12. Will Dahlgreen, "Chinese people are most likely to feel the world is getting better," YouGov UK, 5 Januari 2016, <https://yougov.co.uk/news/2016/01/05/chinese-people-are-most-optimistic-world/>.

13. Stephen Hopgood, *The Endtimes of Human Rights* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013); Eric A. Posner, *The Twilight of Human Rights Law* (New York: Oxford University Press, 2014); Sebastian Strangio, "Welcome to the Post-Human Rights World: Geopolitical Alignments and the Rise of Populist Nationalism Have Unleashed a Global Backlash against Human Rights," argumen, *Foreign Policy*, 7 Maret 2017, <http://foreignpolicy.com/2017/03/07/welcome-to-the-post-human-rights-world/>.

14. Posner, *The Twilight of Human Rights Law*.

15. Eric A. Posner, "Have Human Rights Treaties Failed?: Human Rights Law Is Too Ambitious and Ambiguous," opini, *New York Times*, 8 Desember 2014, <http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/12/28/have-human-rights-treaties-failed>.

16. Lihat Jens David Ohlin, *The Assault on International Law* (New York: Oxford University Press, 2015).

17. Email dikirimkan kepada anggota Section Chair ISA Human Rights Section, 3 Juli 2015.

18. Michael Ignatieff menyebut hak asasi manusia "*lingua franca of global moral thought*." Michael Ignatieff, *Human Rights as Politics and Idolatry*, University Center for Human Values Series (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), 53.

19. Untuk ringkasan komprehensif terhadap literatur kritis dan sejumlah tanggapannya, lihat Rodríguez-Garavito dan Luna, "A Human Rights Crisis?" Penulis mengulas lebih dari 250 artikel akademik, buku, dan postingan blog dari berbagai disiplin, seperti ilmu politik, antropologi, sosiologi, dan hukum.

20. Definisi yang digunakan Mark Suchman dari teori organisasi berfokus pada organisasi yang diinginkan atau sesuai. Mark Suchman, "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *The Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 574. Saya menambahkan bagian soal otentisitas, yang diambil dari pembahasan soal legitimasi dan otentisitas dalam kajian bahasa, karena saya percaya bahwa otentisitas merupakan

satu bagian penting dari legitimasi di bidang HAM. Lihat Claire Kramsch, "Authenticity and Legitimacy in Multilingual Second Language Acquisition" (makalah tidak diterbitkan), <http://cms.arizona.edu/index.php/multilingual/article/viewFile/9/20>. Saya ingin berterima kasih kepada Sushma Raman yang menarik perhatian saya pada soal otentisitas sebagai aspek legitimasi.

21. "Venezuela Must Uphold Rights of 'Even Those Who Disagree with State Policies' – UN Human Rights Chief," *UN News Centre*, 12 November 2015, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52537#.WfbJJUnJUt>.

22. Pada 1993/94, saat saya diberikan jabatan di University of Minnesota, hanya 19% dosen tetap ilmu politik yang merupakan perempuan. Pada 2014, survei besar terhadap anggota American Political Science Association menunjukkan bahwa 39% dosen tetap adalah perempuan. Lisa Brandes, et al., "The Status of Women in Political Science: Female Participation in the Professoriate and the Study of Women and Politics in the Discipline," *PS: Political Science & Politics*, 1 Juni 2001, <http://www.apsanet.org/portals/54/Files/Status%20of%20Women/200106WmnReport.pdf>. Juga, *Pipeline to Tenure: Institutional Practices for Hiring, Mentoring, and Advancing Women in Academia: Report prepared by the APSA Committee for the Status of Women in the Profession (CSWP)*, diakses pada 8 Desember 2016, <http://web.apsanet.org/cswp/wp-content/uploads/sites/4/2016/01/FINAL-Pipeline-Report-May2016.pdf>.

23. Variasi di antara berbagai negara tidak serta merta mengikuti pembagian antara negara maju dan kurang maju. Di Jepang, misalnya, perempuan hanya 12,7% dari akademisi universitas unggulan negara tersebut, sementara di Turki, 47,5% staf di lima universitas teratas adalah perempuan. Jack Grove, "Global Gender Index, 2013," *Times Higher Education (THE)*, 2 Mei 2013, <https://www.timeshighereducation.com/features/global-gender-index-2013/2003517.article>.

24. Eric Cameron, "Marriage Equality Takes Effect in Uruguay," *Human Rights Campaign*, 5 Agustus 2013, <http://www.hrc.org/blog/marriage-equality-takes-effect-in-uruguay/>.

25. "Revolutionary Truth: Tunisian Victims Make History on First Night of Public Hearings for TDC," *International Center for Transitional Justice (ICTJ)*, 17 November 2016, <https://www.ictj.org/news/tunisia-truth-dignity-public-hearings-live>.

26. Kishore Mahbubani dan Lawrence H. Summers, "The Fusion of Civilizations: The Case for Global Optimism," *Foreign Affairs* 95, no. 3 (2016): 127.

27. Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*.

28. Lihat Steven L. B. Jensen, *The Making of International Human Rights: The 1960s, Decolonization, and the Reconstruction of Global Values*, Human Rights in History (Cambridge: Cambridge University Press, 2016); Roland Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010).

29. Saya mengambil istilah "contentious history" dari judul buku Christopher Roberts, *The Contentious History of the International Bill of Human Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

30. Navi Pillay, wawancara oleh penulis, 5 Mei 2016, Cambridge, MA.

31. Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*; Posner, *The Twilight of Human Rights Law*; Mark Osiel, "The Demise of International Criminal Law," *Humanity Journal*, 10 Juni 2014, <http://humanityjournal.org/blog/the-demise-of-international-criminal-law/>.

32. Stephen Hopgood, "The Endtimes of Human Rights," dalam *Debating The Endtimes of Human Rights: Activism and Institutions in a Neo-Westphalian World*, Strategic Studies Project, ed. Doutje Lettinga dan Lars Van Troost (Amnesty International Netherlands, 2014), https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/debating_the_endtimes_of_human_rights.pdf.

33. Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*, xii.
34. Maria Brant, "Besides Human Rights, I Don't See a Solution for Serving the Victims," *Sur International Journal on Human Rights, English Ed.* 11, no. 20 (Desember 2014): 90–95.
35. Raquel Rolnik, "UN Special Procedures System Is 'Designed to Be Ineffective,'" *Sur International Journal on Human Rights, English Ed.* 11, no. 20 (Desember 2014): 80–88.
36. Saya ambil dari artikel yang ditulis bersama Ann Marie Clark. Ann Marie Clark dan Kathryn Sikkink, "Information Effects and Human Rights Data: Is the Good News about Increased Human Rights Information Bad News for Human Rights Measures?" *Human Rights Quarterly* 35, no. 3 (2013): 539–568.
37. Albert O. Hirschman, *A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America* (New Haven: Yale University Press, 1971).
38. Albert Hirschman menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa ilmuwan sosial sulit membicarakan soal etika adalah karena ilmu-ilmu sosial modern muncul "dalam proses membebaskan dirinya dari ajaran moral tradisional." Albert O. Hirschman, "Morality and the Social Sciences: A Durable Tension," dalam *Essays in Trespassing: Economics to Politics and beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 294–306.
39. Saya berterima kasih kepada Richard Price karena, dengan dorongannya, saya pertama kali mencoba menjabarkan pendekatan eksplisit terhadap etika hak asasi manusia yang menggabungkan perhatian pada isu normatif dan temuan riset empiris.
40. Hirschman, "Morality and the Social Sciences," 305–6.
41. Amartya Sen, "Rights and Agency," dalam *Consequentialism and Its Critics*, ed. Samuel Scheffler, Oxford Readings in Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 1988), 187–223; Martha C. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000); John Tasioulas, "Human Rights, Legitimacy, and International Law," *American Journal of Jurisprudence* 58 (2013): 1–25; Charles R. Beitz, *The Idea of Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2009); Mathias Risse, *On Global Justice* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012).
42. Saya berterima kasih kepada Erin Kelly untuk kategorisasi filsuf hak asasi manusia yang "praktis" atau "fungsional" ini. Erin Kelly, "'Practical' Philosophical Theories of Human Rights" (memo, Radcliffe Exploratory Seminar on Human Rights Studies Today, Harvard University, Cambridge, September 2015).
43. Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, edisi ke-2 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003), 40.
44. Richard M. Price, ed., *Moral Limit and Possibility in World Politics*, Cambridge Studies in International Relations 107 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). Poin serupa pernah dikemukakan oleh Joseph S. Nye, *Nuclear Ethics* (New York: Free Press, 1986); J. L. Holzgrefe dan Robert O. Keohane, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 50–51.
45. Lihat, misalnya, Dursun Peksen, "Does Foreign Military Intervention Help Human Rights?," *Political Research Quarterly* 65, no. 3 (2012): 558–571; James David Meernik, Steven C. Poe, dan Erum Shaikh, "The Use of Military Force to Promote Human Rights," dalam *Conflict Prevention and Peacebuilding in Post-War Societies: Sustaining the Peace*, ed. T. David Mason dan James David Meernik, Contemporary Security Studies (London: Routledge, 2006), 160–76.
46. Di sini saya menggunakan kategori yang dikembangkan dalam beberapa karya saya sebelumnya, khususnya, Kathryn Sikkink, "The Role of Consequences, Comparison, and Counterfactuals in Constructivist Ethical Thought," dalam *Moral Limit and Possibility*

in *World Politics*, ed. Richard M. Price, Cambridge Studies in International Relations 107 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 83–111.

47. Menurunnya penilaian terhadap demokrasi signifikan karena salah satu penjelasan terpenting bagi pasang surut demokrasi di Amerika Latin adalah apakah kelompok-kelompok politik meyakini demokrasi. Semakin sedikitnya kelompok yang menyatakan keyakinan dan dukungannya terhadap demokrasi turut berpengaruh terhadap runtuhnya rezim demokrasi. Scott Mainwaring, *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

48. Hirschman, A Bias for Hope; Albert O. Hirschman, *Journeys toward Progress: Studies of Economic Policy-Making in Latin America* (New York: Greenwood Press, 1968); Philipp H. Lepenies, "Possibilism: An Approach to Problem-Solving Derived from the Life and Work of Albert O. Hirschman," *Development and Change* 39, no. 3 (2008): 437–459.

49. Lepenies, "Possibilism," 448.

50. Jeremy Adelman, *Worldly Philosopher: The Odyssey of Albert O. Hirschman* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013), 453; Hirschman, A Bias for Hope; Hirschman, *Journeys toward Progress*.

51. Albert O. Hirschman, "The Search for Paradigms as a Hindrance to Understanding," *World Politics: A Quarterly Journal of International Relations* 22, no. 3 (1970): 329–343. Juga, lihat pengantar Hirschman untuk buku David P. Ellerman, *Helping People Help Themselves: From the World Bank to an Alternative Philosophy of Development Assistance*, *Evolving Values for a Capitalist World* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005), xvii–xviii.

52. Hirschman, *Journeys toward Progress*.

53. Beberapa di antaranya muncul dalam buku paling populer Saul D. Alinsky, *Rules for Radicals: A Practical Primer for Realistic Radicals* (New York: Random House, 1971), tetapi Johnson mengingat rumusan ini dari pelatihan bersama Alinsky di Chicago pada akhir 1960-an.

Bab 2. Respons terhadap Kritik: Cara Mengevaluasi Legitimasi dan Efektivitas HAM

1. Doutje Lettinga, wawancara via telepon oleh penulis, 25 Januari 2016.
2. Stephen Hopgood, "The Endtimes of Human Rights."
3. Samuel Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality," dalam *Can Human Rights Bring Social Justice?: Twelve Essays*, ed. Douthie Lettinga dan Lars van Troost (Amnesty International Netherlands, 2015), 13–18, https://www.amnesty.nl/content/uploads/2015/10/can_human_rights_bring_social_justice.pdf.
4. Douthie Lettinga dan Lars van Troost, "Introduction," dalam *Can Human Rights Bring Social Justice?: Twelve Essays*, ed. Douthie Lettinga dan Lars van Troost (Amnesty International Netherlands, 2015), 9, https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/can_human_rights_bring_social_justice.pdf.
5. Douthie Lettinga, "How Revolutionary Are Global Human Rights?," *Open Global Rights*, 13 Mei 2015, <https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/douthielettinga/how-revolutionary-are-global-human-rights>.
6. David Kennedy, "International Human Rights Movement: Part of the Problem?" *Harvard Human Rights Journal* 15 (2002): 24.
7. Patrick Corrigan, "G8 Must Put Rights at Heart of Decisions," *Amnesty International UK*, 17 Juni 2013, <https://www.amnesty.org.uk/blogs/belfast-and-beyond/g8-must-put-rights-heart-decisions>.

8. Rodríguez-Garavito dan Luna, "A Human Rights Crisis?"
9. Martha Finnemore, "Legitimacy, Hypocrisy, and the Social Structure of Unipolarity: Why Being a Unipole Isn't All It's Cracked Up to Be," *World Politics* 61, no. 1 (2009): 58–85 di 61; Ian Hurd, "Legitimacy and Authority in International Politics," *International Organization* 53, no. 2 (1999): 379–98 di 381.
10. Linz mengusulkan dan menggunakan definisi ini untuk membahas legitimasi pemerintahan, tetapi juga berguna untuk membahas institusi lain seperti institusi internasional. Juan J. Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, & Reequilibration* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978).
11. Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes*.
12. Mark Suchman, "Managing Legitimacy," 574.
13. Paulo Sérgio Pinheiro dalam wawancara dengan Maria Brant, sebagaimana dikutip dalam "Besides Human Rights, I Don't See a Solution for Serving the Victims," *Sur International Journal on Human Rights, English Ed.* 11, no. 20 (Desember 2014): 90–95.
14. Stephen Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*; David Kennedy, "Boundaries in the Field of Human Rights: The International Human Rights Movement: Part of the Problem?," *Harvard Human Rights Journal* 15 (2002): 99–317.
15. Lihat, misalnya, Tony Evans, *US Hegemony and the Project of Universal Human Rights*, Southamptton Studies in International Policy (Houndmills: Macmillan Press, 1996).
16. Samuel Moyn, *The Last Utopia: Human Rights in History* (Cambridge, MA: Belknap Press, 2010).
17. Moyn, *The Last Utopia*. Buku ini terkadang tidak konsisten dalam argumennya; konsep HAM diakui muncul lebih awal, tetapi baru pada 1970-an "konsep ini beredar luas," (hlm. 125) atau, "merupakan revolusi HAM global," tetapi lebih sering menggunakan istilah "kemunculan" saat menyebut HAM pada 1970-an (hlm. 116, hlm. 121, 217, dst.). Pegiat HAM terkemuka di AS, Aryeh Neier, mengemukakan pendapat serupa dalam bukunya, *The International Human Rights Movement: A History* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012). Neier menentukan asal mula gerakan ini pada 1970-an, masa yang sama dengan organisasi yang dia bantu dirikan dengan berani (Komite Helsinki dan Human Rights Watch).
18. Moyn, *The Last Utopia*, 181, 183, 200, 143.
19. Roland Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*; Steven L. B. Jensen, *The Making of International Human Rights*.
20. David Kennedy, "The International Human Rights Regime: Still Part of the Problem?" dalam *Examining Critical Perspectives on Human Rights*, ed. Robert Dickinson et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 19–34 hlm. 20–21.
21. Alfred William Brian Simpson, *Human Rights and the End of Empire: Britain and the Genesis of the European Convention* (Oxford: Oxford University Press, 2004).
22. Lihat, misalnya, Kathryn Sikkink, *Mixed Signals: U.S. Human Rights Policy and Latin America* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004).
23. Johnson, "Trump Says 'Torture Works,' Backs Waterboarding and 'Much Worse.'"
24. Kathryn Sikkink, "From Pariah State to Global Protagonist: Argentina and the Struggle for International Human Rights," *Latin American Politics and Society* 50, no. 1 (1 April 2008): 1–29.
25. Brooke Coe, "Regional Identities and Dynamic Normative Orders in the Global South: A Comparative Study" (Disertasi Ph.D., University of Minnesota, 2015), <http://search.proquest.com/docview/1731233146/>.

26. Di sini saya mengacu pada beberapa karya saya sebelumnya, khususnya Sikkink, "The Role of Consequences, Comparison and Counterfactuals in Constructivist Ethical Thought."

27. Terkait isu ini, lihat, misalnya, Matthew J. Gibney, *The Ethics and Politics of Asylum: Liberal Democracy and the Response to Refugees* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

28. Mathias Risse, "World Society and Pluralist Internationalism" (naskah tidak diterbitkan, 1 Agustus 2015).

29. Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009).

30. Saya terbantu oleh César Rodríguez-Garavito yang menarik perhatian saya pada kesamaan pendekatan saya dalam buku ini dengan dua konsep keadilan Sen.

31. Beth A. Simmons, "Twilight or Dark Glasses? A Reply to Eric Posner," *open-Democracy*, 23 Desember 2014, <https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/beth-simmons/twilight-or-dark-glasses-reply-to-eric-posner>.

32. Kontinum kepatuhan ini mengelaborasi lebih jauh diagram dan gagasan yang telah disampaikan dalam Ann Marie Clark, "The Normative Context of Human Rights Criticism: Treaty Ratification and UN Mechanisms," dalam *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*, ed. Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, Cambridge Studies in International Relations 126 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 125–44. Saya juga merujuk wawasan dari Xinyuan Dai, dalam babnya di buku yang sama, "The 'Compliance Gap' and the Efficacy of International Human Rights Institutions," 85–102.

33. Corrigan, "G8 Must Put Rights at Heart of Decisions."

34. FAO, IFAD, dan WFP, *The Multiple Dimensions of Food Security, The State of Food Insecurity in the World* (Rome: FAO, 2013).

35. World Hunger Education Service, "2016 World Hunger and Poverty Facts and Statistics," *World Hunger*, diakses pada 11 Desember 2016, <http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/>.

36. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) menyebutkan di Pasal 11 bahwa perempuan berhak "menerima upah yang sama, termasuk tunjangan, dan perlakuan yang sama dalam penilaian kualitas pekerjaan." United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, United Nations (New York: United Nations, 1979), <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article11>.

37. "The Wage Gap Over Time," National Committee on Pay Equity, diakses pada 2 Maret 2017, <http://www.pay-equity.org/info-time.html>.

38. Moyn, *The Last Utopia*, 218.

39. David Kennedy, "The International Human Rights Regime: Still Part of the Problem?," dalam *Examining Critical Perspectives on Human Rights*, ed. Robert Dickinson et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 19–34 hlm. 24.

40. Samuel Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality."

41. Doutje Lettinga dan Lars van Troost, eds., *Can Human Rights Bring Social Justice?: Twelve Essays* (Amnesty International Netherlands, 2015), https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/can_human_rights_bring_social_justice.pdf.

42. Samuel Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality."

43. Doutje Lettinga dan Lars van Troost, eds., *Can Human Rights Bring Social Justice?*

44. Errol Black dan Jim Silver, "We have a floor, now we need a ceiling: reducing Canada's income inequalities," Canadian Centre for Policy Alternatives, Manitoba Office, 4 Februari 2010, <https://www.policyalternatives.ca/publications/commentary/fast-facts-we-have-floor-now-we-need-ceiling>.

45. Lihat video acara tersebut di, "History and Human Rights: A Panel Discussion," video YouTube, 2:02:39, dari diskusi panel, diposting oleh Jacqueline Bhabha, 1 Desember 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=LozSSje2tpc&index=1&list=PL2SOU6wwxB0vZEgAvRotf9-INc9nA8t02>.

46. Kennedy, "The International Human Rights Regime: Still Part of the Problem?," 24.

47. Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality," 16.

48. Lihat, misalnya, Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality"; Mary Nolan, "Human Rights and Market Fundamentalism," Max Weber Lecture Series (Fiesole, Italy: European University Institute, 2014); Costas Douzinas, "Seven Theses on Human Rights: (3) Neoliberal Capitalism & Voluntary Imperialism," *Critical Legal Thinking*, 23 Mei 2013, <http://criticallegalthinking.com/2013/05/23/seven-theses-on-human-rights-3-neoliberal-capitalism-voluntary-imperialism/>; David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (New York: Oxford University Press, 2005); Wendy Brown, "The Most We Can Hope For ...: Human Rights and the Politics of Fatalism," *The South Atlantic Quarterly* 103, no. 2 (2004): 451–463.

49. Douzinas, "Seven Theses on Human Rights." Lihat juga Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality."

50. Nolan, "Human Rights and Market Fundamentalism," 1.

51. Jason Hickel, "A Short History of Neoliberalism (And How We Can Fix It)," *New Left Project*, 9 April 2012, http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/a_short_history_of_neoliberalism_and_how_we_can_fix_it.

52. Hickel, "A Short History of Neoliberalism (And How We Can Fix It)"; John Gerard Ruggie, "International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order," *International Organization* 36, no. 2 (1982): 379–415.

53. Jean H. Quataert, *Advocating Dignity: Human Rights Mobilizations in Global Politics*, Pennsylvania Studies in Human Rights (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009).

54. Nolan, "Human Rights and Market Fundamentalism," 4.

55. Costas Douzinas, misalnya, sepertinya mengutip Robert Cooper, diplomat Inggris senior pada masa pemerintahan Blair, merujuk "*voluntary imperialism*" seolah Cooper merupakan juru bicara gerakan HAM. Douzinas, "Seven Theses on Human Rights."

56. Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality."

57. Eduardo Salvador Arenas Catalán, "Back to the Future: Human Rights Protection beyond the Rights Approach," dalam *Can Human Rights Bring Social Justice?: Twelve Essays*, ed. Doutje Lettinga dan Lars van Troost (Amnesty International Netherlands, 2015), 41–46, https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/can_human_rights_bring_social_justice.pdf.

58. Hopgood, "The Endtimes of Human Rights," 14.

59. Navi Pillay, wawancara oleh penulis, 5 Mei 2016, Cambridge, MA.

60. Kathryn Sikkink, *The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics* (New York: W. W. Norton & Co., 2011).

61. Hun Joon Kim dan Kathryn Sikkink, "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries," *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (2010): 939–963.

62. Mark Osiel, *Mass Atrocity, Collective Memory, and the Law* (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997).
63. Osiel, "The Demise of International Criminal Law."
64. Osiel, "The Demise of International Criminal Law."
65. Lihat database Transnational Justice Research Collaborative (The National Science Foundation and the Arts and Humanities Research Council) diakses pada 28 Januari 2017, <https://transitionaljusticedata.com/>.
66. Osiel, "The Demise of International Criminal Law."
67. Lihat Milli Lake, "Organizing Hypocrisy: Providing Legal Accountability for Human Rights Violations in Areas of Limited Statehood," *International Studies Quarterly* 58, no. 3 (2014): 515–526; Milli Lake, Ilot Muthaka, dan Gabriella Walker, "Gendering Justice in Humanitarian Spaces: Opportunity and (Dis)empowerment Through Gender-Based Legal Development Outreach in the Eastern Democratic Republic of Congo," *Law & Society Review* 50, no. 3 (2016): 539–574. Lihat juga, buku mendatang Lake, *UnderStating Human Rights: Gender Justice and Transnational Advocacy in the Democratic Republic of Congo and South Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, rencana terbit 2018).
68. Sikkink, *The Justice Cascade*, bab 7.
69. Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*.
70. Anonim, wawancara Skype oleh penulis, 2 Februari 2016.
71. Alex de Waal, "Writing Human Rights and Getting It Wrong," *Boston Review*, 6 Juni 2016, <http://bostonreview.net/world/alex-de-waal-writing-human-rights>.
72. De Waal, "Writing Human Rights and Getting It Wrong."
73. Lihat, misalnya, "Is the United States Immune to the Justice Cascade?" dalam Sikkink, *The Justice Cascade*, bab 7.
74. De Waal, "Writing Human Rights and Getting It Wrong."
75. Lihat, misalnya, Julie Flint dan Alex de Waal, "Case Closed: A Prosecutor without Borders," *World Affairs* (Spring 2009), <http://www.worldaffairsjournal.org/article/case-closed-prosecutor-without-borders>.
76. Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*.
77. Albert O. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy* (Cambridge, MA: Belknap Press, 1991), 153.

Bab 3. Asal Mula Politik HAM yang Beragam

1. Saya ingin berterima kasih kepada Fernando Berdion del Valle, Grayson Fuller, Giovanna Robledo, dan Jessica Tueller yang telah membantu penelitian untuk bab ini.
2. Lihat, misalnya, Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*; Kennedy, "The International Human Rights Regime: Still Part of the Problem?."
3. Chaim Kaufmann dan Robert Pape, "Explaining Costly International Moral Action: Britain's Sixty-Year Campaign against the Atlantic Slave Trade," *International Organization* 53, no. 4 (1999): 631–668.
4. Krasner berpendapat bahwa kampanye kemanusiaan awal ini hanya dilakukan ketika diprakarsai oleh negara-negara kuat. Stephen D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999).
5. Robert William Fogel, *Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery*, edisi ke-1 (New York: W. W. Norton & Co., 1989), 410.
6. Untuk teks lengkap semua konvensi internasional dan regional, perjanjian, serta instrumen HAM lainnya yang saya rujuk di sepanjang buku ini, lihat Human Rights

Library online dari University of Minnesota, diakses pada 18 Maret 2017, <http://hrlibrary.umn.edu/treaties.htm>.

7. Misalnya, Lynn Hunt, *Inventing Human Rights: A History* (New York: W. W. Norton & Co., 2007); Mary Ann Glendon, *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights* (New York: Random House, 2001); Johannes Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*, Pennsylvania Studies in Human Rights (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999); Paul Gordon Lauren, *The Evolution of International Human Rights: Visions Seen* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003), bab 6–7.

8. Tom J. Farer, “The Rise of the Inter-American Human Rights Regime: No Longer a Unicorn, Not Yet an Ox,” *Human Rights Quarterly* 19, no. 3 (1997): 510–546.

9. Deklarasi Amerika pertama kali disetujui oleh Konferensi Internasional Negara-negara Amerika Ke-9 (Ninth International Conference of American States) di Bogotá, Kolombia, pada April 1948. Organisasi Negara-negara Amerika (Organization of American States, OAS) juga terbentuk di pertemuan Bogotá tersebut; Deklarasi Amerika kemudian diadopsi secara resmi dengan suara bulat oleh anggota OAS yang baru terbentuk.

10. Bahkan Morsink, yang sangat teliti dalam soal sejarah dan mencatat dengan lengkap kontribusi Amerika Latin, keliru menafsirkan garis waktunya, dengan mengatakan, “Ketika hak-hak baru pertama kali dimasukkan ke draf paling awal DUHAM, pada Juni hingga Desember 1947, Deklarasi Bogota April 1948 belum dirancang.” Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 132. Morsink mengetahui draf yang dibuat oleh Inter-American Juridical Committee (Komite Yuridis Lintas-Amerika), tetapi tidak mengakuinya sebagai draf pertama Deklarasi Bogotá, padahal memang demikian, seperti halnya Draft Sekretariat Humphrey merupakan draf pertama DUHAM.

11. Kathryn Sikkink, “Reconceptualizing Sovereignty in the Americas: Historical Precursors and Current Practices,” *Houston Journal of International Law* 19, no. 3 (1996–97): 705–724 hlm. 705; Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998), 80–89; Sikkink, *Mixed Signals*, bab 2.

12. Mary Ann Glendon, “The Forgotten Crucible: The Latin American Influence on the Universal Human Rights Idea,” *Harvard Human Rights Journal* 16 (2003): 27–39; Greg Grandin, “The Liberal Traditions in the Americas: Rights, Sovereignty, and the Origins of Liberal Multilateralism,” *American Historical Review* 117, no. 1 (2012): 68–91; Greg Grandin, “Human Rights and Empire’s Embrace,” dalam *Human Rights and Revolutions*, ed. Jeffrey N. Wasserstrom, edisi ke-2 (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2007): 191–212; Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*; Susan Waltz, “Universalizing Human Rights: The Role of Small States in the Construction of the Universal Declaration of Human Rights,” *Human Rights Quarterly* 23 (2001): 44–72; Liliana Obregón, “The Colluding Worlds of the Lawyer, the Scholar and the Policymaker: A View of International Law from Latin America,” *Wisconsin International Law Journal* 23, no. 1 (2005): 145–172; Paolo Carozza, “From Conquest to Constitutions: Retrieving a Latin American Tradition of the Idea of Human Rights,” *Human Rights Quarterly* 25, no. 2 (2003): 281–313; Jan Herman Burgers, “The Road to San Francisco: The Revival of the Human Rights Idea in the Twentieth Century,” *Human Rights Quarterly* 14, no. 4 (1992): 447–478 hlm. 450; Rainer Huhle, “Latinoamérica: Continente de la paz y los derechos humanos,” *Nürnberger Menschenrechtszentrum* (2007): 1–17, <http://d-nb.info/991186621/34>; Rainer Huhle, “América Latina y la fundamentación del sistema internacional de protección de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial,” *Memoria: Revista sobre cultura, democracia y derechos humanos* 4 (2008):

33–43; Patrick William Kelly, “On the Poverty and Possibility of Human Rights in Latin American History,” *Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development* 5, no. 3 (2014): 435–450.

13. Pamela Slotte dan Miia Halme-Tuomisaari, eds., *Revisiting the Origins of Human Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

14. Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*.

15. Sikkink, “Reconceptualizing Sovereignty in the Americas.”

16. Carozza, “From Conquest to Constitutions.”

17. Christian Reus-Smit, *Individual Rights and the Making of the International System* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013); Paulina Ochoa Espejo, “Paradoxes of Popular Sovereignty: A View from Spanish America,” *The Journal of Politics* 74, no. 4 (2012): 1053–65.

18. Espejo, “Paradoxes of Popular Sovereignty.”

19. Adam Przeworski, *Democracy and the Limits of Self-Government*, Cambridge Studies in the Theory of Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 50.

20. Lihat, misalnya, studi Luis van Isschot tentang asal-usul sosial advokasi HAM modern di Kolombia berdasarkan pergulatan para pekerja minyak pada awal 1900-an di wilayah Magdalena Medio. Luis van Isschot, *The Social Origins of Human Rights* (Madison: University of Wisconsin Press, 2015).

21. Ann Van Wynen Thomas, *The Organization of American States* (Dallas: Southern Methodist University Press, 1963); G. Pope Atkins, *Latin America in the International Political System* (New York: Free Press, 1977). Mengenai Doktrin Betancourt, lihat Leslie Bethell dan Ian Roxborough, “Introduction: The Postwar Conjuncture in Latin America: Democracy, Labor, and the Left,” dalam *Latin America Between the Second World War and the Cold War: Crisis and Containment, 1944–1948*, ed. Leslie Bethell dan Ian Roxborough (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 1–32.

22. Contohnya seperti usulan Juan Bautista Alberdi pada 1844, Doktrin Tobar pada 1907, dua traktat yang dibuat oleh negara-negara Amerika Tengah pada awal 1900-an, deklarasi pada Konferensi Lintas-Amerika pada 1936 di Buenos Aires, dan Doktrin Betancourt pada 1950-an. Lihat Thomas, *The Organization of American States*, 214–18.

23. Jorge I. Domínguez, “International Cooperation in Latin America: The Design of Regional Institutions by Slow Accretion,” ed. Amitav Acharya dan Alastair I. Johnston, *Crafting Cooperation: Regional Institutions in Comparative Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 83–128.

24. Lihat, misalnya, Louise Fawcett, “Between West and Non-West: Latin American Contributions to International Thought,” *International History Review* 34, no. 4 (1 Desember 2012): 679–704. Lihat juga Ivan I. Jaksic, *Andrés Bello: Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Latin America*, Cambridge Latin American Studies 87 (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

25. Domínguez, “International Cooperation in Latin America”; Donald Richard Shea, *The Calvo Clause: A Problem of Inter-American and International Law and Diplomacy* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1955), 140; Manuel R. García-Mora, “The Calvo Clause in Latin American Constitutions and International Law,” *Marquette Law Review* 33 (1949): 205–219 hlm. 206–8.

26. Eduardo Ricardo Pérez Calvo, *Vida y trabajos de Carlos Calvo* (Buenos Aires: Ediciones Dunker, 1996), bab 1.

27. Espejo, “Paradoxes of Popular Sovereignty.”

28. "The Mexican Constitution of 1917 with Amendments through 2015," The Constitute Project, diakses pada 17 Maret 2017, https://www.constituteproject.org/constitution/Mexico_2015?lang=en.

29. Álvarez memaparkan drafnya kepada American Institute of International Law pada 1917 sebagai bagian dari proyek yang lebih besar, tetapi tidak disebutkan dalam keputusan akhir konferensi Havana, serta tidak difinalisasi dan disetujui hingga 1932. René Brunet, *La garantie internationale des droits de l'homme d'après la charte de San-Francisco* (Geneva: Grasset, 1947), 87; "Final Act of the Havana Meeting of the American Institute of International Law," *The American Journal of International Law* 11, no. 2 (1917): 47–53.

30. Untuk pembahasan tentang para lawan, lihat Burgers, "The Road to San Francisco"; Dzovinar Kevonian, "André Mandelstam and the Internationalization of Human Rights," dalam *Revisiting the Origins of Human Rights*, ed. Pamela Slotte dan Miia Halme (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 239–66; Huhle, "Latinoamérica"; Helmut Philipp Aust, "From Diplomat to Academic Activist: André Mandelstam and the History of Human Rights," *European Journal of International Law = Journal Européen de Droit International* 25, no. 4 (2014): 1105–1121; Huhle, "América Latina y la fundamentación del sistema internacional de protección de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial."

31. Ricardo Joaquín Alfaro dan United Nations Conference on International Organization, *Derechos y libertades fundamentales del hombre* (Panama: Imprenta Nacional, 1946), 5.

32. Misalnya, Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*.

33. Burgers, "The Road to San Francisco." Tentang Mandelstam, lihat Kevonian, "André Mandelstam and the Internationalization of Human Rights."

34. Burgers, "The Road to San Francisco," 450–59; Jan Herman Burgers, wawancara dengan penulis, 13 November 1993, The Hague, Netherlands; Huhle, "Latinoamérica." Tentang Mandelstam, lihat juga Aust, "From Diplomat to Academic Activist."

35. Eric D. Weitz, "From the Vienna to the Paris System: International Politics and the Entangled Histories of Human Rights, Forced Deportations, and Civilizing Missions," *The American Historical Review* 113, no. 5 (2008): 1313–1343.

36. Weitz, "From the Vienna to the Paris System."

37. A. Dirk Moses, "Raphael Lemkin, Culture, and the Concept of Genocide," dalam *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, ed. A. Dirk Moses (Oxford: Oxford University Press, 2010), 19–41.

38. William Korey, "Raphael Lemkin: The Unofficial Man," *Midstream*, Juli 1989, 45–48. Lihat juga, Philippe Sands, *East West Street: On the Origins of "Genocide" and "Crimes against Humanity"* (New York: Alfred A. Knopf, 2016).

39. The Fifth International Conference for the Unification of Penal Law, diselenggarakan bekerja sama dengan First Committee of the League of Nations. Raphael Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe; Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress* (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1944).

40. Sands, *East West Street*.

41. Burgers, "The Road to San Francisco." Burgers meninjau pemikiran politik Eropa pada periode ini dan terkejut melihat kegagalan para intelektual dan pembentuk opini dalam menegaskan kembali ide HAM.

42. H.G. Wells, *The Times*, 23 Oktober 1939, sebagaimana dikutip dalam Burgers, "The Road to San Francisco," 494.

43. Hersch Lauterpacht, *An International Bill of the Rights of Man* (New York: Columbia University Press, 1945).

44. Manu Bhagavan, *India and the Quest for One World: The Peacemakers*, Palgrave Macmillan Transnational History Series (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 3.
45. Sebagaimana dikutip dalam Gordon Connell-Smith, *The Inter-American System* (London: Oxford University Press, 1966), 142.
46. Eduardo Rodriguez Larreta, "Inter-American Solidarity: Safeguarding the Democratic Ideal: Note from Uruguayan Foreign Minister to Secretary of State," *Bulletin*, 25 November 1945, 865–66.
47. Simpson, *Human Rights and the End of Empire*, 39.
48. Lihat Sikkink, *Mixed Signals*, bab 2; Azza Salama Layton, *International Politics and Civil Rights Policies in the United States, 1941–1960* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000); Mary L. Dudziak, *Cold War Civil Rights: Race and the Image of American Democracy, Politics and Society in Twentieth-Century America* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011).
49. Sebagaimana dikutip dalam Lauren, *The Evolution of International Human Rights*, 165.
50. Perbedaan Wells dan Hull ihwal kontur tatanan pascaperang juga tampak dalam isu lain di luar HAM, seperti debat seputar pembangunan. Lihat Eric Helleiner, *Forgotten Foundations of Bretton Woods: International Development and the Making of the Postwar Order* (Ithaca: Cornell University Press, 2014).
51. Lauren, *The Evolution of International Human Rights*, 162, 164–65, 167.
52. Jacob Robinson, *Human Rights and Fundamental Freedoms in the Charter of the United Nations: A Commentary, From War to Peace* (New York: Institute of Jewish Affairs, 1946), 17.
53. Brian Urquhart, *Ralph Bunche: An American Life*, edisi ke-1 (New York: W. W. Norton & Co., 1993), 113.
54. M. Glen Johnson, "The Contributions of Eleanor and Franklin Roosevelt to the Development of International Protection for Human Rights," *Human Rights Quarterly* 9 (1987): 19–48 hlm. 24.
55. Lauren, *The Evolution of International Human Rights*, 174–179; Sumner Welles, *Where Are We Heading?* (New York: Harper & Brothers, 1946), 34.
56. Inter-American Juridical Committee, *The Dumbarton Oaks Proposals: Preliminary Comments and Recommendations of the Inter-American Juridical Committee* (Washington, DC: Pan American Union, 1944), 2, 5–7.
57. "Inter-American Conference on Problems of War and Peace, Final Act," dalam *Report of the Delegation of the United States of America to the Inter-American Conference on Problems of War and Peace, Mexico, February 21–March 8 1945* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1946).
58. *Report of the Delegation of the United States of America to the Inter-American Conference on Problems of War and Peace, Mexico, February 21–March 8 1945* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1946); Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 130–1.
59. Inter-American Juridical Committee, *Draft Declaration of the International Rights and Duties of Man and Accompanying Report* (Washington, DC: Pan American Union, 1946), 57–58.
60. Khususnya, Moyn berpendapat, "Dalam karya terbaru saya tentang masalah ini, tesis umum saya adalah bahwa di sepanjang masa perang (*transwar*) yang hilang dan terlupakan, HAM umumnya lebih tepat dilihat sebagai proyek kaum Kristen kanan, bukan kaum Sekular kiri." Samuel Moyn, "Christian Human Rights: An Introduction," *The*

Immanent Frame: Secularism, Religion, and the Public Sphere (blog) 2015, <http://blogs.ssrc.org/tif/2015/05/29/christian-human-rights-an-introduction/>.

61. Katherine Marino, "The Vanguard of Feminist Demands" dalam *The Vanguard for Women's Rights: Pan-American Feminism and the Origins of Human Rights* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, siap terbit), bab 8.

62. Ini mencakup 12 negara dari Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. 6 lainnya berasal dari Uni Soviet (USSR) dan Eropa Timur (termasuk tiga negara yang mewakili Uni Soviet—Republik Sosialis Soviet Ukraina, Republik Sosialis Soviet Byelorusia, dan Uni Soviet).

63. Afrika Selatan (di bawah penguasa minoritas kulit putih) tidak disertakan dalam kedua grup. India hadir dalam kapasitas sebagai pengamat karena belum memperoleh kemerdekaan penuh. *Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945* (New York: UN Information Organizations, 1945), volume 3.

64. Lihat misalnya, Sikkink, "Reconceptualizing Sovereignty in the Americas"; Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*; Glendon, "Forgotten Crucible."

65. Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 130.

66. Lauren, *The Evolution of International Human Rights*, 337, catatan kaki 86.

67. Urquhart, *Ralph Bunche*, 118.

68. Urquhart, *Ralph Bunche*.

69. "Charter of the United Nations," United Nations, diakses pada 18 Maret 2017, <http://www.un.org/en/charter-united-nations/>.

70. Urquhart, *Ralph Bunche*, 122.

71. Istilah *critical juncture* berasal dari literatur institusionalisme sejarah. Lihat, misalnya, Giovanni Capocchia dan R. Daniel Kelemen, "The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism," *World Politics* 59, no. 3 (2007): 341–369.

72. "New Uruguayan Proposals on the Dumbarton Oaks Proposals," dalam *Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945*, 3:34.

73. "Statement of Uruguayan Delegation of Its Position with Reference to Chapters I and II of the Charter as Considered by Committee I/1," dalam *Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945* (New York: UN Information Organizations, 1945), 6:628–33.

74. "Report of Rapporteur, Subcommittee I/1/A (Farid Zeineddine, Syria), to Committee I/1," dalam *Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945*, 6:705.

75. Fabian Klose, *Human Rights in the Shadow of Colonial Violence*, terj. Dona Geyer (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), 35–36.

76. *Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945*, 3:293 (penekanan ditambahkan).

77. Bhagavan, *India and the Quest for One World*.

78. "Charter of the United Nations," United Nations, diakses pada 18 Maret 2017, <http://www.un.org/en/charter-united-nations/>.

79. Sebagaimana dikutip dalam Bhagavan, *India and the Quest for One World*, 68.

80. Negara-negara republik di Amerika lebih dulu karena telah meminta draf deklarasi hak dari Inter-American Juridical Committee di konferensi di Mexico City pada 1945—sebelum Konferensi San Francisco. Karena itu, proses Deklarasi Amerika berjalan lebih awal dalam penyusunan drafnya; DUHAM masih menunggu hingga setelah pertemuan San Francisco dan ratifikasi Piagam PBB. Huhle, "Latinoamérica."

81. The UN Nuclear Preparatory Committee (Komite Persiapan Nuklir PBB) mengadakan pertemuan pertamanya pada April dan Mei 1946. Inter-American Juridical Committee, *Draft Declaration of the International Rights and Duties of Man and Accompanying Report*; Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 4.

82. Lihat Fernando Berdion del Valle dan Kathryn Sikkink, "(Re)discovering Duties: Individual Responsibilities in the Age of Rights," *Minnesota Journal of International Law* 26, no. 1 (2017): 189–245.

83. Carozza, "From Conquest to Constitutions," 12.

84. Seluruh bagian tentang hak dan kewajiban merujuk pada karya yang ditulis bersama Fernando Berdion del Valle, dan saya berterima kasih kepadanya atas izinnya untuk menggunakan beberapa materi tersebut di sini. Lihat Berdion del Valle dan Sikkink, "(Re)discovering Duties: Individual Responsibilities in the Age of Rights."

85. Carozza, "From Conquest to Constitutions," 12.

86. "American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948," Inter-American Commission on Human Rights, diakses pada 18 Maret 2017, <http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic2.american%20Declaration.htm>.

87. Jorge Contesse, "Inter-American Constitutionalism: The Interaction between Human Rights and Progressive Constitutional Law in Latin America," dalam *Law and Society in Latin America: A New Map*, ed. César Rodríguez-Garavito, Law, Development, and Globalization (New York: Routledge, 2015), 220–34.

88. Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Virginia Legal Studies (Charlottesville: University Press of Virginia, 1974).

89. Dardo Regules, *La lucha por la justicia y por el derecho; apuntes sobre la IX Conferencia Panamericana reunida en Bogotá durante el mes de abril de 1948* (Montevideo: Barreiro y Ramos, 1949), 97.

90. Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 130.

91. John P. Humphrey, *Human Rights & the United Nations: A Great Adventure* (Dobbs Ferry, NY: Transnational Publishers, 1984), 31–32.

92. Draft Panama disiapkan oleh American Law Institute dan draft Chili disiapkan oleh Inter-American Juridical Committee OAS. Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 131.

93. Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*.

94. Glendon, *A World Made New*; Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*; Humphrey, *Human Rights & the United Nations*.

95. Semua kutipan dan informasi di paragraf ini berasal dari Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 245–46.

96. Semua kutipan di paragraf ini berasal dari Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 247, 249.

97. Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*.

98. Klose, *Human Rights in the Shadow of Colonial Violence*, 39.

99. Bhagavan, *India and the Quest for One World*, 71–74.

100. UNDAW 2003 sebagaimana dikutip dalam Glendon, "Forgotten Crucible."

101. Marino, "The Vanguard of Feminist Demands."

102. Marino, "The Vanguard of Feminist Demands."

103. Marino, "The Vanguard of Feminist Demands."

104. "Charter of the United Nations," United Nations, diakses pada 18 Maret 2017, <http://www.un.org/en/charter-united-nations/>.

105. Sejarah ini telah terdokumentasikan dengan rinci dalam karya baru Katherine Marino dan Torild Skard, serta terkonfirmasi dalam memoar delegasi Amerika Serikat

Virginia Gildersleeve dan memo pendek yang ditulis Lutz wrote tentang karyanya, serta karya para perempuan lain di Konferensi San Francisco. Lihat Marino, "The Vanguard of Feminist Demands"; Torild Skard, "Getting Our History Right: How Were the Equal Rights of Women and Men Included in the Charter of the United Nations?," *Forum for Development Studies* 35, no. 1 (1 Juni 2008): 37–60; Bertha Lutz, "Women at the Conference in San Francisco," terj. Victoria Junqueira (Museu Virtual of Brazil, t.t.), <http://lhs.unb.br/bertha/wp-content/uploads/2013/02/San-Francisco-Conference-Report.pdf>.

106. Marino, "The Vanguard of Feminist Demands."

107. Lutz, Notes on the San Francisco Conference, sebagaimana yang dilihat Bertha Lutz, Plenipotentiary Brazilian Delegate (0780) ABFPF, sebagaimana dikutip dalam Marino, "The Vanguard of Feminist Demands."

108. Lutz, Notes on the San Francisco Conference, sebagaimana yang dilihat Bertha Lutz, Plenipotentiary Brazilian Delegate (0780) ABFPF sebagaimana dikutip dalam Marino, "The Vanguard of Feminist Demands"; Lutz to Catt, May 21, 1945, Reel 12, NAWSA Papers as quoted in Marino, "The Vanguard of Feminist Demands."

109. Lutz, "Women at the Conference in San Francisco."

110. Lutz, "Women at the Conference in San Francisco."

111. Lutz, "Women at the Conference in San Francisco."

112. Bhagavan, *India and the Quest for One World*, 69–70.

113. Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 118.

114. Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights*, 118.

115. Publik dan ahli HAM tidak mengenal Lutz dan Bernardino, tetapi sejumlah sejarawan yang mempelajari perempuan dan feminisme sempat mengakui karya mereka. Lihat, khususnya, Leila J. Rupp, *Worlds of Women: The Making of an International Women's Movement* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997); Glenda Sluga, *Internationalism in the Age of Nationalism* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, Inc, 2013); Rachel Soihet, *O feminismo táctico de Bertha Lutz*, Série Feministas (Florianópolis, SC: Editora Mulheres, 2006); Ellen DuBois dan Lauren Derby, "The Strange Case of Minerva Bernardino: Pan American and United Nations Women's Right Activist," *Women's Studies International Forum* 32, no. 1 (2009): 43–50.

116. Museum virtual dibuat oleh Teresa Cristina de Novaes Marques. Museum dapat ditemukan di <http://lhs.unb.br/bertha/>.

117. Dalam *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, Mary Ann Glendon tidak hanya merinci upaya Roosevelt, tetapi juga menekankan peran penting aktor utama lain dalam penyusunan draf DUHAM: Charles Malik dari Lebanon, Peng-chun Chang dari Tiongkok, René Cassin dari Prancis, Hernán Santa Cruz dari Chili, Carlos Romulo dari Filipina, Hansa Mehta dari India, dan Alexei Pavlov dari Uni Soviet. Di sini saya tidak banyak membahas peran penting Charles Malik, Peng-chun Chang, dan René Cassin karena Glendon, Morsink, dan lainnya sudah membahasnya panjang lebar.

118. Ini berkaitan dengan pendapat Louise Fawcett bahwa Amerika Latin itu tidak sepenuhnya "Barat" atau pun "non-Barat." Fawcett, "Between West and Non-West."

119. Liliana Obregón, wawancara via email oleh penulis, 18 September 2014. Cambridge, MA.

120. Definisi "kreol" yang paling terkenal adalah keturunan Eropa yang lahir di benua Amerika. Liliana Obregón, "Between Civilization and Barbarism: Creole Interventions in International Law," *Third World Quarterly* 27, no. 5 (2006): 815–832 hlm. 817.

121. Arnulf Becker Lorca, "Writing the History of International Law," makalah disampaikan pada First SJD Association Workshop, Harvard Law School, Cambridge, MA, 9 Mei 2015.

122. Glendon, *A World Made New*, 69–70.

123. Bonny Ibhawoh, *Imperialism and Human Rights: Colonial Discourses of Rights and Liberties in African History*, SUNY Series in Human Rights (Albany: State University of New York Press, 2007), 143–44.

124. Poin serupa juga dikemukakan terkait para aktivis HAM Amerika Latin pada 1970-an oleh Patrick William Kelly dalam bukunya yang akan datang, *Salvation in Small Steps: Latin America and the Making of Global Human Rights Politics* (naskah tidak diterbitkan, t.t.).

125. Tentang jaringan advokasi transnasional, lihat Keck dan Sikkink, *Activists beyond Borders*.

126. Eric Pace, "Carlos P. Romulo of Philippines Dies," *The New York Times*, 16 Desember 1985, <http://www.nytimes.com/1985/12/16/world/carlos-p-romulo-of-philippines-dies.html?pagewanted=all>.

127. Carlos P. Romulo, "The Philippine Pattern," *Far Eastern Survey* 13, no. 14 (1944): 125–129 hlm. 129.

128. Glenn Mitoma, *Human Rights and the Negotiation of American Power* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), 75–76.

129. Mitoma, *Human Rights and the Negotiation of American Power*, 101.

130. Marino, "The Vanguard of Feminist Demands."

131. Rainer Huhle, saat membahas memoar Victor Andrés Belaunde dari Peru dan khususnya keterlibatan Belaunde dalam Konferensi San Francisco, misalnya, mengatakan, "pendiriannya dipengaruhi oleh kebanggaan wilayah Amerika Latin-Hispanik yang kuat, yang menyebabkan penentangan keras terhadap keputusan negara-negara besar di Dumbarton Oaks." Huhle, "Latinoamérica."

132. Gayatri Chakravorty Spivak, "Can the Subaltern Speak?," dalam *The Post-Colonial Studies Reader*, ed. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin (London: Routledge, 1995), 24–28.

133. Bentuk studi *subaltern* yang lebih berorientasi pada aksi dilakukan oleh Boaventura de Sousa Santos dan César Rodríguez-Garavito, yang mengusulkan pendekatan yang mereka sebut "*subaltern cosmopolitan legality*." César Rodríguez-Garavito dan Boaventura de Sousa Santos, eds., *Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality*, Cambridge Studies in Law and Society (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

134. Rom Harré, 1993, sebagaimana dikutip dalam Colin Wight, *Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology*, Cambridge Studies in International Relations 101 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 210.

135. Katherine Marino mengingatkan saya bahwa, meski Bertha Lutz dalam beberapa segi terpisah dari masyarakatnya, dia dan kelompok feminisnya sangat memengaruhi wacana politik publik di Brasil dan menggerakkan perubahan perundang-undangan nasional untuk perempuan. Katherine Marino, percakapan dengan penulis, 11 April 2016, Cambridge, MA.

136. Waltz, "Universalizing Human Rights."

137. Miia Halme-Tuomisaari, "Lobbying for Relevance: American Internationalist, French Civil Libertarians and the UDHR," dalam *Revisiting the Origins of Human Rights*, ed. Pamela Slotte dan Miia Halme-Tuomisaari (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 330–361 hlm. 331–32.

138. Sands, *East West Street*.

139. Regules, *La lucha por la justicia y por el derecho*, 93.

140. Mauricio García Villegas, "Ineffectiveness of the Law and the Culture of Noncompliance with Rules in Latin America," dalam *Law and Society in Latin America: A New Map*, ed. César Rodríguez-Garavito, Law, Development, and Globalization (New York: Routledge, 2015), 63–80.

141. Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*, x.

142. Regules, *La lucha por la justicia y por el derecho*, 126.

Bab 4. Perjuangan HAM Era Perang Dingin

1. Saya terbantu oleh Jo-Marie Burt dalam memahami seluk-beluk kasus ini. Lihat laporan-laporannya tentang perjuangan hukum yang sedang berlangsung melawan impunitas di Guatemala, "Guatemala Trials before the National Courts of Guatemala," the International Justice Monitor, terakhir diperbarui pada 17 Januari 2017, <http://www.ijmonitor.org/category/guatemala-trials/> serta karyanya yang lain tentang subjek ini, seperti Jo-Marie Burt, "Historic Verdict in Guatemala's Genocide Case Overturned by Forces of Impunity," *NACLA Report on the Americas* 46, no. 2 (2013): 1–3.

2. Comisión para el Esclarecimiento Histórico, *Guatemala: Memory of Silence = Tz'inil Na'tab'al; Report of the Commission for Historical Clarification, Conclusions and Recommendations*, edisi ke-2 (Guatemala: CEH, 1998), http://www.aaas.org/sites/default/files/migrate/uploads/mos_en.pdf; "Truth Commission: Guatemala," United States Institute of Peace, diakses pada 17 Juni 2016, <http://www.usip.org/publications/truth-commission-guatemala>.

3. Untuk mengetahui pembahasan tentang tantangan terhadap hukum amnesti di Guatemala, lihat transitionaljusticedata.com, di bawah undang-undang amnesti 1996, tantangan di <https://transitionaljusticedata.com/browse/index/Browse.mechanism:amnesties/Browse.countryid:48>. Geoff Dancy, et al., 2014 "The Transitional Justice Research Collaborative: Bridging the Qualitative-Quantitative Divide with New Data," Transitional Justice Research Collaborative, terakhir diperbarui pada 2014, <https://transitionaljustice-data.com>.

4. CICIG memiliki banyak atribut jaksa internasional, tetapi beroperasi di bawah undang-undang Guatemala, di pengadilan Guatemala, dan mengikuti prosedur pidana Guatemala. Lihat CICIG: The International Commission against Impunity in Guatemala, diakses pada 18 Juni 2016, <http://www.cicig.org/index.php?page=about> untuk informasi selengkapnya.

5. King menggunakan frasa ini berkali-kali, termasuk dalam pidatonya di tengah unjuk rasa di Selma pada 1965. Frasa serupa pertama kali digunakan dalam khotbah Parker pada 1853. "Theodore Parker and the Moral Universe," All Things Considered, National Public Radio, 2 September 2010, <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=129609461>.

6. Jack Snyder dan Leslie Vinjamuri, "Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice," *International Security* 28, no. 3 (2004): 5–44.

7. Boaventura de Sousa Santos, *If God Were a Human Rights Activist*, Stanford Studies in Human Rights (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2015).

8. Lihat, misalnya, Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality"; Arenas Catalán, "Back to the Future."

9. Albert O. Hirschman, "Political Economics and Possibilism," dalam bukunya *A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America* (New Haven: Yale University Press, 1971), 1–37.

10. Moyn, *The Last Utopia*.
11. Fokus saya pada bab ini lebih pada sejarah diplomatik, tetapi di dalamnya juga terdapat sejarah sosial yang kaya tentang perjuangan HAM pada waktu dan tempat tertentu di seluruh wilayah. Lihat, misalnya, van Isschot, *The Social Origins of Human Rights*; Steve J. Stern, *Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries* (Madison: University of Wisconsin Press, 1987).
12. Jensen, *The Making of International Human Rights*, 46.
13. Andrew Moravcsik, "The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe," *International Organization* 54, no. 2 (2000): 217–252.
14. Jensen, *The Making of International Human Rights*.
15. Simpson, *Human Rights and the End of Empire*, 2–13.
16. Komite hukum Majelis Eropa baru merekomendasikan pembentukan organisasi serupa di Eropa lebih dari setahun setelahnya, pada September 1949. Moravcsik, "The Origins of Human Rights Regimes."
17. Resolusi Brasil menegaskan bahwa, "tidak ada hak yang dijamin dengan baik tanpa perlindungan pengadilan; dan menyangkut hak yang diakui secara internasional, perlindungan peradilan, agar efektif, harus berasal dari organ internasional." "Proyecto de resolución sobre la creación de una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del hombre, documento publicado con la clasificación CB-125/C.VI-6," dalam *Actas y documentos* (Bogotá, Colombia: Novena Conferencia Internacional Americana, 1948), 6:464–65 (terjemahan Bahasa Inggris oleh penulis).
18. Secara khusus, Inter-American Juridical Committee mengatakan, sebagai tanggapan terhadap resolusi Brasil untuk menyiapkan Statuta bagi Pengadilan HAM Antar-Amerika yang baru, bahwa "kurangnya hukum positif tentang masalah tersebut merupakan hambatan serius bagi penyiapan Statuta semacam itu," dan menyarankan agar "sebaiknya menyiapkan Konvensi terlebih dahulu." *Inter-American Council of Jurists, Inter-American Court to Protect the Rights of Man* (Washington, DC: Department of International Law, Pan American Union, 1953), 2.
19. Brian J. Bosch, *Balaguer and the Dominican Military: Presidential Control of the Factional Officer Corps in the 1960s and 1970s* (Jefferson, NC: McFarland & Co., 2007), 30.
20. Aníbal Luis Barbagelata dan Justino Jiménez de Aréchaga, "Prólogo," dalam *Escritos y discursos*, Ediciones del Instituto Artigas del Servicio Exterior (Montevideo: República Oriental del Uruguay, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Artigas del Servicio Exterior, 1992), 11.
21. Piero Gleijeses, *Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944–1954* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991).
22. Gleijeses, *Shattered Hope*.
23. Inter-American Conference, *Décima conferencia interamericana, Caracas, Venezuela, 1o al 28 de marzo de 1954: actas y documentos*, Conferencias y organismos 39 (Washington, DC: Unión Panamericana, 1956), 157–158.
24. Inter-American Conference, *Décima conferencia interamericana*, 265.
25. Untuk pembahasan yang lebih rinci tentang perdebatan ini, terkait dengan Amandemen Bricker, lihat Sikkink, *Mixed Signals*.
26. Organization of American States, General Secretariat, *Quinta reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores. Santiago de Chile, 12 al 18 de agosto de 1959. Actas y documentos*, OEA/Ser.F/III.5 (Washington, DC: Unión Panamericana, 1961), 316.
27. Lihat Sikkink, *Mixed Signals*, bab 2; Layton, *International Politics and Civil Rights Policies in the United States, 1941–1960*; Dudziak, *Cold War Civil Rights*.
28. Inter-American Conference, *Décima conferencia interamericana*, 192.

29. Di Caracas, duta besar Guatemala menegaskan bahwa salah satu tujuan revolusi 1944 adalah menjadikan Guatemala sebagai negara kapitalis modern. Inter-American Conference, *Décima conferencia interamericana*, 282.

30. Gleijeses, *Shattered Hope*, 147–148, 164.

31. Gleijeses, *Shattered Hope*, 268.

32. “Declaration of Solidarity for the Preservation of the Political Integrity of the American States Against International Communist Intervention Adopted by the Tenth Inter-American Conference,” 28 Maret 1954, *The Avalon Project, Yale Law School* http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam10.asp.

33. Justino Jiménez de Aréchaga, *Escritos y discursos*, Ediciones del Instituto Artigas del Servicio Exterior (Montevideo: República Oriental del Uruguay, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Artigas del Servicio Exterior, 1992), 260–61 (terjemahan Bahasa Inggris oleh penulis).

34. Lihat, terutama, Jensen, *The Making of International Human Rights*; Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*; Klose, *Human Rights in the Shadow of Colonial Violence*.

35. Moyn berpendapat bahwa dekolonisasi tidak berkaitan dengan HAM. Moyn, *The Last Utopia*. Untuk penafsiran alternatif, lihat, misalnya, Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*; Jensen, *The Making of International Human Rights*.

36. Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*, 148.

37. Jensen, *The Making of International Human Rights*, 2.

38. Klose, *Human Rights in the Shadow of Colonial Violence*, 5.

39. Jan-Miller Muller, 2010, sebagaimana dikutip dalam Jensen, *The Making of International Human Rights*, 3.

40. Frederick Cooper dikutip dalam Jensen, *The Making of International Human Rights*, 278.

41. Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*.

42. Eric Weitz memetakan bagaimana istilah *self-determination* beralih dari konsep Pencerahan terkait individu yang memiliki pengetahuan diri, dan mampu membebaskan diri, menjadi konsep tentang bangsa dan hak kolektif. Eric D. Weitz, “Self-determination: How a German Enlightenment idea became the slogan of national liberation and a human right,” *American Historical Review* 120 no. 2 (2015): 462–496.

43. Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*.

44. G. N. Uzoigwe, “Pan-Africanism in World Politics: The Geopolitics of the Pan-African Movements, 1900–2000,” dalam *Pan-Africanism and the Politics of African Citizenship and Identity*, ed. Toyin Falola dan Kwame Essien, Routledge African Studies (New York: Routledge, 2014), 214–246 di 227. Lihat juga, Coe, “Regional Identities and Dynamic Normative Orders in the Global South.”

45. Quataert, *Advocating Dignity*, 73; Klose, *Human Rights in the Shadow of Colonial Violence*, 22.

46. Uzoigwe, “Pan-Africanism in World Politics.”

47. Audie Klotz, *Norms in International Relations: The Struggle against Apartheid*, Cornell Studies in Political Economy (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1995).

48. Gary J. Bass, “The Indian Way of Humanitarian Intervention,” *The Yale Journal of International Law* 40, no. 2 (2015): 227–294 hlm. 247.

49. PBB akhirnya menetapkan 1968 sebagai Tahun HAM Internasional.

50. Ervand Abrahamian, “The 1953 Coup in Iran,” *Science & Society* 65, no. 2 (Summer 2001): 182–215 hlm. 186.

51. Stephen Kinzer, *All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror* (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003), 69–70.
52. Kinzer, *All the Shah's Men*, 71, 82.
53. Abrahamian, "The 1953 Coup in Iran," 186–187.
54. Shiva Balaghi, "Silenced Histories and Sanitized Autobiographies: The 1953 CIA Coup in Iran," *Biography* 36, no. 1 (2013): 71–96 hlm. 85, 87; Mark J. Gasiorowski, "The CIA Looks Back at the 1953 Coup in Iran," *Middle East Report*, no. 216 (2000): 4–5 hlm. 4.
55. Francis J. Gavin, "Politics, Power, and U.S. Policy in Iran, 1950–1953," *Journal of Cold War Studies* 1, no. 1 (1 Januari 1999): 56–89.
56. Abrahamian, "The 1953 Coup in Iran," 204.
57. Abrahamian, "The 1953 Coup in Iran," 182, 194.
58. Gavin, "Politics, Power, and U.S. Policy in Iran, 1950–1953," 65–66.
59. Abrahamian, "The 1953 Coup in Iran," 211, 217.
60. James Risen, "New York Times Special Report: The C.I.A. in Iran," *The New York Times*, 2000, <http://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html>.
61. Balaghi, "Silenced Histories and Sanitized Autobiographies."
62. Stephen R. Weissman, "Opening the Secret Files on Lumumba's Murder," *Washington Post*, 21 Juli 2002, <http://www.udel.edu/globalagenda/2003/student/readings/CIAlumumba.html>.
63. Stephen R. Weissman, "What Really Happened in Congo," *Foreign Affairs* 93, no. 4 (2014): 14–24; Weissman, "Opening the Secret Files on Lumumba's Murder"; Edouard Bustin, "Remembrance of Sins Past: Unraveling the Murder of Patrice Lumumba," *Review of African Political Economy* 29, no. 93/94 (2002): 537–60.
64. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, "Draft Assassination Report [Pages Missing]," Top Secret, Report, 1 (16 Oktober 1975).
65. Weissman, "What Really Happened in Congo," 14.
66. René Lemarchand, "The C.I.A. in Africa: How Central? How Intelligent?," *Journal of Modern African Studies* 14, no. 3 (1976): 401–26 hlm. 410.
67. Lemarchand, "The C.I.A. in Africa," 404.
68. "Document 5 – Paper Prepared in the Central Intelligence Agency: CIA Position in Belgian Congo RE Political Action Operations" dalam *Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXIII, Congo, 1960–1968 - Historical Documents - Office of the Historian*, diakses pada 20 Maret 2016, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v23/d5>.
69. Christian Parenti, "In Search of Lumumba," *In These Times*, 30 Januari 2008, http://inthesetimes.com/article/3500/in_search_of_lumumba.
70. Parenti, "In Search of Lumumba."
71. Gary Jonathan Bass, *The Blood Telegram: Nixon, Kissinger, and a Forgotten Genocide*, edisi ke-1 (New York: Alfred A. Knopf, 2013), xii–xiii.
72. Syed Badrul Ahsan, "Bangladesh since 1971: How Far Has It Come?," *Asian Affairs* 36, no. 2 (Juli 2005): 149–57 hlm. 152.
73. Bass, *The Blood Telegram*, 24, xiv.
74. Pratap Bhanu Mehta, sebagaimana dikutip dalam Bass, "The Indian Way of Humanitarian Intervention," 229.
75. Bass, "The Indian Way of Humanitarian Intervention," 229.
76. Jensen, *The Making of International Human Rights*, 186.
77. Jensen, *The Making of International Human Rights*.

78. Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*.
79. Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*, 94.
80. Uzoigwe, "Pan-Africanism in World Politics," 227. Paragraf ini banyak merujuk pada Jensen, *The Making of International Human Rights*, 108–117.
81. Sebagaimana dikutip dalam Coe, "Regional Identities and Dynamic Normative Orders in the Global South," 166.
82. Lihat, misalnya, Carrie Booth Walling, *All Necessary Measures: The United Nations and Humanitarian Intervention*, edisi ke-1, Pennsylvania Studies in Human Rights (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013).
83. *Discurso del Excmo. Señor Raul Roa Garcia, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Pronunciado en la Sesión Plenaria Celebrada el 17 de Agosto de 1959*, Documento 93 (Santiago, Chile: Organization of American States, Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, 1959).
84. *Discurso del Excmo. Señor Raul Roa Garcia*, 342 (terjemahan Bahasa Inggris oleh penulis).
85. Ini terjadi pada konferensi 1960 di San José, Kosta Rika. Seventh Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs of American States, "XIII Preparation of the Final Act," 22–29 Agustus 1960, <http://www.oas.org/council/MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/Actas/Acta%207.pdf> hlm. 13.
86. Seventh Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs of American States, "Appendix 5: Doc. 51: Political Stability and Underdevelopment, Draft Resolution," 22–29 Agustus 1960, <http://www.oas.org/council/MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/Actas/Acta%207.pdf> 31–32 hlm. 32.
87. Che Guevara, *Venceremos! The Speeches and Writings* (New York: Macmillan, 1968), 158.
88. John Dreier, *The OAS and the Hemisphere Crisis*, Harper and Row, for the Council on Foreign Relations, New York, 1962, hlm. 132, sebagaimana dikutip dalam Cecilia Medina Quiroga, *The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and the Inter-American System* (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1988), 67.
89. Medina Quiroga, *The Battle of Human Rights*, 70.
90. William Wipfler, wawancara via telepon dengan penulis, 29 April 1996.
91. David Weissbrodt, "The Role of Intergovernmental Organizations in the Implementation of Human Rights," *Texas International Law Journal* 12, no. 2 (1977): 293–320 hlm. 314.
92. William Wipfler, wawancara via telepon dengan penulis, 29 April 1996.
93. Medina Quiroga, *The Battle of Human Rights*, 82, 83.
94. Genaro R. Carrió, *El sistema americano de derechos humanos*, Derechos humanos: temas y problemas 2 (Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1987), 21–22.
95. Inter-American Commission on Human Rights, Organization of American States (OAS) Official Records, "Third Report on the Situation of Human Rights in Chile," 11 Februari 1977, <http://www.cidh.org/countryrep/Chile77eng/INDEX.htm>; Inter-American Commission on Human Rights, Organization of American States (OAS) Official Records, "Report on the Situation of Human Rights in Haiti," 9 Februari 1995, <http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2010/02/1995-ICHR-Report-Haiti.pdf>; Inter-American Commission on Human Rights, Organization of American States (OAS) Official Records, "Report on the Situation of Human Rights in El Salvador," 29 September 1999, <http://www.cidh.oas.org/annualrep/99eng/Merits/UnitedStates10.951.htm>.

96. Inter-American Commission on Human Rights, Organization of American States (OAS) Official Records, "Report on the Situation of Human Rights in Argentina," 11 April 1980, <http://www.cidh.org/countryrep/Argentina80eng/toc.htm>.
97. Inter-American Court for Human Rights, Case of Velásquez Rodríguez v. Honduras, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988), <http://www.refworld.org/docid/40279a9e4.html>.
98. Bhagavan, *India and the Quest for One World*, 109–13. Negara berkembang lain yang mendukung gagasan dua Kovenan antara lain Tiongkok, Brasil, dan Venezuela.
99. United Nations, María del Carmen Almeida de Quinteros et. al. v. Uruguay, Communication No. 107/1981, U.N. Doc. CCRP/C/OP/2, 31 Juli 1983, <https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/newscans/107-1981.html>.
100. United Nations, "María del Carmen Almeida de Quinteros et. al. v. Uruguay."
101. United Nations, "María del Carmen Almeida de Quinteros et. al. v. Uruguay."
102. Simpson, *Human Rights and the End of Empire*, 2–13.
103. Sikkink, *The Justice Cascade*, bab 2 tentang Yunani dan Portugal.
104. Ann Marie Clark, *Diplomacy of Conscience: Amnesty International and Changing Human Rights Norms* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001).
105. European Commission of Human Rights and Council of Europe, *The Greek Case: Report of the Commission*, vol. 2 Part I, 3 vols. (Strasbourg, 1970).
106. Daniel C. Thomas, *The Helsinki Effect: International Norms, Human Rights, and the Demise of Communism* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001).
107. Lihat Sikkink, *Mixed Signals*, bab 3.
108. Ini menunjukkan pandangan berbeda tentang peran pemerintahan Carter dibandingkan pandangan Moyn, yang keliru menafsirkan bahwa kebijakan HAM di kawasan Amerika *sebagian besar* karena Carter. Moyn, *The Last Utopia*. Lihat juga, Sikkink, *Mixed Signals*.
109. Untuk informasi selengkapnya tentang klaim keterlibatan HAM dengan neoliberalisme, lihat bab 2.
110. Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*, xii.
111. Guillermo A. O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*, Politics of Modernization Series 9 (Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1979); David Collier dan Fernando Henrique Cardoso, *The New Authoritarianism in Latin America* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979).
112. Albert O. Hirschman, "The Turn to Authoritarianism in Latin America and the Search for Its Economic Determinants," dalam *The New Authoritarianism in Latin America* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979), 61–98 hlm. 61–62.
113. Mainwaring, *Democracies and Dictatorships in Latin America*.
114. Mainwaring, *Democracies and Dictatorships in Latin America*.
115. Jensen, *The Making of International Human Rights*, 280.
116. Jensen, *The Making of International Human Rights*, 197.
117. Jensen, *The Making of International Human Rights*.
118. Jane Mayer, *The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals* (New York: Doubleday, 2008).
119. Frank del Olmo, "A '50s Victim of the CIA Is Finally at Rest, With Honors: *Guatemala: President Jacobo Arbenz Was Toppled by a U.S.-Directed Coup; Now Even the Military Grants Him Hero Status," Los Angeles Times, 11 Desember 1995, http://articles.latimes.com/1995-12-11/local/me-12810_1_president-jacobo-arbenz.

120. Selengkapnya tentang kasus Pinochet, lihat Naomi Roht-Arriaza, *The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights*, Pennsylvania Studies in Human Rights (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005).

121. Lihat, misalnya, Ellen L. Lutz dan Caitlin Reiger, *Prosecuting Heads of State* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009); Naomi Roht-Arriaza dan Javier Mariezcurrena, *Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

122. Ellen Lutz dan Kathryn Sikkink, "The Justice Cascade: The Evolution and Impact of Foreign Human Rights Trials in Latin America," *Chicago Journal of International Law* 2, no. 1 (2001): 1–33. Kami meminjam istilah "kaskade" dari teoretikus Cass Sunstein, yang membicarakan soal kaskade norma sosial. Kaskade norma menurutnya adalah "perubahan yang cepat dan dramatis dalam legitimasi norma dan tindakan yang didasarkan pada norma tersebut." Lihat Cass R. Sunstein, *Free Markets and Social Justice* (New York: Oxford University Press, 1997).

123. Mengenai perluasan metafora ini dalam kaitannya dengan Statuta Mahkamah Pidana Internasional, lihat Benjamin N. Schiff, *Building the International Criminal Court* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

124. Mark A. Pollack, "The New Institutionalisms and European Integration," dalam *European Integration Theory*, ed. Antje Wiener dan Thomas Diez, edisi ke-2 (Oxford University Press, 2009), 125–43 hlm. 127.

125. Untuk pembahasan tentang ini, lihat David Armitage, "What's the Big Idea? Intellectual History and the Longue Durée," *History of European Ideas* 38, no. 4 (2012): 493–507.

126. Justino Jiménez de Aréchaga, *Opera minora, 1933–1979*, Colección Testimonios (Montevideo: Ediciones de la Plaza, 2001).

127. Jiménez de Aréchaga, *Opera minora, 1933–1979*.

Bab 5. Mengapa Sulit Sekali Mengukur Efektivitas Hak Asasi Manusia?

1. Pada bab ini, saya menggunakan artikel yang saya tulis bersama Ann Marie Clark dan saya berterima kasih kepadanya karena telah mengizinkan saya menggunakan beberapa materi tersebut pada bab ini. Clark dan Sikkink, "Information Effects and Human Rights Data."

2. Lucia Nader, wawancara Skype dengan penulis, 10 Februari 2016.

3. Amy Joscelyne et al., "Mental Health Functioning in the Human Rights Field: Findings from an International Internet-Based Survey," *PLOS ONE* 10, no. 12 (23 Desember 2015), <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0145188>.

4. Lihat United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, "The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies," diakses pada 12 Maret, 2015, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx> untuk deskripsi tentang instrumen HAM internasional inti dan badan pemantaunya.

5. Lihat International Criminal Court, "The States Parties to the Rome Statute," diakses pada 9 Maret 2017, https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx.

6. Di Afrika, 53 negara telah meratifikasi Piagam Afrika tentang HAM dan Penduduk (African Charter on Human and Peoples' Rights), namun hanya 24 negara yang menerima yurisdiksi wajib Mahkamah Afrika. African Commission on Human and Peoples' Rights, "Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on

the Establishment of the African Court on Human and Peoples' Rights," diakses pada 12 Desember 2016, <http://www.achpr.org/instruments/court-establishment/>.

7. Lihat David Luban, "The War on Terrorism and the End of Human Rights," *Philosophy & Public Policy Quarterly* 22, no. 3 (2002): 9–14, <http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/892/>; Michael Ignatieff, "Is the Human Rights Era Ending?," *The New York Times*, 5 Februari 2002, <http://www.nytimes.com/2002/02/05/opinion/is-the-human-rights-era-ending.html>.

8. "Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide," United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, diperbarui 2017, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx>.

9. Data ini diambil dari Indikator Genosida/Politisida Political Instability Task Force (PITF) State Failure Problem Set, 1955–2014. Center for Systemic Peace, INSCR Data Page, diakses pada 1 Maret 2017, <http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html>.

10. Human Security Report Project, Security Statistics, Definitions, diakses pada 1 Maret 2017, <http://www.hsrgroup.org/our-work/security-stats/Definitions.aspx>.

11. Hollie Nyseth Brehm, "Conditions and Courses of Genocide" (Disertasi Ph.D. University of Minnesota, 2014).

12. Lihat, misalnya, Helen Fein, *Genocide: A Sociological Perspective*, vol. 38, no. 1, *Current Sociology* (London: Sage Publications, 1990); James Waller, *Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing*, Edisi ke-2. (Oxford: Oxford University Press, 2007); Nyseth Brehm, "Conditions and Courses of Genocide"; Eric D. Weitz, *A Century of Genocide: Utopias of Race and Nation* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003).

13. Sikkink, *The Justice Cascade*; Kim dan Sikkink, "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries."

14. Saya tidak dapat mengatakan bahwa penuntutan semacam itu mencegah genosida dengan sendirinya karena tim saya belum berkesempatan menggunakan data kami untuk menguji dampak penuntutan terhadap genosida. Dengan tersedianya data terkait akuntabilitas yang reliabel saat ini, kami mendorong para ahli genosida untuk menguji apakah meningkatnya akuntabilitas terkait dengan menurunnya genosida dan politisida.

15. "Death Penalty," Amnesty International, diakses pada 16 Juni 2016, <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>.

16. "Death Penalty"; "The Death Penalty: An International Perspective," Death Penalty Information Center, diakses pada 16 Juni 2016, <http://www.deathpenaltyinfo.org/death-penalty-international-perspective>. Konvensi Eropa tentang HAM (European Convention on Human Rights) (Protokol No. 13) melarang penggunaan hukuman mati seluruhnya, bahkan saat perang. Hukum internasional berikut ini secara eksplisit melarang hukuman mati, kecuali saat perang: Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang HAM (European Convention on Human Rights), dan Protokol untuk Konvensi Amerika tentang HAM untuk Menghapuskan Hukuman mati (American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty). Untuk melihat seluruh konvensi tersebut, lihat "International Human Rights Instruments," University of Minnesota Human Rights Library, diakses pada 11 March 2017, <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/ainstls1.htm>.

17. Beth A. Simmons, *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

18. Simmons, *Mobilizing for Human Rights*; Robyn Linde, *The Globalization of Childhood: The International Diffusion of Norms and Law against the Child Death Penalty* (New York: Oxford University Press, 2016).

19. Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Dicitak ulang dengan koreksi (Oxford: Clarendon Press, 1982).

20. Amartya Sen, "Freedoms and Needs: An Argument for the Primacy of Political Rights," *The New Republic* 210, no. 2–3 (1994): 31–38; Amartya Kumar Sen, "Democracy as a Universal Value," *Journal of Democracy* 10, no. 3 (1999): 3–17.

21. "Rome Declaration and Plan of Action," Repositori Dokumen Korporat FAO, 13–17 November 1996, <http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.HTM>.

22. "Children: Reducing Mortality," World Health Organization, diakses pada 18 Juni 2016, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/>.

23. Kathryn Sikkink, "Codes of Conduct for Transnational Corporations: The Case of the WHO/UNICEF Code," *International Organization* 40, no. 4 (1986): 815–40.

24. Simmons, *Mobilizing for Human Rights*.

25. Simmons, *Mobilizing for Human Rights*; Daniel W. Hill, "Estimating the Effects of Human Rights Treaties on State Behavior," *The Journal of Politics* 72, no. 4 (2010): 1161–1174. Yonatan Lupu, "The Informative Power of Treaty Commitment: Using the Spatial Model to Address Selection Effects," *American Journal of Political Science*, 57 no. 4 (2013): 912–925.

26. Thomas Risse, Steve C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, Cambridge Studies in International Relations 66 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, eds., *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*, Cambridge Studies in International Relations 126 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

27. Lihat khususnya bab yang ditulis Katrin Kinzelbach dan Kathryn Sikkink. Katrin Kinzelbach, "Resisting the Power of Human Rights: the People's Republic of China," dalam *The Persistent Power of Human Rights*, 164–81. Kathryn Sikkink, "The United States and Torture: Does the Spiral Model Work?" dalam *The Persistent Power of Human Rights*, 145–63.

28. Oona A. Hathaway, "Do Human Rights Treaties Make a Difference?," *The Yale Law Journal* 111, no. 8 (2002): 1935–2042; James Raymond Vreeland, "Political Institutions and Human Rights: Why Dictatorships Enter into the United Nations Convention against Torture," *International Organization* 62, no. 1 (2008): 65–101.

29. Emilie M. Hafner-Burton and James Ron, "Seeing Double: Human Rights Impact through Qualitative and Quantitative Eyes," *World Politics* 61, no. 2 (2009): 360–401.

30. Malcolm K. Sparrow, *The Character of Harms: Operational Challenges in Control* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 181.

31. "Violence against Women," World Health Organization, diakses pada 1 Maret 2017, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/>.

32. Keck dan Sikkink, *Activists beyond Borders*.

33. Semua materi pada paragraf ini diambil dari dua sumber. Steven Livingston, "Digital Affordances and Human Rights Investigations" (makalah tidak diterbitkan, diterima pada 1 Maret 2017). Steven Livingston, "Conference Report: Technology & Human Rights in the 21st Century" (Laporan konferensi, Carr Center for Human Rights Policy, Harvard Kennedy School, Cambridge, MA), diakses pada 3 Maret 2017, <http://carrcenter.hks.harvard.edu/publications/conference-report-technology-human-rights-21st-century>.

34. Clark dan Sikkink, "Information Effects and Human Rights Data," 540.

35. Keck dan Sikkink, *Activists beyond Borders*, 194.

36. Mengutip Klara Selin, sosiolog di National Council for Crime Prevention, Stockholm, dalam sebuah tulisan blog, Martin W. Lewis, "Misleading Murder and Rape Maps, and the Sweden Rape Puzzle," *GeoCurrents* (blog), 25

Mei 2013, <http://www.geocurrents.info/geography-of-crime-and-punishment/misleading-murder-and-rape-maps-and-the-the-sweden-rape-puzzle>.

37. Sparrow, *The Character of Harms*, 181.

38. Will H. Moore, "Quantitative Data in Human Rights: What Do the Numbers Really Mean?," *openDemocracy*, 16 Mei 2016, <https://www.opendemocracy.net/open-globalrights/will-h-moore/quantitative-data-in-human-rights-what-do-numbers-really-mean>.

39. Bahaya tersembunyi seperti itu sangat mudah diprediksi hingga Sparrow menciptakan istilah lain untuk itu—Langkah aktivitas terkait intervensi ("Intervention-related activity measures" atau IRAM). Dia mencontohkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai ilustrasi. Para pakar kekerasan dalam rumah tangga dapat mengantisipasi bahwa kampanye mereka dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang masalah ini akan mendorong lebih banyak pelaporan karena mereka menjanjikan bantuan, perlindungan, dan pelayanan kepada para korban yang melapor. Sparrow, *The Character of Harms*, 191.

40. Steven Pinker, *The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined*, Harvard Library E-Reader Collection (New York: Viking, 2011). Cetak ulang *The Better Angels of Our Nature* diterbitkan oleh Penguin books pada 2011. Lihat bahasan di hlm. 189–190, 193–194, 200, 203, 219, 369–70, 511–515.

41. Amos Tversky dan Daniel Kahneman, "Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases," *Science* 185, no. 4157 (27 September 1974): 1124–1131.

42. Amos Tversky dan Daniel Kahneman, "Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability," *Cognitive Psychology* 5, no. 2 (1973): 207–232.

43. Graham Allison, "The Sky Is Falling, and Other Threats," *The Boston Globe*, 22 Februari 2016, http://epaper.bostonglobe.com/BostonGlobe/article_popover.aspx?guid=0555c5a0-0f1c-4394-9985-e5150e91f60f&source=prev.

44. Tversky dan Kahneman, "Availability."

45. Sen, *The Idea of Justice*, 164.

46. Roy F. Baumeister et al., "Bad Is Stronger Than Good," *Review of General Psychology* 5, no. 4 (2001): 323–370.

47. Baumeister et al., "Bad Is Stronger Than Good," 323.

48. Amos Tversky dan Daniel Kahneman, "Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty," *Journal of Risk and Uncertainty* 5, no. 4 (1992): 297–323.

49. Susan T. Fiske dan Shelley E. Taylor, *Social Cognition*, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 1991).

50. Baumeister et al., "Bad Is Stronger Than Good."

51. Felicia Pratto dan Oliver P. John, "Automatic Vigilance: The Attention-Grabbing Power of Negative Social Information," *Journal of Personality and Social Psychology* 61, no. 3 (1991): 380–391. Sebagaimana dikutip dalam Baumeister et al., "Bad Is Stronger Than Good," 341.

52. Baumeister et al., "Bad Is Stronger Than Good."

53. Robert W. Schrauf dan Julia Sanchez, "The Preponderance of Negative Emotion Words in the Emotion Lexicon: A Cross-Generational and Cross-Linguistic Study," *Journal of Multilingual and Multicultural Development* 25, no. 2–3 (2004): 266–84.

54. Alina Tugend, "Praise Is Fleeting, But Brickbats We Recall," *The New York Times*, 24 Maret 2012, <http://www.nytimes.com/2012/03/24/your-money/whypeople-remember-negative-events-more-than-positive-ones.html>.

55. Professor Clifford Nass dikutip dalam Tugend, "Praise Is Fleeting, But Brickbats We Recall."

56. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*. Saya terbantu oleh diskusi dengan kolega saya Geoff Dancy, yang juga mengajar tentang kaitan antara gagasan Hirschman dengan pesimisme HAM modern.

57. Samantha Power, penulis HAM lainnya, menemukan kategori kebalikan, kesia-siaan, dan kemudaratatan (*perversity, futility, jeopardy*) dari Hirschman membantu dalam memikirkan perdebatan HAM modern. Samantha Power, "A Problem from Hell": *America and the Age of Genocide* (New York: Basic Books, 2002).

58. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 7.

59. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 21.

60. Snyder dan Vinjamuri, "Trials and Errors"; Geoff Dancy dan Veronica Michel, "Human Rights Enforcement from Below: Private Actors and Prosecutorial Momentum in Latin America and Europe," *International Studies Quarterly* 60, no. 1 (2016): 176–88.

61. Kim dan Sikkink, "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries."

62. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 7.

63. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 65.

64. Posner, "Have Human Rights Treaties Failed?"

65. Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality." Meski pernyataan ini menggambarkan kesan kesia-siaan wacana HAM, secara umum, Moyn lebih mengkritik kebalikan atau kemudaratatan HAM.

66. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 7.

67. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 94.

68. Jack Goldsmith dan Stephen D. Krasner, "The Limits of Idealism," *Daedalus* 132, no. 1 (2003): 47–64 hlm. 51.

69. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 33.

70. Hirschman, *Journeys toward Progress*.

71. Adelman, *Worldly Philosopher*.

72. Adelman, *Worldly Philosopher*, 487.

73. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 36, 26, 54, 44.

74. Patrick Ball, percakapan dengan penulis, di konferensi "How Do We Know What We Know? Charting the Future for Human Rights Documentation and Analysis" pada 23–24 Jan 2015, Arizona State University, Tempe, AZ, Januari 2015.

75. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 36.

76. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 38.

77. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*, 151.

78. Joscelyne et al., "Mental Health Functioning in the Human Rights Field."

79. Joscelyne et al., "Mental Health Functioning in the Human Rights Field."

80. "Resilience," *Psychology Today*, diakses pada 15 Desember 2016, <https://www.psychologytoday.com/basics/resilience>.

81. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan frasa ini, tetapi ini dipopulerkan oleh Eric Pooley, "Grins, Gore and Videotape: The Trouble with Local TV News," *New York Magazine* 22, no. 40 (9 Oktober 1989): 36–44 hlm. 36.

82. Meski jumlah koresponden asing telah mengalami penurunan, tidak ada penurunan dalam berita luar negeri. Tapi, berita luar negeri lebih mungkin diambil dari layanan telegram ketimbang dari koresponden asing. Terlepas dari itu, tak ada bukti kuat bahwa tingkat kekerasan dalam pemberitaan luar negeri mengalami penurunan.

83. Saya terbantu oleh Steven Pinker untuk observasi ini. Harvard Human Rights Colloquium, 5 Februari 2016.

84. Komentar Stephen Northfield pada lokakarya di University of Toronto, Munk School of Global Affairs, "Community of Practice for Human Rights Education," 5 Desember 2016.

85. Christopher Fariss menciptakan frasa "berubahnya standar akuntabilitas" (*a changing standard of accountability*) HAM, dalam artikelnya di APSA, Christopher J. Fariss, "New Takes on Human Rights Measurement," *Wrongs & Rights: The Newsletter for the APSA Human Rights Section*, 31 Mei 2012, http://cfariss.com/documents/human_rights_newsletter_may_2012.pdf. Lihat juga Christopher J. Fariss, "Respect for Human Rights Has Improved over Time: Modeling the Changing Standard of Accountability," *American Political Science Review* 108, no. 2 (2014): 297–318 hlm. 297.

86. Argumen ini dikemukakan oleh yang lainnya. Misalnya, Lynn Hunt menulis "logika hak" (*logic of rights*) dan mengatakan bahwa "persoalan hak karenanya menunjukkan kecenderungan untuk mengalami kaskade." Hunt, *Inventing Human Rights*, 147.

87. Fariss, "Respect for Human Rights Has Improved over Time."

88. Catholic Church, Archdiocese of São Paulo, *Torture in Brazil: A Report* (New York: Vintage Books, 1986), 79.

89. Clark dan Sikkink, "Information Effects and Human Rights Data."

90. Lebih dari 90 artikel di jurnal ilmu politik dan HAM terkemuka dari 1999 hingga 2011 menggunakan data ini, sering kali untuk mencapai kesimpulan negatif tentang efektivitas hukum atau advokasi HAM. Saya berterimakasih kepada Brooke Coe atas bantuannya dalam mengumpulkan fakta ini. Ini adalah beberapa studi yang disebut James Ron dan Emilie Hafner-Burton saat mengatakan bahwa studi kuantitatif lebih pesimistis tentang kemajuan HAM. Hafner-Burton dan Ron, "Seeing Double." Ini juga merupakan sebagian data yang disebut Eric Posner ketika menyebutkan bahwa tidak ada kemajuan dalam HAM. Posner, *The Twilight of Human Rights Law*.

91. Todd Landman dan Marco Larizza, "Inequality and Human Rights: Who Controls What, When, and How," *International Studies Quarterly* 53, no. 3 (2009): 715–736.

92. Salah satu alasan mengapa kelompok HAM membuat banyak laporan adalah untuk memperoleh perhatian media, sehingga meningkatkan profil lembaga dan menguatkan pesannya. Karena organisasi berita makin berkurang sumber dayanya untuk menerjunkan koresponden asing di lapangan, mereka sering mengandalkan laporan NGO dalam meliput peristiwa mancanegara, sehingga berita mancanegara lebih banyak menyoroti pelanggaran HAM.

93. Clark dan Sikkink, "Information Effects and Human Rights Data."

94. Skor ini dimulai pada 1976 dan karenanya tidak mencakup tahun-tahun terburuk represi di Brasil antara 1968–1974.

95. Sebuah laporan pemerintah Brasil pada 2007 menjelaskan bahwa periode terjadinya pembunuhan dan penghilangan paling parah adalah dari 1971 hingga 1974, dan pemerintah jarang membunuh atau menghilangkan paksa lawan politiknya setelah 1979, dan tidak ada kasus penghilangan setelah transisi ke demokrasi pada 1985. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, *Direito à memória e à verdade: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos*, Série Bibliográfica (Brasília: Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 2007).

96. *Brazil: Authorized Violence in Rural Areas*, Amnesty International (London, UK: Amnesty International Publications, 1988), 1.

97. Lihat situs web Observatório das Violências Policiais-SP (Observatory of Police Violence in São Paulo), diakses pada 1 Maret 2017, <http://www.ovp-sp.org/>.

98. Posner, *The Twilight of Human Rights Law*, 1–2.

99. Comisión para el Esclarecimiento Histórico, *Guatemala: Memory of Silence = Tz'inil Na'tab'al*.
100. Sparrow, *The Character of Harms*, 192.
101. Fariss, "Respect for Human Rights Has Improved over Time."
102. Fariss, "Respect for Human Rights Has Improved over Time."
103. Ellen L. Lutz dan Kathryn Sikkink, "International Human Rights Law and Practice in Latin America," *International Organization* 54, no. 3 (2000): 633–659; Simmons, *Mobilizing for Human Rights*, 160–61; Clark, "The Normative Context of Human Rights Criticism."
104. Lihat karya Ball yang menyoroti situs web organisasi data HAM yang dia temukan, the Human Rights Data Analysis Group (DRDAG): <https://hrdag.org/>
105. Saya terbantu oleh Phuong Pham untuk wawasan ini. Lihat, e.g., Elliot R. Haut dan Peter J. Pronovost, "Surveillance Bias in Outcome Reporting," *Journal of the American Medical Association* 305, no. 23 (2011): 2462–63.
106. Tentang taktik baru, lihat situs web New Tactics in Human Rights di <https://www.newtactics.org/>

Bab 6. Apa yang Berhasil dan Tidak Berhasil dalam Memajukan HAM

1. Beberapa bagian di bab ini mengacu pada karya sebelumnya yang ditulis bersama Geoff Dancy dan Hans Peter Schmitz. Saya berterima kasih kepada mereka berdua yang telah mengizinkan saya menggunakan versi (modifikasi) dari beberapa bagian bab kami. Geoff Dancy dan Kathryn Sikkink, "Ratification And Human Rights Prosecutions: Toward A Transnational Theory Of Treaty Compliance," *New York University Journal of International Law and Politics* 44, no. 3 (2012): 751–790; Hans Peter Schmitz dan Kathryn Sikkink, "International Human Rights," dalam *Handbook of International Relations*, ed. Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, edisi ke-2. (London: SAGE, 2013): 827–854.
2. Narasi ini dan semua bahan tambahan tentang Nadia Murad Basee Taha dan Murad Ismael pada bab ini didasarkan pada dua presentasi publik oleh Nadia Murad Basee Taha dan Murad Ismael di Harvard Kennedy School pada 28 Maret 2016, "A Conversation with Nadia Murad Basee Taha" dan presentasi di Human Security Class di Harvard Kennedy School tentang Genosida Yazidi; jika merujuk pada sumber lain, catatan tambahan disertakan.
3. "ISIL May Have Committed Genocide, War Crimes in Iraq, Says UN Human Rights Report," *UN News Centre*, 19 Maret 2015, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50369#.V2VoqK4nKwn>.
4. Di sepanjang buku ini, saya menggunakan nama belakang untuk menyebut orang yang saya wawancarai. Tetapi, Nadia Murad Basee Taha membuat inisiatif dan situs web bertajuk "I'm with Nadia," dan mengingat upaya itu, nama depannya lebih tepat digunakan dalam narasi ini. Agar konsisten dalam bab ini, saya juga menggunakan nama depan Murad. Selengkapny tentang inisiatif "I'm with Nadia," lihat <http://www.nadiamurad.org/>.
5. Presentasi, Human Security Class, Harvard Kennedy School, 28 Maret 2016.
6. Raya Jalabi, "Who Are the Yazidis and Why Is Isis Hunting Them?," *The Guardian*, 11 Agustus 2014, <https://www.theguardian.com/world/2014/aug/07/who-yazidi-isis-iraq-religion-ethnicity-mountains>.
7. Presentasi, Human Security Class, Harvard Kennedy School, 28 Maret 2016.
8. Bagian ini mengacu pada bab yang ditulis bersama dengan Hans Peter Schmitz. Schmitz dan Sikkink, "International Human Rights." Kami membahas penjelasan

politik, ekonomi, psikologi, dan ideologi untuk pelanggaran HAM, seperti perang, otoritarianisme, kemiskinan, ketimpangan, dan ideologi yang mendehumanisasi, di antara masalah-masalah lainnya. Terdapat sejumlah hubungan antara kerangka kami dan studi yang baru-baru ini dilakukan oleh Emilie Hafner-Burton. Dia mengidentifikasi enam “konteks” berbeda yang berkontribusi terhadap pelanggaran HAM, seperti konflik, negara yang tidak liberal, kemiskinan dan ketimpangan, serta dehumanisasi. Dia juga membantu membedakan antara konteks makro yang turut memengaruhi pelanggaran HAM tetapi sangat sulit diubah dalam jangka pendek, seperti kemiskinan, dan “alasan” lebih dekat yang diungkapkan oleh individu yang melakukan represi untuk membenarkan tindakannya. Emilie M. Hafner-Burton, *Making Human Rights a Reality* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013), bab 2–3.

9. Steven C. Poe, “The Decision to Repress: An Integrative Theoretical Approach to the Research on Human Rights and Repression,” dalam *Understanding Human Rights Violations: New Systematic Studies*, ed. Sabine C. Carey dan Steven C. Poe, Ethics and Global Politics (Aldershot: Ashgate, 2004): 16–42; Benjamin A. Valentino, *Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the Twentieth Century*, Cornell Studies in Security Affairs (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004).

10. Daron Acemoglu dan James A. Robinson, *Economic Origins of Dictatorship and Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

11. Alison Liebhafsky Des Forges, “*Leave None to Tell the Story*”: *Genocide in Rwanda* (New York: Human Rights Watch, International Federation of Human Rights, 1999); Scott Straus, “Second-Generation Comparative Research on Genocide,” *World Politics* 59, no. 3 (2007): 476–501; Valentino, *Final Solutions*; J. Andrew Slack dan Roy R. Doyon, “Population Dynamics and Susceptibility for Ethnic Conflict: The Case of Bosnia and Herzegovina,” *Journal of Peace Research* 38, no. 2 (2001): 139–161.

12. Nyseth Brehm, “Conditions and Courses of Genocide”; James D. Fearon dan David D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War,” *American Political Science Review* 97, no. 1 (2003): 75–90.

13. Des Forges, *Leave None to Tell the Story*; Scott Straus, *The Order of Genocide: Race, Power, and War in Rwanda* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006); Valentino, *Final Solutions*.

14. Terdapat banyak literatur tentang topik ini. Lihat, misalnya, Judith Green Kelley, *Ethnic Politics in Europe: The Power of Norms and Incentives* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004).

15. Poe, “The Decision to Repress.”

16. Steven C. Poe dan C. Neal Tate, “Repression of Human Rights to Personal Integrity in the 1980s: A Global Analysis,” *American Political Science Review* 88 (1994): 853–872; Steven C. Poe, C. Neal Tate, dan Linda Camp Keith, “Repression of the Human Right to Personal Integrity Revisited: A Global Cross-National Study Covering the Years 1976–1993,” *International Studies Quarterly* 43, no. 2 (1999): 291–313.

17. Nyseth Brehm, “Conditions and Courses of Genocide.”

18. Christian Davenport, ed., *Paths to State Repression: Human Rights Violations and Contentious Politics* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2000); Poe dan Tate, “Repression of Human Rights to Personal Integrity in the 1980s”; Poe, Tate, dan Keith, “Repression of the Human Right to Personal Integrity Revisited”; James A. Piazza dan James Igoe Walsh, “Transnational Terror and Human Rights,” *International Studies Quarterly* 53, no. 1 (2009): 125–148.

19. E. Melander, T. Pettersson, dan L. Themnér, “Organized Violence, 1989–2015,” *Journal of Peace Research* 53, no. 5 (2016): 727–742. Data ini bersumber dari UCDP/PRIO

Armed Conflict Dataset, dari Uppsala University dan Peace Research Institute di Oslo. Lihat <https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/UCDP-PRIO/>.

20. Untuk data terbaru tentang korban jiwa dalam pertempuran, lihat Melander, Pettersson, dan Themnér, "Organized Violence, 1989–2015." Data juga tersedia di situs web Uppsala University, Department of Peace and Conflict http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/charts_and_graphs/#tocjump_9015420470103274_6

21. Tanisha M. Fazal, "Dead Wrong?: Battle Deaths, Military Medicine, and Exaggerated Reports of War's Demise," *International Security* 39, no. 1 (2014): 95–125. Dia merujuk argumen Stephen Pinker tentang dampak revolusi humanitarian terhadap menurunnya perang. Lihat Pinker, *The Better Angels of Our Nature*.

22. Untuk pengantar tentang R2P, lihat situs web International Coalition for R2P, diakses pada 1 Maret 2017, <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop/learn-about-rtop>.

23. Stephen Hopgood, misalnya, seperti berusaha keras untuk menyebutkan ICC dan R2P dalam satu kalimat bila memungkinkan, seperti hendak menegaskan pendapatnya bahwa keduanya adalah sama. Hopgood, *The End-times of Human Rights*.

24. Walling, *All Necessary Measures*.

25. Power, "A Problem from Hell"; Michael Ignatieff, "Those Fighting Islamic State Are the Lesser Evil: An Interview with Michael Ignatieff," wawancara dengan Erich Follath, 9 September 2014, <http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-michael-ignatieff-on-islamic-state-and-mideast-turmoil-a-990667.html>.

26. Lihat, misalnya, Poe, Tate, dan Keith, "Repression of the Human Right to Personal Integrity Revisited."

27. Robert Anthony Pape, *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism* (New York: Random House, 2005).

28. Erica Chenoweth dan Maria J. Stephan, *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*, Columbia Studies in Terrorism and Irregular Warfare (New York: Columbia University Press, 2011).

29. Presentasi, Human Security Class, Harvard Kennedy School, 28 Maret 2016.

30. De Waal, "Writing Human Rights and Getting It Wrong."

31. Mark Peceny, *Democracy at the Point of Bayonets* (University Park: Pennsylvania State University Press, 1999).

32. Peksen, "Does Foreign Military Intervention Help Human Rights?"

33. Meernik, Poe, dan Shaikh, "The Use of Military Force to Promote Human Rights"; Bruce Bueno de Mesquita dan George W. Downs, "Intervention and Democracy," *International Organization* 60, no. 3 (2006): 627–49; Alexander B. Downes dan Jonathan Monten, "Forced to Be Free?: Why Foreign-Imposed Regime Change Rarely Leads to Democratization," *International Security* 37, no. 4 (2013): 90–131.

34. Ignatieff, wawancara oleh Follath.

35. Julian Borger, *The Butcher's Trail: How the Search for Balkan War Criminals Became the World's Most Successful Manhunt* (New York: Other Press, 2016).

36. Saya berterima kasih kepada Derya Honça atas wawasan ini.

37. Poe dan Tate, "Repression of Human Rights to Personal Integrity in the 1980s"; Poe, Tate, dan Keith, "Repression of the Human Right to Personal Integrity Revisited."

38. Bruce Bueno de Mesquita et al., "Thinking Inside the Box: A Closer Look at Democracy and Human Rights," *International Studies Quarterly* 49, no. 3 (2005): 439–458; Christian Davenport, "The Promise of Democratic Pacification: An Empirical Assessment," *International Studies Quarterly* 48, no. 3 (2004): 539–560; David Cingranelli dan Mikhail

Filippov, "Electoral Rules and Incentives to Protect Human Rights," *The Journal of Politics* 72, no. 1 (2010): 243–257.

39. de Mesquita et al., "Thinking Inside the Box."

40. Pemahaman bahwa demokrasi itu multidimensi mengikuti tradisi panjang dalam penelitian ilmu politik tentang demokrasi, dari Dahl hingga Mesquita, et. al. Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971); de Mesquita et al., "Thinking Inside the Box."

41. Helen Fein, "More Murder in the Middle': Life-Integrity Violations and Democracy in the 'World, 1987,'" *Human Rights Quarterly* 17, no. 1 (1995): 170–191. Ini berkaitan dengan argumen Edward Mansfield dan Jack Snyder bahwa negara-negara yang tengah dalam proses demokratisasi lebih mungkin terlibat dalam perang. Edward D. Mansfield, "Democratization and War," *Foreign Affairs* 74, no. 3 (1995): 79–97.

42. Nyseth Brehm, "Conditions and Courses of Genocide."

43. Steven Levitsky dan Lucan Way, "The Myth of Democratic Recession," *Journal of Democracy* 26, no. 1 (2015): 45–58.

44. Joshua Kurlantzick, Robert Battison, seperti dikutip dalam Levitsky and Way, "The Myth of Democratic Recession," 45.

45. *Freedom House*, s.v. "Reports: Freedom in the World," diakses pada 12 November 2016, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016>.

46. Maxwell O. Chibundu, "Political Ideology as a Religion: The Idolatry of Democracy," *University of Maryland Law Journal of Race, Religion, Gender, and Class* 6, no. 1 (2006): 117–157.

47. Poe, Tate, dan Keith, "Repression of the Human Right to Personal Integrity Revisited"; Risse, Ropp, dan Sikkink, *The Power of Human Rights*; Todd Landman, *Protecting Human Rights: A Comparative Study*, Advancing Human Rights Series (Washington, DC: Georgetown University Press, 2005); Eric Neumayer, "Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?," *Conflict Resolution* 49, no. 6 (2005): 925–953.

48. de Mesquita et al., "Thinking Inside the Box."

49. Sen, "Freedoms and Needs"; Wesley Milner, "Economic Globalization and Rights: An Empirical Analysis," dalam *Globalization and Human Rights*, ed. Alison Brysk (Berkeley: University of California Press, 2002), 77–97; Han S. Park, "Correlates of Human Rights: Global Tendencies," *Human Rights Quarterly* 9, no. 3 (1987): 405–413.

50. Neil J. Mitchell dan James M. McCormick, "Economic and Political Explanations of Human Rights Violations," *World Politics* 40, no. 4 (1988): 476–498; Poe dan Tate, "Repression of Human Rights to Personal Integrity in the 1980s"; Poe, Tate, dan Keith, "Repression of the Human Right to Personal Integrity Revisited"; Milner, "Economic Globalization and Rights."

51. Reinhard Heinisch, "The Economic Nature of Basic Human Rights: Economic Explanations of Cross-National Variations in Governmental Basic Human Rights Performance," *Peace & Change* 23, no. 3 (1998): 333–372.

52. Landman dan Larizza, "Inequality and Human Rights."

53. Amartya Sen, "More than 100 Million Women Are Missing," *New York Review of Books* 37, no. 20 (20 Desember 1990), <http://www.nybooks.com/articles/1990/12/20/more-than-100-million-women-are-missing/>.

54. Lihat Max Roser, "Our World in Data," tabel tentang tren Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI) di <https://ourworldindata.org/human-development-index/>. Roser mendapatkan data ini dari "Table 2: Human Development Index Trends, 1980–2013," United Nations Development Programme, diakses pada 18 Maret 2017, <http://hdr.undp.org/en/data>.

55. Tentang tiga cara lain dalam mengukur ketimpangan pendapatan, lihat Branko Milanović, *Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), bab 1.

56. Branko Milanović, *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization* (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016).

57. William H. Meyer, "Confirming, Infirmary, and 'Falsifying' Theories of Human Rights: Reflections on Smith, Bolyard, and Ippolito Through the Lens of Lakatos," *Human Rights Quarterly* 21, no. 1 (1999): 220–228; Clair Apodaca, "Global Economic Patterns and Personal Integrity Rights After the Cold War," *International Studies Quarterly* 45, no. 4 (2001): 587–602; David L. Richards, Ronald D. Gellensy, dan David H. Sacko, "Money with a Mean Streak? Foreign Economic Penetration and Government Respect for Human Rights in Developing Countries," *International Studies Quarterly* 45, no. 2 (2001): 219–239; Bruce London dan Bruce A. Williams, "Multinational Corporate Penetration, Protest, and Basic Needs Provision in Non-Core Nations: A Cross-National Analysis," *Social Forces* 66 (March 1988): 747–773; Tony Evans, "Trading Human Rights," dalam *Global Trade and Global Social Issues*, ed. Annie Tayler dan Caroline Thomas (London: Routledge, 1999): 31–52; Jackie G. Smith, Melissa Bolyard, dan Anna Ippolito, "Human Rights and the Global Economy: A Response to Meyer," *Human Rights Quarterly* 21, no. 1 (1999): 207–219.

58. Emilie M. Hafner-Burton, "Right or Robust? The Sensitive Nature of Repression to Globalization," *Journal of Peace Research* 42, no. 6 (November 2005): 679–98; Milner, "Economic Globalization and Rights."

59. M. Rodwan Abouharb dan David L. Cingranelli, *Human Rights and Structural Adjustment* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

60. Lihat, misalnya, Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, terutama "A Global Tax on Capital," 515–539; dan Milanović, *Global Inequality*, terutama "How Can Inequality in Rich Welfare States Be Reduced?" 217–222.

61. Kathryn Sikkink, *Ideas and Institutions: Developmentalism in Brazil and Argentina*, Cornell Studies in Political Economy (Ithaca: Cornell University Press, 1991).

62. Fernando Fajnzylber, *Industrialización en América Latina: De "la caja negra" al "casillero vacío": selección* (Santiago: United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL), 1990), http://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/27955/1/S9000502_es.pdf.

63. Stephan Haggard, *Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries*, Cornell Studies in Political Economy (Ithaca: Cornell University Press, 1990).

64. The World Bank, "Uruguay: Overview," diakses pada 24 November 2016, <http://www.worldbank.org/en/country/uruguay/overview>.

65. Anna Heim, "Impact and Numbers from Uruguay's One Laptop per Child Program," *The Next Web (TNW)*, 7 April 2013, <http://thenextweb.com/la/2013/04/07/uruguays-one-laptop-per-child-program-impact-and-numbers/>.

66. Jonathan Gilbert, "Uruguay's Most Unexpected Champion of Capitalism," *Fortune*, 23 Januari 2015, <http://fortune.com/2015/01/23/uruguay-jose-mujica-economy-capitalism/>.

67. Leo Kuper, *Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century* (New Haven: Yale University Press, 1981); Fein, *Genocide*.

68. Fein, *Genocide*; Ervin Staub, *The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989); Weitz, *A Century of Genocide*; Nyseth Brehm, "Conditions and Courses of Genocide."

69. Presentasi, Human Security Class, Harvard Kennedy School, 28 Maret 2016.

70. Nyseth Brehm, "Conditions and Courses of Genocide."
71. Weitz, *A Century of Genocide*.
72. Jeremy Diamond, "Donald Trump on Torture: 'We Have to Beat the Savages,'" CNN, 6 Maret 2016, <http://www.cnn.com/2016/03/06/politics/donald-trump-torture/index.html>.
73. John Hagan dan Wenona Rymond-Richmond, "The Collective Dynamics of Racial Dehumanization and Genocidal Victimization in Darfur," *American Sociological Review* 73, no. 6 (2008): 875–902.
74. Stanley Milgram, "Some Conditions of Obedience and Disobedience to Authority," *Human Relations* 18, no. 1 (1965): 57–76.
75. Milgram, "Some Conditions of Obedience and Disobedience to Authority."
76. Amanda M. Murdie dan David R. Davis, "Shaming and Blaming: Using Events Data to Assess the Impact of Human Rights INGOs," *International Studies Quarterly* 56, no. 1 (2012): 1–16.
77. Hathaway, "Do Human Rights Treaties Make a Difference?"; Emilie M. Hafner-Burton dan Kiyoteru Tsutsui, "Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises," *American Journal of Sociology* 110, no. 5 (2005): 1373–1411. Untuk pandangan yang lebih positif dari gelombang pertama studi, lihat Neumayer, "Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?"
78. Oona Hathaway, "The Promise and Limits of the International Law of Torture," dalam *Torture: Philosophical, Political and Legal Perspectives*, ed. Sanford Levinson (Oxford: Oxford University Press, 2004), 199–212; Emilie M. Hafner-Burton dan Kiyoteru Tsutsui, "Justice Lost! The Failure of International Human Rights Law to Matter Where Needed Most," *Journal of Peace Research* 44, no. 4 (Juli 2007): 407–425 hlm. 407.
79. Simmons, *Mobilizing for Human Rights*; Lupu, "The Informative Power of Treaty Commitment."
80. Simmons, *Mobilizing for Human Rights*.
81. Naomi Roht-Arriaza, *The Pinochet Effect*.
82. Hafner-Burton dan Ron, "Seeing Double"; Hafner-Burton, *Making Human Rights a Reality*.
83. Dalam penelitian kami, terhitung hampir 110 transisi di lebih dari 80 negara. "Home," Transnational Justice Research Collaborative, terakhir diperbarui pada 12 Desember 2016, www.transnationaljusticedata.com.
84. Alfredo Romero, "The Rule of Law Façade: A Playbook for Regimes" (working paper, Carr Center for Human Rights Policy, Harvard Kennedy School, Cambridge, MA, 2016).
85. Levitsky dan Way, "The Myth of Democratic Recession," 51.
86. Ryan Goodman dan Derek Jinks, *Socializing States: Promoting Human Rights through International Law* (New York: Oxford University Press, 2013).
87. Hafner-Burton, *Making Human Rights a Reality*.
88. Clark, "The Normative Context of Human Rights Criticism."
89. Rodríguez-Garavito dan de Sousa Santos, eds., *Law and Globalization from Below: Balakrishnan Rajagopal, International Law from Below: Development, Social Movements, and Third World Resistance* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
90. Kolaborator dan rekan penulis saya tentang studi akuntabilitas menyertakan Carrie Booth Walling, Hun Joon Kim, Geoffrey Dancy, Bridget Marchesi, Leigh Payne, Tricia Olsen, Andrew Rieter, Francesca Lessa, dan Gabriel Pereira.

91. Simon Zadek, "The Meaning of Accountability," dalam *Business and Human Rights: From Principles to Practice*, ed. Dorothée Baumann-Pauly dan Justine Nolan (New York: Routledge, 2016), 240–43.

92. Zadek, "The Meaning of Accountability."

93. Ruth W. Grant dan Robert O. Keohane, "Accountability and Abuses of Power in World Politics," *American Political Science Review* 99, no. 1 (2005): 29–43.

94. Database ini dan penelitian yang dihasilkannya didasarkan pada kegiatan yang didukung oleh National Science Foundation serta Arts and Humanities Research Council dengan dua hibah: NSF (No. Hibah 0961226) "Alternative Accountabilities for Human Rights Violations" serta Arts and Humanities Research Council (No. Hibah 0AH/I500030/1) yang berkaitan dengan proyek bertajuk "The impact of transitional justice on human rights and democracy." Segala opini, temuan, dan kesimpulan atau rekomendasi yang dikemukakan dalam materi ini adalah milik penulis dan tidak mesti merupakan pandangan National Science Foundation. Saya ingin berterima kasih kepada tim riset NSF/AHRC atas bantuannya.

95. Kim dan Sikkink, "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries."

96. Snyder dan Vinjamuri, "Trials and Errors."

97. Catalina Smulovitz, "The Discovery of Law: Political Consequences in the Argentine Case," dalam *Global Prescriptions: The Production, Exportation, and Importation of a New Legal Orthodoxy*, ed. Yves Dezalay dan Bryant G. Garth (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002), 249–265.

98. Anne-Marie Slaughter, *A New World Order* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004); Yonatan Lupu, "Best Evidence: The Role of Information in Domestic Judicial Enforcement of International Human Rights Agreements," *International Organization* 67, no. 3 (2013): 469–503 pada 469; Courtenay Conrad, "Divergent Incentives for Dictators: Domestic Institutions and (International Promises Not to) Torture," *Journal of Conflict Resolution* 58, no. 1 (2014): 34–67.

99. Jeffrey K. Staton dan Will H. Moore, "Judicial Power in Domestic and International Politics," *International Organization* 65, no. 3 (2011): 553–587.

100. Dancy dan Sikkink, "Ratification and Human Rights Prosecutions."

101. Kim dan Sikkink, "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries"; Geoff Dancy et al., "Stopping State Agents of Violence or Promoting Political Compromise? The Powerful Role of Transitional Justice Mechanisms" (makalah disampaikan pada Konferensi Tahunan American Political Science Association 2013, Chicago, IL, 30 Agustus 2013), <https://transitionaljusticedata.com/files/Stopping%20Agents%20of%20Violence%20APSA%202013.10.24.pdf>.

102. Sikkink, *The Justice Cascade*.

103. Karya ini didasarkan pada dua hibah dari National Science Foundation (No. SES-0961226 dan SES-1228519) serta Arts and Humanities Research Council (No. Hibah AH/1500030/1 dan AH/K502856/1). Segala opini, temuan, dan kesimpulan atau rekomendasi yang dikemukakan dalam materi ini adalah milik penulis dan tidak mesti merupakan pandangan universitas atau National Science Foundation atau Arts and Humanities Research Council.

104. Mengenai jaringan advokasi transnasional, lihat Keck dan Sikkink, *Activists beyond Borders*. Mengenai proses hukum transnasional, lihat Harold Koh, "Transnational Legal Process. (The 1994 Roscoe Pound Lecture)," *Nebraska Law Review* 75, no. 1 (1996): 181–207; Harold Koh, "Jefferson Memorial Lecture; Transnational Legal Process after September 11th," *Berkeley Journal of International Law* 22, no. 3 (2004): 337–54.

105. Keck dan Sikkink, *Activists beyond Borders*; Risse, Ropp, and Sikkink, *The Power of Human Rights*.

106. Murdie dan Davis, "Shaming and Blaming."

107. Lihat, misalnya, Amanda Murdie, "The Impact of Human Rights NGO Activity on Human Right Practices," *International NGO Journal* 4, no. 10 (2009): 421–440; Amanda Murdie dan Tavishi Bhasin, "Aiding and Abetting: Human Rights INGOs and Domestic Protest," *Journal of Conflict Resolution* 55, no. 2 (2011): 163–91; Murdie dan Davis, "Shaming and Blaming"; David Davis, Amanda Murdie, and Coty Steinmetz, "'Makers and Shapers': Human Rights INGOs and Public Opinion," *Human Rights Quarterly* 34, no. 1 (2012): 199–224; Sam R. Bell, K. Chad Clay, dan Amanda Murdie, "Neighborhood Watch: Spatial Effects of Human Rights INGOs," *The Journal of Politics* 74, no. 2 (2012): 354–368; Sam R. Bell et al., "Taking the Fight to Them: Neighborhood Human Rights Organizations and Domestic Protest" 44, no. 4 (2014): 853–75.

108. Keck dan Sikkink, *Activists beyond Borders*.

109. Simmons, *Mobilizing for Human Rights*, 358.

110. Ini adalah masalah yang dihadapi perwakilan khusus PBB bidang bisnis dan HAM John Ruggie dalam Prinsip Panduan Bisnis dan HAM (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) yang disusunnya. Prinsip Panduan Ruggie menjelaskan bahwa negara memiliki *kewajiban untuk melindungi* dari pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan bisnis, sementara perusahaan memiliki *tanggung jawab untuk menghormati* HAM. "UN Guiding Principles on Business and Human Rights," United Nations Human Rights Council, Juni 2011, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

111. Simmons, *Mobilizing for Human Rights*.

112. Kim dan Sikkink, "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries"; Sikkink, *The Justice Cascade*; Geoffrey Dancy, et al., "Behind Bars and Bargains: How Justice Policies Change Human Rights Practices in New Democracies" (naskah tidak diterbitkan, t.t.).

113. Lihat Karisa Cloward, *When Norms Collide: Local Responses to Female Genital Mutilation and Early Marriage* (Oxford: Oxford University Press, 2016); Gerry Mackie, "Ending Footbinding and Infibulation: A Convention Account," *American Sociological Review* 61, no. 6 (1996): 999–1017.

114. New Tactics in Human Rights, diakses pada 18 Juni 2016, <https://www.new-tactics.org/>.

115. Lihat Livingston, "Conference Report: Technology & Human Rights in the 21st Century."

116. Chenoweth dan Stephan, *Why Civil Resistance Works*.

117. Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*; James Ron, David Crow, dan Shannon Golden, "The Struggle for a Truly Grassroots Human Rights Movement," *openDemocracy*, 18 Juni 2013, <http://www.opendemocracy.net/openglobalrights/james-ron-david-crow-shannon-golden/struggle-for-truly-grassroots-human-rights-move>; Ran Hirschl, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007).

118. Geoffrey Dancy, "The Impact of Human Rights Law in Time" (Disertasi Ph.D., University of Minnesota, 2013), <http://search.proquest.com/docview/1447014720/>.

119. Lihat Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*.

120. Sonia Cardenas, *Conflict and Compliance: State Responses to International Human Rights Pressure*, Pennsylvania Studies in Human Rights (Philadelphia: University of

Pennsylvania Press, 2007); Clifford Bob, *The Global Right Wing and the Clash of World Politics*, Cambridge Studies in Contentious Politics (New York: Cambridge University Press, 2012).

121. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*.

122. Terima kasih kepada Jessica Tueller yang telah menunjukkan kemungkinan ini.

123. James Ron, Archana Pandya, dan David Crow, "Universal Values, Foreign Money: Funding Local Human Rights Organizations in the Global South," *Review of International Political Economy* 23, no. 1 (2016): 29–64.

124. Kami membahas ini secara mendetail dalam Keck dan Sikkink, *Activists beyond Borders*, 97–102.

125. Dupuy, Ron, dan Prakash, "Foreign Aid to Local NGOs."

126. Sergio Aguayo, wawancara oleh penulis, 26 Mei 2016, Cambridge, MA.

127. César Rodríguez-Garavito, "The Future of Human Rights: From Gatekeeping to Symbiosis," *Sur International Journal on Human Rights* 11, no. 20 (2014): 498–509 hlm. 502.

128. César Rodríguez-Garavito, wawancara oleh penulis, 20 April 2016, Boston, MA.

129. Bahar Rumelili dan Buke Bosnak, "Taking Stock of the Europeanization of Civil Society in Turkey: The Case of NGOs," dalam *The Europeanization of Turkey: Polity and Politics*, ed. Ali Tekin dan Aylin Güney, Routledge Studies in Middle Eastern Politics 75 (London: Routledge, 2015), 127–144.

130. Murdie dan Bhasin, "Aiding and Abetting"; Linnea Beatty, "Interrelation of Violent and Non-Violent Resistance in Burma," (Makalah disampaikan pada APSA 2011 Annual Meeting, Seattle, WA, 2001), <http://papers.ssrn.com/abstract=1900480>.

131. Karina Ansolabehere, "Reforming and Transforming: A Multi-Directional Investigation of Human Rights," *openDemocracy*, 4 Desember 2013, <http://www.opendemocracy.net/openglobalrights/karina-ansolabehere/reforming-and-transforming-multi-directional-investigation-of-h>.

132. Lucia Nader, "Solid Organisations in a Liquid World," *Sur International Journal on Human Rights* 11, no. 20 (2014): 482–489.

133. Mengenai korupsi dan profesionalisasi, lihat V. Suresh, "Funds and Civil Liberties," *openDemocracy*, 6 Januari 2014, <https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/v-suresh/funds-and-civil-liberties>. Mengenai kurangnya alternatif, lihat komentar penjelasan James Ron kepada Dupuy, Ron, dan Prakash, "Foreign Aid to Local NGOs."

134. Straus, *The Order of Genocide*.

135. Lepenies, "Possibilism," 449.

Bab 7. Kesimpulan: Bukti Adanya Harapan Tanpa Rasa Puas Diri yang Berlebihan

1. Jack Rendler, wawancara oleh penulis, 13 November 2016, Cambridge, MA.

2. "Zim Pastor's Arrest 'a Well Calculated Plan to Intimidate Activists,'" *News24*, 13 Juli 2016, <http://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/zim-pastors-arrest-a-well-calculated-plan-to-intimidate-activists-20160713>.

3. Privilege Musvanhiri, "Zimbabwe Activist Evan Mawarire Is Freed," *DW*, 14 Juni 2016, <http://www.dw.com/en/zimbabwe-activist-evan-mawarire-is-freed/a-19398879>.

4. Jack Rendler, wawancara oleh penulis, 13 November 2016, Cambridge, MA.

5. "Resilience," *Psychology Today*, diakses pada 15 Desember 2016, <https://www.psychologytoday.com/basics/resilience>.

6. Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes*.

7. Sparrow, *The Character of Harms*.

8. Malcolm Sparrow, pesan e-mail kepada penulis, 21 April 2016. Terima kasih kepada Malcolm atas izinnya untuk mengutip ini.

9. Lihat, misalnya, Fariss, "Respect for Human Rights Has Improved over Time"; Keith Schnakenberg dan Christopher Fariss, "Dynamic Patterns of Human Rights Practices," *Political Science Research and Methods* 2, no. 1 (2014): 1–31; Moore, "Quantitative Data in Human Rights." Tentang Human Rights Data Analysis Groups, lihat situs webnya di <https://hrdag.org/>.

10. Ada berbagai cara untuk merangkum perdebatan ini. Human Rights Lab di Universitas los Andes membagi kritik ini ke dalam enam kategori: (1) kurangnya dampak dan efektivitas; (2) kurangnya legitimasi; (3) masalah dari struktur pendanaan dan ketergantungan sumber daya; dampak tak terduga dari advokasi HAM; (5) legalisasi yang berlebihan; dan (6) kelebihan beban. Saya melihat bahwa kritik legitimasi merupakan kategori payung yang lebih besar dan banyak masalah yang diangkat dalam kategori 3-6 Lab tersebut berkaitan dengan kritik legitimasi. Rodríguez-Garavito dan Luna, "A Human Rights Crisis?"

11. Moyn, "Human Rights in the Age of Inequality."

12. Samuel Moyn, *Christian Human Rights*, Intellectual History of the Modern Age (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015); Moyn, *The Last Utopia*.

13. Saya berterima kasih kepada Fernando Berdion Del Valle atas kontribusinya kepada karya kami berdua tentang hak dan kewajiban individu, paragraf-paragraf ini diambil dari sana: Kathryn Sikkink dan Fernando Berdion Del Valle, "(Re)discovering Human Duties: Individual Responsibility in International Human Rights Law and Global Constitutions," *Minnesota Journal of International Law* 26, no. 1 (2017): 189–245.

14. Mengenai pentingnya HAM di dunia yang semakin multipolar, lihat Rodríguez-Garavito, "The Future of Human Rights."

15. James Ron dan David Crow, "Who Trusts Local Human Rights Organizations? Evidence from Three World Regions," *Human Rights Quarterly* 37 (2015): 188–239.

16. Hopgood, *The Endtimes of Human Rights*.

17. William J. Dobson, *The Dictator's Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy* (New York: Anchor Books, 2013); Levitsky dan Way, "The Myth of Democratic Recession."

18. Gerald Knaus, "Europe and Azerbaijan: The End of Shame," *Journal of Democracy* 26, no. 3 (2015): 5–18.

19. Untuk gambaran umum tentang kampanye ini, lihat kasus "Protecting the Inter-American System of Human Rights," Human Rights & Governance: Case Studies, diakses pada 16 Desember 2016, <http://hrcases.org/#/caso/4/1>.

20. Moyn, "Human Rights and the Age of Inequality."

21. Charles Beitz juga berpendapat bahwa HAM memiliki cakupan normatif yang luas dan tidak akurat jika digambarkan sebagai minimal. Lihat Beitz, "From Practice to Theory."

22. Cecilia L. Ridgeway, "Why Status Matters for Inequality," *American Sociological Review* 79, no. 1 (2014): 1–16.

23. Sen, "Freedoms and Needs," 31.

24. ESCR-Net, diakses pada 10 April 2017, <https://www.eschr-net.org/>.

25. César Rodríguez-Garavito dan Diana Rodríguez Franco, *Radical Deprivation on Trial: The Impact of Judicial Activism on Socio-economic Rights in the Global South*, Comparative Constitutional Law and Policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2015); César Rodríguez-Garavito, ed., *Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017); César Rodríguez-Garavito, "Beyond the

Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America,” *Texas Law Review* 89, no. 7 (2011): 1669–98; Rodríguez-Garavito dan de Sousa Santos, eds., *Law and Globalization from Below*; Rodríguez-Garavito, “The Future of Human Rights.”

26. Heinz Klug, “Campaigning for Life: Building a New Transnational Solidarity in the Face of HIV/AIDS and TRIPS,” dalam *Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality*, ed. César Rodríguez-Garavito dan Boaventura de Sousa Santos, Cambridge Studies in Law and Society (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 118–39.

27. Untuk gambaran umum tentang masalah dan kampanye ini, lihat César Rodríguez-Garavito, ed., *Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017). Lihat juga John Gerard Ruggie, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights* (New York: W. W. Norton & Co., 2013).

28. John Oliver, “Last Week Tonight with John Oliver: Tobacco,” video YouTube, 18:10, dari penampilan yang disiarkan di televisi oleh HBO pada 2015, diposting oleh LastWeekTonight, 15 Februari, <https://www.youtube.com/watch?v=6UsHHOCH4q8>.

29. Kami terbantu oleh Samuel Moyn yang menarik perhatian kami pada masalah kewajiban/hak ini.

30. Beberapa upaya sudah berlangsung terkait isu ini, seperti proyek Financial Action Task Force dan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) di OECD.

31. Gabriel Zucman, *The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens* (Chicago: University of Chicago Press, 2015).

32. “Human Rights in Tax Policy,” Center for Economic and Social Rights, diakses pada 18 Desember 2016, <http://www.cesr.org/section.php?id=229>.

33. Raymond Offenheiser, percakapan dengan penulis, 24 Mei 2016, Boston, MA.

34. Sen, *The Idea of Justice*; Risse, *On Global Justice*.

35. Kennedy, “The International Human Rights Movement.”

36. Rodríguez-Garavito, “The Future of Human Rights,” 500.

37. Hafner-Burton, *Making Human Rights a Reality*.

38. Lihat Maria Beatriz Bonna Nogueira, “The Promotion of LGBT Rights as International Human Rights Norms: Explaining Brazil’s Diplomatic Leadership,” *Global Governance* (naskah tidak diterbitkan, diterima pada 12 November 2016), file Word; Michelle Morais de Sa E Silva, “Conditional Cash Transfers and Improved Education Quality: A Political Search for the Policy Link,” *International Journal of Educational Development* 45 (2015): 169–181.

39. Kathryn Sikkink et al., “Comprehensive Reparations Measures in Colombia: Accomplishments and Challenges” (laporan tidak diterbitkan, diberikan kepada pemerintah Kolombia, 1 Juni 2015), file Word).

40. Mengenai keputusan Mahkamah Agung India, lihat Jennifer Geist Rutledge, *Feeding the Future: School Lunch Programs as Global Social Policy* (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2016). Mengenai kontribusi kampanye hak ekonomi dan sosial di Kawasan Selatan Dunia, lihat Rodríguez-Garavito dan de Sousa Santos, eds., *Law and Globalization from Below*; César Rodríguez-Garavito, *Human Rights in Minefields: Extractive Economies, Environmental Conflicts, and Social Justice in the Global South* (Bogotá: Dejusticia, 2015), <https://business-humanrights.org/en/new-book-human-rights-in-minefields-extractive-economies-environmental-conflicts-and-social-justice-in-the-global-south>.

41. Lihat Bonna Nogueira, “The Promotion of LGBT Rights as International Human Rights Norms.”

42. Ini diambil dari presentasi Yuen Foong Khong, round-table A Symposium on Soft Power and Manshel Lecture in Honor of Joseph S. Nye, Jr., Cambridge, MA, 12 Desember 2015.

43. Gagasan dari tanggapan Joseph Nye terhadap presentasi Yuen Foong Khong pada "A Symposium on Soft Power."

44. Alastair Iain Johnston, "China and International Order. Which China? Which Order" (artikel tidak diterbitkan, diterima pada 6 Januari 2017), file Word. Terima kasih kepada Johnston atas izinnya untuk mengutip.

45. Harold Hongju Koh, "Foreword: On American Exceptionalism," *Stanford Law Review* 55, no. 5 (2003): 1479–1527.

46. Lihat postingan blog oleh Stephen Hopgood, "Fascism Rising," *openDemocracy* (blog), 9 November 2016, <https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/stephen-hopgood/fascism-rising>.

47. Douglas Johnson, Alberto Mora, dan Averell Schmidt, "The Strategic Costs of Torture: How 'Enhanced Interrogation' Hurt America," *Foreign Affairs* 95, no. 5 (2016): 121–132.

48. Peksen, "Does Foreign Military Intervention Help Human Rights"; Meernik, Poe, dan Shaikhet, "The Use of Military Force to Promote Human Rights."

49. Andrew Strohlein, postingan Twitter, 30 November 2016, 02.21, <https://twitter.com/astroehlein/status/803906671747694592>. Strohlein adalah Direktur Media Eropa di Human Rights Watch.

Bacaan Lanjutan

Pengantar dan Gambaran Umum

Bagi yang tertarik dengan klaim saya tentang perbaikan kesejahteraan dasar manusia di dunia, sejumlah situs web menampilkan presentasi visual data sosial, ekonomi, dan politik yang sangat baik. Khususnya, lihat “Our World in Data,” publikasi web oleh Max Roser, ekonom dan kritikus media yang dikenal dengan risetnya tentang tren global kondisi kehidupan hidup layak dan visualisasinya terhadap tren ini. Mengembangkan gagasan mendiang Hans Rosling, situs web “Gapminder” menampilkan perangkat inovatif yang dikembangkan oleh timnya dan ditujukan untuk “menyingkap keindahan statistik untuk pandangan dunia yang berbasis fakta” (*unveiling the beauty of statistics for a fact-based world view*). Rosling menjelaskan sejarah bagaimana pendekatan ini bermula dalam Ted Talk-nya yang terkenal, kini dapat diakses di https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.

Saya juga menyarankan Anda mengikuti Max Roser atau grup Gapminder di Twitter, dengan nama akun @MaxCRoser dan @gapminder untuk memperoleh secercah keterangan berbasis fakta di tengah rentetan berita suram. Lihat juga kolom Nicholas Kristof, “Why 2017 May be the Best Year Ever,” *New York Times*, 21 Januari 2017.

Mengenai konflik dan perang, lihat situs web dan data Human Security Report Project di <http://www.hsrgroup.org/> serta situs web Peace Research Institute of Oslo (PRIO) dan Department of Peace and Conflict Research di Uppsala University. Kelompok-kelompok ini membuat data

publik untuk segenap komunitas akademik dengan mengodekan dan menyusun data terlengkap tentang konflik; lihat, misalnya, peta dan bagan korban jiwa konflik dari waktu ke waktu di <http://ucdp.uu.se/#/exploratory>. Dokumenter berbasis data dan beranimasi karya Neil Halloran, “The Fallen in World War II” di YouTube, dapat ditemukan di https://www.youtube.com/results?search_query=the+fallen+of+world+war+ii+, memberikan tampilan visual yang menarik tentang kekerasan semasa Perang Dunia II dan penurunan dramatis setelahnya. Untuk gambaran umum tentang tren yang lebih besar dalam penurunan kekerasan di seluruh dunia dan pandangan psikologi di balik angka, sumber penting lainnya adalah Steven Pinker, *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined* (Viking, 2011).

Untuk mengetahui lebih jauh kritik seputar legitimasi dan efektivitas hukum, institusi, dan gerakan hak asasi manusia (HAM), saya sarankan untuk mulai dengan dua publikasi Amnesty International Belanda. Yang pertama adalah Doutje Lettinga dan Lars van Troost, eds., *Debating The Endtimes of Human Rights: Activism and Institutions in a Neo-Westphalian World* (2014), dan kedua adalah Doutje Lettinga dan Lars van Troost, eds., *Can Human Rights Bring Social Justice?: Twelve Essays* (2015); keduanya tersedia secara online di https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/can_human_rights_bring_social_justice.pdf dan https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/debating_the_endtimes_of_human_rights.pdf. Kedua publikasi ini memberi gambaran umum tentang pendekatan kritis terhadap studi HAM serta komentar tentang kritik tersebut dari berbagai akademisi dan aktivis. Untuk ulasan lengkap tentang kritik tersebut, lihat artikel mendatang oleh César Rodríguez-Garavito dan Sean Luna, dari Human Rights Lab Universitas los Andes, “A Human Rights Crisis? Unpacking the Debate on the Future of the Human Rights Field,” yang dapat dilihat di <https://static1.squarespace.com/static/557f5fe4e4b0a17c309a0dcd/t/58a8908c29687f223ffbe21e/148744207549>.

Terakhir, cara dinamis untuk mengikuti perdebatan di kalangan aktivis dan akademisi HAM tentang berbagai isu adalah dengan mengikuti blog *Open Global Rights*, forum online multibahasa yang ditujukan untuk memfasilitasi diskusi seputar hukum, institusi, dan gerakan HAM di seluruh dunia, dengan alamat <https://www.opendemocracy.net/open-globalrights>. Anda juga dapat mengikuti blog *openDemocracy* di Twitter, @openRights_oD. Mengikuti diskusi dan memperhatikan berbagai sudut pandang yang berlawanan akan meningkatkan kualitas kerja HAM dan

saya mendorong pembaca yang tertarik untuk melihat komunitas para ahli dan aktivis ini.

Untuk membaca selengkapnya tentang Albert Hirschman dan gagasannya tentang posibilisme, saya menyarankan semua esai di bukunya yang merupakan favorit saya, *A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America* (Yale University Press, 1971), yang juga menginspirasi judul buku yang Anda baca sekarang ini. Biografi kehidupan dan karya Hirschman karya Jeremy Adelman yang diteliti dengan cermat, *Worldly Philosopher: The Odyssey of Albert O. Hirschman* (Princeton University Press, 2013) juga enak dibaca. Meskipun karya-karya ini tidak umum ditemukan dalam literatur wajib HAM, penelitian Hirschman memberikan perspektif tentang dunia yang dapat memberikan pencerahan kepada siapa saja yang sedang berusaha memahami bagaimana dan mengapa perubahan terjadi, termasuk yang sedang belajar dan bekerja di bidang HAM.

Legitimasi HAM: Perjuangan yang Beragam

Ada banyak pilihan buku dan artikel terkait sejarah perlindungan HAM internasional, beberapa di antaranya sudah terbit sejak bertahun-tahun yang lalu, dan sebagian lainnya relatif baru. Tentang kontribusi Amerika Latin terhadap HAM, misalnya, lihat karya klasik seperti buku Johannes Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent* (University of Pennsylvania Press, 1999), khususnya bab 4 dan 5, serta artikel Mary Ann Glendon, "The Forgotten Crucible: The Latin American Influence on the Universal Human Rights Idea," *Harvard Human Rights Journal* 16 (2003). Karya yang lebih baru antara lain seperti buku Patrick William Kelly *Salvation in Small Steps: Latin America and the Making of Global Human Rights Politics* (Cambridge University Press, siap terbit). Pembahasan tentang tradisi dukungan Amerika Latin yang lebih panjang terhadap hukum internasional dapat ditemukan dalam buku Arnulf Becker Lorca, *Mestizo International Law: A Global Intellectual History, 1842–1933* (Cambridge University Press, 2015), sementara buku Katherine Marino, *The Vanguard for Women's Rights: Pan-American Feminism and the Origins of Human Rights* (University of North Carolina Press, forthcoming) menyajikan pembahasan yang dikaji dengan cermat tentang kontribusi Amerika Latin terhadap hak perempuan serta informasi tentang kehidupan para feminis seperti Bertha Lutz dan Minerva Bernardino.

Untuk bacaan yang lebih mendalam dan menarik tentang asal-usul HAM pada periode pasca-Perang Dunia II, dengan subteks tentang peran korban dari pinggiran kekuasaan, saya menyarankan buku Philippe Sands, *East West Street: On the Origins of "Genocide" and "Crimes against Humanity"* (Alfred A. Knopf, 2016). Untuk peran India dalam tatanan internasional pasca-Perang Dunia II, lihat buku Manu Bhagavan, *India and the Quest for One World: The Peacemakers*, (Palgrave Macmillan, 2013).

Pergulatan HAM semasa Perang Dingin merupakan subjek sejumlah buku penting, seperti buku Roland Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights* (University of Pennsylvania Press, 2010), dan buku Steven L. B. Jensen, *The Making of International Human Rights: The 1960s, Decolonization, and the Reconstruction of Global Values* (Cambridge University Press, 2016). Buku-buku hasil penelitian yang cermat ini mendokumentasikan berbagai cara para diplomat dan aktivis dari Kawasan Selatan Dunia berjuang membangun hukum dan institusi HAM internasional yang sering kita sepelekan saat ini.

Efektivitas Hukum, Institusi, dan Gerakan HAM

Guna mengungkap kesulitan dalam mengukur efektivitas hukum dan aktivisme HAM, saya mesti membaca kajian dari berbagai disiplin. Kumpulan esai klasik yang disunting oleh Daniel Kahneman, Paul Slovic, dan Amos Tversky—*Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases* (Cambridge University Press, 1982)—menjelaskan heuristik kognitif yang menyulitkan pengukuran kemungkinan peristiwa secara akurat. Untuk pembahasan tentang ciri khas masalah terkait bahaya tersembunyi, saya menyarankan karya kolega saya Malcolm K. Sparrow, *The Character of Harms: Operational Challenges in Control* (Cambridge University Press, 2008). Ann Marie Clark dan saya juga memberikan penjelasan lebih rinci tentang masalah data HAM yang spesifik dalam artikel kami, "Information Effects and Human Rights Data: Is the Good News about Increased Human Rights Information Bad News for Human Rights Measures?" *Human Rights Quarterly* 35, no. 3 (2013), tetapi bagi pakar data, lihat artikel Christopher J. Fariss, "Respect for Human Rights Has Improved over Time: Modeling the Changing Standard of Accountability," *American Political Science Review* 108, no. 2 (2014). Buku tentang isu-isu tertentu juga barangkali menarik. Mengenai penurunan hukuman mati anak-anak, misalnya, lihat buku Robyn Linde, *The Globalization of Childhood: The International Diffusion of Norms and Law against the Child Death Penalty* (Oxford University Press, 2016).

Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil dalam pemajuan HAM, empat buku saya sebelumnya membahas masalah ini. Lihat *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Cornell University Press, 1998), yang saya tulis bersama dengan Margaret Keck dan di sana kami menyarankan cara pikir yang berguna dalam memahami efektivitas gerakan HAM. Berikutnya, dalam dua buku berbeda terbitan Cambridge University Press—*The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change* (1999) dan *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance* (2013)—saya bersama co-editor Thomas Risse dan Stephen Ropp serta sekelompok ahli berbakat mengkaji efektivitas HAM di seluruh dunia. Terakhir, dalam *The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions are Changing World Politics* (W. W. Norton & Co., 2011), saya merangkum penelitian yang dilakukan bersama Hun Joon Kim ihwal efektivitas penuntutan HAM dalam membantu memperbaiki hak integritas tubuh. Saya juga menyarankan buku Beth Simmons, *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics* (Cambridge University Press, 2009), sebuah karya definitif tentang efektivitas hukum HAM internasional terhadap perilaku negara, untuk dibaca oleh semua yang tertarik dengan topik ini.

Dalam karya baru terbaik tentang persepsi terhadap kerja HAM di Kawasan Selatan Dunia, *Taking Root: Human Rights and Public Opinion in the Global South* (Oxford University Press, 2017), James Ron, Shannon Golden, David Crow, dan Archana Pandya menggunakan studi survei baru yang luas untuk menunjukkan bahwa opini publik tentang gerakan dan kebijakan HAM di negara-negara berkembang rupanya sangat positif. Situs web New Tactics in Human Rights (<https://www.newtactics.org/>) menyediakan tinjauan atas berbagai macam taktik yang digunakan oleh gerakan HAM di seluruh dunia serta pembahasan tentang efektivitas taktik-taktik tersebut.

Karya klasik dan tak lekang waktu tentang penyebab represi adalah Steven C. Poe, C. Neal Tate, dan Linda Camp Keith, "Repression of the Human Right to Personal Integrity Revisited: A Global Cross-National Study Covering the Years 1976–1993," *International Studies Quarterly* (1999). Ringkasan yang berguna dan terbaru dari literatur ini dapat ditemukan dalam buku Emilie M. Hafner-Burton, *Making Human Rights a Reality* (Princeton University Press, 2013). Buku Eric D. Weitz, *A Century of Genocide: Utopias of Race and Nation* (Princeton University Press, 2003), menarik perhatian pada pentingnya ideologi dalam menunjang genosida

dan barangkali cocok disandingkan dengan *East West Street* karya Sands yang disebutkan di bagian kedua saran ini.

Memperjuangkan Keberhasilan HAM pada Abad Ke-21

Kekhawatiran akan masa depan HAM juga dialami oleh banyak pakar lain; karya terbaru menyertakan dialog yang penting dan menarik tentang subjek ini. Geoff Dancy dan Christopher Fariss menghadirkan pendekatan baru yang menjanjikan dalam “Rescuing Human Rights Law from International Legalism and its Critics,” *Human Rights Quarterly* 39, no. 1 (2017). *Human Rights Futures*, disunting oleh Stephen Hopgood, Jack Snyder dan Leslie Vinjamuri (Cambridge University Press, 2017), menghimpun sekelompok pakar dari berbagai tradisi teoretis untuk membahas perdebatan empiris dan normatif seputar masa depan HAM. Untuk pandangan yang menggabungkan perspektif dari Kawasan Selatan Dunia, lihat César Rodríguez-Garavito, “The Future of Human Rights: From Gatekeeping to Symbiosis,” *Sur International Journal on Human Rights* 11, no. 20 (2014). Bagi yang ingin memahami aneka ragam pandangan HAM, termasuk banyak suara dari Kawasan Selatan Dunia, ada baiknya membaca artikel dari setiap edisi jurnal *Sur* dan, khususnya, kumpulan wawancara dan artikel di edisi peringatan hari jadi ke-10 jurnal tersebut yang bertajuk “Human Rights in Motion.” Koleksi tersebut dapat ditemukan di situs webConectas dalam Bahasa Inggris, Spanyol, dan Portugis. Versi Inggris tersedia di <http://www.conectas.org/Arquivos/edicao/pdfs/edicao-2015219104510-65051631.pdf>. César Rodríguez-Garavito dan Diana Rodríguez Franco juga memberikan gambaran umum kampanye terkini di Kawasan Selatan Dunia untuk hak ekonomi dan sosial dalam *Radical Deprivation on Trial: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in the Global South*, Comparative Constitutional Law and Policy (Cambridge University Press, 2015).

Terakhir, untuk membaca lebih lanjut tentang visi strategis penggerak masyarakat Saul Alinsky, yang aforismanya tentang perlunya kemarahan, harapan, dan keyakinan bahwa kita dapat membuat perubahan menjadi metafora yang menuntun buku ini, lihat bukunya, *Rules for Radicals: A Practical Primer for Realistic Radicals* (Vintage Books, 1971).***

Indeks

A

- ABRI. *Lihat* Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; dwifungsi. *Lihat* dwifungsi ABRI
- Adelman, Jeremy 327
- Ad Hoc Working Group of Experts on Southern Africa (Kelompok Kerja Ad Hoc Pakar Afrika Selatan) 112
- Afghanistan 148, 198, 234
- African National Congress, ANC (Kongres Nasional Afrika) 111, 247
- Afrika Selatan 12–13, 46–47, 79–80, 87, 111, 112, 116, 117, 135, 136, 164, 232, 237, 243, 245, 246, 247, 248, 276
- Aguayo, Sergio 5, 5–6, 6, 7, 26, 134, 224, 263
- aktivasi batas. *Lihat juga* penggalangan batas
- aktivasi batas (boundary activation). *Lihat* penggalangan batas
- akuntabilitas 20, 47, 84, 190, 214, 215, 215–216, 216, 216–217, 217, 227, 287, 297; negara 48, 139; perusahaan 243–244; pidana individu 49, 138–139, 152, 190; standar yang berubah 159, 173, 174, 178, 179, 180–181, 183–185, 235, 291
- Alberdi, Juan Bautista 273
- Alfaro, Ricardo 68, 95
- Alinsky, Saul 22, 38, 232, 267
- Allende, Salvador 121
- Álvarez, Alejandro 68, 68–69, 69, 95, 274
- American Institute of International Law (Institut Hukum Internasional Amerika) 68, 68–69, 69, 274
- American Law Institute (Institut Hukum Amerika) 277
- Amin, Idi 116, 117
- Amnesty International 56, 152, 181, 184; dan Brasil 176–180; dan hukuman mati 152; dan Konferensi Tahunan wilayah Northeast dan New England 2016 231–232, 242; dan laporan 165, 176; dan Yunani 128
- amparo (hukum) 84, 84–85
- Ansolabehe, Karina 225
- apartheid 11, 32, 44, 44–45, 45, 111, 112, 112–113, 116, 116–117, 117, 135, 245, 247
- API. *Lihat* Aksi Pelajar Indonesia
- Arab Saudi 75, 213
- Arab Spring (Kebangkitan Dunia Arab) 3–4, 4, 5, 10, 26
- Árbenz, Jacobo 107, 108, 108–109, 109, 137
- arena interaksi. *Lihat juga* situs interaksi
- arena publik. *Lihat* ruang publik
- Arenas Catalán, Eduardo 46
- Argentina 66, 67, 105, 108, 122, 126, 131, 138, 165, 191, 205, 215, 228
- Atlantic Charter (Piagam Atlantik) 71
- AURI. *Lihat* Angkatan Udara Republik Indonesia
- Australia 73, 87, 276
- Azerbaijan 212, 240

B

badan konvensi 113, 113–114, 125, 135, 157

bahaya tersembunyi (invisible harms) 160, 160–161, 161, 165, 165–166, 175, 182–183, 184, 222, 234–235, 235, 328

Balaguer, Joaquín 105, 106

Ball, Patrick 171, 181, 183, 235, 260

Bangladesh 115, 116

Ban Ki-moon 7

Baperki. *Lihat* Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)

Bashir, Omar al- 191

Bass, Gary 115, 116

Batista, Fulgencio 106, 117

Baumeister, Roy 167

BBM. *Lihat* bahan bakar minyak (BBM)

Beitz, Charles 16, 301

Belanda 25, 128

Belaunde, Victor Andrés 279

Berdion del Valle, Fernando 257, 271, 277

Bernardino, Minerva 85, 89, 92, 92–93, 95, 278, 327

Bhabha, Jacqueline 260

Bhagavan, Manu 71, 328

bias negatif 167, 167–169, 168, 174

bias pemberitaan 172, 174

bias pengawasan (surveillance bias) 184, 184–185, 235

Bickford, Louis 259

BIG. *Lihat* Badan Informasi Geospasial

BKPRMI. *Lihat* Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)

BKSAUA. *Lihat* Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA)

Blum, Carolyn Patty 259

Bogotazo 96, 96–97, 97

Bolívar, Simón 65, 66, 94

Bolivia 118

Bosnia 161

Botswana 164

boundary activation. *Lihat juga* penggalangan batas

boundary control. *Lihat juga* pengendalian perbatasan

BPS. *Lihat* Badan Pusat Statistik

Brasil 13, 13–14, 14, 43, 51, 89, 91, 92, 95, 120, 137, 202, 206, 281, 291; dan negara adikuasa potensial 237, 247–248; dan pengukuran hak asasi manusia 175–181; dan penyusunan norma dan hukum hak asasi manusia 63, 83, 104–107; favela di 180–181; kekerasan terhadap perempuan di. *Lihat juga* Lutz, Bertha; organisasi hak asasi manusia di 145, 163; otoritarianisme di 121, 131

breakdown of the quotidian. *Lihat juga* ambruknya kehidupan sehari-hari

Brexit 238

Brigif. *Lihat* Brigade Infanteri (Brigif)

Brimob. *Lihat* Brigade Mobil (Brimob)

brokerage. *Lihat juga* koordinasi

Bunche, Ralph 76, 76–77

Bung Karno. *Lihat* Sukarno

Burgers, Jan Herman 64, 274

Burke, Roland 110, 328

Burt, Jo-Marie 280

Burundi 7, 11

Bush, George W. 34, 45, 47, 250; pemerintahan 52, 55, 136, 147, 165, 197, 216, 249, 250

C

Calvo, Carlos 66, 67, 68

Carozza, Paolo 64

Carr Center for Human Rights Policy 22, 288, 297

Carrió, Genaro 121

Carter, Jimmy 31, 32, 34, 123, 130; pemerintahan 32, 123, 131, 285

Cartner, Holly 259

Cassin, René 278
 Castro, Fidel 109, 117, 134
 Cekoslowakia 116
 Center for Economic and Social Rights, CESR (Pusat untuk Hak-hak Ekonomi dan Sosial) 245
 Chang, Peng-chun 83, 95, 278
 Chapultepec. *Lihat* Inter-American Conference on Problems of War and Peace (Konferensi Negara-negara Amerika untuk Masalah checks and balances (pengawasan dan pembagian kekuasaan) 192
 Chehtman, Alejandro 260
 Cheney, Dick 136, 250
 Chenoweth, Erica 196
 Chiang Kai-shek 75
 Chili 49, 104, 106, 107, 117, 129, 134, 202, 205, 206, 278; kontribusi terhadap penyusunan norma dan hukum HAM 63, 68–69, 75, 77, 82–83; otoritarianisme di 121, 122, 131–132, 137, 138, 211
 Chillier, Gaston 259
 CIA 108, 109, 114, 114–115, 115
 civic association. *Lihat* hubungan asosiasional
 Clark, Ann Marie 163, 183, 214, 269, 286
 cleavage. *Lihat* pemilah dan pemilahan
 Clements, Charlie 260
 Coe, Brooke 268, 291
 Cohen, Lizabeth 257
 common law 72, 84
 Corrigan, Patrick 27, 37
 critical juncture 77, 276. *Lihat* persimpangan kritis
 Crow, David 72, 238

D

Daerah Istimewa Yogyakarta. *Lihat juga* Yogyakarta
 Dalmas. *Lihat* Pengendalian Massa

(Dalmas)
 Dancy, Geoffrey 216, 217, 218, 290, 292, 297
 Danrem. *Lihat* Komandan Korem
 data berbasis peristiwa 150, 153, 181
 Davis, Osho 91
 Dejusticia 28, 224
 Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi dan Kewajiban Manusia (American Declaration of the Rights and Duties of Man) 63, 79, 80, 95, 102–104, 103, 104, 118, 124, 210, 237, 251; pengaruh terhadap DUHAM 79–81
 Deklarasi Hak-hak (US Bill of Rights) 62
 Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri dan Bangsa Terjajah (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People) 111
 Deklarasi tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) 210
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) 31, 32, 63, 63–64, 64, 76–83, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 88–92, 89, 91, 92, 94, 95, 102, 105, 105–106, 110, 111, 116, 121, 124, 173, 210, 232, 237, 241, 241–242, 242, 246, 272, 272–273, 276, 278
 dekolonisasi 32, 73, 76, 76–77, 77, 102, 109, 109–111, 110, 111, 282
 demokrasi 47, 63; definisi 199; hak asasi manusia dan 71, 75, 132–134, 136, 177, 211, 222
 ; penjelasan untuk 133
 ; tren dalam 139, 200–201, 212–213, 223
 demokratisasi. *Lihat juga* transisi demokrasi dan Reformasi
 Denmark 103, 128
 desaparecidos. *Lihat* deterens

penghilangan
developmentalisme 205
diskriminasi ras 11, 72, 73, 107, 112, 113, 250
DIY. *Lihat* Daerah Istimewa Yogyakarta
Djajoesman, Noegroho. *Lihat juga* Kapolda Jawa Tengah
DKI Jakarta. *Lihat* Jakarta
Doktrin Betancourt 273
Doktrin Calvo 66, 67, 81
Doktrin Drago 66, 67
Doktrin Tobar 273
Douzinas, Costas 42, 270
DPRD. *Lihat* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Drago, Luis María 66, 67
Dulles, Alan Foster 106, 108
Dulles, John Foster 106, 108
Dumbarton Oaks 72, 73, 73–74, 74, 279
Duvall, Raymond 255

E

Edwards, Scott 260
efek informasi 163, 183
efektivitas aktivisme HAM 6, 12, 13–14, 17, 25, 95, 145–146, 156, 157–158, 194, 196, 199, 210, 211, 216, 220–221, 233–235; bias kognitif dan 166–167; definisi 9; pengukuran 12, 36–38, 145–147, 158–162, 173–175, 179–180, 182–183, 184–185, 291; pesimisme terhadap 3. *Lihat juga* legitimasi hak asasi manusia: dan efektivitas; standar akuntabilitas yang berubah dan 179–180
Einstein, Albert 79
Eisenhower, Dwight D. 106, 108
Ekuador 74, 238, 240
El Salvador 65, 122, 132, 134, 212
endogenous-cleavages thesis. *Lihat* tesis pemilahan endogen
entrepreneur norma (norm

entrepreneurs) 21. *Lihat juga* pendorong perubahan (reformonger)
Etiopia 213
etnifikasi. *Lihat juga* reifikasi
etnis. *Lihat juga* suku
exogenous cleavages thesis. *Lihat* tesis pemilahan eksogen

F

Fariss, Christopher 183, 235, 291, 328, 330
Fawcett, Louise 278
Fazal, Tanisha 194
feminisme 93, 278
Filipina 73, 75, 92, 95, 278
Finnemore, Martha 29
focal point. *Lihat* titik rujukan bersama
Frangulis, Antoine 69, 95
Fraser, Donald 130
Freedom House 201
Friedman, Milton 169
Fujimori, Alberto 216
Fuller, Grayson 257, 271
fundamentalisme pasar 42, 44, 45, 46, 169. *Lihat juga* neoliberalisme
Fung, Archon 260

G

Gaitán, Jorge Eliécer 95
Gambia 11
GAMKI. *Lihat* Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Gandhi, Mahatma 70, 78, 92
Ganeshanathan, V. V. 257
genosida 112, 124, 129, 149, 150, 151, 188, 195, 210, 287, 292
Ghana 111, 201
Giannini, Tyler 260
Gildersleeve, Virginia 86, 86–88, 87, 278
Glendon, Mary Ann 64, 327
globalisasi 27, 204, 250

GMIM. *Lihat* Gereja Masehi Injili di Minahasa
 GMKI. *Lihat* Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
 Goldsmith, Jack 169, 170
 Golkar. *Lihat* Golongan Karya
 GPM. *Lihat* Gereja Protestan Maluku
 Grandin, Greg 64
 Grenada 141
 groupism. *Lihat* grupisme
 Guantánamo 249
 Guatemala 74, 99, 202; akuntabilitas hak asasi manusia di 215; pengukuran hak asasi manusia dan 181–183
 Guevara, Ernesto “Che” 105, 109, 119, 284
 Gus Dur. *Lihat* Abdurrahman Wahid

H

habeas corpus 84
 Haberkorn, Tyrell 257
 Hafner-Burton, Emilie 211, 246
 Haiti 69, 118, 122
 hak atas keadilan 83, 84, 122, 124
 hak-hak perempuan 43, 62, 63, 85, 87, 88, 89, 92
 HAM. *Lihat* hak asasi manusia
 harapan hidup 148, 157, 167, 203
 Harcourt, Bernard 41, 56
 Hari Ketupat. *Lihat juga* Idul Fitri
 Hari Raya. *Lihat* Idul Fitri
 Harvard Human Rights Colloquium 260, 290
 hasil negatif. *Lihat* nirperistiwa (non-event) dan nirinsiden (non-incident)
 hasil positif. *Lihat* peristiwa (event) dan insiden (incident)
 heuristik dan bias 184
 heuristik ketersediaan 166, 167, 174, 184
 Hill, Daniel 157

Hirschman, Albert 16, 20, 21, 22, 36, 56, 57, 133, 168, 169, 170, 171, 223, 227, 228, 255, 256, 266, 267, 271, 280, 285, 290, 299, 300, 327
 HMI. *Lihat* Himpunan Mahasiswa Islam
 Hochstetler, Kathryn 259
 Holocaust 95, 103
 Honça, Derya 257, 294
 Honduras 120, 123, 285
 Hopgood, Stephen 13, 25, 31, 33, 46, 47, 51, 52, 55, 56, 264, 265, 266, 267, 268
 hubungan. *Lihat juga* relasi
 Huhle, Rainer 64
 hukuman mati 5, 14, 56, 147, 152, 153, 183, 220; penghapusan 153–154
 hukum internasional mestizo 90, 93
 Hull, Cordell 72
 Human Rights Data Analysis Group 235
 Human Rights Lab, University of los Andes 28
 Human Rights Watch 3
 Human Security Report Project 194
 Humphrey, John 82
 Hunt, Lynn 291

I

ICMI. *Lihat* Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
 idealisme 22, 23, 39, 41, 46
 ideologi keamanan nasional 128, 252
 IDI. *Lihat* Ikatan Dokter Indonesia
 Ignatieff, Michael 197
 Ikhwanul Muslimin 4, 5
 IKIP. *Lihat* Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)
 IMF 205
 imperialisme 9, 13, 61, 62, 92
 impunitas 20, 190, 191, 214, 215, 217, 226, 252, 254, 280
 Indeks Hak Integritas Tubuh Cingranelli dan Richards (CIRI

- Physical Integrity Rights Index) 175
- Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 203, 295
- India 6, 14, 19, 34, 43, 71, 78, 79, 84, 88, 89, 95, 111, 112, 116, 124, 125, 154, 167, 204, 237, 238, 246, 247, 248
- indiscriminate. *Lihat juga* serangan kategoris dan tidak pandang bulu
- individualisme 42, 43, 83
- Indonesia 7, 56, 110, 158
- industrialisasi substitusi impor (import substitution industrialization, ISI) 205
- Inggris (Britania Raya) 27, 33, 45, 63, 66, 70, 72, 73, 76, 76–77, 77, 84, 103, 114, 128, 138, 164, 169, 236, 250
- institusionalisasi 29, 107, 124, 130
- institusionalisme sejarah 276
- institutionalized riot system. *Lihat juga* sistem kerusakan yang melembaga
- interaksi; antaretnis. *Lihat* interaksi antaretnis; antarwarga. *Lihat* interaksi antarwarga
- ; damai. *Lihat* interaksi damai
- ; Muslim-Kristen. *Lihat* interaksi Muslim-Kristen
- ; Pribumi-Tionghoa. *Lihat* interaksi Pribumi-Tionghoa; sehari-hari. *Lihat* interaksi sehari-hari; situs. *Lihat* situs interaksi; sosial. *Lihat* interaksi sosial
- ; strategis. *Lihat* interaksi strategis
- Inter-American Commission on Human Rights, IACHR (Komisi Negara-negara Amerika untuk Hak Asasi Manusia), 105, 118, 119, 247
- Inter-American Council of Jurists (Dewan Ahli Hukum Negara-negara Amerika) 281
- Inter-American Court of Human Rights (Pengadilan Hak Asasi Manusia Negara-negara Amerika) 100, 104
- Inter-American Juridical Committee (Komite Yuridis Negara-negara Amerika) 104, 272
- internal policing. *Lihat* pemolisian internal
- International Commission against Impunity in Guatemala, CICIG (Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala) 101, 280
- International Criminal Court, ICC (Mahkamah Pidana Internasional), *Lihat juga* Statuta Roma 18, 138, 146, 199, 210
- International Diplomatic Academy (Akademi Diplomatik Internasional) 69
- International Law Institute (Institut Hukum Internasional) 69
- International Monetary Fund, IMF (Dana Moneter Internasional) 205
- International Network for Economic, Social and Cultural Rights, ESCR-Net (Jaringan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) 242
- International Studies Association (Asosiasi Studi Internasional) 8
- intervensi kemanusiaan 116, 117
- intervensi militer 17, 68, 122, 195, 196, 197, 198, 199, 252, 254. *Lihat juga* kudeta
- Irak 8, 45, 47, 55, 75, 148, 187, 188, 196, 197, 198, 218, 219, 234, 249
- Iran 75, 113, 114, 116, 135, 136, 137, 202
- Irlandia 103
- Ismael, Murad 188
- Israel 6, 47, 116
- J**
- Jalan Ahmad Yani. *Lihat juga* Satu Jam di Jalan Ahmad Yani

Jalan Urip Sumohardjo. *Lihat* Jalan Solo
 Jamaika 112, 113, 116, 135
 Jelin, Elizabeth 256
 Jensen, Steven 110, 135
 Jepang 197, 265
 Jerman 8, 69, 86, 197, 208
 Jiménez de Aréchaga, Justino 105, 108, 109, 120, 121, 131, 140, 141
 Jogja. *Lihat* Yogyakarta
 Johnson, Douglas 22, 251
 Johnston, Iain 248

K

Kadin. *Lihat* Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
 Kahneman, Daniel 166
 Kamboja 129, 130, 208
 kamtibmas. *Lihat* Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 Kanada 40, 82, 85
 Kapolda. *Lihat juga* Kepolisian Daerah (Polda)
 Kapolresta. *Lihat juga* Kepolisian Resort Kota (Polresta)
 kaskade, keadilan; norma 139, 216, 286, 291
 kasus; negatif. *Lihat juga* nirperistiwa (non-event) atau nirinsiden (non-incident)
 ; positif. *Lihat juga* peristiwa (event) dan insiden (incident)
 Kaufman, Zachary 260
 keadilan sosial 26, 27, 40, 118, 243
 kebebasan 4, 26, 27, 45, 70, 83, 91, 92, 109, 129, 133, 136, 141, 169, 197, 200, 201, 202, 241
 kebijakan luar negeri AS 33, 34
 Keck, Margaret 161, 214, 219
 kedaulatan 32, 34, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 81, 109, 129, 195
 kejahatan kemanusiaan 99, 100
 kejahatan perang 99, 161, 195, 199

kejahatan terorganisir 6
 kekerasan; antarkelompok. *Lihat* kekerasan komunal; antarsuku. *Lihat* kekerasan antarsuku; anti-Tionghoa. *Lihat* kekerasan anti-Tionghoa
 ; bilateral. *Lihat juga* bentrokan
 ; etnis. *Lihat* kekerasan etnis
 ; kolektif. *Lihat* kekerasan kolektif; komunal. *Lihat* kekerasan komunal
 ; Muslim-Kristen. *Lihat* kekerasan Muslim-Kristen
 kekerasan anti-Tionghoa. *Lihat juga* kekerasan terhadap Tionghoa
 kekerasan kolektif; konsentrasi ruang. *Lihat* konsentrasi geografis
 kekerasan polisi 180
 kekerasan sepihak 151, 154
 kekerasan terhadap perempuan, *Lihat juga* pemerkosaan 61, 163, 164, 166, 183, 203
 kekerasan terhadap Tionghoa. *Lihat juga* kekerasan anti-Tionghoa
 Kekristenan 91
 kelaparan 27, 37, 38, 119, 154, 155, 156
 Kelly, Erin 64
 Kelly, Patrick William 64
 Kemenkokesra. *Lihat* Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
 kemiskinan 27, 37, 108, 122, 177, 203, 204, 206, 207, 215, 226, 244, 245, 248
 Kennedy, David 22, 26, 27, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 55, 119, 187, 189
 Kennedy, John F. 22, 26, 27, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 55, 119, 187, 189
 Kenya 158
 Keohane, Robert 256, 266, 298
 Kepulauan Virgin Inggris 244
 kerusuhan; anti-Tionghoa. *Lihat* kerusuhan anti-Tionghoa; Cina. *Lihat* kerusuhan anti-Tionghoa
 kesadaran hukum kreol 90, 93
 kesejahteraan 42, 43, 103, 105, 122, 131, 168, 169, 202, 203, 252, 253

- kesempatan yang terbuang (missed opportunities). *Lihat juga* nirperistiwa (non-event)
- kesetaraan 10, 12, 14, 26, 67, 77, 85, 87, 89, 147, 205, 206, 207, 226, 241, 242, 243, 245
- kesetaraan ekonomi 14, 241, 242, 243, 245
- kesetaraan gender 12, 147. *Lihat juga* hak-hak perempuan
- kesetaraan pernikahan 10. *Lihat juga* hak komunitas LGBT
- ketimpangan ekonomi 147, 177, 203, 204, 226, 242, 244, 245
- Khmer Merah 129, 208
- Kim, Hun Joon 48, 215, 270
- King, Martin Luther, Jr., 101
- Kissinger, Henry 130
- KK. *Lihat* Kartu Keluarga
- KKN. *Lihat juga* kolusi, korupsi, dan nepotisme
- Knaus, Gerald 240
- KNPI. *Lihat* Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
- Kodam. *Lihat juga* Komando Daerah Militer (Kodam)
- kodifikasi 72
- Kodim. *Lihat juga* Komando Distrik Militer (Kodim)
- Koh, Harold 244, 249
- Kolombia 28, 63, 79, 95, 96, 125, 224, 238, 247, 260, 272, 273, 278, 302
- kolonialisme 11, 70, 76, 110
- Komisi HAM Eropa (European Commission of Human Rights) 128, 129, 136
- Komisi HAM PBB (UN Commission on Human Rights) 82, 84, 89, 105, 112, 127, 239
- komisi kebenaran 100, 181, 217, 218, 254
- Komnas HAM. *Lihat juga* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- komunisme 106, 107, 108, 114, 115, 119, 130
- komunitarianisme 237
- Konferensi Bandung 110
- Konferensi Internasional Negara-negara Amerika Ke-9 (Ninth International Conference of American States). *Lihat* Konferensi Bogotá 96, 97
- Konferensi San Francisco 62, 70, 73, 75, 77, 79, 85, 86, 88, 90
- Konferensi Seluruh Rakyat Afrika (All-African Peoples' Conference) 111, 112
- Konferensi Teheran 116
- Kongo, Republik Demokratik (RDK) 50, 114, 115, 136, 137, 202
- Kongres Panama 66
- konsentrasi geografis. *Lihat* konsentrasi ruang/spasial
- konteks interaksi. *Lihat juga* arena interaksi
- kontingensi 104
- kontinum kepatuhan 36
- Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights) 210
- Konvensi Genosida 112, 124, 129, 195, 210
- Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 210, 212, 215
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT) 210
- Konvensi Pengungsi (Refugee Convention) 54, 210
- Konvensi Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Convention for the Protection of All Persons from

- Enforced Disappearance) 210
- Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 174, 210
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD) 112, 210, 212, 243
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) 210, 269
- Kopassus. *Lihat* Komando Pasukan Khusus
- Korea Selatan 212
- Korea Utara 231
- Korem. *Lihat juga* Komando Resor Militer (Korem)
- korupsi 99, 116, 138, 165, 231, 245
- Kosta Rika 106, 107, 123, 125, 247
- Kostrad. *Lihat* Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad)
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) 124, 210, 212
- Krasner, Stephen 169, 170
- Kraton. *Lihat* Keraton Yogyakarta
- Kraton Alit. *Lihat* Surakarta
- Krimea 198
- krisis pangan. *Lihat juga* kelaparan (hunger)
- krisis pangan (famine) 153, 154
- krisis pengungsi 7, 147
- KTP. *Lihat* Kartu Tanda Penduduk
- Kuba, *Lihat juga* Revolusi Kuba
Revolusi Kuba, 74, 82, 83, 105, 106, 117, 118, 119, 120, 134
- kudeta, di Argentina; di Brasil; di Chili; di Guatemala; di Iran; di Kongo; di Kuba; di Mesir; di Uganda; di Uruguay; di Venezuela; di Yunani 5, 19, 32, 66, 74, 103, 106, 109, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 126, 128, 129, 131, 137, 192, 202, 227
- Kurva Belajar Diktator (Dictator's Learning Curve) 239
- L
- Lake, Milli 50, 51, 260, 271
- Lauterpacht, Hersch 70, 95, 274
- layanan kesehatan 40, 43, 82, 156, 241
- League of Nations (Liga Bangsa-Bangsa) 274
- legitimasi hak asasi manusia, dan asal-usul hak asasi manusia; dan efektivitas; dan perbandingan dengan yang ideal; definisi; kritik terhadap; 13, 18
- Lemkin, Raphael 70, 95, 274
- Lessa, Francesca 297
- Lettinga, Doutje 25, 26, 27, 28, 39, 40, 259, 265, 267, 269, 270, 326
- Levitsky, Steven 201, 295, 297, 301
- liberalisme, Amerika Latin; tertanam 32, 44, 237
- Liberia 75
- Liechtenstein 247
- Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) 63, 69, 73
- Linde, Robyn 287, 328
- lingkungan 27, 149, 181, 238, 243
- Linz, Juan 29, 30, 268, 300
- longue durée (jangka panjang) 140
- Lorca, Arnulf Becker 90, 279, 327
- Lumumba, Patrice 114, 115, 137, 283
- Luna, Sean 264, 265, 268, 270, 301, 326
- Lupu, Yonatan 157, 288, 297, 298
- Lutz, Bertha 43, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 278, 279, 286, 292, 327
- lynching. *Lihat juga* pembunuhan beramai-ramai

M

Maduro, Nicolás 9

Mahkamah Pidana Internasional
(International Criminal Court,
ICC) 18, 46, 146, 199, 210, 218, 247,
286

Majelis Eropa (Council of Europe) 127,
128, 129, 240, 281

Malik, Charles 91, 92, 95, 278

Mandela, Nelson 112, 247

Mandelstam, André 64, 69, 95, 274

Mander, Harsh 259, 264

Marchesi, Bridget 260, 297

Maria da Penha (hukum) 163

Marino, Katherine 260, 276, 277, 278,
279, 327

Maroko 158, 238

Marxisme 205, 246

master cleavage. *Lihat* pemilahan
utama

masyarakat sipil 6, 70, 75, 77, 120, 125,
135, 136, 211, 213, 220, 223, 224, 237

Matakin. *Lihat* Majelis Tinggi Agama
Konghucu Indonesia (Matakin)

Mawarire, Evan 231, 232, 300

Mazzini, Giuseppe 64

McCarthyisme 106

MDG 155

MDI. *Lihat* Majelis Dakwah Indonesia
(MDI)

medan interaksi. *Lihat* arena interaksi

Mehta, Hansa 43, 71, 84, 88, 89, 95, 278,
283

mekanisme; aktivasi batas (boundary
activation). *Lihat juga* boundary
activation

; relasional. *Lihat* mekanisme relasional

Meksiko 5, 6, 12, 51, 61, 62, 63, 65, 67, 71,
75, 81, 83, 108, 118, 224, 225, 238, 247

Melander, Erik 151, 193, 293, 294

Menhankam/Pangab. *Lihat
juga* Wiranto

Mesir 3, 4, 5, 6, 10, 12, 52, 75, 202, 223,
227, 234, 264

migrasi, *Lihat* krisis pengungsi 54

Milgram, Stanley 209, 297

Millennium Development Goal, MDG
(Tujuan Pembangunan Milenium)
155

minimalisme 253

Modi, Narendra 248

molotov. *Lihat juga* bom molotov

Moore, Will 235, 260, 289, 298, 301

Mora, Alberto 251, 273, 303

Morayef, Heba 3, 4, 5, 7, 13, 19, 26, 34,
259, 263, 264

Morsi, Mohammed 4, 5, 227

Morsink, Johannes 64, 82, 272, 273, 275,
276, 277, 278, 327

Mosaddeq, Mohammad 113, 114, 137

Moyn, Samuel 26, 29, 31, 32, 33, 39, 40,
42, 44, 45, 102, 169, 241, 242, 260, 267,
268, 269, 270, 275, 280, 281, 282, 285,
290, 301, 302

MPR. *Lihat* Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)

Mubarak, Hosni 4

Mugabe, Robert 232

MUI. *Lihat* Majelis Ulama Indonesia
(MUI)

Mujica, José 206

Murad Basee Taha, Nadia 292

Murdie, Amanda 160, 220, 259, 297, 299,
300

Muspida. *Lihat* Musyawarah Pimpinan
Daerah (Muspida)

Muspika. *Lihat* Musyawarah Pimpinan
Kecamatan (Muspika)

Mwananyanda, Muleya 232

Myanmar 34

N

Nader, Lucia 26, 145, 225, 259, 286, 300

naker. *Lihat* tenaga kerja

naming and shaming (tunjuk hidung
dan mempermalukan), *Lihat juga*
politik informasi 185, 219, 220, 221

nasionalisme 115
 National Science Foundation, NSF
 (Yayasan Sains Nasional) 215, 271, 298
 National Violence Monitoring System.
Lihat Sistem Nasional Pemantauan
 Kekerasan (SNPK)
 NATO 130
 near-miss. *Lihat* kasus hampir
 (near-miss)
 negara kebangsaan (nation-state) 70
 Nehru, Jawaharlal 70, 71, 79, 84
 Neier, Aryeh 268
 neighborhood. *Lihat* permukiman
 neoliberalisme, *Lihat* juga fundamen-
 talisme pasar 26, 42, 43, 44, 45, 101,
 131, 132, 133, 134, 285
 Neuman, Gerald 260
 Ngarso Dalem. *Lihat* Sri Sultan
 Hamengkubuwono X
 NGO, dana asing; dari Kawasan Utara
 Dunia (Global North); NGO
 internasional (INGO); “pelagak”;
 terprofesionalisasi 62, 73, 75, 76,
 77, 82, 87, 94, 121, 125, 135, 160, 161,
 163, 164, 178, 180, 188, 214, 219, 220,
 221, 222, 224, 225, 226, 237, 239, 243,
 259, 291, 299
 Nigeria 212, 238
 NIIS (ISIL atau ISIS) 187, 188, 196, 197,
 198, 208, 209, 220
 Nikaragua 106, 118
 Nixon, Richard 130, 283
 Nkrumah, Kwame 111
 Nolan, Mary 42, 270, 298
 nonintervensi 66, 67, 68, 71, 77, 81, 82
 norma, akuntabilitas; demokrasi; hak
 asasi manusia; kedaulatan 8, 11,
 16, 17, 20, 21, 34, 44, 48, 71, 73, 77, 94,
 95, 97, 98, 104, 134, 139, 146, 173, 190,
 237, 250, 253, 286
 Northfield, Stephen 172, 173, 260, 291
 Norwegia 128
 Nussbaum, Martha 16, 266
 Nye, Joseph 260, 266, 303

Nyerere, Julius 111, 116, 117

O

Obregón, Liliana 64, 90, 258, 272, 278
 Ocampo, Luis Moreno 259
 O'Donnell, Guillermo 132, 133, 285
 Offenheiser, Raymond 260, 302
 Oliver, John 112, 244, 289, 302
 Olsen, Tricia 297
 Omoniyi, Bandele 91
 Open Society Foundations (Yayasan
 Masyarakat Terbuka) 259, 263
 ORBA. *Lihat* Orde Baru
 Organisasi Perburuhan Internasional
 (International Labor Organization,
 ILO) 63
 Organization of African Unity, OAU
 (Organisasi Kesatuan Afrika) 116
 Organization of American States,
 OAS (Organisasi Negara-negara
 Amerika) 80, 272, 273, 281, 284, 285
 Osiel, Mark 48, 49, 50, 51, 265, 271
 otentisitas 33, 90–94, 264, 265. *Lihat*
 juga legitimasi
 otoritarianisme 95, 104, 118, 128, 132,
 133, 141, 151, 200, 201, 209, 223, 226,
 252, 253, 293
 outmigration. *Lihat* migrasi keluar
 Oxfam 243, 245

P

PAD. *Lihat* Pendapatan Asli Daerah
 paired comparison. *Lihat* perbandin-
 gan berpasangan
 Pak Harto. *Lihat* Suharto
 Pakistan 115, 116
 Pamitra. *Lihat* Paguyuban Mitra
 Masyarakat
 Panama 66, 68, 75, 82, 95
 Pan-American Union (Perserikatan
 Pan-Amerika) 82
 Pandit, Madame Vijaya Lakshmi 71, 78,

- 79, 95
- Pangdam. *Lihat juga* Panglima Kodam
- paradoks informasi 159, 161, 163, 171, 174, 180, 184, 235
- Paraguay 66, 118
- Pavlov, Alexei 278
- Payne, Leigh 297
- PDI-P. *Lihat* Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
- pembangunan, berbasis-hak; manusia 21, 90, 116, 118, 132, 170, 203, 204, 206, 222, 227, 228, 243, 245, 247, 248
- pembersihan etnis 191, 248. *Lihat juga* genosida
- pemeriksaan 15, 50, 51, 160, 162, 164, 183, 228
- pemilu. *Lihat* pemilihan umum
- pemodelan variabel laten (latent variable modeling) 183
- pemungutan suara 173
- penahanan ilegal 136, 147, 248, 249, 250, 251
- penahanan politik 121, 177, 178, 179, 190
- Pencerahan 11, 65, 90
- pendidikan 10, 25, 43, 66, 80, 82, 91, 105, 121, 157, 158, 159, 173, 183, 205, 206, 221, 238, 241, 243, 245
- pengadilan ad hoc 138, 152, 161
- pengalihan bingkai. *Lihat juga* alih bingkai
- pengasingan 95, 191
- penggalangan batas. *Lihat juga* boundary activation
- penghilangan 44, 122, 123, 127, 133, 160, 175, 177, 178, 179, 181, 190, 215
- penguatan demokrasi 66, 169, 199
- pengukuran berbasis standar 182, 183
- penyiksaan 4, 6, 15, 34, 43, 52, 55, 120, 121, 122, 128, 129, 130, 136, 146, 147, 159, 160, 165, 166, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 190, 208, 211, 216, 220, 234, 248, 249, 250, 251
- perbandingan 9, 12, 18, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 147, 155, 158, 159, 170, 181, 184, 189, 233, 234, 235, 253
- perbudakan 25, 63, 70, 242
- perdagangan bebas 27, 204, 244
- Pereira, Gabriel 297
- Pérez Cisneros, Guy 83
- Pérez Jiménez, Marcos 106
- Perjanjian Helsinki 129, 130
- pernyataan kausal tersembunyi 41, 42
- Peru 201, 216
- Peruzzotti, Enrique 259
- perwalian 76, 77
- Pham, Phuong 260, 292
- PHBI. *Lihat* Panitia Hari Besar Islam
- Phillip Morris 243, 244
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk (African Charter on Human and Peoples' Rights) 210
- Piagam PBB (UN Charter) 11, 17, 62, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 112, 195, 198, 246
- Pillay, Navi 12, 13, 26, 46, 47
- Pinheiro, Paulo Sérgio 13, 31
- Pinker, Steven 165, 166
- Pinochet, Augusto 122, 138, 211
- PKI. *Lihat* Partai Komunis Indonesia
- PKK. *Lihat* Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
- PM. *Lihat* Polisi Militer
- PMII. *Lihat* Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- PMKRI. *Lihat* Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
- Pola Filipina 92
- Polandia 70, 212
- political entrepreneurs. *Lihat juga* wirausahawan politik
- politik informasi, definisi 161, 163, 182, 184, 185, 219, 220, 222
- Pol Pot 208
- Polres. *Lihat* Kepolisian Resort Kota (Polresta)
- Polri. *Lihat* Kepolisian Republik

Indonesia (Polri)
 Polwil. *Lihat* Kepolisian Wilayah (Polwil)
 populisme 254
 Poros Peking. *Lihat juga* Sukarno
 Portugal 127
 posibilisme 20, 21, 36, 227.
 Lihat Hirschman, Albert
 Posner, Eric 8, 12, 36, 148, 159, 169, 180
 Power, Samantha 218
 Prague Spring (Musim Semi Praha) 116
 Prancis 62, 65, 72, 76, 84, 103, 164, 218
 Prebisch, Raúl 205
 process-tracing. *Lihat* penelusuran proses
 proses hukum yang adil 43, 50
 Pulido, Miguel 259
 Putnam, Robert 260

Q

Quinteros, Elena 126, 127
 quotidian. *Lihat* hubungan sehari-hari

R

Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University 256
 Raman, Sushma 260, 265
 ratifikasi konvensi 213, 216
 Reagan, Ronald 32, 181
 realis 8, 9, 73
 reformasi agraria 108
 reformasi pertanahan 170
 reformonger (pendorong perubahan)
 Lihat juga entrepreneur norma (norm entrepreneurs); Hirschman, Albert 21, 170
 Regules, Dardo 81, 95, 97, 98
 reifikasi. *Lihat juga* etnifikasi
 relasi. *Lihat juga* hubungan relasional; mekanisme. *Lihat* mekanisme relasional
 Rendler, Jack 231, 232

repertoar pertikaian. *Lihat juga* repertoire of contention
 repertoire of contention. *Lihat* repertoar pertikaian
 represi negara 176, 197, 252
 republikanisme kewargaan 237
 Republik Dominika 85, 89, 95, 105, 117, 118, 120
 revolusi 6, 46, 65, 75, 109, 118, 119, 133, 134, 192, 252
 Rhodesia Selatan 112
 Richardson, Egerton 135
 Rieter, Andrew 297
 Ríos Montt, Efraín 99, 100, 101, 124, 137, 138, 181
 Risse, Mathias 16, 35, 158, 246
 Risse, Thomas 16, 35, 158, 246
 RMS. *Lihat* Republik Maluku Selatan
 Roa García, Raúl 117
 Robinson, Mary 56
 Robledo, Giovanna 257
 Rodríguez-Garavito, César 26, 28, 224, 225, 243, 246
 Rolnik, Raquel 13
 Romulo, Carlos 92, 95
 Ron, James 211, 238
 Roosevelt, Eleanor 70, 71, 75, 89, 93
 Roosevelt, Franklin Delano 70, 71, 75, 89, 93
 Ropp, Stephen 158
 Roser, Max 150, 204
 Rothenberg, Daniel 260
 RRI. *Lihat juga* Radio Republik Indonesia
 Ruggie, John 44
 Rumsfeld, Donald 250
 Rusia 6, 46, 47, 69, 87, 95, 198, 212, 213, 218, 237, 246, 248. *Lihat juga* Uni Soviet (USSR)
 Rwanda 115, 138, 152, 191, 197, 198, 208, 227

S

- sanksi 108, 112, 135, 215, 221
 Santa Cruz, Hernán 278
 SARA. *Lihat* suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
 SBKRI. *Lihat* Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
 Schmidt, Averell 251
 segregasi 72, 250
 Selandia Baru 73, 164
 self-determination (hak menentukan nasib sendiri), *Lihat* juga kedaulatan 282
 Sen, Amartya 16, 35, 153, 154, 167, 203, 242, 246
 Senegal 201
 Serbia 161, 185, 201
 Sikkink, Arlene 10
 Simmons, Beth 36, 157, 159, 211, 214, 221
 Siprus 128
 Smith, Jackie 160
 SMPR. *Lihat* Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat
 SMPTA. *Lihat* Solidaritas Mahasiswa Pencinta Tanah Air
 SMU. *Lihat* Sekolah Menengah Umum
 Smulovitz, Catalina 216, 228
 Smuts, Field Marshal Jan 87
 Snyder, Jack 169
 Solo. *Lihat* Surakarta
 Somoza, Anastasio 106
 sosialisme 64, 82, 237
 Spanyol 26, 65, 66, 127, 138
 Sparrow, Malcolm 160, 182, 235
 Sri Lanka 239
 Sri Sultan. *Lihat* Sri Sultan Hamengkubuwono X
 Sri Sultan HB X. *Lihat* Sri Sultan Hamengkubuwono X
 STAIN. *Lihat* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
 Stalin, Joseph 208
 Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court), *Lihat* juga International Criminal Court, ICC (Mahkamah Pidana Internasional) 146, 210
 Stephan, Maria 196
 Straus, Scott 227
subaltern 92
 Sudan 7, 55, 56, 191, 208, 212
 Sudan Selatan 7
 Suharto. *Lihat* juga Orde Baru
 Sultan Yogyakarta. *Lihat* Sri Sultan Hamengkubuwono X
 Sulut. *Lihat* Sulawesi Utara
 sunat perempuan (female genital cutting) 221
 supremasi hukum 98, 101, 128, 216, 227, 228, 252
 surga pajak (tax havens) 244, 245
 Suriah 7, 8, 11, 12, 75, 148, 193, 197, 198, 199, 212, 218, 234
 Swedia 128, 164
 Swiss 86, 244
 Syria Tracker 222
- T
- Tambo, Oliver 112
 Tanggung Jawab untuk Melindungi (Responsibility to Protect, R2P) 68
 Tanzania 111, 116, 117
 Tasioulas, John 16
 Tatanan Ekonomi Internasional Baru (New International Economic Order, NIEO) 205
 Teluk Babi 118, 119
 teori dependensi 205
 teori ideal 35, 39
 teori kritis 9, 41, 56, 61, 73, 90, 101
 teori non-ideal 35
 terorisme 136, 137, 166, 192, 196
 TGPF. *Lihat* Tim Gabungan Pencari

Fakta
 Thailand 34, 52, 201
 Tiongkok 6, 38, 46, 47, 73, 75, 83, 85, 89, 95, 106, 110, 111, 153, 158, 204, 212, 218, 237, 246, 248
 TNI. *Lihat* Tentara Nasional Indonesia
 TPF. *Lihat* Tim Pencari Fakta
 transisi demokrasi. *Lihat juga* Reformasi
 Transitional Justice Research Collaborative (Kolaborasi Riset Keadilan Transisi) 217, 218
 trauma 171, 172
 Trisakti. *Lihat* Universitas Trisakti
 Trujillo, Rafael 92, 105, 106, 117
 Truman, Harry S. 89
 Trump, Donald 6, 7, 34, 41, 136, 146, 147, 208, 231, 238, 248, 249, 251, 254
 Tunisia 5, 11, 158
 Turki 70, 75, 201, 225
 Tversky, Amos 166

U

Uganda 116, 117, 224
 UGM. *Lihat* Universitas Gadjah Mada
 UKIM. *Lihat* Universitas Kristen Indonesia Maluku
 UMS. *Lihat* Universitas Muhammadiyah Surakarta
 UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC (Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia) 205
 UN Food and Agriculture Organization, FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) 37
 UN High Commissioner for Refugees, UNHCR (Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi) 149
 UNIBA. *Lihat* Universitas Islam Batik
 Uni Eropa 192, 225
 Uni Soviet (USSR) 44, 45, 72, 73, 102, 108, 114, 124, 129, 130, 135, 136, 138, 208, 213, 246
 Unisri. *Lihat* Universitas Slamet Riyadi
 United Fruit Company 108
 United Nations Children's Fund, UNICEF (Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa) 156
 universalisme 62, 110
 Universal Periodic Review (Tinjauan Periodik Universal) 239
 UN Office on Drugs and Crime (Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan) 164
 Unpatti. *Lihat* Universitas Pattimura
 UNS. *Lihat* Universitas Negeri Sebelas Maret
 UN Security Council (Dewan Keamanan PBB) 17
 Uruguay 10, 49, 63, 71, 74, 75, 77, 81, 82, 85, 95, 97, 98, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 134, 140, 141, 206, 207, 243, 244
 utopianisme 208
 UTP. *Lihat* Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta

V

van Troost, Lars 25, 26, 27, 28, 40
 variasi; ruang/spasial. *Lihat* variasi ruang/spasial
 ; waktu/temporal. *Lihat* variasi waktu/temporal
 Venezuela 9, 10, 106, 126, 127, 131, 201, 212
 vigilantisme. *Lihat* main hakim sendiri
 Vinjamuri, Leslie 169

W

Waal, Alex de 54, 55, 56
 Walikota; Ambon. *Lihat juga* Tanasale, Chris; Manado. *Lihat juga* Korah,

- Lucky Harry; Surakarta. *Lihat juga* Soetopo, Imam
 Waltz, Susan 64
 water cannon. *Lihat* meriam air
 Weitz, Eric 69, 208
 Welles, Sumner 72
 Wells, H. G. 70
 World Food Summit (KTT Pangan Dunia) 155
 World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia) 156
 World Peace Foundation (Yayasan Perdamaian Dunia) 154

Y

- Yazidi 8, 187, 188, 196, 197, 198, 207, 208, 209, 218, 220
 Yogya. *Lihat* Yogyakarta
 Yogyakarta; Jalan Urip Sumohardjo. *Lihat* Jalan Solo
 Yordania 247
 Yugoslavia 84, 138, 152, 161, 164, 191, 199, 208
 Yunani 26, 65, 69, 95, 127, 128, 129, 130, 138, 140

Z

- zero-sum. *Lihat* menang-kalah
 Zimbabwe 148, 231, 232
 Zucman, Gabriel 244

Banyak kritikus menyatakan bahwa perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia (HAM) seperti “berjalan di tempat”, bahkan mundur: “Arab Spring” diberangus, perang masih terus terjadi, dan mutu demokrasi merosot termasuk di AS dan Eropa. Beberapa pegiat HAM sendiri bahkan terlihat putus asa dan mulai memandang bahwa perjuangan HAM akan ditakdirkan sia-sia.

Dalam buku ini, Kathryn Sikkink membantah klaim-klaim pesimistik di atas. Berbasis dua dekade lebih risetnya, Gurubesar Kebijakan HAM pada Harvard Kennedy School itu memperlihatkan kuatnya legitimasi dan efektivitas perjuangan HAM dulu, sekarang, dan di masa depan. Menurutnya, sementara bias kognitif dan kebiasaan media massa melaporkan hal-hal buruk memang meningkatkan sinisme mengenai masa depan HAM, riset ilmu-ilmu sosial yang lebih solid menunjukkan sebaliknya.

Buku ini penting dibaca dan didiskusikan. Agar kita memiliki landasan lebih kokoh dalam menilai bagaimana seharusnya perjuangan menegakkan HAM dilakukan – dan agar gerakan HAM selalu punya nafas dan energi baru dan terus berkelanjutan.

Foto sampul: Ruth Hartnup, *Resilience and Determination* (Alcatraz, 2014). Desain sampul terinspirasi puisi Wiji Thukul, “Bunga dan Tembok,” menggambarkan bahwa harapan dapat tumbuh dalam keadaan yang sulit sekalipun.